



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAAHRAGA &
PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	65
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	66

BAB. IV. PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai jenis kegiatan.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 masih terdapat kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan pada tahun 2025 agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan

Mempawah, Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah

EL ZURATNAM, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198703 1 001



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah tahun 2025 terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah.

Selain itu, pembuatan RENJA Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Proses Penyusunan dokumen rencana kerja perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah dalam hal ini adalah Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

Dokumen RENJA Perubahan secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:



1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas berupa program dan kegiatan SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini, Sejumlah Peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah 2025 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah. Sebagai sebuah dokumen perencanaan Renja SKPD akan digunakan oleh Dinas sebagai acuan atau dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2025 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2025 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah:

1. Menyelaraskan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2025.
2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran Dinas sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
3. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



Kabupaten Mempawah Tahun 2025 untuk diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Mempawah.

4. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran perubahan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB. IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. RENJA Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah tahun 2024. Anggaran induk yang di alokasikan sebesar Rp.337.594.790.686,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.306.308.986.387,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.17.763.232.031,00. Realisasi 2024 sebesar 98.36% atau Rp.332.088.508.423,39 yang terdiri dari 11 (sebelas) Program, 25 (dua puluh lima) Kegiatan dan 144 (seratus empat puluh empat) Sub Kegiatan.



Tabel 2.1

ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian/Program	Anggaran (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.145.000.568,00	217.899.472.061,00	98,53
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.961.960,00	99,24
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.261.950,00	5.259.550,00	99,95
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.073.550,00	4.073.500,00	100
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.337.800,00	2.337.750,00	100
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.032.550,00	1.032.250,00	99,97
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.071.000,00	93,81
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.643.000,00	45.263.890,00	99,17
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	219.981.558.572,00	216.847.638.504,00	98,58
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	170.984.600,00	170.462.470,00	99,69
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.500.000,00	27.131.720,00	98,66



	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	7.456.940,00	99,43
	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
	a Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	52.200.000,00	47.665.600,00	91,31
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	33.000.000,00	19.414.475,00	58,83
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.600,00	9.943.700,00	99,44
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.316.400,00	42.065.500,00	99,41
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.320.000,00	33.318.000,00	99,99
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.999.770,00	100
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.000.000,00	72.285.428,00	99,02
	f. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	10.000.000,00	9.853.200,00	98,53
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	a. Pengadaan Mebel	10.286.000,00	10.274.000,00	99,88
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.580.000,00	18.580.000,00	100
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.806.000,00	18.700.000,00	99,44
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			



	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.350.100,00	240.415.209,00	76,97
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.295.596,00	128.264.245,00	89,51
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,854,850.00	22.410.800,00	98,06
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	23.015.100,00	92,06
	c. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	10.000.000,00	9.988.000,00	99,88
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	6.900.000,00	6.900.000,00	100
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	12.00.000,00	11.689.500,00	95,82
2	Program Pengelolaan Pendidikan	110.810.561.730,00	108.605.756.131,39	98,01
	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	69.063.560.530,00	68.064.509.381,53	98,55
	a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.236.705.150,00	1.205.704.850,00	97,49
	b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.675.115.350,00	2.657.375.050,00	99,34
	c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	276.878.200,00	275.177.000,00	99,39
	d. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.436.316.400,00	5.359.209.200,00	98,58
	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	756.907.600,00	755.458.600,00	99,81
	f. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	717.103.300,00	716.223.600,00	99,88
	g. Pengadaan Mebel Sekolah	2.220.670.300,00	2.174.351.000,00	97,91



	h. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.401.004.550,00	4.320.124.550,00	98,16
	i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	600.000.000,00	599.999.740,00	100
	j. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	175.000.000,00	173.816.274,00	99,32
	k. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	37.728.100,00	36.433.345,00	96,57
	l. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	433.418.000,00	424.217.903,00	97,88
	m. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00	139.512.600,00	93,01
	n. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	26.947.000.000,00	26.874.462.286,53	99,73
	o. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.999.480,00	148.712.960,00	99,14
	p. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4.091.281.250,00	4.050.874.292,00	99,01
	q. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	165.471.100,00	156.436.900,00	94,54
	r. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	115.924.350,00	86.050.840,00	74,23
	s. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	452.222.100,00	360.016.956,00	79,61
	t. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	260.000.000,00	155.576.575,00	59,84
	u. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	57.600.000,00	20.305.900,00	35,25
	v. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000,00	20.955.525,00	69,85
	w. Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	20.000.000,00	15.397.305,00	76,99
	x. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	25.000.000,00	24.984.000,00	99,94



	y. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	481.650.000,00	470.280.000,00	97,64
	z. Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.536.034.450,00	3.481.126.630,00	98,45
	aa. Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.624.446.700,00	2.552.209.800,00	97,25
	bb. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	250.000.000,00	243.002.350,00	97,20
	cc. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	434.889.700,00	408.589.530,00	93,95
	dd. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.305.194.550,00	10.135.423.820,00	98,35
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.105.284.750,00	1.085.428.200,00	98,20
	b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.098.790.950,00	1.079.091.000,00	98,21
	c. Pembangunan Laboratorium	2.469.349.275,00	2.415.313.650,00	97,81
	d. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.598.265.000,00	2.583.115.285,00	99,42
	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	330.691.175,00	329.928.700,00	99,77
	f. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	134.133.350,00	132.945.900,00	99,11
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	200.000.000,00	199.606.000,00	99,80
	h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.876.132.950,00	1.803.504.200,00	96,13
	i. Pengadaan Mebel Sekolah	798.319.700,00	783.611.000,00	98,16
	j. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	227.700.000,00	227.400.000,00	99,87
	k. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	766.080.000,00	763.986.500,00	99,73



	I. Perlengkapan Belajar Peserta Didik	184.353.000,00	180.516.000,00	97,92
	m. Pembinaan Minat Bakat, dan Kreativitas Siswa	194.235.100,00	188.092.633,00	96,84
	n. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.072.050,00	14.044.630,00	99,81
	o. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	202.236.225,00	170.346.535,00	84,23
	p. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	148.556.000,00	146.858.402,00	98,86
	q. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.977.100.000,00	10.972.055.802,86	99,95
	r. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.000.000,00	23.896.140,00	95,58
	s. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	135.781.300,00	134.630.450,00	99,15
	t. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	100.280.800,00	45.630.550,00	45,50
	u. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	187.932.600,00	168.853.295,00	89,85
	v. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	571.000.000,00	517.960.265,00	90,71
	w. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	191.016.911,00	132.037.355,00	69,12
	x. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	72.991.200,00	46.799.120,00	64,12
	y. Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungna, Kekerasan dan Intoleransi	50.000.000,00	20.840.460,00	41,68
	z. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	490.060.775,00	438.337.349,00	89,45
	aa. Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.236.886.750,00	1.204.657.650,00	97,39
	bb. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	282.500.000,00	274.089.700,00	97,02



	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
	cc. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	25.000.000,00	24.999.300,00	100
	dd. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	252.978.000,00	250.680.000,00	99,09
	ee. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	133.925.000,00	133.348.000,00	99,57
	3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.236.449.803,00	1.228.754.000,00	99,38
	b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	511.777.755,00	508.679.400,00	99,39
	c. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	353.865.918,00	352.475.890,00	99,61
	d. Pengadaan Mebel PAUD	135.573.200,00	134.159.000,00	98,96
	e. Pengadaan Perlengkapan PAUD	64.748.000,00	64.015.000,00	98,87
	f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	175.000.000,00	169.000.000,00	96,57
	g. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	614.000.000,00	596.124.300,00	97,09
	h. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.193.758.225,00	938.450.050,00	78,61
	i. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	39.000.000,00	38.465.510,00	98,63
	j. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	240.461.000,00	191.020.340,00	79,44
	k. Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.902.750.000,00	3.862.190.600,00	98,96
	l. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.000.000,00	20.959.920,00	83,84
	m. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bina Pendidikan	23.000.000,00	16.517.620,00	71,82



	n. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	85.130.500,00	73.427.320,00	86,25
	o. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	232.079.524,00	219.319.200,00	94,50
	p. Fasilitasi dan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000,00	24.657.330,00	98,63
	q. Pembangunan Ruang Kelas Baru	199.419.864,00	199.079.080,00	99,83
	r. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	197.050.000,00	170.744.580,00	86,65
	s. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	210.000.000,00	199.839.000,00	95,16
	t. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	211.400.000,00	209.300.000,00	99,01
	3. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	25.000.000,00	100
	b. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	225.015.000,00	224.840.000,00	99,92
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.999.975,00	14.985.960,00	99,91
	d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.000.000,00	34.057.140,00	85,14
	e. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.929.420.000,00	2.835.997.800,00	96,81
	f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	19.340.100,00	96,70
	g. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	79.949.975,00	72.476.218,00	90,65
	h. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.450.000,00	10.445.000,00	99,95
	i. Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.0000.000,00	199.776.000,00	99,89



	j. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	406.250.000,00	400.000.000,00	98,46
	k. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	450.000.000,00	437.343.000,00	97,19
	l. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	118.000.000,00	91.440.320,00	77,49
	m. Pengadaan Mebel Sekolah	71.799.600,00	70.950.000,00	98,82
	n. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.000.000,00	394.813.000,00	98,70
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	50.000.000,00	48.886.606,00	97,77
	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000,00	48.886.606,00	97,77
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	63.000.000,00	58.524.045,00	92,90
	1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	38.000.000,00	35.124.600,00	92,43
	b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	23.399.445,00	93,601
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	234.500.700,00	228.355.095,00	97,38
	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			



	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	36.307.000,00	36.211.400,00	99,74
	b. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	15.626.300,00	15.276.040,00	97,76
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	182.567.400,00	176.867.655,00	96,88
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.429.355.962,00	1.410.720.314,00	98,70
	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	57.355.962,00	57.343.852,00	99,98
	2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
	a. Seleksi Atlet Daerah	32.000.000,00	31.718.460,00	99,12
	b. Pemusatana Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.000.000,00	104.503.250,00	87,09
	c. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	170.000.000,00	167.637.952,00	98,61
	d. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100



	3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
	a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	800.000.000,00	800.000.000,00	100
	4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
	a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000,00	199.516.800,00	99,76
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	245.907.368,00	98,36
	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
	a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000,00	245.907.368,00	98,36
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.023.295.060,00	2.016.257.360,00	99,65
	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	180.142.760,00	178.338.360,00	99,00
	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.843.152.300,00	1.837.919.000,00	99,72
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	410.859.960,00	409.494.520,00	99,67
	1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	410.859.960,00	409.494.520,00	99,67
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	205.042.560,00	203.783.100,00	99,39



	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
	a. Penetapan Cagar Budaya	205.042.560,00	203.783.100,00	99,39
11	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	935.229.890,00	539.189.233,00	98,75
	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
	a. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	546.351.890,00	539.189.233,00	98,69
	2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
	a. Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	372.778.500,00	368.575.800,00	98,87
	3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	16.099.500,00	15.787.400,00	98,06
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
	a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	37.944.256,00	37.799.390,00	99,62
JUMLAH		337.594.790.686,00	332.088.508.423,39	98,38

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Audited 2024)

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat realisasi pendapatan pada anggaran Dinas

Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah. Realisasi belanja sebesar Rp.332.088.508.423,39 dari anggaran belanja dalam APBD tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp.337.594.790.686,00. Realisasi Belanja Pada tahun 2024 terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.275.999.069.849,24 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp.280.759.295.998,00, dan belanja modal sebesar Rp.56.089.438.574,15 dibandingkan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.56.835.494.688,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp.217.519.698.504,00, Belanja Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.47.470.009.905,24, Belanja Hibah sebesar Rp.9.535.949.200,00 serta belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.1.473.412.240,00. Realisasi belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.11.359.415.029,06, belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp.41.675.334.967,00 dan belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp.3.054.688.578,09,00.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini belum terlaksana dengan baik disebabkan terbatasnya biaya Operasional;
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang arti penting pendidikan;
3. Masih rendahnya APK dan APM pada jenjang pendidikan menengah;
4. Sistem kurikulum dan metode pembelajaran kurang mengarah pada penguasaan estetika, etika, kepribadian dan kompetensi tertentu;

5. Sarana Prasarana penunjang proses belajar mengajar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih terbatas;
6. Sistem pengembangan guru belum optimal terutama dalam segi pengembangan profesi, kode etik, kesejahteraan, hak dan perlindungan;
7. Rendahnya kesadaran dan partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan;
8. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur kepariwisataan;
9. Minimnya Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Budaya sebagai penerus tradisi dan kebudayaan.

Sementara itu pada tahun berjalan, anggaran Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah terdiri dari anggaran Pendapatan sebesar Rp.50.000.000,00 dan anggaran belanja sebesar Rp.313.916.549.039,00 terdiri atas 11 (sebelas) Program, 25 (dua puluh lima) Kegiatan dan 144 (seratus empat puluh empat) Sub Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Secara umum pada tahun 2024 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik.



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah

No	Indikator	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
			Tahun 2024	Tahun n+1	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	tahun 2026	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	a TK/PAUD	nilai	69,81	45	45,73	40,23	45	50	
	b SD/MI	nilai	100	108,8	101,33	100,11	108,8	109	
	c SMP/MTs	nilai	100	83	99,36	103,77	83	85	
2	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	a SD/MI	nilai	98,85	-	95,98	95,64	-	-	
	b SMP/MTs	nilai	90	-	88,88	88,4	-	-	
3	Angka Putus Sekolah (APTS)								
	a SD/MI	%	0,45	-	0,09	0,35	-	-	
	b SMP/MTs	%	0,25	-	0,29	0,28	-	-	
4	Persentase Pemuda yang menjadi anggota aktif dalam organisasi kepemudaan	%	60	30	1,74	57	30	35	
5	Persentase atlit olahraga yang berprestasi di pekan olahraga ditingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	%	37	-	22,39	34,78	-	-	
6	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke objek wisata dan event daerah di Kabupaten Mempawah	%	13	-	12,6	12,92	-	-	
7	Jumlah Pelaku seni Budaya yang tampil pada event lokal daerah	%	28	-	13	20	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD

Isu Strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal anatar lain:

1. Pendidikan Anak Usia Dini belum terlaksana dengan baik;
2. Akses Informasi dan Komunikasi di bidang pendidikan masih sangat terbatas;
3. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bermutu dan fasilitas pendidikan menengah pada seluruh kecamatan;
4. Belum merata penataan tenaga pendidik disatuan pendidikan;
5. Masih terbatasnya Sarana dan Prasaran untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Perkembangan dan Perubahan Kurikulum belum mampu di ikuti dengan cepat;
7. Penuntasan wajar 9 tahun mengarah penuntasan wajar 12 tahun;
8. Mutu Lulusan belum memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai serta daya saing yang tinggi.;
9. Sangat minimnya fasilitas pembinaan olahraga dan kepemudaan.
10. Belum tersedianya fasilitas untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah.
11. Belum tertata nilai-nilai historis dan atraksi/event budaya yang siap jual.
12. Belum dikembangkan daerah-daerah pesisir yang memiliki potensi yang sangat besar akan wisata baharinya

KONDISI YANG DIINGINKAN

Setelah menganalisa permasalahan yang ada, maka sangat perlu menentukan faktor kunci keberhasilan agar pelaksanaan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mencapai hasil maksimal. Faktor kunci keberhasilan tersebut merupakan implementasi Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus dalam rangka ikut mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Mempawah. Faktor penentu yang merupakan langkah strategis yang harus dilakukan adalah:

Bidang Pendidikan

- a. Meningkatkan pendidikan dan kegiatan keagamaan, kebudayaan dalam rangka pembentukan watak dan moral peserta didik serta segenap insan pendidik.
- b. Meningkatkan penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS) dengan kebebasan seluas-luasnya pada satuan pendidikan secara otonom mengembangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- c. Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang (APK dan APM).
- d. Meningkatkan kualitas setiap jalur dan jenjang pendidikan dengan menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, proses pembelajaran sarana pendidikan, ketenagaan dan pendanaan.
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan dengan berbasis pada pelayanan prima dengan mengedepankan ketepatan dan kecepatan akses data dan informasi.
- f. Menyediakan layanan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas – luasnya pada semua jenjang.



- g. Menata program keahlian dan pendidikan kejuruan dalam rangka mewujudkan sistem keahlian persiapan kerja dengan berorientasi pada kebutuhan pasar.
- h. Perluasan akses pendidikan dengan mengupayakan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sarana prasarana.
- i. Penataan dan Pemetaan penempatan tenaga guru dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kesejahteraan.
- j. Meningkatkan kualitas lulusan pada semua jenjang pendidikan dan mengupayakan peningkatan daya serap lulusan ditingkat perguruan tinggi dan lapangan kerja.
- k. Meningkatkan Profesionalisme, Kompetensi, daya saing pendidik dan tenaga kependidikan serta mengupayakan kesejahteraan dengan kriteria kinerja dan tempat tugas.

Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan olahraga dan kepemudaan dalam rangka peningkatan prestasi dan memupuk sikap hidup sehat , demokrasi dan kebersamaan.
- b. Meningkatkan aspek mental dan moral melalui system pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah , khususnya melalui pendidikan agama, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, pendidikan budi pekerti dan kewargaan negara serta ketrampilan.
- c. Pengembangan kegiatan ekonomi produktif, ketrampilan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar di kalangan pemuda melalui kegiatan kursus dan pelatihan.

- d. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kebudayaan daerah dalam rangka mencegah ancaman desintegrasi bangsa, serta memupuk rasa kerja sama, demokratis dan saling menghargai.
- e. Penerapan system pengembangan olahraga yang lebih efisien.
- f. Memberi perhatian dan penghargaan nyata kepada siswa dan pembina olahraga dan kesenian berprestasi.

Bidang Pariwisata

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi nilai-nilai budaya dan pariwisata diharapkan menjadi momentum yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti :

- a. Robo'-robo', sebagai trade mark budaya daerah yang dapat menarik turis lokal, domestik maupun manca negara, dapat dikemas lebih apik dengan tidak mengurangi makna napak tilas dan ritual kerajaan Mempawah. Kedepan kegiatan robo'-robo tidak terkesan monoton akan tetapi memberikan nilai tambah, guna peningkatan perekonomian menengah.
- b. Pengembangan cipta, rona dan karsa kesenian daerah, yang diwujudkan dengan tereksposnya karya-karya. Sanggar budaya sebagai ciri kekhasan Kabupaten Mempawah dalam nuansa pluralisme budaya antar etnis.
- c. Penibung Komplek sebagai saling terintegrasi, yaitu tersedianya wisata bahari pulau Penibung, pulau Temajo, terkoneksi wisata pantai Kijing dan kuliner.
- d. Komplek Jungkat sebagai wisata alternatif terdekat dari ibukota propinsi yang didukung dengan pulau Panjang dan sekitarnya



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.



Tabel.T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LEBUTUHAN DANA (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
					402.463.760.000,00					321.516.883.729,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				402.463.760.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				321.516.883.729,00	
	-					-					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		APK SD APM SD	118 Persen 93 Persen	140.193.760.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		APK SD APM SD	118 Persen 93 Persen	70.482.439.122,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 Persen	79.343.900.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 Persen	36.615.623.392,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	750.000.000,00			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	500.000,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.500.000.000,00			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	211.200.000,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang	2.700.000.000,00			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang	316.668.900,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					Pembangunan Perpustakaan Sekolah					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	650.000.000,00		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35 Unit	5.500.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35 Unit	1.091.420.000,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	550.000.000,00		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	800.000.000,00		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	345.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	350.000.000,00		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.100.000.000,00		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	144.675.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	350.000.000,00		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah					Pengadaan Mebel Sekolah			
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket	2.300.000.000,00		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket	491.274.600,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	50.000.000,00		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

Pengadaan Perlengkapan Sekolah					Pengadaan Perlengkapan Sekolah				
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	1.500.000.000,00		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	0,00	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	1.000.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0,00	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (1000 Peserta Didik)	1000 Peserta Didik	600.000.000,00		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (1000 Peserta Didik)	1000 Peserta Didik		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (30 Paket)	30 Paket	750.000.000,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (30 Paket)	30 Paket		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	250.000.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	262.907.000,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	50.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	24.448.100,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	434.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	410.815.000,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	189 Satuan Pendidikan	150.000.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	189 Satuan Pendidikan	138.390.000,00		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	25975 Satuan Pendidikan	30.000.000.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	25975 Satuan Pendidikan	26.536.316.000,00		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	567 Orang	150.000.000,00		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	567 Orang	150.000.000,00		
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar					
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	15 Ruang	3.500.000.000,00		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	15 Ruang	0,00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar					
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	750.000.000,00		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00		
Pemeliharaan Mebel Sekolah					Pemeliharaan Mebel Sekolah					
		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1000 Unit	500.000.000,00		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1000 Unit	0,00		
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar					Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar					
		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang	125.000.000,00		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang	0,00		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	300.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	291.075.000,00	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					Pengembangan konten digital untuk pendidikan				
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	134.900.000,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	124.156.880,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	189 Orang	240.000.000,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	189 Orang	222.502.000,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	189 Dokumen	260.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	189 Dokumen	234.902.000,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	45.650.000,00	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	200.000.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	80.635.000,00	
	Penyediaan infrastruktur TIK					Penyediaan infrastruktur TIK				
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket	1.500.000.000,00		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket	0,00	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	50.000.000,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	25.240.000,00	
	Penataan Ruang/Sudut Baca				Penataan Ruang/Sudut Baca				
		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	20 Ruang	200.000.000,00		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	20 Ruang	0,00	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku	800.000.000,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku	50.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	750.000.000,00		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	325.440.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru				
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	4.000.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	631.400.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	2.150.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	1.280.365.000,00	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	189 Orang	250.000.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	189 Orang	1.162.787.912,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	189 Satuan Pendidikan	700.000.000,00		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	189 Satuan Pendidikan	479.030.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang	10.400.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang	757.625.000,00	
	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				
		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	3 Ruang	950.000.000,00		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	661.200.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	120.000.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 persen	34.416.500.000,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 persen	21.873.375.605,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	950.000.000,00		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.350.000.000,00		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.100.000.000,00		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Pembangunan Perpustakaan Sekolah				
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	980.000.000,00		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	
	Pembangunan Laboratorium				Pembangunan Laboratorium				



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	2.500.000.000,00		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	241.500.000,00	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula					Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang	850.000.000,00		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	
	Pembangunan Asrama Sekolah					Pembangunan Asrama Sekolah			
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	450.000.000,00		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	350.000.000,00		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	
	Pembangunan Fasilitas Parkir					Pembangunan Fasilitas Parkir			
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit	650.000.000,00		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit	0,00	
	Pembangunan Kantin Sekolah					Pembangunan Kantin Sekolah			
		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	120.000.000,00		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	18 Unit	2.600.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	18 Unit	2.526.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.500.000.000,00		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	715.540.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000,00		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	230.000.000,00		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	600.000,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	550.000.000,00		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	190.000.000,00	
Pengadaan Mebel Sekolah					Pengadaan Mebel Sekolah				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	25 Paket	875.000.000,00		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	25 Paket	799.941.800,00	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah					Pengadaan Perlengkapan Sekolah				
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	250.000.000,00		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	22.072.400,00	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	500.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	-	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1750 Peserta Didik	850.000.000,00		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1750 Peserta Didik	1.100.000.000,00	
Perlengkapan Belajar Peserta Didik									
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (4 Paket)	4 paket	203.000.000,00					
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (7 Paket)	7 paket	245.000.000,00					
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500.000.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	258.349.100,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	27.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	24.230.000,00		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	650.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	181.365.225,00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 Satuan Pendidikan	150.000.000,00		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 Satuan Pendidikan	119.650.000,00		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	50 Satuan Pendidikan	11.000.000.000,00		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	50 Satuan Pendidikan	11.838.737.000,00		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	144 Orang	100.000.000,00		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	144 Orang	25.000.000,00		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU					
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (2 Ruang)	2 ruang	260.000.000,00						
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	250.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	144.826.200,00	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					Pengembangan konten digital untuk pendidikan				
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	150.000.000,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	150.000.000,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	188.000.000,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	169.287.880,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	600.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	492.772.000,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	191.000.000,00		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	180.124.000,00	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12 Komunitas	100.000.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12 Komunitas	98.280.000,00	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	50.000.000,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	33.530.000,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Penataan Ruang/Sudut Baca					Penataan Ruang/Sudut Baca					
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	20 Ruang	200.000.000,00		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	20 Ruang	0,00		
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan	520.000.000,00		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan	368.866.000,00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					Pembangunan Ruang Kelas Baru					
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.000.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	900.000.000,00		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	282.500.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	750.000.000,00		
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	25.000.000,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	25.000.000,00		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	250.000.000,00		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	229.600.000,00		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	167.150.000,00		
	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus					Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus					
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	320.000.000,00		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	-		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	120.954.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 persen	20.017.500.000,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 persen	8.363.948.850,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1.400.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	385.630.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (3 Unit)	3 Unit	900.000.000,00					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	1.200.000.000,00					
	Pengadaan Mebel PAUD				Pengadaan Mebel PAUD				
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 Paket	45.000.000,00		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 Paket	170.000.000,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				
		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket	30.000.000,00		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket	16.701.300,00	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD				Pengadaan Perlengkapan PAUD				
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	195 Paket	2.145.000.000,00		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	195 Paket	316.061.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800 Peserta Didik	800.000.000,00		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800 Peserta Didik	250.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (30 Paket)	30 Paket	450.000.000,00						
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (500 Peserta Didik)	500 Peserta didik	335.000.000,00						
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	500 Orang	1.500.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	500 Orang	1.439.292.000,00		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	49.000.000,00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	192 Satuan Pendidikan	230.000.000,00		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	192 Satuan Pendidikan	64.650.000,00		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD				Pengelolaan Dana BOP PAUD					
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	6200 Satuan Pendidikan	4.154.000.000,00		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	6200 Satuan Pendidikan	3.936.596.000,00		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	195 Orang	45.000.000,00		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	195 Orang	9.657.000,00		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	195 Orang	45.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	195 Orang	0,00	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				Pengembangan konten digital untuk pendidikan				
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	12.000.000,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	23.000.150,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	195 Orang	90.000.000,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	195 Orang	81.669.400,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	22.000.000,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	65.000.000,00		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	42.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000,00		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	90.000.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	24.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru				
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					Pembangunan Perpustakaan Sekolah					
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000,00		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta didik	250.000.000,00		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta didik		0,00	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6200 Buku	155.000.000,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6200 Buku		0,00	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	25.000.000,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		0,00	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100.000.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		157.000.000,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.200.000.000,00		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		0,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6500 Paket	2.476.500.000,00		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6500 Paket		252.842.000,00	
	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah					Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah					
			Jumlah sarana dan prasarana utilitas sekolah yg dipelihara	1 paket	-		Jumlah sarana dan prasarana utilitas sekolah yg dipelihara	1 paket		184.750.000,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	800.000.000,00	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	600.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	210.500.000,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	30 Paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	30 Paket	203.320.000,00	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Satuan Pendidikan	0,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Satuan Pendidikan	0,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	325.280.000,00	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	6.415.860.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	3.629.491.275,00	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (1 Unit)	1 unit	200.000.000,00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600 Peserta Didik	75.000.000,00		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600 Peserta Didik	160.000.000,00		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan					
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (2 Paket)	2 paket	100.000.000,00		Jumlah alat prakti dan peraga siswa nonformal/kesetaraan yang tersedia	2 paket			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60 Orang	125.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60 Orang	13.237.300,00		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	75.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	31.700.000,00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	50.000.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	0,00		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	3.250.000.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	2.738.830.000,00		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20 Orang	35.000.000,00		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20 Orang	16.360.000,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50.000.000,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	0,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	40.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	14.204.975,00	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	40.000.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50.000.000,00		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	0,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	35.000.000,00		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	35.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru				
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	100.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0,00	
	Pengadaan Perlengkapan sekolah				Pembangunan Ruang Kelas Baru				



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

			Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	1 paket	240.860.000,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	240.860.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	450.000.000,00		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	157.500.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	600 Peserta Didik	200.000.000,00		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	600 Peserta Didik	84.299.000,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah					Pengadaan Mebel Sekolah				
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	150.000.000,00		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	75.000.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit	400.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit	0,00	
	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus					Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	-		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	62.500.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	150.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	65,74 persen	825.000.000,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	65,74 persen	46.099.100,00	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Persentase Ketercapaian Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	82 persen	825.000.000,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Persentase Ketercapaian Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	82 persen	46.099.100,00	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	75.000.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	25.919.100,00	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	750.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	20.180.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90 persen	239.031.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90 persen	243.388.010.817,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen	93.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen	74.403.120,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.261.950,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.073.550,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.337.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.032.550,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	41.697.270,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	95 persen	235.215.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	95 persen	242.800.134.247,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang/bulan	235.000.000.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang/bulan	242.607.367.347,00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	175.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	157.154.500,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	30.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	27.572.600,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.039.800,00		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 persen	60.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 persen	51.354.300,00		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	60.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	51.354.300,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	350.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	25.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	25.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	300.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	90 persen	340.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	90 persen	84.374.300,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.240.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.810.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.323.500,00	
	Penyediaan Bahan/Material				Penyediaan Bahan/Material				



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	100.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	20.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	750.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	35.862.700,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	250.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19.732.100,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.130.600,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 Persen	600.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 Persen	298.721.100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	400.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	298.721.100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	200.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	1.622.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	18.161.050,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.000.000,00			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	12.954.150,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	75.000.000,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	5.206.900,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	7.500.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	15.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.844.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.743.235.400,00	
	-				-	-					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Sosial kemasyarakatan	0,73 persen	1.074.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Sosial kemasyarakatan	0,73 persen	936.031.500,00	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kapasitas pemuda	100 persen	274.000.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kapasitas pemuda	100 persen	66.031.500,00	
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda					Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda					
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	8 Orang	24.000.000,00			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	8 Orang	10.000.000,00	
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota					Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota					
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	80 Orang	50.000.000,00			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	80 Orang	17.067.800,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	200.000.000,00			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	38.963.700,00	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	60 persen	800.000.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	60 persen	870.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (5 Organisasi)	5 Organisasi	550.000.000,00			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 Organisasi	-	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota					
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100 Orang	250.000.000,00			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100 Orang	870.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	9 medali	3.370.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	9 medali	1.711.443.900,00	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan wasit dan pelatih olahraga	50 orang	300.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan wasit dan pelatih olahraga	50 orang	-	
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan					Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota					pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota					
			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	50 Unit	100.000.000,00			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	50 Unit	0,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	200.000.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	0,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 orang	490.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 orang	375.384.600,00	
	Seleksi Atlet Daerah					Seleksi Atlet Daerah					
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	40.000.000,00			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	30.374.000,00	
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga					Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga					
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	15 Orang	100.000.000,00			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	15 Orang	80.000.000,00	
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3 Pelatda	150.000.000,00			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3 Pelatda	75.147.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	12 Orang	200.000.000,00		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	12 Orang	189.863.600,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	1.850.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	700.000.000,00	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				Pengembangan Organisasi Keolahragaan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (3 Organisasi)	3 organisasi	1.800.000.000,00					
	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi				Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kabupaten/kota dengan lembaga terkait				
		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan (5 Organisasi)	5 organisasi	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	700.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase peningkatan olahraga rekreasi yang dikembangkan	66,67 persen	730.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase peningkatan olahraga rekreasi yang dikembangkan	66,67 persen	636.059.300,00	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	0,00	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				
		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	5 Laporan	-		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	5 Laporan	442.570.000,00	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	500.000.000,00		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	0,00	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional					Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional						
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Lembaga	230.000.000,00			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Lembaga	193.489.300,00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		-	-	400.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		-	-	95.760.000,00		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		-	-	400.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		-	-	95.760.000,00		
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	400.000.000,00			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	95.760.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				14.400.000.000,00	-				4.068.437.540,00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase objek kebudayaan yang dikembangkan	46 Persen	8.700.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase objek kebudayaan yang dikembangkan	46 Persen	2.557.644.000,00		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia yang dikembangkan	44 persen	5.200.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia yang dikembangkan	44 persen	653.978.400,00		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	42 Objek	5.000.000.000,00			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	42 Objek	653.978.400,00		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	200.000.000,00			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	0,00		



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	3.500.000.000,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1.903.665.600,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 Objek	3.500.000.000,00			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 Objek	1.903.665.600,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		-	-	4.900.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		-	-	348.478.500,00	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	4.900.000.000,00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	348.478.500,00	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (45 Orang)	45 orang	400.000.000,00			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (45 Orang)	45 orang		
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 Lembaga	4.500.000.000,00			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 Lembaga	348.478.500,00	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		-	-	100.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		-	-	-	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	100.000.000,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		-	-	-	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					Penetapan Cagar Budaya					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (25 Orang)	25 orang	100.000.000,00		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	28 Objek	-		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	700.000.000,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-		1.162.315.040,00	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	700.000.000,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		261.337.000,00	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				Penetapan Cagar Budaya					
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (27 Objek)	27 Objek	300.000.000,00		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (27 Objek)	27 Objek			
	Penetapan Cagar Budaya				Penetapan Cagar Budaya					
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	28 Objek	400.000.000,00		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	28 Objek	261.337.000,00		
	Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilindungi	40 Persen	-	Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilindungi	40 Persen	900.978.040,00		
	Pelindungan cagar budaya				Pelindungan cagar budaya					
		Jumlah cagar budaya yang dilindungi	6 Lokasi	-		Jumlah cagar budaya yang dilindungi	6 Lokasi	900.978.040,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.170.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			788.661.750,00		
	-				-					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata	11 persen	1.620.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata	11 persen	415.300.000,00		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten Mempawah	40 Persen	1.595.000.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten Mempawah	40 Persen	415.300.000,00		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	1.500.000.000,00		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	410.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9 Laporan	5.300.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	45 Orang	70.000.000,00		Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	45 Orang	0,00	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perizinan Usaha Pariwisata	0 Dokumen	25.000.000,00	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha Pariwisata	0 Dokumen	0,00	
	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota					Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota				
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (100 Usaha)	100 Pelaku Usaha	25.000.000,00		Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	100 Pelaku Usaha	0,00	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah	11 persen	1.300.000.000,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah	11 persen	373.361.750,00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Meningkatnya persentase program pemasaran pariwisata	66,67 Persen	1.300.000.000,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase program pemasaran pariwisata	66,67 Persen	373.361.750,00	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DISDIKPORAPAR 2025

		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75 Dokumen	8.500.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	9 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	9 Dokumen	4.910.000,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	1.200.000.000,00		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	337.470.367,00	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	22.481.383,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50 Persen	250.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50 Persen	0,00	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	50 persen	250.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	50 persen	0,00	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	250.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	0,00	
				402.463.760.000,00				321.516.883.729,00	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Cita-cita Kementerian Pendidikan Nasional dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara Visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Kebijakan umum di susun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing sebagai mana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat

persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan- kegiatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tujuan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menetapkan isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Mempawah.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas Olahraga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan, dan
3. Meningkatkan nilai tambah Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

3.2.2. Sasaran

Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Partisipasi Sekolah dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatkan Kapasitas Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Meningkatkan Atlit Prestasi;
3. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemajuan Kebudayaan Daerah;
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

3.2. Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten dan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah tahun 2025 terdiri dari;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
7. Program Pengembangan Kebudayaan;
8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
9. Program Pembinaan Sejarah;
10. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
12. Program Pemasaran Pariwisata;

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 yang kami susun dan laksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah merupakan rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah selama tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mempawah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2025, dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya. Selain itu, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.



PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

RENCANA KERJA (RENJA)

**PERUBAHAN
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Raden Kusno
dinkesppkbkabmempawah@gmail.com
Kode Pos 78912



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tahun 2025–2026. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai jenis kegiatan. Rencana Kerja Perubahan memuat indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Mempawah, Agustus 2025

Plt.Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Mempawah



DR. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes
NIP. 19720705 200112 1 003



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	71
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	73
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74
3.3. Program dan Kegiatan	79
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN	96
BAB V PENUTUP	112



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023
- Tabel 2.2 Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Target Kinerja Program/ Kegiatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Direncanakan
- Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan PP dan KB dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan PP dan KB sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Mempawah
- Tabel 2.4 Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/ SDGs)
- Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja SPM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2023
- Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci Hasil Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tabel 2.7 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tabel 2.8 Daftar Sepuluh Penyakit Terbesar di Kabupaten Mempawah Tahun 2023
- Tabel 2.9 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah
- Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tabel 3.2 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Mempawah Tahun 2023
- Tabel 3.3 Daftar Puskesmas Se-Kabupaten Mempawah
- Tabel 3.4 Total Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah
- Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
- Tabel 4.1 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan Perangkat Daerah).

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, serta sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar



upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*). Perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Percepatan pembangunan daerah di bidang kesehatan menjadi uraian dari program-program pembangunan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kementerian Kesehatan. Renstra dan Renja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah mengacu pada kebijakan-kebijakan di tingkat Provinsi dan nasional, yang meliputi Renja Perubahan dan Renstra Kementerian Kesehatan dan SPM Nasional Bidang Kesehatan. Oleh karena itu, Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah memiliki peran strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis di bidang kesehatan tingkat Kabupaten dengan tingkat provinsi dan pusat.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah merupakan unsur pelaksana urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan sebagai landasan melaksanakan tujuan atau sasaran strategis sebagaimana dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun dua tahun kedepan.



Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026. Renja Perubahan menafsirkan dan menjabarkan Renstra dengan menentukan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan sebagaimana tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah di bidang kesehatan.

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimulai dari forum konsultasi publik yaitu hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan serta Forum Perangkat Daerah. Forum ini membahas rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang Perubahan RKPD Kabupaten Mempawah. Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibahas dalam Forum Perangkat Daerah kemudian akan dituang ke dalam berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah.

Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perubahan yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan ditetapkan bersama dengan seluruh Renja Perubahan OPD dalam Perkada tentang Perubahan RKPD Kabupaten Mempawah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Pra RKA-SKPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya akan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kabupaten Mempawah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6780);
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - g) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);



- h) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Review Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- t) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1039);
- u) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
- v) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023);
- w) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
- x) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 2);
- y) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
- z) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 75).
- aa) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6);



bb) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah:

1. Menjadi acuan pengukuran kinerja yaitu pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Menjadi pedoman dalam menjaga upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah yaitu pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat



Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PP DAN KB KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan PP dan KB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan PP dan KB
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan PP dan KB
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan PP dan KB
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Membahas Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan program kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.



BAB V PENUTUP

Membahas dan menjabarkan mengenai kesimpulan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Dinas.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra maupun Renja Perubahan, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja target dan realisasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah di tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (tahun berjalan). Pada anggaran tahun 2023, jumlah anggaran belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah sebesar Rp.180.674.902.578,00 terdiri atas 8 (delapan) Program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 111 (seratus



sebelas) Sub Kegiatan.

Berdasarkan Aspek pelayanan umum dalam Bidang Kesehatan pada pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah berikut program/Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Tabel 2.1

Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN 2024)		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1					2	3	4	5
1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	02	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.025	4.597	81,90
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.989	4.502	83,80
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.807	4.033	85,52
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.959	16.569	92,09
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.774	44.690	99,87
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	205.396	162.804	82,82
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.318	30.095	90,33
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	97.873	74.429	80,30
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.106	6.205	162,83
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	645	631	97,83
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.828	4.304	92,96
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.877	6.844	103,96

Sumber: Dinas Kesehatan PP dan KB

Berikut merupakan pencapaian kegiatan SPM bidang kesehatan dari kurun waktu 2019-2024 (s/d Juni 2024):

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, program/Kegiatan Dinas Kesehatan,



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023, terdapat 10 (sebelas) dari 12 (dua belas) SPM yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Capaian yang tidak memenuhi target kinerja:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2024 sebesar 76,30% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama, kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan mengikuti kelas ibu hamil, ibu hamil kurang mendapatkan dukungan dan pendampingan keluarga, belum maksimalnya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, sistem pencatatan pelaporan dan pendataan kohort ibu hamil belum dilakukan dengan baik.

Beberapa kendala tersebut menyebabkan capaian tidak memenuhi target, namun telah dilakukan tindak lanjut yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya ANC dan kerjasama dengan kader kesehatan desa untuk deteksi dini resiko kehamilan, pendataan ke jejaring swasta yang melakukan pelayanan, melakukan sweeping, meningkatkan kerjasama lintas sektor dan membuat jejaring bersama kader untuk memotivasi ibu agar memeriksakan kehamilan, memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan ibu hamil, menguatkan kembali program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dengan melakukan kunjungan rumah.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2024 sebesar 75,17% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih ada persalinan di luar fasilitas pelayanan Kesehatan dan masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap paraji/dukun.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2024 sebesar 69,45% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Kurang maksimalnya pemanfaatan kohort sebagai kontrol pelayanan bayi baru lahir yang menyebabkan target belum dapat terpenuhi 100%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan kesehatan Balita tahun 2024 sebesar 75,45%,



dengan demikian belum memenuhi target 100%. Kendala yang dihadapi yaitu kriteria definisi operasional pelayanan kesehatan Balita tidak mudah untuk dicapai : imunisasi booster lanjutan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali pertahun, penimbangan BB 4 kali pertahun, vitamin A 2 kali pertahun, pemeriksaan SDIDTK, kepemilikan buku KIA. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kriteria definisi operasional pelayanan kesehatan balita, perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis untuk tenaga kesehatan sesuai standar.

e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tahun 2024 sebesar 99,81%. Penjangkauan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran karena keterbatasan petugas dalam melakukan penjangkauan dan pemeriksaan berkala. Hal ini menyebabkan tidak dapat mencapai target 100%.

f. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Capaian pelayanan kesehatan usia produktif tahun 2024 sebesar 79,26% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu jumlah sasaran program yang besar, program belum terintegrasi secara maksimal di lintas program maupun lintas sector. Selain itu, petugas kurang konsisten dalam entri data pada sistem pencatatan dan pelaporan online (SIPTM dan ASIK).

g. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Capaian pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2024 sebesar 90,33% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Kendala eksternal yang dihadapi yaitu masih kurangnya motivasi lansia dan keluarga untuk membawa usia lanjut berkunjung ke Posyandu serta promosi kesehatan belum optimal melibatkan organisasi lansia.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian pelayanan penderita Hipertensi tahun 2024 sebesar 76,05% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Banyak penderita Hipertensi belum terdeteksi dan yang sudah terdeteksi tidak berobat secara teratur.

i. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) tahun 2024 sebesar 97,83% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Kendala yang dihadapi yaitu keluarga ODGJ enggan melaporkan ke



Fasyankes terdekat karena masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap penderita ODGJ serta kurangnya pendampingan dan pemahaman keluarga dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ODGJ.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian pelayanan orang terduga Tuberkulosis tahun 2024 sebesar 89,15% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu tingkat penularan penyakit yang cukup tinggi pada lingkungan dan keluarga, stigma negatif masyarakat terhadap penderita Tuberkulosis sehingga enggan memeriksakan diri ke Fasyankes, efek samping obat anti Tuberkulosis menyebabkan penderita putus berobat, kegiatan Investigasi Kontak (IK) serta skrining kasus TB masih berjalan secara pasif.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data program/Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 pada Tabel 2.1, terdapat 2 (dua) dari 12 (dua belas) SPM yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus capaian tahun 2024 sebesar 151,12% dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV capaian tahun 2023 sebesar 111,13% dengan demikian sudah melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Faktor pendukung yang mendorong tercapainya target Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus adalah skrining lebih dari satu kali pada sasaran pada input data di aplikasi Epuskesmas. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV tercapai karena didukung oleh jadwal pelayanan dan skrining yang sudah diatur dengan baik, adanya skrining mobile VCT yang menjaring cukup banyak populasi umum, terjalinnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang baik dengan VCT RSUD dr. Rubini yang cukup banyak menjaring orang yang beresiko karena tidak ada target pemeriksaan pada ibu hamil.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data program/Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 pada Tabel 2.2, terdapat 2 (dua) dari 12 (dua belas) SPM yang melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus capaian tahun 2024 sebesar 151,12% dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV capaian tahun 2023 sebesar 111,13% dengan demikian sudah melebihi target kinerja yang ditetapkan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yang direncanakan

Adapun faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Target Kinerja Program/ Kegiatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Direncanakan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN 2023)			PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.025	4.597	81,90	- Program P4K masih belum berjalan baik - Sistem Pencatatan dan Pendataan Kohort ibu hamil masih belum dilakukan dengan disiplin - Kurangnya pendampingan oleh keluarga dalam upaya ibu hamil minum tablet tambah darah dalam rangka pengawasan rutin ibu hamil - Kurang kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan mengikuti kelas ibu hamil - Belum maksimalnya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi - Kurangnya monitoring dan evaluasi capaian program dari Kepala Puskesmas dan belum maksimalnya integrasi lintas program dan lintas sektor. - Kurangnya kesadaran suami untuk mengikuti kelas ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan ibu hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.989	4.502	83,80	- Masih ditemukan ibu hamil yang melakukan persalinan dengan dukun bersalin - Sistem pendampingan ibu hamil oleh kader dan dukun belum berjalan dengan baik - Koordinasi lintas sektor dan lintas program yang masih kurang, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi capaian program dari Kepala Puskesmas - Walaupun sudah memanfaatkan kantong persalinan, namun masih ditemukan persalinan diluar tanggal tafsiran bidan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.807	4.033	85,52	- Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak bayi



					- Kurang Maksimalnya pemanfaatan kantong neonatus sebagai kontrol kunjungan neonatal sampai dengan kunjungan neonatal lengkap (KN3), - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak bayi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	21.959	16.569	92,09	- Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak balita - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	44.774	44.690	99,87	- Kerjasama lintas sektor kurang maksimal - Keterbatasan petugas dalam melakukan Penjarangan dan pemeriksaan berkala karena bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi - Keterbatasan waktu dan SDM untuk melakukan pelayanan ulang, entri data layanan pada aplikasi (SIPTM dan ASIK) masih rendah. - Keterbatasan anggaran pelaksanaan penjarangan dan pemeriksaan berkala di sekolah
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	205.396	162.804	82,82	- Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor. - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang dan petugas kurang konsisten dalam entri data pada sistem pencatatan dan pelaporan online (SIPTM dan ASIK).
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	33.318	30.095	90,33	- Kurangnya motivasi usia lanjut dan keluarga untuk kunjungan ke posyandu - Kurangnya peran aktif bidan desa dalam melakukan pelayanan pada usia lanjut dengan kunjungan rumah karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan bidan desa, dalam kegiatan-kegiatan program lainnya - Entry data pelayanan lansia di aplikasi e-kohort masih rendah - Belum melibatkan organisasi lansia seperti Lembaga Lansia Indonesia, persatuan Wredatama Indonesia (PWRI) dalam pencapaian kunjungan lanjut usia
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	97.873	74.429	80,30	- Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor. - Banyak penderita Hipertensi belum terdeteksi dan yang sudah terdeteksi tidak berobat secara teratur - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.106	6.205	162,83	Pelayanan skrining sudah dilakukan
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	645	631	97,83	- Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor. - Keluarga ODGJ enggan melaporkan ke Fasyankes terdekat karena masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap penderita ODGJ - Masih kurangnya jumlah tenaga yang tersertifikasi dan petugas kurang konsisten dalam entri data pada sistem pencatatan dan pelaporan online (SIMKESWA dan ASIK).
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	4.828	4.304	92,96	- Belum berjalannya kegiatan Investigasi Kontak (IK) serta skrining kasus TB - Stigma negatif masyarakat terhadap penderita Tuberkulosis sehingga enggan memeriksakan diri ke Fasyankes



					- Keterbatasan tenaga dan adanya pergantian PJ program di Faskes.
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	6.877	6.844	103,96	Pelayanan skrining sudah dilakukan

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Implikasi yang timbul terhadap 12 indikator Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai target, sudah mencapai target maupun yg melebihi target adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target, jika ibu hamil pada saat kehamilan tidak rutin memeriksakan kehamilannya atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan maksimal maka tidak akan terdeteksi dini resiko pada kehamilannya yang akan menyebabkan tingginya kasus kematian ibu dan bayi.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin belum mencapai target, jika persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di Fasyankes, maka akan menyebabkan berbagai penyulit persalinan seperti perdarahan karena pertolongan yang salah, kematian janin dalam rahim, partus lama, ruptur uteri, infeksi berat dan janin mengalami asfiksia, infeksi dan trauma persalinan, yang akhirnya akan menyumbangkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum mencapai target, pelayanan bayi yang paripurna akan menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, jika bayi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi barul lahir yang maksimal, permasalahan kesehatan tidak dapat dideteksi secara dini, hal ini akan menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian bayi.
- d. Pelayanan kesehatan Balita belum mencapai target, jika pelayanan kesehatan Balita tidak dilakukan secara maksimal, maka tidak dapat terdeteksi Balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang dan permasalahan kesehatan, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian Balita.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target, jika tidak terpantaunya kesehatan pada anak usia pendidikan dasar maka



akan berdampak pada kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan pada anak sehingga akan meningkatkan angka morbiditas.

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif belum mencapai target, jika kelompok usia produktif mengalami masalah kesehatan dan rendah kecerdasannya, hal ini dapat berujung pada bencana. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga menambah beban negara.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut belum mencapai target, tidak terpantaunya kesehatan pada usia lanjut, akan berdampak pada kecenderungan bertambahnya penyandang disabilitas karena proses degeneratif.
- h. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi belum mencapai target, Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, dengan 90-95% kasus didominasi oleh Hipertensi Esensial. Di Indonesia, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dan Studi Kohor Penyakit Tidak Menular (PTM) tahun 2011-2021, Hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat dengan persentase 10,2%.
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) belum mencapai target, komplikasi dari DM terutama pada pembuluh darah baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler, serta pada sistem saraf atau neuropati akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang meningkat dan membawa dampak pembiayaan terhadap DM menjadi tinggi dan produktivitas penyandang DM menjadi menurun.
- j. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) belum mencapai target, pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan ODGJ belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan ODGJ sering terabaikan. Secara sosial masih terdapat stigma di masyarakat sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan kesehatan.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis belum mencapai target, dampak yang ditimbulkan apabila capaian tidak memenuhi target maka berpotensi akan terjadinya resiko tinggi penularan Tuberkulosis terhadap masyarakat dengan daya tahan tubuh yang rendah sehingga rentan tertular.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus HIV sudah mencapai lebih dari target, dengan melakukan skrining HIV yang tidak hanya pada populasi beresiko dan populasi kunci tetapi juga pada populasi umum



dan catin, dampak yang diharapkan masyarakat paham tentang penyakit HIV dan kesadaran untuk melakukan skrining sejak dini.

2.1.6 Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Program/Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dianggarkan melalui sumber pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap tahunnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu mengajukan usulan anggaran program/kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM meskipun belum semua kebutuhan belanja dapat terakomodir baik melalui DAU maupun DAK. Adapun anggaran Dinas Kesehatan yang diusulkan melalui pendanaan DAK mengalami peningkatan setiap tahunnya. DAK Tahun 2023 sebesar Rp.30.780.240.000,00 menjadi Rp.31.682.748.262,00 pada tahun 2024 atau naik sebesar 2,85%. Selanjutnya, DAK tahun 2025 disetujui sebesar Rp.44.238.084.000,00.

2.1.7 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka Renstra 2025-2026

Tabel 2.3 [TC 29 PMDN 86/2017]

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan PP dan KB dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan PP dan KB sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Mempawah

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Tahun 2020-2024)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d tahun 2024	
					Target 2023	Realisasi Renja Perubahan 2023	%		Realisasi capaian program kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1		URUSAN WAJIB								
1.2		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3



1.2.1.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	7	7	7	1	7	21	3
1.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peangkat daerah	2	2	2	2	1	2	6	4
1.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDoku men Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	467	467	467	467	1	467	1401	3
1.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	12	12	12	12	1	12	36	3
1.2.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.03	Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	1	1	1	1	3	3



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)

Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah

Tahun 2025

1.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapran Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang dipelihara	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	249	249	249	249	1	249	747	3
1.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	0	1	2	2
1.2.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	1	1	3	3



1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
1.2.2.2.01.1	Pembangun Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah pembangunan rumah sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.01.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan puskesmas	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.01.1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	4	4	4	1	4	12	4
1.2.2.2.01.1 5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	14	14	14	14	1	14	42	3
1.2.2.2.01.1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket Pengadaan Obat, Vaksin, di Fasilitas Kesehatan	1	1	1	1	1		2	2
1.2.2.2.01.1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket Pengadaan Bahan Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.01.2 0	Pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14	14	14	14	1	14	42	3
1.2.2.2.01.2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di faskes	6025	6025	6025	6025	1	6025	18.075	3
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang melahirkan di faskes dengan selamat	5769	5769	5769	5769	1	5769	17.307	3
1.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah data bayi baru lahir sesuai standar yang valid	5769	5769	5769	5769	1	5769	17.307	3
1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah data balita yang valid	27728	27728	27728	27728	1	27728	83.184	3
1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Data Anak usia pendidikan dasar yang valid	44774	44774	44774	44774	1	44774	134.322	3
1.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penduduk yang dilakukan skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun	204777	204777	20477 7	20477 7	1	204777	614.331	3



1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	33318	33318	33318	33318	1	33318	99954	3
1.2.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96894	96894	96894	96894	1	96894	290682	3
1.2.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4065	4065	4065	4065	1	4065	12915	3
1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	648	648	648	648	1	648	1944	3
1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4828	4828	4828	4828	1	4828	14484	3
1.2.2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6877	6877	6877	6877	1	6877	20631	3
1.2.2.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1	1	1	1	1	1	3	3



		Pelayanan Promosi Kesehatan								
1.2.2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	527	527	527	527	1	527	1581	3
1.2.2.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan	74120	74120	74120	74120	1	74120	222360	3
1.2.2.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	12	12	1	12	36	3
1.2.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah	100	100	100	100	100 %	100	300%	3%
1.2.2.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapat akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	14	14	14	14	1	14	42	3
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14	14	14	14	1	14	42	3
1.2.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Faskes lainnya	1	1	1	1	1	1	3	3



1.2.2.2.02.3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen akreditasi faslitas kesehatan di kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.02.4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4752	4752	4752	4752	1	4752	14256	3
1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.03.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	14	14	14	14	1	14	42	3
1.2.2.2.04.4	Penyiapan perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	300%	3%
1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.3.2.01.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	4	4	4	1	4	12	3
1.2.3.2.01.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3



1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.3.2.02.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	110	110	110	110	1	110	330	3
1.2.3.2.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.3.2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	70	70	70	70	1	70	210	3
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian Alkes dan Makanan Minuman	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	300%	3%
1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.4.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	12	12	12	1	12	36	3
1.2.4.2.01.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	1	1	1	1	1	1	3	3



		Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
1.2.4.2.01.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	6	6	6	6	1	6	18	3
1.2.4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri rumah tangga	90	90	90	90	1	90	270	3
1.2.4.2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90	90	90	90	1	90	270	3
1.2.4.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah laporan kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	300	300	300	300	1	300	900	3
1.2.4.2.05.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah produk Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	300	300	300	300	1	300	900	3
1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	25	25	25	1	25	75	3
1.2.4.2.06.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	25	25	25	1	25	70	3



1.2.4.2.06.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	300%	3%
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9	9	9	9	1	9	27	3
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	6	1	6	18	3
1.2.5.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif dan Preventif	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan UKBM	1	1	1	1	1	1	3	3
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	2	2	2	1	2	6	3
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100%	100%	100%	100%	100 %	100%	300%	3%
2.14.2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.2.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah dokumen implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.2.2.02.9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	15	15	15	15	1	15	45	3



2.14.2.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	15	15	15	15	1	15	45	3
2.14.2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.2.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pelayanan KB berkualitas dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	300%	3%
2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.01.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangsa Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	18	18	18	18	1	18	54	3
2.14.3.2.01.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.01.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.01.6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah dokumen Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah dokumen Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	9	9	9	9	1	9	27	3
2.14.3.2.01.8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah dokumen Pengendalian Program KKBPK	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1	1	1	1	1	1	3	3



2.14.3.2.02.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah dokumen Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.02.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah dokumen Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200	200	200	200	1	200	600	3
2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.03.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah dokumen Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37	37	37	37	1	37	111	3
2.14.3.2.03.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17668	17668	17668	17668	1	17668	53004	3
2.14.3.2.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	9	9	9	9	1	9	27	3
2.14.3.2.03.8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah dokumen Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15	15	15	15	1	15	45	3
2.14.3.2.03.9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	14	14	14	14	1	14	42	3
2.14.3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.3.2.04.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	18	18	18	18	1	18	54	3
2.14.3.2.04.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung keluarga berkualitas program bangga kencana	30	30	30	30	1	30	90	3
2.14.3.2.04.4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah dokumen Pembinaan Terpadu Kampung KB	9	9	9	9	1	9	27	3



2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan kelompok ketahanan keluarga sejahtera	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	300%	3%
2.14.4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.4.2.01.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	133	133	133	133	1	133	399	3
2.14.4.2.01.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah dokumen Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	1	1	1	1	3	3

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MEMPAWAH

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/ SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah adalah:

1. Tujuan 1 yaitu Menghapus kemiskinan (Menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar)
2. Tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan (Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik)
3. Tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)
4. Tujuan 5 yaitu Kesetaraan Gender (Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti telah disepakati sesuai dengan Program of action of the international conference on population and development and the Beijing platform)

Berikut merupakan indikator yang digunakan untuk mencapai Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs):



Tabel 2.4

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/ SDGs)

Kode indikator	Indikator	Target Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Target 1.4 Menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar						
1.4.1 (a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	83,44	85,62	87,81	95,0	95,0
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	88,61	90,74	92,87	100	100
Target 2.1 Mengurangi prevalensi stunting pada balita						
2.1.1	Prevalensi Balita stunting	18	18	18	14	14
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (Underweight)pada anak balita	10	10	10	13	13
Target 3.1. Mengurangi rasio angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup						
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	218	217	216	183	183
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	83	85	86	95,0	95,0
Target 3.2. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000						
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	8	7	6	5	5
3.2.2	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	12	11	10	9	9
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13	12	11	10	10
Target 3.3. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya						
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0,003	0,006	0,006	0,006	0,006
3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orangMendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	0	1	0	0



Target 3.7. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,15	73,74	74,34	56,19	56,49
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	19,99	22,73	25,48	8,97%	9,27%
3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun ((Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	27	25	23	27,3	27
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate TFR)	2,5	2	2,4	2,33	2,03
Tujuan 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti telah disepakati sesuai dengan Program of action of the international conference on population and development and the Beijing platform						
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	11	11	11	23,6	23,03

2.2.2 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023 sebagai berikut:



Tabel 2.5 [TC 30 PMDN 86/2017]
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan PP dan KB
Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (satuan indikator)	SPM/ Standar nasional	Target Kinerja 2020- 2024 (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)				Proyeksi Tahun 2025	Anggaran				Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan												
Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan : %)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	88,65	93,03	83,52	93,15	96,15	10.655.075	19.635.000	20.616.700	21.647.500	
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	92,28	96,94	86,88	93,52	99,16	1.800.426.000	3.000.000.000	3.100.000.000	3.400.000.000	
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	98,35	101,17	91,73	98,29	100	0	40.000.000	45.000.000	50.000.000	
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Balita	100	81,25	74,18	82,91	83,71	88,47	11.560.000	18.900.000	19.845.000	20.837.300	
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100	10,45	23,67	79,17	84,55	95,31	0	30.000.000	33.199.900	40.170.600	
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100	80,00	82,96	92,47	85,39	91,61	121.383.950	136.500.000	143.329.000	150.495.400	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100	67,47	84,71	70,10	81,47	95,77	11.136.200	14.700.000	15.435.000	16.206.700	
Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	80,43	84,05	85,97	65,09	88,73	26.990.550	28.350.000	29.767.500	31.255.300	
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	80,51	80,29	85,11	93,28	99,76	26.990.550	28.350.000	29.767.500	31.255.300	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Pada ODGJ Berat	100	80,56	82,35	85,16	75,93	86,56	11.820.000	15.750.000	16.535.500	17.362.200	
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	100	92,60	34,50	59,35	65,95	69,25	26.418.300	27.794.000	29.184.000	29.768.000	
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (satuan; %)	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	128,04	98,13	99,54	111,13	100	25.605.875	27.030.000	28.381.000	28.948.000	

Sumber: Dinas Kesehatan PP dan KB



2.2.3 Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Indikator Kinerja yang Sudah Ditentukan Dalam Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pencapaian target SPM kesehatan tidak terlepas dari *framework* perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua belas SPM kesehatan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024.

2.2.4 Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Hasil
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{124}{311.575} \times 100 \%$ Jumlah Penduduk di Kabupaten	0,3979 %
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	$\frac{1}{1} \times 100 \%$ Jumlah RS di Kabupaten	100,00 %
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{4.731}{5.079} \times 100 \%$ Jumlah ibu hamil di Kabupaten	93,15 %



Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan $\frac{4.534}{4.848} \times 100 \%$ Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	93,52 %
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{4.538}{4.617} \times 100 \%$ Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	98,29 %
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{15.386}{18.380} \times 100 \%$ Jumlah balita di Kabupaten	83,71 %
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{41.258}{48.796} \times 100 \%$ Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	84,55 %
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{174.857}{204.777} \times 100 \%$ Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	85,39 %
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{25.702}{31.549} \times 100 \%$ Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	81,47 %
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{63.073}{96.894} \times 100 \%$ Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	65,09 %
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{3.792}{4.065} \times 100 \%$ Jumlah penderita DM di Kabupaten	93,28 %
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{492}{648} \times 100 \%$	75,93 %



	Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{3.134}{4.752} \times 100 \%$ Jumlah penderita TBC di Kabupaten	65,95 %
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar $\frac{6.112}{5.500} \times 100 \%$ Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	111,13 %

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dipetakan, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya angka kesakitan dan kematian	Tingginya angka kematian bayi (AKB)	– Rendahnya cakupan kunjungan bayi – Rendahnya cakupan pelayanan anak balita
		Tingginya angka kematian ibu (AKI)	– Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan – Rendahnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani – Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani – Rendahnya cakupan pelayanan nifas – Masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun
		Masih rendahnya kasus positif Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati	– Penemuan kasus TB masih berjalan secara pasif (case finding). – Kegiatan Investigasi Kontak erat dan kontak rumah belum optimal – Tingkat penularan penyakit yang cukup tinggi pada lingkungan dan keluarga – Stigma negatif masyarakat terhadap penderita Tuberkulosis sehingga enggan memeriksakan diri ke Fasyankes – Komitmen pengelola program kurang dan sering terjadinya mutasi SDMkes, rangkap tugas – Efek samping obat anti Tuberkulosis menyebabkan penderita putus berobat



		Masih tingginya kasus penyakit menular	– Peningkatan kasus untuk penyakit DBD, ISPA, Campak serta HIV/AIDS. – Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
		Belum optimalnya Imunisasi	– Rendahnya cakupan kelurahan UCI (<i>universal child immunization</i>)
		Belum pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	– Jumlah tenaga kesehatan secara umum masih kurang – Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
		Belum optimalnya Manajemen kesehatan perencanaan	– Kurangnya dukungan data yang memadai dari berbagai bidang sehingga membuat kegiatan perencanaan terhambat – Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan baik – Keterbatasan kemampuan dan jumlah SDM kesehatan
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan	– Sarana dan Prasarana Puskesmas belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan – Alokasi anggaran yang tidak mencukupi
2	Tingginya angka prevalensi stunting	Tingginya jumlah balita stunting	– Prevalensi balita stunting meningkat – Persentase balita gizi buruk dan gizi kurang meningkat

Sumber: Dinas Kesehatan PP dan KB

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat. Gambaran angka kesakitan penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2023 dapat dilihat dari gambaran prevalensi 10 penyakit terbesar melalui laporan rutin pada Sistem Rekam Medik Elektronik Puskesmas. Berikut sepuluh penyakit terbesar di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2023:



Tabel 2.8

Daftar Sepuluh Penyakit Terbesar di Kabupaten Mempawah Tahun 2023

No Urut	ICDX-10	Jenis Penyakit	Jumlah
1	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	16.243
2	I10	Essential (primary) hypertension	14.982
3	K30	Dyspepsia	13.735
4	J00	Acute nasopharyngitis [common cold]	9.229
5	K04.0	Pulpitis	6.385
6	M79.1	Myalgia	4.705
7	R50.9	Fever, unspecified	4.248
8	Z34	Supervision of normal pregnancy	3.779
9	A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	3.590
10	R50	Fever of other and unknown origin	3.445

Sumber: Dinas Kesehatan PP dan KB

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penyakit ISPA menduduki rangking pertama, diikuti penyakit Hipertensi pada rangking kedua, dan rangking ketiga di duduki oleh penyakit Dispepsia/Gastritis. Dari tabel tersebut juga memperlihatkan penyakit yang mendominasi adalah penyakit infeksi dan penyakit tidak menular.

2.3.1 Analisis tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah utama dalam pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), masih rendahnya kasus positif Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, masih tingginya kasus penyakit menular, dan belum optimalnya imunisasi. Sementara masalah-masalah tersebut merupakan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rendahnya penemuan kasus positif Tuberkulosis yaitu tidak pernah mencapai target 800 kasus. Sejak 5 (lima) tahun terakhir dari 2019-2023, penemuan kasus hanya berada di kisaran angka 200-300 kasus, meliputi angka



terendah sebanyak 274 penemuan kasus di tahun 2021 dan angka tertinggi sebanyak 369 penemuan kasus di tahun 2023. Pelayanan terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan sesuai standar juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 110,6% menjadi 66,0% di tahun 2023.

Masalah lain yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan yaitu belum optimalnya pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan khususnya yang ada 14 (empat belas) di Puskesmas Se-Kabupaten Mempawah serta belum optimalnya manajemen perencanaan kesehatan dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Mempawah.

Masalah pokok lainnya yang dihadapi yaitu masih tingginya angka prevalensi stunting. Hal ini disebabkan oleh prevalensi balita stunting meningkat serta persentase balita gizi buruk dan gizi kurang juga meningkat. Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 angka prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah turun menjadi 25,1 persen dari 29,7 persen. Di tahun 2023 naik 2,1 persen menjadi 27,2 persen.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam RPJPD diungkapkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mempawah hingga tahun 2025 adalah terwujudnya “Kabupaten Mempawah Maju dan Bersaya Saing”. Dalam rangka mewujudkan visi misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2020-2024 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005-2025, yaitu :

“Terwujudnya Mempawah CERDAS, MANDIRI dan TERDEPAN”

Dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah pada tahun 2024, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3



Tahun 2023, RPD Kabupaten Mempawah menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah namun tetap selaras dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Visi Daerah yakni pada Visi pertama “Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Kesehatan. Namun diketahui terdapat kendala dan masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu tingginya angka Kesakitan dan Kematian dan tingginya angka prevalensi stunting pada balita.

2.3.3 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi

2.3.3.1 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yakni pada Visi pertama “Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Kesehatan. Namun diketahui dari masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu tingginya angka Kesakitan dan Kematian dan tingginya angka prevalensi stunting pada balita tentunya akan menghambat tercapainya sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejalan dengan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mempawah.

2.3.3.2 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian IKK

Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki dampak terhadap pencapaian IKK yaitu tidak tercapainya 12 indikator IKK dari 14 indikator IKK Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.3.3.3 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian NSPK dan SPM



Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki dampak terhadap pencapaian NSPK dan SPM yaitu tidak tercapainya 11 indikator Standar Pelayanan Minimal dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

2.3.3.4 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki dampak terhadap pencapaian TPB/SDGs yaitu terkendalanya pencapaian 7 (tujuh) tujuan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/ SDGs).

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan yaitu bahwa dinamika permasalahan kesehatan terus bergerak cepat yang diakibatkan oleh perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya transformasi di bidang kesehatan seiring dengan perkembangan global tersebut. Berikut merupakan tantangan dan peluang yang akan dihadapi :

a. Tantangan

- Relatif tingginya kepercayaan masyarakat terhadap dukun untuk melakukan pertolongan persalinan dengan pertimbangan lebih kekeluargaan.



Persalinan yang ditolong non tenaga kesehatan di Kabupaten Mempawah tahun 2022 adalah sebesar 1,18% meningkat menjadi 1,96% di tahun 2023.

- Masih terdapat masyarakat yang menyembunyikan kasus ODGJ berat didalam keluarganya sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- Masih rendahnya kesadaran ibu pasca bersalin untuk menggunakan kontrasepsi dengan alasan tertentu, dan stigma masyarakat yang melarang anak/istri menggunakan kontrasepsi.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan secara berkala dan sesuai standar baik untuk usia lanjut, anak balita, ibu hamil, penderita TB, HIV, dan penyakit menular lainnya serta keluarga ODGJ dan ODMK
- Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

b. Peluang

- Beberapa peluang yang membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Mempawah diantaranya;
- Akses kesehatan yang semakin mudah dan terjangkau di tiap lapisan masyarakat.
- Peran media sosial dan media informasi yang semakin mudah diakses.
- Adanya koordinasi lintas sektor yang berperan dimasyarakat baik melalui organisasi kesehatan maupun organisasi kemasyarakatan.
- Tersebar nya fasilitas kesehatan swasta (klinik, swasta dan praktek mandiri) yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

2.4.1 Uraian Proses Rancangan Awal Renja Perubahan Dinas Hesehatan dengan Hasil Analisis Kebutuhan

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel reuiu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perubahan OPD tahun 2025.
2. Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*Bottom-Up Procedure*) serta menjawab permasalahan di bidang kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat.



3. Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisis program–program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum, sedangkan program yang tidak prioritas (mendesak) akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.4.2 Tabel Review terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut merupakan Tabel Review terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Kabupaten Tahun 2025.



Tabel 2.9 [TC 31 PMDN 86/2017]

Review Terhadap Rancangan Awal PERUBAHAN RKPD Tahun 2025
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				170.502.930.373,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				170.502.930.373,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				167.289.247.723,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				167.289.247.723,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46.247.125.870,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46.247.125.870,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja		30.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja		30.000.000,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan jumlah dokumen penatausahaan		45.645.552.598,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan jumlah dokumen penatausahaan		45.645.552.598,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	467 orang	45.468.912.598,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	467 orang	45.468.912.598,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	141.640.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	141.640.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		76.770.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		76.770.000,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	76.770.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	76.770.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah paket pakaian dinas dan jumlah yang		31.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah paket pakaian dinas dan jumlah yang		31.000.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

		mengikuti sosialisasi dan pelatihan					mengikuti sosialisasi dan pelatihan			
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	31.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	31.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		129.631.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		129.631.900,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.499.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.499.200,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.668.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.668.500,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	23.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	23.000.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	28.679.200,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	28.679.200,00
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	0,00	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	35.785.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	35.785.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor		29.323.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor		29.323.000,00
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0,00
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- unit	0,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- unit	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Unit	0,00



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

		Bangunan Lainnya yang Disediakan					Bangunan Lainnya yang Disediakan			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah pembayaran belanja telepon,air , listirk dan petugas keamanan kantor		180.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah pembayaran belanja telepon,air , listirk dan petugas keamanan kantor		180.000.000,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya serta gedung kantor yang terpelihara		124.848.372,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya serta gedung kantor yang terpelihara		124.848.372,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.848.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.848.300,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	249 Unit	78.962.472,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	249 Unit	78.962.472,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	2.920.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	2.920.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.117.600,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.117.600,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				116.831.128.100,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				116.831.128.100,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		35.124.148.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		35.124.148.000,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	10.378.150.000,00	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	10.378.150.000,00	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	18.000.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	18.000.000.000,00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	- unit	0,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	- unit	0,00	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 unit	586.453.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 unit	586.453.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	14 unit	31.627.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	14 unit	31.627.000,00	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 unit	157.904.000,00	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 unit	157.904.000,00	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	5.859.217.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	5.859.217.000,00	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	110.797.000,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	110.797.000,00	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah peningkatan penyediaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama		81.668.239.100,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah peningkatan penyediaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama		81.668.239.100,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5079 orang	9.726.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5079 orang	9.726.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4848 orang	287.600.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4848 orang	287.600.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4617 Orang	60.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4617 Orang	60.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18380 Orang	7.395.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18380 Orang	7.395.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48796 Orang	2.585.600,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48796 Orang	2.585.600,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204777 Orang	40.319.200,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204777 Orang	40.319.200,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31549 Orang	19.976.300,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31549 Orang	19.976.300,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96894 Orang	11.711.300,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96894 Orang	11.711.300,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4065 Orang	11.986.100,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4065 Orang	11.986.100,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	648 Orang	4.794.400,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	648 Orang	4.794.400,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4752 Orang	14.968.900,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4752 Orang	14.968.900,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5500 Orang	17.751.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5500 Orang	17.751.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	7.338.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	7.338.500,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	1 Dokumen	85.794.952,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	1 Dokumen	85.794.952,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

		Berpotensi Bencana Sesuai Standar					Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.184.259.900,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.184.259.900,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	88.336.900,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	88.336.900,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	153.596.384,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	153.596.384,00	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	194.670.800,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	194.670.800,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	7.735.200,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	7.735.200,00	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	94.024.700,00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	94.024.700,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	527 Orang	7.630.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	527 Orang	7.630.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	74120 Orang	5.803.300,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	74120 Orang	5.803.300,00	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	580.028.600,00	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	580.028.600,00	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	347.616.500,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	347.616.500,00	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	63.841.560.042,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	63.841.560.042,00	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100 Orang	9.320.000,00	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100 Orang	9.320.000,00	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 spesimen	47.982.500,00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 spesimen	47.982.500,00	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 Dokumen	20.758.200,00	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 Dokumen	20.758.200,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

		Kabupaten/Kota Sehat					Kabupaten/Kota Sehat			
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	14 Unit	0,00	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	14 Unit	0,00	
Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen	2.344.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen	2.344.000.000,00	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	68.969.000,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	68.969.000,00	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	52.333.984,00	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	52.333.984,00	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	23.404.500,00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	23.404.500,00	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4752 Orang	0,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4752 Orang	0,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	0,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	0,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	14 dokumen	369.606.500,00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	14 dokumen	369.606.500,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		36.951.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		36.951.000,00
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	36.951.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	36.951.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		1.790.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		1.790.000,00
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	14 Unit	1.790.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	14 Unit	1.790.000,00



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3.275.252.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3.275.252.000,00	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Dokumen hasil pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		1.159.400,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Dokumen hasil pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		1.159.400,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	545.800,00	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	545.800,00	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	613.600,00	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	613.600,00	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan distribusi pemerataan SDM Kesehatan		2.622.791.100,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan distribusi pemerataan SDM Kesehatan		2.622.791.100,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	5.747.800,00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	5.747.800,00	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas	110 Orang	2.604.351.900,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas	110 Orang	2.604.351.900,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

		Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	12.691.400,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	12.691.400,00	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar		651.301.500,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar		651.301.500,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	70 Orang	651.301.500,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	70 Orang	651.301.500,00	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				396.674.529,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				396.674.529,00	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan optikal, UMOT		42.207.000,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan optikal, UMOT		42.207.000,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	42.207.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	42.207.000,00	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase SPP IRT yang diterbitkan		103.971.237,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase SPP IRT yang diterbitkan		103.971.237,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen	103.971.237,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen	103.971.237,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		18.699.792,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		18.699.792,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	300 Dokumen	18.699.792,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	300 Dokumen	18.699.792,00	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase pemeriksaan Post Market Peredaran pangan		231.796.500,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase pemeriksaan Post Market Peredaran pangan		231.796.500,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25 Unit	231.796.500,00	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25 Unit	231.796.500,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				539.067.224,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				539.067.224,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase terselenggaranya advokasi dan pemberdayaan kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat di sekolah, desa, kecamatan, kabupaten.		72.954.500,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase terselenggaranya advokasi dan pemberdayaan kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat di sekolah, desa, kecamatan, kabupaten.		72.954.500,00
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	72.954.500,00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	72.954.500,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase terlaksananya rumah tangga hidup sehat		155.175.524,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase terlaksananya rumah tangga hidup sehat		155.175.524,00
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	155.175.524,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	155.175.524,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase terlaksananya Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		310.937.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase terlaksananya Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		310.937.200,00
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	156.258.200,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	156.258.200,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.213.682.650,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.213.682.650,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				253.433.750,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				253.433.750,00	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase pelaksanaan program pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk		6.100.550,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase pelaksanaan program pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk		6.100.550,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	6.100.550,00	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	6.100.550,00	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		247.333.200,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator: Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		247.333.200,00	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	60.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	60.000.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	113.700.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	113.700.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	64.098.200,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	64.098.200,00	
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	9.535.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	9.535.000,00	
Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	0,00	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	0,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.862.748.900,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.862.748.900,00	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah		916.136.900,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah		916.136.900,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	15.300.000,00	Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	15.300.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	441.000.000,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	441.000.000,00
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	64.700.000,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	64.700.000,00
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.286.500,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.286.500,00	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Organisasi	259.850.400,00	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Organisasi	259.850.400,00	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)		551.499.600,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)		551.499.600,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang	551.499.600,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang	551.499.600,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	0,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	0,00	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)		317.112.400,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)		317.112.400,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Laporan	266.055.000,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Laporan	266.055.000,00	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	1 Laporan	31.457.400,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	1 Laporan	31.457.400,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

		Jaringan dan Jejaringnya					Jaringan dan Jejaringnya			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS		78.000.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS		78.000.000,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	9 Laporan	16.400.000,00	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	9 Laporan	16.400.000,00	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	30 Kampung	61.600.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	30 Kampung	61.600.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.097.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.097.500.000,00	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase Keluarga sejahtera melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		158.800.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Mempawah	Indikator : Persentase Keluarga sejahtera melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		158.800.000,00	



Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		28.800.000,00	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		28.800.000,00	
		Sasaran:		Target:			Sasaran:		Target:	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	133 Unit	130.000.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	133 Unit	130.000.000,00	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				938.700.000,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				938.700.000,00	
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Indikator : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		447.000.000,00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Indikator : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		447.000.000,00	



Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		491.700.000,00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		491.700.000,00	
--	--	---	--	----------------	--	--	---	--	----------------	--

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.1 Proses Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dimulai dari forum konsultasi publik yaitu hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dibahas di dalam Musrenbang dengan mekanismenya diawali dari penggalan masalah kesehatan dan gagasan terkait upaya penyelesaian masalah kesehatan di Kabupaten Mempawah dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.

Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan. Selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting terkait kesehatan di tingkat Kecamatan.

2.5.2 Kesesuaian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dengan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Usulan-usulan masyarakat dalam forum Musrenbang ditampung dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah. Kemudian Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibahas dalam Forum Perangkat Daerah kemudian dituang ke dalam berita acara hasil kesepakatan forum Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan RKPD) yang berisi isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan yang berpedoman pada Renstra, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum perangkat daerah.

Usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang yang sesuai dengan program kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirumuskan bersama dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan. Rancangan akhir Renja Perubahan merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perubahan yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan



dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan ditetapkan bersama dengan seluruh Renja Perubahan OPD dalam Perkada tentang PERUBAHAN RKPD Kabupaten Mempawah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Pra RKA-SKPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya akan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2025.

2.5.3 Tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Berikut tabel usulan program kegiatan masyarakat dalam forum Musrenbang yang ditampung ke dalam Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Tabel 2.10 [TC 32 PMDN 86/2017]

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas Segedong Kecamatan Segedong	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	500.000.000	Rehabilitasi Puskesmas Segedong



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Pembangunan bidang sumber daya manusia dalam arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak”**. Peningkatan kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Secara khusus, arah pembangunan jangka panjang bidang SDM yaitu: Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan pemerataan kualitas dan relevansi mencakup kesehatan:

- a. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dan berkualitas bagi penduduk miskin; peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antardaerah dan antarkelompok penduduk; peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; dan peningkatan produksi, distribusi, dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, dan aman bagi penduduk, dengan harga yang terjangkau
- b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan perilaku sehat masyarakat; peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau; pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan; peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang lebih bermutu, serta peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan kesehatan jasmani dan mental masyarakat, melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga menuju pembentukan budaya olahraga; peningkatan pembiayaan kesehatan, melalui alokasi pembiayaan pemerintah yang lebih memadai, dan pengembangan asuransi kesehatan (sosial dan swasta).

Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memiliki tujuan strategis yaitu:

1. Menciptakan SDM yang berdaya saing berfokus pada peningkatan derajat kesehatan; dan
2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan Publik.



Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya status Kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan.
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tahun 2025 sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah 2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sebagaimana yang tertuang dalam RPD Kabupaten Mempawah 2025-2026, pada Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran tujuan daerah yang tertuang dalam tujuan pertama RPD kabupaten Mempawah 2025-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia”**. Tujuan ini untuk menyokong Misi daerah dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah yang Berkualitas. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah:



Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

Tujuan RPD	Indikator Tujuan/ Sasaran RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD (Renstra)	Indikator Tujuan/ Sasaran PD (Renstra)	Satuan	Target Kinerja pada Tahun ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia harapan hidup	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian	- Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	217	205	194	183	122
						- Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	19,5	18,6	17,6	16	16
						- Angka Kejadian Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	65	65	65	65	65
			Prevalensi stunting	Meningkatkan kualitas kesehatan	Menurunnya Angka Prevalensi spesifik Stunting	- Persentase ibu hamil KEK	Persen	13	13	11,5	10	10
						- Persentase balita Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Persen	3,8	3,8	3	2,5	2,5
						- Persentase Bayi Balita Wasting	Persen	7,5	7,5	7,3	7	7
						- Persentase Bayi Balita Underweight	Persen	14	14	13	12	12



Tujuan RPD	Indikator Tujuan/ Sasaran RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD (Renstra)	Indikator Tujuan/ Sasaran PD (Renstra)	Satuan	Target Kinerja pada Tahun ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai AKIP	Meningkatnya penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kategori	68	68	68	68	68



Guna meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, maka Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah bertujuan untuk “Meningkatkan Kualitas Kesehatan” Masyarakat Kabupaten Mempawah. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana, sasaran yang ingin dicapai harus jelas. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun penduduk yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelayanan Kesehatan berdasarkan Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Mempawah Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km²)	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK per km²
			DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN				
1	Jongkat	408,26	5		5	51.382	15.169	3,4	125,9
2	Segedong	260,60	6		6	26.422	7.722	3,4	101,4
3	Sungai Pinyuh	265,84	8	1	9	62.600	17.879	3,5	235,5
4	Anjungan	124,08	4	1	5	21.642	6.544	3,3	174,4
5	Mempawah Hilir	398,42	5	3	8	45.704	14.458	3,2	114,7
6	Mempawah Timur	199,45	6	2	8	34.681	10.309	3,4	173,9
7	Sungai Kunyit	442,79	12		12	29.720	9.174	3,2	67,1
8	Toho	244,87	8		8	24.227	7.068	3,4	98,9
9	Sadaniang	453,58	6		6	12.392	3.414	3,6	27,3
JUMLAH		2797,88	60	7	67	308.770	91.737	3,4	110,4

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 3.2, luas wilayah Kabupaten Mempawah yaitu 2797,88 km² yang terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan dengan jumlah penduduk adalah 308.770 orang pada tahun 2023. Dari data tersebut, diketahui bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Mempawah yaitu 110,4 km². Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah terdiri dari 14 puskesmas sebagaimana Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Daftar Puskesmas Se-Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Kode Puskesmas	Nama Puskesmas
1	Jongkat	1060061	JONGKAT
		1060062	WAIK HULU
2	Segedong	1060063	SEGEDONG
3	Sungai Pinyuh	1060064	SUNGAI PINYUH
		1060065	SUNGAI PURUN KECIL
4	Anjungan	1060066	ANJUNGAN
5	Mempawah Hilir	1060067	MEMPAWAH HILIR
6	Antibar	1060068	ANTIBAR
		1060069	SUNGAI BAKAU KECIL
7	Sungai Kunyit	1060070	SUNGAI KUNYIT
		1060071	SEMUDUN
8	Toho	1060072	TAKONG
		1060073	TOHO
9	Sadaniang	1060074	SADANIANG

Sumber : BPS



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi oleh faktor-faktor diantara yaitu:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Program kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat dipengaruhi oleh Visi dan Misi kepala daerah. Keterkaitan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus sesuai dengan Visi Daerah yakni pada Visi pertama “Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Kesehatan.

- b. mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- a) Jumlah program dan jumlah kegiatan

Pada tahun anggaran 2023, program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah terdiri atas 8 (delapan) Program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 111 (seratus sebelas) Sub Kegiatan. Pada tahun anggaran 2024, terdiri atas 7 (tujuh) program, 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 119 (seratus Sembilan belas) subkegiatan. Pada tahun anggaran 2025, terdiri atas 8 (delapan) program, 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan, dan 107 (seratus tujuh) subkegiatan.

- b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan di Kabupaten Mempawah.

- c) Total kebutuhan dana

Berdasarkan sumber pendanaan, berikut rincian anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah:



Tabel 3.4

Total Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah

No.	Sumber Dana	2023		2024		2025	
		Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
1	DAK	30.780.240.000	17,04%	31.682.748.262	24,33%	44.238.084.000	25,94
2	DAU	134.152.150.442	74,25%	84.676.424.316	65,02%	105.960.034.031	63%
3	JKN	15.742.512.136	8,71%	13.874.922.400	10,65%	20.304.812.342	12%
Total PAGU		180.674.902.578	100,00%	130.234.094.978	100,00%	170.502.930.373	100%

c. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahunan menetapkan program-program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 [TC 33 PMDN 86/2017]
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026



BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebesar Rp.170.502.930.373,00 didasari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah 2025-2026. Renja Perubahan yang dibuat ini merupakan pedoman bagi internal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus berpedoman pada indikator kinerja yang sudah tertuang pada Renja Perubahan 2025 dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Mempawah
Tahun Anggaran 2025

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MEMPAWAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				90 Persent ase	90 Persent ase	50.440.423.607,00	46.249.641.870,00	46.247.125.870,00	-50.440.423.607,00							0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				95 Persentase	95 Persentase	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Administrasi Keuangan				100 Persentase	100 Persentase	48.862.253.635,00	45.645.552.598,00	45.645.552.598,00	-3.216.701.037,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				440 Orang/ bulan	440 Orang/ bulan	48.685.613.635,00	45.468.912.598,00	45.468.912.598,00	-3.216.701.037,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	141.640.000,00	141.640.000,00	141.640.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah				100 Persentase	100 Persentase	81.160.000,00	81.160.000,00	76.770.000,00	-4.390.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	81.160.000,00	81.160.000,00	76.770.000,00	-4.390.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian				100 Persentase	100 Persentase	282.045.700,00	25.000.000,00	31.000.000,00	-251.045.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	257.045.700,00	0,00	0,00	-257.045.700,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				100 Persentase	100 Persentase	143.846.900,00	143.846.900,00	129.631.900,00	-14.215.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.499.200,00	11.499.200,00	11.499.200,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.668.500,00	25.668.500,00	25.668.500,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.679.200,00	28.679.200,00	28.679.200,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.785.000,00	-14.215.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persentase	100 Persentase	712.176.000,00	19.234.000,00	29.323.000,00	-682.853.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	610.308.000,00	0,00	0,00	-610.308.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	11.868.000,00	0,00	0,00	-11.868.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	19.234.000,00	29.323.000,00	-60.677.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persentase	100 Persentase	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persentase	100 Persentase	148.941.372,00	124.848.372,00	124.848.372,00	-24.093.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	22.848.300,00	22.848.300,00	22.848.300,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				249 Unit	249 Unit	78.962.472,00	78.962.472,00	78.962.472,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	6.900.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	-3.980.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	25.230.600,00	10.117.600,00	10.117.600,00	-15.113.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				100 Persen	100 Persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	60.245.198.000,00	36.332.021.000,00	35.124.148.000,00	-25.121.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip	Masyarakat Kabupaten Mempawah		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	22.895.198.000,00	10.378.150.000,00	10.378.150.000,00	-12.517.048.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				8 Unit	8 Unit	1.810.000.000,00	0,00	0,00	-1.810.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Unit	1 Unit	20.700.000.000,00	199.500.000,00	0,00	-20.700.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	8.100.000.000,00	586.453.000,00	586.453.000,00	-7.513.547.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				14 Unit	14 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	31.627.000,00	-8.373.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	0 Unit	0,00	157.904.000,00	157.904.000,00	157.904.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	6.600.000.000,00	6.859.217.000,00	5.859.217.000,00	-740.783.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	110.797.000,00	110.797.000,00	10.797.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Nilai Sakip Nilai Sakip			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Persentase	100 Persentase	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5079 Orang	5990 Orang	38.278.600,00	18.478.500,00	9.726.000,00	-28.552.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4848 Orang	5955 Orang	3.948.366.000,00	287.600.000,00	287.600.000,00	-3.660.766.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4617 Orang	5702 Orang	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18380 Orang	49922 Orang	15.000.000,00	10.000.000,00	7.395.000,00	-7.605.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48796 Orang	48796 Orang	15.000.000,00	4.695.600,00	2.585.600,00	-12.414.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				204777 Orang	199710 Orang	52.144.200,00	52.144.200,00	40.319.200,00	-11.825.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31549 Orang	34666 Orang	28.743.000,00	20.881.300,00	19.976.300,00	-8.766.700,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96894 Orang	96894 Orang	24.297.300,00	17.581.300,00	11.711.300,00	-12.586.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4065 Orang	4065 Orang	24.374.700,00	17.581.100,00	11.986.100,00	-12.388.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				648 Orang	648 Orang	14.813.000,00	7.594.400,00	4.794.400,00	-10.018.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4752 Orang	4752 Orang	34.250.500,00	20.493.900,00	14.968.900,00	-19.281.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5500 Orang	5500 Orang	25.982.500,00	19.536.200,00	17.751.200,00	-8.231.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	14.088.500,00	14.088.500,00	7.338.500,00	-6.750.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	121.981.980,00	92.516.980,00	85.794.952,00	-36.187.028,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.153.683.100,00	1.199.499.900,00	1.184.259.900,00	-6.969.423.200,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	34.753.900,00	96.476.900,00	88.336.900,00	53.583.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	170.552.060,00	170.552.060,00	153.596.384,00	-16.955.676,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	69.000.000,00	203.990.800,00	194.670.800,00	125.670.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	17.115.200,00	17.115.200,00	7.735.200,00	-9.380.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.939.200,00	98.639.700,00	94.024.700,00	78.085.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				527 Orang	527 Orang	13.760.000,00	13.760.000,00	7.630.000,00	-6.130.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				74120 Orang	74120 Orang	11.490.000,00	10.378.300,00	5.803.300,00	-5.686.700,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.232.302.600,00	590.028.600,00	580.028.600,00	-1.652.274.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	227.459.000,00	385.546.500,00	347.616.500,00	120.157.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	42.793.207.700,00	42.793.207.700,00	43.536.747.700,00	743.540.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	10.000.000,00	9.320.000,00	-5.680.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	47.982.500,00	47.982.500,00	47.982.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pravalensi Stunting Pravalensi Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	39.690.000,00	22.058.200,00	20.758.200,00	-18.931.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				14 Unit	14 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				14 Dokumen	14 Dokumen	19.070.006.000,00	0,00	0,00	-19.070.006.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	13.524.000,00	68.969.000,00	68.969.000,00	55.445.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	71.079.660,00	71.079.660,00	52.333.984,00	-18.745.676,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	39.376.800,00	36.751.000,00	23.404.500,00	-15.972.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4752 Orang	4752 Orang	21.092.500,00	0,00	0,00	-21.092.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				36 Orang	36 Orang	19.050.500,00	0,00	0,00	-19.050.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	3 Orang	18.050.500,00	0,00	0,00	-18.050.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	369.606.500,00	369.606.500,00	369.606.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Pravalensi Stunting Pravalensi Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan				4 Nilai	4 Nilai	44.781.000,00	44.781.000,00	36.951.000,00	-7.830.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	44.781.000,00	44.781.000,00	36.951.000,00	-7.830.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang dilakukan pengukuran Mutu				100 Persentase	100 Persentase	68.720.800,00	1.790.000,00	1.790.000,00	-66.930.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				14 Unit	14 Unit	68.720.800,00	1.790.000,00	1.790.000,00	-66.930.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandng disabilitas.	Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar (Persen)				85 Persentase	85 Persentase	2.662.498.600,00	3.295.172.600,00	3.275.252.000,00	-2.662.498.600,00							0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin praktik apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan optikal, UMOT				100 Persentase	100 Persentase	11.709.400,00	11.709.400,00	1.159.400,00	-10.550.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.595.800,00	5.595.800,00	545.800,00	-5.050.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.113.600,00	6.113.600,00	613.600,00	-5.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi SDM Kesehatan Sesuai standar				100 Persentase	100 Persentase	2.631.379.200,00	2.626.879.200,00	2.622.791.100,00	-8.588.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.147.800,00	14.147.800,00	5.747.800,00	-8.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				110 Orang	110 Orang	2.600.000.000,00	2.595.500.000,00	2.604.351.900,00	4.351.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.231.400,00	17.231.400,00	12.691.400,00	-4.540.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan				100 Persentase	100 Persentase	19.410.000,00	656.584.000,00	651.301.500,00	631.891.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				70 Orang	70 Orang	19.410.000,00	656.584.000,00	651.301.500,00	631.891.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian, Alkes dan Makanan Minuman				100 Persentase	100 Persentase	57.766.237,00	405.798.029,00	396.674.529,00	-57.766.237,00							0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan optikal, UMOT				100 Persentase	100 Persentase	11.064.500,00	48.930.500,00	42.207.000,00	31.142.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	12 Dokumen	11.064.500,00	48.930.500,00	42.207.000,00	31.142.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase SPP IRT yang diterbitkan				100 Persentase	100 Persentase	11.701.737,00	106.371.237,00	103.971.237,00	92.269.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				90 Dokumen	90 Dokumen	11.701.737,00	106.371.237,00	103.971.237,00	92.269.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				100 Persentase	100 Persentase	20.000.000,00	18.699.792,00	18.699.792,00	-1.300.208,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	18.699.792,00	18.699.792,00	-1.300.208,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan Post Market Peredaran pangan				100 Persentase	100 Persentase	15.000.000,00	231.796.500,00	231.796.500,00	216.796.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 Unit	25 Unit	15.000.000,00	231.796.500,00	231.796.500,00	216.796.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persen)				100 Persen tase	100 Persen tase	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya advokasi dan pemberdayaan kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat di sekolah, desa, kecamatan, kabupaten.				100 Persentase	100 Persentase	83.289.500,00	83.289.500,00	72.954.500,00	-10.335.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	83.289.500,00	83.289.500,00	72.954.500,00	-10.335.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya rumah tangga hidup sehat				100 Persentase	100 Persentase	60.496.200,00	60.496.200,00	155.175.524,00	94.679.324,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	60.496.200,00	60.496.200,00	155.175.524,00	94.679.324,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)				100 Persentase	100 Persentase	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	14.543.200,00	60.623.200,00	156.258.200,00	141.715.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.630.216.414,00	3.339.968.750,00	3.213.682.650,00	-416.533.764,00							0,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.630.216.414,00	3.339.968.750,00	3.213.682.650,00	-416.533.764,00							0,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				75 Persent ase	-	150.233.150,00	382.899.850,00	253.433.750,00	-150.233.150,00							0,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				61 Persentase	-	7.118.050,00	7.118.050,00	6.100.550,00	-1.017.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.118.050,00	7.118.050,00	6.100.550,00	-1.017.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100 Persentase	100 Persentase	143.115.100,00	375.781.800,00	247.333.200,00	104.218.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	0 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	133.700.000,00	113.700.000,00	113.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	12.190.700,00	66.190.700,00	64.098.200,00	51.907.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	12.930.000,00	9.535.000,00	-5.465.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	115.924.400,00	102.961.100,00	0,00	-115.924.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)mCPR)				85 Persentase	100 85 Persentase	3.479.983.264,00	1.814.868.900,00	1.862.748.900,00	-3.479.983.264,00							0,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh Wilayah				100 Persentase	100 Persentase	3.397.172.064,00	861.391.900,00	916.136.900,00	-2.481.035.164,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	18.550.000,00	18.550.000,00	15.300.000,00	-3.250.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				9 Laporan	9 Laporan	3.212.853.000,00	441.000.000,00	441.000.000,00	-2.771.853.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																			
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	0,00	64.700.000,00	-70.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																			
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																			
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	0 Dokumen	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.634.000,00	12.634.000,00	10.286.500,00	-2.347.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				18 Organisasi	18 Organisasi	18.135.064,00	264.207.900,00	259.850.400,00	241.715.336,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase status PUS anggota Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS)				100 Persentase	100 Persentase	15.499.600,00	551.499.600,00	551.499.600,00	536.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				200 Orang	200 Orang	15.499.600,00	551.499.600,00	551.499.600,00	536.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				85 Persentase	1 Laporan	12.191.600,00	321.477.400,00	317.112.400,00	304.920.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	0 Orang	0,00	266.055.000,00	266.055.000,00	266.055.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.191.600,00	35.822.400,00	31.457.400,00	19.265.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Persentase pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui Poktan BKB,BKR, dan UPPKS</i>				85 Persentase	85 Persentase	55.120.000,00	80.500.000,00	78.000.000,00	22.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>				9 Laporan	9 Laporan	18.900.000,00	18.900.000,00	16.400.000,00	-2.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				30 Kampung	30 Kampung	36.220.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00	25.380.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Peningkatan Pelayanan Keluarga Sejahtera				22 Persent ase	100 persen	0,00	1.142.200.000,00	1.097.500.000,00	0,00							0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan Keluarga Sejahtera</i>				100 Persentase	100 persen	0,00	158.800.000,00	158.800.000,00	158.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah PPKS di Kecamatan Segedong, Sadaniang dan Mempawah Timur		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				133 Unit	133 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	1 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	983.400.000,00	938.700.000,00	938.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	447.000.000,00	447.000.000,00	447.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	536.400.000,00	491.700.000,00	491.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS MEMPAWAH								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00					0,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	896 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6570 Orang	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	321.733.000,00	321.733.000,00	321.733.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 0	0,00	3.309.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	6.500.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	111.983.000,00	111.983.000,00	111.983.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	2.476.040.350,89	166.040.350,89	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	124.043.000,00	269.460.596,00	275.969.231,00	151.926.231,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	211.650.000,00	208.150.000,00	208.150.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS BAKAU KECIL																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	297 Orang	0,00	47.800.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2222 Orang	0,00	115.959.543,00	116.340.900,00	116.340.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	193.431.186,00	193.543.000,00	193.543.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	30.912.721,00	30.881.000,00	30.881.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	924.219.000,00	924.219.000,00	1.100.939.916,56	176.720.916,56	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	171.977.000,00	314.280.546,00	316.560.852,00	144.583.852,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS ANTIBAR								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00					0,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Masyarakat Kabupaten Mempawah		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	381 Orang	0,00	60.609.000,00	60.609.000,00	60.609.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2794 Orang	0,00	80.600.000,00	80.600.000,00	80.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.300.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															</					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	1.171.000.000,00	1.171.000.000,00	1.278.653.032,45	107.653.032,45	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	170.590.000,00	322.851.596,00	323.272.124,00	152.682.124,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	46.700.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	24.927.000,00	24.967.000,00	24.967.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS SUNGAI KUNYIT								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	398 Orang	0,00	103.200.000,00	103.200.000,00	103.200.000,00		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidkian Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3013 Orang	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	198.068.000,00	198.068.000,00	198.068.000,00		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	9.913.000,00	9.913.000,00	9.913.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	1.229.175.000,00	1.229.175.000,00	1.310.984.777,13	81.809.777,13	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	181.750.000,00	341.894.596,00	339.235.124,00	157.485.124,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	12.860.000,00	12.860.000,00	12.860.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	129.400.000,00	129.400.000,00	129.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS SEMUDUN							214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Masyarakat Kabupaten Mempawah		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	181 Orang	0,00	78.899.500,00	78.899.500,00	78.899.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1358 Orang	0,00	80.400.000,00	80.400.000,00	80.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	202.321.000,00	202.321.000,00	202.321.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	61.963.000,00	61.963.000,00	61.963.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	804.000.000,00	804.000.000,00	985.447.873,10	181.447.873,10	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	164.889.000,00	328.898.096,00	335.550.392,00	170.661.392,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		FKTP RAWAT INAP PUSKESMAS SUNGAI PINYUH								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	771 Orang	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5850 Orang	0,00	90.600.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	470.679.000,00	470.679.000,00	470.679.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	20.668.800,00	20.668.800,00	20.668.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	2.792.466.000,00	2.792.466.000,00	3.367.626.733,23	575.160.733,23	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	472.863.000,00	657.204.508,00	625.862.396,00	152.999.396,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS SUNGAI PURUN KECIL								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	439 Orang	0,00	27.000.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3302 Orang	0,00	71.400.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.000.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	170.564.000,00	170.564.000,00	170.564.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.100.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	18.380.700,00	16.720.900,00	16.720.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	4.050.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	76.200.000,00	76.909.800,00	76.909.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	806.000.000,00	806.000.000,00	1.010.610.797,17	204.610.797,17	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Sungai Pinyuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	187.464.000,00	352.971.596,00	349.772.252,00	162.308.252,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	8.100.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				-	1 Dokumen	0,00	89.550.000,00	89.550.000,00	89.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.660.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS SEGEDONG								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	514 Orang	0,00	74.200.000,00	74.200.000,00	74.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3846 Orang	0,00	67.150.000,00	67.150.000,00	67.150.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	264.288.000,00	264.288.000,00	264.288.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	7.700.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	4.316.600,00	4.316.600,00	4.316.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	35.259.100,00	35.259.100,00	35.259.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	1.466.216.000,00	1.466.216.000,00	1.738.826.049,46	272.610.049,46	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	181.184.000,00	329.383.796,00	331.585.768,00	150.401.768,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				-	1 Dokumen	0,00	65.800.000,00	63.050.000,00	63.050.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	10.775.400,00	10.775.400,00	10.775.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		FKTP RAWAT INAP PUSKESMAS JUNGKAT								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan</i>				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	489 Orang	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	3643 Orang	0,00	83.600.000,00	94.200.000,00	94.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	3.800.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	11.900.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	286.839.000,00	276.239.000,00	276.239.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				-	1 Dokumen	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	23.700.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	29.800.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	17.100.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	92.513.000,00	102.113.000,00	102.113.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	1.587.042.000,00	1.587.042.000,00	2.230.050.452,14	643.008.452,14	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	14		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	387.385.000,00	511.909.908,00	546.500.176,00	159.115.176,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				-	1 Dokumen	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	30.880.000,00	30.880.000,00	30.880.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS WAJOK HULU							214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan</i>				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	509 Orang	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3819 Orang	0,00	50.600.000,00	50.600.000,00	50.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	326.207.000,00	326.207.000,00	326.207.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	63.700.000,00	63.700.000,00	63.700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	852.721.000,00	852.721.000,00	1.459.016.857,90	606.295.857,90	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	192.455.000,00	359.630.596,00	359.022.043,00	166.567.043,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	4.140.100,00	4.140.100,00	4.140.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.868.900,00	1.868.900,00	1.868.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan lanjutan				-	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	11.894.000,00	11.894.000,00	11.894.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS ANJUNGAN							214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	419 Orang	0,00	92.909.000,00	92.909.000,00	92.909.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3175 Orang	0,00	109.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	216.997.000,00	216.997.000,00	216.997.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	44.263.000,00	44.263.000,00	44.263.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	994.721.000,00	994.721.000,00	1.232.325.037,10	237.604.037,10	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	189.393.000,00	336.544.596,00	337.005.124,00	147.612.124,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	89.400.000,00	89.400.000,00	89.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	25.611.000,00	25.611.000,00	25.611.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS TAKONG								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	256 Orang	0,00	52.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1982 Orang	0,00	208.000.000,00	184.600.000,00	184.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	2.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	196.955.000,00	375.476.596,00	368.313.892,00	171.358.892,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	16.760.000,00	19.760.000,00	19.760.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	550.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	63.500.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS TOHO								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	209 Orang	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1588 Orang	0,00	82.200.000,00	66.850.000,00	66.850.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	7.200.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	164.763.000,00	164.763.000,00	164.763.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	10.900.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	6.600.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	5.230.800,00	4.030.800,00	4.030.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	13.800.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	52.716.600,00	49.966.600,00	49.966.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	653.349.000,00	653.349.000,00	671.089.829,53	17.740.829,53	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	159.810.000,00	317.035.596,00	317.035.596,00	157.225.596,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	11.809.000,00	14.059.000,00	14.059.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	51.850.000,00	51.850.000,00	51.850.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	31.161.600,00	31.161.600,00	31.161.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		FKTP RAWAT JALAN PUSKESMAS SADANIANG								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-44.136.154.185,00					0,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							211.008.868.144,00	164.392.423.899,00	167.289.247.723,00	-43.719.620.421,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	157.689.850.800,00	114.080.633.500,00	116.831.128.100,00	-157.689.850.800,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan				-	100 persen	97.331.151.000,00	77.702.041.500,00	81.668.239.100,00	-15.662.911.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	231 Orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mempawah, Sadaniang, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Sadaniang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1894 Orang	0,00	154.000.000,00	123.200.000,00	123.200.000,00	Kab. Mempawah, Sadaniang, Semua Kel/Desa Kab. Mempawah, Sadaniang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	16.200.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	198.641.000,00	234.841.000,00	234.841.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	14.250.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	16.850.000,00	20.450.000,00	20.450.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	94.663.000,00	110.163.000,00	110.163.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	763.795.000,00	763.795.000,00	829.993.411,59	66.198.411,59	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	149.236.000,00	310.432.828,00	307.730.668,00	158.494.668,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	12.009.000,00	9.509.000,00	9.509.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	2.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	146.600.000,00	131.100.000,00	131.100.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	158.328.900,00	361.177.900,00	539.067.224,00	-158.328.900,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.543.200,00	217.392.200,00	310.937.200,00	296.394.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	J U M L A H								214.639.084.558,00	167.732.392.649,00	170.502.930.373,00	-560.936.702.193,95							0,00		



Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, pada tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah menjalankan 8 (delapan) program, 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan, dan 107 (seratus tujuh) subkegiatan. Dari kedelapan program, urusan kesehatan membawahi program 4 (empat) program yaitu: program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Program yang menjadi esensi urusan bidang kesehatan yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat karena terdapat 12 (dua belas) subkegiatan SPM bidang kesehatan di dalamnya. Kemudian terdapat urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program yaitu program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana (KB), program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS). Urusan penunjang pemerintahan bidang kesehatan tercantum dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp170.502.930.373,00,00, urusan bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp.167.289.247.723,00, dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp. 3.213.682.650,00. Program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan di Kabupaten Mempawah dengan sasaran yaitu masyarakat umum sebagai target pelayanan kesehatan serta pegawai ASN maupun honor sebagai pelaksana program kegiatan.



BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2025 didasari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah 2025-2026. Renja Perubahan yang dibuat ini merupakan pedoman bagi internal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus berpedoman pada indikator kinerja yang sudah tertuang pada Renja Perubahan 2025.

Renja Perubahan merupakan suatu hal yang penting dalam sistem Pemerintahan. Renja Perubahan yang dibuat secara konseptual merupakan pedoman perencanaan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan daerah. Sebagai dokumen perencanaan strategis untuk menjabarkan potret permasalahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah tahun 2025 diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2026 yaitu menurunnya angka kesakitan dan kematian, menurunnya angka prevalensi spesifik stunting, dan meningkatnya pelayanan prima kepada publik. Upaya menurunkannya angka kesakitan dan kematian yaitu melalui penguatan puskesmas dan jejaringnya, penguatan manajemen program, dan meningkatkan peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan.

Strategi penguatan puskesmas dan jejaringnya dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau seluruh masyarakat meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular (IMS) dan



HIV/AIDS, mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai ketentuan dan dapat dilaksanakan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.



Hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah adalah:

1. Melibatkan semua pihak terkait dalam menentukan program dan kegiatan prioritas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis dengan instansi vertikal dan horizontal;
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
4. Memberdayakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan khususnya yang melibatkan perubahan perilaku hidup bersih, sehat dan sanitasi total berbasis masyarakat;
5. Meningkatkan dukungan dan komitmen pelaksanaan Forum Satu Data untuk mencapai integrasi dan sinkronisasi data guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang berkualitas.

Mempawah, Agustus 2025

Plt.Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Mempawah



dr. DAVID WIPRIANIPAR, M.Kes
NIP. 19720705 200112 1 003



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH

**Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan
Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah (78914)**

email :rs_rubini@yahoo.com

KATAPENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Renja Perubahan RSUD dr. Rubini Mempawah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah tahun 2025–2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis.

Mempawah, 5 Agustus 2025

DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH



dr. David V.P Sianipar, M.Kes
Pembina TK.I
NIP. 19720705 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH TAHUN LALU	 10
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	 10
2.1. 2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	 23
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH.....	 42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	 46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	 49

BAB III	:	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	53
		3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	53
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	54
		3.3 Program dan Kegiatan	56
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V	:	PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah TA. 2025 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah RPD Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024-2026.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan. RSUD dr. Rubini merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016.

Perubahan status dari Perangkat Daerah biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.

RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas sehingga perkembangan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah menjadi PPK-BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah di masa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Dalam penyelenggaraannya, rumah sakit membutuhkan biaya operasional dan investasi yang besar sehingga perlu didukung oleh ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karenanya RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang penjabaran program dan kegiatannya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam

menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan Tahun 2025 yang disepakati Bersama di lingkup RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini juga mengacu pada RPD Tahun 2025-2026 Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dan akan dipakai sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate outcome) yang diharapkan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang disertai penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, perlu didukung kesiapan sumberdaya yang handal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah telah memiliki kemampuan pelayanan minimal 4 (empat) pelayanan dasar, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533/MENKES/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. Pelayanan dasar yang mampu dilayani di RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yaitu : Kebidanan, Penyakit Dalam, Bedah dan Anak serta ditambah dengan pelayanan spesialisasi paru, kesehatan jiwa, patologi anatomi kesehatan gigi anak dan kemampuan fasilitas penunjang diagnose yaitu Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi dan Instalasi Radiologi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1039);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
36. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 75);
37. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Rubini Mempawah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan pengukuran kinerja yaitu pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Menjadi pedoman dalam menjaga upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. menyediakan dokumen rencana kerja 2025 serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yaitu pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

Membahas rencana kerja dan pendanaan program kegiatan dan sub kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Bab V PENUTUP

Membahas dan menjabarkan mengenai kesimpulan penyusunan Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Lalu

Pengukuran Kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra maupun Renja, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja target dan realisasi program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah di tahun 2024 (n 2) dan tahun 2025 (tahun berjalan). Pada anggaran tahun 2024, jumlah anggaran belanja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebesar Rp.118.332.502.494,00 terdiri atas dilaksanakan 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan.

Berdasarkan Aspek pelayanan umum dalam Bidang Kesehatan pada pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berikut Program/Kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.a

Program/Kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN 2024)		
					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1					2	3		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit	100%
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	2 Unit	100%
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	2 Paket	100%
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	5 Orang	5 Orang	100%
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	02	2.03	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8 Dokumen	6 Dokumen	75,00%
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	1 Unit	1 Unit	100%
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota			
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	-	0,00%
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	450 Orang	-	0,00%
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	100%
					CAPAIAN RATA-RATA			84,62%

Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah

Tabel 2.1.b
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. RUBINI MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET		REALISASI		%
1	2	3	4		5		6
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	86	%	92,90	%	108,02
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	Nilai	87	Nilai	103,57
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			Berhasil				

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 78.515.180.700,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 73.913.181.540,00

Tabel 2.1.c
CORE BUSSINESS

**SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)
			TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Masyarakat	Rp 13.432.449.448,00	Rp 11.419.772.623,00	85,02	108,02
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 65.082.731.252,00	Rp 62.493.408.917,00	96,02	103,57
		JUMLAH	Rp 78.515.180.700,00	Rp 73.913.181.540,00		

Berikut merupakan pencapaian kegiatan SPM bidang kesehatan RSUD dr. Rubini Mempawah dari kurun waktu 2023-2024 :

Tabel 2.1.d

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH TAHUN 2023					
NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1.	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
		1. Kemampuan menangani life saving di Unit Gawat Darurat	100%	100%	100%
		2. Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam	100%	100%	100%
		3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS yang masih berlaku.	100%	100%	94%
		4. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	1,6 menit
		5. Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat	≤ 2/1000	≤ 2/1000	2,9
		6. Tidak Adanya Keharusan Untuk Membayar Uang Muka	100%	100%	100%
		7. Kepuasan Pelanggan Pada Pelayanan Gawat	≥ 80%	≥ 80%	82%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
2.	PELAYANAN RAWAT JALAN				
		1. Dokter pemberi pelayanan di klinik spesialis	100%	100%	100%
		2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan sesuai dengan rumah sakit tipe C	100%	100%	100%
		3. Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		4. Waktu tunggu dirawat jalan	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	54,6 menit
		5. Pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani dengan startegi DOTS	100%	100%	100%
		6. Penegakkan Diagnosa TB melalui pemeriksaan TCM	60%	60%	100%
		7. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS	100%	100%	100%
		8. Pelayanan balita stunting yang dilayani di Rumah Sakit	100%	100%	100%
		9. Pelayanan pasien geriatri	100%	100%	100%
		10. Kepuasan Pelanggan Pada Rawat Jalan	≥ 80%	≥ 80%	86%

3.	PELAYANAN RAWAT INAP				
		1. Pemberi Pelayanan Rawat Inap	100 % (Dokter Spesialis / Dokter Umum/ Apoteker/ Perawat, Bidan Dan Gizi) Minimal D3	100 % (Dokter Spesialis / Dokter Umum/ Apoteker/ Perawat, Bidan Dan Gizi) Minimal D3	100%
		2. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	100%
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100% (Pelayanan spesialis : penyakit dalam, bedah, anak, kebidanan)	100% (Pelayanan spesialis : penyakit dalam, bedah, anak, kebidanan)	100%
		4. Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)	≥ 80%	≥ 80%	100%
		5. Kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤ 1%	≤ 1%	0,45%
		6. Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1%	≤ 1%	0,05%
		7. Kematian pasien lebih dari 48 jam	≤ 0,25%	≤ 0,25%	2%
		8. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	≤ 5%	8%
		9. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	100%
		10. Bed Occupancy Rate – BOR	≥ 60 %	≥ 60 %	72,1%
		11. Average Length Of Stay - ALOS (hari)	≤ 5 hari	≤ 5 hari	3 hari
		12. Bed Turn Over – BTO (kali)	40 - 50 kali	40 - 50 kali	80 kali
		13. Turn Over Interval - TOI (hari)	≤ 3 hari	≤ 3 hari	1,5 hari
		14. Pasien rawat inap yang di rujuk	≤ 5%	≤ 5%	2%
		15. Pasien yang memperoleh informasi pre-operatif	100%	100%	100%
		16. Kepuasan Pelanggan Rawat Inap	≥ 80%	≥ 80%	86%
4.	PELAYANAN PASIEN MISKIN				
		1. Jumlah Pasien Miskin Yang Dirawat	100%	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
5.	PELAYANAN BEDAH SENTRAL				
		1. Waktu Tunggu Operasi Elektif	≤ 2 Hari	≤ 2 Hari	67%
		2. Kejadian Kematian di Meja Operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	0%
		3. Tidak adanya Kejadian Operasi Salah Sisi	100%	100%	100%
		4. Tidak Adanya Kejadian Operasi Salah Orang	100%	100%	100%
		5. Tidak Adanya Kejadian Salah Tindakan pada Operasi	100%	100%	100%
		6. Tidak Adanya Kejadian Tertinggal Benda Asing pada tubuh Pasien setelah Operasi	100%	100%	100%
		7. Komplikasi Anastesi Karena Overdosis, Reaksi Anastesi dan Salah Penempatan Endo Tracheal Tube	≤ 5 %	≤ 5 %	0%

6.	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI				
		1. Pemberian Pelayanan Persalinan Normal	100% (Dokter spesialis kandungan, dokter umum dan bidan minimal D3)	100% (Dokter spesialis kandungan, dokter umum dan bidan minimal D3)	100%
		2. Pemberian Pelayanan Persalinan Dengan Penyulit	100% (Dokter spesialis Kebidanan)	100% (Dokter spesialis Kebidanan)	100%
		3. Pemberian Pelayanan Persalinan Dengan Tindakan Operasi.	100% (Dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak)	100% (Dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak)	100%
		4. Kemampuan Menangani BBLR 1500 - 2500 gr	≥ 90%	≥ 90%	99%
		5. Pertolongan Persalinan Melalui Sectio Caesaria	≤ 25%	≤ 25%	72%
		6. Konseling Keluarga Berencana Mantap	100%	100%	100%
		7. Tidak Ada Kejadian Kematian Ibu Bersalin	100%	100%	100%
		8. Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir	100%	100%	67%
		9. Kepuasan Pelanggan	≥80 %	≥80 %	81%
7.	PELAYANAN INTENSIF				
		1. Rata-Rata Pasien yang Kembali ke Perawatan Intensif dengan Kasus yang sama <72 Jam	≤ 3 %	≤ 3 %	0,48%
		2. Pemberi Pelayanan Unit Intensive	100% (Dokter spesialis Penyakit Dalam, dokter spesialis sesuai dengan kasus terkait, perawat minimal D3 mahir ICU, ICCU)	100% (Dokter spesialis Penyakit Dalam, dokter spesialis sesuai dengan kasus terkait, perawat minimal D3 mahir ICU, ICCU)	100%
8.	PELAYANAN RADIOLOGI				
		1. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Thorax	≤ 60 menit	≤ 60 menit	5 menit
		2. Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen	≤ 2%	≤ 2%	0,03%
		3. Kepuasan Pelanggan	≥80 %	≥80 %	75%
9.	PELAYANAN LABORATORIUM				
		1. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Cito	≤ 120 Menit	≤ 120 Menit	75 menit
		2. Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	100%	100%	100%
		3. Kepuasan Pelanggan	≥80 %	≥80 %	81%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
10.	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN				
		1. Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Tingkat Direksi	100%	100%	100%
		2. Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%
		3. Ketepatan waktu pengusulan naik pangkat	100%	100%	100%
		4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%
		5. Karyawan Yang Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam Pertahun	≥ 60 %	≥ 60 %	65%
		6. Cost Recovery	≥ 40 %	≥ 40 %	173%
		7. Ketepatan Waktu Pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap	< 3 jam	< 3 jam	2
		8. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%
11	Pelayanan Farmasi	1. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	≤ 30 menit	≤ 30 menit	22 menit
		2. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	44 menit
		3. Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Dalam Pemberian Obat	≥ 90%	≥ 90%	100%
		4. Penulisan Resep Sesuai Formularium	100%	100%	100%
		5. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	83%
12	Pelayanan Rekam Medik	1. Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 2 x 24 Jam Setelah Pelayanan	100%	100%	95%
		2. Kelengkapan Informed Consent Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas	100%	100%	100%
		3. Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	100%
13.	Pelayanan Gizi				
		1. Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pada Pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	32%
		2. Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien	≤ 30 %	≤ 30 %	20%
		3. Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Diet	≥ 95 %	≥ 95 %	100%
		4. Jumlah Konsultasi Gizi Rawat Inap Yang Terlayani	≥ 90 %	≥ 90 %	100%
14.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit				
		1. Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Alat 2. Karena alat kesehatan rusak total	≥ 80 %	≥ 80 %	100%
		2. Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat	100%	100%	82%
		3. Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi	100%	100%	99,07%
15.	Pelayanan Transfusi Darah				
		1. Pemenuhan Kebutuhan Darah Bagi Setiap Pelayanan Tranfusi	100%	100%	100%
		2. Kejadian Reaksi Tranfusi	≤ 0,01%	≤ 0,01%	0%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
16.	Pelayanan Pengolahan Limbah / Sanitasi Rumah Sakit				
		1. Baku Mutu Limbah Cair a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6 - 9	100%	100%	100% 13,5 61,7 13,7 6,6
		2. Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai Dengan Aturan	100%	100%	100%
NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
17.	Pelayanan Rehabilitasi Medik				
		1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50%	≤ 50%	21,9%
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%	87%
18.	Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah				
		1. Waktu Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah	24 jam	24 jam	100%
		2. Respon Time Pelayanan Ambulance Untuk Masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	≤ 30 menit	100%
19.	Pelayanan Pemulasan Jenazah				
		1. Waktu tanggapan pelayanan pemulasan jenazah	≤ 120 menit	≤ 120 menit	100%
20.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi				
		1. Tersedianya Anggota Tim PPI RS Yang Terlatih	≥ 75%	≥ 75%	81%
		2. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%
		3. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial HAI (Health Care Associated Infection) di Rumah Sakit	≥ 75%	≥ 75%	100%
21.	Pelayanan Laundry				
		1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	96%
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	100%	100%	100%

Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit =

$$\frac{\text{Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit}}{\text{Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM)}} \times 100 = \frac{91}{99} \times 100 = 91,92$$

Persentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) /pasien terhadap pelayanan pada Tahun 2023 sebesar 85 Nilai dari target sebesar 80 Nilai atau dengan realisasi sebesar 106,25%.

Berdasarkan tingkat capaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Jasa (Kesehatan) khususnya di RSUD Dokter Rubini Mempawah dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil”. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan jasa kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan Rumus Perhitungannya sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) =

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang

Total Unsur yang terisi

SKM unit Pelayanan x 25

= 30,57/9 x 25 = 84,90 ==== 85 Nilai

Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024 =

Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit x 100 = 92 x 100 = 92,90

Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM) 99

Pencapaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dengan rumus yaitu Total Nilai Capaian SPM Rumah Sakit 92 (sembilan puluh dua) dibagi dengan Total Unsur Standar Pelayanan Minimal (SPM) 99 (sembilan puluh sembilan) dengan nilai 92,90 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh) melebihi Target 86% sehingga Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal **Berhasil** dapat dilihat pada Tabel 2.1.e Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit di bawah ini :

Tabel 2.1.e
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT
TAHUN 2024

No	Unit	Total Seluruh Indikator Mutu SPM	Total Indikator sudah Tercapai	%	Total Indikator Belum Tercapai	Uraian Indikator yang belum tercapai
1	Pelayanan Gawat Darurat	7	5	85,7%	2	Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat Pemberi pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS yang masih berlaku.
2	Pelayanan Rawat Jalan	10	10	100%	0	
3	Pelayanan Rawat Inap	16	15	93,7%	1	Kematian pasien lebih dari 48 jam
4	Pelayanan Pasien Miskin	1	1	100%	0	-
5	Pelayanan Bedah Sentral	7	7	100%	0	-
6	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	9	7	77,8%	2	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir
7	Pelayanan Intensif	2	2	100%	0	
8	Pelayanan Radiologi	3	3	100%	0	
9	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	3	3	100%	0	-
10	Administrasi dan Manajemen	8	8	100%	0	-
11	Pelayanan Farmasi	5	5	100%	0	-

No	Unit	Total Seluruh Indikator Mutu SPM	Total Indikator sudah Tercapai	%	Total Indikator Belum Tercapai	Uraian Indikator yang belum tercapai
12	Pelayanan Rekam Medis	3	3	100%	0	
13	Pelayanan Gizi	4	4	100%	0	
14	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	3	1	33,3%	2	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi
15	Pelayanan Tranfusi Darah	2	2	100%	0	-
16	Pelayanan Pengolahan Limbah/Sanitasi Rumah Sakit	5	5	100%	0	
17	Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)	3	3	100%	0	
18	Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah	2	2	100%	0	
19	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	1	1	100%	0	
20	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	3	3	100%	0	-
21	Pelayanan Laundry	2	2	100%	0	
Total		99	92	92,9%	7	

Persentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) /pasien terhadap pelayanan pada Tahun 2024 sebesar 87 Nilai dari target sebesar 84 Nilai atau dengan realisasi sebesar 103,57%. Dengan Rumus Perhitungannya sebagai berikut :

Rumus :	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) =	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang
		Total Unsur yang Terisi SKM Unit Pelayanan x 25

$$\begin{aligned}
 &\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024} = \\
 &\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \\
 &\frac{\text{SKM unit Pelayanan x 25}}{= \frac{31,25}{9} \times 25 = 86,80 \text{ ===== } 87 \text{ Nilai}}
 \end{aligned}$$



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 87 dibandingkan target nilai 84 atau dengan realisasi sebesar 103,57% sehingga nilai capaian sasaran berhasil.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan .

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, program/Kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) indikator belum tercapai dari 99 (sembilan puluh Sembilan) Total seluruh Indikator Mutu SPM dari unit pelayanan.

Capaian yang tidak memenuhi target kinerja:

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Capaian Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV tahun 2024 sebesar 96,27% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Untuk Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS indikator mutu SPM tercapai 100%.

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Capaian Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun 2024 sebesar 98,19% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Untuk Pelayanan Gizi indikator mutu SPM tercapai 100%.

c. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Capaian Operasional Pelayanan Rumah Sakit tahun 2024 sebesar 63,72% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Untuk Operasional Pelayanan Rumah Sakit indikator mutu SPM belum tercapai 100% dikarenakan ada Jenis Pelayanan :

Pelayanan gawat darurat Indikator SPM yaitu : Pemberi pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS yang masih berlaku - Penyebab : Ada mutasi dan rolling petugas di IGD,

Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat – Penyebab :

1. Kondisi pasien yang masuk ke IGD sudah dalam kondisi kritis,
2. berdasarkan penilaian triage dalam level 1 yaitu memerlukan Tindakan resusitasi,
3. masih terdapatnya tenaga perawat dan dokter yang belum terlatih system
4. Sistem pelayanan pre hospital yang perlu ditingkatkan
5. RSUD dr. Rubini masih menjadi satu-satunya RS rujukan di Kabupaten.

Pelayanan Rawat Inap Indikator SPM yaitu : Kematian pasien lebih dari 48 jam – Penyebab :

1. pasien yang masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis
2. Proses rujukan pada kasus kegawatdaruratan ke faskes yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lama,
3. Pasien tidak mau di rujuk ke RS yang lengkap sarana penanganan penyakitnya

Pelayanan Persalinan dan Perinatologi Indikator SPM yaitu : Pertolongan Persalinan Melalui Sectio Caesaria – Penyebab :

1. Kasus Kebidanan dengan penyulit yang tinggi
2. RSUD dr. Rubini satu satunya rumah sakit Pelayanan rujukan pada pasien Kebidanan di Kab.mempawah
3. RSUD dr. Rubini merupakan RS satu-satunya RS dengan pelayanan rujukan di kabupaten mempawah utk pasien kebidanan dan kandungan.

Indikator SPM Yaitu Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir – Penyebab :

1. Bayi dibawa pulang sebelum waktu 48 jam
2. Bayi kecil/prematur/ Bayi dalam kondisi kritis
3. BHP kurang karena harus menunggu dikirim dari RS Sardjito Yogyakarta

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Indikator SPM Yaitu Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat – Penyebab : Peralatan yang diperlukan untuk perawatan membutuhkan waktu dalam proses pemesanan. Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi – Penyebab : Terbatasnya anggaran untuk kalibrasi ala-alat.

d. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Capaian Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya tahun 2024 sebesar 80,81% dengan demikian belum memenuhi target 100%. Untuk Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya indikator mutu SPM tercapai 100%.

e. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota

Capaian Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota tahun 2024 sebesar 85,20% dengan demikian belum memenuhi target 100% di karenakan penundaan untuk Survey Akreditasi Tahun 2024.

f. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Capaian Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan tahun 2024 sebesar 95,27% dengan demikian belum memenuhi target 100%.

g. **Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar**

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar tahun 2024 sebesar 0,00% dengan demikian belum memenuhi target 100% dikarenakan adanya Refocusing Anggaran tidak dapat dilaksanakan karena untuk belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19 Non ASN untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Penanganan COVID-19 dimana Pandemi Covid 19 sudah dicabut oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak ada realisasi Tahun 2024.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data program/Kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 pada Tabel 2.1.e, terdapat 16 (enam belas) dari 21 (dua puluh satu) Jenis Pelayanan Indikator SPM yang memenuhi target kinerja 100% yang direncanakan yaitu Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Pasien Miskin, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan Intensif, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Transfusi Darah, Pelayanan Pengolahan Limbah / Sanitasi Rumah Sakit, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah, Pelayanan Pemulasan Jenazah, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Pelayanan Laundry dengan demikian sudah melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung yang mendorong tercapainya target yaitu optimalisasi Operasional Pelayanan Rumah Sakit dalam peningkatan pelayanan Kesehatan dengan di tunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai dengan standar di rumah sakit.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yang direncanakan

Adapun faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah TA.2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Target Kinerja Program/ Kegiatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Direncanakan

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	STANDAR	CAPAIAN TAHUN 2024												TOTAL TAHUN 2024	PENYEBAB
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	PELAYANAN GAWAT DARURAT	3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS yang masih berlaku. 5. Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat	100% ≤ 2/1000	100% 2	100% 1	89,3% 3	83% 2	83% 3	83% 3	83% 3	83% 4	90% 2	90% 3	90% 1	90% 3	88,7% 2,5	Penyebab : Ada mutasi dan rolling petugas di IGD Penyebab: 1. Kondisi pasien yang masuk ke IGD sudah dalam kondisi kritis, 2. berdasarkan penilaian triage dalam level 1 yaitu memerlukan tindakan resusitasi, 3. masih terdapatnya tenaga perawat dan dokter yang belum terlatih sistem, 4. sistem pelayanan pre hospital yang perlu ditingkatkan, 5. RSUD dr. Rubini masih menjadi satu-satunya RS rujukan di Kabupaten Mempawah.
3	PELAYANAN RAWAT INAP	7. Kematian pasien lebih dari 48 jam	≤ 0,25%	1,26%	1,13%	2,49%	0,60%	2,60%	2,11%	2,58%	5,40%	2,04%	0,93%	1,52%	1,49%	2,01%	pasien yang masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis, ❷ Proses rujukan pada kasus kegawatdaruratan ke faskes yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lama, -Pasien tidak mau di rujuk ke RS yang lengkap sarana penanganan penyakitnya -Basilitas sarana dan prasarana yang masih belum memadai Rencana Tindak Lanjut : ❶Meningkatkan kualitas supervisi oleh kepala instalasi ❷Meningkatkan kompetensi pelatihan petugas ❸Melaksanakan Asuhan pasien sesuai SOP
6	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI	5. Pertolongan Persalinan Melalui Sectio Caesaria	≤ 25%	76,7%	67,9%	62,9%	70,0%	76,1%	69,5%	69,5%	64,6%	64,6%	83,3%	63,0%	75,0%	70%	- Kasus Kebidanan dengan penyulit yang tinggi, - RSUD dr. Rubini satu satunya rumah sakit Pelayanan rujukan pada pasien Kebidanan di Kab.mempawah - RSUD dr. Rubini merupakan Rs satu-satunya RS dengan pelayanan rujukan di kabupaten mempawah utk pasien kebidanan dan kandungan.
		8. Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir	100%	95%	96%	94%	80%	98%	99%	100%	99,0%	96,6%	91,7%	91,7%	93,4%	95%	1. Bayi dibawa pulang sebelum waktu 48 jam 2.Bayi kecil/prematur/ Bayi dalam kondisi kritis 3.BHP kurang karena harus menunggu dikirim dari RS Sardjito Yogyakarta
14	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat	100%	82%	83%	89%	88%	82%	67%	80%	86%	85%	85%	85%	85%	83%	Penyebab : Peralatan yang diperlukan untuk perawatan membutuhkan waktu dalam proses pemesanan.
		Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Penyebab : Terbatasnya anggaran untuk kalibrasi ala-alat.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Implikasi yang timbul terhadap 21 (dua puluh satu) Jenis Pelayanan indikator Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai target, sudah mencapai target maupun yg melebihi target adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Gawat Darurat Pemberi pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga yang bersertifikat BCLS/ PPGD/ ATLS/ ACLS yang masih berlaku - Penyebab : Ada mutasi dan rolling petugas di IGD,
Kematian pasien < 24 Jam di Unit Gawat Darurat – Penyebab :
 1. Kondisi pasien yang masuk ke IGD sudah dalam kondisi kritis,
 2. berdasarkan penilaian triage dalam level 1 yaitu memerlukan Tindakan resusitasi,
 3. masih terdapatnya tenaga perawat dan dokter yang belum terlatih system
 4. Sistem pelayanan pre hospital yang perlu ditingkatkan
 5. RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah masih menjadi satu-satunya RS rujukan di Kabupaten.
- b. Pelayanan Rawat Inap - Kematian pasien lebih dari 48 jam – Penyebab :
 1. pasien yang masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis
 2. Proses rujukan pada kasus kegawatdaruratan ke faskes yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lama,
 3. Pasien tidak mau di rujuk ke RS yang lengkap sarana penanganan penyakitnya
- c. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi - Pertolongan Persalinan Melalui Sectio Caesaria –
Penyebab :
 1. Kasus Kebidanan dengan penyulit yang tinggi
 2. RSUD dr. Rubini satu satunya rumah sakit Pelayanan rujukan pada pasien Kebidanan di Kab.mempawah
 3. RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merupakan RS satu-satunya RS dengan pelayanan rujukan di kabupaten mempawah utk pasien kebidanan dan kandungan.

Indikator SPM Yaitu Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir –
Penyebab :

1. Bayi dibawa pulang sebelum waktu 48 jam
2. Bayi kecil/prematur/ Bayi dalam kondisi kritis

3. BHP kurang karena harus menunggu dikirim dari RS Sardjito Yogyakarta
- d. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Indikator SPM Yaitu Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat – Penyebab : Peralatan yang diperlukan untuk perawatan membutuhkan waktu dalam proses pemesanan. Peralatan Laboratorium (Dan Alat Ukur Yang Lain) Yang Terkalibrasi Tepat Waktu Sesuai Dengan Ketentuan Kalibrasi – Penyebab : Terbatasnya anggaran untuk kalibrasi ala-alat.

2.1.5 Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Program/Kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dianggarkan melalui sumber pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setiap tahunnya RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah selalu mengajukan usulan anggaran program/kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM meskipun belum semua kebutuhan belanja dapat terakomodir baik melalui DAU, BLUD maupun DAK. Adapun anggaran RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yang diusulkan melalui pendanaan DAU, DAK dan BLUD mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. DAK Tahun 2024 sebesar Rp.2.506.000.000,00 yang berasal dari Bidang Kesehatan dan KB Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting menjadi Rp.0,00 pada tahun 2025 atau turun sebesar 0,00%. Selanjutnya, usulan awal DAK tahun 2026 yaitu sebesar Rp.8.000.000.000,00.

2.1.6 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten dan Pencapaian Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam rangka Renstra 2025-2026 dapat di lihat berikut :

Tabel 2.3 [TC 29 PMDN 86/2017]
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Rubini Mempawah dan
Pencapaian Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Mempawah

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran				92.718.749.764,00		100%	-	64,00
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	85%	85%	66.500.000,00	29.399.900,00	100%	100%	-	44,21
1.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.993.300,00	100%	2 Dokumen		99,87
1.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.745.050,00	100%	2 Dokumen		54,90
1.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.038.950,00	100%	2 Dokumen		40,78
1.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	2.732.200,00	100%	1 Dokumen		42,03
1.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.068.700,00	100%	1 Dokumen		41,37
1.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	14.821.700,00	100%	1 Laporan		37,05

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah				9.840.000,00	100%	100%	-	39,36
1.02.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	9.840.000,00	100%	1 Laporan		39,36
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	85%	85%	172.800.000,00	33.862.000,00	100%	80%	-	19,60
1.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	10 orang	172.800.000,00	33.862.000,00	100%	12 orang		19,60
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	85%	85%	605.151.363,00	298.342.348,00	100%	85%	-	49,30
1.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	67.000.000,00	54.992.600,00	100%	1 Paket		82,08
1.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.184.000,00	34.280.700,00	100%	1 Paket		106,51
1.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	263.640.000,00	99.076.200,00	100%	1 Paket		37,58
1.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	86.515.000,00	17.490.575,00	100%	1 Paket		20,22
1.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.275.000,00	16.125.715,00	100%	1 Paket		48,46
1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	59.329.158,00	100%	1 Paket		62,45
1.02.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	27.537.363,00	17.047.400,00	100%	1 Paket		61,91

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	85%	85%	388.100.000,00	39.600.000,00	100%	80%	-	10,20
1.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	2 Unit	388.100.000,00	39.600.000,00	100%	1 Unit		10,20
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	90%	90%	1.671.888.000,00	1.289.984.407,00	100%	85%	-	77,16
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	1.608.000.000,00	1.217.149.655,00	100%	3 laporan		75,69
1.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	63.888.000,00	72.834.752,00				114,00
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	90%	90%	736.565.000,00	124.700.500,00	100%	85%	-	16,93
1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	15.593.900,00	100%	1 Unit		44,55
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	28 Unit	365.565.000,00	29.661.600,00	100%	42 Unit		8,11
1.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	336.000.000,00	79.445.000,00	100%	1 Paket		23,64
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	100%	27.150.000.000,00	60.236.759.222,00	100%	100%	-	221,87
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	27.150.000.000,00	60.236.759.222,00	100%	1 Unit Kerja		221,87

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.	8 = (7/6)		Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	70%	70%	63.287.557.180,00	7.069.154.862,00	100%	100%	-	21,71
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas kesehatan dan upaya pemerataan layanan kesehatan di rumah sakit	100%	100%	21.755.520.000,00	3.267.998.274,00	100%	100%	-	15,02
1.02.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	328.320.000,00	69.344.353,00	100%	1 Paket		21,12
1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	691.200.000,00	181.320.912,00	100%	2 Unit		26,23
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	20.736.000.000,00	3.017.333.009,00	100%	2 Paket		14,55
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	40.236.187.180,00	3.541.376.388,00	100%	100%	-	8,80
1.02.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 orang	5 orang	148.733.280,00	15.164.425,00	100%	5 orang		10,20
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	103.680.000,00	4.440.000,00	100%	1 Dokumen		4,28
1.02.02.2.02.0032	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7 Dokumen	7 Dokumen	38.230.826.400,00	3.315.834.863,00	100%	7 Dokumen		8,67
1.02.02.2.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	902.947.500,00	175.780.000,00	100%	1 Dokumen		19,47
1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	30.157.100,00	100%	1 Unit		3,55

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase peningkatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100%	100%	332.750.000,00	183.216.300,00	100%	100%	-	55,06
1.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Paket	1 Paket	332.750.000,00	183.216.300,00	100%	1 Paket		55,06
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dalam peningkatan penerbitan izin rumah sakit kelas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	90%	90%	963.100.000,00	76.563.900,00	100%	95%	-	7,95
1.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	963.100.000,00	76.563.900,00	100%	1 Unit		7,95
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	75%	75%	1.915.510.000,00	273.928.573,00	71%	71%	-	14,30
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas	200 orang	200 orang	1.915.510.000,00	273.928.573,00	71%	200 orang	-	14,30
1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200 orang	200 orang	1.915.510.000,00	273.928.573,00	71%	200 orang	-	14,30

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/ SDGs).

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah:

1. Tujuan 1 yaitu Menghapus kemiskinan (Menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar)
2. Tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan (Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik)
3. Tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)
4. Tujuan 5 yaitu Kestaraan Gender (Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti telah disepakati sesuai dengan Program of action of the international conference on population and development and the Beijing platform).

2.2.2 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian kinerja Pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berdasarkan Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5 [TC 30 PMDN 86/2017]
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2022-2024

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.01	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja			85%	90%	90%	80%	80%	85%	95%	95%	-
1.02.01.2.01.0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.02.01.2.01.0002	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.02.01.2.01.0003	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.02.01.2.01.0004	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.02.01.2.01.0005	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.02.01.2.01.0006	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.02.01.2.02	Persentase pelayanan administrais keuangan			90%	95%	95%	90%	90%	90%	95%	95%	-
1.02.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			445 orang	450 orang	450 orang	311 orang	368 orang	364 orang	450 orang	450 orang	-
1.02.01.2.02.0003	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.02.01.2.02.0005	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.02.01.2.02.0007	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.02.01.2.03	Persentase terpenuhinya kebutuhan administasi barang milik daerah			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.03.0006	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.05	Persentase layanan administrasi kepegawaian			85%	90%	90%	85%	85%	85%	95%	95%	-
1.02.01.2.05.	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	-
1.02.01.2.05.0010	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			14 orang	17 orang	17 orang	10 orang	10 orang	7 orang	10 Orang	10 Orang	-
1.02.01.2.06	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			90%	95%	95%	90%	90%	90%	95%	95%	-
1.02.01.2.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
1.02.01.2.06.0002	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
1.02.01.2.06.0003	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
1.02.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
1.02.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
1.02.01.2.06.0009	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-
1.02.01.2.06.0010	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.02.01.2.07	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			85%	90%	90%	0%	0%	80%	95%	95%	-
1.02.01.2.07.0010	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			12 Unit	15 Unit	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-
1.02.01.2.07.0011	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					2 Unit	2 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
1.02.01.2.08	Persentase penyediaan jasa penunjang			90%	95%	95%	85%	85%	90%	95%	95%	-
1.02.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-
1.02.01.2.08.0004	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.09	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			90%	95%	95%	85%	85%	90%	95%	95%	-
1.02.01.2.09.0001	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-
1.02.01.2.09.0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			44 Unit	49 Unit	57 Unit	26 Unit	28 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	-
1.02.01.2.09.0005	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-
1.02.01.2.09.0006	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-
1.02.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-
1.02.01.2.09.0010	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-
1.02.01.2.09.0011	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-
1.02.02.2.10	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
1.02.02.2.10.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-
1.02.02.2.01	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
1.02.02.2.01.0013	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			1	1	1	1	1	1	1	1	-
1.02.02.2.01.0014	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
1.02.02.2.01.0020	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
1.02.02.2.01.0023	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			17 Paket	20 Paket	20 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02	Persentase peningkatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
1.02.02.2.02.0003	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	-	-	-	-	-	30 orang	30 orang	-
1.02.02.2.02.0012	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV		5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-
1.02.02.2.02.0015	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.02.02.2.02.0032	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-
1.02.02.2.02.0034	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.02.02.2.02.0035	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
1.02.02.2.03	Persentase peningkatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
1.02.02.2.03.0002	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.02.02.2.04	Persentase dalam peningkatan penerbitan izin rumah sakit kelas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota			90%	95%	95%	85%	85%	90%	95%	95%	-
1.02.02.2.04.0002	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
1.02.03	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar			75%	80%	80%	-	-	-	85%	85%	-
1.02.03.2.02	Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas			85%	90%	90%	-	-	-	71%	71%	-
1.02.03.2.02.0002	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			623 orang	200 orang	200 orang	-	200 orang	-	50 orang	50 orang	-

2.2.3 Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Berdasarkan Indikator Kinerja yang Sudah Ditentukan Dalam Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)

Capaian kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pencapaian target SPM kesehatan tidak terlepas dari framework perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua belas SPM kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024.

2.2.4 Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan RSUDS dr. Rubini Mempawah Berdasarkan Indikator Kinerja yang Sudah Ditentukan Dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Indikator Kinerja Kunci Hasil
RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten}} \times 1000$	$\frac{138}{314.148} \times 1000 = \mathbf{0,4393}$
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{1}$

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah telah dipetakan, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah
Kabupaten Mempawah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya akses layanan rujukan dan mutu layanan Kesehatan Rumah Sakit	Belum optimalnya peningkatan mudan keselamatan pasien dalam Upaya meningkatkan kepuasan pasien (pelangan) di Rumah Sakit	- Pemberian layanan langsung dan layanan pendukung yang terstandar belum optimal - Sarana dan prasarana serta pemeliharaan pendukung layanan masih perlu ditingkatkan - Pemanfaatan transformasi informasi dan teknologi masih minim - Kepatuhan dalam menjalankan standar mutu Rumah sakit yang masih belum optimal
2.	Belum optimalnya kinerja profesionalisme dan pengembangan karier tenaga Kesehatan Rumah Sakit	Belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehtan melalui diklat dan pelatihan Rumah Sakit	- Pemanfaatan teknologi dalam akselerasi peningkatan kompetensi SDM Rumah Sakit belum optimal - Ketersediaan anggaran untuk mematuhi standar 20 jam/orang/ tahun masih minim - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang terlatih sesuai komptensinya.
	<i>Sumber : RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah</i>		

2.3.1 Analisis tingkat kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Masalah utama dalam pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yaitu RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah Rumah Sakit baru yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan baik sarana dan prasarana. Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melalui Akreditasi, yang saat ini masih tipe C dan untuk mewujudkan hal tersebut RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merencanakan :

- a. Melengkapi kebutuhan tenaga Dokter Spesialis yang bertugas dan bekerja di RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.
- b. Melengkapi peralatan medik dan obat - obatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit secara bertahap untuk kenyamanan pelanggan di tengah persaingan antar rumah sakit yang semakin lama semakin ketat.
- d. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan nasional dan daerah bagi masyarakat peserta BPJS dan miskin sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Mengupayakan pengolahan limbah yang sesuai standar, menempuh akreditasi dan lulus sesuai dengan versi yang terbaru dan mengimplemetasi Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD dr. Rubini merupakan rumah sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip- Prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam RPJPD diungkapkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mempawah hingga tahun 2025 adalah **”Terwujudnya Kabupaten Mempawah Maju dan Berdaya Saing”**. Dalam rangka mewujudkan visi misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2020-2025 diselaraskan dengan dokumen RPD 2025-2026, yaitu :

“Terwujudnya Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”.

Dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah pada tahun 2024, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Bupati/Walikota menetapkan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik yaitu pada tanggal 20 Agustus 2025.

Keterkaitan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dengan Visi Daerah yakni pada Visi kedua Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat dengan Tujuan Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Publik dengan sasarannya adalah 1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkaunya Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat, 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas. Namun diketahui terdapat kendala dan masalah yang dihadapi oleh RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yaitu tingginya angka Kesakitan dan Kematian dan tingginya angka prevalensi stunting pada bayi balita.

2.3.3 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi

2.3.3.1 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yakni pada Visi pertama “Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Kesehatan. Namun diketahui dari masalah yang dihadapi oleh RSUD dr. Rubini Mempawah yaitu 1. Belum optimalnya peningkatn mutu dan keselamatan pasien dalam Upaya meningkatkan kepuasan pasien (pelanggan) di rumah sakit, 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan tenaga Kesehatan melalui diklat, kursus dan pelatihan yang akan menghambat tercapainya sasaran RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sejalan dengan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mempawah.

2.3.3.2 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian IKK

Permasalahan dan hambatan dalam yang dihadapi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki dampak terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu tidak tercapainya 1 indikator IKK dari 2 indikator IKK RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yaitu : 1. Rasio daya tamping Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk, 2. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan Kesehatan di rumah sakit.

2.3.3.3 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian NSPK dan SPM

Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kesehatan yang dihadapi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki dampak terhadap pencapaian NSPK dan SPM yaitu tidak tercapainya 4 (empat) Jenis Pelayanan indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dari 21 (dua puluh satu) Jenis Pelayanan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

2.3.3.4 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kesehatan yang dihadapi RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah memiliki dampak terhadap pencapaian TPB/SDGs yaitu terkendalanya pencapaian 4 (empat) jenis pelayanan dengan indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/ SDGs).

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Peluang dan Tantangan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu :

a. Peluang yaitu terdiri dari :

1. Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang berdekatan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang serta merupakan jalur sutera menuju arah utara di Provinsi Kalimantan Barat merupakan potensi strategis.
2. Berlakunya sistem JKN dan target pencapaian jaminan kesehatan.
3. Munculnya penyakit menular dengan jenis strain baru.
4. RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagai rumah sakit rujukan satu-satunya yang ada di Kabupaten Mempawah.

b. Tantangan yaitu terdiri dari :

1. Regionalisasi sistem rujukan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Jenis obat-obatan yang belum tersedia untuk kasus-kasus tertentu.
3. Tingkat kehadiran dokter spesialis yang masih kurang optimal
4. Belum adanya Dokter Spesialis Jantung dan Mata Tetap Di RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dan masih menggunakan Jasa Dokter Spesialis Tamu dari luar untuk menunjang pelayanan kesehatan.
5. Undang-undang keterbukaan informasi publik dan perlindungan konsumen.
6. Perekrutan tenaga PNS terbatas dan adanya kebijakan ASN.
7. Kurangnya sarana dan prasarana Alat-alat Kesehatan dalam menunjang pelayanan Kesehatan di rumah sakit.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1 Uraian Proses Rancangan Awal Renja Dinas Hesehatan dengan Hasil Analisis Kebutuhan

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel reuiu terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2026.
2. Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Bottom-Up Procedure) serta menjawab permasalahan di bidang kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat.
3. Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisis program–program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum, sedangkan program yang tidak prioritas (mendesak) akan diusulkan pada tahun berikutnya.

**Tabel 2.9 [TC 31 PMDN 86/2017]
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah**

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dokter Rubini Mempawah									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				Rp 98.350.239.860,00				Rp 90.350.239.860,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		Rp 81.273.600.360,00		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		Rp 81.273.600.360,00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja		Rp 31.977.200,00		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja		Rp 31.977.200,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.042.900,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.042.900,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.340.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.340.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.830.300,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.830.300,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.128.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.128.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.633.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.633.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 15.003.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.003.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrais keuangan		Rp 38.749.262.180,00		Persentase pelayanan administrais keuangan		Rp 38.749.262.180,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/Bulan	Rp 38.676.372.580,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/Bulan	38.676.372.580,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Rp 46.751.200,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	46.751.200,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 19.722.800,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	19.722.800,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 6.415.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6.415.600,00	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah		Rp 17.945.100,00		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah		Rp 17.945.100,00	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 17.945.100,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 17.945.100,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian		Rp 25.000.000,00		Persentase layanan administrasi kepegawaian		Rp 25.000.000,00	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 25.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	25.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum		Rp 159.911.380,00		Persentase Pelayanan Administrasi Umum		Rp 159.911.380,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 35.585.900,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.585.900,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.221.080,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.221.080,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp 35.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	35.000.000,00	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 24.104.400,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24.104.400,00	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana		Rp 60.000.000,00		Persentase peningkatan sarana dan prasarana		Rp 60.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 60.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang		Rp 2.000.000.000,00		Persentase penyediaan jasa penunjang		Rp 2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.000.000.000,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		Rp 229.504.500,00		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		Rp 229.504.500,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 25.926.900,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.926.900,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 102.577.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	102.577.600,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 30.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 10.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 61.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.000.000,00	
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Rp 40.000.000.000,00		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Rp 40.000.000.000,00	
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Rp 40.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 16.976.639.500,00		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 8.976.639.500,00	
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 11.388.663.950,00		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 3.388.663.950,00	
Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unit	Rp 128.785.800,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unit	128.785.800,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 8.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	Rp 259.878.150,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	Rp 259.878.150,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00	
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan		5.323.759.950,00		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan		5.323.759.950,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kabupaten Mempawah	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Rp 45.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	45.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Rp 31.791.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	31.791.600,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 50.855.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	50.855.000,00	
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	Rp 4.959.013.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	4.959.013.600,00	
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	200.000.000,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Rp 37.099.750,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	37.099.750,00	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan		Rp 186.329.500,00		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan		Rp 186.329.500,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 186.329.500,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	186.329.500,00	
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan		Rp 77.886.100,00		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan		Rp 77.886.100,00	
Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Rp 77.886.100,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	77.886.100,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar		Rp 100.000.000,00		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar		Rp 100.000.000,00	
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Persentase pemenuhan SDM kesehatan		Rp 100.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Persentase pemenuhan SDM kesehatan		Rp 100.000.000,00	
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	Rp 100.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	100.000.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.1 Proses Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dimulai dari forum konsultasi publik yaitu hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dibahas di dalam Musrenbang dengan mekanismenya diawali dari penggalian masalah kesehatan dan gagasan terkait upaya penyelesaian masalah kesehatan di Kabupaten Mempawah dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.

Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan. Selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting terkait kesehatan di tingkat Kecamatan.

2.5.2 Kesesuaian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dengan Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah

Usulan-usulan masyarakat dalam forum Musrenbang ditampung dalam rancangan Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah. Kemudian Renja RSUD dr. Rubini Mempawah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah kemudian dituang ke dalam berita acara hasil kesepakatan forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berisi isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan yang berpedoman pada Renstra, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum perangkat daerah.

Usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang yang sesuai dengan program kegiatan prioritas RSUD dr. Rubini Mempawah dirumuskan bersama dalam rancangan akhir Rencana Kerja. Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja RSUD dr. Rubini Mempawah

akan ditetapkan bersama dengan seluruh Renja OPD dalam Perkada tentang RKPD Kabupaten Mempawah.

Rencana Kerja RSUD dr. Rubini Mempawah ini akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Pra RKA-SKPD RSUD dr. Rubini Mempawah yang selanjutnya akan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026.

2.5.3 Tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Berikut tabel usulan program kegiatan masyarakat dalam forum Musrenbang yang ditampung ke dalam Renja RSUD dr. Rubini Mempawah

**Tabel 2.10 [TC 32 PMDN 86/2017]
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Rubini Mempawah

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	Rp 81.273.600.360,00	
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	100%	Rp 31.977.200,00	
1.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.042.900,00	
1.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.340.000,00	
1.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.830.300,00	
1.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.128.000,00	
1.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.633.000,00	
1.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 15.003.000,00	
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	Rp 38.749.262.180,00	
1.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/Bulan	Rp 38.676.372.580,00	
1.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Rp 46.751.200,00	
1.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 19.722.800,00	
1.02.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 6.415.600,00	
1.02.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah	100%	Rp 17.945.100,00	
1.02.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 17.945.100,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	Rp 25.000.000,00	
1.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 25.000.000,00	
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	Rp 159.911.380,00	
1.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.000.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 35.585.900,00	
1.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.000.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.221.080,00	
1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp 35.000.000,00	
1.02.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 24.104.400,00	
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp 60.000.000,00	
1.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 60.000.000,00	
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	Rp 2.000.000.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	Rp 229.504.500,00	
1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 25.926.900,00	
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 102.577.600,00	
1.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 30.000.000,00	
1.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 10.000.000,00	
1.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 61.000.000,00	
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	Rp 40.000.000.000,00	
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Rp 40.000.000.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100%	Rp 8.976.639.500,00	
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100%	Rp 3.388.663.950,00	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unit	Rp 128.785.800,00	
1.02.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -	
1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	Rp 259.878.150,00	
1.02.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	100%	Rp 5.323.759.950,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kabupaten Mempawah	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Rp 45.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Rp 31.791.600,00	
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 50.855.000,00	
1.02.02.2.02.0032	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	Rp 4.959.013.600,00	
1.02.02.2.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	
1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Rp 37.099.750,00	
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	100%	Rp 186.329.500,00	
1.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 186.329.500,00	
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	100%	Rp 77.886.100,00	
1.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Rp 77.886.100,00	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	75%	Rp 100.000.000,00	
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Persentase pemenuhan SDM kesehatan	71%	Rp 100.000.000,00	
1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	Rp 100.000.000,00	
					Rp 90.350.239.860,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Pembangunan bidang sumber daya manusia dalam arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak”. Peningkatan kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Secara khusus, arah pembangunan jangka panjang bidang SDM yaitu: Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan pemerataan kualitas dan relevansi mencakup kesehatan:

- a. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (sustainable) dan berkualitas bagi penduduk miskin; peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antardaerah dan antar kelompok penduduk; peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; dan peningkatan produksi, distribusi, dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, dan aman bagi penduduk, dengan harga yang terjangkau.
- b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan perilaku sehat masyarakat; peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau; pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran yang merata,

sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan; peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang lebih bermutu, serta peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan kesehatan jasmani dan mental masyarakat, melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga menuju pembentukan budaya olahraga; peningkatan pembiayaan kesehatan, melalui alokasi pembiayaan pemerintah yang lebih memadai, dan pengembangan asuransi kesehatan (sosial dan swasta).

Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memiliki tujuan strategis yaitu:

1. Menciptakan SDM yang berdaya saing berfokus pada peningkatan derajat kesehatan; dan
2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya status Kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan.
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah tahun 2025 sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sebagaimana yang tertuang dalam RPD Kabupaten Mempawah 2025-2026, pada Urusan Kesehatan, merupakan penjabaran tujuan daerah yang tertuang dalam tujuan kedua RPD kabupaten Mempawah 2025-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat”.

Tujuan ini untuk menyokong Misi daerah dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah yang Berkualitas. Tujuan Renja RSUD dr. Rubini Mempawah yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
- b. Tersedianya kebutuhan minimal tenaga kesehatan sesuai standar klasifikasi rumah sakit.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen Rumah Sakit yang professional, akuntabel dan transparan.
- e. Meningkatkan fasilitas dan kemampuan aparatur.

Sasaran Renja RSUD dr. Rubini Mempawah yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.
2. Tersedianya kebutuhan minimal tenaga kesehatan sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan publikasi ilmiah internasional.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit dan sumber daya manusia yang profesional.

Berikut tujuan dan sasaran RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah (Renstra)	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah (Renstra)	Target Kinerja pada Tahun ke -				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Publik	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkaunya Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		85%	86%	87%	88%
						Bed Occupancy Rate (BOR)= Jumlah hari perawatan rumah sakit	60%				
						Average Length of Stay (ALOS)= Jumlah rata-rata lama di rawat	50 Kali				
						Turn Over Interval (TOI)= Tempat tidur tidak di tempati	< 5 Hari				
						Gross Death Rate (GDR)= Jumlah angka kematian 48 jam setelah di rawat untuk tiap 1000 penderita keluar	< 0,025%				
						Net Death Rate (NDR)= Jumlah angka kematian untuk tiap 1000 penderita keluar	< 0,045%				
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	85,5 Nilai	85,6 Nilai
						Predikat Penilaian Akreditasi	Paripurna	-	-	-	Paripurna
					Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas	Nilai SAKIP					BB

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Penyusunan program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah dipengaruhi oleh faktor-faktor diantara yaitu:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Program kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sangat dipengaruhi oleh Visi dan Misi kepala daerah. Keterkaitan program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah harus sesuai dengan Visi Daerah yakni pada Visi kedua “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter” dengan sasarannya adalah

”Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat”. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Mempawah dan sekitarnya.

b. Mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan Pada tahun anggaran 2024, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah, memiliki 2 (dua) sasaran strategis. Kedua Sasaran Strategis tersebut dituangkan dalam 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah ditunjang dengan penyediaan anggaran dalam DPPA Tahun 2024 sebesar Rp.118.332.502.494,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.112.445.568.583,00 atau 95,03%.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berlokasi di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

c) Total kebutuhan dana Berdasarkan sumber pendanaan, berikut rincian anggaran program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dapat di lihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Total Kebutuhan Anggaran RSUD dr. Rubini Mempawah
Kabupaten Mempawah

No	Sumber Dana	2024		2025		2026	
		Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
1.	APBD	51.212.702.742	43,28	50.350.239.860	55,73	52.852.860.839	55,73
2.	DAK	2.506.000.000	2,12	-		-	
3.	BLUD	64.613.799.752	54,60	40.000.000.000	44,27	40.000.000.000	44,27
Total Pagu		118.332.502.494	100	90.350.239.860	100	92.852.860.839	100

Dalam menjalankan peran dan fungsinya maka dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2026 direncanakan akan melaksanakan Program dengan Kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.90.350.239.860,00 dengan rincian berdasarkan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.3 [TC 33 PMDN 86/2017] Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dokter Rubini Mempawah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				Rp 90.350.239.860,00				Rp 94.661.884.615,00
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran			Rp 81.273.600.360,00				Rp 85.585.267.315,00
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja			Rp 31.977.200,00				Rp 31.975.900,00
1.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	Rp 5.042.900,00	APBD		2 Dokumen	5.042.600,00
1.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 3.340.000,00	APBD		1 Dokumen	3.339.800,00
1.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 2.830.300,00	APBD		1 Dokumen	2.830.000,00
1.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 3.128.000,00	APBD		1 Dokumen	3.127.700,00
1.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 2.633.000,00	APBD		1 Dokumen	2.633.000,00
1.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 15.003.000,00	APBD		1 Laporan	15.002.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan			Rp 38.749.262.180,00				Rp 41.036.945.369,00
1.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	400 Orang/Bulan	Rp 38.676.372.580,00	APBD		400 orang/bulan	40.964.056.369,00
1.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	Rp 46.751.200,00	APBD		2 Dokumen	46.751.200,00
1.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	2 Laporan	Rp 19.722.800,00	APBD		2 Laporan	19.722.400,00
1.02.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 6.415.600,00	APBD		1 Laporan	6.415.400,00
1.02.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah			Rp 17.945.100,00				Rp 17.944.900,00
1.02.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 17.945.100,00	APBD		1 Dokumen	Rp 17.944.900,00
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian			Rp 25.000.000,00				Rp 25.000.000,00
1.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Rp -				-
1.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	10 Orang	Rp 25.000.000,00	APBD		10 Orang	25.000.000,00
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			Rp 159.911.380,00				Rp 159.907.400,00
1.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 15.000.000,00	APBD		1 Paket	14.999.500,00
1.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 35.585.900,00	APBD		1 Paket	35.583.300,00
1.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 25.000.000,00	APBD		1 Paket	25.000.000,00
1.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 25.221.080,00	APBD		1 Paket	25.220.700,00
1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	1 laporan	Rp 35.000.000,00	APBD		1 laporan	35.000.000,00
1.02.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 24.104.400,00	APBD		1 Dokumen	24.103.900,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			Rp 60.000.000,00				Rp 60.000.000,00
1.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 60.000.000,00	APBD		1 Unit	60.000.000,00
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang			Rp 2.000.000.000,00	Rp -			Rp 2.000.000.000,00
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	3 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	APBD		3 Laporan	2.000.000.000,00
1.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			Rp 229.504.500,00				Rp 229.493.746,00
1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 25.926.900,00	APBD		1 Unit	25.922.646,00
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Mempawah	10 Unit	Rp 102.577.600,00	APBD		10 Unit	102.571.100,00
1.02.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara			Rp -				-
1.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 30.000.000,00	APBD		1 Unit	30.000.000,00
1.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Unit	10.000.000,00
1.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			Rp -				-
1.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 61.000.000,00	APBD		1 Unit	61.000.000,00
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			Rp 40.000.000.000,00				Rp 42.024.000.000,00
1.02.02.2.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kabupaten Mempawah	1 Unit Kerja	Rp 40.000.000.000,00	BLUD		1 Unit Kerja	42.024.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			Rp 8.976.639.500,00				Rp 8.976.617.300,00
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			Rp 3.388.663.950,00	APBD			3.388.663.500,00
1.02.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 128.785.800,00	APBD		1 Unit	128.785.800,00
1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	2 Unit	Rp 259.878.150,00	APBD		2 Unit	Rp 259.877.700,00
1.02.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00	APBD		2 Paket	Rp 3.000.000.000,00
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan			5.323.759.950,00	-			5.323.740.300,00
1.02.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	420 Orang	Rp 45.000.000,00	APBD		420 Orang	45.000.000,00
1.02.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	400 Orang	Rp 31.791.600,00	APBD		15 Orang	31.791.200,00
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 50.855.000,00	APBD		1 Dokumen	50.836.300,00
1.02.02.2.02.0032	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	Rp 4.959.013.600,00	APBD		2 Dokumen	4.959.013.500,00
1.02.02.2.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 37.099.750,00	APBD		1 Unit	37.099.300,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan			Rp 186.329.500,00				Rp 186.327.700,00
1.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 186.329.500,00	APBD		1 Dokumen	186.327.700,00
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan			Rp 77.886.100,00				Rp 77.885.800,00
1.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 77.886.100,00	APBD		1 Unit	77.885.800,00
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar			Rp 100.000.000,00				Rp 100.000.000,00
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	Kabupaten Mempawah		Rp 100.000.000,00				Rp 100.000.000,00
1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kabupaten Mempawah	50 Orang	Rp 100.000.000,00	APBD		50 Orang	100.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebesar **Rp.90.350.239.860,00** didasari Rencana Strategis RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah 2025-2026. Renja yang dibuat ini merupakan pedoman bagi internal RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus berpedoman pada indikator kinerja yang sudah tertuang pada Renja 2025 dalam tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 RSUD dr. Rubini Mmepawah Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi N-2 (Tahun 2023)	Kondisi N-1 (Tahun 2024)	RENCANA TAHUN 2025				
									Target Capaian Kinerja	Lokasi	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	0.00	0.00	02	RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH		Rp 109.222.273.777,00	Rp 89.321.852.027,00		Kabupaten Mempawah		Rp 90.350.239.860,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Rp 109.222.273.777,00	Rp 89.321.852.027,00		Kabupaten Mempawah		Rp 90.350.239.860,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi perangkat daerah	Rp 100.049.311.703,00	Rp 76.503.836.377,00		Kabupaten Mempawah		Rp 81.273.600.360,00	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 29.999.175,00	Rp 31.842.150,00		Kabupaten Mempawah		Rp 31.977.200,00	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.999.900,00	Rp 5.042.550,00	2 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 5.042.900,00	APBD
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.767.725,00	Rp 3.340.500,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 3.340.000,00	APBD
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 2.232.025,00	Rp 2.771.800,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 2.830.300,00	APBD
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 2.767.575,00	Rp 3.123.000,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 3.128.000,00	APBD
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 2.232.175,00	Rp 2.552.750,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 2.633.000,00	APBD
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Rp 14.999.775,00	Rp 15.011.550,00	1 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 15.003.000,00	APBD
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 32.486.155.087,00	Rp 36.393.701.231,00				Rp 38.749.262.180,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 32.405.039.963,00	Rp 36.320.811.731,00	390 Orang/Bulan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 38.676.372.580,00	APBD
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 58.615.524,00	Rp 46.751.300,00	2 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 46.751.200,00	APBD
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 17.499.825,00	Rp 19.722.700,00	2 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 19.722.800,00	APBD
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 4.999.775,00	Rp 6.415.500,00	1 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 6.415.600,00	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi N-2 (Tahun 2023)	Kondisi N-1 (Tahun 2024)	RENCANA TAHUN 2025				
								Target Capaian Kinerja	Lokasi	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 9.840.000,00	Rp 17.954.600,00				Rp 17.945.100,00	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 9.840.000,00	Rp 17.954.600,00	1 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 17.945.100,00	APBD
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 37.500.000,00	Rp 25.000.000,00				Rp 25.000.000,00	
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 37.500.000,00	Rp 25.000.000,00	10 Orang	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 25.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 300.083.565,00	Rp 323.143.280,00				Rp 159.911.380,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp 54.998.200,00	Rp 74.995.300,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 15.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 34.752.300,00	Rp 35.585.900,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 35.585.900,00	APBD
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 99.515.900,00	Rp 103.236.600,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17.500.000,00	Rp 25.000.000,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 25.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16.125.865,00	Rp 25.221.080,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 25.221.080,00	APBD
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 60.000.000,00	Rp 35.000.000,00	1 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 35.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 17.191.300,00	Rp 24.104.400,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 24.104.400,00	APBD
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 40.000.000,00	Rp 447.260.000,00				Rp 60.000.000,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Rp -	Rp 92.260.000,00	7 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 40.000.000,00	Rp 60.000.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 60.000.000,00	APBD
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp 295.000.000,00	3 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.477.008.512,00	Rp 1.850.279.616,00				Rp 2.000.000.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.773.600.000,00	3 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 2.000.000.000,00	APBD
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 77.008.512,00	Rp 76.679.616,00	1 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi N-2 (Tahun 2023)	Kondisi N-1 (Tahun 2024)	RENCANA TAHUN 2025				
								Target Capaian Kinerja	Lokasi	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 125.820.800,00	Rp 414.655.500,00				Rp 229.504.500,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 15.603.000,00	Rp 25.926.900,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 25.926.900,00	APBD
1	02	01	2.09	0002	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 30.307.800,00	Rp 102.577.600,00	10 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 102.577.600,00	APBD
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Rp -	Rp 50.000.000,00	5 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah		APBD
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp -	Rp 30.000.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 30.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp -	Rp 139.051.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 10.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 79.910.000,00	Rp 67.100.000,00	2 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 61.000.000,00	APBD
1	02	02	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 65.542.904.564,00	Rp 37.000.000.000,00				Rp 40.000.000.000,00	
1	02	02	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 65.542.904.564,00	Rp 37.000.000.000,00	1 Unit Kerja	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 40.000.000.000,00	BLUD
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 8.372.962.074,00	Rp 11.598.015.650,00				Rp 8.976.639.500,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.277.104.927,00	Rp 5.894.663.950,00				Rp 3.388.663.950,00	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Rp 77.140.927,00	Rp 128.785.800,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 128.785.800,00	APBD
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp -	Rp 2.506.000.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	DAK
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 182.434.600,00	Rp 259.878.150,00	2 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 259.878.150,00	APBD
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 3.017.529.400,00	Rp 3.000.000.000,00	6 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 3.000.000.000,00	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi N-2 (Tahun 2023)	Kondisi N-1 (Tahun 2024)	RENCANA TAHUN 2025				
								Target Capaian Kinerja	Lokasi	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.828.173.297,00	Rp 5.425.478.350,00				Rp 5.323.759.950,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp -	Rp -	50 Orang	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 45.000.000,00	APBD
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Rp 20.779.300,00	Rp 37.041.400,00	10 Orang	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 31.791.600,00	APBD
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 5.502.400,00	Rp 50.855.000,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 50.855.000,00	APBD
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 4.589.110.922,00	Rp 5.006.572.200,00	2 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 4.959.013.600,00	APBD
1	02	02	2.01	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 175.780.800,00	Rp 294.000.000,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 200.000.000,00	APBD
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Rp 36.999.875,00	Rp 37.009.750,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 37.099.750,00	APBD
1	02	03	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 188.690.200,00	Rp 197.939.700,00				Rp 186.329.500,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 188.690.200,00	Rp 197.939.700,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 186.329.500,00	APBD
1	02	02	2.04		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 78.993.650,00	Rp 79.933.650,00				Rp 77.886.100,00	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 78.993.650,00	Rp 79.933.650,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 77.886.100,00	APBD
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 800.000.000,00	Rp 1.220.000.000,00				Rp 100.000.000,00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Rp 800.000.000,00	Rp 1.220.000.000,00				Rp 100.000.000,00	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp 800.000.000,00	Rp 1.220.000.000,00	200 Orang	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 100.000.000,00	APBD
						Rp 109.222.273.777,00	Rp 89.321.852.027,00				Rp 90.350.239.860,00	

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, pada tahun anggaran 2025, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah menjalankan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Dari ketiga program, urusan kesehatan membawahi program 2 (dua) program yaitu: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program yang menjadi esensi urusan bidang kesehatan yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat karena terdapat 2 (dua) Sub kegiatan SPM bidang kesehatan di dalamnya. Urusan penunjang pemerintahan bidang kesehatan tercantum dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. Rp.90.350.239.860,00 urusan bidang kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.8.976.639.500,00, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp.100.000.000,00 dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.81.273.600.360,00 dilaksanakan di Kabupaten Mempawah.

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah

diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis :

No	Bidang / Bagian	Jenis Layanan		Kelompok Sasaran
1	Bidang Pelayanan Bidang Penunjang	Pelayanan Unggulan		Kelompok sasaran pelayanan unggulan mencakup semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan unggulan di suatu institusi, termasuk pasien atau masyarakat yang membutuhkan layanan, serta internal organisasi seperti tenaga pendidik, peneliti, dan tenaga kesehatan.
		-	Pelayanan Rawat Jalan	Kelompok sasaran pelayanan rawat jalan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di luar rawat inap, termasuk individu, keluarga, kelompok rentan (seperti disabilitas), dan masyarakat pada umumnya
			Pelayanan Rawat Inap	Kelompok sasaran pelayanan rawat inap pada umumnya adalah pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut dan tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer, serta pasien yang membutuhkan perawatan khusus seperti kelompok rentan.
		Pelayanan Penunjang		
			Pelayanan Gawat Darurat	Kelompok sasaran pelayanan gawat darurat adalah individu atau pasien yang mengalami kondisi klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, dan meminimalkan risiko kematian atau disabilitas. Pelayanan gawat darurat mencakup penanganan kasus yang mengancam jiwa dan juga kasus gawat darurat ringan.
			Pelayanan Bedah dan Anestesi	Kelompok sasaran pelayanan bedah dan anestesi adalah pasien yang membutuhkan intervensi bedah

				atau prosedur medis yang memerlukan anestesi, serta staf medis yang terlibat dalam pelayanan tersebut, termasuk dokter spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, perawat bedah, perawat anestesi, dan tim pendukung lainnya.
			Pelayanan Penunjang Medis	Kelompok sasaran pelayanan penunjang medis adalah seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan medis dan penunjang medis untuk pemulihan, penyembuhan, peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Sasaran ini mencakup individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat secara luas, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan.
			Radiologi, Laboratorium Klinik, Farmasi dan Rehabilitasi Medik	
			Pelayanan Keperawatan	Kelompok sasaran pelayanan keperawatan secara umum meliputi individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat luas, yang semuanya berhak menerima layanan keperawatan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mereka.
			Keperawatan Intensif, Keperawatan Bedah, Keperawatan Geriatri dan Keperawatan Neonatal dan Pediatri	
			Pelayanan Kesehatan Anak	Kelompok sasaran pelayanan kesehatan anak sangat beragam dan mencakup berbagai tahapan usia, mulai dari janin dalam kandungan hingga remaja dan balita, dengan fokus utama pada pencegahan stunting dan pemantauan tumbuh kembang.
			Pelayanan Kardiologi dan Pembuluh Darah	Kelompok sasaran pelayanan Kardiologi dan Pembuluh Darah meliputi pasien dengan berbagai penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, mulai dari anak-anak hingga dewasa, termasuk mereka yang mengalami kondisi kritis, penyakit

			jantung koroner, gagal jantung, penyakit katup jantung, stroke, hingga aritmia.
		Pelayanan Hemodialisis	Kelompok sasaran utama pelayanan hemodialisis (cuci darah) adalah pasien yang mengalami gagal ginjal, baik tahap akhir (kronis) maupun akut, yang ginjalnya sudah tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menyaring limbah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh.
		Pelayanan Gigi dan Mulut	Kelompok sasaran utama pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi anak-anak (anak prasekolah dan anak sekolah dasar), ibu hamil, dan ibu menyusui karena mereka termasuk kelompok rentan terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut.
		Pelayanan Nutrisi dan Gizi Klinik	Kelompok sasaran pelayanan gizi klinik meliputi pasien yang memiliki masalah gizi terkait penyakit, baik yang sedang menjalani pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang ingin melakukan pencegahan penyakit dan peningkatan status gizi. Pelayanan ini dirancang untuk mengatasi masalah gizi spesifik yang muncul akibat kondisi medis tertentu.
		Pelayanan Pasien Miskin	Kelompok sasaran pelayanan kesehatan bagi pasien miskin mencakup individu, keluarga, dan masyarakat secara umum, dengan prioritas utama adalah kelompok yang rentan dan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan secara optimal, seperti masyarakat di daerah terpencil, kumuh, lansia, ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, dan penderita penyakit tertentu yang tidak memiliki kemampuan finansial.
	Bagian Tata Usaha Bidang Pengendalian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD dr. Rubini Mempawah, Aparatur, Karyawan, Pasien BPJS, Masyarakat Umum.

Sumber: RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 didasari Rencana Strategis RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah 2025-2026. Renja yang dibuat ini merupakan pedoman bagi internal RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus berpedoman pada indikator kinerja yang sudah tertuang pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025.

Renja merupakan suatu hal yang penting dalam sistem Pemerintahan. Renja yang dibuat secara konseptual merupakan pedoman perencanaan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan daerah. Sebagai dokumen perencanaan strategis untuk menjabarkan potret permasalahan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan BLUD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah tahun 2025 diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2026 yaitu Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkaunya Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat serta Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas .

Akhir kata semoga Rencana Kerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai ketentuan dan dapat dilaksanakan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance.

Hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah:

1. Melibatkan semua pihak terkait dalam menentukan program dan kegiatan prioritas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis dengan instansi vertikal dan horizontal;
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada pada RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah;
4. Memberdayakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan khususnya yang melibatkan perubahan perilaku hidup bersih, sehat dan sanitasi total berbasis masyarakat;
5. Meningkatkan dukungan dan komitmen pelaksanaan Forum Satu Data untuk mencapai integrasi dan sinkronisasi data guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah;
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah salah satu unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Beberapa isu penting yang ber-pengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah diantaranya diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Akreditasi versi Standar Kementerian Kesehatan (STARKES) edisi 1 sebagai standar pelayanan

perumahsakitan yang menuntut rumah sakit untuk terus berbenah dan menjadi pemberi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 akan dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Mempawah, 5 Agustus 2026

DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19720705 200112 1 003

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD DR RUBINI KAB. MEMPAWAH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD DR RUBINI						90.350.239.860,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						90.350.239.860,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						90.350.239.860,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi perangkat daerah	-			100 Persen	81.273.600.360,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja di rumah sakit	-			100 Persen	31.977.200,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.042.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.340.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.830.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.128.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.633.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	15.003.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan dokumen pelaporan di rumah sakit</i>	-			100 Persen	38.749.262.180,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				390 Orang/bulan	38.676.372.580,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2 Dokumen	46.751.200,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	19.722.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	6.415.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya peningkatan administrasi barang milik daerah di rumah sakit</i>	-			100	17.945.100,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	17.945.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam fasilitas, sosialisasi dan pelatihan</i>	-			100 Persen	25.000.000,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				600 Paket	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	25.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan administrasi umum di rumah sakit	-			100 Persen	159.911.380,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.585.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.221.080,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	24.104.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitas barang milik daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan di rumah sakit	-			100 Persen	60.000.000,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang administrasi perkantoran di rumah sakit	-			100 90	2.000.000.000,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya peningkatan pemeliharaan barang milik daerah rutin dan berkala sarana dan prasarana fasilitas penunjang layanan di rumah sakit	-			100 Persen	229.504.500,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.926.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	102.577.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	61.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD dalam menunjang kegiatan operasional BLUD di rumah sakit	-			100 Persen	40.000.000.000,00			-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah	-	0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan fasilitas kesehatan dan upaya pemerataan layanan kesehatan di rumah sakit	-			100 Persen	8.976.639.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	45.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25 Orang	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	31.791.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	50.855.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				6 Dokumen	4.959.013.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur , Karyawan RSUD dr.Rubini Mempawah, Pasien RSUD dr.Rubini Mempawah dan Masyarakat		0,00	RSUD DR RUBINI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				200 Orang	100.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dr. Rubini Mempawah		0,00	RSUD DR RUBINI
	J U M L A H							90.350.239.860,00						0,00		

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah (Renstra)	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah (Renstra)	Target Kinerja pada Tahun ke -				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Publik	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkaunya Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		85%	86%	87%	88%
						Bed Occupansy Rate (BOR)= Jumlah hari perawatan rumah sakit	60%				
						Average Length of Stay (ALOS)= Jumlah rata-rata lama di rawat	50 Kali				
						Turn Over Interval (TOI)= Tempat tidur tidak di tempati	< 5 Hari				
						Gross Death Rate (GDR)= Jumlah angka kematian 48 jam setelah di rawat untuk tiap 1000 penderita keluar	< 0,025‰				
						Net Death Rate (NDR)= Jumlah angka kematian untuk tiap 1000 penderita keluar	< 0,045‰				
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	85,5 Nilai	85,6 Nilai
						Predikat Penilaian Akreditasi	Paripurna	-	-	-	Paripurna
					Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas	Nilai SAKIP				B	BB

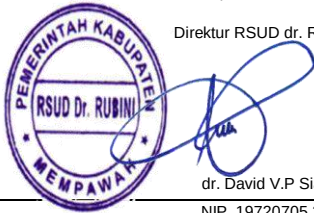
KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi N-2 (Tahun 2023)	Kondisi N-1 (Tahun 2024)	RENCANA TAHUN 2025				
									Target Capaian Kinerja	Lokasi	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 300.083.565,00	Rp 323.143.280,00				Rp 159.911.380,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 54.998.200,00	Rp 74.995.300,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 15.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 34.752.300,00	Rp 35.585.900,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 35.585.900,00	APBD
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp 99.515.900,00	Rp 103.236.600,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 17.500.000,00	Rp 25.000.000,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 25.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 16.125.865,00	Rp 25.221.080,00	1 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 25.221.080,00	APBD
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 60.000.000,00	Rp 35.000.000,00	1 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 35.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 17.191.300,00	Rp 24.104.400,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 24.104.400,00	APBD
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 40.000.000,00	Rp 447.260.000,00				Rp 60.000.000,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Rp -	Rp 92.260.000,00	7 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 40.000.000,00	Rp 60.000.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 60.000.000,00	APBD
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Rp -	Rp 295.000.000,00	3 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.477.008.512,00	Rp 1.850.279.616,00				Rp 2.000.000.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.773.600.000,00	3 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 2.000.000.000,00	APBD
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp 77.008.512,00	Rp 76.679.616,00	1 Laporan	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	APBD
1	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp 125.820.800,00	Rp 414.655.500,00				Rp 229.504.500,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 15.603.000,00	Rp 25.926.900,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 25.926.900,00	APBD
1	02	01	2.09	0002	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 30.307.800,00	Rp 102.577.600,00	10 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 102.577.600,00	APBD
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Rp -	Rp 50.000.000,00	5 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah		APBD
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp -	Rp 30.000.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 30.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp -	Rp 139.051.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 10.000.000,00	APBD

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi N-2 (Tahun 2023)	Kondisi N-1 (Tahun 2024)	RENCANA TAHUN 2025																																								
									Target Capaian Kinerja	Lokasi	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 79.910.000,00	Rp 67.100.000,00	2 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 61.000.000,00	APBD																																				
1	02	02	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Rp 65.542.904.564,00	Rp 37.000.000.000,00				Rp 40.000.000.000,00																																					
1	02	02	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Rp 65.542.904.564,00	Rp 37.000.000.000,00	1 Unit Kerja	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 40.000.000.000,00	BLUD																																				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rp 8.372.962.074,00	Rp 11.598.015.650,00				Rp 8.976.639.500,00																																					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas kesehatan dan upaya pemerataan layanan kesehatan di rumah sakit	Rp 3.277.104.927,00	Rp 5.894.663.950,00				Rp 3.388.663.950,00																																					
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Rp 77.140.927,00	Rp 128.785.800,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 128.785.800,00	APBD																																				
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Rp -	Rp 2.506.000.000,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp -	DAK																																				
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Rp 182.434.600,00	Rp 259.878.150,00	2 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 259.878.150,00	APBD																																				
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Rp 3.017.529.400,00	Rp 3.000.000.000,00	6 Paket	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 3.000.000.000,00	APBD																																				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.828.173.297,00	Rp 5.425.478.350,00				Rp 5.323.759.950,00																																					
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp -	Rp -	50 Orang	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 45.000.000,00	APBD																																				
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp 20.779.300,00	Rp 37.041.400,00	10 Orang	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 31.791.600,00	APBD																																				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 5.502.400,00	Rp 50.855.000,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 50.855.000,00	APBD																																				
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 4.589.110.922,00	Rp 5.006.572.200,00	2 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 4.959.013.600,00	APBD																																				
1	02	02	2.01	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 175.780.800,00	Rp 294.000.000,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 200.000.000,00	APBD																																				
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Rp 36.999.875,00	Rp 37.009.750,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 37.099.750,00	APBD																																				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi N-2 (Tahun 2023)	Kondisi N-1 (Tahun 2024)	RENCANA TAHUN 2025				
									Target Capaian Kinerja	Lokasi	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase peningkatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Rp 188.690.200,00	Rp 197.939.700,00				Rp 186.329.500,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 188.690.200,00	Rp 197.939.700,00	1 Dokumen	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 186.329.500,00	APBD
1	02	02	2.04		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dalam peningkatan penerbitan izin rumah sakit kelas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 78.993.650,00	Rp 79.933.650,00				Rp 77.886.100,00	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Rp 78.993.650,00	Rp 79.933.650,00	1 Unit	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 77.886.100,00	APBD
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rp 800.000.000,00	Rp 1.220.000.000,00				Rp 100.000.000,00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas	Rp 800.000.000,00	Rp 1.220.000.000,00				Rp 100.000.000,00	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Rp 800.000.000,00	Rp 1.220.000.000,00	200 Orang	Kabupaten Mempawah	RSUD dr. Rubini Mempawah	Rp 100.000.000,00	APBD
							Rp 109.222.273.777,00	Rp 89.321.852.027,00				Rp 90.350.239.860,00	

Mempawah, 5 Agustus 2025

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes

NIP. 19720705 200112 1 003

Tabel T.C-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah s/d Tahun 2024
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	Target	Rp.	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran				92.718.749.764,00		100%	-
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	85%	85%	66.500.000,00	29.399.900,00	100%	100%	-
1.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.993.300,00	100%	2 Dokumen	
1.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.745.050,00	100%	2 Dokumen	
1.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.038.950,00	100%	2 Dokumen	
1.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	2.732.200,00	100%	1 Dokumen	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat Berj
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025
					Target	Rp.			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
1.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.068.700,00	100%	1 Dokumen	
1.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	14.821.700,00	100%	1 Laporan	
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan	90%	90%	31.490.062.211,00	30.656.261.387,00	100%	85%	-
1.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 orang	368 orang	31.366.112.711,00	30.578.495.602,00	100%	450 orang	
1.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggujian/ Verfikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	63.949.500,00	55.339.410,00	100%	2 Dokumen	
1.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	17.499.600,00	100%	1 Dokumen	
1.02.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.926.775,00	100%	1 Dokumen	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025
					Target	Rp.			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah				9.840.000,00	100%	100%	-
1.02.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	9.840.000,00	100%	1 Laporan	
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	85%	85%	172.800.000,00	33.862.000,00	100%	80%	-
1.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	10 orang	172.800.000,00	33.862.000,00	100%	12 orang	
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	85%	85%	605.151.363,00	298.342.348,00	100%	85%	-
1.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	67.000.000,00	54.992.600,00	100%	1 Paket	
1.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.184.000,00	34.280.700,00	100%	1 Paket	
1.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	263.640.000,00	99.076.200,00	100%	1 Paket	
1.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	86.515.000,00	17.490.575,00	100%	1 Paket	
1.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.275.000,00	16.125.715,00	100%	1 Paket	
1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	59.329.158,00	100%	1 Paket	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisa: Renstra Perangkat Berji
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025
					Target	Rp.			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
1.02.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	27.537.363,00	17.047.400,00	100%	1 Paket	
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	85%	85%	388.100.000,00	39.600.000,00	100%	80%	-
1.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	2 Unit	388.100.000,00	39.600.000,00	100%	1 Unit	
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	90%	90%	1.671.888.000,00	1.289.984.407,00	100%	85%	-
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	1.608.000.000,00	1.217.149.655,00	100%	3 laporan	
1.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	63.888.000,00	72.834.752,00			
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	90%	90%	736.565.000,00	124.700.500,00	100%	85%	-
1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	15.593.900,00	100%	1 Unit	
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	28 Unit	365.565.000,00	29.661.600,00	100%	42 Unit	
1.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	336.000.000,00	79.445.000,00	100%	1 Paket	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisa: Renstra Perangkat Berji
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025
					Target	Rp.			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	100%	27.150.000.000,00	60.236.759.222,00	100%	100%	-
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	27.150.000.000,00	60.236.759.222,00	100%	1 Unit Kerja	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	70%	70%	63.287.557.180,00	7.069.154.862,00	100%	100%	-
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas kesehatan dan upaya pemerataan layanan kesehatan di rumah sakit	100%	100%	21.755.520.000,00	3.267.998.274,00	100%	100%	-
1.02.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	328.320.000,00	69.344.353,00	100%	1 Paket	
1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	691.200.000,00	181.320.912,00	100%	2 Unit	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	20.736.000.000,00	3.017.333.009,00	100%	2 Paket	
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100%	100%	40.236.187.180,00	3.541.376.388,00	100%	100%	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat Berj
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025
					Target	Rp.			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
1.02.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 orang	5 orang	148.733.280,00	15.164.425,00	100%	5 orang	
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	103.680.000,00	4.440.000,00	100%	1 Dokumen	
1.02.02.2.02.0032	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7 Dokumen	7 Dokumen	38.230.826.400,00	3.315.834.863,00	100%	7 Dokumen	
1.02.02.2.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	902.947.500,00	175.780.000,00	100%	1 Dokumen	
1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	30.157.100,00	100%	1 Unit	
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase peningkatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100%	100%	332.750.000,00	183.216.300,00	100%	100%	-
1.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Paket	1 Paket	332.750.000,00	183.216.300,00	100%	1 Paket	
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dalam peningkatan penerbitan izin rumah sakit kelas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	90%	90%	963.100.000,00	76.563.900,00	100%	95%	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat Berj
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2025
					Target	Rp.			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)
1.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	963.100.000,00	76.563.900,00	100%	1 Unit	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	75%	75%	1.915.510.000,00	273.928.573,00	71%	71%	-
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas	200 orang	200 orang	1.915.510.000,00	273.928.573,00	71%	200 orang	-
1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200 orang	200 orang	1.915.510.000,00	273.928.573,00	71%	200 orang	-

Mempawah, 10 Pebruari 2025

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes
NIP. 19720705 200112 1 003

si Capaian Target Daerah s/d Tahun alan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rp.
11 = (10/4)
64,00
44,21
99,87
54,90
40,78
42,03

si Capaian Target Daerah s/d Tahun alan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rp.
11 = (10/4)
41,37
37,05
97,35
97,49
86,54
50,00
19,71

si Capaian Target Daerah s/d Tahun alan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rp.
11 = (10/4)
39,36
39,36
19,60
19,60
49,30
82,08
106,51
37,58
20,22
48,46
62,45

si Capaian Target Daerah s/d Tahun alan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rp.
11 = (10/4)
61,91
10,20
10,20
77,16
75,69
114,00
16,93
44,55
8,11
23,64

si Capaian Target Daerah s/d Tahun alan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rp.
11 = (10/4)
221,87
221,87
21,71
15,02
21,12
26,23
14,55
8,80

si Capaian Target Daerah s/d Tahun alan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rp.
11 = (10/4)
10,20
4,28
8,67
19,47
3,55
55,06
55,06
7,95

si Capaian Target Daerah s/d Tahun alan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rp.
11 = (10/4)
7,95
14,30
14,30
14,30

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
				(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(10)	(11)
1.02.01.2.05.0010	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			14 orang	17 orang	17 orang	10 orang	10 orang	7 orang	10 Orang
1.02.01.2.06	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			90%	95%	95%	90%	90%	90%	95%
1.02.01.2.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
1.02.01.2.06.0002	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
1.02.01.2.06.0003	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
1.02.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
1.02.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
1.02.01.2.06.0009	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
1.02.01.2.06.0010	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1.02.01.2.07	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			85%	90%	90%	0%	0%	80%	95%
1.02.01.2.07.0010	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			12 Unit	15 Unit	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
1.02.01.2.07.0011	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					2 Unit	2 Unit		1 Unit	1 Unit

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
				(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n-1)	(Thn n)
				(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(10)	(11)
1.02.01.2.08	Persentase penyediaan jasa penunjang			90%	95%	95%	85%	85%	90%	95%
1.02.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
1.02.01.2.08.0004	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
1.02.01.2.09	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			90%	95%	95%	85%	85%	90%	95%
1.02.01.2.09.0001	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit
1.02.01.2.09.0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			44 Unit	49 Unit	57 Unit	26 Unit	28 Unit	30 Unit	10 Unit
1.02.01.2.09.0005	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit
1.02.01.2.09.0006	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit
1.02.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit
1.02.01.2.09.0010	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			-		2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit
1.02.01.2.09.0011	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit
1.02.02.2.10	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.10.01	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja
1.02.02.2.01	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.01.0013	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			1	1	1	1	1	1	1
1.02.02.2.01.0014	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.02.02.2.01.0020	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.02.02.2.01.0023	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			17 Paket	20 Paket	20 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
1.02.02.2.02	Persentase peningkatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.0003	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	-	-	-	-	-	30 orang

[illegible]

eksi	Catatan Analisis
Tahun 2026	
(Thn n+1)	
(12)	(13)
100%	
95%	-
2 Dokumen	-
2 Dokumen	-
2 Dokumen	-
2 Dokumen	-
1 Dokumen	-
1 Dokumen	-
1 Dokumen	-
95%	-
400 orang	-
2 Dokumen	-
2 Dokumen	-
1 Dokumen	-
100%	
1 Dokumen	-
95%	-
1 Paket	-

eksi	Catatan Analisis
Tahun 2026	
(Thn n+1)	
(12)	(13)
10 Orang	-
95%	-
1 Paket	-
1 Paket	-
1 Paket	-
1 Paket	-
1 Paket	-
1 Paket	-
1 Laporan	-
1 Dokumen	-
95%	-
3 Unit	-
1 Unit	-

eksi	Catatan Analisis
Tahun 2026	
(Thn n+1)	
(12)	(13)
95%	-
3 Dokumen	-
1 Laporan	-
95%	-
2 Unit	-
10 Unit	-
2 Unit	-
2 Unit	-
2 Unit	-
2 Unit	-
2 Unit	-
100%	-
1 Unit Kerja	-
100%	-
1	-
1 Unit	-
1 Unit	-
2 Paket	-
100%	-
30 orang	-

eksi	Catatan Analisis
Tahun 2026	
(Thn n+1)	
(12)	(13)
5 orang	-
1 Dokumen	-
7 Dokumen	-
2 Dokumen	-
1 Unit	-
100%	-
1 Dokumen	-
95%	-
1 Unit	-
85%	-
71%	-
50 orang	-

Tabel 2.9 (TC-31 PMDN 86/2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPDTahun 2025
RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : RSUDokter Rubini Mempawah

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				Rp 98.350.239.860,00				Rp 90.350.239.860,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		Rp 81.273.600.360,00		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		Rp 81.273.600.360,00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja		Rp 31.977.200,00		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja		Rp 31.977.200,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.042.900,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.042.900,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.340.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.340.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.830.300,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.830.300,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.128.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.128.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.633.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.633.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 15.003.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.003.000,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrais keuangan		Rp 38.749.262.180,00		Persentase pelayanan administrais keuangan		Rp 38.749.262.180,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/Bulan	Rp 38.676.372.580,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/Bulan	38.676.372.580,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Rp 46.751.200,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	46.751.200,00	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 19.722.800,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	19.722.800,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 6.415.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6.415.600,00	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah		Rp 17.945.100,00		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah		Rp 17.945.100,00	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 17.945.100,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 17.945.100,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian		Rp 25.000.000,00		Persentase layanan administrasi kepegawaian		Rp 25.000.000,00	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 25.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	25.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum		Rp 159.911.380,00		Persentase Pelayanan Administrasi Umum		Rp 159.911.380,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 35.585.900,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.585.900,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.221.080,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.221.080,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp 35.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	35.000.000,00	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 24.104.400,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24.104.400,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana		Rp 60.000.000,00		Persentase peningkatan sarana dan prasarana		Rp 60.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 60.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang		Rp 2.000.000.000,00		Persentase penyediaan jasa penunjang		Rp 2.000.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.000.000.000,00		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		Rp 229.504.500,00		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		Rp 229.504.500,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 25.926.900,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.926.900,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 102.577.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	102.577.600,00		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 30.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000,00		
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 10.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00		
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 61.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.000.000,00		
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Rp 40.000.000.000,00		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Rp 40.000.000.000,00		
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Rp 40.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 16.976.639.500,00		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 8.976.639.500,00		
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 11.388.663.950,00		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		Rp 3.388.663.950,00		
Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unit	Rp 128.785.800,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unit	128.785.800,00		
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 8.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	Rp 259.878.150,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	Rp 259.878.150,00		

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00		
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan		5.323.759.950,00		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan		5.323.759.950,00		
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kabupaten Mempawah	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Rp 45.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	45.000.000,00		
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Rp 31.791.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	31.791.600,00		
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 50.855.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	50.855.000,00		
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	Rp 4.959.013.600,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	4.959.013.600,00		
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	200.000.000,00		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Rp 37.099.750,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	37.099.750,00		
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan		Rp 186.329.500,00		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan		Rp 186.329.500,00		
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 186.329.500,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	186.329.500,00		
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan		Rp 77.886.100,00		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan		Rp 77.886.100,00		
Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingakt Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Rp 77.886.100,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	77.886.100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar		Rp 100.000.000,00		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar		Rp 100.000.000,00		

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Persentase pemenuhan SDM kesehatan		Rp 100.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Persentase pemenuhan SDM kesehatan		Rp 100.000.000,00		
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	Rp 100.000.000,00	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	100.000.000,00		



Tabel T - C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Rubini Mempawah

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi perangkat daerah	100 %	Rp 81.273.600.360,00	
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	100%	Rp 31.977.200,00	
1.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.042.900,00	
1.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.340.000,00	
1.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.830.300,00	
1.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.128.000,00	
1.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.633.000,00	
1.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 15.003.000,00	
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrais keuangan	100%	Rp 38.749.262.180,00	
1.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/Bulan	Rp 38.676.372.580,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Rp 46.751.200,00	
1.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 19.722.800,00	
1.02.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 6.415.600,00	
1.02.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah	100%	Rp 17.945.100,00	
1.02.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 17.945.100,00	
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	Rp 25.000.000,00	
1.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 25.000.000,00	
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	Rp 159.911.380,00	
1.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.000.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 35.585.900,00	
1.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.000.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.221.080,00	
1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp 35.000.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 24.104.400,00	
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp 60.000.000,00	
1.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 60.000.000,00	
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	Rp 2.000.000.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	Rp 229.504.500,00	
1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 25.926.900,00	
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 102.577.600,00	
1.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 30.000.000,00	
1.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 10.000.000,00	
1.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 61.000.000,00	
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	Rp 40.000.000.000,00	
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Rp 40.000.000.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100 %	Rp 8.976.639.500,00	
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100 %	Rp 3.388.663.950,00	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unit	Rp 128.785.800,00	
1.02.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -	
1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	Rp 259.878.150,00	
1.02.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00	
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	100 %	Rp 5.323.759.950,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kabupaten Mempawah	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Rp 45.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Rp 31.791.600,00	
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 50.855.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.02.2.02.0032	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	Rp 4.959.013.600,00	
1.02.02.2.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	
1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Rp 37.099.750,00	
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	100%	Rp 186.329.500,00	
1.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 186.329.500,00	
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	100%	Rp 77.886.100,00	
1.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Rp 77.886.100,00	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	75%	Rp 100.000.000,00	
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Persentase pemenuhan SDM kesehatan	71%	Rp 100.000.000,00	
1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	Rp 100.000.000,00	
					Rp 90.350.239.860,00	

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dokter Rubini Mempawah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				Rp 90.350.239.860,00				Rp 94.661.884.615,00
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran			Rp 81.273.600.360,00				Rp 85.585.267.315,00
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja			Rp 31.977.200,00				Rp 31.975.900,00
1.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	Rp 5.042.900,00	APBD		2 Dokumen	5.042.600,00
1.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 3.340.000,00	APBD		1 Dokumen	3.339.800,00
1.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 2.830.300,00	APBD		1 Dokumen	2.830.000,00
1.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 3.128.000,00	APBD		1 Dokumen	3.127.700,00
1.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 2.633.000,00	APBD		1 Dokumen	2.633.000,00
1.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 15.003.000,00	APBD		1 Laporan	15.002.800,00
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan			Rp 38.749.262.180,00				Rp 41.036.945.369,00
1.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	400 Orang/Bulan	Rp 38.676.372.580,00	APBD		400 orang/bulan	40.964.056.369,00
1.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	Rp 46.751.200,00	APBD		2 Dokumen	46.751.200,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	2 Laporan	Rp 19.722.800,00	APBD		2 Laporan	19.722.400,00
1.02.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 6.415.600,00	APBD		1 Laporan	6.415.400,00
1.02.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah			Rp 17.945.100,00				Rp 17.944.900,00
1.02.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 17.945.100,00	APBD		1 Dokumen	Rp 17.944.900,00
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian			Rp 25.000.000,00				Rp 25.000.000,00
1.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Rp -				-
1.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	10 Orang	Rp 25.000.000,00	APBD		10 Orang	25.000.000,00
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			Rp 159.911.380,00				Rp 159.907.400,00
1.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 15.000.000,00	APBD		1 Paket	14.999.500,00
1.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 35.585.900,00	APBD		1 Paket	35.583.300,00
1.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 25.000.000,00	APBD		1 Paket	25.000.000,00
1.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 25.221.080,00	APBD		1 Paket	25.220.700,00
1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	1 laporan	Rp 35.000.000,00	APBD		1 laporan	35.000.000,00
1.02.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 24.104.400,00	APBD		1 Dokumen	24.103.900,00
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemuniang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			Rp 60.000.000,00				Rp 60.000.000,00
1.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 60.000.000,00	APBD		1 Unit	60.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang			Rp 2.000.000.000,00	Rp -			Rp 2.000.000.000,00
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	3 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	APBD		3 Laporan	2.000.000.000,00
1.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			Rp 229.504.500,00				Rp 229.493.746,00
1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 25.926.900,00	APBD		1 Unit	25.922.646,00
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Mempawah	10 Unit	Rp 102.577.600,00	APBD		10 Unit	102.571.100,00
1.02.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara			Rp -				-
1.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 30.000.000,00	APBD		1 Unit	30.000.000,00
1.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Unit	10.000.000,00
1.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			Rp -				-
1.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 61.000.000,00	APBD		1 Unit	61.000.000,00
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			Rp 40.000.000.000,00				Rp 42.024.000.000,00
1.02.02.2.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kabupaten Mempawah	1 Unit Kerja	Rp 40.000.000.000,00	BLUD		1 Unit Kerja	42.024.000.000,00
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			Rp 8.976.639.500,00				Rp 8.976.617.300,00
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			Rp 3.388.663.950,00	APBD			3.388.663.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 128.785.800,00	APBD		1 Unit	128.785.800,00
1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	2 Unit	Rp 259.878.150,00	APBD		2 Unit	Rp 259.877.700,00
1.02.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	2 Paket	Rp 3.000.000.000,00	APBD		2 Paket	Rp 3.000.000.000,00
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan			5.323.759.950,00	-			5.323.740.300,00
1.02.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	420 Orang	Rp 45.000.000,00	APBD		420 Orang	45.000.000,00
1.02.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	400 Orang	Rp 31.791.600,00	APBD		15 Orang	31.791.200,00
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 50.855.000,00	APBD		1 Dokumen	50.836.300,00
1.02.02.2.02.0032	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	Rp 4.959.013.600,00	APBD		2 Dokumen	4.959.013.500,00
1.02.02.2.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 37.099.750,00	APBD		1 Unit	37.099.300,00
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan			Rp 186.329.500,00				Rp 186.327.700,00
1.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 186.329.500,00	APBD		1 Dokumen	186.327.700,00
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan			Rp 77.886.100,00				Rp 77.885.800,00
1.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingakt Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 77.886.100,00	APBD		1 Unit	77.885.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar			Rp 100.000.000,00				Rp 100.000.000,00
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	Kabupaten Mempawah		Rp 100.000.000,00				Rp 100.000.000,00
1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kabupaten Mempawah	50 Orang	Rp 100.000.000,00	APBD		50 Orang	100.000.000,00

Mempawah, 5 Agustus 2025

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes
NIP. 19720705 200112 1 003



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

KABUPATEN MEMPAWAH

Jln. D. Manambon Telp. (0561) 691144 Fax. (0561) 691144

M E M P A W A H



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Mempawah, 5 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MEMPAWAH

HAMDANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19670818 199403 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	43
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB V PENUTUP	66



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga diwajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang di selenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja SKPD.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagai Satuan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini menyusun rencana kerja perubahan (RENJA) Kabupaten Mempawah untuk rencana kerja Tahun 2025, Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025, merupakan rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah seperti yang tertuang dalam RPD 2025-2026 dalam Misi 1 yaitu *"Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien"* dan Misi 4 yaitu *"Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif Secara Merata"*



Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 harus mampu :

1. Mencangkup semua pesan yang terdapat dalam visi dan Misi.
2. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
3. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang mana yang dilayani.

Berdasarkan acuan tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan
2. Tersedianya Bangunan Gedung yang Sesuai Fungsinya dan Standar Bangunan Gedung Negara.
3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Bagi Masyarakat.
4. Mempercepat Serta Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Pengairan, Pengendalian Banjir dan Konservasi Sumber Daya Air.
5. Terkendalinya Pembangunan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Wilayah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
6. Pelayanan Prima

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah untuk Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah tahun 2025 adalah agar terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah untuk Tahun 2025;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan antar sektor dan bagian;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui penetapan indikator kinerja berupa ukuran kuantitatif dan kualitatif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

1. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap.
2. Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik.
3. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 Itr Perorang Perhari.
4. Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan.
5. Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan.



6. Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan
Peta Digital

2. Capaian dan Evaluasi Program /Kegiatan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Jumlah Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 251.503.075.518,00
dengan rincian :

- a. Belanja Operasi Rp. 54.432.259.215,00
- b. Belanja Modal Rp. 197.070.816.303,00

Dari jumlah Belanja Daerah tersebut di atas telah terealisasi sebesar
Rp. 245.170.402.349,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar
99,32%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Mempawah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam
rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Sebagaimana dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
pada Tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024
Kabupaten Mempawah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten		Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	62,55 %	63,30 %	-	-	-	59,10 %	60,95 %	66,90 %	62,55 %	
2	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara		Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik	72,00 %	73,00 %	-	-	-	56,00 %	70,00 %	75,00 %	72,00 %	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	75,00 %	75,50 %	-	-	-	63,73 %	73,42 %	71,00 %	75,00 %	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan		Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	88,00 %	88,50 %	-	-	-	80,07 %	86,74 %	83,00 %	88,00 %	
5	Meningkatnya Ketersediaan Air yang berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan	56,00 %	58,00 %	-	-	-	24,27 %	25,45 %	26,67 %	56,00 %	
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	44,00 %	56,00 %	-	-	-	30,00 %	33,33 %	50,00 %	44,00 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Sinergi Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi melalui kegiatan Musrenbang serta dengan Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

- Untuk mengurangi laju penurunan kondisi terutama pada ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang saat ini mengandalkan pada sub kegiatan Rekonstruksi jalan dan sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola.
- Kurang disiplinnya masyarakat pengguna jalan terhadap batasan muatan kendaraan dan musim penghujan merupakan faktor yang dominan penyebab kerusakan jalan.
- Kurangnya database sambungan rumah air bersih/air minum yang aman bagi masyarakat khususnya data akses air bersih/air minum bukan jaringan perpipaan.
- Kurangnya Jaringan Irigasi Rawa yang dapat dioperasikan dan terpelihara dengan baik
- Belum optimalnya alokasi anggaran sangat mempengaruhi pencapaian target kinerja nasional
- Terus bertambahnya PNS tenaga teknis yang purna tugas dan meninggal dunia mempengaruhi kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah membutuhkan sumberdaya manusia



yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MEMPAWAH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	Nilai SAKIP	72 %	6.443.928.924,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	Nilai SAKIP	72 %	6.443.928.924,00	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	38.500.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	38.500.200,00	
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000,00	
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	15.000.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	15.000.200,00	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.501.844.100,00	Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang difasilitasi	Kab. Mempawah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang difasilitasi	100%	7.501.844.100,00	
2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang / Bulan	7.400.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang / Bulan	7.400.000.000,00	
2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dokumen	77.844.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dokumen	77.844.000,00	
2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.500.000,00	
2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.100,00	
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	42.937.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	42.937.500,00	
2.03	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42.937.500,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42.937.500,00	



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	98%	89.738.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	98%	89.738.800,00	
2.05	02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54.738.800,00	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54.738.800,00	
2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	35.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	35.000.000,00	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	203.063.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	203.063.900,00	
2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.999.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.999.800,00	
2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.503.900,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.503.900,00	
2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.580.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.580.000,00	
2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	
2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	
2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75.000.000,00	
2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	24.000.200,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	24.000.200,00	
2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	479.648.624,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	479.648.624,00	



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00
2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.648.624,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.648.624,00
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	88%	88.195.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	88.195.800,00
2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000,00
2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	35.000.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	35.000.800,00
2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.025.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.025.000,00
2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.140.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.140.000,00
2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	23 Unit	14.030.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	23 Unit	14.030.000,00
2.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Air	26,67%	25.125.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Air	26,67%	25.125.000.000,00
2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	17.725.000.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	17.725.000.000,00



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Mempawah	Parang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5,95 KM	8.025.000.000,00	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Mempawah	Parang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5,95 KM	8.025.000.000,00	
2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Mempawah	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	5 Unit	1.000.000.000,00	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Mempawah	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	5 Unit	1.000.000.000,00	
2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Mempawah	Parang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	124,01 KM	8.600.000.000,00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Mempawah	Parang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	124,01 KM	8.600.000.000,00	
2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pengelolaan SDA Kawasan Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pengelolaan SDA Kawasan Kabupaten/Kota	220 Orang	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pengelolaan SDA Kawasan Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pengelolaan SDA Kawasan Kabupaten/Kota	220 Orang	100.000.000,00	
2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	7.400.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	7.400.000.000,00	
2.02	01	Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Mempawah	Jumlah Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	400.000.000,00	Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Mempawah	Jumlah Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	400.000.000,00	
2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Parang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	9,11 KM	500.000.000,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Parang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	9,11 KM	500.000.000,00	
2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Parang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	63,42 KM	5.000.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Parang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	63,42 KM	5.000.000.000,00	
2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Parang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	30,27 KM	1.500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Parang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	30,27 KM	1.500.000.000,00	
3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Mempawah	Persentase jumlah pelayanan pemerintahan, hukum, kesejahteraan sosial dan masyarakat	71 %	112.400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Mempawah	Persentase jumlah pelayanan pemerintahan, hukum, kesejahteraan sosial dan masyarakat	71 %	112.400.000.000,00	



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Layanan Air Bersih/Air Minum yang tersambung kerumah masyarakat	71 %	112.400.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Layanan Air Bersih/Air Minum yang tersambung kerumah masyarakat	71 %	112.200.000.000,00
2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Mempawah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Mempawah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	200.000.000,00
2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Mempawah	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	20 Liter/Detik	60.000.000.000,00	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Mempawah	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	20 Liter/Detik	60.000.000.000,00
2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mempawah	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan Padat Karya SPAM Berbasis Masyarakat	250 SR	15.000.000.000,00	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mempawah	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan Padat Karya SPAM Berbasis Masyarakat	250 SR	15.000.000.000,00
2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Mempawah	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Karya SPAM Berbasis Masyarakat	100 RT	6.000.000.000,00	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mempawah	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Karya SPAM Berbasis Masyarakat	100 RT	6.000.000.000,00
2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	760 RT	11.200.000.000,00	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	760 RT	11.200.000.000,00
2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit SPAM Jaringan Perpipaan yang di Optimalkan	400 Unit	20.000.000.000,00	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit SPAM Jaringan Perpipaan yang di Optimalkan	400 Unit	20.000.000.000,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	83%	15.600.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	85%	15.600.000.000,00



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Akses Layanan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten	83%	15.600.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Akses Layanan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten	85%	15.600.000.000,00	
2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Mempawah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	5 Dokumen	500.000.000,00	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	5 Dokumen	500.000.000,00	
2.01	03	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	525 RT	4.500.000.000,00	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	525 RT	4.500.000.000,00	
2.01	05	Rahabiltasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimisasi SPALD-T Skala Permukiman	85 RT	500.000.000,00	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimisasi SPALD-T Skala Permukiman	85 RT	500.000.000,00	
2.01	11	Supervisi Pembangunan/ Rahabiltasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rahabiltasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen	100.000.000,00	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rahabiltasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen	100.000.000,00	
2.01	12	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	475 RT	10.000.000.000,00	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	475 RT	10.000.000.000,00	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	72%	15.000.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	72%	15.000.000.000,00	
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Luasan Grogas Air di Kawasan Permukiman	72%	15.000.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Luasan Grogas Air di Kawasan Permukiman	72%	15.000.000.000,00	



Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Mempawah	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	650 M	5.000.000.000,00	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Mempawah	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	650 M	5.000.000.000,00	
2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mempawah	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1200 M	10.000.000.000,00	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mempawah	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1200 M	10.000.000.000,00	
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Kab. Mempawah	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang Berkualitas	100%	71.000.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Mempawah	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang Berkualitas	100%	71.000.000.000,00	
2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	71.000.000.000,00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	71.000.000.000,00	
2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25 Sistem Jaringan	70.000.000.000,00	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25 Sistem Jaringan	70.000.000.000,00	
2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	1.000.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	1.000.000.000,00	
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Kab. Mempawah	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	100%	56.000.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Mempawah	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	100%	56.000.000.000,00	
2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Mempawah	Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	56.000.000.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Mempawah	Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	56.000.000.000,00	



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mempawah	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mempawah	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	100.000.000,00
2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000.000,00	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000.000,00
2.01	13	Peneliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Peneliharaan dan Perawatan	3 Unit	5.900.000.000,00	Peneliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Peneliharaan dan Perawatan	3 Unit	5.900.000.000,00
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Kab. Mempawah	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100%	14.150.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Mempawah	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100%	14.150.000.000,00
2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	14.150.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	14.150.000.000,00
2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	14.000.000.000,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	14.000.000.000,00



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	03	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	50.000.000,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Dokumen	50.000.000,00	
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Kab. Mempawah	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	66,90%	631.784.104.689,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Mempawah	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	66,90%	631.784.104.689,00	
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik	31,80%	631.784.104.689,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik	31,80%	631.784.104.689,00	
				Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Sedang	35,10%			Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Sedang	35,10%		
				Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik	83,08%			Kab. Mempawah	Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik	83,08%		
2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	12 Dokumen	1.151.373.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	12 Dokumen	1.151.373.000,00	
2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	500.000.000,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	500.000.000,00	
2.01	05	Pembangunan Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang dibangun	4,15 KM	24.097.939.689,00	Pembangunan Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang dibangun	4,15 KM	24.097.939.689,00	
2.01	08	Rakonstruksi Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang dilakukan Rakonstruksi Jalan	68 KM	527.884.792.000,00	Rakonstruksi Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang dilakukan Rakonstruksi Jalan	68 KM	527.884.792.000,00	
2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14 KM	46.750.000.000,00	Rehabilitasi Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14 KM	46.750.000.000,00	
2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1,40 KM	500.000.000,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1,40 KM	500.000.000,00	



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6,20 KM	5.000.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6,20 KM	5.000.000.000,00	
2.01	12	Pembangunan Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dibangun	80 M	4.300.000.000,00	Pembangunan Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dibangun	80 M	4.300.000.000,00	
2.01	16	Penggantian Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	250 M	16.100.000.000,00	Penggantian Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	250 M	16.100.000.000,00	
2.01	17	Pelebaran Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	150 M	2.800.000.000,00	Pelebaran Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	150 M	2.800.000.000,00	
2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	175 M	2.450.000.000,00	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	175 M	2.450.000.000,00	
2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	50 M	250.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	50 M	250.000.000,00	
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Kab. Mempawah	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development	50%	1.580.700.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Mempawah	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development	50%	1.580.700.000,00	
2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	100%	444.900.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	100%	444.900.000,00	
2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	94.900.000,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	94.900.000,00
2.02	Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota		Kab. Mempawah	Persentase Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota	100%	805.000.000,00	Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota	Kab. Mempawah	Persentase Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota	100%	805.000.000,00
2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000,00
2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	55.000.000,00	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	55.000.000,00
2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/ Kota		Kab. Mempawah	Persentase Koordinasi & Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/ Kota	100%	175.800.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/ Kota	Kab. Mempawah	Persentase Koordinasi & Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/ Kota	100%	175.800.000,00
2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00



*Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	25.800.000,00	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	25.800.000,00	
2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Kab. Mempawah	Persentase jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	155.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Kab. Mempawah	Persentase jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	155.000.000,00	
2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	55.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	55.000.000,00	
2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah akan menambah program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Mempawah lainnya. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah untuk membuat usulan program/kegiatan. Untuk tahun 2025 ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Kabupaten Banjarnegara seperti yang terlihat pada Tabel T-C.32.



Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN MEMPAWAH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program /Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Mempawah	Nilai SAKIP	72,50 %	7.853.500.000,00
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	50.000.000,00
2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.500.000,00
2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00
2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	5.000.000,00
2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00



Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	5.000.000,00
2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	17.500.000,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.606.000.000,00
2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang / Bulan	7.500.000.000,00
2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	650 Dokumen	80.000.000,00
2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.500.000,00
2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	8.500.000,00



Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	25.000.000,00
2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	98 %	140.000.000,00
2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	80.000.000,00
2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	60.000.000,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	290.000.000,00
2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00
2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00



Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	100.000.000,00
2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	27.500.000,00
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.655.000.000,00
2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	550.000.000,00
2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	900.000.000,00
2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00
2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00
2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	75.000.000,00
2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Mempawah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	200.000.000,00



Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	400.000.000,00
2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	98 %	160.000.000,00
2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000,00
2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	40.000.000,00
2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	10.000.000,00
2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	23 Unit	20.000.000,00
2.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Air	26,67 %	56.600.000.000,00



2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	34.100.000.000,00
2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Mempawah	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	14 Unit	1.500.000.000,00
2.01	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	200 Lembaga	100.000.000,00
2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Mempawah	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	142,50 KM	10.000.000.000,00
2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Mempawah	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	9,5 KM	20.000.000.000,00
2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Mempawah	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	24 Unit	2.500.000.000,00
2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	22.500.000.000,00
2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	4,75 KM	10.000.000.000,00
2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	4,75 KM	10.000.000.000,00
2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Mempawah	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	60 KM	2.000.000.000,00



2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Mempawah	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen	500.000.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Kab. Mempawah	Persentase jumlah pelayanan pemerintahan, hukum, kesejahteraan sosial dan masyarakat	71 %	74.200.000.000,00
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Layanan Air Bersih/Air Minum yang tersambung kerumah masyarakat	71 %	74.200.000.000,00
2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1800 Unit	7.200.000.000,00
2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000,00
2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Mempawah	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	5.000.000.000,00
2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Mempawah	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	100 Liter/Detik	50.000.000.000,00
2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2.500.000.000,00



2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5 Unit	5.000.000.000,00
2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Mempawah	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5812 SR	3.500.000.000,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SITEM AIR LIMBAH		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	83 %	21.300.000.000,00
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Akses Layanan Air Limbah Domistik Dalam Daerah Kabupaten	83 %	21.300.000.000,00
2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Mempawah	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	26000 M ³ /Hari	4.000.000.000,00
2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kab. Mempawah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0,16 M ³ /Hari	6.000.000.000,00
2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Mempawah	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0,08 M ³ /Hari	6.000.000.000,00
2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	120 RT	1.200.000.000,00
2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Mempawah	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20 M ³ /Hari	3.500.000.000,00



2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	600.000.000,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SITEM DRAINASE		Kab. Mempawah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	72 %	20.800.000.000,00
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Presentase Luasan Gengan Air di Kawasan Permukiman	72 %	20.800.000.000,00
2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mempawah	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M	10.000.000.000,00
2.01	0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	10 Unit	750.000.000,00
2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	5 Dokumen	50.000.000,00
2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Mempawah	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Kab. Mempawah	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	50 %	5.850.000.000,00
2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Kab. Mempawah	Jumlah Bangunan Gedung Negara	55 %	5.850.000.000,00



2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	40 Bangunan Gedung	1.750.000.000,00
2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	3.500.000.000,00
2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Mempawah	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	20 Orang	500.000.000,00
2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Mempawah	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	75 Dokumen	100.000.000,00
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Kab. Mempawah	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	53,59 %	31.350.000.000,00
2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota		Kab. Mempawah	Persentase Jalan Lingkungan	53,59 %	31.350.000.000,00



2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	30 Dokumen	800.000.000,00
2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	500 Kawasan	30.000.000.000,00
2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	550.000.000,00
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Kab. Mempawah	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	66,90 %	149.966.413.257,00
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik	31,80 %	149.966.413.257,00
				Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Sedang	35,10 %	
				Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik	83,08 %	
2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	12 Dokumen	1.151.373.000,00



Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2.01	0031	Penggantian Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	2 Jembatan	525.000.000,00
2.01	0032	Pembangunan Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang dibangun	0,696 KM	2.000.000.000,00
2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	28,279 KM	130.000.000.000,00
2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,468 KM	5.525.040.257,00
2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	250.000.000,00
2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	600.000.000,00
2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	735.000.000,00
2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	632,073 KM	300.000.000,00
2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,492 KM	7.000.000.000,00
2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Mempawah	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Rutin	1,400 KM	1.380.000.000,00
2.01	0048	Pelebaran Jembatan	Kab. Mempawah	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	3 Jembatan	500.000.000,00



9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Kab. Mempawah	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development	50 %	1.224.900.000,00
2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 %	349.900.000,00
2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00
2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.000.000,00
2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.000.000,00
2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kab. Mempawah	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	94.900.000,00
2.02	Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota		Kab. Mempawah	Persentase Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	100 %	200.000.000,00



2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00
2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00
2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab / Kota		Kab. Mempawah	Persentase Koordinasi & Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab / Kota	100 %	450.000.000,00
2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	320.000.000,00
2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan	75.000.000,00
2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	25.000.000,00
2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Mempawah	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	30.000.000,00



2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota		Kab. Mempawah	Persentase jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100 %	225.000.000,00
2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00
2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan ungsi Forum Penataan Ruang	1 Dokumen	25.000.000,00
2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Kab. Mempawah	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	25.000.000,00
2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kab. Mempawah	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	25.000.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agenda Prioritas Nasional yang disusun dalam 9 Agenda Prioritas (Nawacita) yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan.
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem Penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah 9 ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.
2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

4.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Renja merupakan penjabaran dari pernyataan Rencana Strategis sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang, oleh sebab itu tujuan disusunnya Renja SKPD untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing - masing Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan
2. Tersedianya Bangunan Gedung yang Sesuai Fungsinya dan Standar Bangunan Gedung Negara.

3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Bagi Masyarakat.
4. Mempercepat Serta Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Pengairan, Pengendalian Banjir dan Konservasi Sumber Daya Air.
5. Terkendalinya Pembangunan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Wilayah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
6. Pelayanan Prima

4.3. Program dan Kegiatan

Pembangunan Infrastruktur sangatlah penting dalam mendukung pembangunan nasional, regional maupun lokal, dalam melayani mobilitas orang, barang, jasa, distribusi komoditi, perdagangan dan industri seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan serta sebagai penunjang, pendorong, penggerak pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah sebagai fungsi Pelayanan Publik.

Keberadaan infratraktur yang bersifat strategis sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya roda perekonomian antara lain untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah adalah sesuai tabel T-C.33.



No	Kode	LOKASI / TINGKAT BUDAYA / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RESOLUSI PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JANGKA PENDIRIAN RESTRUKTURISASI 000	REKORD CAPAIAN RESTRUKTURISASI 000	PENGALAMAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI 000	CAPAIAN KINERJA DAN KETERANGAN PERINGKAT											KEL. JANGKA SARAF	PENGALAMAN KINERJA TANGGUNG JAWAB		PENGALAMAN KINERJA TANGGUNG JAWAB
							TANGGUNG JAWAB			PENGALAMAN KINERJA (Rp)			Berkas/Keputusan (10-12)	LOKASI	SARAF	PENGALAMAN KINERJA					
							RESTRUKTURISASI	RESTRUKTURISASI	RESTRUKTURISASI	RESTRUKTURISASI	RESTRUKTURISASI	RESTRUKTURISASI				RESTRUKTURISASI	RESTRUKTURISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DATA PERKEMBANGAN DAN PERKEMBANGAN							421.077.341.000,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	421.077.341.000,00							30.000.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN KELAS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							421.077.341.000,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	421.077.341.000,00							30.000.000,00		
1.00		URUSAN PEMERINTAHAN KELAS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							421.077.341.000,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	421.077.341.000,00							30.000.000,00		
1.10.01		PROSES PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KELAS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Tingkat Ekspansi Bilang Tingkat Pelayanan Kendatikan				75 Person	75 Person	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00							8.000.000.000,00		
1.10.01.01		Proses Pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN KELAS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Proses Pemeliharaan URUSAN PEMERINTAHAN KELAS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100 Person	100 Person	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00							8.000.000.000,00	DATA/PROSEDUR URUSAN DAN PENGALAMAN KINERJA	
1.10.01.01.0001		Pengawasan Dokumen Pemeliharaan Pemeliharaan Dasar																			
		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Pemeliharaan Dasar					2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.500.000,00							8.000.000,00	DATA/PROSEDUR URUSAN DAN PENGALAMAN KINERJA	
1.10.01.01.01.0002		Kontrol dan Pengawasan Dokumen Pemeliharaan DASAR																			
		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Pemeliharaan Dasar					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00							1.000.000,00	DATA/PROSEDUR URUSAN DAN PENGALAMAN KINERJA	
1.10.01.01.01.0003		Kontrol dan Pengawasan Dokumen Pemeliharaan DASAR																			
		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Dasar					3 Dokumen	3 Dokumen	3.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00							1.000.000,00	DATA/PROSEDUR URUSAN DAN PENGALAMAN KINERJA	
1.10.01.01.01.0004		Kontrol dan Pengawasan Dokumen Pemeliharaan DASAR																			
		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Dasar					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00							1.000.000,00	DATA/PROSEDUR URUSAN DAN PENGALAMAN KINERJA	

46

47

48

49

50

51



Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

1.30.30.2.01.0030	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jangka Panjang					20 10/04/2024	20 10/04/2024	15.000.000.000,00	1.041.304.888,80	1.141.304.000,00	8.801.000.000,00	Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kantor Bupati	DANA KURASI JABAR (KUR) DNC 7 (Lima Belas) R. RUP. MANGKAP URDAYA	Revisi/pekerjaan pengembangan infrastruktur dan memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan memelihara memperbaiki infrastruktur untuk memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan di area produksi maka akan ada kegiatan	Perencanaan Perencanaan Ruang Lingkup Baru Perencanaan Ruang Lingkup Baru			5.880.000.000,00	ORANG-POKOKAN LUMUT DAN PENYAKIT LUMUT
1.30.30.2.01.0040	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jangka Panjang					10/04/2024	10/04/2024	11.200.000.000,00	32.111.000.000,00	4.890.000.000,00	43.901.111.000,00	Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kantor Bupati	DANA LUMUT PENYAKIT LUMUT DNC 7 (Lima Belas) R. RUP. MANGKAP URDAYA	Revisi/pekerjaan pengembangan infrastruktur dan memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan memelihara memperbaiki infrastruktur untuk memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan di area produksi maka akan ada kegiatan	Perencanaan Perencanaan Ruang Lingkup Baru Perencanaan Ruang Lingkup Baru			10.880.000.000,00	ORANG-POKOKAN LUMUT DAN PENYAKIT LUMUT
1.30.30.2.01.0050	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					20/04/2024	20/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kantor Bupati	DANA LUMUT PENYAKIT LUMUT DNC 7 (Lima Belas) R. RUP. MANGKAP URDAYA	Revisi/pekerjaan pengembangan infrastruktur dan memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan memelihara memperbaiki infrastruktur untuk memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan di area produksi maka akan ada kegiatan	Perencanaan Perencanaan Ruang Lingkup Baru Perencanaan Ruang Lingkup Baru			0,00	ORANG-POKOKAN LUMUT DAN PENYAKIT LUMUT
1.30.30.2.01.0060	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jangka Panjang					5/04/2024	5/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kantor Bupati	DANA LUMUT PENYAKIT LUMUT DNC 7 (Lima Belas) R. RUP. MANGKAP URDAYA	Revisi/pekerjaan pengembangan infrastruktur dan memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan memelihara memperbaiki infrastruktur untuk memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan di area produksi maka akan ada kegiatan	Perencanaan Perencanaan Ruang Lingkup Baru Perencanaan Ruang Lingkup Baru			0,00	ORANG-POKOKAN LUMUT DAN PENYAKIT LUMUT
1.30.30.2.01.0070	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jangka Panjang					5/04/2024	5/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kantor Bupati	DANA LUMUT PENYAKIT LUMUT DNC 7 (Lima Belas) R. RUP. MANGKAP URDAYA	Revisi/pekerjaan pengembangan infrastruktur dan memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan memelihara memperbaiki infrastruktur untuk memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan di area produksi maka akan ada kegiatan	Perencanaan Perencanaan Ruang Lingkup Baru Perencanaan Ruang Lingkup Baru			0,00	ORANG-POKOKAN LUMUT DAN PENYAKIT LUMUT
1.30.30.2.01.0080	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jangka Panjang					5/04/2024	5/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kantor Bupati	DANA LUMUT PENYAKIT LUMUT DNC 7 (Lima Belas) R. RUP. MANGKAP URDAYA	Revisi/pekerjaan pengembangan infrastruktur dan memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan memelihara memperbaiki infrastruktur untuk memperbaiki kegiatan kerja yang berkaitan di area produksi maka akan ada kegiatan	Perencanaan Perencanaan Ruang Lingkup Baru Perencanaan Ruang Lingkup Baru			0,00	ORANG-POKOKAN LUMUT DAN PENYAKIT LUMUT

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD 2025-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada BAB III Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun berdasarkan usulan masyarakat, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Mempawah serta target dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2020-2024.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Mempawah, 5 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MEMPAWAH



HAMDANI, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19670818 199403 1 008



**Pemerintah Daerah
Kabupaten Mempawah**

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) Tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahunan merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini Adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan di Bidang Sosial. Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah pada Tahun-tahun berikutnya.



Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kekuatan kepada kita dalam mengemban Amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan Ammiiinn

Mempawah,

2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan Kabupaten Mempawah



ABDURAHMAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19760716 200212 1 005



DAFTAR ISI

Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 32

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 47

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 47

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 68

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 71

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 73

3.3.Program dan Kegiatan 73

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 94

BAB V PENUTUP 100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2025, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat
2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program Kabupaten
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan TW II

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

- tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;
 29. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.
 30. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Mempawah adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II dan Capaian Renstra
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 3.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 3.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No Rek					Program dan Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2024 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2024 (Rp)	%
					BELANJA DAERAH	20.323.191.645	19.638.244.749	96,63%
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.797.093.445	19.230.580.169	97,14%
1	04	01	.	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.835.556.845	3.693.406.429	96,29%
1	04	01	2.01	.	Kegiatan PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.685.800	29.354.915	98,89%
1	04	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.418.000	98,91%
1	04	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.000.000	2.931.025	97,70%
1	04	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.500.000	1.499.830	99,99%
1	04	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1.500.000	1.499.830	99,99%
1	04	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	1.500.000	1.499.830	99,99%
1	04	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.685.800	14.506.400	98,78%
1	04	01	2.02	.	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.401.523.261	3.353.502.349	98,59%
1	04	01	2.02	0001	Sub Kegiatan PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.335.593.861	3.287.765.949	98,57%
1	04	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	45.945.800	45.945.800	100,00%
1	04	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.983.600	14.828.200	98,96%
1	04	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	5.000.000	4.962.400	99,25%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No Rek					Program dan Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2024 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2024 (Rp)	%
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1	04	01	2.03	.	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH pada PERANGKAT DAERAH	16.008.550	16.000.500	99,95%
1	04	01	2.03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	16.008.550	16.000.500	99,95%
1	04	01	2.05	.	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	17.920.000	59,73%
1	04	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	30.000.000	17.920.000	59,73%
1	04	01	2.06	.	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	136.292.400	113.580.629	83,34%
1	04	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.996.900	2.996.900	100,00%
1	04	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.174.350	27.219.425	90,21%
1	04	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.360.000	15.120.000	98,44%
1	04	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.764.600	28.368.450	95,31%
1	04	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000	18.072.829	50,20%
1	04	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.996.550	21.803.025	99,12%
1	04	01	2.08	.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.457.584	108.962.386	67,49%
1	04	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	101.000.000	62.982.751	62,36%
1	04	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.457.584	45.979.635	76,05%
1	04	01	2.09	.	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.589.250	54.085.650	89,27%
1	04	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.856.250	20.252.250	88,61%
1	04	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	22.500.000	18.600.400	82,67%
1	04	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.993.000	4.993.000	100,00%
1	04	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.140.000	4.140.000	100,00%
1	04	01	2.09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000	6.100.000	100,00%
1	04	02	.	.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	329.403.750	31.559.300	9,58%
1	04	02	2.01	.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	23.883.450	16.489.800	69,04%
1	04	02	2.01	0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	23.883.450	16.489.800	69,04%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No Rek					Program dan Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2024 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2024 (Rp)	%
1	04	02	2.02	.	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	36.020.300	14.223.700	39,49%
1	04	02	2.02	0006	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	36.020.300	14.223.700	39,49%
1	04	02	2.03	.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	269.500.000	845.800	0,31%
1	04	02	2.03	0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	269.500.000	845.800	0,31%
1	04	03	.	.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.260.362.800	5.184.651.960	98,56%
1	04	03	2.02	.	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha	28.241.300	25.235.180	89,36%
1	04	03	2.02	0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	28.241.300	25.235.180	89,36%
1	04	03	2.03	.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha	5.232.121.500	5.159.416.780	98,61%
1	04	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.110.800.000	5.108.261.900	99,95%
1	04	03	2.03	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	23.000.000	20.483.840	89,06%
1	04	03	2.03	0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	17.035.550	13.506.100	79,28%
1	04	03	2.03	0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	81.285.950	17.164.940	21,12%
1	04	05	.	.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.371.770.050	10.320.962.480	99,51%
1	04	05	2.01	.	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.371.770.050	10.320.962.480	99,51%
1	04	05	2.01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Utilitas di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	10.340.000.000	10.293.423.380	99,55%
1	04	05	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	31.770.050	27.539.100	86,68%
2	10	.	.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	526.098.200	407.664.580	77,49%
2	10	04	.	.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	55.436.800	47.360.300	85,43%
2	10	04	2.01	.	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	55.436.800	47.360.300	85,43%
2	10	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.595.500	24.908.500	87,11%
2	10	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	26.841.300	22.451.800	83,65%
2	10	05	.	.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	237524200	191.811.880	80,75%



No Rek					Program dan Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2024 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2024 (Rp)	%
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	237524200	191.811.880	80,75%
2	10	05	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	237.524.200	191.811.880	80,75%
2	10	06	.	.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	54.516.700	41.978.500	77,00%
2	10	06	2.01	.	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimun dan Tanah Absentee dalam1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	54.516.700	41.978.500	77,00%
2	10	06	2.01	0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	17.240.200	14.143.800	82,04%
2	10	06	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	37.276.500	27.834.700	74,67%
2	10	07	.	.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	37.966.100	18.088.400	47,64%
2	10	07	2.01	.	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota	37.966.100	18.088.400	47,64%
2	10	07	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	26.581.650	16.931.400	63,70%
2	10	07	2.01	0003	Sub Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	11.384.450	1.157.000	10,16%
2	10	08	.	.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	70.768.650	64.628.800	91,32%
2	10	08	2.01	.	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	33.094.550	30.849.100	93,22%
2	10	08	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.094.550	30.849.100	93,22%
2	10	08	2.02	.	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	37.674.100	33.779.700	89,66%
2	10	08	2.02	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	24.984.000	22.364.000	89,51%
2	10	08	2.02	0002	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	12.690.100	11.415.700	89,96%
2	10	10	.	.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	69.885.750	43.796.700	62,67%
2	10	10	2.01	.	Kegiatan Penggunaan Tanah yang hamparan nya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	69.885.750	43.796.700	62,67%
2	10	10	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	34.870.300	22.892.100	65,65%
2	10	10	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	35.015.450	20.904.600	59,70%



Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/9)
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	85%	85%	83%	100,00%	100%	100,00%
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan	85%	85%	85%	83%	100,00%	100%	100,00%
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen 100,00%
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen 100,00%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakit, LKPD, Perjakin, Cascading)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	85%	85%	85%	80%	94,12%	100%	100%	100,00%
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (<i>Orang/bulan</i>)	32 orang	30 Dokumen	32 Dokumen	29 Dokumen	90,62%	32 orang	32 orang	100,00%
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (<i>Dokumen</i>)	24 Dokumen	225 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00%	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00%
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun (Lap Keuangan Akhir Tahun)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan bulanan dan Laporan Semesteran (Laporan Fisik dan Keuangan, dan Laporan Semesteran)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	17 Dokumen	100,00%	17 Laporan	17 Laporan	100,00%
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pesentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100,00%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

				Daerah pada SKPD								
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85%	85%	85%	85%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas PNS	32 stel	-	-	-	-	32 stel	32 stel	100,00%
01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimtek, pelatihan dll)	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	100,00%	15 orang	15 orang	100,00%
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	85%	85%	85%	85%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan	7 jenis	7 paket	7 paket	7 paket	100,00%	7 Paket	7 Paket	100,00%
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan materai dan ATK	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	100,00%	20 paket	20 paket	100,00%
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket makanan dan minuman	768 kotak	792 kotak	768 kotak	768 kotak	100,00%	784 paket	784 paket	100,00%
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	100,00%	9 paket	9 paket	100,00%
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan						1 paket	1 paket	100,00%
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen laporan, rekomendasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	20 laporan	20 laporan	100,00%
01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Arsip yang tertata	4 dokumen	130 box	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	85%	85%	85%	100,00%	100%	100%	100,00%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	100,00%
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						4 Unit	4 Unit	100,00%
01	2.07	05	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	1 buah	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100,00%
01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100,00%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit	2 Unit	100,00%
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	85%	85%	85%	85%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 laporan	84 laporan	84 laporan	84 laporan	100,00%	96 laporan	96 laporan	100,00%
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	12 laporan	12 laporan	100,00%
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85%	85%	85%	100,00%	100%	100%	100,00%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100,00%	7 unit	7 unit	100,00%
01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	2 Unit	2 Unit	100,00%
01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100,00%	6 unit	6 unit	100,00%
01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	12 unit	10 unit	10 unit	100,00%	10 unit	10 unit	100,00%
02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak (Persen)	100%	100%	90,20%	90,20%	100,00%	100%	100%	100,00%
02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data rumah yang terdampak bencana/relokasi	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
02	2.01	09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data penerima dan jenis pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%
02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						1 orang	1 orang	100,00%
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1 orang	1 orang	100,00%
02	2.03		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota		100,00%	100,00%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%
02	2.03	0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		134 unit Rumah	10 unit Rumah	0	0	10 unit Rumah	10 unit Rumah	100,00%



			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun						2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	100,00%
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah						1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	100,00%
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah						1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	100,00%
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	100,00%
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						100 Persen	100 Persen	100,00%
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan kumuh	n/a	0,16%	0,16%	0,16%	100,00%	0,16%	0,16%	100,00%
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan						100 Persen	100 Persen	100,00%



			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Terdatanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	n/a	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
			Penyusunan/Review /Legalisasi KebijakanBidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha						1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	100,00%
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina						2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	100,00%
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

			Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh								
03	2.02	0001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						75 Rumah Tangga	75 Rumah Tangga	100,00%
03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	n/a	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
03	2.03	0001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	umlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	63 unit rmh	249 unit rmh	249 unit rmh	100,00%	25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	100,00%
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh						1 Laporan	1 Laporan	100,00%



03	2.03	0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	ha	0,6 ha	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	-	-	
03	2.03	0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		0	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1 Unit	1 Unit	100,00%
03	2.03	0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		2 hektar	2 hektar	0 hektar	0%	5 hektar	5 hektar	100,00%
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10Ha yang ditangani						100 Persen	100 Persen	100,00%
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki						75 Unit Rumah	75 Unit Rumah	100,00%
05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik (Persen)	100%	51,45%	63,44%	63,44%	100,00%	50,56%	50,56%	100,00%



05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase tercapainya penyediaan prasarana dan sarana dan Utilitas Umum Perumahan		51,45%	63,44%	63,44%	100,00%	50,56%	50,56%	100,00%
05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	70 lokasi	22 lokasi	70 lokasi	70 lokasi	100,00%	22 lokasi	22 lokasi	100,00%
05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
			Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU						60 Kelompok	60 Kelompok	100,00%
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase terwujudnya tertib administrasi dan kesesuaian perizinan dengan RTRW Kab. Mempawah	100%	-	-	-	-	-	-	
02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan izin lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah	100%	-	-	-	-	-	-	
02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	



04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu konplik maupun perkara pertanahan lainnya	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya sengketa tanah garapan oleh Pemerintah kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00%	2 BA	2 BA	100,00%
05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	0%	100,00%	100%	100%	100,00%
05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	0%	100,00%	100%	100%	100,00%
05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda Kab. Mempawah	25 Dokumen	1 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen	80,00%	25 Dokumen	25 Dokumen	100,00%



06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (<i>Persen</i>)	25%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
06	2.01		Penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Maksimum dan Tanah Absentee dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee oleh Pemda Kab. Mempawah	25%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam I (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	25%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
07	2.01		Penetapan tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah ulayat yang berada di wilayah Kab. Mempawah	25%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%



08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah (<i>Persen</i>)	100%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase terselesainya masalah tanah kosong yang ada di wilayah Kab. Mempawah	100%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah (<i>Persen</i>)	62,50%	100%	100%	20,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah (<i>Persen</i>)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya konsolidasi penggunaan tanah yang berada diwilayah Kab. Mempawah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
10	2.01	0006	Inventarisasi dalam rangka penataan lokasi pelaku usaha UMK	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Tabel 2.2

Realisasi Belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah Per 31 Juni 2025

No Rek					U R A I A N	Alokasi Dana T.A 2025 (pagu awal) (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran	KET
							Rp	%		
1					BELANJA DAERAH	27.256.799.820	1.891.108.349	6,94%	25.365.691.471	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.607.858.620	1.818.528.669	6,83%	24.789.329.951	
1	04	01	.	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.979.877.420	1.818.528.669	45,69%	2.161.348.751	
1	04	01	2.01	.	Kegiatan PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.682.300	18.090.000	53,71%	15.592.300	
1	04	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	6.090.000	81,20%	1.410.000	
1	04	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.000.000	-	0,00%	3.000.000	
1	04	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	3.500.000	-	0,00%	3.500.000	
1	04	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1.500.000	-	0,00%	1.500.000	
1	04	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	3.500.000	-	0,00%	3.500.000	
1	04	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.682.300	12.000.000	81,73%	2.682.300	
1	04	01	2.02	.	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.567.213.420	1.711.556.278	47,98%	1.855.657.142	
1	04	01	2.02	0001	Sub Kegiatan PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.510.949.920	1.692.176.278	48,20%	1.818.773.642	
1	04	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36.280.000	9.900.000	27,29%	26.380.000	



No Rek					U R A I A N	Alokasi Dana T.A 2025 (pagu awal) (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran	KET
							Rp	%		
1	04	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.983.500	9.480.000	63,27%	5.503.500	
1	04	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	-	0,00%	5.000.000	
1	04	01	2.03	.	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH pada PERANGKAT DAERAH	16.100.000	3.500.000	21,74%	12.600.000	
1	04	01	2.03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	16.100.000	3.500.000	21,74%	12.600.000	
1	04	01	2.05	.	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	25.000.000	21.540.200	86,16%	3.459.800	
1	04	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	25.000.000	21.540.200	86,16%	3.459.800	
1	04	01	2.06	.	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	150.304.200	27.354.912	18,20%	122.949.288	
1	04	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.010.400	3.010.400	100,00%	-	
1	04	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.174.500	500.000	1,66%	29.674.500	
1	04	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.360.000	7.200.000	46,88%	8.160.000	
1	04	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.765.000	-	0,00%	29.765.000	
1	04	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	16.644.512	33,29%	33.355.488	
1	04	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.994.300	-	0,00%	21.994.300	
1	04	01	2.07	.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.103.300	-	0,00%	25.103.300	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	20.005.700		0,00%	20.005.700	



No Rek					U R A I A N	Alokasi Dana T.A 2025 (pagu awal) (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran	KET
							Rp	%		
1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.097.600		0,00%	5.097.600	
1	04	01	2.08	.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.000.000	28.263.479	27,98%	72.736.521	
1	04	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	101.000.000	28.263.479	27,98%	72.736.521	
1	04	01	2.09	.	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.474.200	8.223.800	13,38%	53.250.400	
1	04	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.874.200	3.612.900	15,79%	19.261.300	
1	04	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	22.500.000	1.560.900	6,94%	20.939.100	
1	04	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-	0,00%	10.000.000	
1	04	01	2.09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000	3.050.000	50,00%	3.050.000	
1	04	02	.	.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	405.856.900	-	0,00%	405.856.900	
1	04	02	2.01	.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.900.800	-	0,00%	31.900.800	
1	04	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	2.765.000	-	0,00%	2.765.000	
1	04	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	5.584.400		0,00%	5.584.400	
1	04	02	2.01	0007	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.605.700		0,00%	11.605.700	
1	04	02	2.01	0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.945.700	-	0,00%	11.945.700	



No Rek					U R A I A N	Alokasi Dana T.A 2025 (pagu awal) (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran	KET
							Rp	%		
1	04	02	2.02	.	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	28.063.900	-	0,00%	28.063.900	
1	04	02	2.02	0006	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	11.423.900	-	0,00%	11.423.900	
1	04	02	2.02	0007	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.320.000		0,00%	8.320.000	
1	04	02	2.02	0008	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.320.000		0,00%	8.320.000	
1	04	02	2.03	.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	336.152.200	-	0,00%	336.152.200	
1	04	02	2.03	0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	229.045.900	-	0,00%	229.045.900	
1	04	02	2.03	0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	44.714.400	-	0,00%	44.714.400	
1	04	02	2.03	0007	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.764.000		0,00%	8.764.000	
1	04	02	2.03	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	8.764.000		0,00%	8.764.000	
1	04	02	2.03	0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	44.863.900		0,00%	44.863.900	
1	04	02	2.04	.	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.740.000	-	0,00%	9.740.000	
1	04	02	2.04	0004	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.870.000		0,00%	4.870.000	
1	04	02	2.04	0005	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.870.000		0,00%	4.870.000	
1	04	03	.	.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	742.980.400	-	0,00%	742.980.400	



No Rek					U R A I A N	Alokasi Dana T.A 2025 (pagu awal) (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran	KET
							Rp	%		
1	04	03	2.02	.	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha	38.930.200	-	0,00%	38.930.200	
1	04	03	2.02	0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi KebijakanBidang PKP	14.930.000		0,00%	14.930.000	
1	04	03	2.02	0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	24.000.200	-	0,00%	24.000.200	
1	04	03	2.03	.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha	704.050.200	-	0,00%	704.050.200	
1	04	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	437.645.400	-	0,00%	437.645.400	
1	04	03	2.03	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	19.545.000		0,00%	19.545.000	
1	04	03	2.03	0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	13.954.300	-	0,00%	13.954.300	
1	04	03	2.03	0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	232.905.500	-	0,00%	232.905.500	
1	04	05	.	.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	21.479.143.900	-	0,00%	21.479.143.900	
1	04	05	2.01	.	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	21.479.143.900	-	0,00%	21.479.143.900	
1	04	05	2.01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Utilitas di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	21.446.250.000	-	0,00%	21.446.250.000	
1	04	05	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	26.283.900	-	0,00%	26.283.900	
1	04	05	2.01	0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	6.610.000	-	0,00%	6.610.000	
2	10	.	.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	648.941.200	72.579.680	11,18%	576.361.520	
2	10	04	.	.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	10.000.000	4.860.000	48,60%	5.140.000	



No Rek					U R A I A N	Alokasi Dana T.A 2025 (pagu awal) (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran	KET
							Rp	%		
2	10	04	2.01	.	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	10.000.000	4.860.000	48,60%	5.140.000	
2	10	04	2.01	0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	10.000.000	4.860.000	48,60%	5.140.000	
2	10	05	.	.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	478.994.200	57.609.680	12,03%	421.384.520	
2	10	05	2.01	.	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	478.994.200	57.609.680	12,03%	421.384.520	
2	10	05	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	478.994.200	57.609.680	12,03%	421.384.520	
2	10	06	.	.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	28.118.200	-	0,00%	28.118.200	
2	10	06	2.01	.	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimun dan Tanah Absentee dalam1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	28.118.200	-	0,00%	28.118.200	
2	10	06	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	28.118.200		0,00%	28.118.200	
2	10	07	.	.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	15.935.400	-	0,00%	15.935.400	
2	10	07	2.01	.	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota	15.935.400	-	0,00%	15.935.400	
2	10	07	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	15.935.400		0,00%	15.935.400	
2	10	08	.	.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	56.697.600	10.110.000	17,83%	46.587.600	
2	10	08	2.01	.	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	24.856.300	5.450.000	21,93%	19.406.300	



No Rek					U R A I A N	Alokasi Dana T.A 2025 (pagu awal) (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran	KET
							Rp	%		
2	10	08	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.856.300	5.450.000	21,93%	19.406.300	
2	10	08	2.02	.	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	31.841.300	4.660.000	14,64%	27.181.300	
2	10	08	2.02	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	21.187.200	2.060.000	9,72%	19.127.200	
2	10	08	2.02	0002	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	10.654.100	2.600.000	24,40%	8.054.100	
2	10	10	.	.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	59.195.800	-	0,00%	59.195.800	
2	10	10	2.01	.	Kegiatan Penggunaan Tanah yang hamparan nya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	59.195.800	-	0,00%	59.195.800	
2	10	10	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	29.548.600		0,00%	29.548.600	
2	10	10	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	29.647.200		0,00%	29.647.200	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah menyelenggarakan 2 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan. Urusan ini dilaksanakan dengan 9 Program, 23 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

Perumusan indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengukuran kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri..

Dalam mencapai target kinerjanya, dibutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, dan juga dibutuhkan dukungan dana serta ide kreatif, hal ini tidak bisa hanya dikerjakan dan ditumpukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasi yang membidangnya, inilah yang menjadi kendala diinternal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah.

Secara garis besar permasalahan pokok kinerja pelayanan bidang perumahan dan Kawasan permukiman meliputi; rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman tersebut yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

Menurut Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Huruf D, Sub Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman memiliki 4 (empat) Urusan yaitu :

1. Perumahan

Pembagian Urusan untuk Perumahan, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi Site Plan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Fasilitasi Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2. Permukiman

Pembagian Urusan untuk Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Pengkajian dan Pengawasan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pembagian Urusan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.

4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Pembagian Urusan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal Penyelenggaraan PSU perumahan.



Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabuapten Mempawah adalah sesuai tabel berikut:

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak (<i>Persen</i>)	Persentase terfasilitasinya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	89,78%	89,78%	100%		
	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan											0,59%	
	Persentase data rumah yang terdampak bencana/ relokasi			100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%		
	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											100,00%	
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah											1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus											1 Dokumen	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana Program Kabupaten/Kota											1 Dokumen	
	Persentase tersedianya data penerima dan jenis pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%		
	Persentase Dokumen Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											100,00%	
	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota											1 orang	
	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana											1 orang	



No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Kabupaten/Kota												
	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota											100,00%	
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi											10 unit Rumah	
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun											2 unit rumah	
	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah											1 rumah tangga	
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah											1 rumah tangga	
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota											2 unit rumah	
	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau											100%	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Relokasi Program Kabupaten/Kota												
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota											1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota											1 dokumen	
	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan kumuh			n/a	n/a	100%	100%	100%	0,16%	0,16%	100%	5,73%	
	Persentase jumlah izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan											100%	
	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik											1 dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman											1 Laporan	
	Persentase Terdatanya perumahan dan kawasan			n/a	n/a	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%		



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	permukiman kumuh												
	Persentase jumlah kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 hektar yang ditata dan ditingkatkan											100,00%	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi											1 dokumen	
	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha											1 dokumen	
	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina											2 Kelompok masyarakat	
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh											1 dokumen	
	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											75 rumah tangga	
	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	
	Persentase Peningkatan			n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	65,00%	100%		



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha												
	Persentase luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan											100,00%	
	umlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						165 unit Rumah	300 Unit Rumah	35 unit rmh	63 unit rmh	300 Unit Rumah	25 unit rmh	
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU											1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh											1 Laporan	
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi											1 Dokumen	
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas											1 unit	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar											5 ha	
	Persentase rumah tidak layak huni											4,55	
	Persentase jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10Ha yang ditangani											100%	
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki											75 Unit rumah	
	Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik (Persen)			100%	100%	100%	100%	100%	49,23%	51,45%	100%	50,56%	
	Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak											78,99%	
	Persentase tercapainya penyediaan prasarana dan			100%	100%	100%	100%	100%	49,23%	51,45%	100%	50,56%	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	sarana dan Utilitas Umum Perumahan												
	Persentase terselenggaranya PSU Perumahan											100%	
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU											60 kelompok	
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang											1 Laporan	
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			n/a	20 Lokasi	156 Lokasi	54 Lokasi	250 Lokasi	162 lokasi	22 lokasi	250 Lokasi	100 lokasi	
	Persentase terwujudnya tertib administrasi dan kesesuaian perizinan dengan RTRW Kab. Mempawah			100%	100%	100%	100%	100%	89,19%	100%	100%		
	Persentase Penerbitan izin lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah			100%	100%	100%	100%	100%	89,19%	100%	100%		
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
	Persentase terselesaikannya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Sengketa Tanah Garapan baik itu konflik maupun perkara pertanahan lainnya												
	Persentase terselesaikannya sengketa tanah garapan oleh Pemerintah kabupaten Mempawah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	3 BA	3 BA	2 Berita Acara	2 BA	
	Persentase terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda Kab.			25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Mempawah												
	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persen)			n/a	25%	50%	75%	100%	25%	25%	100%	100%	
	Persentase terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee oleh Pemda Kab. Mempawah			n/a	25%	50%	75%	100%	25%	25%	100%	100%	
	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah			n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Persentase Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan			n/a	25%	50%	75%	100%	25%	25%	100%	100%	
	Persentase penetapan tanah ulayat yang berada di wilayah Kab. Mempawah			n/a	25%	50%	75%	100%	25%	25%	100%	100%	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Jumlah Laporan survei dan Pemetaan batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah (Persen)			n/a	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	
	Persentase terselesainya masalah tanah kosong yang ada di wilayah Kab. Mempawah			n/a	100%	25%	25%	100%	25%	25%		100%	
	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong			n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	
	Persentase jumlah tanah kosong dan pemanfaatannya			n/a	62,50%	75%	87,50%	100%	25%	25%	1 Laporan	100%	
	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.			n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong			n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 dokumen	
	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah (Persen)			n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 Dokumen	100%	
	Persentase terwujudnya konsolidasi penggunaan tanah yang berada diwilayah Kab. Mempawah			n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisi
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	
											1 Dokumen		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan didalam menyusun Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas rumah melalui rehabilitasi RTLH.
2. Penataan rumah dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di kawasan kumuh.
3. Pembinaan terhadap pengembang perumahan untuk pemenuhan komitmen dalam penyediaan PSU perumahan/
4. Penyediaan PSU di perumahan swadaya.
5. Optimalisasi proses pensertipikatan melalui Pembentukan Tim Percepatan dan menetapkan target penyelesaian.
6. Penyediaan dana yang tepat sasaran guna mendukung pembiayaan operasional pengukuran, transportasi dan akomodasi
7. Perbaikan dokumen pendukung dalam rangka proses percepatan aset Pemda melalui koordinasi yang intensif antara pemda dan BPN.
8. Optimalisasi kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah terkait permasalahan sengketa, konflik dan perkara tanah lainnya.
9. Optimalisasi pengamanan aset untuk menjamin kepastian batas bidang tanah.
10. Optimalisasi Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPD 2025-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah terkait erat dengan pencapaian Misi ke-3 yaitu Membangun infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif Secara Merata.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Renstra OPD, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengajukan usulan sebanyak 9 (sembilan) program, 23 (duapuluh tiga) kegiatan dan 57 (Limapuluh tujuh) Sub kegiatan. Dengan adanya Rencana kerja Perubahan usulan program kegiatan RKPDP sebanyak tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik.

Secara keseluruhan , hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD /Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel 2.4



Tabel.2.4
Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2025
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				22.601.748.59 ₉	BELANJA DAERAH				22.601.748.59 ₉	
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				22.319.276.79 ₉	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				22.319.276.79 ₉	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Nilai Kepuasan Pegawai atas Layanan Kesekretariatan	85%	3.852.744.799	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Nilai Kepuasan Pegawai atas Layanan Kesekretariatan	85%	3.852.744.799	
1.04.01.2.01	Kegiatan PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					Kegiatan PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
1.04.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.500.000	
1.04.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
1.04.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.500.000	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14.682.300	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14.682.300	
1.04.01.2.02	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah		100 Persen	3.506.205.199	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah		100 Persen	3.506.205.199	
1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.449.941.699	Sub Kegiatan PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.449.941.699	
1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	36.280.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	36.280.000	
1.04.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	14.983.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	14.983.500	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	5.000.000	
1.04.01.2.03	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH pada PERANGKAT DAERAH					Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH pada PERANGKAT DAERAH					
1.04.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	16.100.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	16.100.000	
1.04.01.2.05	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					
1.04.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	25.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	25.000.000	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01.2.06	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.010.400	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.010.400	
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	22.131.400	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	22.131.400	
1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	784 Paket	15.360.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	784 Paket	15.360.000	
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	19.092.200	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	19.092.200	
1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	38.081.800	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	38.081.800	
1.04.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	21.994.300	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	21.994.300	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah				
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah				
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	101.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	101.000.000	
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.431.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.431.000	
1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	17.556.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	17.556.200	
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
1.04.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.100.000	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	100%	156.610.500	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	100%	156.610.500	
1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	2.765.000	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	2.765.000	
1.04.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			
1.04.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.945.700	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.945.700	
1.04.02.2.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
1.04.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	11.423.900	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	11.423.900	
1.04.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota					Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota					
1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	125.605.900	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	125.605.900	
1.04.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
1.04.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah			Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah			



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah			Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah			
1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.04	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
1.04.02.2.04.0004	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.04.0005	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.870.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.870.000	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	5,73%	400.777.600	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	5,73%	400.777.600	
1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha					Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha					
1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi KebijakanBidang PKP	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			Sub Kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi KebijakanBidang PKP	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			
1.04.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	24.000.200	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	24.000.200	
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha					Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha					
1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	369.873.400	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	369.873.400	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	6.904.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	6.904.000	
1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU Layak	80,24%	17.909.143.900	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU Layak	80,24%	17.909.143.900	
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Utilitas di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	85 Lokasi	17.876.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Utilitas di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	85 Lokasi	17.876.250.000	
1.04.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	26.283.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	26.283.900	
1.04.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	6.610.000	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	6.610.000	
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah			282.471.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah			282.471.800	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Objek Bidang Tanah Milik Pemda Yang Sudah Tidak Bermasalah (Clear and Clean)	100%	10.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Objek Bidang Tanah Milik Pemda Yang Sudah Tidak Bermasalah (Clear and Clean)	100%	10.000.000	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota					Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota					
2.10.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	10.000.000	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	10.000.000	
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Aset Tanah Milik Pemda Yang Sudah Bersertifikat	100%	215.774.200	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Aset Tanah Milik Pemda Yang Sudah Bersertifikat	100%	215.774.200	
2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	215.774.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	215.774.200	
02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100%	-	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100%	-	
2.10.06.2.01	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen		
02.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Penetapan Bidang Tanah Ulayat Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat	100%	-	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Penetapan Bidang Tanah Ulayat Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat	100%	-	
2.10.07.2.01	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota					Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota					
2.10.07.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di wilayah kabupaten Mempawah	100%	56.697.600	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di wilayah kabupaten Mempawah	100%	56.697.600	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.08.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong					Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong					
2.10.08.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	24.856.300	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	24.856.300	
2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					
2.10.08.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kab/Kota yang diinventarisasi.	1 Laporan	21.187.200	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kab/Kota yang diinventarisasi.	1 Laporan	21.187.200	
2.10.08.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	10.654.100	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	10.654.100	
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Terlaksananya Penatagunaan Tanah Sesuai dengan RTRW Kab. Mempawah		-	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Persentase Terlaksananya Penatagunaan Tanah Sesuai dengan RTRW Kab. Mempawah		-	
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang hamparan nya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota					Kegiatan Penggunaan Tanah yang hamparan nya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota					



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
2.10.10.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan Pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

Dalam hal tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrembang Kabupaten dengan Langkah-langkah :

- 1) Inventarisasi permasalahan usulan-program/kegiatan dari masyarakat
- 2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku
- 3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan,
- 4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan) atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil kebutuhan SKPD
- 5) Periksa apakah usulan Program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 6) Buat Rekapitulasi usulan Program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Adapun Hasil Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat yang telah dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mempawah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan/ Ranking
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perkintan	Persentase kawasan kumuh	0,16%	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Mempawah	Persentase Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Sungai Kunyit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan/ Ranking
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Sungai Pinyuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	75 Unit Rumah	
		Kecamatan Anjongan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	
		Kecamatan Toho	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	
		Kecamatan Sadaniang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	
		Kecamatan Segedong	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	
		Kecamatan Jongkat	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perkimtan	Jumlah kegiatan prasarana, sarana, utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian		
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kabupaten Mempawah	Prasarana, sarana, utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian		
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kecamatan Mempawah Hilir	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	18 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Kecamatan Mempawah Timur	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	21 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Kecamatan Sungai Kunyit	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	13 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Kecamatan Sungai Pinyuh	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	25 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Kecamatan Anjongan	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	24 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Kecamatan Toho	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	6 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Kecamatan Sadaniang	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	2 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Kecamatan Segedong	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	6 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan/ Ranking
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Jongkat	Terbangunnya jalan Lingkungan/PSU Lingkungan	25 Paket	(Musrenbang) Pembangunan Jalan Lingkungan
		Mempawah Hilir	Terbangunnya Pagar Makam	2 Paket	(Musrenbang) Terbangunnya Pagar Makam
		Kecamatan Toho	Terbangunnya Pagar Makam	5 Paket	(Musrenbang) Terbangunnya Pagar Makam
		Kecamatan Jongkat	Terbangunnya Pagar Makam	3 Paket	(Musrenbang) Terbangunnya Pagar Makam

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan untuk urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Didalam Pasal 18 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada pasal 1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pelayanan dasar seperti dimaksud berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan lingkup pengaturan yang meliputi SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat serta Pembinaan dan Pengawasan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengampu SPM Perumahan Rakyat yang terdiri dari :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah merencanakan beberapa kegiatan untuk memenuhi SPM sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mempawah memfasilitasi setiap perangkat daerah untuk menyusun inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan inovasi ini dimaksudkan untuk lebih mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) yang mengacu Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara nomor 44 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi dilingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2020.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah sudah merencanakan beberapa inovasi dalam pelayanan publik di dinas yang terdiri dari :

- a. Sistem Informasi Database Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh (SI AMPUH)
- b. System Informasi Database Pertanahan Berbasis Gis (SI INTAN)
- c. Sistem Informasi Persil Pertanahan Berbasis Web-Gis (E-SIPP)

Pada Renja tahun 2023 ada 2 (dua) inovasi yang dimasukkan untuk diakomodir dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari “SI AMPUH” dan “SI INTAN”, sedangkan untuk E-SIPP akan dilaksanakan setelah SI INTAN dibuat (diakomodir).

Sedangkan untuk penyelenggaraan dibidang Pertanahan secara nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah meliputi :

- Pemberian izin lokasi

- Penyelesaian sengketa tanah garapan
- Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.

Dari urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam implementasinya di daerah mencakup kegiatan penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah guna melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan telah selaras terhadap kebijakan nasional, sebagaimana terakomodir dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah.

1.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik.
2. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kewilayah

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah antara lain :

1. Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah Lainnya.
2. Aset Tanah Pemda yang Bersertifikat.
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah.
4. Persentase Rumah Layak Huni.
5. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Penanganan Kabupaten.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Mempawah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah sesuai tabel berikut :



TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MEMPAWAH

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							27.256.799.820	27.256.799.820	22.601.748.599							42.389.577.961	
1	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							26.607.858.620	26.607.858.620	22.319.276.799							29.413.966.261	
	01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Kepuasan Pegawai atas Layanan Kesekretariatan				85%	85%	3.567.213.420	3.567.213.420	3.852.744.799	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			4.011.690.061	Disperkintan Kabupaten Mempawah
1	1.04.01.2.01	Kegiatan PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH																	
	1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			7.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			3.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			3.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			1.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			3.500.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	14.682.300	14.682.300	14.682.300	Disperkimitan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			14.682.300	Disperkimitan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.02	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					100 Persen	100 Persen	3.567.213.420	3.567.213.420	3.506.205.199	Disperkimitan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			3.610.200.561	Disperkimitan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.510.949.920	3.510.949.920	3.449.941.699	Disperkimitan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			3.556.457.461	Disperkimitan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	36.280.000	36.280.000	36.280.000	Disperkimitan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			33.760.000	Disperkimitan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.983.500	14.983.500	14.983.500	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			14.983.100	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			5.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.03	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH pada PERANGKAT DAERAH																	
	1.04.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16.100.000	16.100.000	16.100.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			16.100.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.05	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH																	
	1.04.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			25.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.06	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
	1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	3.010.400	3.010.400	3.010.400	Disperkiman Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			3.005.400	Disperkiman Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	30.174.500	30.174.500	22.131.400	Disperkiman Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			20.689.900	Disperkiman Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				784 Paket	784 Paket	15.360.000	15.360.000	15.360.000	Disperkiman Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			15.360.000	Disperkiman Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	29.765.000	29.765.000	19.092.200	Disperkiman Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			29.764.900	Disperkiman Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	50.000.000	50.000.000	38.081.800	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			50.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	21.994.300	21.994.300	21.994.300	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			21.994.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya					2 unit		20.005.700	20.005.700		Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			18.791.400	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 unit		5.097.600	5.097.600		Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			5.257.800	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				96 Laporan	96 Laporan	101.000.000	101.000.000	101.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			101.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	1.04.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	22.874.200	22.874.200	17.431.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			22.864.700	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	22.500.000	22.500.000	17.556.200	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			22.496.100	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			9.993.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																0	
	1.04.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	6.100.000	6.100.000	6.100.000	Disperkiman Kabupaten Mempawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			5.490.000	Disperkiman Kabupaten Mempawah
	01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat				100%	100%	-	-	156.610.500	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			156.786.400	Disperkiman Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
	1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.765.000	2.765.000	2.765.000	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			2.679.900	Disperkiman Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen		5.584.400	5.584.400		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen		11.605.700	11.605.700		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11.945.700	11.945.700	11.945.700	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			11.945.500	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
	1.04.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.423.900	11.423.900	11.423.900	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			11.423.800	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Orang		8.320.000	8.320.000		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Orang		8.320.000	8.320.000		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota																	
	1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	229.045.900	229.045.900	125.605.900	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			125.867.200	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah		44.714.400	44.714.400		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penveludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga		8.764.000	8.764.000		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga		8.764.000	8.764.000		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah		44.863.900	44.863.900		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.02.2.04	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
	1.04.02.2.04.0004	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen		4.870.000	4.870.000		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.02.2.04.0005	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.870.000	4.870.000	4.870.000	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			4.870.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Kumuh				5,73%	5,73%	-	-	400.777.600	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			1.477.596.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha																	
	1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi KebijakanBidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen		14.930.000	14.930.000		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.200	24.000.200	24.000.200	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			24.000.000	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)ha																	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	437.645.400	437.645.400	369.873.400	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			1.448.250.900	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan		19.545.000	19.545.000		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	13.954.300	13.954.300	6.904.000	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			5.345.100	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				5 Ha		232.905.500	232.905.500		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkimtan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU Layak				80,24%	80,24%	-	-	17.909.143.900	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			23.767.893.800	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
	1.04.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Utilitas di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				100 Lokasi	85 Lokasi	21.446.250.000	21.446.250.000	17.876.250.000	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasai dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	26.283.900	26.283.900	26.283.900	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			26.283.900	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	1.04.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	6.610.000	6.610.000	6.610.000	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			6.609.900	Disperkintan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																23.735.000.000	
2	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							-	-	282.471.800	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			12.975.611.700	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Objek Bidang Tanah Milik Pemda Yang Sudah Tidak Bermasalah (Clear and Clean)				100%	100%	-	-	10.000.000	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			10.000.000	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota																	
	2.10.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			10.000.000	Disperkimtan Kabupaten Mempawah



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Aset Tanah Milik Pemda Yang Sudah Bersertifikat				100%	100%	-	-	215.774.200	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			12.908.915.700	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																12.543.933.400	
	2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25 Dokumen	15 Dokumen	478.994.200	478.994.200	215.774.200	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			364.982.300	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee				100%	100%	-	-	-	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.06.2.01	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota																	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.10.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	28.118.200	28.118.200		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	02.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Penetapan Bidang Tanah Ulayat Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat				100%	100%	-	-	-	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.07.2.01	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota																	
	2.10.07.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan		15.935.400	15.935.400		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di wilayah kabupaten Mempawah				100%	100%	-	-	56.697.600	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			56.696.000	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.08.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong																	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.10.08.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	1 Laporan	24.856.300	24.856.300	24.856.300	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			24.856.300	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																	
	2.10.08.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kab/Kota yang diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	21.187.200	21.187.200	21.187.200	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			21.185.600	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	2.10.08.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	10.654.100	10.654.100	10.654.100	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			10.654.100	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Terlaksananya Penatagunaan Tanah Sesuai dengan RTRW Kab. Mempawah				100%		-	-	-	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkintan Kabupaten Mempawah
	2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang hamparan nya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota																	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan		29.548.600	29.548.600		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			-	Disperkimtan Kabupaten Mempawah
	2.10.10.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen		29.647.200	29.647.200		Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				Disperkimtan Kabupaten Mempawah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH

Dalam Upaya pencapaian visi Kabupaten Mempawah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu menetapkan rencana kerja yang optimal serta pendanaan yang dapat menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dan pendanaannya tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2026

Dinas Perkimtan pada tahun 2025 mengajukan usulan sebanyak 11 (sebelas) program, 24 (duapuluh empat) kegiatan dan 80 (Delapanpuluh) Sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 82.006.778.000,00

Adapun rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersumber dari Dana Alokasi Umum. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 4.1

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			82.006.778.000,00
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN			81.536.778.000,00
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85%	4.967.278.000,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	36.500.000,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(1 Dokumen)	7.500.000,00
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(1 Dokumen)	3.000.000,00
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(3 Dokumen)	4.000.000,00
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(1 Dokumen)	3.000.000,00
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(3 Dokumen)	4.000.000,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(3 Laporan)	15.000.000,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100 Persen	3.466.000.000,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(32 Orang/bulan)	3.400.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
DISPERKIMTAN Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(24 Dokumen)	46.000.000,00
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2 Laporan)	15.000.000,00
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(17 Laporan)	5.000.000,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 Persen	16.100.000,00
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(4 Laporan)	16.100.000,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	75.000.000,00
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	(32 Paket)	30.000.000,00
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(15 Orang)	45.000.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 Persen	178.560.000,00
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(7 Paket)	4.000.000,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(20 Paket)	30.200.000,00
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(784 Paket)	15.360.000,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(9 Paket)	30.000.000,00
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	(1 Paket)	25.000.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(20 Laporan)	40.000.000,00
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(4 Dokumen)	22.000.000,00
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(2 Dokumen)	12.000.000,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	931.218.000,00
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	(1 Unit)	445.000.000,00
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(4 Unit)	391.000.000,00
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(9 Unit)	16.794.000,00
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(6 Unit)	65.124.000,00
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(2 Unit)	13.300.000,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	161.500.000,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(96 Laporan)	101.000.000,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(12 Laporan)	60.500.000,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	102.400.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	(1 Unit)	22.900.000,00
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(7 Unit)	23.000.000,00
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(2 Unit)	45.000.000,00
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(6 Unit)	5.000.000,00
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(10 Unit)	6.500.000,00
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	100%	754.500.000,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	130.000.000,00
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	(1 Dokumen)	50.000.000,00
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	(1 Dokumen)	20.000.000,00
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	(1 Dokumen)	30.000.000,00
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	(1 Dokumen)	30.000.000,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	90.000.000,00
1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	(1 Dokumen)	50.000.000,00
1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	(1 Orang)	20.000.000,00
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(1 Orang)	20.000.000,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100%	494.500.000,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	(10 Unit Rumah)	269.500.000,00
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	(2 Unit Rumah)	75.000.000,00
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	(1 Rumah Tangga)	25.000.000,00
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	(1 Rumah Tangga)	25.000.000,00
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	(2 Unit Rumah)	100.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	40.000.000,00
1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	(1 Dokumen)	20.000.000,00
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(1 Dokumen)	20.000.000,00
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan kumuh	5,73%	6.280.000.000,00
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	100 Persen	15.000.000,00
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	(1 Dokumen)	5.000.000,00
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	(1 Laporan)	10.000.000,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase jumlah kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 hektar yang ditata dan ditingkatkan	100 Persen	375.000.000,00
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	(1 Laporan)	15.000.000,00
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	(1 Dokumen)	100.000.000,00
1.04.03.2.02.0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	(1 Rumah Tangga)	30.000.000,00
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	(2 Kelompok Masyarakat)	75.000.000,00
1.04.03.2.02.0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	(1 Dokumen)	5.000.000,00
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	(1 Dokumen)	100.000.000,00
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	(75 Rumah Tangga)	50.000.000,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan	100 Persen	5.890.000.000,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	(215 Unit Rumah)	4.300.000.000,00
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	(1 Dokumen)	15.000.000,00
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	(1 Laporan)	25.000.000,00
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	(1 Dokumen)	100.000.000,00
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan	(1 Unit)	50.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	(5 Ha)	1.400.000.000,00
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni	4,55%	1.680.000.000,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10Ha yang ditangani	100 Persen	1.680.000.000,00
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	(75 Unit Rumah)	1.680.000.000,00
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak	80,24%	67.855.000.000,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase terselenggaranya PSU Perumahan	100 Persen	67.855.000.000,00
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	(100 Lokasi)	67.725.000.000,00
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	(1 Laporan)	50.000.000,00
1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	(60 Kelompok)	30.000.000,00
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	(1 Laporan)	50.000.000,00
2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			470.000.000,00
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik Maupun Perkara Pertanahan Lainnya	100%	60.000.000,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksanakannya Sengketa Tanah Garapan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah	100 Persen	60.000.000,00
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2 Dokumen)	30.000.000,00
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2 Berita Acara)	30.000.000,00
2.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	150.000.000,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kab. Mempawah	100 persen	150.000.000,00
2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	(1 Dokumen)	50.000.000,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(25 Dokumen)	100.000.000,00
2.10.06.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	60.000.000,00
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee oleh pemda kabupaten Mempawah	100 Persen	60.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	(1 Dokumen)	40.000.000,00
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	(1 Dokumen)	20.000.000,00
2.10.07.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	100%	30.000.000,00
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan tanah ulayat yang berada di wilayah Kab. Mempawah	100 Persen	30.000.000,00
2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(1 Laporan)	30.000.000,00
2.10.08.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten Mempawah	100%	75.000.000,00
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong yang ada di wilayah Kab. Mempawah	100 Persen	35.000.000,00
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	(1 Laporan)	35.000.000,00
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong	100 Persen	40.000.000,00
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kab/Kota yang diinventarisasi.	1 Laporan	25.000.000,00
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	15.000.000,00
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Terlaksananya Penatagunaan Tanah Sesuai dengan RTRW Kab. Mempawah	100%	95.000.000,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya Konsolidasi Penatagunaan Tanah yang berada di wilayah Kab. Mempawah	100 Persen	95.000.000,00
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	(1 Laporan)	35.000.000,00
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	(1 Dokumen)	35.000.000,00
2.10.10.2.01.0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	(1 Dokumen)	25.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mempawah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi terkait.

Mempawah, 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan Kabupaten Mempawah



ABDURAHMAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19760716 200212 1 005



PEMERINTAH

KABUPATEN MEMPAWAH

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN
PERUBAHAN 2025

(2025 - 2029)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MEMPAWAH





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 Perubahan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah tahun 2025 Perubahan merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025–2029. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kerja (Renja) ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan dan sub kegiatan. Renja ini memuat tujuan, sasaran, program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 Perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis yang telah ditetapkan dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarnya.



Satuan Polisi Pamong Praja
Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2025 PERUBAHAN

Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Renja ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Namun kami juga menyadari menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan masa mendatang.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Perubahan, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Besar harapan kami atas terealisasi usulan program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam Renja ini. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Renja ini, Semoga Tuhan Yang Maha Esa menggantikannya dengan pahala yang berlipat dan menjadi amal yang diridhoi.

Mempawah, Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MEMPAWAH

KUNTUM INDAH PERTIWI NINGSIH, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19720210 199202 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika	12
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V. PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	43



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga diwajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome



yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi



pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang di selenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja OPD.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 Perubahan, Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 Perubahan, merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja yang termuat Visi Pemerintah Kabupaten Mempawah yaitu ***“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Profesional “***

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Mempawah tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi Kabupaten Mempawah :

1. Menciptakan Pelayanan Publik yang cepat, Profesional dan Efisien.
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
3. Membangun infrastruktur publik yang memadai dan efektif secara merata



4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian Daerah guna menciptakan kemandirian Daerah.
5. Memperkuat Basis Perekonomian Daerah melalui penguatan sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Parawisata.

Berdasarkan Misi Kabupaten diatas Satuan Polisi Pamong Praja mengemban misi yang pertama yaitu “ **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas** “ Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah;
- b. Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Terciptanya Perlindungan.

Dalam melaksanakan tugas bidang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan sebagaimana tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1. 2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2026 adalah:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran



- Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 diganti dengan Undang-undang nomor 07 tahun 2021 no 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 10. Undang-undang Nomot 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);



13. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
16. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Review Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tanggal 20 Agustus 2025.

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Perubahan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi



Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2029 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Perubahan disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program tiap bidang disertai dengan rencana kerja yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan. Sehingga terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 Perubahan adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Perubahan;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Sebagai pedoman / acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025
5. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2025
6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



7. Renja SKPD diharapkan dapat berperan sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah untuk pencapaian visi organisasi.
8. Menjadi acuan pengukuran kinerja yaitu pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
9. Merupakan komitmen Bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.
10. Menjadi pedoman dalam menjaga upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja.
11. Adanya kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh insan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
12. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI



DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah review terhadap rancangan awal renja dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, dan rumusan rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Berisi tentang rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan Tahun 2025-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025 - 2029. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :



A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. EVALUASI PROGRAM TAHUN 2023

Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 7.169.748.444,00,- (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dari anggaran belanja dalam APBD tahun 2023 yang sebesar Rp. 7.448.128.433,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 278.379.989,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau hanya terealisasi 96,26%.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp. 7.169.748.444,00,- (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dibandingkan



dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 7.012.324.730,- (Tujuh Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga mengalami kenaikan belanja operasi sebesar Rp. 157.423.714,00,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 5.963.574.095,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 5.823.815.996,- (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp 139.758.099,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 2,40 %.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp. 1.206.174.349,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.188.508.734,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp. 17.665.615,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) atau 90,96 %.



Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 setelah perubahan anggaran adalah, sebesar Rp. 7.448.128.433,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 7.169.748.444,00,- (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Pencapaian 96,26 %, sedangkan belanja Pegawai sebesar Rp. 6.122.150.970,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 5.963.574.095,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan pencapaian 97,41% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.325.977.463,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar 1.206.174.349,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan pencapaian 90,96 % yang dijabarkan melalui 2 Program 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan termasuk rutin yaitu sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

▪ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah

NO	U R A I A N	JUMLAH		
		ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI ANGGARAN	%
p	2	3	4	
1.	BELANJA OPERASI	7.448.128.433	7.169.748.444	96,26



1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	533.614.800	518.030.705	97,08
1.2	BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	533.614.800	518.030.705	97,08
	1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	533.614.800	518.030.705	97,08
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota.	427.721.400	415.183.605	97,07
	~ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	59.085.000	57.450.125	97,23
	~ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.	368.636.400	357.733.480	97,04
	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	105.893.400	102.847.100	97,12
	~ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.638.200	23.942.300	93,39
	~ Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wakil Bupati	80.255.200	78.904.800	98,32
	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.914.513.633	6.655.711.269	96,26
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.199.025	28.012.860	99,34
	~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.875	4.968.760	99,38
	~ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.499.850	2.482.980	99,33
	~ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.	2.499.850	2.482.980	99,33
	~ Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.499.850	2.482.980	99,33
	~ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	2.499.850	2.482.980	99,33



Satuan Polisi Pamong
Praja
Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2026

	DPA SKPD			
	~ Koordinasi dan Pernyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.199.750	13.112.180	99,34
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.139.000.545	5.983.337.245	97,46
	~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.098.300.970	5.943.717.625	97,47
	~ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	24.150.000	23.340.000	96,65
	~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.549.825	11.304.010	97,87
	~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.999.750	4.975.610	99,52
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.515.500	12.400.500	99,08
	~ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.515.500	12.400.500	99,08
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.465.000	143.253.900	93,96
	~ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	137.465.000	128.271.900	93,31
	~ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	14.982.000	99,88
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.754.175	114.811.529	98,34
	~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.495.900	2.495.000	99,96
	~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.746.700	31.718.000	96,86
	~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.510.000	6.500.300	99,85
	~ Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	17.783.575	16.924.000	95,17
	~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas)	55.218.000	55.203.129	99,97
	~ Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	2.000.000	1.971.100	98,56
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	171.385.008	93.243.635	54,41



	Pemerintahan Daerah.			
	~ Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik	119.352.000	41.267.167	34,58
	~ Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	52.033.008	51.976.468	99,89
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.194.380	280.651.600	95,40
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya ~ Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.861.000	24.258.700	93,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ~ Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.623.380	246.682.900	95,38
	~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
	~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.830.000	4.830.000	100
	~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	4.880.000	100

Sumber : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 8.052.469.494,- terinci dalam 2 program dan 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan termasuk rutin, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024. apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Kabupaten Mempawah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Profesional”**

Sesuai visi diatas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi Pertama Kabupaten Mempawah yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas “** Untuk mencapai Misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja



mempunyai tugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, di Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025 dan 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil $\pm$ sebanyak 150 orang anggota.
- b. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah/peraturan bupati.
- c. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang di ingin di capai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program dan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah tahun 2025 – 2029, maka strategi dan kebijakan yang



akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan Kapabilitas dan kapasitas aparatur Polisi Pamong Praja dan Linmas.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur, anggota, dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan



- b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mempawah yang terintegrasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Perlindungan masyarakat.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Mempawah dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong



terwujudnya visi dan misi Kabupaten Mempawah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah.

- b. Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;



- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja, dibentuk berdasarkan Perda 05 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh unsur pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Sekretaris melaksanakan fungsinya yaitu :



-
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja penganggaran Satuan Polisi Apamong Praja;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh;

- Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi sbb:
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi danketatalaksanaan
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur
 - f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur



- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris
- Kasubbag Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi sbb:
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Penyiapan dan Pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris
- Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sbb:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah



-
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - d. Pengelolaan dan pelayanan umum di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau ketentuan Daerah lainnya
 - f. Penyuluhan dan penyampaian informasi mengenai penegakan peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Ketentuan Daerah lainnya
 - g. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Ketentuan Daerah lainnya
 - h. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, dan mempunyai fungsi sbb:
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan



- c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - e. Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI)
 - f. Pelaksanaan Pengembangan sumber daya personil dan kesamaptaan
 - g. Pelaksanaan Pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - h. Pelaksanaan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
 - i. Penyusunan bahan evaluasi pengendalian dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan, dan mempunyai fungsi sbb:
- a. Penyusunan Program kerja Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan



-
- c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan
 - e. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
 - f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
 - g. Pelaksanaan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
 - h. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
 - i. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - j. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan
 - k. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan
 - l. Pelaksanaan tugas lain di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sbb:
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Perlindungan Masyarakat
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perlindungan masyarakat.
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pembinaan perlindungan masyarakat.
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan masyarakat.
- Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang pembinaan perlindungan masyarakat, dan mempunyai fungsi sbb:
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat
 - d. Pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pembinaan perlindungan masyarakat



-
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
- Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat, dan mempunyai fungsi sbb:
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
 - e. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan / operasi penertiban penyakit masyarakat
 - f. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba
 - g. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
 - h. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang bidang pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat



- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 150 orang anggota dibandingkan dengan kondisi saat ini yang baru memiliki anggota sebanyak 48 orang.
2. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan ya-ng menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan Daerah berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mempawah. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk



itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

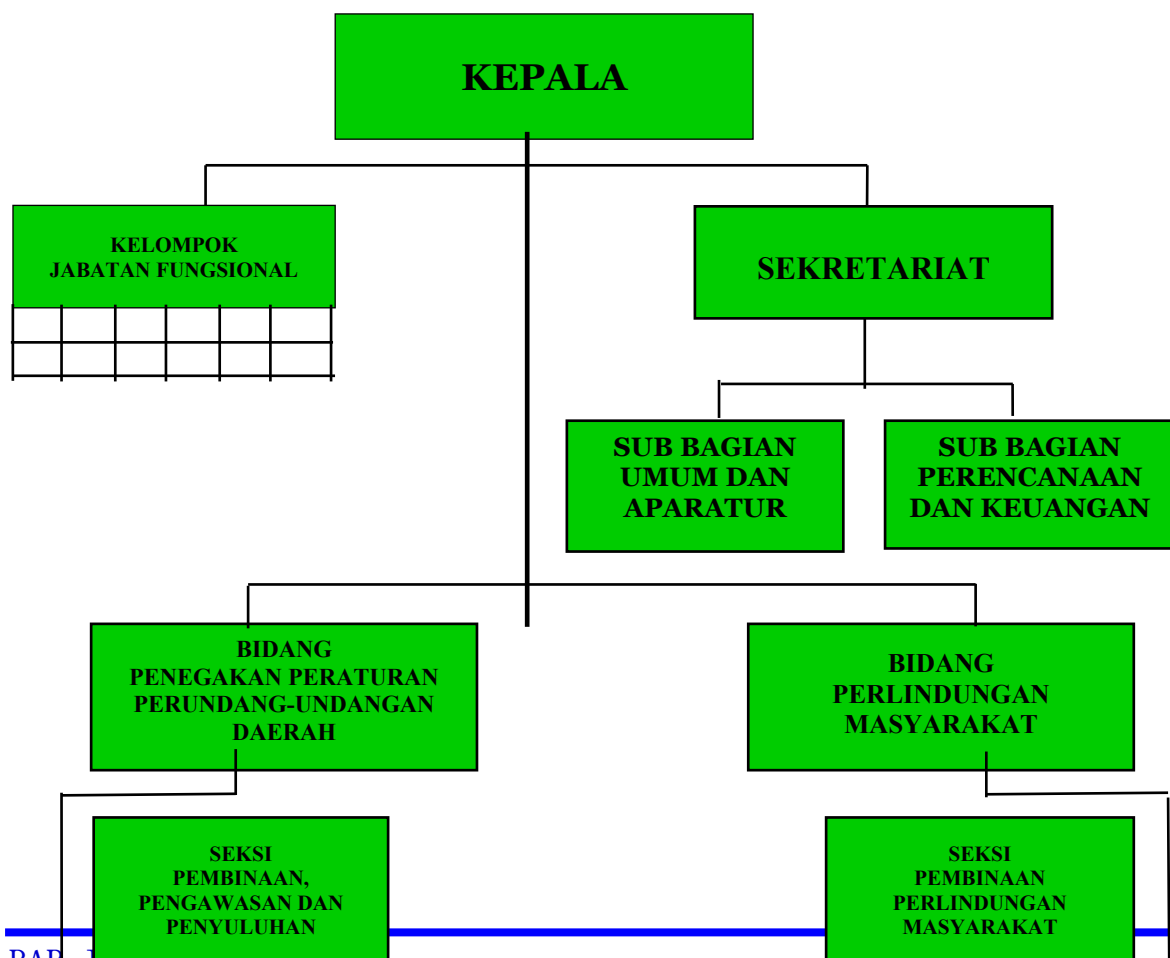
Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati Mempawah di Kabupaten Mempawah

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.
2. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.
3. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendaya gunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 60 %. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten Mempawah, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Kecamatan yang secara ex –officio dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan, masing-masing kecamatan diisi 5 orang sesuai dengan luas wilayah dan tingkat entisitas yang tinggi, dan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota Linmas, masing-masing kecamatan 5 orang anggota linmas yang telah terlatih, dengan catatan apabila itu dilaksanakan anggota Satpol PP Kecamatan berjumlah 45 orang. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana rasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana



- prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
(Menurut Perbup No. 26 tahun 2017)





Satuan Polisi Pamong

Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2025 PERUBAHAN

SEKSI PEYELIDIKAN,
PENYIDIKAN DAN
PENINDAKAN

SEKSI
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT
MASYARAKAT



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029. Sedangkan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2026 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2025 – 2029 terutama pembangunan jangka menengah Daerah tahap ke-2 tahun 2025 – 2029. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2025.

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu “ penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Mempawah masuk dalam Misi pertama yaitu “ ***Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien*** ”. Untuk mendukung pencapaian Misi Kabupaten Mempawah serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, didalam melaksanakan tugas yaitu Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mempawah, dilakukan dengan berbagai strategi yaitu:



1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan kebijakan Kepala daerah demi terwujudnya supermasi hukum dan HAM.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
4. Terselenggaraanya perlindungan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Meningkatkan kinerja apaaratur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan di Kabupaten Mempawah.



Sesuai dengan Misi Kabupaten Mempawah peran Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tegaknya supremasi Hukum dengan ditaatinya PERDA oleh masyarakat dalam rangka Otonomi Daerah.
- b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan perlindungan masyarakat.
- c. Mewujudkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, transparan dan bertanggung jawab.

Adapun makna dari rumusan Misi tersebut sebagai berikut :

- a. Tegaknya supremasi hukum adalah dipatuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh masyarakat Kabupaten Mempawah.
- b. Ditaatinya PERDA adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Mempawah yang dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- c. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang professional, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan keahliannya dan berkualitas, terbuka pada masyarakat, mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta siap menanggung segala resiko dari wewenang yang diterimanya. dengan meningkatkan kinerja aparatur penyelenggaraan Pemerintah masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis



Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 - 2029 untuk program dan kegiatan di tahun 2025.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah. Untuk mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mempawah, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Mempawah. Sejalan dengan Misi Kedelapan Kabupaten Mempawah, maka program dan kegiatan yang dirancang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- Perencanaan, PANGANGGARAN dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD



- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan/Material
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - ❖ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
-



-
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ❖ Pengadaan Mebel
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - ❖ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - ❖ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - ❖ Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Mempawah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah perlu menetapkan rencana kerja yang optimal serta pendanaan yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dan pendanaannya tertuang pada Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun 2025 – 2026.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 terdiri dari 2 Program dan 11 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan lokasi kegiatan tersebar di Kabupaten Mempawah. Total anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp. 10.025.134.130,00 (Sepuluh Miliar Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

Pada rumusan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD. Program, Kegiatan dan Pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah bisa dilihat pada tabel matriks Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah tahun 2025 yang tertuang pada Tabel T-C 32 pada Lampiran



BAB V

PENUTUP

4.1. PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai



Satuan Polisi Pamong
Praja
Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2026

sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat memiliki keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Mempawah, Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MEMPAWAH

KUNTUM INDAH PERTIWI NINGSIH, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda



Satuan Polisi Pamong

Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2026

NIP. 19720210 199202 2 002

Tabel T-C 29
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KABUPATEN MEMPAWAH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja			7.448.128.433					10.025.134.130,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	80%	6.655.711.269	70%	6.655.711.269	96,26	70%	8.075.548.693,00	100%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	80%	28.012.860	70%	28.012.860	99,34	70%	31.213.600,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	4.968.760	2 Dokumen	4.968.760	99,38	2 Dokumen	5.000.000,00	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.482.980	1 Dokumen	2.482.980	99,33	1 Dokumen	2.500.000,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.482.980	1 Dokumen	2.482.980	99,33	1 Dokumen	4.000.000,00	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.482.980	1 Dokumen	2.482.980	99,33	1 Dokumen	2.500.000,00	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.482.980	1 Dokumen	2.482.980	99,33	1 Dokumen	4.000.000,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.112.180	2 Laporan	13.112.180	99,34	2 Laporan	13.213.600,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	90%	5.983.337.245	80%	5.983.337.245	97,46	80%	7.586.473.293,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64/14 Orang/bulan	5.943.717.625	64/14 Orang/bulan	5.943.717.625	97,47	64/14 Orang/bulan	7.544.981.293,00	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.340.000	12 Dokumen	23.340.000	96,65	12 Dokumen	24.900.000 ,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.304.010	1 Laporan	11.304.010	97,87	1 Laporan	11.592.000,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.975.610	1 Laporan	4.975.610	99,52	1 Laporan	5.000.000,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	90%	12.400.500	80%	12.400.500	99,08	80%	11.089.800,00	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.400.500	12 Laporan	12.400.500	99,08	12 Laporan	11.089.800,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	90%	143.253.900	80%	143.253.900	93,96	80%	15.000.000,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	128.271.900	64 Paket	128.271.900	93,31	64 Paket	0,00	
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Paket	14.982.000	64 Orang	14.982.000	99,88	64 Orang	15.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80%	114.811.529	70%	114.811.529	98,34	70%	96.092.600,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.495.000	1 Paket	2.495.000	99,96	1 Paket	5.001.300,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.718.000	2 Paket	31.718.000	96,86	2 Paket	22.999.500,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.300	1 Paket	6.500.300	99,85	1 Paket	8.600.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.924.000	1 Paket	16.924.000	95,17	1 Paket	15.992.200,00	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	-	1 Paket	0,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.203.129	12 Laporan	55.203.129	99,97	12 Laporan	41.000.000,00	
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1.971.100	2 Dokumen	1.971.100	98,56	2 Dokumen	2.499.200,00	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80%	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	-	0,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	80%	93.243.635	70%	93.243.635	54,41	70%	119.352.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.267.167	12 Laporan	41.267.167	34,58	12 Laporan	119.352.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	51.976.468	12 Laporan	51.976.468	99,89	12 Laporan	-	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	280.651.600	70%	280.651.600	95,40	70%	216.327.400,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.258.700	1 Unit	24.258.700	93,80	1 Unit	24.861.400,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	246.682.900	10 Unit	246.682.900	95,38	10 Unit	105.256.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	75.000.000,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	4.830.000	14 Unit	4.830.000	100	14 Unit	5.110.000,00	
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.880.000	10 Unit	4.880.000	100	10 Unit	6.100.000,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif	30%	518.030.705	20%	518.030.705	97,08	20%	1.949.585.437,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	415.183.605	80%	415.183.605	97,07	95,50%	1.859.908.817,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	-	11.760.175,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	57.450.125	12 Dokumen	57.450.125	97,23	12 Dokumen	23.406.600,00	
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	134 Orang	-	-	-	-	125 Orang	40.639.200,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	12.982.900,00	
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	-	-	-	-	2	7.415.000,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250 laporan	357.733.480	280 Laporan	357.733.480	97,04	280 Laporan	1.763.704.942,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	55 Unit	-	-	-	-	55 Unit	0,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	102.847.100	80%	102.847.100	97,12	80%	89.676.620,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	23.942.300	3 Laporan	23.942.300	93,39 89,78	10 Laporan	23.474.400,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	-	-	-	-	6 Laporan	23.410.520,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35 Laporan	78.904.800	40 Laporan	78.904.800	98,32	21 Laporan	42.791.700,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Antar PPNS	100%	-	-	-	-	-	0,00	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	-	-	-	-	-	0,00	

Tabel T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MEMPAWAH

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				70%	70%	80%		6.655.711.269			
	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja				70%	70%	80%		28.012.860			
	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		4.968.760			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.482.980			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.482.980			

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.482.980			
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.482.980			
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		13.112.180			
Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan				80%	80%	90%		5.983.337.245			
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64/14 Orang/bulan	64/14 Orang/bulan	64/14 Orang/bulan		5.943.717.625			
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		23.340.000			
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		11.304.010			
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		4.975.610			

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah				80%	80%	90%		12.400.500			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12.400.500			
	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian				80%	80%	90%		143.253.900			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	64 Paket		128.271.900			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	64 Paket		14.982.000			
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				70%	70%	80%		114.811.529			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket		2.495.000			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2 Paket		31.718.000			

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket		6.500.300			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket		16.924.000			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket		-			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		55.203.129			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		1.971.100			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	-	12 Dokumen		-			
	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	-	80%		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	1 Unit		-			

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	2 Unit		-			
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	10 Unit		-			
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	4 Unit		-			
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	10 Unit		-			
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				70%	70%	80%		93.243.635			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-	12 Laporan		-			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		41.267.167			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	-		51.976.468			

	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70%	70%	80%		280.651.600			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1 Unit		24.258.700			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	10 Unit		246.682.900			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit		-			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	14 Unit		4.830.000			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10 Unit		4.880.000			
	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif				20%	20%	30%		518.030.705			

	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				80%	80%	100%		415.183.605			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				-	-	3 Dokumen		-			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		57.450.125			
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				201 Orang	201 Orang	134 Orang		-			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		-			
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				-	-	1 Dokumen		-			

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				280 Laporan	280 Laporan	250 laporan		357.733.480			
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				-	-	2 Laporan		-			
Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				-	-	2 Laporan		-			
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				-	-	55 Unit		-			
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				80%	80%	100%		102.847.100			
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		23.942.300			

	Kepala Daerah											
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				6 Laporan	6 Laporan	4 Laporan		-			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40 Laporan	40 Laporan	35 Laporan		78.904.800			
	Terlaksananya Koordinasi Antar PPNS				-	-	100%		-			
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				-	-	4 Laporan		-			

Tabel.T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN MEMPAWAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MEMPAWAH

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	Tingkat Kepuasan Bidang Pelayanan Terhadap Kesekretariatan	80%	8.075.548.693,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	Tingkat Kepuasan Bidang Pelayanan Terhadap Kesekretariatan	80%	8.075.548.693,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	80%	31.213.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	80%	31.213.600,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	5.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.213.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.213.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	90%	7.586.473.293,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	90%	7.586.473.293,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64/14 Orang/bulan	7.544.981.293,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64/14 Orang/bulan	7.544.981.293,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.900.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.900.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.592.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.592.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	90%	11.089.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	90%	11.089.800,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.089.800,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.089.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	90%	15.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	90%	15.000.000,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	0,00	Pagu dana Bertambah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Paket	15.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Paket	15.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80%	96.092.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80%	96.092.600,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.001.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.001.300,00	Sub Kegiatan Bertambah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	2 Paket	22.999.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	2 Paket	22.999.500,00	Sub Kegiatan Bertambah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.600.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.600.000,00	
	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kab Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.992.600,00	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kab Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.992.600,00	

	Penyediaan Bahan/Material	Kab Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.499.200,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.499.200,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80%	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80%	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

	Pengadaan Mebel	Kab Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	Pengadaan Mebel	Kab Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	80%	119.352.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	80%	119.352.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.352.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.352.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	216.327.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	216.327.400,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.861.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.861.400,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	105.256.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	105.256.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	5.110.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	5.110.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.100.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.100.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab Mempawah	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif	30%	1.949.585.437,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab Mempawah	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif	30%	1.949.585.437,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.859.908.817,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.859.908.817,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.760.175,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.760.175,00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	23.406.600,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	23.406.600,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab Mempaw ah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	134 Orang	40.639.200,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab Mempaw ah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	134 Orang	40.639.200,00	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempaw ah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	12.982.900,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempaw ah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	12.982.900,00	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab Mempaw ah	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	7.415.000,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab Mempaw ah	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	7.415.000,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab Mempaw ah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250 laporan	1.763.704.942,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab Mempaw ah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250 laporan	1.763.704.942,00	

	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	0,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	0	
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	0,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	0,00	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	55 Unit	0,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	55 Unit	0,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	89.676.620,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30,80%	89.676.620,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja

	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	23.474.400,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	23.474.400,00	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	23.410.520,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	23.410.520,00	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35 Laporan	42.791.700,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21 Laporan	42.791.700,00	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Koordinasi Antar PPNS	100%	0,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Koordinasi Antar PPNS	100%	0,00	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	0,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	0,00	

TABEL T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mempawah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	Satuan Polisi Pamong Praja			10.025.134.130,00		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	8.075.548.693,00	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	31.213.600,00	80%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5.000.000,00	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	1 Dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.500.000,00	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.000.000,00	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.213.600,00	2 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	7.586.473.293,00	90%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.544.981.293,00	64/14 Orang/bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.900.000,00	12 Dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.592.000,00	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	1 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	11.089.800,00	90%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.089.800,00	12 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	15.000.000,00	90%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0,00	64 Paket	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	64 Paket	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	96.092.600,00	80%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.001.300,00	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22.999.500,00	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.600.000,00	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.992.600,00	1 Paket	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0,00	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.000.000,00	12 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.499.200,00	2 Dokumen	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	12 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0,00	80%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0,00	1 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	2 Unit	
	Pengadaan Mebel	Kab Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,00	10 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0,00	4 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	4 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	10 Unit	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	119.352.000,00	80%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	119.352.000,00	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.327.400,00	80%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24.861.400,00	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105.256.000,00	10 Unit	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75.000.000,00	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.110.000,00	14 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.100.000,00	10 Unit	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab Mempawah	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif	1.949.585.437,00	30%	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.859.908.817,00	95.60%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11.760.175,00	4 Dokumen	

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.406.600,00	12 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab Mempawah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40.639.200,00	134 Orang	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12.982.900,00	4 Dokumen	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab Mempawah	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	7.415.000,00	1 Dokumen	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.763.704.942,00	250 laporan	

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-	2 Laporan	
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0,00	2 Laporan	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0,00	55 Unit	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	89.676.620,00	30,80%	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23.474.400,00	10 Laporan	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala	23.410.520,00	3 Laporan	

			daerah Sesuai SOP			
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42.791.700,00	21 Laporan	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab Mempawah	Terlaksananya Koordinasi Antar PPNS	0,00	100%	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0,00	4 Laporan	

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.025.134.130,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.075.548.693,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	100	8.075.548.693,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.213.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan PolisiPamong Praja	
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan PolisiPamong Praja	
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan PolisiPamong Praja	
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan PolisiPamong Praja	
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.213.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	13.213.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan PolisiPamong Praja	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.586.473.293,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.544.981.293,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	7.544.981.293,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan PolisiPamong Praja	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			24.900.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	24.900.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.592.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	11.592.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.089.800,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	11.089.800,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.089.800,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	11.089.800,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			96.092.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.001.300,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	5.001.200,00	1.05.0.00.0.00.01.0000	

	Disediakan			- Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.999.500,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	22.999.500,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.600.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	8.600.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.992.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.992.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			41.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	41.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.499.200,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2.499.200,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0 - 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	

1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119.352.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	119.352.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			119.352.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	119.352.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.327.400,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan			24.861.400,00	1.05.0.00.0.00.01.0000	

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				- Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	24.861.400,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			105.256.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	105.256.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			75.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	75.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.110.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	5.110.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.100.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	6.100.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1	2	3	4	5	6
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.949.585.437,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	-		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				1.05.0.00.0.00.01.0000	

				- Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	30.60	89.676.620,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			89.676.620,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			23.474.400,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10	23.474.400,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			23.410.520,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3	23.410.520,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			42.791.700,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21	42.791.700,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Tratibum yang ditangani	95.50	1.859.908.817,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.859.908.817,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik			12.982.900,00	1.05.0.00.0.00.01.0000	

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				- Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	12.982.900,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			7.415.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2	7.415.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			1.763.704.942,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	280	1.763.704.942,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				0 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2		0 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	55	0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	

Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	-	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT	Persentase Linmas yang dibina	25	183.954.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.859.908.817,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			11.760.175,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	11.760.175,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			23.406.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	23.406.600,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET
		2026			
		TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0	0,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			40639200,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	0	40639200,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			0	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	125	0	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	0		- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				- 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	-	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	-	
--	--	---	---	--	---	--



Pemerintah Kabupaten Mempawah



Perubahan Renja Tahun 2025

Disusun Oleh :
BPBD Kabupaten Mempawah

 [bpbdmempawah](https://www.instagram.com/bpbdmempawah)

 penanggulanganbencana@mempawah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat selesai dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dibuat sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini bisa disusun dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 11 Agustus 2025

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mempawah**

Drs. AGIT SUGIARTO
Pembina Utama Muda
NIP.19751031 199412 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Mempawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV: Penutup

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024
- Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2024 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)	Persentase (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.963.529.653,00	3.371.295.040,00	95,94
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.933.917.289,00	2.790.970.802,00	94,67
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.418.500,00	28.015.450,00	98,58
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.499.650,00	3.493.145,00	99,81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.479.850,00	2.459.900,00	99,19
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.479.700,00	2.478.325,00	99,93
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.479.700,00	2.390.025,00	96,41
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.479.700,00	2.458.325,00	99,13
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.900,00	14.735.730,00	98,24
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.149.316,00	2.389.167.283,00	95,74
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.799.816,00	2.349.322.148,00	95,77
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.349.850,00	22.341.945,00	100,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.900,00	14.970.995,00	100,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.999.750,00	4.992.195,00	100,00
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Prangkat Daerah	12.299.600,00	12.293.460,00	100,00
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.299.600,00	12.293.460,00	100,00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.173.545,00	30.874.000,00	88,21
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.173.545,00	30.874.000,00	88,21
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.679.900,00	133.631.420,00	95,16
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000,00	2.609.400,00	94,89
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.279.950,00	21.154.660,00	99,41
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.995.900,00	100,00
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.999.950,00	17.990.020,00	100,00
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.250.000,00	79.548.440,00	99,44
6.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.400.000,00	2.333.000,00	97,17

F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.530.000,00	12.500.000,00	99,74
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.530.000,00	12.500.000,00	99,74
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.994.728,00	60.326.163,00	67,60
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	38.074.035,00	61,91
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.994.728,00	22.252.128,00	86,64
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.671.500,00	157.315.500,00	83,33
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.857.800,00	22.846.900,00	93,01
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	55.993.700,00	59.751.600,00	78,21
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.330.000,00	4.747.500,00	99,96
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.490.000,00	69.969.500,00	100
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	666.181.200,00	170.241.185,00	99,42
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	22.931.000,00	24.412.475,00	99,37
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	22.931.000,00	24.412.475,00	99,37
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	836.981.750,00	63.395.385,00	83,77
1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	4.275.050,00	8.456.600,00	99,63
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	320.823.400,00	0,00	0,00
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	29.124.950,00	29.229.685,00	99,39
4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	60.020.850,00	25.709.100,00	98,27
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	211.368.750,00	70.845.750,00	99,80
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	211.368.750,00	70.845.750,00	99,80
D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	17.637.200,00	11.587.575,00	99,74
1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	17.637.200,00	11.587.575,00	99,74
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	363.431.164,00	374.498.679,00	94,84
A	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.510.864,00	350.390.209,00	85,84
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.339.400,00	9.459.000,00	94,59
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.171.464,00	340.931.209,00	94,60
B	Investigasi Kejadian Kebakaran	11.999.900,00	24.108.470,00	98,40
1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	11.999.900,00	24.108.470,00	98,40
C	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	36.920.400,00	0,00	0,00
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	36.920.400,00	0,00	0,00

Penjelasan :

- 1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023, total belanja yang dikelola adalah Rp. 3.514.101.451,00 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.453.005.581,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.061.095.870,00.
- 2. Pada tahun 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 80 % (data sampai dengan Bulan Nopember 2023 dikarenakan Renja 2024 ini disusun pada awal Bulan Desember 2023), yaitu :
 - 2.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (61,91 %);
 - 2.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (78,21 %);

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis :

“ Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran”

IKU	:	1. Jumlah kejadian bencana yang ditangani 2. Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi bencana pemenuhan ruang kerja.
-----	---	--

2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

2.2.1 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan didalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

- 2.2.1.1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana.
- 2.2.1.2. Penanganan bencana yang cepat dan rutin di wilayah wilayah tertentu seperti banjir, kebakaran hutan dan putting beliung.
- 2.2.1.3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menanggulangi bencana.
- 2.2.1.4. Penambahan jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
- 2.2.1.5. Sarana dan prasarana yang lengkap untuk memudahkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

2.2.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

Untuk mengatasi permasalahan diatas,beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

- 2.2.2.1. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat didalam penanggulangan bencana
- 2.2.2.2. Mengembangkan jaringan komunikasi
- 2.2.2.3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait
- 2.2.2.4. Memberdayakan seluruh potensi.
- 2.2.2.5. Mengikuti bimtek dan pelatihan
- 2.2.2.6. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi
- 2.2.2.7. Mobilitas pemenuhan kebutuhan dasar secara efektif dan efesien.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi di atas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana.
2. Mengoptimalkan penanganan bencana yang cepat dan rutin di wilayah wilayah yang terkena banjir, kebakaran hutan dan putting beliung.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi dalam menanggulangi bencana.
4. Menambah jumlah aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Menambah jumlah sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2026 telah ditetapkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah yaitu :

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah berdasarkan fungsi utama BPBD yaitu :

Tujuan:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan, Aman dan Tertib.

Berdasarkan pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 diatas, selanjutnya dirumuskan Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik.
2. Meningkatkan Ketahanan Kebencanaan.

2.1.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada tujuan diatas, maka Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Menurunnya Indeks Resiko Bencana.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah

N o	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satua n	Kondi si Awal	Targ et 2025	Targ et 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatn ya Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasa n Masyarak at	Meningkatn ya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasa n Masyarak at pada Perangka t Daerah	Nilai	90	90	90
2.	Meningkatn ya Ketahanan Kebencana an	Indeks Risiko Bencana	Meningkatn ya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahan an Daerah	Nilai	0,38	0,46	0,50

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 3 program, 17 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah adalah sesuai tabel terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mempawah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.



PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2.Landasan Hukum	3
	1.3.Maksud dan Tujuan	5
	1.4.Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	9
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun lalu	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah	20
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah	26
	2.4. Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025.....	35
	2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	47
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	48
	3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	50
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB IV	PENUTUP	61

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program / Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Mempawah, 24 Juli 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MEMPAWAH**



ABDUL MALIK, SH., MSi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691016 199803 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka rencana kerja memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas, sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai

kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tahun 2025, terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tahun 2025 – 2026 dan disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

1.3.2 Tujuan

tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOPD, kewenangan SKPD serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain uraian realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi dan yang melebihi target kinerja yang direncanakan, serta faktor-faktor penyebabnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra-SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berisikan uraian tentang :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 setelah perubahan anggaran adalah, sebesar Rp. 5.641.286.204,00 (Lima milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 5.137.371.786,00 (Lima milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) atau 91,07 % yang dijabarkan melalui 5 Program, 14 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan.

Sedangkan untuk tahun Anggaran tahun 2024 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.028.629.383,00 (Lima milyar dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dijabarkan dalam 5 program 15 kegiatan dan 38 Sub kegiatan dan diharapkan capaian kinerjanya lebih besar dari tahun 2023. Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C. 29 di bawah ini.



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mempawah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Fisik	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Rp	Fisik	Rp				Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	0%	11,907,000,000	88.20%	3,235,243,990	90%	3,701,384,593	93.41%	3,399,239,575	91.84%	91%	3,905,941,640	80%	9,540,532,364	93%	6,505,983,239
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86%														
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Daerah	100%	80,000,000	100%	29,938,100	100%	30,000,000	100%	28,882,280	96.27%	98%	31,999,600	114%	90,819,980	39.60%	61,937,700
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	15,000,000	2	4,969,300	2	5,000,000	2	4,971,295	99.43%	2	5,000,000	6	14,940,595	3	9,969,300
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	7,000,000	1	2,499,700	1	2,500,000	1	2,491,055	99.64%	1	2,999,900	3	7,990,655	2	5,499,600
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	8,000,000	1	2,499,700	1	2,500,000	1	2,403,055	96.12%	1	2,999,900	3	7,902,655	2	5,499,600
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	7,000,000	1	2,499,700	1	2,500,000	1	2,384,250	95.37%	1	2,999,900	3	7,883,850	2	5,499,600
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8,000,000	1	2,499,700	1	2,500,000	1	2,482,055	99.28%	1	2,999,900	3	7,981,655		5,499,600
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	2	35,000,000	2	14,970,000	2	15,000,000	2	14,150,570	94.34%	2	15,000,000	6	44,120,570	4	29,970,000
	Administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan	100%	6,400,000,000	64%	2,286,846,693	98%	2,447,864,292	100%	2,242,965,794	91.63%	100%	2,905,417,697	116%	7,435,230,184	32.71%	5,192,264,390



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp		Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan															
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26	6,300,000,000	14	2,259,527,693	14	2,406,894,292	14	2,202,497,564	91.51%	26	2,865,887,697	54	7,327,912,954	40	5,125,415,390
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	750	50,000,000	2	7,449,600	2	20,970,000	2	20,910,000	99.71%	2	19,530,000	6	47,889,600	4	26,979,600
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	35,000,000	1	14,869,600	1	15,000,000	1	14,619,500	97.46%	1	15,000,000	3	44,489,100	2	29,869,600
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	15,000,000	13	4,999,800	13	5,000,000	13	4,938,730	98.77%	13	5,000,000	39	14,938,530	26	9,999,800
	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	30,000,000	0%	-	0%	13,511,000	0%	13,360,450	0.00%	100%	12,000,000	0%	-	20.00%	-
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	30,000,000	0	-	2	13,511,000	2	13,360,450	98.89%	2	12,000,000	0	-	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	97%	110,000,000	62.50%	48,887,283	96%	35,000,000	62.50%	25,618,795	73.20%	97%	20,000,000	72%	79,669,278	31.90%	54,050,483
	- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	50,000,000	0	14,836,800	0	-	0	-	-	0	-				
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	60,000,000	5	34,050,483	8	35,000,000	5	25,618,795	73.20%	20	20,000,000	30	79,669,278	25	54,050,483
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	83%	487,000,000	97.65%	133,401,133	80%	159,701,500	97.65%	151,395,826	94.80%	81%	144,209,700	88%	429,006,659	35.73%	277,610,833
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7,000,000	6	2,499,850	6	2,500,000	6	2,500,000	100.00%	1	2,497,200	13	7,497,050	7	4,997,050
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	50,000,000	36	13,025,600	36	23,025,600	36	22,267,500	96.71%	2	23,025,600	74	58,318,700	38	36,051,200
	- Penyediaan Bahan Logistik	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20,000,000	1	-	1	-	1	-	-	2	8,000,000.00	4	8,000,000	3	8,000,000
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	35,000,000	12	9,468,400	12	15,666,900	12	13,949,870	89%	1	15,666,900	25	39,085,170	13	25,135,300
	- Penyediaan Bahan/Material	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	60,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Rp	Fisik	Rp		Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	300,000,000	28	108,407,283	30	115,000,000	30	109,458,456	95.18%	30	90,020,000	88	307,885,739	58	198,427,283
	- Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	700	15,000,000	0	-	10	3,509,000	9	3,220,000	-	800	5,000,000	809	8,220,000	800	5,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	80%	2,610,000,000	100%	414,573,191	100%	509,986,000	100%	486,287,500	95.35%	82%	327,721,000	10%	268,886,100	36.40%	133,928,600
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1,100,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	2	760,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	- Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	50,000,000	0	57,841,600	0	-	0	-	-	10	16,577,000	10	74,418,600	10	74,418,600
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	12	600,000,000	4	297,221,591	4	374,499,000	4	351,330,000	93.81%	16	311,144,000				
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	100,000,000	0	59,510,000	66	135,487,000	66	134,957,500	99.61%	0	-	66	194,467,500	0	59,510,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	85%	1,700,000,000	100%	198,982,645	90%	323,460,640	100%	270,153,319	83.52%	81%	319,391,040	46%	788,527,004	36.20%	518,373,685
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	30,000,000	3	-	2	10,000,000	3	7,650,000	76.50%	1	10,000,000	7	17,650,000	4	10,000,000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	470,000,000	36	145,385,197	36	211,500,000	36	162,380,623	76.78%	48	208,800,000	120	516,565,820	84	354,185,197
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	1,200,000,000	48	53,597,448	48	101,960,640	48	100,122,696	98.20%	12	100,591,040	108	254,311,184	60	154,188,488
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	91%	490,000,000	93.75%	122,614,945	82%	181,861,161	93.75%	180,575,611	99.29%	82%	145,202,603	92%	448,393,159	35.15%	267,817,548
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	50,000,000	1	19,266,850	1	22,860,900	1	22,853,300	99.97%	1	22,860,900	3	64,981,050	2	42,127,750
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Dinas	9	80,000,000	8	30,059,200	9	31,520,000	8	30,242,050	95.95%	9	31,520,000	25	91,821,250	17	61,579,200



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Rp	Fisik	Rp		Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	20,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	100,000,000	0	-	0	75,000,000	0	75,000,000	100.00%	0	-	0	75,000,000	0	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60	200,000,000	5	65,808,195	5	45,000,000	5	45,000,000	100.00%	30	77,100,000	40	187,908,195	35	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	40,000,000	1	7,480,700	1	7,480,261	1	7,480,261	100.00%	15	13,721,703	17	28,682,664	16	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Capaian Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk	0%	1,560,000,000	86.41%	997,297,248	91%	1,651,036,451	86.41%	1,504,871,091	91.15%	93%	1,160,896,132	235%	3,663,064,471	35.88%	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	100%														
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	100%														
		Persentase Penyelesaian Perekaman KTP	100%														
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	93%	1,560,000,000	86.41%	997,297,248	97%	1,651,036,451	86.41%	1,504,871,091	91.15%	98%	1,160,896,132	235%	3,663,064,471	36.88%	
	- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0	-	9	-	0	-	9	-	-	0	-	18	-	9	
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	65000	1,500,000,000	49613	672,573,720	72000	1,172,808,275	49613	1,027,063,195	87.57%	72000	674,897,450	171226	2,374,534,365	121613	
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20	60,000,000	228	324,723,528	228	478,228,176	228	477,807,896	100%	12	485,998,682	468	1,288,530,106	240	



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Rp	Fisik	Rp		Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase tingkat penataan pendaftaran penduduk	0%	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	- Penyusunan Tatacara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	- Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Capaian Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	0%	300,000,000	54.91%	110,534,500	90%	148,974,100	104.91%	121,068,110	81.27%	93%	128,152,450	120%	359,755,060	29.58%	238,686,950
		Persentase penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun	100%														
		Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)	100%														
		Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)	100%														
		Persentase penyelesaian penerbitan Akte Kematian	100%														
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	90%	300,000,000	109.82%	104,783,900	96%	86,974,100	109.82%	75,781,580	87.13%	98%	123,152,700	101%	303,718,180	42%	227,936,600
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	10000	260,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	- Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan pencatatan sipil yang Ditingkatkan	4	40,000,000	16199	104,783,900	14750	86,974,100	16199	75,781,580	87.13%	4	123,152,700	32402	303,718,180	16203	227,936,600
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Capaian Penyelenggaraan Fungsi Pencatatan Sipil	0%	-	0	5,750,600	92%	62,000,000	100%	45,286,530	73.04%	94%	4,999,750	2	56,036,880	18.80%	10,750,350
	- Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	0	-	12	5,750,600	12	-	12	-	-	12	4,999,750	36	10,750,350	24	10,750,350



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Fisik	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Rp	Fisik	Rp				Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Pencatatan Sipil															
	- Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	- Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	-		-	2	62,000,000	2	45,286,530	73.04%	0	-	2	45,286,530	0	-
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid	0%	1,005,000,000	84.44%	110,287,600	91%	117,661,060	84.44%	97,986,270	83.28%	94%	127,544,050	33%	335,817,920	35.69%	237,831,650
		Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	100%														
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dapat dimanfaatkan dan disajikan	0%	215,000,000	80.00%	44,495,000	90%	35,505,000	80.00%	27,773,850	78.23%	94%	51,544,550	58%	123,813,400	34.80%	96,039,550
		Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	91%														
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	- Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	85,000,000	80.00	32,195,850	80.00	27,845,000	80.00	23,701,970	85.12%	2	36,744,800	162	92,642,620	82	68,940,650
	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	- Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	21	90,000,000	3	12,299,150	5	7,660,000	3	4,071,880	53.16%	10	14,799,750	16	31,170,780	13	27,098,900
	- Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	40,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase tingkat pengelolaan informasi administrasi kependudukan	90%	600,000,000	88.89%	65,792,600	90%	82,156,060	88.89%	70,212,420	85.46%	96%	75,999,500	35%	212,004,520	36.98%	141,792,100
	- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Fisik	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Rp	Fisik	Rp				Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	21	155,000,000	0	4,755,600	10	82,156,060	10	70,212,420	85.46%	10	13,999,700	20	88,967,720	10	18,755,300
	- Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18	190,000,000	8	61,037,000	9	-	8	-	-	12	61,999,800	28	123,036,800	20	123,036,800
	- Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	- Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	8	115,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	- Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2	140,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	190,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	- Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6	70,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	- Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	- Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	1	50,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	- Bimbingan Teknis Terkait	- Jumlah Laporan Hasil	9	70,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Fisik	Rp	Fisik	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Fisik	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Fisik	Rp	Fisik	Rp				Fisik	Rp	Fisik	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Pengelolaan Informasi	Bimbingan Teknis Terkait															
	Administrasi Kependudukan dan	Pengelolaan Informasi															
	Pendayagunaan Data	Administrasi Kependudukan dan															
	Kependudukan	Pendayagunaan Data															
		Kependudukan															
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	Persentase Peningkatan	0%	165,000,000	79%	17,921,600	95%	22,230,000	79%	14,206,740	63.91%	96%	36,129,750	41%	68,258,090	34.91%	54,051,350
	KEPENDUDUKAN	Pengelolaan Profil Data															
		Kependudukan															
		Persentase penyajian komponen	95%														
		data dalam profil kependudukan															
	Penyusunan Profil	Persentase data profil	95%	165,000,000	79%	17,921,600	95%	22,230,000	79%	14,206,740	63.91%	100%	36,129,750	41%	68,258,090	35.71%	54,051,350
	Kependudukan	kependudukan yang disusun															
	- Penyediaan Data Kependudukan	- Jumlah Data Kependudukan	1	110,000,000	1	10,914,800	1	10,855,000	1	7,213,135	66.45%	9	20,379,850	11	38,507,785	10	31,294,650
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota															
	- Penyusunan Profil Data	- Jumlah dokumen profil Data	1	55,000,000	40	7,006,800	40	11,375,000	40	6,993,605	61.48%	1	15,749,900	81	29,750,305	41	22,756,700
	Perkembangan dan Proyeksi	Perkembangan dan Proyeksi															
	Kependudukan serta Kebutuhan	Kependudukan serta															
	yang lain	Kebutuhan yang lain															



Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Kabupaten Mempawah “MENJADIKAN KABUPATEN MEMPAWAH YANG CERDAS, MANDIRI DAN TERDEPAN”, kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung misi pertama yaitu *Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien*.

Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi dalam Penyelenggaraan ketertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui Pelayanan Prima.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil.
- b. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin di capai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program dan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tahun 2025 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas pelayanan dokumen, data dan informasi kependudukan dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan.

Arah Kebijakan :

- Penerapan system informasi administrasi kependudukan (SIAK) sebagai alat bantu pengolahan informasi administrasi kependudukan.
- Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola.
- Mengintegrasikan semua data administrasi kependudukan ke data base SIAK dan mengembangkan inovasi pelayanan.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

2.2. Analisis kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Mempawah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.30. dibawah ini.



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mempawah

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	SASARAN											
	MENINGKATNYA KAPASITAS KINERJA DAN SUMBER DAYA APARATUR											
	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase aparatur yang melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi			96,00%	96,00%	97,00%	-	100,00%		97,00%	-	
1.1	PROGRAM											
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH											
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	INDIKATOR PROGRAM											
	Persentase Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			91,00%	91,00%	92,00%	-	92,74%	91,83%	92,00%	-	
	SASARAN											
	MENINGKATNYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT											
	INDIKATOR SASARAN											
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah (Nilai)			-	-	-	82,35%	-	-	-	82,35%	
	PROGRAM											
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH											
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											



No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	INDIKATOR PROGRAM											
	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan			-	-	-	85,00%	-	-	-	85,00%	
2.	SASARAN											
	MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase kepemilikan KTP-el			99,40%	99,60%	99,80%	-	85,51%	90,40%	99,80%	-	
	Persentase kepemilikan KIA			40,00%	50,00%	60,00%	-	47,42%	52,80%	60,00%	-	
	Persentase kepemilikan KK			100,00%	100,00%	100,00%	-	87,58%	99,96%	100,00%	-	
	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun			78,00%	82,00%	85,00%	-	88,87%	90,76%	85,00%	-	
2.1	PROGRAM											
	PENDAFTARAN PENDUDUK											
	INDIKATOR PROGRAM											
	Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			91,00%	92,00%	93,00%	-	87,58%	91,15%	93,00%	-	
2,2	PROGRAM											
	PENCATATAN SIPIL											
	INDIKATOR PROGRAM											
	Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			91,00%	92,00%	93,00%	-	86,67%	81,27%	93,00%	-	
	SASARAN											
	MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK											



No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase keluarga yang memiliki KK			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman KTP			-	-	-	95,00%	-	-	-	95,00%	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA			-	-	-	55,00%	-	-	-	55,00%	
	PROGRAM											
	PENDAFTARAN PENDUDUK											
	INDIKATOR PROGRAM											
	Persentase Penyelesaian Penerbitan			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	Kartu Keluarga											
	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	Persentase Penyelesaian Perekaman KTP			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	SASARAN											
	MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL											
	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase penduduk berusia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran			-	-	-	95,00%	-	-	-	95,00%	
	Persentase penduduk yang meninggal memiliki Akta Kematian			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	PROGRAM											
	PENCATATAN SIPIL											
	INDIKATOR PROGRAM											
	Persentase penyelesaian Penerbitan Akta			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	Kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun											



No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	Persentase penyelesaian penerbitan Akte penyelesaian penerbitan Akte Kematian			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
3.	SASARAN											
	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATABASE KEPENDUDUKAN YANG VALID DAN BERBASIS SIAK											
	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid			95,00%	96,00%	97,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	
	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan			5 PKS	7 PKS	8 PKS	-	3 PKS	7 PKS	8 PKS	-	
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN											
	INFORMASI ADMINISTRASI											
	KEPENDUDUKAN											
	Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid			91,00%	92,00%	93,00%	-	77,09%	83,29%	93,00%	-	
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan			95,00%	95,00%	95,00%	-	47,98%	63,91%	100,00%	-	
	SASARAN											
	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATABASE KEPENDUDUKAN BERSKALA KABUPATEN											



No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	INDIKATOR SASARAN											
	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan			-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan			-	-	-	95,00%	-	-	-	95,00%	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sejak dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Perda 05 Tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mempawah dalam Melaksanakan Tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

A. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/ kegiatan dan pengembangan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta pembinaan organisasi.

Sekretariat membawahi dua Sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok Yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta urusan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok Yaitu membantu Sekretaris dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi/penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan melaporkan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pelaksanaan tugas.



B. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi 3 Sub Koordinator dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan program kerja di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan urusan Sub Koordinator-Sub Koordinator agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
3. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
4. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
5. Pengelolaan dan pelayanan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian, pencatatan dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di bidang pendaftaran penduduk. Dalam



melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan dan kebijakan teknis Sub Koordinator pelayanan pendaftaran penduduk.
3. Penyiapan bahan koordinasi di Sub Koordinator pelayanan pendaftaran penduduk.
4. Penyiapan bahan Pembinaan dan fasilitasi Sub Koordinator pelayanan pendaftaran penduduk.
5. Penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi bimbingan teknis, advokasi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran meliputi identitas penduduk (KTP, KIA dan KK), pindah datang dan pendataan penduduk sesuai peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.
6. Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi identitas penduduk (KTP, KIA dan KK), pindah datang dan pendataan penduduk.
7. Penyiapan bahan penetapan tingkat mobilitas dan mortalitas imigrasi penduduk kabupaten.
8. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian, pencatatan dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
9. Pelaksanaan tugas lain Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.



Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dibidang Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas, Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan di Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil.
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. Penyiapan bahan koordinasi di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Penyiapan bahan Pembinaan dan fasilitasi di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
5. Melaksanakan kegiatan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil.
7. Pelaksanaan tugas lain dibidang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sub Koordinator Pendokumentasi Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dibidang Pendokumentasi Dokumen Kependudukan. Dalam melaksanakan



tugas, Sub Koordinator Pendokumentasi Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan di Sub Koordinator Pendokumentasi Dokumen Kependudukan.
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Koordinator Pendokumentasi Dokumen Kependudukan.
3. Penyiapan bahan koordinasi di Sub Koordinator Pendokumentasi Dokumen Kependudukan.
4. Penyiapan bahan Pembinaan dan fasilitasi di Sub Koordinator Pendokumentasi Dokumen Kependudukan.
5. Menyusun tata kelola pengelolaan dokumentasi dokumen kependudukan sesuai peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana penyimpanan dokumentasi, memindai scan dokumentasi dokumen kependudukan ke dalam arsip digital sesuai peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.
7. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Sub Koordinator dokumentasi dokumen kependudukan.
8. Pelaksanaan tugas lain di Sub Koordinator dokumentasi dokumen kependudukan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.



- C. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahi 3 Sub Koordinator dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang PIAK dan Pemanfaatan Data serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dibidang PIAK dan Pemanfaatan Data.
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.
 3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.
 4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang meliputi penyajian dan pengolahan data, perumusan kebijakan teknis SIAK serta serta inovasi pelayanan sebagai bahan pelaksanaan tugas.
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program si bidang PIAK dan Pemanfaatan Data sesuai dengan urusan Sub Koordinator-Sub Koordinator berdasarkan rencana kerja dan program kerja untuk pelaksanaan tugas.
 6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- C. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan dan Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok Yaitu :
- a. Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data di bidang Sistem Informasi Administrsi



Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Mengumpulkana dan mengolah bahan kebijakan teknis pada Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun grafik data statistik berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan pengolahan hasil perekaman data hasil pendaftaran pelayanan pendudukn dan pencatatan sipil berdasarkan data yang ada untuk pelaksnaan tugas.
5. Melaksanakan pembangunan bank data administrasi kependudukan,
6. perlindungan data pribadi penduduk pada bank data administrasi kependudukan, pembangunan dan pengembangan jaringan kumunikasi data, penyusunan proyeksi kependudukan, pemeliharaan sistem teknologi informasi dan perangkat keras pelayanan administrasi kependudukan skala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan sesuai pedoman yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.
7. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Pelaksanaan tugas lain dibidang catatan sipil yang diberikan oleh Kepala Bidang Catatan sipil.

- b. Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan dan



Penyajian Data Kependudukan menyelenggarakan Sub Koordinator:

1. Penyusunan menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 3. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas.
 4. Melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian data meliputi statistik kependudukan, data agregat penduduk, profil kependudukan, pembersihan data ganda penduduk dan anomali sebagai petunjuk teknis sebagai bahan pelaksanaan tugas.
 5. Menyiapkan bahan fasilitasi pengawasan terhadap Administrator Data Base Kependudukan sesuai petunjuk teknis agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
 6. Menyelenggarakan pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem SIAK, penyiapan data dan desiminasi informasi kependudukan, mengkompilasi laporan data kependudukan, serta menyajikan statistik data kependudukan sesuai petunjuk teknis sebagai bahan pelaksanaan tugas.
 7. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 8. Pelaksanaan tugas lain di Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang diberikan oleh Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.
- c. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Informasi



Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.
2. Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
3. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan.
4. Menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
6. Menyelenggarakan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Pegawai Negeri Sipil ini berdasarkan beban kerja yang ada.
2. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada .
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran



program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.

5. Rendahnya pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mempawah :

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berdasarkan kepada Peraturan yang berlaku.
2. Aspek kebutuhan Aparatur, perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur yang telah ada dan Penambahan Aparatur yang berkompeten.
3. Aspek Sarana prasarana, dibutuhkan sarana pasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan Dinas dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

Tantangan Kedepan yang sangat dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sarana dan prasarana yang masih belum mendukung serta kurangnya Aparatur yang berkopenten dibidangnya, dan belum optimalnya Aparatur yang ada.

2.4. Review terhadap RKPD Perubahan

RKPD Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya Perubahan RKPD yang disajikan pada Tabel T-C 31 berikut ini :



Tabel T-C 31.
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mompowah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.300.212.542	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.300.212.542	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mompowah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Nilai 85	3.710.072.142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mompowah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Nilai 85	3.710.072.142	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mompowah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	34.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mompowah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	34.000.000	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mompowah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mompowah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah dokumen DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah dokumen DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	15.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mompowah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	15.000.000	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mompowah	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	100%	2.936.527.276	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mompowah	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	100%	2.936.527.276	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org/bln	2.901.363.276	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 org/bln	2.901.363.276	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750 dokumen	19.500.000	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750 dokumen	19.500.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	10.664.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	10.664.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 laporan	5.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 laporan	5.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	90%	12.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	90%	12.000.000	
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	12.000.000	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	12.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	25.000.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 paket	-	- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 paket	-	
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	25.000.000	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	25.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80%	91.084.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80%	91.084.800	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.583.100	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.583.100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.400.300	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.400.300	
	- Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Disediakan	1 paket	-	- Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Disediakan	1 paket	-	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.341.400	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.341.400	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	- Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	-	- Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	-	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	60.000.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	60.000.000	
	- Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	800 dokumen	3.760.000	- Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	800 dokumen	3.760.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	80%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	80%	-	
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	-	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	-	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	-	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	-	
	- Pengadaan Mebel	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 paket	-	- Pengadaan Mebel	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 paket	-	
	- Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang	12 unit	-	- Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang	12 unit	-	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	-	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	85%	460.597.424	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	85%	460.597.424	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	5.000.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	5.000.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 laporan	176.400.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 laporan	176.400.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	279.197.424	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	279.197.424	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	80%	150.862.642	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	80%	150.862.642	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	16.914.100	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	16.914.100	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	24.176.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	24.176.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	-	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	-	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 buah	60.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 buah	60.000.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 unit	38.400.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 unit	38.400.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	11.372.542	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	11.372.542	
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Mempawah	1. Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga 2. Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA 3. Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	100% 100% 100%	490.869.400	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Mempawah	1. Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga 2. Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA 3. Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	100% 100% 100%	490.869.400	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Persentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	93%	490.869.400	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Persentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	93%	490.869.400	
	- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	30 dokumen	-	- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	30 dokumen	-	
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	65.000 dokumen	476.469.400	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	65.000 dokumen	476.469.400	
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 laporan	14.400.000	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 laporan	14.400.000	
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Persentase tingkat penataan pendaftaran	98%	-	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Persentase tingkat penataan pendaftaran	98%	-	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Mempawah	pendudukan					pendudukan			
			Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	2 dokumen	-	- Penyusunan Tatacara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	2 dokumen	-	
			1. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran bagi Penduduk berusia 0-18 tahun 2. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akte 3. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akte 4. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akte	100%	42.583.100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Mempawah	1. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran bagi Penduduk berusia 0-18 tahun 2. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akte 3. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akte 4. Persentase Penyelesaian Penerbitan Akte	100%	42.583.100	
			Persentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	90%	42.583.100	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Mempawah	Persentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	90%	42.583.100	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	10.000 dokumen	42.583.100	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	10.000 dokumen	42.583.100	
			Jumlah Layanan pencatatan sipil yang Ditingkatkan	4 layanan	-	- Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Mempawah	Jumlah Layanan pencatatan sipil yang Ditingkatkan	4 layanan	-	
			Persentase capaian fungsi penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Mempawah	Persentase capaian fungsi penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	-	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	12 dokumen	-	- Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	12 dokumen	-	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait	2 dokumen	-	- Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis	2 dokumen	-	
			Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	100%	38.371.900	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	100%	38.371.900	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	100%	38.371.900	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	100%	38.371.900	
			Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	90%	23.395.700	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	90%	23.395.700	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang	2 dokumen	18.187.400	- Pengolahan dan Penyajian Data	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang	2	18.187.400	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	21 dokumen	5.208.300	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	21 dokumen	5.208.300	
	- Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 laporan	-	- Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 laporan	-	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	14.976.200	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	14.976.200	
	- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	21 Dokumen	3.826.200	- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	21 Dokumen	3.826.200	
	- Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 laporan	11.150.000	- Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 laporan	11.150.000	
	- Kerja sama dengan Organisasi	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kerja sama dengan	8	-	- Kerja sama dengan Organisasi	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kerja sama dengan	8	-	
3	- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Mempawah	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	-	- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Mempawah	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	-	
	- Pembinaan dan Pengawasan Terkait	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	6 laporan	-	- Pembinaan dan Pengawasan Terkait	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	6 laporan	-	
	- Supervisi Bersama dengan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan	1 Dokumen	-	- Supervisi Bersama dengan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan	1 Dokumen	-	
	- Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait	9 laporan	-	- Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis	9 laporan	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan	95%	18.316.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan	95%	18.316.000	
1	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun	95%	18.316.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun	95%	18.316.000	
	- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.389.500	- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.389.500	
	- Penyusunan Profil Data	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen profil Data Perkembangan dan	1 dokumen	8.926.500	- Penyusunan Profil Data	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen profil Data Perkembangan dan	1	8.926.500	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain			Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	dokumen		



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mempawah, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mempawah. Sejalan dengan Misi pertama Kabupaten Mempawah, maka program yang dirancang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Setiap program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan. Untuk lebih jelasnya Usulan program, kegiatan, Sub kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah perubahan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C 32 berikut :



Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Perubahan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mempawah

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Kab. Mempawah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85%	
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	100%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 org/bln	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750 dokumen	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	97%	
1.4.1	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 paket	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	82%	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
1.5.5	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mompawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mompawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 dokumen	
1.6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Mompawah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	80%	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mompawah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mompawah	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	2 unit	
1.6.3	Pengadaan Mebel	Kab. Mompawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 paket	
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mompawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mompawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	
1.7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Mompawah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	85%	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Mompawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mompawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mompawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	
1.8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Mompawah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	91%	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Kab. Mompawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Mompawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mompawah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mompawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 buah	
1.8.5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mompawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	
1.8.6	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mompawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Mompawah	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	100%	
		Kab. Mompawah	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA		
		Kab. Mompawah	Persentase Penyelesaian Perekaman KTP		
2.1	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Mompawah	Persentase terlaksanya pelayanan pendaftaran penduduk	93%	
2.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Mompawah	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	65000 dokumen	
2.1.2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mompawah	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 laporan	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Mompawah	Persentase capaian pengelolaan dokumen Persentase penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun	100%	
		Kab. Mompawah	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)		
		Kab. Mompawah	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)		



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kab. Mempawah	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Kematian		
3.1	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Kab. Mempawah	Persentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	90%	
3.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	10000 dokumen	
3.1.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Mempawah	Jumlah Layanan pencatatan sipil yang Ditingkatkan	4 layanan	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	100%	
4.1	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	90%	
4.1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 dokumen	
4.1.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	21 dokumen	
4.1.3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	1 laporan	
2	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Persentase Tingkat Pengelolaan Administrasi Kependudukan	21 dokumen	
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	
2	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	
4.2.1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	21 Dokumen	
4.2.2	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 laporan	
4.2.3	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	8 Dokumen	
4.2.4	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	
4.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	
4.3.1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	
4.3.2	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	1 dokumen	
4.3.3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	9 laporan	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Penyajian Komponen Data dalam Profil Kependudukan	95%	
5.1	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Mempawah	Persentase Data Profil Kependudukan yang Disusun	95%	
5.1.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	
5.1.2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 dokumen	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Sedangkan Perubahan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2005 – 2025 terutama Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 – 2026. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2025.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam undang undang No 24 tahun 2013 , Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah mengacu pada visi dan misi dalam RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025 yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Adapun Visi Kabupaten Mempawah Tahun 2005 – 2025 yaitu : " *Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing* "

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, maka misi yang akan diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah " *Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik* ". Misi ini ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan pendayagunaan system perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta system akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.



Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan :

Tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik.

B. Sasaran :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah mempunyai sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan Indikatornya *Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah.*

Sasaran II : Meningkatnya kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dengan indikatornya :

- a. Persentase penduduk yang telah melakukan Perekaman KTP;*
- b. Persentase Keluarga yang memiliki KK;*
- c. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA;*

Sasaran III : Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil dengan indikatornya :

- a. Persentase penduduk berusia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran;*
- b. Persentase penduduk yang meninggal memiliki Akta Kematian;*

Sasaran IV : Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Kabupaten dengan indikatornya *Persentase pemanfaatan database SIAK untuk kepentingan Pembangunan.*



Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu didukung sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang memadai. Kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada saat ini telah didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sedangkan Sumber Daya Manusia yang masih sangat kurang dan tingkat kompetensi yang masih sangat rendah dan dukungan anggaran yang ada untuk mencapai sasaran masih belum maksimal.

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mempawah, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mempawah. Sejalan dengan Misi pertama Kabupaten Mempawah, maka program dan kegiatan rencana kerja perubahan yang dirancang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari Rencana 5 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp 4.300.212.542,00 yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota yang dukung dengan 7 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.710.072.142,00;
2. Program Pendaftaran Penduduk yang dukung dengan 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 490.869.400,00;
3. Program Pencatatan Sipil yang dukung dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 42.583.100,00;



4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang didukung dengan 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 38.371.900,00;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang didukung dengan 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 18.316.000,00

Untuk lebih jelasnya rumusan rencana kerja perubahan program dan kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel T-C 33 pada bagian Lampiran V.



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Mempawah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2025				RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4				5	6	7	8	9	10
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.325.676.233			4.300.212.542				5.199.212.325
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Kab. Mempawah	85%	4.210.091.933		85%	3.710.072.142			85%	4.051.798.025
2	01	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Mempawah	100%	34.000.000		100%	34.000.000			100%	34.000.000
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	2 dokumen	5.000.000	APBD	2 dokumen	5.000.000	APBD	-	2 dokumen	5.000.000
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mempawah	1 dokumen	3.000.000	APBD	1 dokumen	3.000.000	APBD	-	1 dokumen	3.000.000
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mempawah	1 dokumen	4.000.000	APBD	1 dokumen	4.000.000	APBD	-	1 dokumen	4.000.000
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mempawah	1 dokumen	3.000.000	APBD	1 dokumen	3.000.000	APBD	-	1 dokumen	3.000.000
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mempawah	1 dokumen	4.000.000	APBD	1 dokumen	4.000.000	APBD	-	1 dokumen	4.000.000
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mempawah	2 dokumen	15.000.000	APBD	2 dokumen	15.000.000	APBD	-	2 dokumen	15.000.000
2	12	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Mempawah	100%	2.936.527.276		100%	2.936.527.276			100%	3.213.642.788
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	26 org/bln	2.901.363.276	APBD	26 org/bln	2.901.363.276	APBD	-	26 org/bln	3.178.478.788
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mempawah	750 dokumen	19.500.000	APBD	750 dokumen	19.500.000	APBD	-	750 dokumen	19.500.000
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mempawah	1 laporan	10.664.000	APBD	1 laporan	10.664.000	APBD	-	1 laporan	10.664.000
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	13 laporan	5.000.000	APBD	13 laporan	5.000.000	APBD	-	13 laporan	5.000.000
2	12	01	2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	Kab. Mempawah	100%	12.000.000		100%	12.000.000			100%	12.000.000
2	12	1	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mempawah	2 laporan	12.000.000	APBD	2 laporan	12.000.000	APBD	-	2 laporan	12.000.000
2	12	01	2.04		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Mempawah	97%	25.000.000		97%	25.000.000			97%	25.000.000
2	12	01	2.04	0002	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mempawah	27 paket	-	APBD	27 paket	-	APBD	-	27 paket	-
2	12	01	2.04	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	30 orang	25.000.000	APBD	30 orang	25.000.000	APBD	-	30 orang	25.000.000
2	12	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kab. Mempawah	82%	130.166.200		82%	91.084.800			82%	130.166.000
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mempawah	1 paket	3.499.300	APBD	1 paket	2.583.100	APBD	-	1 paket	3.499.100



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2025				RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mempawah	2 paket	23.000.000	APBD	2 paket	15.400.300	APBD	-	2 paket	23.000.000
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mempawah	1 paket	8.000.000	APBD	1 paket	-	APBD	-	1 paket	8.000.000
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mempawah	1 paket	15.666.900	APBD	1 paket	9.341.400	APBD	-	1 paket	15.666.900
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mempawah	3 paket	-	APBD	3 paket	-	APBD	-	3 paket	-
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	50 laporan	75.000.000	APBD	50 laporan	60.000.000	APBD	-	50 laporan	75.000.000
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mempawah	800 dokumen	5.000.000	APBD	800 dokumen	3.760.000	APBD	-	800 dokumen	5.000.000
2	12	01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kab. Mempawah	80%	211.770.400		80%	-			80%	206.426.900
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mempawah	8 unit	24.724.200	APBD	-	-	APBD	-	8 paket	23.543.200
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mempawah	5 unit	187.046.200	APBD	-	-	APBD	-	-	182.883.700
2	12	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Mempawah	85%	675.053.420		85%	460.597.424			85%	245.000.000
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mempawah	3 laporan	10.000.000	APBD	3 laporan	5.000.000	APBD	-	2 laporan	10.000.000
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mempawah	48 laporan	235.000.000	APBD	48 laporan	176.400.000	APBD	-	48 laporan	235.000.000
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mempawah	36 laporan	430.053.420	APBD	36 laporan	279.197.424	APBD	-	36 laporan	-
2	12	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Kab. Mempawah	91%	185.574.637		91%	150.862.642			91%	185.562.337
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mempawah	1 unit	22.856.900	APBD	1 unit	16.914.100	APBD	-	1 unit	22.844.600
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mempawah	9 unit	31.520.000	APBD	9 unit	24.176.000	APBD	-	9 unit	31.520.000
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Mempawah	1 buah	40.000.000	APBD	1 buah	60.000.000	APBD	-	1 buah	40.000.000
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mempawah	30 unit	77.530.000	APBD	30 unit	38.400.000	APBD	-	30 unit	77.530.000
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mempawah	15 unit	13.667.737	APBD	15 unit	11.372.542	APBD	-	15 unit	13.667.737
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Kab. Mempawah	100%	759.710.000		100%	490.869.400			100%	774.575.000
						Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA										
						Persentase Penyelesaian Perekaman KTP										
2	12	02	2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase terlaksanya pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Mempawah	93%	759.710.000		93%	490.869.400			93%	759.710.000



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2025				RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	65000 dokumen	729.710.000	APBD	65000 dokumen	476.469.400	APBD	-	65000 dokumen	729.710.000
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	20 laporan	30.000.000	APBD	20 laporan	14.400.000	APBD	-	20 laporan	30.000.000
2	12	02	2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kab. Mempawah	-	-	-	-	-	-	-	4 laporan	14.865.000
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dan Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dan Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	-	-	APBD	-	-	APBD	-	2 laporan	8.400.000
2	12	02	2.03	0004	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	-	-	APBD	-	-	APBD	-	2 laporan	6.465.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun	Kab. Mempawah	100%	139.979.600		100%	42.583.100			100%	156.944.600
					Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)											
					Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)											
					Persentase penyelesaian penerbitan Akte Kematian											
2	12	03	2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Kab. Mempawah	90%	139.979.600		90%	42.583.100			90%	139.979.600
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kab. Mempawah	10000 dokumen	119.979.600	APBD	10000 dokumen	42.583.100	APBD	-	10000 dokumen	119.979.600
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan pencatatan sipil yang Ditingkatkan	Kab. Mempawah	4 layanan	20.000.000	APBD	4 layanan	-	APBD	-	4 layanan	20.000.000
2	12	03	2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Mempawah	-	-	-	-	-	-	-	4 laporan	16.965.000
2	12	03	2.02	0002	Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dan Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Mempawah	-	-	APBD	-	-	APBD	-	2 laporan	10.500.000
2	12	03	2.02	0004	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab. Mempawah	-	-	APBD	-	-	APBD	-	2 laporan	6.465.000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian informasi data kependudukan yang akurat dan valid	Kab. Mempawah	100%	168.936.600		100%	38.371.900			100%	168.936.600
2	12	04	2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dapat dimanfaatkan dan disajikan	Kab. Mempawah	90%	61.861.400		90%	23.395.700			90%	61.861.400
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Mempawah	2 dokumen	36.583.600	APBD	2 dokumen	18.187.400	APBD	-	2 dokumen	36.583.600
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	21 dokumen	16.779.000	APBD	21 dokumen	5.208.300	APBD	-	21 dokumen	16.779.000
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Kab. Mempawah	1 laporan	8.498.800	APBD	1 laporan	-	APBD	-	1 laporan	8.498.800
2	12	04	2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	90%	88.575.200		90%	14.976.200			90%	88.575.200
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	21 dokumen	10.240.500	APBD	10 dokumen	3.826.200	APBD	-	21 dokumen	10.240.500
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	18 laporan	78.334.700	APBD	3 laporan	11.150.000	APBD	-	18 laporan	78.334.700



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2025				RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4				5	6	7	8	9	10
2	12	04	2.04		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Mempawah	-	18.500.000		-	-		-	90%	18.500.000
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Mempawah	-	18.500.000	APBD	-	-	APBD	-	9 laporan	18.500.000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan	Kab. Mempawah	95%	46.958.100		95%	18.316.000			95%	46.958.100
2	12	05	2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun dan Disajikan	Kab. Mempawah	95%	46.958.100		95%	18.316.000			95%	46.958.100
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	1 dokumen	25.466.600	APBD	1 dokumen	9.389.500	APBD	-	1 dokumen	25.466.600
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Mempawah	1 dokumen	21.491.500	APBD	1 dokumen	8.926.500	APBD	-	1 dokumen	21.491.500



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025 secara rinci ditampilkan dalam Tabel 4.1. berikut ini.



Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MEMPAWAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA TAHUN 2025					
								Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sumber Dana
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5,325,676,233		4,300,212,542	ABPD
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase tingkat capaian pelayanan administrasi perkantoran	%	Kab. Mempawah	91.00	4,210,091,933	91.00	3,710,072,142	ABPD
2	01	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	dokumen	Kab. Mempawah	100	34,000,000	100	34,000,000	ABPD
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Mempawah	2	5,000,000	2	5,000,000	ABPD
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Kab. Mempawah	1	3,000,000	1	3,000,000	APBD
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Mempawah	1	4,000,000	1	4,000,000	APBD
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	Kab. Mempawah	1	3,000,000	1	3,000,000	APBD
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Mempawah	1	4,000,000	1	4,000,000	APBD
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Mempawah	2	15,000,000	2	15,000,000	APBD
2	12	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	%	Kab. Mempawah	100.00	2,936,527,276	100.00	2,936,527,276	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	Kab. Mempawah	26	2,901,363,276	32	2,901,363,276	APBD
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Kab. Mempawah	750	19,500,000	750	19,500,000	APBD
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Kab. Mempawah	1	10,664,000	1	10,664,000	APBD
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	Kab. Mempawah	13	5,000,000	13	5,000,000	APBD



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Satuan	RENCANA TAHUN 2025					
									Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sumber Dana
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah		%	Kab. Mempawah	97.00	12,000,000	97.00	12,000,000	
2	12	1	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	Kab. Mempawah	2	12,000,000	2	12,000,000	APBD
2	12	01	2.04		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		%	Kab. Mempawah	97.00	25,000,000	97.00	25,000,000	
2	12	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	Kab. Mempawah	20	-	-	-	APBD
2	12	01	2.04	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	Kab. Mempawah	30	25,000,000	30	25,000,000	APBD
2	12	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum		%	Kab. Mempawah	81%	130,166,200	81%	91,084,800	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	Kab. Mempawah	1	3,499,300	1	2,583,100	APBD
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	Kab. Mempawah	2	23,000,000	2	15,400,300	APBD
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	Kab. Mempawah	1	8,000,000	0	-	APBD
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	Kab. Mempawah	1	15,666,900	1	9,341,400	APBD
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	Kab. Mempawah	50	75,000,000	40	60,000,000	APBD
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen	Kab. Mempawah	700	5,000,000	700	3,760,000	APBD
2	12	01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		%	Kab. Mempawah	82.00	211,770,400	82.00	-	APBD
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		paket	Kab. Mempawah	5	24,724,200	0	-	APBD
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	Kab. Mempawah	12	187,046,200	0	-	APBD
2	12	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah		%	Kab. Mempawah	91.00	675,053,420	91.00	460,597,424	APBD
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	Kab. Mempawah	1	10,000,000	1	5,000,000	APBD
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	Kab. Mempawah	48	235,000,000	48	176,400,000	APBD
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	Kab. Mempawah	12	430,053,420	12	279,197,424	APBD
2	12	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD		%	Kab. Mempawah	82.00	185,574,637	82.00	150,862,642	APBD
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	Kab. Mempawah	1	22,856,900	1	16,914,100	APBD
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit	Kab. Mempawah	8	31,520,000	8	24,176,000	APBD
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		unit	Kab. Mempawah	1	40,000,000	2	60,000,000	APBD
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	Kab. Mempawah	60	77,530,000	30	38,400,000	APBD



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA TAHUN 2025					
								Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sumber Dana
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Kab. Mempawah	15	13,667,737	15	11,372,542	APBD
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase capaian pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk	%	Kab. Mempawah	100%	759,710,000	100%	490,869,400	APBD
2	12	02	2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	%	Kab. Mempawah	93%	759,710,000	93%	490,869,400	APBD
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Kab. Mempawah	65.000	729,710,000	65.000	476,469,400	APBD
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Kab. Mempawah	20	30,000,000	20	14,400,000	APBD
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian pengelolaan dokumen pencatatan sipil	%	Kab. Mempawah	90.00	139,979,600	90.00	42,583,100	APBD
2	12	03	2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	%	Kab. Mempawah	96.00	139,979,600	96.00	42,583,100	APBD
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	Kab. Mempawah	10000	119,979,600	10000	42,583,100	APBD
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan pencatatan sipil yang Ditingkatkan	layanan	Kab. Mempawah	4	20,000,000	0	-	APBD
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian informasi data kependudukan yang akurat dan valid	%	Kab. Mempawah	91.00	168,936,600	91.00	38,371,900	APBD
2	12	04	2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dapat dimanfaatkan dan disajikan	%	Kab. Mempawah	90.00	61,861,400	90.00	23,395,700	APBD
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	dokumen	Kab. Mempawah	2	36,583,600	2	18,187,400	APBD
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	Kab. Mempawah	21	16,779,000	21	5,208,300	APBD
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	laporan	Kab. Mempawah	1	8,498,800	0	-	APBD
2	12	04	2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Kab. Mempawah	90%	88,575,200	90%	14,976,200	APBD
2	12	04	2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Kab. Mempawah	90.00	88,575,200	90.00	14,976,200	APBD
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	Kab. Mempawah	21	10,240,500	21	3,826,200	APBD
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Kab. Mempawah	18	78,334,700	3	11,150,000	APBD



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025*

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA TAHUN 2025					
								Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sumber Dana
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	04	2.04		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Kab. Mempawah	90%	18,500,000	0	-	APBD
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	Kab. Mempawah	9	18,500,000	0	-	APBD
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan	%	Kab. Mempawah	95,00	46,958,100	95,00	18,316,000	
2	12	05	2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun dan Disajikan	%	Kab. Mempawah	%	46,958,100	%	18,316,000	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	dokumen	Kab. Mempawah	1	25,466,600	1	9,389,500	APBD
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	dokumen	Kab. Mempawah	1	21,491,500	1	8,926,500	APBD

BAB V

P E N U T U P

Disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para aparatur pelaksana.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian hukum warganya dan aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, maka program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terus-menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan untuk dapat terus mengakomodir setiap perubahan kebijakan yang terjadi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa-masa yang akan datang.



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2025

**DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MEMPAWAH**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD Perubahan) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana program kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Mempawah, Agustus 2025

Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mempawah



Drs. ASWIN AS, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 196802031989031007

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkanya UU nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga diwajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang di selenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja OPD.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini menyusun rencana kerja perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025, Renja Perubahan OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025, merupakan rencana Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup seperti yang tertuang dalam Rentra 2025 – 2026 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing".

Misi 1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas;

Misi 2. Mewujudkan kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing;

Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;

Misi 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dikaitkan dengan visi dan misi dalam RPJPD 2005-2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terkait erat dengan pencapaian Misi ke 3 dan 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat penerima manfaat atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Mempawah menetapkan Misi 3 dan 4 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

Tujuan :

- 1.1 Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
- 1.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks).

Sasaran :

- 1.2.1 Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja utama Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)
- 1.2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks).Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mempawah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 84 Tahun 2021, tanggal 30 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- 2.Terwujudnya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- 4.Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD



BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Lalu

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selama tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja



1. Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 22.546.369.616,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah), terealisasi sebesar Rp. 21.583.167.959.00 (dua puluh satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau terealisasi 95,73%, dengan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 20.442.052.516,00 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua ribu lima puluh dua ribu lima rtaus enam belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 19.508.264.294,00 (sembilan belas milyar lima ratus delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 95,43% dan belanja modal sebesar Rp. 2.104.317.100,00 (dua milyar seratus empat juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.074.903.665,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau 98,60% yang dijabarkan melalui 10 (sepuluh) Program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan termasuk rutin yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Evaluasi Hasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.581.639.999,00	6.461.072.041,00	98,17
Program	02.11.02	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57
Kegiatan	02.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57
Sub Kegiatan	02.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57
Program	02.11.03	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	108.578.800,00	83.983.717,00	77,35



Kegiatan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45.893.500,00	32.771.867,00	99,35
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	23.098.900,00	15.680.250,00	67,88
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	22.794.600,00	17.091.617,00	74,98
Kegiatan	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62.685.300,00	51.211.850,00	90,78
Sub Kegiatan	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	62.685.300,00	51.211.850,00	81,70
Program	02.11.04	PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	303.049.700,00	301.108.135,00	99,36
Kegiatan	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	303.049.700,00	301.108.135,00	99,36
Sub Kegiatan	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	303.049.700,00	301.108.135,00	99,36
Program	02.11.05	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36.814.700,00	25.849.150,00	70,21
Kegiatan	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.375.000,00	15.910.100,00	68,06
Sub Kegiatan	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	23.375.000,00	15.910.100,00	68,06
Sub Kegiatan	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	0	0	0 -
Kegiatan	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.439.700,00	9.939.050,00	73,95
Sub Kegiatan	2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	0	0



Sub Kegiatan	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	13.439.700,00	9.939.050,00	73,95
Program	02.11.06	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	112.634.650,00	86.613.550,00	76,90
Kegiatan	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112.634.650,00	86.613.550,00	76,90
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31.935.000,00	27.572.200,00	86,34
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	20.000.000,00	10.210.000,00	51,05
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.699.825,00	27.429.600,00	76,83
Sub Kegiatan	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24.999.825,00	21.401.750,00	85,61
Program	02.11.09	PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	36.079.900,00	28.074.150,00	77,81
Kegiatan	2.11.09.2.0127	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.079.900,00	28.074.150,00	77,81
Sub Kegiatan	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.079.900	28.074.150,00	77,81
Program	02.11.10	PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	36.279.775,00	26.343.070,00	72,61
Kegiatan	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	36.279.775,00	26.343.070,00	72,61
Sub Kegiatan	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16.279.775,00	9.748.600,00	59,88



Sub Kegiatan	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	20.000.000,00	16.594.470,00	82,97
Program	02.11.11	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.848.202.474,00	5.809.533.269,00	99,34
Kegiatan	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.848.202.474,00	5.809.533.269,00	99,34
Sub Kegiatan	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.510.368.984,00	4.491.966.524,00	99,59
Sub Kegiatan	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.337.833.490,00	1.317.566.745,00	98,49
02.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15.964.729.617,00	15.122.095.918,00	94,72
Program	02.15.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.969.244.489,00	11.260.778.947,00	94,08
Kegiatan	02.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.937.375,00	96,46
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.900.800,00	98,02
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.404.960,00	96,20
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.494.305,00	99,77
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.370.180,00	94,81
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.493.430,00	99,74
Sub Kegiatan	02.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.273.700,00	95,16
Kegiatan	02.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.430.535.977,00	5.049.238.585,00	92,98
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.372.445.977,00	4.991.659.600,00	92,91
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.090.000,00	38.074.340,00	99,96
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.509.200,00	96,73
Sub Kegiatan	02.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.995.445,00	99,91



Kegiatan	02.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.839.700,00	16.490.080,00	79,13
Sub Kegiatan	02.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.839.700,00	16.490.080,00	79,13
Kegiatan	02.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.500.000,00	29.342.413,00	69,04
Sub Kegiatan	02.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42.500.000,00	29.342.413,00	69,04
Kegiatan	02.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.000.000,00	166.783.160,00	99,28
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.982.465,00	99,82
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.000.000,00	25.579.395,00	98,38
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.996.500,00	99,98
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.591.185,00	98,83
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.867.585,00	99,82
Sub Kegiatan	02.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	6.766.030,00	96,66
Kegiatan	02.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.161.647.812,00	5.872.031.044,00	95,30
Sub Kegiatan	02.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.074.999.800,00	5.785.394.162,00	95,23
Sub Kegiatan	02.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.648.012,00	86.636.882,00	99,99
Kegiatan	02.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.721.000,00	97.956.290,00	84,65
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.990.800,00	22.720.845,00	98,83
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.900.200,00	55.553.560,00	76,20
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.852.000,00	97,04
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.900.000,00	6.899.950,00	100,00
Sub Kegiatan	02.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.000,00	7.929.935,00	100,00
Program	02.15.02	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.995.485.128,00	3.861.316.971,00	96,64
Kegiatan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.540.183.840,00	2.508.614.895,00	98,76



Sub Kegiatan	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	422.704.200,00	419.757.985,00	99,30
Sub Kegiatan	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.160.000.000,00	1.153.822.805,00	99,47
Sub Kegiatan	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	957.479.640,00	935.034.105,00	97,66
Kegiatan	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	7.111.100,00	6.544.015,00	92,03
Sub Kegiatan	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	7.111.100,00	6.544.015,00	92,03
Kegiatan	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	39.999.900,00	39.368.110,00	98,42
Sub Kegiatan	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	39.999.900,00	39.368.110,00	98,42
Kegiatan	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	336.977.996,00	328.343.301,00	97,44
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	77.038.956,00	71.002.236,00	92,16
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	17.800.000,00	17.357.160,00	97,51
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	9.794.475,00	97,94
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.510.000,00	7.155.120,00	95,27
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	199.999.040,00	199.787.000,00	99,89
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	19.217.310,00	96,09
Sub Kegiatan	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.630.000,00	4.030.000,00	87,04
Kegiatan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	558.749.700,00	525.597.699,00	94,07
Sub Kegiatan	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	543.750.000,00	512.407.694,00	94,24
Sub Kegiatan	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	14.999.700,00	13.190.005,00	87,94
Kegiatan	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	19.999.600,00	16.075.955,00	80,38

Sub Kegiatan	2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	19.999.600,00	16.075.955,00	80,38
Kegiatan	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.462.992,00	436.772.996,00	88,69
Sub Kegiatan	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	310.213.192,00	292.079.489,00	94,15
Sub Kegiatan	2.15.02.2.09.02	Pengendalian, Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan Barang Antar Kota dlm 1 (satu) Kab/Kota	182.249.800,00	144.693.507,00	79,39
		JUMLAH	22.546.369.616,00	21.583.167.959,00	95,73

Pada dasarnya program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mendukung Visi Daerah “Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing dan Misi Daerah ke 3 dan 4 yakni “Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik” dan “Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan” maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)
- Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja utama Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)
 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks).

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

Permasalahan transportasi dan lingkungan Hidup secara umum di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan yakni dari total kebutuhan kelengkapan jalan sebanyak 13.772 unit hanya sekitar 10.244 unit yang dapat tersedia pada tahun 2023. Selain itu sebagian kelengkapan jalan yang tersedia berada dalam kondisi yang tidak baik atau mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran yang belum memadai dalam pengadaan dan rehabilitasi kelengkapan jalan serta jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang.
2. Pada tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mempawah, persentase kendaraan angkutan barang dan angkutan orang yang layak jalan adalah sebesar 26,28% yakni sebanyak 1412 unit yang melakukan uji kendaraan dari 5352 unit jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahan masyarakat tentang pentingnya melakukan uji kendaraan dalam upaya keselamatan berlalu lintas. Pada unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Mempawah, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yakni belum tersedianya 2 alat uji yakni speedometer tester dan slide slip tester. Beberapa alat uji juga dalam kondisi rusak yakni smoke tester dan Co/Hc. Dalam hal sumber daya manusia masih diperlukan beberapa pelatihan untuk meningkatkan uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.
3. Perencanaan Lingkungan Hidup masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah. Padahal proses perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap urusan.
4. Perencanaan Lingkungan Hidup masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah. Padahal proses perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap urusan.
5. Belum optimalnya proses pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah. Hal ini terindikasi dari terbatasnya dokumen uji kualitas lingkungan yang dilakukan karena minimnya sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia, belum adanya dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun secara berkala, tidak adanya petugas laboratorium yang menyebabkan keterbatasan fungsi laboratorium, hingga pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pemberian informasi yang masih terbatas.

6. Belum optimalnya proses pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Mempawah. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum memahami proses pengendalian B3 dan LB3. Selain itu dari segi jumlah Sumber Daya Manusia yang melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 di Bidang Lingkungan Hidup juga masih sangat terbatas.
7. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan mengalami kendala internal berupa minimnya jumlah fungsional pengendali lingkungan hidup yang ada di Bidang Lingkungan Hidup. Hal ini menyebabkan kecepatan verifikasi dokumen menjadi tidak seimbang dengan jumlah izin yang masuk. Selain itu, pelaku usaha/kegiatan juga terkadang tidak melengkapi dokumen persyaratan sehingga proses verifikasi berkas menjadi terlambat.
8. Kurang optimalnya kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta menumbuhkan budaya peduli terhadap Lingkungan Hidup dari masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat.
9. Menurunnya minat masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini perlu didorong oleh insentif maupun pendampingan secara intensif guna meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat.
10. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan dalam pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup. Masalah tersebut disebabkan belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlengkapan jalan
2. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selama 2 Tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Realisasi RPJMD. Selanjutnya pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 84 Tahun 2021, tanggal 30 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2025 s/d 2026 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD maupun capaian kinerja sesuai target IKK dan target indikator lainnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No.	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Awal Tahun	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian Kinerja tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		Kinerja Tujuan / Sasaran		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan untuk meningkatkan lalu lintas yang tertib dan lancar	%	N/A	0	0	65	70	75	-	85,52	106,01	106,26	-	-	-	0,16	0,15	-
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Memningkatny a kualitas air dan udara (%)	%	N/A	70	75	80	85	90	N/A	N/A	83,34	73,53	-	-	-	0,10	0,09	-
							-	-	-										

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
--------	------------------------	----------------------------------	--



	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Daerah	22.706.664.238					21.361.488.955					0,094				
Belanja Tidak Langsung	5.563.572.903					4.864.030.737					0,087				
Belanja Pegawai	5.563.572.903					4.864.030.737					0,087				
Belanja Langsung	17.143.091.335					16.497.458.218					0,096				
Belanja Barang dan Jasa	15.459.341.335					14.822.797.218					0,096				
Belanja Modal	1.683.750.000					1.674.661.000					0,099				
Belanja Daerah		22.164.743.142	22.631.086.460	22.546.369.616	27.172.564.604		19.919.014.840	21.368.977.977	21.583.167.959			0,090	0,094	0,096	-
Belanja Operasi		19.914.493.142	20.870.979.160	20.442.052.516	23.291.269.604		17.895.851.840	19.614.837.977	19.508.264.294			0,090	0,094	0,095	-
Belanja Pegawai		5.655.617.898	5.312.289.176	5.409.375.977	5.833.605.518		5.150.902.705	4.866.766.156	5.024.269.600			0,091	0,092	0,093	-
Belanja Barang dan Jasa		14.258.875.244	15.558.689.984	15.032.676.539	17.457.664.086		12.744.949.135	14.748.071.821	14.483.994.694			0,089	0,095	0,096	-
Belanja Modal		2.250.250.000	1.760.107.300	2.104.317.100	3.881.295.000		2.023.163.000	1.754.140.000	2.074.903.665	-		0,092	0,099	0,099	-

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan human error;
2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;
3. Rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah akan menempatkan Mempawah pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah;
4. Kondisi prasarana perhubungan yang belum optimal, di sisi lain minat masyarakat menggunakan angkutan umum menurun;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.
6. Menurunnya kualitas air;
7. Bertambahnya volume timbunan sampah;
8. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan konservasi Lingkungan Hidup
9. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi/sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2025.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*Prosesdur Battom Up*).
3. Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program–program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi

masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas (mendesak) akan diusulkan pada tahun berikutnya.

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari shopping list ke working plan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)

Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja utama Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perlengkapan Jalan (Persentase)
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks).

Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mempawah, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan Misi Kesatu dan Keempat Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam serta untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya, dan dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bertujuan teroptimalisasinya upaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,

melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap lingkungan agar dapat dimonitor dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan hidup.

3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suata ruang terbuka yang bersih, indah dan nyaman.
4. Program pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), bertujuan teroptimalisasinya pengendalian lingkungan dari bahan berbahaya dan beracun (B3).
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bertujuan memberikan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan terhadap izin lingkungan yang terbit dan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina
6. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, bertujuan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup.
7. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, bertujuan memberikan penghargaan terhadap dunia pendidikan / sekolah yang telah berkontribusi terhadap lingkungan hidup.
8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup, bertujuan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
9. Program pengelolaan persampahan, bertujuan untuk menata dan mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan sumber daya manusia, prasana dan prasarana yang ada agar berjalan dengan baik.
10. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, bertujuan meningkatkan pelayanan reformasi dan birokrasi yang lebih baik guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran.
11. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), bertujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan agar berhasil dengan baik guna meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

Untuk lebih jelasnya rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.



BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029. Renja Perubahan ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta RAPBD Tahun 2025.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Tahun 2025

No.	Program	RKPD 2025 (Rp)	RKPD Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	528.361.000,00	107.090.600,00	(421.270.400,00)
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	214.913.100,00	44.281.500,00	(170.631.600,00)
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.809.120.400,00	633.350.200,00	(2.175.770.200,00)
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	55.077.500,00	14.716.700,00	(40.360.800,00)
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	37.113.800,00	29.446.800,00	(7.667.000,00)



6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	82.481.600,00	624.440.000,00	541.958.400,00
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	34.627.500,00	27.830.200,00	(6.797.300,00)
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.248.200,00	13.655.900,00	(8.592.300,00)
9	Program Pengelolaan Persampahan	13.794.070.656,00	11.042.696.156,00	(2.751.374.500,00)
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.414.998.189,00	14.689.222.333,00	(3.725.775.856,00)
11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.554.017.376,00	3.925.646.376,00	(5.628.371.000,00)
	Jumlah	45.547.029.321,00	31.152.376.765,00	(14.394.652.556,00)

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD. Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah telah merencanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 11 program, 28 kegiatan dan 82 sub Kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada RKPD Tahun 2025 mengalami perubahan, di mana dari segi pendanaan mengalami pengurangan (refocusing), sehingga dalam target yang seharusnya hendak direalisasikan berdampak mengalami penurunan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Perubahan OPD ini diharapkan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Mempawah.

Renja Perubahan Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2025-2026.

DAERAH (RKPD) KAB. MEMPAAWAH
5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12- 10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							45.547.029.321,00	33.170.444.715,00	31.152.376.765,00	-14.394.652.556,00							44.283.698.780,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.547.029.321,00	33.170.444.715,00	31.152.376.765,00	-14.394.652.556,00							44.283.698.780,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							17.578.013.756,00	13.864.219.356,00	12.537.508.056,00	-5.040.505.700,00							18.116.322.091,00		
1.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 Persen	528.361.000,00	318.088.800,00	107.090.600,00	-421.270.400,00							650.000.000,00		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi pengelolaan lingkungan hidup	100 %	0 %	100 %	100 %	-	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-300.000.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	1	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		0	0	1 Dokumen	-	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		1	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (KLHS)	100 Persen	100%	100%	100%	1 Dokumen	228.361.000,00	218.088.800,00	107.090.600,00	-121.270.400,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	0	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																			
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	116.429.000,00	109.130.600,00	107.090.600,00	-9.338.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																			

[illegible]

			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	37.457.300,00	37.457.300,00	11.630.300,00	-25.827.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		1	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	81%	50%	80%	81%	85%	2.809.120.400,00	1.524.000.200,00	633.350.200,00	-2.175.770.200,00							964.687.500,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	81%	50%	80%	81%	81%	2.809.120.400,00	1.524.000.200,00	633.350.200,00	-2.175.770.200,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		964.687.500,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		4,7 Ha	4,7 Ha	5 Ha	5 Ha	2.809.120.400,00	1.524.000.200,00	633.350.200,00	-2.175.770.200,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			964.687.500,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Lingkungan dan Bahan Berbahaya dan Beracun	70%	0%	60%	70%	70%	55.077.500,00	45.916.600,00	14.716.700,00	-40.360.800,00							134.076.800,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Fasilitas Penyimpanan sementara Limbah B3	75%	0%	65%	75%	75%	29.077.100,00	29.077.100,00	10.737.100,00	-18.340.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		89.076.800,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	13.719.700,00	13.719.700,00	7.259.700,00	-6.460.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)																		

			Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	13.719.700,00	13.719.700,00	7.259.700,00	-6.460.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			13.719.700,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3																		
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan		0	0	1 Laporan	1 Laporan	15.357.100,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			15.357.100,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		0	0	1 Laporan	1 Laporan	15.357.400,00	15.357.400,00	3.477.400,00	-11.880.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten	80%	0%	70%	80%	80%	26.000.400,00	16.839.500,00	3.979.600,00	-22.020.800,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	1 Dokumen	1 Dokumen	-	11.150.000,00	9.459.900,00	0,00	-11.150.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kevenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan		0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.850.400,00	7.379.600,00	3.979.600,00	-10.870.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

5,	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	85%	65%	75%	85%	85%	37.113.800,00	37.113.800,00	29.446.800,00	-7.667.000,00							70.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	20 Fositif	65%	15 Fositif	20 Fositif	20 Fositif	37.113.800,00	37.113.800,00	29.446.800,00	-7.667.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		15 Dokumen	11 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	17.113.800,00	17.113.800,00	9.446.800,00	-7.667.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		1 Orang	3 Orang	5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6,	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	60%	0%	0%	60%	60%	82.481.600,00	68.828.000,00	624.440.000,00	541.958.400,00							554.712.500,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	30%	0%	0	30%	30%	82.481.600,00	68.828.000,00	624.440.000,00	541.958.400,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		554.712.500,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		0	0	1	0	8.409.400,00	0,00	0,00	-8.409.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		

			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		0	100 Orang	125 Orang		74.072.200,00	68.828.000,00	624.440.000,00	550.367.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			534.712.500,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		0	0	1 Lembaga	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	85%	100%	75%	85%	85%	34.627.500,00	30.060.200,00	27.830.200,00	-6.797.300,00							50.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	80%	100%	70%	80%	80%	34.627.500,00	30.060.200,00	27.830.200,00	-6.797.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		2 Entitas	2 Entitas	2 Entitas	2 Entitas	34.627.500,00	30.060.200,00	27.830.200,00	-6.797.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	85%	17%	75%	85%	85%	22.248.200,00	21.330.900,00	13.655.900,00	-8.592.300,00							50.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	80%	17%	70%	80%	80%	22.248.200,00	21.330.900,00	13.655.900,00	-8.592.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		1 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	12.475.200,00	11.557.900,00	8.457.900,00	-4.017.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		

			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kevenangan kabupaten/kota		0	0	1	1	9.773.000,00	9.773.000,00	5.198.000,00	-4.575.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyerelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9,	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	27%	42%	26,81%	27%	27%	13.794.070.656,00	11.731.068.356,00	11.042.696.156,00	-2.751.374.500,00							15.267.845.291,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	27%	84%	26,81%	27%	27%	13.794.070.656	11.731.068.356	11.042.696.156	-2.751.374.500,00			Memperkuat penyerelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		15.267.845.291	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.166.200,00	600.888.200,00	437.466.000,00	-797.700.200,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyerelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			600.888.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		6210 Ton	9345.72 ton	10363 Ton	10363 Ton	12.558.904.456,00	11.130.180.156,00	10.605.230.156,00	-1.953.674.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat penyerelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			14.666.957.291,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							27.969.015.565,00	19.306.225.359,00	18.614.868.709,00	-9.354.146.856,00							26.167.376.689,00	
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	80%	60%	70%	80%	80%	18.414.998.189,00	14.846.849.503,00	14.689.222.333,00	-3.725.775.856,00							19.002.376.689,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	91%	92%	90%	91%	91%	38.009.400,00	33.996.100,00	33.996.100,00	-4.013.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-2.000.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.512.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.012.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.000.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	14.996.400,00	14.996.400,00	14.996.400,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100%	83%	100%	100%	100%	6.737.234.089,00	6.359.551.503,00	6.689.551.503,00	-47.682.586,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			6.737.876.689,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		56 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	6.681.376.689,00	6.305.460.703,00	6.635.460.703,00	-45.915.986,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETribusi JAsa USaha SiSA LEBIH PERHitungan ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			6.681.376.689,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	12 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	34.080.000,00	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.833.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	-833.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			17.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.944.400,00	5.010.900,00	5.010.900,00	-933.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	70%	75%	65%	70%	70%	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Stakeholder		13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	95%	44%	95%	95%	95%	180.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-155.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Stakeholder		127.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	0	0	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		7 Orang	9 Orang	15 Orang	15 Orang	120.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-95.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			67.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	95%	103%	95%	95%	95%	207.495.600,00	137.495.600,00	48.389.900,00	-159.105.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		224.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.995.600,00	10.995.600,00	3.847.800,00	-7.147.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	7.699.100,00	-14.300.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			23.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	5.250.000,00	-9.750.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			19.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	11.372.000,00	-21.128.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0	0	1 Paket	0	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	50.000.000,00	17.770.500,00	-52.229.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		69 Dokumen	60 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	2.450.500,00	-4.549.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	76%	0%	75%	76%	76%	3.269.713.200,00	1.993.157.200,00	1.599.589.800,00	-1.670.123.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Stakeholder		3.355.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	2 Unit	8 Unit	2 Unit	2.956.324.000,00	1.958.639.800,00	1.450.619.800,00	-1.505.704.200,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	149.576.600,00	0,00	0,00	-149.576.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	3 Unit	7 Unit	0,00	24.685.600,00	148.970.000,00	148.970.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Indeks Gini Indeks Gini			0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	10 Unit	0	84.629.600,00	0,00	0,00	-84.629.600,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	10 Unit	0	79.183.000,00	9.831.800,00	0,00	-79.183.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	93%	100%	90%	93%	93%	7.500.000.000,00	6.180.000.000,00	6.028.460.130,00	-1.471.539.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		8.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7.500.000.000,00	6.180.000.000,00	6.028.460.130,00	-1.471.539.870,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			8.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93%	59%	90%	93%	93%	470.045.900,00	105.149.100,00	251.734.900,00	-218.311.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Stakeholder		496.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	1 Unit		22.988.900,00	22.988.900,00	8.042.900,00		-14.946.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			45 Unit	45 Unit	45 Unit	79.997.000,00	72.900.200,00	241.012.900,00		161.015.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00		-350.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	9 Unit	13 Unit	3 Unit	7.300.000,00	4.380.000,00	1.460.000,00		-5.840.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			14.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	10 Unit	12 Unit	2 Unit	9.760.000,00	4.880.000,00	1.220.000,00		-8.540.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	50 %	78%	85 %	50 %	50 %	9.554.017.376,00	4.459.375.856,00	3.925.646.376,00		-5.628.371.000,00							7.165.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ	100%	88%	0%	100%	0%	200.000.000,00	0,00	0,00		-200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																			

			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	0		200.000.000,00	0,00	0,00		-200.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap					200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																						
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	0		0,00	0,00	0,00		0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap					0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																						
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	0		0,00	0,00	0,00		0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap					0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	72 %	88%	70 %	72 %	72 %		7.880.249.560,00	3.699.988.860,00	3.213.599.804,00		-4.666.649.756,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	-				4.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																						
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		3 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit		948.914.000,00	686.414.000,00	584.769.000,00		-364.145.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap					600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																						

			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		11 Unit	240 Unit	160 Unit	160 Unit	5.942.353.800,00	1.840.528.800,00	1.760.528.800,00	-4.181.825.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		140 unit	136 unit	170 Unit	170 Unit	988.981.760,00	1.173.046.060,00	868.302.004,00	-120.679.756,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	70%	100%	65%	70%	70%	582.351.700,00	4.151.400,00	3.281.400,00	-579.070.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	-		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	582.351.700,00	4.151.400,00	3.281.400,00	-579.070.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	72%	100%	70%	72%	72%	39.999.900,00	39.849.900,00	20.667.900,00	-19.332.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			

			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 Dokumen	2200 Dokumen	1600 Dokumen	1600 Dokumen	5.454.200,00	5.454.200,00	5.454.200,00		0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.921.108,00	6.921.108,00	990.000,00		-5.931.108,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																				
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	-	0,00	0,00	0,00		0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		7 Unit	7 Unit	8 Unit	8 Unit	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		-50.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.821.708,00	7.821.708,00	4.421.708,00		-3.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				

			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		5 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.445.400,00	3.445.400,00	1.945.400,00	-1.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas	34%	30%	30%	34%	34%	148.927.000,00	89.797.000,00	37.977.000,00	-110.950.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	-			270.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20.215.900,00	20.215.900,00	8.785.900,00	-11.430.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan																			
			Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan		0 Unit	0 Unit	4 Unit	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.098.700,00	15.098.700,00	7.898.700,00	-7.200.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap				30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			

			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		19.455.900,00	14.325.900,00	12.325.900,00	-7.130.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		0	1	1	-		50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		0 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		14.156.500,00	10.156.500,00	8.966.500,00	-5.190.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengolahan Parkir Pada Kabupaten/Kota	78%	100%	78%	78%	78%		13.702.200,00	13.702.200,00	6.637.200,00	-7.065.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																			
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		0 Orang	0 Orang	2 Orang	-		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			0,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		8 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.072.700,00	111.845.700,00	88.728.700,00	-31.344.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	350.000.000,00	335.226.480,00	411.836.164,00	61.836.164,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap			370.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								45.547.029.321,00	33.170.444.715,00	31.152.376.765,00	-14.394.652.556,00							44.283.698.780,00	



RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

KABUPATEN MEMPAWAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Renja ini disusun sebagai arah acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026. Renja ini memuat tujuan, sasaran, program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Renja ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Namun kami juga menyadari menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan masa mendatang.



Besar harapan kami atas terealisasi usulan program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam Renja ini. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Renja ini, Semoga Tuhan Yang Maha Esa menggantikannya dengan pahala yang berlipat dan menjadi amal yang diridhoi.

Mempawah, 21 Juli 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MEMPAWAH**



RUDI, S.STP,MA

PEMBINA TK.I

NIP. 197909071S998101001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2.Landasan Hukum	4
	1.3.Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistimatika Penyusunan Renja	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...	10
	2.1 Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daera	19
	3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V	P E N U T U P	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Mempawah eksentensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) dan di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Mempawah.

Di era globalisasi dewasa ini perang bidang Komunikasi dan Infomatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyaarakat informasi.

Didalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan suatu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu dalam pengembanganya, penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi infomasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efesien dengan mengoftimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk elemen-elemen masyarakat. Hal inillah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunukasi dan Infomatika Kabupaten Mempawah.



Sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas sebagian urusan Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika. Jadi sangat perlu kiranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah memiliki dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada RENSTRA SKPD 2025 -2026 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026.

Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Renja SKPD memiliki peran penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD pada unit organisasi terendah dan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Untuk memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah harus dikelola secara profesional pula. Prinsip-Prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, benefit, cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan, diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsive yang di topang perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan dan



tidak sekedar reaktif. Era Globalisasi saat ini menyebabkan arus informasi berjalan begitu cepat sehingga menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat, hal ini ditandai dengan semakin kritis dan tinggi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik dan memuaskan, khususnya pelayanan di bidang komunikasi dan infomatika. Dalam upaya merespon paradigma baru tersebut Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Mempawah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terjangkau dan profesional serta berkembangnya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sehingga memuaskan semua pihak yaitu masyarakat, stake holder dan Dinas Komunikasi dan Infomatika itu sendiri.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing-masing SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan RENJA mengacu kepada kerang at arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara stimulant / parallel dengan penyusunan SKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Mempawah dalam menjalankan kebijakan pembangunan Komunikasi



dan Informatika tahun 2025 yang di sepakati Bersama di lingkup Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah.

Renja ini mengacu pada RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dan akan dipakai sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), lingkup perencanaan pembangunan terbagi menjadi tiga jenis perencanaan, yaitu sebagai berikut:

- a.** Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun.
- b.** Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun.
- c.** Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah ini dibuat secara keseluruhan akan direkap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Penyusunan Renja SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :



1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan Renstra SKPD.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Straegis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program tiap bidang disertai dengan rencana kerja yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan.

2. Tujuan

Adapun Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman / acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2025
- c. Selain itu Renja Perubahan SKPD diharapkan dapat berperan sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah untuk pencapaian visi organisasi.
- d. Merupakan komitmen Bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.
- e. Adanya kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh insan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.



1.4. SISTEM PENYUSUNAN RENJA

Sistem rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, keterkaitan antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi juga tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Undang-undang, ketentuan peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.



Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah. tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah selama tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai beriku.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 Kabupaten Mempawah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah

Tabel 2.1

Terlampir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, Teknologi Informasi Komunikasi dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2025

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Mempawah “**Menjadikan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan**”. Pada dasarnya kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi ke 1 (satu) Kabupaten Mempawah yaitu **Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efesien**. Untuk mencapai misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika pada saat ini adalah meningkatkan Kapasitas Layanan Informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerjasama Lembaga Komunikasi dan Informasi serta mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melalui Pengembangan Aplikasi, muatan Layanan Publik, Standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam peningkatan Pelayanan Publik.



Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good governance melalui electronic government (E-Government), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengendalian Menara Tower Telekomunikasi. Sebagai gambaran ada beberapa produk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dan akan terus dikembangkan, antara lain sebagaimana terlampir.



1. Pengendalian Menara Tower Telekomunikasi

Merupakan kegiatan pelayanan perizinan Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi diantaranya memberikan Rekomendasi pada provider yang akan melakukan Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi, serta Melakukan Monitoring serta pendataan pada tower-tower dimaksud, serta melakukan pembinaan pada ORARI dan RAPI

2. Infrastruktur Jaringan TIK

Merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk Mengintegrasikan sistem informasi dan data base dalam rangka mengimplementasikan E-Government dan layanan publik berbasis webbase, dimana DISKOMINFO berusaha mewujudkan E-Service untuk mendukung terwujudnya Government to government (G to G) dan Government to Citizen (G to C) dengan penyediaan sarana aplikasi berbasis webbase untuk pelayanan public, sehingga aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat sampai ketinggian desa.

3. Media Online

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.mempawahkab.go.id

4. Pelayanan Keluhan Masyarakat

Adalah salah satu kegiatan DISKOMINFO dalam rangka menghimpun, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk melalui beberapa media, baik yang berbasis elektronik dan dapat diakses di ppid.mempawah.go.id dan sapa.mempawahkab.go.id: melalui media tersebut diatas, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya serta keluhannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

5. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM):

Pemberdayaan KIM ini Adalah sebuah kegiatan yang dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang dilakukan di kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah dengan melibatkan instansi terkait sebagai narasumber. Semua anggota KIM diundang dalam pertemuan tersebut. dengan kegiatan KIM ini diharapkan tercapainya transformasi langsung kepada masyarakat baik berupa kebijakan Pemerintah, Program Pemerintah, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan kemandirian kewirausahaan masyarakat. Dengan sosialisasi ini memungkinkan penyebaran informasi TIK secara cepat dengan harapan masyarakat tidak gaptek TIK.

6. Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan Dan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk menyukseskan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas baik formal maupun non formal mulai SD/MI sampai SMP/MTS.

7. Statistik Dan Persandian

Kegiatannya antara lain melakukan pembinaan dan fasilitasi di bidang Statistik serta penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan Statistik skala Kabupaten agar data yang disampaikan bisa dimanfaatkan dalam pembangunan daerah, selain itu juga melaksanakan koordinasi dibidang persandian agar dalam pelaksanaan bisa diukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi, melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi serta pengamanan terhadap informasi/berita sandi, maupun pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak telekomunikasi/alat persandian.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah adalah Instansi yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang dan Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah sehingga masih sangat diperlukan peningkatan baik sarana dan prasarana. Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan pelayanan Komunikasi dan Informatika berbasis IT yaitu :

a. Peluang yaitu terdiri dari:

1. Semakin maju dan berkembangnya Teknologi Informasi Komunikasi.
2. Adanya berbagai ragam media informasi.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang TIK semakin meningkat.

b. Tantangan yaitu terdiri dari:

1. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.
2. Lemahnya jaringan informasi.
3. Masih ada beberapa daerah kecamatan yang belum terjangkau layanan komunikasi.
4. Adaptasi perkembangan TIK lambat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik harus lebih baik.

1. Formulasi isu-isu penting

Dalam rangka mewujudkan Good Governance melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi public, beberapa isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah antara lain:

- a. Terwujudnya Mempawah Smart City melalui strategis pelayanan berbasis Information Communication Technology (ICT) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintah.
- b. Koordinasi, Kerjasama, pengembangan dan pemberdayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
- c. Integrasi dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- d. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Penguatan infrastruktur jaringan internet Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- f. Penguatan jalur konektitas antar unit kerja.
- g. Peningkatan implementasi E-Government Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- h. Optimalisasi pembentukan KIM di Kabupaten Mempawah.
- i. Pengembangan Pusat Data yang aman dan handal serta pembentukan portal 1 (satu) Data Kabupaten Mempawah.



- j. Koordinasi dan Kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlkan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang Informatif. Degan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang Komunikasi dan Informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju masrakat yang berpengetahuan.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan Nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Infomatika. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Rumusan arah kebijakan dalam Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan mewujudkan Pemerintah sebagai Government Public Relation (GPR) dengan strategi:

1. Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya
2. Membentuk lembaga jejaring komunikasi

3. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia

b. Kebijakan Mendukung Revolusi Mental dengan strategi

1. Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektivitas diseminasi informasi tentang revolusi mental.
2. Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental.
3. Edukasi dan advokasi kepada ormas, dan media mengenai revolusi mental

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Dinas Kominfo menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 - 2026 tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah:
 - a. Meningkatnya tata kelola Penerapan (e-Government) di Kabupaten Mempawah berbasis teknologi Informasi.
 - b. Meningkatnya Penerapan Repormasi Birokrasi.

3.3. Sararan

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang dapat di akses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat di Kabupaten Mempawah.
2. Meningkatnya tata kelola Aplikasi/ Sistem Layanan Publik yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Keamanan, kerahasiaan dan integrasi data di Pemerintahan Kabupaten Mempawah.
4. Meningkatnya Keamanan, kerahasiaan dan integrasi data di Pemerintahan Kabupaten Mempawah.
5. Meningkatnya Penerapan Repormasi Birokrasi

3.4 Program dan Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Infomatika pada tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Sterategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Infomatika Tahun 2025 – 2026 yang di rencanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya adalah guna mendukung pencapaian visi dan misi bupati terpilih Kabupaten Mempawah serta berbagai faktor lainnya.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 terdiri dari 5 program dan kegiatan Sub.Kegiatan dengan lokasi kegiatan tersebar di Kabupaten Mempawah.

Total anggaran yang di perlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp. 8.503.988.454,95 (Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen).

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada table terlampir



BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2026 terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan dengan lokasi kegiatan tersebar di Kabupaten Mempawah. Total anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp. 8.503.988.454,95- (Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen).

No	Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Rencana Pendanaan (Rupiah)	Bidang Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANA NYA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100%	1.503.406.615,0 0	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	100%	1.503.406.615,0 0	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.02.2.01.0014	RELASI MEDIA	Kab. Mempawah	JUMLAH AKTIVITAS RELASI MEDIA KEPADA MEDIA	1 LAPORAN	988.566.220,00	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.02.2.01.0015	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	Kab. Mempawah	JUMLAH KOMUNITAS INFORMASI YANG AKTIF MENDISE- MINASIKAN INFORMASI DAN TERDAFTAR DI DINAS KOMINFO	1 KOMUNITAS	6.857.305,00	Seksi Komunikasi dan Informasi



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Mempawah
Tahun 2025**

2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Kab. Mempawah	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DISELESAIKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG AN	1 PER-MOHONAN	7.233.800,00	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.02.2.01.0019	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	Kab. Mempawah	JUMLAH REKOMENDASI KOMUNIKASI TERHADAP ISU PUBLIK YANG BERKEMBANG DAN USULAN AGENDA KOMUNIKASI PRIORITAS PEMDA	1 REKOMENDASI	5.522.230,00	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mempawah	JUMLAH MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK MILIK PEMERINTAH DAERAH	1 MEDIA	485.462.060,00	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.02.2.01.0023	PENYUSUNAN KONTEN	Kab. Mempawah	JUMLAH KONTEN INFORMASI PUBLIK	3 KONTEN	3.619.000,00	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.02.2.01.24	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mempawah	JUMLAH ASN BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK YANG DIFASILITASI MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN	30 ORANG	6.146.000,00	Seksi Komunikasi dan Informasi
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Mempawah	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO	100 %	100.080.722,00	Seksi Aplikasi dan Informatika



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Mempawah
Tahun 2025**

2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	PERSENTASE JARINGAN PERANGKAT DAERH YANG TERKONEKSI ONLINE DENGAN JARINGAN PEMKAB	100%	100.080.722,00	Seksi Aplikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0015	FASILITASI PENYELENGGA-RAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Mempawah	JUMLAH LAPORAN HASIL FASILITAS PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	1 LAPORAN	44.946.522,00	Seksi Aplikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0021	PENYELENGGA-RAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Mempawah	JUMLAH APLIKASI SPBE YANG TERHUBUNG DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMDA	10 Aplikasi	49.674.070,00	Seksi Aplikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0024	PENYELENGGA-RAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kab. Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KAB/KOTA YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMDA KAB/KOTA	31 PERANGKAT DAERAH	5.460.130,00	Seksi Aplikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGA-RAA N STATISTIK SEKTORAL	Kab. Mempawah	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK	1,8 INDEKS	34.601.064,00	Seksi Statistik
2.20.02.2.01	PENYELENGGA-RAA N STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN PENYELENGGA-RAA N STATISTIK SEKTORAL	100%	34.601.064,00	Seksi Statistik



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Mempawah
Tahun 2025**

2.20.0.2.01.0007	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Mempawah	JUMLAH PEGAWAI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN DI BIDANG STATISTIK	22 ORANG	7.413.300,00	Seksi Statistik
2.20.02.2.01.0008	PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	Kab. Mempawah	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK UNTUK PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	75 %	13.430.200,00	Seksi Statistik
2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	Kab. Mempawah	PERSENTASE KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL YANG RILIS TEPAT WAKTU	75 %	4.523.664,00	Seksi Statistik
2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	Kab. Mempawah	JUMLAH KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL YANG TELAH DILENGKAPI METADATA	10 Dokumen	5.733.900,00	Seksi Statistik
2.20.02.2.01.0011	PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	Kab. Mempawah	JUMLAH STATISTIK SEKTORAL YANG SUDAH MEMINTA REKOMENDASI DARI PEMBINA DATA STATISTIK	1 Dokumen	3.500.000,00	Seksi Statistik



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Mempawah
Tahun 2025**

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Mempawah	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100%	7.122.500,00	Seksi Persandian
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PENGAMANAN INFORMASI	100%	0,00	Seksi Persandian
2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGUNAKAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI	22 Perangkat Daerah	0,00	Seksi Persandian
2.21.02.2.02	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT DAERAH	100%	7.122.500,00	Seksi Persandian
2.21.02.2.02.0001	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI	22 PERANGKAT DAERAH	7.122.500,00	Seksi Persandian
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	6.858.777.553,95	Sekretariat
2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	100%	33.999.600,00	Sekretariat



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Mempawah
Tahun 2025**

2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	5.000.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH DOKUMEN RKA –SKPD PERANGKA DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA - SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA – SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA – SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH DPA – SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.700,00	Sekretariat



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	1 Laporan	14.999.900,00	Sekretariat
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN.	100%	3.628.080.703,95	Sekretariat
2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Kab. Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	30 Orang	3.583.080.703,95	Sekretariat
2.16.01.2.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN	1 Laporan	5.000.000,00	Sekretariat



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

			KEUANGAN BULANAN/TRIW ULAN/SEMESTER -AN SKPD			
2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	100%	14.999.700,00	Sekretariat
2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2 LAPORAN	14.999.700,00	Sekretariat
2.16.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100 Orang	25.000.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Kab. Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	35 Orang	25.000.000,00	Sekretariat
2.16.01.2. 06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI UMUM	100%	39.413.930,00	Sekretariat
2.16.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERA- NGAN BANGUNAN KANTOR	Kab. Mempawah	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENE- RANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 paket	1.750.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Kab. Mempawah	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	7.697.900,00	Sekretariat
2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Kab. Mempawah	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Paket	6.020.000,00	Sekretariat



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Mempawah
Tahun 2025**

2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kab. Mempawah	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	2 Paket	4.899.930,00	Sekretariat
2.16.01.2.06.0009	PENYELENGGA-RAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1 Laporan	17.079.100,00	Sekretariat
2.16.01.2.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Kab. Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	1 Dokumen	1.967.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	104.725.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Kab. Mempawah	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DI SEDIKAN	5 Unit	16.095.200,00	Sekretariat
2.16.01.2.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab. Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	4 Unit	0,00	Sekretariat
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	2.950.000.000,00	Sekretariat



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Kab. Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIKAN	48 Laporan	2.950.000.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	62.558.620,00	Sekretariat
2.16.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab. Mempawah	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	1 Unit	7.995.120,00	Sekretariat
2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Kab. Mempawah	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	1 Unit	8.750.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/RE HABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Kab. Mempawah	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DI REHABILITASI	1 Unit	40.000.000,00	Sekretariat
2.16.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/RE HABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab. Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DI REHABILITASI	1 Unit	2.656.500,00	Sekretariat



**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Mempawah
Tahun 2025**

2.16.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN/RE HABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab. Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DI REHABILITASI	1 Unit	3.157.000,00	Sekretariat
TOTAL	8.503.988.454,95					

BAB V

P E N U T U P

4.1 PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan hasil komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah untuk berperan aktif dalam pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika. Renja ini dibuat dengan melalui Analisa permasalahan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu Renja Perubahan ini menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya sehingga kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dalam rangka optimalisasi pelayanan di bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mempawah.

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah tahun 2025 akan dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 tidak terlepas kaitanya dengan pengukuran kinerja unit-unit di lingkup Dinas Komunikasi dan



Informatika Kabupaten Mempawah yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Mempawah. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun sehingga good governance dan public service yang baik dapat diwujudkan dan dirahasiakan oleh masyarakat.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat memiliki keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunannya lainnya.

TABEL 2.1
REVIUEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MEMPAWAH

Dinas Komunifikasi Dan Informasi Kabupaten Mempawah

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80%	2.384.203.900	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80%	2.503.939.095	
	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	85%	2.503.939.095	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	85%	2.503.939.095	
	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	100 Dokumen	85.000.000	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	100 Dokumen	85.000.000	
	PENGLOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGLOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	5 Dokumen	881.439.095	PENGLOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGLOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	5 Dokumen	881.439.095	
	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1 Dokumen	100.000.000	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1 Dokumen	100.000.000	
	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	Kab Mempawah	JUMLAH LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	12 Layanan	100.000.000	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	Kab Mempawah	JUMLAH LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	12 Layanan	100.000.000	
	KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	13 Dokumen	87.500.000	KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	13 Dokumen	87.500.000	
	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK YANG MENINGKAT KAPASITASNYA	5 kali	100.000.000	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK YANG MENINGKAT KAPASITASNYA	5 kali	100.000.000	
	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KOMUNITAS DALAM MENDEMINASIKAN INFORMASI PROGRAM ATAU KEBIAKAN	12 Dokumen	1.150.000.000	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KOMUNITAS DALAM MENDEMINASIKAN INFORMASI PROGRAM ATAU KEBIAKAN	12 Dokumen	1.150.000.000	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab Mempawah	PERSENTASE APLIKASI INFORMATIKA YANG TERLAKSANA	75%	566.500.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab Mempawah	PERSENTASE APLIKASI INFORMATIKA YANG TERLAKSANA	75%	583.500.000	
	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE E-GOVERNMENT YANG DIKELOLA	75%	583.500.000	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE E-GOVERNMENT YANG DIKELOLA	75%	583.500.000	
	PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	100 Dokumen	237.000.000	PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	100 Dokumen	237.000.000	
	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Kab Mempawah	JUMLAH APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERABSI ELEKTRONIK YANG DIKEMBANGKAN	9 Unit	161.500.000	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Kab Mempawah	JUMLAH APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERABSI ELEKTRONIK YANG DIKEMBANGKAN	9 Unit	161.500.000	
	PENGEMBANGAN DAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	8 Dokumen	185.000.000	PENGEMBANGAN DAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	8 Dokumen	185.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	PERSENTASE STATISTIS SEKTORAL YANG TERSELENGGARA	80%	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	PERSENTASE STATISTIS SEKTORAL YANG TERSELENGGARA	80%	303.000.000	
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE TERSELENGGARANYA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN	80%	225.000.000	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE TERSELENGGARANYA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN	80%	303.000.000	
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS, DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	120 Buku	100.000.000	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS, DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	125 Dokumen	100.000.000	Pagu dana Bertambah
	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	Kab Mempawah	JUMLAH SDM YANG MENIGKAT KAPASITASNYA DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	30 Orang	55.000.000	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	Kab Mempawah	JUMLAH SDM YANG MENIGKAT KAPASITASNYA PENINGKATAN MUTU DALAM STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	30 Orang	55.000.000	
	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	JUMLAH METADATA STATISITIK SEKTORAL YANG DIHIMPUN	15 Dokumen	70.000.000	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	JUMLAH METADATA STATISITIK SEKTORAL YANG DIHIMPUN	15 Dokumen	100.000.000	
	PENYELENGGARAAN OTORITAS STATISITIK SEKTORAL DI DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHIMPUN	5 Dokumen	48.000.000	PENYELENGGARAAN OTORITAS STATISITIK SEKTORAL DI DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHIMPUN	5 Dokumen	48.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab Mempawah	PERSENTASE PERSANDIAN UNTUK ENGAMANAN INFORMASI YANG TERSELENGGARA	80%	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab Mempawah	PERSENTASE PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI YANG TERSELENGGARA	80%	150.000.000	
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH	80%	50.000.000	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH	80%	110.000.000	
	PELAKSANAAN KEMANANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELETRONIK DAN NON ELEKTRONIK	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	5 LAPORAN	50.000.000	PELAKSANAAN KEMANANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELETRONIK DAN NON ELEKTRONIK	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	5 LAPORAN	50.000.000	
	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI	1 PERANGKAT DAERAH	50.000.000	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI	5 PERANGKAT DAERAH	60.000.000	
	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH	80%	50.000.000	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH	80%	40.000.000	
	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI	10 PERANGKAT DAERAH	50.000.000	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI	10 PERANGKAT DAERAH	40.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	5.207.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	5.207.000.000	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	70.000.000	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	70.000.000	
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	10.000.000	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	10.000.000	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3 Laporan	20.000.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3 Laporan	20.000.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	MENINGKATNYA PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100%	2.248.542.973	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	MENINGKATNYA PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100%	2.248.542.973	
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14 bulan	2.187.392.973	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14 bulan	2.187.392.973	
	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5 Dokumen	26.150.000	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5 Dokumen	26.150.000	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1 Laporan	25.000.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1 Laporan	25.000.000	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	1 Laporan	10.000.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	1 Laporan	10.000.000	
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	100%	15.000.000	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	100%	15.000.000	
					15.000.000	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5 Laporan	15.000.000	

	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI PERANGKAT DAERAH	100%	70.000.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI PERANGKAT DAERAH	100%	70.000.000	
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	25 Paket	30.000.000	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	25 Paket	30.000.000	
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5 Orang	40.000.000	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5 Orang	40.000.000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	166.500.000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	166.500.000	
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	10.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	10.000.000	
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	15.000.000	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	15.000.000	
	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Paket	17.500.000	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Paket	17.500.000	
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	2 Paket	14.000.000	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	2 Paket	14.000.000	
	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BAHAN/MATERIAL YANG DISEDIAKAN	1 Paket	30.000.000	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BAHAN/MATERIAL YANG DISEDIAKAN	1 Paket	30.000.000	
	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1 Laporan	60.000.000	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1 Laporan	60.000.000	
	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	1 Dokumen	20.000.000	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TERSEDIAANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	500.000.000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TERSEDIAANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	500.000.000	
	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DISEDIAKAN	1 Unit	350.000.000	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DISEDIAKAN	1 Unit	350.000.000	
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DISEDIAKAN	2 Unit	80.000.000	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DISEDIAKAN	2 Unit	80.000.000	
	PENGADAAN MEBEL	Kab Mempawah	JUMLAH MPAKET MEBEL YANG DISEDIAKAN	8 Unit	20.000.000	PENGADAAN MEBEL	Kab Mempawah	JUMLAH MPAKET MEBEL YANG DISEDIAKAN	8 Unit	20.000.000	
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	2 Unit	20.000.000	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	2 Unit	20.000.000	
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	3 Unit	30.000.000	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	3 Unit	30.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	2.161.607.027	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	2.161.607.027	
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	4 Laporan	2.114.607.027	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	4 Laporan	2.114.607.027	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	3 Laporan	47.000.000	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	3 Laporan	47.000.000	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERPELIHARA	100%	135.000.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERPELIHARA	100%	135.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	1 Unit	40.000.000	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	1 Unit	40.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	3 Unit	25.000.000	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	3 Unit	25.000.000	
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	ab Mempawah	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 Unit	30.000.000	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 Unit	30.000.000	
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/REHABILITASI	9 Unit	20.000.000	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/REHABILITASI	9 Unit	20.000.000	
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	9 Unit	20.000.000	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	9 Unit	20.000.000	

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mempawah

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Taraget Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			70%	70%	70%	80%	65%		70%		
	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH			80%	80%	80%	85%	75%		80%	80%	
	JUMLAH DOKUMEN HASIL MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK			99 orang	95 orang	100 orang	100 orang	7 orang	0 orang	100 orang	100 orang	
	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK			4 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	4 jenis	0 jenis	5 jenis	5 jenis	
	JUMLAH DOKUMEN HASIL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK			1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	0 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	
	JUMLAH LAYANAN HUBUNGAN MEDIA			12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	11 Layanan	0 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	
	JUMLAH DOKUMEN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN			12 kim	10 kim	13 kim	13 kim	6 kim	0 kim	13 kim	13 kim	
	JUMLAH SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK YANG MENINGKAT KAPASITASNYA			3 kali	2 kali	5 kali	5 kali	3 kali	0 kali	5 kali	5 kali	
	JUMLAH DOKUMEN KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KOMUNITAS DALAM MENDISEMINASIKAN INFORMASI PROGRAM ATAU KEBIJAKAN			10 kali	12 kali	10 kali	10 kali	9 kali	0 kali	10 kali	10 kali	
	PERSENTASE APLIKASI INFORMATIKA YANG TERLAKSANA			65%	65%	70%	75%	65%	-	70%	80%	
	PERSENTASE E-GOVERNMENT YANG DIKELOLA			75%	65%	70%	75%	65%	-	70%	80%	
	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH			139 unit	139 unit	100 unit	100 unit	100 unit	0 unit	100 unit	142 unit	
	JUMLAH APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERABSI ELEKTRONIK YANG DIKEMBANGKAN			8 aplikasi	9 aplikasi	9 aplikasi	10 aplikasi	8 aplikasi	0 aplikasi	9 aplikasi	10 aplikasi	
	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH			7 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	0 orang	8 orang	10 orang	
	PERSENTASE STATISTIS SEKTORAL YANG TERSELENGGARA			65%	70%	75%	80%	65%	0%	75%	80%	
	PERSENTASE TERSELENGGARANYA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN			65%	70%	75%	80%	65%	0%	75%	80%	
	JUMLAH DOKUMEN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS, DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL			120 buku	120 Buku	125 buku	125 buku	120 buku	0 buku	125 buku	125 buku	
	JUMLAH SDM YANG MENIGKAT KAPASITASNYA DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI			0 orang	5 orang	5 orang	7 orang	0 orang	0 orang	30 orang	30 orang	
	JUMLAH METADATA STATSISTIK SEKTORAL YANG DIHIMPUN			12 jenis	12 Jenis	15 jenis	15 jenis	12 jenis	0 jenis	15 jenis	15 jenis	
	JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHIMPUN			0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	PERSENTASE PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI YANG TERSELENGGARA			75%	70%	75%	80%	80%	-	-	-	
	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH			75%	70%	75%	80%	80%	-	-	-	
	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK			0 LAPORAN	5 LAPORAN	5 LAPORAN	5 LAPORAN	0 LAPORAN	0 LAPORAN	5 LAPORAN	5 LAPORAN	
	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI			0 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	7 perangkat daerah	5 perangkat daerah	0 perangkat daerah	5 perangkat daerah	7 perangkat daerah	
	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH			80%	80%	80%	100%	0%	80%	80%		
	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI			0 perangkat daerah	3 perangkat daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	3 perangkat daerah	0 perangkat daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	
	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PERKANTORAN			100%	100%	10%	100%	100%	-	-	-	
	PERSENTASE TINGKAT KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	

	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALIASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALIASI KINERJA SKPD			3 Laporaan	3 Laporaan	3 Laporaan	3 Laporaan	3 Laporaan	0 laporan	3 laporan	3 laporan	
	MENINGKATNYA PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN			14 bulan	14 bulan	14 Bulan	14 bulan	13 bulan	0 bulan	14 bulan	14 bulan	
	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	
	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD			1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	
	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD			0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI PERANGKAT DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA			25 PAKET	25 PAKET	25 PAKET	25 PAKET	25 PAKET	0 PAKET	25 PAKET	25 PAKET	
	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			5 ORANG	5 ORANG	5 ORANG	5 Orang	5 ORANG	0 ORANG	5 ORANG	5 ORANG	
	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN			1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	0 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	
	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0 tahun	1 tahun	1 tahun	
	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN			2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	0 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	
	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN			2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	0 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	
	JUMLAH PAKET BAHAN/MATERIAL YANG DISEDIAKAN			1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	0 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	
	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	
	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	1 -	1 dokumen	
	PERSENTASE TERSEDIANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	JUMLAH UNIT KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DISEDIAKAN			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
	JUMLAH UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DISEDIAKAN			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	
	JUMLAH MPAKET MEDEL YANG DISEDIAKAN			8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	7 Unit	0 Unit	8 Unit	8 Unit	
	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	
	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN			3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	

	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	JUMLAH LAPORAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	JUMLAH LAPORAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN			3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	2 laporan	0 laporan	3 laporan	3 laporan	
	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERPELIHARA			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	
	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA			3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0 unit	3 unit	3 unit	
	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI			1 bangunan	1 bangunan	1 bangunan	1 bangunan	1 bangunan	0 bangunan	1 bangunan	1 bangunan	
	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/REHABILITASI			9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	0 unit	9 unit	9 unit	
	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI			9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	0 unit	9 unit	9 unit	

TABEL 2.3
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mempawah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	Kinerja (4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	PERSENTASE LAYANAN PUBLIKYANG DI SELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP IMPLEMENTASI KEHUMASAN DI KABUPATEN MEMPAWAH	100%	
	RELASI MEDIA	Kab Mempawah	JUMLAH AKTIFITAS RELASI MEDIA KEPADA MEDIA YANG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT; 1. TERVERIFIKASI DEWAN PERS, DAN 2. TERDAFTAR DI DINAS KOMINFO, DAN 3, AKTIF DALAM KEGIATAN RELASI MEDIA.	1 Laporan	
	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	Kab Mempawah	JUMLAH KOMUNITAS INFORMASI YANG AKTIF MENDISEMINASIKAN INFORMASI DAN TERDAFTAR DI DINAS KOMINFO	1 Komunitas	
	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DISELESAIKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGZAN	1 Permohonan	
	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN,OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH REKOMENDASI KOMUNIKASI TERHADAP ISU PUBLIK YANG BERKEMBANG DAN USULAN AGENDA KOMUNIKASI PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH	1 Rekomendasi	
	PEGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DIKELOLA MAUPUN PEMANFAATAN MEDIA BERBAYAR SESUAI KRITERIA/JUKNIS	1 Media	
	PENYUSUNAN KONTEN	Kab Mempawah	JUMLAH KONTEN INFORMASI PUBLIK	3 Konten	
	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH ASN BIDANG KOMUNIKASI PUBLIKYANG DI FASILITASI MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN	30 Orang	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab Mempawah	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH [OPD] YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO	100%	
	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE JARINGAN PERANGKAT DAERAH YANG TERKONEKSI ONLINE DENGAN JARINGAN PEMKAB	100%	
	FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN HASIL FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	1 Laporan	
	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH APLIKASI SPBE YANG TERHUBUNG DENGAN SITEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	10 Aplikasi	
	PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KAB/KOTA YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	31 Perangkat Daerah	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK	1,8 INDEKS	
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	
	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	JUMLAH PEGAWAI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN DI BIDANG STATISTIK	22 Orang	
	PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	Kab Mempawah	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK UNTUK PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	75 Persen	
	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	PERSENTASE KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL YANG RILIS TEPAT WAKTU	75 Persen	
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	Kab Mempawah	JUMLAH KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL YANG DILENGKAPI METADATA	10 DOKUMEN	
	PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	Kab Mempawah	JUMLAH STATISTIK SEKTORAL YANG SUDAH MEMINTA REKOMENDASI DARI PEMBINA DATA STATISTIK	1 DOKUMEN	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab Mempawah	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100%	
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PENGAMANAN INFORMASI	100%	
	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI	22 perangkat Daerah	
	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN HUBUNGAN PERSENTASE HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT DAERAH	100%	
	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI	22 PERANGKAT DAERAH	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PERLAKSANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	100%	
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1 Dokumen	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1 Dokumen	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	1 Dokumen	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALIASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1 Laporan	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PERLAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	30 ORANG/BULAN	
	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5 Dokumen	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1 Laporan	
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	1 Laporan	
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PERLAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	100%	
	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2 laporan	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PERLAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100 Orang	
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	35 Paket	
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35 Orang	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI UMUM	100%	
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	

	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	
	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Paket	
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	2 Paket	
	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1 Laporan	
	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	1 Dokumen	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	
	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	5 Unit	
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	4 Unit	
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	5 Unit	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	48 Laporan	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	1 Unit	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	2 Unit	
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 Unit	
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/REHABILITASI	1 Unit	
	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 Unit	

TABEL 2.4
RENJA PERUBAHAN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MEMPAWAH

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	2025	
				Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	1.503.406.615,00
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP IMPLEMENTASI KEHUMASAN DI KABUPATEN MEMPAWAH	100%	1.503.406.615,00
2.16.02.2.01.0014	RELASI MEDIA	Kab Mempawah	JUMLAH AKTIVITAS RELASI MEDIA KEPADA MEDIA YANG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT: 1. TERVERIFIKASI DEWAN PERS, DAN 2. TERDAFTAR DIDINAS KOMINFO, DAN 3, AKTIF DALAM KEGIATAN RELASI MEDIA	1 Laporan	988.566.220,00
2.16.02.2.01.0015	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	Kab Mempawah	JUMLAH KOMUNITAS INFORMSI YANG AKTIF MENDISEMINASIKAN INFORMASI DAN TERDAFTAR DI DINAS KOMINFO	1 Komunitas	6.857.305,00
2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DISELESAIKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN	1 Permohonan	7.233.800,00
2.16.02.2.01.0019	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH REKOMENDASI KOMUNIKASI TERHADAP ISU PUBLIK YANG BERKEMBANG DAN USULAN AGENDA KOMUNIKASI PRIORITAS PEMDA	1 Rekomendasi	5.522.230,00
2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK MILIK PEMDA YANG DIKELOLA MAUPUN PEMANFAATAN MEDIA BERBAYAR SESUAI KRITERIA/JUKNIS	1 Media	485.462.060,00
2.16.02.2.01.0023	PENYUSUNAN KONTEN	Kab Mempawah	JUMLAH KONTEN INFORMASI PUBLIK	3 Konten	3.619.000,00
2.16.02.2.01.0024	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	Kab Mempawah	JUMLAH ASN BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK YANG DIFASILITASI MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN	30 Orang	6.146.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab Mempawah	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH [OPD] YANG TERHBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO	100%	100.080.722,00
2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	PERSENTASE JARINGAN PERANGKAT DAERAH YANG TERKONEKSI ONLINE DENGAN JARINGAN PEMKAB	100%	100.080.722,00
2.16.03.2.02.0015	FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN HASIL FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	1 Laporan	44.946.522,00
2.16.03.2.02.0021	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH APLIKASI SPBE YANG TERHUBUNG DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMDA	10 Aplikasi	49.674.070,00
2.16.03.2.02.0024	PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KAB/KOTA YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	31 Perangkat Daerah	5.460.130,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK	1,8 INDEKS	34.601.064,00
2.16.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	34.601.064,00
2.16.02.2.01.0007	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	JUMLAH PEGAWAI YANG MENDAPATKAN PELATIHAN DI BIDANG STATISTIK	22 Orang	7.413.300,00
2.16.02.2.01.0008	PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	Kab Mempawah	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK UNTUK PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	75 Persen	13.430.200,00
2.16.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	Kab Mempawah	PERSENTASE KEGIATAN STATISTIK YANG RILIS TEPAT WAKTU	75 Persen	4.523.664,00
2.16.02.2.01.0010	PENEYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	Kab Mempawah	JUMLAH KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL YANG TELAH DILENGKAPI METADATA	10 Dokumen	5.733.900,00
2.16.02.2.01.0011	PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	Kab Mempawah	JUMLAH STATISTIK SEKTORAL YANG SUDAH MEMINTA REKOMENDASI DARI PEMBINA DATA STATISTIK	1 Dokumen	3.500.000,00

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab Mempawah	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100%	7.122.500,00
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PENGAMANAN INFORMASI	100%	0,00
2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI	22 Perangkat Daerah	0,00
2.21.02.2.02	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT DAERAH	100%	7.122.500,00
2.21.02.2.02.0001	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI	22 PERANGKAT DAERAH	7.122.500,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Mempawah	TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	6.858.777.553,95
2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	100%	33.999.600,00
2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	5.000.000,00
2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2.16.01.2.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2.16.01.2.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2.16.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.700,00
2.16.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1 Laporan	14.999.900,00
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PERLAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	3.628.060.703,95
2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	30 Orang/bulan	3.583.080.703,95
2.16.01.2.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00
2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1 Laporan	15.000.000,00
2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	1 Laporan	5.000.000,00
2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	100%	14.999.700,00
2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2 Laporan	14.999.700,00
2.16.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE TINGKAT PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100 Orang	25.000.000,00
2.16.01.2.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35 Orang	25.000.000,00
2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI UMUM	100%	39.413.930,00
2.16.01.206.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	1.750.000,00
2.16.01.206.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1 Paket	7.697.900,00
2.16.01.206.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Paket	6.020.000,00
2.16.01.206.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kab Mempawah	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	2 Paket	4.899.930,00

2.16.01.206.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1 Laporan	17.079.100,00
2.16.01.206.10	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Kab Mempawah	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	1 Dokumen	1.967.000,00
2.16.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	104.725.000,00
2.16.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	5 Unit	16.095.200,00
2.16.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	5 Unit	67.201.000,00
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHUHAN KEBUTUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	2.950.000.000,00
2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Kab Mempawah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	48 Laporan	2.950.000.000,00
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Mempawah	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	62.558.620,00
2.16.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	1 Unit	7.995.120,00
2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Kab Mempawah	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	2 Unit	8.750.000,00
2.16.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 Unit	40.000.000,00
2.16.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/REHABILITASI	1 Unit	2.656.500,00
2.16.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab Mempawah	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 Unit	3.157.000,00
TOTAL					8.503.988.454,95

**Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026**

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika				12.713.000.000		14.069.000.000	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Perhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	100	9.319.000.000	100	10.224.000.000	100
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	100	50.500.000	100	55.500.000	100
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	8.500.000	2	9.500.000	2
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	7.000.000	1	8.000.000	1
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	7.000.000	1	8.000.000	1
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100	100	4.253.000.000	100	4.953.000.000	100
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	4.200.000.000	14	4.900.000.000	14

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100	100	17.000.000	100	20.000.000	100
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	17.000.000	2	20.000.000	2
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	80.000.000	100	85.000.000	100
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	jumlah	35	30.000.000	35	35.000.000	35
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	35	50.000.000	35	60.000.000	35
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	100	152.500.000	100	195.500.000	100
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	20.000.000	2	25.000.000	2
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	20.000.000	2	25.000.000	2

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	7.500.000	1	8.000.000	1
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.360.000.000	100	1.420.000.000	100
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	100.000.000	4	120.000.000	4
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	100.000.000	4	120.000.000	4
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3.200.000.000	100	3.240.000.000	100
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	3.000.000.000	48	3.000.000.000	48
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	205.000.000	100	245.000.000	100
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	35.000.000	2	40.000.000	2
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	2.405.000.000	100	2.700.000.000	100
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Implementasi kehumasan di kabupaten Mempawah	100	100	2.405.000.000	100	2.700.000.000	100
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3	3	50.000.000	3	60.000.000	3
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30	30	60.000.000	30	70.000.000	30
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	12	1.700.000.000	12	1.900.000.000	12
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	545.000.000	100	610.000.000	100
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi online dengan jaringan Pemkab	100	100	545.000.000	100	610.000.000	100
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	1	185.000.000	1	190.000.000	1
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	31	31	200.000.000	31	250.000.000	31
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10	10	160.000.000	10	170.000.000	10
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	1,42	1,80	195.000.000	1,80	245.000.000	1,80
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	100	195.000.000	100	245.000.000	100
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	2	50.000.000	2	60.000.000	2

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2025		2026		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	22	22	60.000.000	22	75.000.000	22
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	22	22	75.000.000	22	90.000.000	22
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100	100	250.000.000	100	290.000.000	100
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Terhadap Pengamanan Informasi	100	100	200.000.000	100	220.000.000	100
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	22	22	200.000.000	22	220.000.000	22
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Hubungan Antar Perangkat Daerah	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	22	22	50.000.000	22	70.000.000	22



Mempawah, Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MEMPAWAH

RUDI, S.STP, MA
NIP. 19790907 199010 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

**PERUBAHAN
TAHUN 2025**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 LatarBelakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPUSSIP Tahun Lalu..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISPUSSIP..... 27

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPUSSIP..... 36

2.4 Review terhadap (Rancangan Awal) RKPD..... 42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPUSSIP

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 52

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DISPUSSIP..... 52

3.3 Program dan Kegiatan..... 53

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPUSSIP..... 65

BAB V PENUTUP..... 98

Lampiran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi *stakeholder* yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri khususnya dibidang Perpustakaan dan Kearsipan, Program/Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan 1 (satu) tahun ke depan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Mempawah, 01 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

NURMALA,SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196805221994032006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah tahun 2025, terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga diwajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang di selenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja SKPD.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah sebagai Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun rencana kerja (Renja) Perubahan SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas berupa program dan kegiatan SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mempawah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja**

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.**
- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2024

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 setelah perubahan anggaran adalah, sebesar Rp. 4.389.822.500,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), terealisasi sebesar Rp.4.078.354.584,- (Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Pencapaian 98,07 %, yang dijabarkan melalui 4 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan termasuk rutin yaitu sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023

No		Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		
A.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.514.548.059	3.417.127.843	97,23
	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.968.050	26.798.170	99,37
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4.837.050	4.742.800	98,05
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.900	2.484.035	99,37
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,499.800	1.497.020	99,81
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.499.550	3.478.260	99,39
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,499.560	1.493.285	99,58
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.132.100	13.102.770	99,78
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.947.978.328	2.860.445.164	97,03
		1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	2.903.129.278	2.815.746.884	96,99



No		Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.849.600	24.830.225	99,92
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.800	14.912.540	99,42
		4. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	4.999.650	4.955.515	99,12
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.206.900	17.650.910	96,95
		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	18.206.900	17.650.910	96,95
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	10.971.305	99,74
		1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
		2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	10.971.305	99,74
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.484.650	133.182.346	99,77
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.400	4.988.900	99,79
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.700	19.975.250	99,88
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.483.750	99,91
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.985.550	19.962.420	99,88
		5. Penyediaan Bahan/Material (untuk pengadaan bahan bangunan dan sbg)	-	-	-
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.000.000	65.776.451	99,66
		7. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	5.000.000	4.995.575	99,91
	6	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.409.000	25.974.000	91,43



No		Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		
		1. Pengadaan Mebel			
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.409.000	25.974.000	91,43
		3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.121.031	250.525.748	97,82
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.619.295	182.918.228	98,02
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.501.736	67.607.520	97,27
	8	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.380.100	91.580.200	99,13
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.852.400	22.831.800	99,91
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.518.700	31.739.400	97,60
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.849.000	9.849.000	100
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	12.420.000	12.420.000	100
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000	14.740.000	100
B	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		562.338.184	560.174.870	99,62
	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	519.187.584	517.178.335	99,61
		1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	64.941.600	64.684.415	99,60



No		Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		
		2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.756.384	80.471.105	99,65
		3. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	20.889.800	20.816.420	99,65
		4. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	7.369.600	7.324.935	99,39
		5. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.125.000	5.060.350	98,74
		6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	14.317.000	13.400.750	93,60
		7. Pengembangan Bahan Pustaka	59.693.200	59.446.375	99,59
		8. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	256.970.000	256.898.775	99,97
		9. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.125.000	9.075.210	99,45
	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	43.150.600	42.996.535	99,64
		1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat			
		2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	35.530.700	35.409.185	99,66
		3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	7.619.900	7.587.350	99,57
C		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11.072.000	10.971.388	99,09
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	11.072.000	10.971.388	99,09
		Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan	11.072.000	10.971.388	99,09



No		Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		
		didayagunakan			
C		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	131.169.400	127.199.529	96,97
		Program Pengelolaan Arsip	118.901.800	114.963.769	96,69
	1.	Pengolahan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	41.104.200	40.206.950	97,82
		1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	14.999.900	14.896.260	99,31
		2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	13.104.400	13.027.040	99,41
		3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12.999.900	12.283.650	94,49
	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	31.880.685	99,63
		1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI			
		2. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	32.000.000	31.880.685	99,63
	3	Pengolahan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	45.797.600	42.876.134	93,2
		1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Melalui JIKN	30.127.900	29.647.879	98,41
		2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan daerah Kabupaten/kota	15.669.700	13.228.255	84,42
E		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12.267.600	12.235.760	99,74
	1	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/kota	12.267.600	12.235.760	99,74
		1. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	12.267.600	12.235.760	99,74

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 5.346.825.957,- terinci dalam 5 program, 15 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan termasuk rutin, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Kabupaten Mempawah **“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing”**.

Pada dasarnya kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan mendukung misi Pertama dan Kedua Kabupaten Mempawah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, dan profesional serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut, Satuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi dalam peningkatan wawasan sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan penyelenggaraan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sistem Pelayanan berbasis Digital.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

- a. Motivasi dan disiplin kerja aparatur kurang optimal.
- b. Tingkat pemahaman Aparatur terhadap Uraian Tugas dan SOP belum optimal
- c. Luasnya Wilayah Binaan dan jumlah sumber daya manusia yang masih sedikit dalam penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Masih belum Optimal.
- d. Sarana Prasarana Berbasis Teknologi yang belum memadai guna menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas sesuai dengan perkembangan zaman.
- e. Belum tersedianya gedung Depo Arsip / Ruang Khusus Arsip dan Lemari Arsip (rollpack) yang memadai dan sesuai standar
- f. Minimnya anggaran peningkatan SDM Bidang Perpustakaan dan Kearsipan .

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026, maka strategi dan

kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas–tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparatur untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya Pelayanan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Mempawah dengan arah kebijakan menyelenggarakan pelayanan Prima yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam misi Dinas Perpustakaan dan Pembuatan Produk Hukum/ Regulasi di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Strategi Pengembangan Sistem Administrasi Berbasis Teknologi Informasi pada penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Mempawah dengan arah Kebijakan :
 - a. Penyediaan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi, pelatihan tenaga / petugas pelayanan perpustakaan digital
 - b. Penyediaan Data base bahan pustaka digital.



- c. Penyediaan Sarana dan Prasara layanan berbasis IT yang memadai
- 6. Strategi Pengembangan Kompetensi SDM perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Mempawah dengan arah Kebijakan memberikan peluang aparatur dalam meningkatkan profesionalisme kerja.



Tabel.T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s / d Tahun 2023
Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100	100	100	100	100
	KegiatanPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan			100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	100	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JumlahDokume RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1	1	100	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumenPerubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1	1	100	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	JumlahDokumen DPA– SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			2	2	100	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	JumlahDokumenperubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil			2	2	100	2	2	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			3	3	100	3	3	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan			100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn			28	28	100	26	26	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	12	100	12	12	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	100	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD			1	1	100	1	1	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang						100	100	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Daerah	milik daerah								
	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD						5	5	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapan			30	30	100	30	30	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan			6	6	100	8	8	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasilistrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JumlahPaket terpenuhinya makan dan minum rapat kantor			1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan			1	0	0	1	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD			12	12	100	12	12	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	100	1	1	100
	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah	Presentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor			100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			2					
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			5	5	100			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahUnit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			4	4	100	41	41	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			4	0	0			
	KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhiya penyediaan jasa			100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			12	12	100	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12	12	100	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlahkendaraan dinas operasional atau lapngan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			5	5	100	5	5	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			2	2	100	1	1	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	JumlahSarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara			37	37	100	18	18	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			16	16	100	16	16	100
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentasepemanfaatlayananpust aka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat			90	90	100	95	95	100
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kunjungan, kepuasan layanan dan koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dimanfaatkan			90	90	100	90	90	100
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK			2	2	100	1	1	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)								
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten / Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten / kota sesuai kewenangannya			1	1	100	1	1	100
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah tingkat kabupaten / kota yang dikembangkan			150	150	100	100	100	100
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standard nasional perpustakaan			15	15	100	10	10	100
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten / kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan			9	9	100	9	9	100
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten / kota			80	80	100	30	30	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten / kota			1600	150	100	100	100	100
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlahdata dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten / kota			20	20	100	25	25	100
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dan jenis kegiatan membaca dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat			90	90	100	95	95	100
	Sosialisasi Budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan			-	-	-	1	1	100
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlahorang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten / kota			9	9	100	9	9	100
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlahperpustakaanberbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten / kota yang dikembangkan			2	2	100	1	1	100
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Presentase Partisipasi Masyarakat yang Terlibat Dalam Pelestarian dan Perawatan Naskah Kuno di Kabupaten Mempawah			75	-	-	90	90	100
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Naskah			75-	-	-	90	90	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kuno								
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno			2	-	-	1	1	100
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan			-	-	-	50	50	100
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan			100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Dinamis aktif dan in aktif			100	100	100	100	100	100
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Didayagunakan			150	150	100	50	50	100
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			100	100	100	30	30	100
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlahlaporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota			8	8	100	2	2	100
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip yang dikelola			100	100	100	100	100	100
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan			1	1	100	1	1	100



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kepada ANRI								
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan AksesArsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis			100	100	100	50	50	100
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	PersentasePeningkatanKualitasP elayananInformasiKearsipan			100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kotaMelalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah Kabupaten / Kota melalui JIKN			31	31	100	31	31	100
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota			1	1	100	1	1	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip vital yang terselamatkan			100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya arsip vital hasil alih media			100	100	100	100	100	100
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip			1	1	100	1	1	100

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Mempawah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah, Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan Program Kerja di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Perumusan Kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas
- h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- j. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- k. Pelaksanaan Fungsi lain dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Bupati di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021 sd 2023 Dan Proyeksi 2024
Kabupaten Mempawah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	2	2	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen DPA– SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			2	2	2	2	100	100	100	100	



	Jumlah Dokumen perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD			2	2	2	2	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			3	3	3	3	100	100	100	100	
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn			28	27	28	29	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	12	12	12	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	1	1	100	100	100	100	
	JumlahLaporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD					5	5			100	100	



	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			30	30	30	32	100	100	100	100	
	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan			6	6	8	10	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD			12	12	12	12	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100	100	100	100	100	100	100	100	



	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2		2		100		100	
	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			5	5	5	5	100	100	100	100	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			4	4	4	4	100	100	100	100	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4	4	4	4	100	100	100	100	
	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12	12	12	12	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12	12	12	12	100	100	100	100	
	Persentase Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5	5	5	5	100	100	100	100	



	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara / direhabilitasi			2	2	1	2	100	100	100	100	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			37	37	18	39	100	100	100	100	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			16	16	16	17	100	100	100	100	
	Persentase pemanfaat layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat			90	90	95	100	100	100	100	100	
	Persentase Kunjungan, kepuasan layanan dan koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dimanfaatkan			90	90	95	100	100	100	100	100	
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			2	2	1	2	100	100	100	100	
	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah kabupaten / Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai Kewenangannya			1	1	1	3	100	100	100	100	
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten / Kota yang Dikembangkan			150	150	100	150	100	100	100	100	



	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			9	15	10	15	100	100	100	100	
	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina sesuai Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			9	9	9	9	100	100	100	100	
	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / kota			50	80	30	80	100	100	100	100	
	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang dicetak dan diadakan			230	1600	100	1600	100	100	100	100	
	Jumlah Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			6	20	25	30	100	100	100	100	
	Persentase jumlah dan jenis kegiatan membaca dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat			90	90	95	100	100	100	100	100	
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					1	4			100	100	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten / Kota			6	9	9	12	100	100	100	100	



	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten / Kota			2	2	1	3	100	100	100	100	
	Presentase Partisipasi Masyarakat yang Terlibat didalam Pelestarian dan Perawatan Naskah Kuno				75	90	100	100	100	100	100	
	Presentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Naskah Kuno				75	90	100	100	100	100	100	
	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Nasakah Kuno				2	1	2	100	100	100	100	
	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan					50	500	100	100	100	100	
	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mengelolaArsip Dinamis aktif dan in aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			100 31	150	50	150	100	100	100	100	
	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			100	100	30	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota			4	8	2	22	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah Arsip yang Dikelola			100	100	100	100	100	100	100	100	



	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI			1	1	1	25	100	100	100	100	
	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Perservasi dan Akses Arsip Statis			100	100	50	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten / Kota Melalui JIKN			31	31	31	31	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota			1	1	1	1	100	100	100	100	
	Persentase Arsip vital yang terselamatkan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Tersedianya arsip vital hasil alih media			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip			1	1	1	1	100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah mempunyai tugas memimpin, merumuskan, menkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan program kerja di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Perumusan Kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

-
- c. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan di publik di lingkungan Dinas
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - j. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - k. Pelaksanaan Fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, umum dan apartur, perencanaan dan keuangan
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan tatalaksanaan
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan data serta kehumasan
- e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang perencanaan (perencanaan kinerja). Monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta perencanaan keuangan, serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik

-
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas
 - i. Penyelarasan dan Kompilasi penyusunan bidang perencanaan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - j. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas
 - k. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat
 - l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas
 - n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Dinas, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas
- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas
- e. Penyiapan bahan pertanggung jawaban dan laporan keuangan
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat

-
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan
 - h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan
 - i. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan
 - l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh sekretaris

3. BIDANG PERPUSTAKAAN

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perpustakaan yang berkududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang Perpustakaan
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang perpustakaan
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pemberdayaan gemar membaca, pengolahan bahan pustaka, pelayanan perpustakaan, dan pelestarian bahan perpustakaan
- f. Pelaksanaan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
- g. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perpustakaan
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan

-
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4. BIDANG KEARSIPAN

Bidang Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kearsipan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Kearsipan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kearsipan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas, bidang kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Kearsipan
- b. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kearsipan
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan di bidang kearsipan
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pelaksanaan pengelolaan arsip
- f. Pelaksanaan perlindungan, penyelamatan dan pelestarian arsip
- g. Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip
- h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kearsipan
- i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang kearsipan
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan tugas dan fungsi di Bidang Kearsipan
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kearsipan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis

fungsional. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan koordinator dan/atau sub koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koordinator dan/atau sub Koordinator Jabatan Fungsional. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/sub koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki ketertarikan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kemampuan dalam spesifik kerja yang diemban.
2. Kurangnya minat baca masyarakat.
3. Kurangnya Pengetahuan tentang ke arsipan di SKPD di Kabupaten Mempawah.
4. Kurangnya Sarana dan Prasaran berbasis teknologi guna kelancaran pengelolaan perpustakaan dan Kearsipan.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Mempawah :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah, yang kompetitif, berkualitas dan mempunyai kemampuan serta keterampilan sesuai dengan spesifik kerja/tugas yang diemban, dalam hal ini tersedianya Tenaga Pustakawan dan Arsiparis sehingga tugas-tugas pelayanan publik yang lebih dominan dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah dapat secara nyata dikerjakan dan disajikan dengan lebih Profesional.
2. Terus dilakukan inovasi, promosi dan upaya lainnya dalam rangka menanamkan budaya baca dikalangan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas jenis layanan yang disediakan, serta pemerataan jangkauan layanan perpustakaan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah.
3. Peningkatan Pengetahuan Kearsipan dan tehnik pengelolaan serta perawatan Arsip secara benar menurut ketentuan yang berlaku untuk seluruh instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, hal ini dilakukan dengan perencanaan pembinaan secara bertahap sehingga dapat dicapai pemerataan pemahaman tentang pola kearsipan yang baik.
4. Terus diperbaikinya Sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan Kedepan yang sangat dirasakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung (Gedung Depo untuk Arsip) serta kurangnya Aparatur yang berkopententendibidangnya, dan belum optimalnya Aparatur yang ada.

2.4. Review terhadap (Rancangan Awal) RKPD

Usulan Rencana Program dan kegiatan awal yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Tahun 2024, terdiri dari 4 Program ,13 Kegiatandan 46 Sub Kegiatan Total anggaran untuk belanja berjumlah Rp. 4.389.822.500,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Penyusunan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi



pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kabupaten Mempawah, dengan arahan Bupati Mempawah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah.



Tabel.T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenMompowah

K	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Ket
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dispussip	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.538.770.205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dispussip	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.538.770.205	
	KegiatanPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	26.969.100	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	26.969.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispussip	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.837.050	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispussip	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.837.050	
	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	2.499.925	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	2.499.925	
	Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1.499.900	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Dispussip	JumlahDokumenPerubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1.499.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	2 Dokumen	3.499.825	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	2 Dokumen	3.499.825	
	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD	2 Dokumen	1.499.900	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD	2 Dokumen	1.499.900	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	13.132.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	13.132.500	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	100%	2.946.385.676	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	100%	2.946.385.676	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispussip	Jumlah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	27 orang	2.916.386.026	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispussip	Jumlah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	27 orang	2.916.386.026	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen laporan aset SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen laporan aset SKPD	12 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	14.999.875	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	14.999.875	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	4.999.775	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispussip	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	4.999.775	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	52.124.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	52.124.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispussip	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	30 Stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispussip	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	30 Stel	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispussip	Jumlah sosialisasi perundang-undangan yang diikuti	6 Kali	32.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispussip	Jumlah sosialisasi perundang-undangan yang diikuti	6 Kali	32.500.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	149.434.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispussip	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	149.434.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Dispussip	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan instalasi	1 Tahun	4.999.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Dispussip	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan instalasi	1 Tahun	4.999.000	



	Bangunan Kantor		listrik/penerangan Bangunan Kantor			Bangunan Kantor		listrik/penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispussip	Jumlah terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	26.950.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispussip	Jumlah terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	26.950.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispussip	Jumlah terpenuhinya makan dan minum rapat kantor	1 Tahun	17.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispussip	Jumlah terpenuhinya makan dan minum rapat kantor	1 Tahun	17.500.000	
	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	Dispussip	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	19.985.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispussip	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	19.985.000	
	Penyediaan Bahan/Material (untuk pengadaan bahan bangunan dan sbg)	Dispussip	Jumlah Paket Pameran Informasi Pelayanan Publik	1 Paket		Penyediaan Bahan/Material (untuk pengadaan bahan bangunan dan sbg)	Dispussip	Jumlah Paket Pameran Informasi Pelayanan Publik	1 Paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispussip	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalamsatutahun	1 Tahun	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispussip	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam satu tahun	1 Tahun	75.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispussip	Jumlah pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis	1 Tahun	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispussip	Jumlah pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis	1 Tahun	5.000.000	
	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	8.370.000	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	8.370.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Dispussip	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Dispussip	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Dispussip	Jumlah pengadaan mebel			Pengadaan Mebel	Dispussip	Jumlah pengadaan mebel			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dispussip	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dispussip	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau	Dispussip	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	4 Unit	8.370.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau	Dispussip	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	4 Unit	8.370.000	



	bangunan lainnya					bangunan lainnya					
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	100%	257.307.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	100%	257.307.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Dispussip	Jumlah terpenuhinya jasa komunkasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	175.387.937	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispussip	Jumlah terpenuhinya jasa komunkasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	175.387.937	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispussip	Jumlah Jasa Pendukung keamanan dan ketertiban kantor	2 Orang	81.919.992	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispussip	Jumlah Jasa Pendukung keamanan dan ketertiban kantor	2 Orang	81.919.992	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	84.558.250	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dispussip	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	84.558.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	1 Tahun	22.854.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	1 Tahun	22.854.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	5Unit	39.520.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	5 Unit	39.520.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	2Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	2 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	37 Unit	12.420.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	37 Unit	12.420.000	



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	16 Unit	9.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispussip	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	16 Unit	9.760.000	
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dispussip	Persentase pemanfaat layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat	90%	717.848.070	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dispussip	Persentase pemanfaat layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat	90%	717.848.070	
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Kunjungan, kepuasan layanan dan koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dimanfaatkan	90%	717.848.070	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Kunjungan, kepuasan layanan dan koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dimanfaatkan	90%	717.848.070	
	Pengembangan dan PemeliharaanLayananPerpu stakaanElektronik	Dispussip	Jumlah Buku Elektronik, jumlah buku yang dientry dan perawatan jaringan komputer	2	192.578.950	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispussip	Jumlah Buku Elektronik, jumlah buku yang dientry dan perawatan jaringan komputer	2	192.578.950	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah Unit Layanan Perpustakaan jumlah kunjungan dan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	1 Unit	129.890.520	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah Unit Layanan Perpustakaan jumlah kunjungan dan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	1 Unit	129.890.520	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah Koleksi Perpustakaan Hasil Karya Penulis Daerah	150 Buku	57.004.450	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah Koleksi Perpustakaan Hasil Karya Penulis Daerah	150 Buku	57.004.450	
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dispussip	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar yang dibina	15 Perpustakaan	4.999.750	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dispussip	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar yang dibina	15 Perpustakaan	4.999.750	



	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina	9 Perpustakaan	4.999.775	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina	9 Perpustakaan	4.999.775	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah pengelola perpustakaan Desa yang diberikan Bimbingan Teknis	80 Orang	14.694.925	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah pengelola perpustakaan Desa yang diberikan Bimbingan Teknis	80 Orang	14.694.925	
	Pengembangan Bahan Pustaka	Dispussip	Jumlah Bahan Pustaka pada perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Keliling dan Rumah Baca	230 Eks	206.100.225	Pengembangan Bahan Pustaka	Dispussip	Jumlah Bahan Pustaka pada perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Keliling dan Rumah Baca	230 Eks	206.100.225	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah dan jenis perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	20 perpustakaan Desa/ Kelurahan	5.249.850	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah dan jenis perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	20 perpustakaan Desa/ Kelurahan	5.249.850	
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase jumlah dan jenis kegiatan membaca dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	70%	53.244.225	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase jumlah dan jenis kegiatan membaca dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	70%	53.244.225	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispussip	Jumlah Masyarakat dan Pelajar yang berpartisipasi dalam meningkatkan Budaya Minat Baca	9 Kegiatan	29.999.925	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispussip	Jumlah Masyarakat dan Pelajar yang berpartisipasi dalam meningkatkan Budaya Minat Baca	2 Kegiatan	29.462.330	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispussip	Jumlah perpustakaan Desa yang sudah melaksanakan kegiatan Literasi yang berbasis Inklusi sosial	2 Perpustakaan Desa	23.244.300	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispussip	Jumlah perpustakaan Desa yang sudah melaksanakan kegiatan Literasi yang berbasis Inklusi sosial	2 Perpustakaan Desa	23.244.300	
3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dispussip	PersentasePartisipasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pelestarian Dan Perawatan Naskah Kuno Di	75%	24.138.800	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dispussip	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pelestarian Dan	75%	24.138.800	



			Kabupaten Mempawah					Perawatan Naskah Kuno Di KabupatenMempawah			
	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Dispussip	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Naskah Kuno	75 %	24.138.800	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Dispussip	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Naskah Kuno	75 %	24.138.800	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan PendaftaranNaskah Kuno	Dispussip	Jumlah Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan PendaftaranNaskah Kuno	2 Orang	24.138.800	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno	Dispussip	Jumlah Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	24.138.800	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dispussip	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan	100%	104.884.800	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dispussip	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan	100%	104.884.800	
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Dinamis aktif dan in aktif	100%	21.381.475	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Dinamis aktif dan in aktif	100%	21.323.270	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dispussip	Jumlah Arsip Dinamis di OPD	150 Berkas, 31 OPD	5.178.925	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dispussip	Jumlah Arsip Dinamis di OPD	100 Berkas, 31 OPD	5.168.680	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dispussip	Jumlah arsip yang masuk Daftar usul musnah penyusutan berkas arsip dinamis	100 Berkas	10.202.550	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dispussip	Jumlah arsip yang masuk Daftar usul musnah penyusutan berkas arsip dinamis	100 Berkas	10.163.820	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah OPD/Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan Arsip sesuai Standar	8 OPD	6.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dispussip	Jumlah OPD/Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan Arsip sesuai Standar	31 OPD	5.990.770	
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Jumlah Arsip yang dikelola	100%	30.122.175	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Jumlah Arsip yang dikelola	100%	30.003.805	
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan	Dispussip	Jumlah Salinan Otentik Naskah Yang Diserahkan ke	1 Dokumen	5.687.475	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan	Dispussip	Jumlah Salinan Otentik Naskah Yang Diserahkan	1 Dokumen	5.643.015	



	Otentik Naskah Asli ArsipTerjagaKepada ANRI		ANRI			Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI		ke ANRI			
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan AksesArsip Statis	Dispussip	JumlahDokumenArsip yang di Akuisisi	100 Berkas	24.434.700	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan AksesArsip Statis	Dispussip	Jumlah Dokumen Arsip yang di Akuisisi	100 Berkas	24.360.790	
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	100%	53.381.150	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	100%	52.568.455	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Dispussip	Jumlah OPD yang menerapkan system pengelolaan kearsipan berbasis IT	31 OPD	43.129.700	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Dispussip	Jumlah OPD yang menerapkan system pengelolaan kearsipan berbasis IT	31 OPD	42.459.125	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Dispussip	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisai Tata Kelola Arsip	7 Kelurahan	10.251.450	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Dispussip	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisai Tata Kelola Arsip	7 Kelurahan	10.109.330	
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dispussip	Persentase Arsip vital yang terselamatkan	100%	4.446.825	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dispussip	Persentase Arsip vital yang terselamatkan	100%	4.222.450	
	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase tersedianya arsip vital hasilalih media	100%	4.446.825	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dispussip	Persentase tersedianya arsip vital hasil alih media	100%	4.222.450	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dispussip	Jumlah arsip vital di OPD yang dialihmediakan dalam bentuk CD	1 CD	4.446.825	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dispussip	Jumlah arsip vital di OPD yang dialihmediakan dalam bentuk CD	1 CD	4.222.450	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

----- TIDAK ADA-----

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Sedangkan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2025-2026 terutama pembangunan jangka panjang Daerah tahap ke-1 tahun 2025 – 2026. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2025.

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu “ penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Mempawah masuk dalam misi kesatu yaitu “ **Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas Mandiri dan Terdepan** “. Untuk mendukung pencapaian misi Kabupaten Mempawah serta tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah, disusunlah strategi Yaitu Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih berdayaguna serta untuk lebih memantapkan Pelaksanaan akuntabilitas di Kabupaten Mempawah yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasara dalam pengelolaan arsip dan perpustakaan.
2. Meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan memanfaatkan regulasi bidang perpustakaan dan kearsipan dalam rangka mengoptimalkan kemampuan sumber daya aparatur.
3. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mempawah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Mempawah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJPD 2025 – 2026. Visi Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing”

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 untuk Program dan kegiatan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan :

Tujuan yang ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik
2. Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan pelayanan prima kepada public
3. Meningkatkan kualitas arsip dalam rangka penguatan birokrasi yang efektif dan efisien

b. Sasaran :

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mempawah menetapkan sasaran sebagai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan public pada Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan minat baca masyarakat
3. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Perpustakaan
4. Mewujudkan Tata Kelola Arsip secara Tertib

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten dan Kearsipan Kabupaten Mempawah, pada dasarnya kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan, Sejalan dengan Misi pertama Kabupaten Mempawah, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
4. Program Pengelolaan Arsip.
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Untuk lebih jelasnya rumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel lampiran.



TABEL T-C 33
RUMUSAN RANCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			100%	8.020.358.175	APBD		100%	8.832.858.175
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			100%	7.490.358.175	APBD		100%	8.022.858.175
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Mempawah	100%	5.150.358.175	APBD		100%	5.157.858.175
2.23.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	Kabupaten Mempawah	100%	90.000.000	APBD		100%	90.000.000
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokume RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan	Kabupaten	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Mempawah						
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kabupaten Mempawah	3 Laporan	25.000.000	APBD		3 Dokumen	25.000.000
2.23.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	Kabupaten Mempawah	100%	3.765.858.175	APBD		100%	3.773.358.175
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Kabupaten Mempawah	29 Orang	3.685.858.175	APBD		30 Orang	3.685.858.175
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	12 Dokumen	45.000.000	APBD		12 Dokumen	50.000.000
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	27.500.000
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD							
2.23.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Mempawah	100%	40.000.000	APBD		100%	40.000.000
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	5 Laporan	40.000.000	APBD		5 Laporan	40.000.000
2.23.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Mempawah	100%	62.000.000	APBD		100%	62.000.000
2.23.01.2.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Mempawah	32 Paket	27.000.000	APBD		32 Paket	27.000.000
2.23.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	Kabupaten Mempawah	10 Orang	35.000.000	APBD		10 Orang	35.000.000
2.23.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Mempawah	100%	267.500.000	APBD		100%	267.500.000
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	7.500.000	APBD		1 Paket	7.500.000
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Laporan	150.000.000
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
2.23.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kabupaten Mempawah	100%	300.000.000	APBD		100%	300.000.000
2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	2 Unit	120.000.000	APBD		2 Unit	120.000.000
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kabupaten Mempawah	5 Paket	30.000.000	APBD		10 Paket	30.000.000
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kabupaten Mempawah	4 Unit	80.000.000	APBD		5 Unit	80.000.000
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	4 Unit	70.000.000			6 Unit	70.000.000
2.23.01.2.08	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terpenuhinya penyediaan	Kabupaten Mempawah	100%	355.000.000	APBD		100%	355.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jasa							
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Kabupaten Mempawah	12 Laporan	235.000.000	APBD		12 Laporan	235.000.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Dikantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	12 Laporan	120.000.000	APBD		12 Laporan	120.000.000
2.23.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kabupaten Mempawah	100%	270.000.000	APBD		100%	270.000.000
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Mempawah	1 Unit	30.000.000	APBD		1 Unit	30.000.000
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Mempawah	5 Unit	65.000.000	APBD		5 Unit	65.000.000
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	2 Unit	100.000.000	APBD		2 Unit	100.000.000
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	39 Unit	50.000.000	APBD		39 Unit	50.000.000
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan R/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kabupaten	17 Unit	25.000.000	APBD		17 Unit	25.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Mempawah						
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemanfaat layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat	Kabupaten Mempawah	100%	2.245.000.000	APBD		100%	2.765.000.000
2.23.02.2.01	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kunjungan, kepuasan layanan dan koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dimanfaatkan	Kabupaten Mempawah	95%	1.350.000.000	APBD		100%	1.595.000.000
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kabupaten Mempawah	2 Layanan	225.000.000	APBD		2 Layanan	225.000.000
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah kabupaten / Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai Kewenangannya	Kabupaten Mempawah	3 Perpustakaan	401.894.675	APBD		1 Perpustakaan	410.894.675
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	150 Eksemplar	65.000.000	APBD		150 Eksemplar	70.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Dikembangkan							
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kabupaten Mempawah	15 Perpustakaan	60.000.000	APBD		15 Perpustakaan	80.000.000
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina sesuai Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kabupaten Mempawah	9 Perpustakaan	45.000.000	APBD		9 Perpustakaan	55.000.000
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / kota	Kabupaten Mempawah	80 Orang	60.796.461	APBD		80 Orang	80.000.000
2.23.02.2.01.09	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang dicetak dan diadakan	Kabupaten Mempawah	1600 Eksemplar	350.000.000	APBD		1700 Eksemplar	450.000.000
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	30 Dokumen	75.000.000	APBD		40 Dokumen	90.000.000
2.23.02.2.02	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah dan jenis kegiatan membaca dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Kabupaten Mempawah	100%	895.000.000	APBD		100%	1.160.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kabupaten Mempawah	4 Lokus	400.000.000	APBD		4 Lokus	650.000.000
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	12 Orang	150.000.000	APBD		12 Orang	160.000.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	3 Perpustakaan	95.000.000	APBD		3 Perpustakaan	100.000.000
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Partisipasi Masyarakat yang Terlibat didalam Pelestarian dan Perawatan Naskah Kuno	Kabupaten Mempawah	100%	95.000.000	APBD		100%	110.000.000
2.23.03.2.01	PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Naskah Kuno	Kabupaten Mempawah	100%	95.000.000	100%		100%	110.000.000
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Nasakah Kuno	Kabupaten Mempawah	2 Orang	30.000.000	2 Orang		4 Orang	35.000.000
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kabupaten Mempawah	500 Eksemplar	65.000.000	500 Eksemplar		800 Eksemplar	75.000.000
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				530.000.000				810.000.000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Penataan Arsip	Kabupaten	100%	445.000.000	100%		100%	690.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sesuai standar kearsipan	Mempawah						
2.24.02.2.01	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Dinamis aktif dan in aktif	Kabupaten Mempawah	100%	120.000.000	100%		100%	160.000.000
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kabupaten Mempawah	150 Berkas	35.000.000	150 Berkas		200 Berkas	50.000.000
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kabupaten Mempawah	100 Berkas	30.000.000	100 Berkas		200 Berkas	50.000.000
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	22 Laporan	55.000.000	22 Laporan		31 Laporan	60.000.000
2.24.02.2.02	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Arsip yang Dikelola	Kabupaten Mempawah	100%	40.000.000	APBD		100%	45.000.000
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Kabupaten Mempawah	1 Arsip	11.000.000	APBD		1 Arsip	25.000.000
2.24.02.2.02.04	Akuisisi, Pegolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Perservasi dan Akses Arsip Statis	Kabupaten Mempawah	100 Arsip	40.000.000	APBD		250 Arsip	45.000.000
2.24.02.2.03	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Kabupaten Mempawah	100%	285.000.000	APBD		100%	485.000.000
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kerasipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	Kabupaten Mempawah	31 pengguna	250.000.000	APBD		31 pengguna	450.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kearsipan Tingkat daerah kabupaten / Kota Melalui JIKN							
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan	35.000.000
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip vital yang terselamatkan	Kabupaten Mempawah	100%	85.000.000	APBD		100%	120.000.000
2.24.03.2.04	AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya arsip vital hasil alih media	Kabupaten Mempawah	100%	35.000.000	APBD		100%	50.000.000
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip	Kabupaten Mempawah	1 Arsip	35.000.000	APBD		1 Arsip	50.000.000



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Mempawah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah perlu menetapkan rencana kerja yang optimal serta pendanaan yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dan pendanaannya tertuang pada Rencana Startegis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten tahun 2025 – 2026.

Pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah tahun 2025 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							5.943.635.204	5.346.825.957	5.670.582.018	-273.053.186							0	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.943.635.204	5.346.825.957	5.670.582.018	-273.053.186							0	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.711.935.804	5.238.975.557	5.625.800.918	-86.134.886							0	
1	02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran				100 persen	100 %	4.945.950.520	3.789.733.377	3.712.768.738	-1.233.181.782							0	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			100 persen	100 persen	38.481.400	31.699.800	31.699.800	-6.781.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokume n	5.630.400	4.836.900	4.836.900	-793.500	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	5.306.100	2.499.600	2.499.600	-2.806.500	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	4.507.400	3.498.500	3.498.500	-1.008.900	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	5.672.400	3.499.700	3.499.700	-2.172.700	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	2.999.000	2.999.000	2.999.000	0	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	14.366.100	14.366.100	14.366.100	0	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	-			100 persen	100 persen	3.865.430.520	3.346.733.482	3.346.733.482	-518.697.038			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bula n	29 Orang/b ulan	3.820.254.420	3.301.731.882	3.301.731.882	-518.522.538	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokume n	25.002.000	25.002.000	25.002.000	0	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.010.300	14.999.800	14.999.800	-10.500	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.163.800	4.999.800	4.999.800	-164.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	-			100 persen	100 persen	23.409.000	17.969.000	17.969.000	-5.440.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	23.409.000	17.969.000	17.969.000	-5.440.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	-			100 persen	100 persen	42.000.000	15.000.000	15.000.000	-27.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	27.000.000	0	0	-27.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	20 Orang	15.000.000	15.000.000	12.000.000	-3.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	-			100 persen	100 persen	176.739.600	117.560.500	117.560.500	-59.179.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000	4.983.800	2.712.000	-4.788.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.514.700	19.999.700	9.943.800	-12.570.900	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000	17.600.000	7.700.000	-12.300.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	10.088.900	-9.911.100	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000	0	0	-30.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	70.000.000	50.000.000	30.000.000	-40.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150 Dokumen	150 Dokume n	6.724.900	4.977.000	0	-6.724.900	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	300.000.000	4.970.200	4.970.200	-295.029.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kab. Mempawah	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	120.000.000	0	0	-120.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000	0	0	-30.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0	4.970.200	0	0	Kab. Mempawah , Mempawah Hilir, Terusan Kab. Mempawah Mempawah Hilir, Terusan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Indeks Kepuasan Masyara kat (IKM)		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	1 Unit	80.000.000	0	0	-80.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	70.000.000	0	0	-70.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	235.000.000	174.619.295	174.619.295	-60.380.705			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	12 Laporan	235.000.000	174.619.295	193.077.356	-41.922.644	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	0	0	0	0	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	264.890.000	81.181.100	81.181.100	-183.708.900			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.000.000	22.852.400	21.733.700	-8.266.300	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	65.000.000	32.518.700	19.120.700	-45.879.300	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				2 Unit	2 Unit	125.000.000	0	0	-125.000.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				20 Unit	17 Unit	20.040.000	12.290.000	5.110.000	-14.930.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	9 Unit	24.850.000	13.520.000	4.880.000	-19.970.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Layanan Pembinaan Perpustakaan				100 persen	100 persen	751.827.584	1.393.659.480	1.862.844.480	1.111.016.896							1.745.000.000	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	-			100	100	584.035.984	1.017.077.480	1.017.077.480	433.041.496			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Mempawah		835.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	15 Perpustakaan	24.959.400	8.816.600	4.776.600	-20.182.800	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya a Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.00011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	93.119.384	74.110.080	125.700.080	32.580.696	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya a Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.00013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	9 Perpustakaan	5.125.000	5.125.000	2.985.000	-2.140.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.00016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	60 Orang	30.676.000	12.790.100	10.585.100	-20.090.900	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.00017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				40 Dokumen	67 Dokume n	19.234.800	76.764.500	72.924.500	53.689.700	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan DAK Non Fisik- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		90.000. 000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.00018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	2000 Eksempl ar	280.149.900	282.598.300	636.088.300	355.938.400	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		450.000 .000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.00019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.00020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				150 Eksemplar	150 Eksempl ar	62.520.500	333.291.300	336.721.300	274.200.800	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan DAK Non Fisik- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		70.000. 000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.00020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustaka an	2 Perpust akaan	68.251.000	223.581.600	310.761.600	242.510.600	Kab. Mempawah . Mempawah Hilir, Terusan Kab. Mempawah . Mempawah Hilir, Terusan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan DAK Non Fisik- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Nilai Sakip		225.000 .000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Gemar Membaca Masyarakat	-			100	100	167.791.600	376.582.000	376.582.000	208.790.400			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		910.000 .000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				21 Orang	21 Orang	51.058.000	0	0	-51.058.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	10.253.900	10.253.900	5.863.900	-4.390.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya a Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		100.000 .000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Perpustakaan	0	28.860.000	28.860.000	28.860.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				15 Orang	15 Orang	49.796.500	163.321.700	205.731.700	155.935.200	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan DAK Non Fisik- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Nilai Sakip		160.000 .000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				35 Lokus	35 Lokus	56.683.200	174.146.400	121.846.400	65.163.200	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			650.000 .000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase hasil pengumpulan data dan informasi koleksi naskah kuno				100 %	100 %	14.157.700	55.582.700	50.187.700	36.030.000							75.000. 000	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi naskah kuno yang terkumpul dari Masyarakat	-			100 %	100 %	14.157.700	55.582.700	55.582.700	41.425.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		75.000. 000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				3 Orang	3 Orang	0	0	0	0	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.03.2.01.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				700 Eksemplar	300 Eksemplar	14.157.700	55.582.700	50.187.700	36.030.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							231.699.400	107.850.400	44.781.100	-186.918.300							70.000.000	
4	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan				100 persen	100 %	172.924.200	86.565.400	32.416.100	-140.508.100							0	



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Dinamis aktif dan in aktif	-			100 persen	100 %	62.864.400	39.764.500	39.764.500	-23.099.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM)	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				165 Berkas	165 Berkas	25.614.700	14.146.300	0	-25.614.700	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				150 Berkas	150 Berkas	17.936.800	12.618.500	12.618.500	-5.318.300	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Laporan	25 Laporan	19.312.900	12.999.700	6.259.700	-13.053.200	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis yang Dikelola	-			100 persen	100 persen	32.000.000	13.537.900	13.537.900	-18.462.100			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				120 Arsip	120 Arsip	32.000.000	13.537.900	13.537.900	-18.462.100	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	-			100	100	78.059.800	33.263.000	33.263.000	-44.796.800			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				81 Pengguna	81 Penggu na	52.724.800	16.631.500	0	-52.724.800	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	25.335.000	16.631.500	0	-25.335.000	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
5	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip statis yang terselamatkan				100 %	100 %	58.775.200	21.285.000	12.365.000	-46.410.200							70.000. 000	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Daftar Arsip Statis dan daftar arsip yang dimusnahkan	-			100 %	100 %	34.610.000	13.318.700	13.318.700	-21.291.300			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah	70.000. 000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	100 Arsip	34.610.000	13.318.700	6.668.700	-27.941.300	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			70.000. 000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Arsip Statis Hasil Alih Media	-			100 persen	100 persen	24.165.200	7.966.300	7.966.300	-16.198.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	Kab. Mempawah	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		



Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang (12- 10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				2 Arsip	2 Arsip	24.165.200	7.966.300	5.696.300	-18.468.900	Kab. Mempawah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H						5.943.635.204	5.346.825.957	5.670.582.018	-273.053.186										



BAB V

PENUTUP

Disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Arsip.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan rencana jangka pendek yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun tersebut. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tergantung pada sikap, etos/semangat kerja dan disiplin dari seluruh staf. Hal ini harus juga didukung oleh SKPD yang terkait dan khususnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 ini pada dasarnya berfungsi sebagai standar dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan, rencana kerja perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun sehingga dapat lebih terarah, terpadu dan sistematis sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang kami ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa-masa yang akan datang.

Mempawah, 01 Agustus 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NURMALA, SH, M.Si
NIP. 196805221994032006



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2025



DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Raden Kusno No. 61 Mempawah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah disampaikan dalam rangka memenuhi peraturan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perodesatu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Mempawah, Agustus 2025.
Kep. 4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mempawah



RESTI BASRUN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP.197206011999031006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Rencana Kerja merupakan perencanaan tahunan yang menjadi dasar Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah dalam Menyusun Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pengisian Anggaran (DPA).

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan nantinya lebih diarahkan pada



optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan pangan dapat lebih optimal.
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan perikanan untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pelaksanaan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan perikanan pada tahun sebelumnya yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan ketersediaan pangan pada tahun 2025 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja-SKPD Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Kabupaten Mempawah Tahun 2025:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- b. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang -undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan sebuah kerangka acuan yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah dan menyeluruh dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi Tahun 2025.
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2025.



Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan/melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2025.
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi dalam pelaksanaan rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.
4. Menetapkan komitmen kinerja (performance agreement) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kabupaten Mempawah merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Keanekaragaman pangan di daerah menjamin keragaman pola konsumsi pangan, jika masyarakat mengerti pentingnya keragaman konsumsi untuk kesehatan. Keragaman pola konsumsi merupakan hal yang penting, karena konsumsi pangan yang cukup dari beragam jenis pangan, memberi peluang terpenuhinya energi dan protein yang diperlukan tubuh. Ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan pokok, merupakan salah satu titik rawan ketahanan pangan nasional. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa beras adalah makanan pokok. Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dengan terbatasnya teknologi pengolahan pangan lokal serta perlunya keamanan pangan lokal yang akan diolah agar tidak timbul masalah setelah dikonsumsi.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja			Kondisi Kinerja	Perangkat Daerah	Penanggungjwab data (Nama/No Hp)
			Awal RPJMD	2024		Akhir RPJMD		
				Target	Realisasi			
ASPEK PELAYANAN UMUM								
FOKUS PELAYANAN URUSAN WAJIB								
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
20,01	Persentase Tersedianya Kebutuhan untuk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah	Persen		60	55	65	DPKPP	
20,02	Persentase Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Persen		78	75	80	DPKPP	



No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah	Penanggungjawab data (Nama/No Hp)
				Target	Realisasi			
20,03	Persentase Jumlah dalam Penanganan Kerawanan Pangan	Persen		77	77	80	DPKPP	
20,04	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah	Persen		70	70	75	DPKPP	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
26,01	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian	Persen		78	78	80	DPKPP	
26,02	Persentase Ketersedianya Prasarana Pertanian	Persen		75	75	80	DPKPP	
26,03	Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persen		80	79	85	DPKPP	
26,04	Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen		64	60	68	DPKPP	
26,05	Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian	Persen		80	80	85	DPKPP	
26,06	Capaian Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persen		70	70	77	DPKPP	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
28,01	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap	Persen		80	65	84	DPKPP	
28,02	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya	Persen		70	60	75	DPKPP	
28,03	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persen		65	65	70	DPKPP	
28,04	Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan dan pemasaran hasil Perikanan	Persen		74	74	80	DPKPP	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
SEMUA URUSAN								
39	SEMUA BIDANG URUSAN							
39,14	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen		80	80	85	DPKPP	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pembangunan Pertanian, Ketahanan Pangan dan di Kabupaten Mempawah yang terdiri dari permasalahan bidang pertanian yaitu :

- a. Kepemilikan lahan yang belum dapat dioptimalkan dengan baik.
- b. Kebanyakan pelaku usaha di bidang pertanian adalah buruh tani, penyewa.
- c. Generasi Muda tidak berminat mengelola usaha di bidang pertanian.
- d. Sarana dan Prasarana yang ada ditingkat petani, baik jumlah maupun jenisnya sangat kurang.
- e. Perilaku pelaku usaha di bidang pertanian masih tidak mengikuti anjuran yang telah diberikan, walaupun hal tersebut diketahui dan dimengerti bahwa hal tersebut dapat menekan biaya produksi.
- f. Tidak tersedianya dana pada waktu diperlukan sebagaimana yang telah dijadwalkan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

Juga terdapat permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang ketahanan pangan adalah :

1. Ketersediaan pangan yang kurang stabil/kelangkaan jenis pangan tertentu pada waktu tertentu, utamanya sembilan bahan pokok.
2. Keseimbangan antara ekspor dan impor terhadap komoditi tertentu yang menyebabkan rawannya masalah harga dan ketersediaan bahan pangan.
3. Tidak stabilnya harga pangan tertentu, misalnya gula, minyak goreng, terigu, terutama kedelai.
4. Keterbatasan sistem informasi harga yang dapat diakses petani dan kelayakan harga ditingkat petani masih rendah.
5. Keterbatasan akses terhadap sumber data, sehingga keakuratan data ketahanan pangan masih harus di sempurnakan.
6. Kurangnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

7. Belum kuatnya kelembagaan pangan.
8. Penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam yang belum optimal.
9. Kurangnya informasi terhadap pemanfaatan pekarangan rumah secara optimal sebagai sumber pangan dan sumber gizi keluarga.
10. Mayoritas penduduk Indonesia utamanya Kabupaten Mempawah makanan pokoknya beras sehingga ketergantungan kepada beras sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan beras menjadi komponen utama ketahanan pangan nasional.
11. Penganekaragaman pangan yang belum optimal.
12. Terbatasnya teknologi pengolahan pangan.
13. Kesadaran individu/pelaku usaha pangan terhadap keamanan pangan masih kurang.
14. Penanganan daerah rawan pangan belum maksimal.
15. Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat tentang rawan pangan dan gizi buruk antar daerah dan waktu.
16. Kurangnya sosialisasi tentang mutu produk yang baik dan aman untuk dikonsumsi.
17. Masih rendahnya kesadaran IKM/UKM tentang pengawasan mutu yang baik dan aman sehingga daya saing produk pangan kurang diminati.

Terdapatnya juga permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang perkebunan adalah :

1. Petani dalam pemilihan tanaman yang akan ditanami lebih mengutamakan tanaman yang sedang menjadi trend pada saat itu, dan enggan menanam jenis tanaman lainnya karena dianggap lebih menguntungkan dari segi ekonomis.
2. Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi lainnya.
3. Kelembagaan perkebunan masih perlu ditingkatkan ke arah kelembagaan yang profesional, produktif dan mandiri, kurangnya sosialisasi informasi dalamantisipasi perubahan iklim global (anomali iklim) terkait dengan usaha tani perkebunan.
4. Selain itu belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak di bidang perkebunan, dan pertanaman khususnya komoditi kelapa, karet, dan pisang.
5. Belum adanya jaminan kesehatan bagi tenaga perkebunan utamanya BPJS

ketenagakerjaan.

Juga terdapat permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang penyuluhan adalah :

1. SDM Penyuluh sendiri, karena saat ini jumlah penyuluh pertanian lapangan sangat kurang dibanding jumlah kelompok tani yang harus mereka bina setiap harinya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan dalam upaya penyuluh memberikan informasi inovasi teknologi dan binaan kepada kelompok.
3. Masih kurangnya pendampingan teknis penyuluh pertanian memberikan pendampingan dalam setiap tahap kegiatan pertanian, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen dan pasca panen.
4. Belum maksimalnya dalam mengembangkan Kelompok Tani, diharapkan para Penyuluh turut mengembangkan dan memotivasi kelompok tani untuk saling berbagi informasi dan pengalaman agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Juga Dalam bidang peternakan, terdapat berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh bidang peternakan. Beberapa permasalahan utama yang mungkin perlu perhatian dari bidang peternakan antara lain:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tanda-tanda penyebarang penyakit atau virus utamanya penyakit kuku dan mulut pada ternak sapi serta virus ASF pada hewan ternak babi.
2. Banyak peternak yang kurang terlatih dalam hal pengelolaan usaha peternakan, mulai dari manajemen pemeliharaan ternak hingga pemasaran produk. bidang peternakan perlu melakukan pelatihan dan penyuluhan yang terus-menerus.
3. Praktik peternakan yang tidak memperhatikan kesejahteraan ternak, seperti pengelolaan kandang yang tidak layak atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap hewan, sering menjadi masalah. Bidang peternakan harus memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan dipatuhi.
4. Untuk meningkatkan produksi daging, susu, telur, atau produk peternakan lainnya membutuhkan peningkatan efisiensi dalam pembiakan, pemeliharaan, dan pengelolaan



ternak. Bidang peternakan dapat membantu dengan menyediakan data dan informasi terkait perkembangan terbaru dalam teknik pembiakan atau pengelolaan peternakan.

5. Masih kurangnya penjaminan produk peternakan yang aman untuk konsumsi manusia sangat penting. bidang peternakan harus memperhatikan standar keamanan pangan dan kesehatan hewan agar produk yang dihasilkan bebas dari bahan kimia berbahaya dan patogen yang dapat menular ke manusia.
6. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan pakan, penyakit hewan, dan kondisi kehidupan ternak. Peternak perlu diberikan informasi tentang adaptasi terhadap perubahan iklim, dan bidang peternakan bisa berperan dalam menyebarluaskan informasi ini.

Juga terdapat permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang perikanan adalah :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Banyak pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan, yang kesulitan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha mereka, baik untuk alat tangkap yang lebih modern, pengelolaan budidaya yang lebih baik, atau untuk pemasaran.
3. Kurangnya strategi pemasaran bagi pelaku usaha di sektor pengolahan hasil perikanan.
4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya ikan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha perikanan.
5. Nelayan dan pembudidaya kurang mendapatkan akses terhadap teknologi modern untuk meningkatkan hasil tangkapan dan produksi budidaya.

Salah satu isu strategis di Kabupaten Mempawah adalah rendahnya pendapatan petani dan nelayan yang berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dalam rangka mewujudkan program prioritas tersebut, strategi yang ditempuh adalah :

- a. Penguatan cadangan pangan masyarakat (terutama di tingkat individu dan rumah tangga)
- b. Penjaminan stabilitas harga pangan melalui peningkatan peranan lembaga ekonomi pedesaan.
- c. Pengembangan dan penguatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis bahan pangan lokal



nonberas.

- d. Pengembangan bisnis pengolahan bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah ekonomi.
- e. Peningkatan fasilitasi sertifikasi mutu produk.
- f. Peningkatan penanganan pasca panen meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Beberapa faktor yang dapat mendukung kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam mewujudkan program prioritas adalah :

- Tersedianya sumberdaya manusia/aparatur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan yang cukup dengan fasilitas yang memadai.
- Tersedianya dana APBD kabupaten yang mencukupi.
- Melakukan pendekatan terhadap pemerintah pusat maupun provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk para petani dengan cara pengajuan proposal dan melalui dana bantuan provinsi maupun dana alokasi khusus.
- Adanya kerja sama yang baik antar SKPD pemerintah Kabupaten Mempawah yang terkait dengan Ketahanan pangan dan lembaga-lembaga non pemerintah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 antara lain:

1. Kondisi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan daerah masih belum mantap perlu ditingkatkan.
2. Produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Masih rendahnya aksesibilitas petani dan nelayan terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha pertanian.
5. Berkurangnya lahan pertanian di kabupaten Mempawah adanya pembangunan pelabuhan Kijing di kecamatan Sungai Kunyit dan industri yang memanfaatkan



lahan pertanian yang ada diwilayah sekitar pelabuhan.

Untuk itu ditempuh Program yang mendukung yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
11. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
13. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14. Program Perizinan Usaha Pertanian
15. Program Penyuluhan Pertanian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.



Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 15 program yang tercantum dalam RENJA Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
11. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
13. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14. Program Perizinan Usaha Pertanian
15. Program Penyuluhan Pertanian

Pada tahun 2025 telah direncanakan program dan kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja program dan kegiatan sebesar Rp. 26.491.349.277,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2025

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan SKPD di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Salah satu arah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun (2020-2025), Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun (2020-2025) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun (2020-2025)

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun (2020-2025) adalah Pembangunan Pertanian menuju pertanian industri, dari system pertanian tradisional menuju system pertanian modern.

Undang-undang Kelautan dapat menjadi pondasi kuat yang dapat mengarahkan pembangunan nasional yang berorientasi archipelago menjadi negara maritim yang kuat, tangguh dan mandiri. Undang-undang ini nantinya juga mendukung penataan ruang wilayah kelautan dan penjagaan kedaulatan serta terwujudnya industri kelautan yang maju secara berkesinambungan. Termasuk mengembangkan pengetahuan kebaharian pada masyarakat.

Undang-undang Kelautan akan melengkapi kebijakan yang belum ada di bidang kelautan, dan meniadakan/meminimalisir kebijakan yang saling melemahkan. Keuntungan Undang-undang tentang Kelautan untuk daerah, antara lain dalam hal perhitungan DAU yang berbasiskan daratan selama ini sangat merugikan daerah kepulauan, batasan perairan pedalaman yang belum jelas sampai sekarang, dan penguatan sumber daya manusia. "Kebutuhan kelembagaan untuk Tata Kelola Laut juga diperlukan penguatan lembaga pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta penguatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Rencana zonasi merupakan instrumen penataan ruang yang menjadi dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang di perairan pesisir. Rencana zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan



perairan pesisir. Rencana zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dimana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas.

Untuk mendukung tata kelola laut, selain Undang-undang Kelautan diperlukan juga regulasi yang lain. Diantaranya, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Pesisir serta *Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)*. Rencana zonasi merupakan instrumen penataan ruang yang menjadi dasar dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang di perairan pesisir. Rencana zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir. Rencana zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dimana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah untuk rencana kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Petani dan Nelayan melalui pembangunan ekonomi dengan peningkatan sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani dan nelayan.
- c. Terwujudnya perlindungan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
- d. Terwujudnya pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi.



2. Sasaran Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
- Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah untuk rencana kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan.
 - b. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur dan Masyarakat.
 - c. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan.



3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	TARGET		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan							38.245.469.525,00	23.039.692.577,00	20.858.723.154,00						1.666.250.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.944.414.800,00	366.763.200,00	106.476.000,00						631.250.000,00		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							1.944.414.800,00	366.763.200,00	106.476.000,00						631.250.000,00		
1	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal				-	75 %	206.634.000,00	206.621.600,00	0,00						551.250.000,00		
	2	09	02	201		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-			-	75 Persen	206.634.000,00	206.621.600,00	206.621.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-	551.250.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	02	201	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	206.634.000,00	206.621.600,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan		551.250.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal				85 Persen	75 Persen	1.531.258.500,00	88.943.000,00	106.476.000,00						80.000.000,00		
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-			-	75 Persen	261.301.700,00	28.171.900,00	28.171.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				4 Laporan	4 Laporan	242.799.500,00	10.992.200,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.546.200,00	10.758.400,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																							
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																							



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	6.956.000,00	6.421.300,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penguatan Cadangan Pangan	-			285 Persentase	285 Persentase	633.730.800,00	34.941.600,00	34.941.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Ton	40 Ton	598.180.000,00	0,00	106.476.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				40 Ton	40 Ton	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	202	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																	
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				40 Ton	40 Ton	35.550.800,00	34.941.600,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-			89 Nilai	89 Nilai	636.226.000,00	25.829.500,00	25.829.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	masyarakat kab.mem pawah		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	11.469.600,00	10.829.500,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	4 Laporan	615.736.200,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	9.020.200,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani				4 Persentase	4 Persentase	179.920.300,00	45.845.400,00	0,00							0,00	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Terpetakannya Kerentanan serta ketahanan pangan di tingkat kecamatan	-			4 Persentase	4 Persentase	12.045.500,00	11.560.600,00	11.560.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan					1 Dokumen	1 Dokumen	12.045.500,00	11.560.600,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	-			4 Persentase	4 Persentase	167.874.800,00	34.284.800,00	34.284.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	masyarakat kab.mem pawah		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					4 Dokumen	4 Dokumen	158.590.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	

DPKPP Kabupaten Mempawah



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	9.284.800,00	9.284.800,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan				100 %	100 %	26.602.000,00	25.353.200,00	0,00							0,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	-			90 Dokumen	90 Dokumen	26.602.000,00	25.353.200,00	25.353.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	masyarakat kab.mem pawah		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	

30



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	14.094.600,00	13.274.500,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.507.400,00	12.078.700,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							36.301.054.725,00	22.672.929.377,00	20.752.247.154,00						1.035.000.000,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1.892.403.952,00	575.195.500,00	486.598.433,00						1.035.000.000,00		
5	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase Produksi perikanan tangkap				95 Persentase	95 Persentase	1.022.331.352,00	260.804.000,00	235.073.300,00							0,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Nelayan yang dibina	-			4 Persentase	4 Persentase	498.131.000,00	232.267.200,00	232.267.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	masyarakat kab.mem pawah		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	21.900.000,00	19.241.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	320.156.600,00	213.026.200,00	206.536.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				30 Unit	30 Unit	156.074.400,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 3	2.0 2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Jumlah Nelayan Yang ditingkatkan kapasitasnya	-			15 Persent ase	15 Persentas e	470.137.900,00	28.536.800,00	28.536.800,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 3	2.0 2	00 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	430.138.200,00	28.536.800,00	28.536.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditenjukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	39.999.700,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 3	2.0 4		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Rekomendasi Terlaksananya Tanda Daftar Kapal Perikanan	-			57 Persent ase	57 Persentas e	54.062.452,00	0,00	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 3	2.0 4	00 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																	
							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				783 Rekomendasi	783 Rekomendasi	54.062.452,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	35	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			57 Persentase	-	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	35	25	03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																	
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	35	25	03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																	
							Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PDRB Perkapita			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				96,5 Persentase	-	698.243.300,00	254.020.300,00	151.525.133,00						935.000.000,00		
	3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			100 Persentase	-	22.220.900,00	12.458.600,00	12.458.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.01	0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota				52 Rekomendasi	52 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.01	0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya				52 rekomendasi	52 rekomendasi	22.220.900,00	12.458.600,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2 5	0 4	2.0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pembinaan	-			72 Persent ase	72 Persentas e	34.035.900,00	17.663.900,00	17.663.900,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan	masyarak at kab.mem pawah		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 2	00 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelomp ok	5 Kelompok	17.979.800,00	17.663.900,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 2	00 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				20 Kelomp ok	20 Kelompok	16.056.100,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				1 Kelomp ok	1 Kelompok	0,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 2	00 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah penerbitan Tanda Daftar Pembudidaia Ikan Kecil (TDPIK)	-			100 Persentase	100 Persentase	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				75 Rekomendasi	75 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Rekomendasi	75 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Jumlah Pembudidaya Ikan yang dibina/diawasi	-			26,79 Persentase	26,79 Persentase	641.986.500,00	223.897.800,00	223.897.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-		935.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokum en	4 Dokumen	16.582.300,00	16.254.500,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 4	00 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	267.760.900,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 4	00 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokum en	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 4	00 09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	330.121.800,00	180.121.800,00	151.525.133,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Retrib usi Jasa Usah a Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapit a			750.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 4	00 10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				100 Unit	100 Unit	27.521.500,00	27.521.500,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapit a			185.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 4	2.0 4	00 12	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																	
							Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				20 Dokum en	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapit a			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
7	3	2 5	0 5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau				75 Persen	75 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2 5	0 5	2.0 1		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, waduk dan rawa	-			-	75 Persen	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapita	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 5	2.0 1	00 04	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																	
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapita			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 5	2.0 1	00 07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapita			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				38,83 kg / kapita / tahun	-	171.829.300,00	60.371.200,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Persentase Penerbitan tanda daftar pengolahan hasil perikanan	-			25 persen	25 persen 95 Persen	14.631.300,00	12.615.700,00	12.615.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapita	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				4 Dokumen	4 Dokumen	14.631.300,00	12.615.700,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapita			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar yang dibina	-			90 persen	90 persen	20.189.500,00	16.989.500,00	16.989.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapita	-		45.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20.189.500,00	16.989.500,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PDRB Perkapit a		45.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	2 5	0 6	2.0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Produk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersalurkan	-			96 Persent ase	96 Persentas e	137.008.500,00	30.766.000,00	30.766.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan	masyarak at kab.mem pawah		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 6	2.0 3	00 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Ton	2 Ton	33.916.000,00	30.766.000,00	100.000.000,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 6	2.0 3	00 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	103.092.500,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							34.408.650.773,00	22.097.733.877,00	20.265.648.721,00						0,00		
9	3	2 7	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretiatan				-	100 Persen	19.308.860.873,00	16.985.804.677,00	16.780.136.121,00							0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			100 Persentase	100 Persentase	41.500.000,00	35.675.350,00	35.675.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai Sakip	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokum en	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 1	2.0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokum en	1 Dokumen	4.500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 1	2.0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokum en	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 1	2.0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokum en	1 Dokumen	4.500.000,00	4.275.350,00	4.275.350,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 1	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	TARGET		Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	-			-	100 Persen	17.603.758.769,00	16.347.792.394,00	16.347.792.394,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	37	21	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				132 Orang/b ulan	132 Orang/bu lan	17.540.139.019,00	16.284.172.644,00	16.284.172.644,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Sisa Lebih Perhit unga n Angg aran Tahu n Sebel umny a Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Aloka si Umu m (DAU) DAU Tamb ahan Duku ngan Pend anaa n atas Kebij akan Pengg ajian Pega wai Peme rintah deng an Perja njian Kerja	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	TARGET		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.619.750,00	43.619.750,00	43.619.750,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	-			100 persen	100 persen	19.995.800,00	19.995.800,00	19.995.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	16 Laporan	19.995.800,00	19.995.800,00	19.995.800,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	-			87 Nilai	87 Nilai	121.742.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				132 Paket	132 Paket	81.742.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				132 Dokum en	132 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 1	2.0 5	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				132 Dokum en	132 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 1	2.0 5	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	-			87 Nilai	87 Nilai	563.000.900,00	199.009.300,00	199.009.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.269.800,00	9.269.800,00	5.924.200,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.739.900,00	66.739.900,00	50.360.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.493.400,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	28.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.499.600,00	27.499.600,00	20.499.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	52.500.000,00	21.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	19.998.200,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			6 Persentase	6 Persentase	510.034.900,00	33.501.200,00	33.501.200,00			-	Indeks Gini	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	18.921.300,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Indeks Gini			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	3	27	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	510.034.900,00	14.579.900,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	3	27	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	287.320.000,00	227.320.000,00	227.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	3	27	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			88 Persentase	88 Persentase	161.508.504,00	97.510.633,00	97.510.633,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	masyarakat kab.mem pawah		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	22.857.500,00	4.054.400,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				115 Unit	115 Unit	99.800.000,00	65.640.000,00	12.974.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	21.708.504,00	9.013.133,00	2.039.577,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
10	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan				98,119898,04 98 Persen Persentase Persen	98,0498,1198 Persen Persentase	1.631.079.900,00	414.539.900,00	350.841.000,00							0,00	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2 7	0 2	2.0 1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase kelompok tani yang menerima bantuan sarana pertanian	-			22 Persent ase	22 Persentas e	724.999.900,00	282.809.900,00	282.809.900,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskin an	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 2	2.0 1	00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	4 Laporan	649.999.900,00	207.809.900,00	300.000.000,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskin an			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	2 7	0 2	2.0 1	00 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	27	02	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian	-			-	85 Persen	55.146.400,00	40.256.400,00	40.256.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-	0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	27	02	203	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 Laporan	4 Laporan	55.146.400,00	40.256.400,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 2	2.0 6		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Lain	Persentase pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian	-			93 Persent ase	85 Persen	850.933.600,00	91.473.600,00	91.473.600,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 2	2.0 6	00 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	

DPKPP Kabupaten Mempawah																							
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	1 Ton	24.870.200,00	24.870.200,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				20 Ekor	20 Ekor	826.063.400,00	66.603.400,00	50.841.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
11	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				1008 Persen Persentase	-	5.496.639.500,00	1.142.978.700,00	1.768.343.300,00							0,00	

75



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			8 Persentase	-	398.663.800,00	34.635.400,00	34.635.400,00			-	Tingkat Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				-	75 Laporan	0,00	0,00	660.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																	
							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	356.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	TARGET		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				4 Dokumen	4 Dokumen	42.663.800,00	34.635.400,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	-			100 Persentase	100 Persentase	5.097.975.700,00	1.108.343.300,00	1.108.343.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.586.037.400,00	1.004.319.000,00	1.004.319.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																	
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	805.837.600,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	767.262.500,00	104.024.300,00	104.024.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	938.838.200,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
12	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan				74,23 87 88,08 0,05 Persen Persen Persentase	0,05 74,23 87 88,08 Persentase Persen Persen	167.585.800,00	112.307.400,00	0,00							0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah hewan dan ternak yang telah mendapatkan tindakan Penjaminan Kesehatan Hewan	-			0,05 Persentase	0,05 Persentase	93.696.500,00	85.424.200,00	85.424.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																	
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	51.527.500,00	51.527.500,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Usaha Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	42.169.000,00	33.896.700,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah masuk dan keluar hewan dan produk hewan yang terawasi Persentase Peningkatan kesehatan hewan dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular	-			1 Persentase	1 Persentase 85 Persen	26.883.200,00	26.883.200,00	26.883.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				4 laporan	4 laporan	26.883.200,00	26.883.200,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah unit Usaha yang didampingi dan diawasi Persentase Peningkatan kesehatan hewan dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular	-			1 Persentase	1 Persentase 85 Persen	47.006.100,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tingkat Kemiskinan	masyarakat kab.mem pawah			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	4 Laporan	27.181.900,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tingkat Kemiskinan				0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																	
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				2 Dokumen	2 Dokumen	19.824.200,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
13	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura				23,65 Persentase	23,65 Persentase	320.072.000,00	261.667.000,00	0,00							0,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Luas lahan yang dikendalikan dari serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan	-			1 Persentase	1 Persentase	320.072.000,00	261.667.000,00	261.667.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				250 Ha	250 Ha	174.999.900,00	174.999.900,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50 Ha	50 Ha	35.000.000,00	31.680.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				4 Laporan	4 Laporan	110.072.100,00	54.987.100,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1 4	3	2 7	0 6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian				-	85 Persen	757.851.700,00	719.406.700,00	0,00							0,00	
	3	2 7	0 6	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian	-			-	85 Persen	757.851.700,00	719.406.700,00	719.406.700,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 6	2.0 1	00 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana		TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				25 Dokumen	25 Dokumen	729.084.700,00	704.084.700,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																	
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				5 Laporan	5 Laporan	28.767.000,00	15.322.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																	



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumb er Dana	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	Melanjutkan pengemban gan infrastruktur dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha an, mengemban gan industri kreatif serta mengemban gan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1 5	3	2 7	0 7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Capaian Kinerja Penyuluhan Pertanian				-	77 Persen	6.726.561.000,00	2.461.029.500,00	1.366.328.300,00							0,00	
	3	2 7	0 7	2.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningatan kapasitas penyuluh dan kompetensi penyuluh	-			-	80 Persen	6.726.561.000,00	2.461.029.500,00	2.461.029.500,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	9 Unit	1.397.451.500,00	1.233.876.800,00	618.450.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	

DPKPP Kabupaten Mempawah



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumb er Dana		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	9 Unit	721.215.700,00	671.176.700,00	266.107.400,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	2 7	0 7	2.0 1	00 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				20 Unit	20 Unit	4.607.893.800,00	555.976.000,00	481.770.000,00	Kab. Memp awah, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Aloka si Umu m (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tingkat Kemiski nan			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H												38.245.469.525,00	23.039.692.577,00	20.858.723.154,00					1.666.250.000,0			



BAB IV

PENUTUP

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah merupakan SKPD yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta perlindungan lingkungan dan peningkatan gizi masyarakat. Sesuai dengan Tupoksi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah berupaya seoptimal mungkin dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2025, akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2025. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah pada Tahun 2025.

Mempawah, Juli 2025.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan
Pangan Dan Perikanan
Kabupaten Mempawah

GUSTI BASRUN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19720601 199903 1 006

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

PERUBAHAN RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja atau Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana kerja adalah dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan Renja berpedoman dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan memperhatikan aspirasi atau usulan kegiatan proposal dari masyarakat. Keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen lainnya dilihat dari tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk SKPD adalah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah 2025-2026 untuk perencanaan dengan jangka waktu lima tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab Mempawah 2025 -2026.

Untuk melaksanakan rencana Tahunan diharuskan menyusun Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah setiap tahunnya pada setiap awal Tahun anggaran, sedangkan untuk ditingkat kabupaten menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan Rencana Kerja semua SKPD (Renja SKPD) termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, artinya sebelum RKPD disusun masing- masing SKPD harus menyusun Renjanya terlebih dahulu. Pelaksanaan dari rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Tahunan (Lakit) yang

menggambarkan hasil capaian kegiatan dari Rencana Kinerja setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas artinya Rencana Kinerja (Renja) 2025 merupakan penetapan kegiatan/proyek, terutama untuk Belanja Langsung secara tahunan melalui indikator kinerja serta targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang terpilih yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah 2025 - 2026. Renja tersebut selanjutnya dihimpun dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusun rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Mempawah tahun 2025p sampai pada penyusunan RKA dan DPA.

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator : 1. Masukan (input) 2. Keluaran (output) 3. Hasil (outcome), gunanya untuk mengukur efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah 2025-2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
17. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolak ukur pelaksanaan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Mempawah .

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Tenaga kerja Tahun 2025–2026 kedalam rencana pembangunan tahunan yang disinkronkan dengan rencana pencapaian sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2026.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2025.
3. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2025, yaitu:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten

Mempawah review terhadap rancangan awal renja dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, dan rumusan rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Berisi tentang rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan Tahun 2025-2026 Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan renja Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Tahun 2025

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN LALU.

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian
renstra

Disperindagnaker kabupaten Mempawah 2025-2026 dan capaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Tenaga Kerja review terhadap rancangan awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA SKPD**

Berdasarkan tugas Pokok dan fungsinya Dinas perindustrian , perdagangan dan tenaga kerja kabupaten Mempawah menyelenggarakan tiga urusan pilihan yaitu urusan bidang perindustrian , urusan bidang perdagangan dan urusan tenaga kerja.

Rencana Kerja Dinas perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas perindustrian, perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Anggaran Dinas perindustrian, perdagangan dan Tenaga Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 setelah perubahan anggaran adalah, sebesar Rp. 7.802.178.831,- (Tujuh milyar delapan ratus dua juta serratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), terealisasi sebesar Rp.7.378.756.793,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Pencapaian 94,57 %, yang dijabarkan

melalui 12 Program , 23 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan termasuk rutin yaitu sebagai berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI
TAHUN 2023**

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	22.018.100	17.251.682
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	22.018.100	17.251.682
	2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	22.018.100	17.251.682
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	428.132.100	424.220.629
	Keg.Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	428.132.100	424.220.629
	2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.132.100	424.220.629
2	PROGRAM PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	74.352.812	72.000.862
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	28.366.904	28.223.746
	2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	28.366.904	28.223.746
	Keg. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.580.000	21.724.835
	2.04.01 Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	22.580.000	21.724.835
	Keg.Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.549.100	8.673.559
	2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.549.100	8.673.559

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	216.218.400	201.975.778
	Keg.Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.390.000	14.359.346
	2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.390.000	14.359.346
	Keg.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	382.378.425	337.898.200
	2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.510.000	20.809.400
	2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.040.000	16.113.396
	2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	23.440.000	23.437.234
	2.02.05 Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	139.838.400	127.256.402
4	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	24.910.200	24.909.900
	Keg. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	42.117.100	42.077.233
	2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.903.500	28.525.099
	2.02.01 Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	14.213.600	13.552.134

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	461.491.080	457.525.600
	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	461.491.080	457.525.600
	2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	315.054.080	313.801.239
	2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	131.117.000	129.388.320
	2.02.01 Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	15.320.000	14.336.041
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.514.317.276	1.482.737.000
	Kegiatan Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota	10.723.100	10.721.642
	2.01.01 Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	10.723.100	10.721.642
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	790.651.404	776.454.401
	2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	29.949.904	29.688.201
	2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	760.701.500	746.766.200
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	118.509.558	111.807.560
	Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	118.509.558	111.807.560
	2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	101.724.558	96.798.495
	2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	16.785.000	15.009.065

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	5.333.845.685	4.966.259.651
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.998.800	29.361.225
	2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.800	4.735.800
	2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.480.400	3.351.200
	2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.612.200	2.606.826
	2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.113.300	2.049.000
	2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.793.400	1.788.999
	2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.700	14.829.400
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.563.067.015	4.246.653.013
	2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.514.647.515	4.198.308.352
	2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	28.419.700	28.397.337
	2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	14.954.043
	2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4.999.800	4.993.281
	Keg. Administrasi Barang milik Daerah pada SKPD	21.400.000	21.346.496
	2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.400.000	21.346.496
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.040.000	29.104.000
	2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.040.000	29.104.000
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.067.125	163.885.642
	2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.755.900	4.686.838

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)
	2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.699.200	34.865.177
	2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.800.000	13.799.053
	2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000	30.977.356
	2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.821.352	77.559.218
	2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.999.700	1.998.000
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.153.000	97.288.000
	2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.835.800	10.835.800
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.041.865	383.884.345
	2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.970.125	188.061.148
	2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.071.740	195.823.197
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.386.080	81.189.130
	2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.744.510	24.186.410
	2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.070.670	33.750.820
	2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	5.313.000	4.994.000
	2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.280.000	8.280.000

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)
	2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.977.900	9.977.900
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	275.846.300	272.421.866
	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	275.846.300	272.421.866
	2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	66.491.900	66.470.086
	2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	209.354.400	205.951.780
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	19.970.000	19.575.883
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.970.000	19.575.883
	2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	19.970.000	19.575.883
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	20.160.000	19.842.727
	Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	20.160.000	19.842.727
	2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	20.160.000	19.842.727

Dinas Perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja kabupaten Mempawah pada rencana kerja (renja) tahun 2025 terdapat 4 sasaran strategis yang dibahas yaitu

Perindustrian , Perdagangan dan Tenaga Kerja. Berikut ini Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan capaian renstra SKPD s.d tahun 2023:

Penjelasan tabel I adalah sebagai berikut :

1. Untuk tahun 2023 sesuai dengan laporan kinerja tahun 2023 tidak terdapat program /kegiatan yang tidak mencapai target yang ditentukan yaitu
2. Program/kegiatan tahun 2023 yang mencapai target adalah :
 1. Program perencanaan tenaga kerja
 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 4. Program Hubungan Industrial
 5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 12. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota
3. Program/kegiatan tahun 2023 yang melebihi target
Untuk tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang ditentukan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah
 - a. Meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan para IKM yang ada
 - b. Menciptakan embrio baru terhadap industri serta mendorong inovasi dan kreasi yang dibutuhkan pasar industri
 - c. Meningkatkan kemampuan pelaku IKM terhadap penggunaan, penerapan teknologi serta alih teknologi dalam proses produksi yang dapat menunjang peningkatan mutu produk yang dihasilkan
 - d. Bantuan berupa peralatan industri, dengan harapan ke depan mereka akan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksinya
 - e. Tersedianya sarana berupa bangunan pasar yang layak dan baik

- f. Terjaminnya perlindungan konsumen dengan terujinya kebenaran hasil pengukuran, takaran dan timbangan
 - g. Penyerapan tenaga kerja, berkurangnya perselisihan antara pekerja dan perusahaan
- 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - a. Optimalisasi pelayanan bursa kerja
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pembina sektor / pencipta lapangan kerja.
 - c. Mewajibkan penerima kerja melaporkan secara online atau manual terhadap pencari kerja yang sudah terdaftar/bekerja di perusahaan yang bersangkutan

Tabel T-C 29
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023
 Kabupaten Mempawah

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2.07	02			Program perencanaan tenaga kerja	Persentase tersusunnya rencana tenaga kerja makro dan mikro	0	0	15		0			100
2.07	02	2.01		Kegiatan Penyusunan rencana Tenaga Kerja	Persentase tersusunnya rencana tenaga kerja di kab Mempawah	0	0	15		-			100
2.07	02	2.01	02	Sub kegiatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga	0	0	1		-			100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kerja Makro (Dokumen)								
2.07	03			Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang 3mendapatkan sertifikasi kompetensi	80	100	100					100
2.07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kerja	Persentase pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80	16	100					100
2.07	03	2.01	01	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80	16	100					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	40	85	45					100
2.07	04	2.03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase jumlah pengguna informasi pasar kerja	40	85	35					100
2.07	04	2.03	02	Sub kegiatan Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari kerja yang dilayani online	525	1441	340					100
2.07	04	2.04		Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten.	Prosentase CPMI/PMI yang terlindungi	15	40	20					100
2.07	04	2.04	01	Sub keg peningkatan erlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/ pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan di tingkatkan kompetensinya	20	60	20					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07	04	2.04	02	Sub Kegiatan Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI	15	7	20					100
2.07	04	2.05		Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam (1) satu daerah Kabupaten	Presentase Dokumen Perpanjangan IMTA yang tervalidasi lokasi kerja dalam Kabupaten	45	90	75					100
2.07	04	2.05	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi/ sinkronisasi tenaga kerja asing ditempatkan	45	90	50					100
				Program Hubungan Industrial	Persentase menurunnya kasus Perselisihan Hubungan Industrial	15		17					100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
							Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota	Presentase jumlah peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang di sahkan	35		15				100
				Sub Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan	1	4	10				100
				Sub kegiatan pendaftaran perjanjian kerja sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun perjanjian Kerjasama							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit dan Pekerja yang	40	51	1				100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan								
				Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten/kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan	80		80					100
				Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40	23	3					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub kegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten Mempawah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20	15	18					100
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12	0	15					100
				Sub Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan Pengembangan pelaksanaan Jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2	1	3					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.30				Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan									
3.30	02			Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha memperoleh izin usaha disektor perdagangan	100	58	100					100
3.30	02	2.01		Kegiatan Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha took swalayan	Persentase pelaku usaha memperoleh izin usaha disektor perdagangan	100	58	100					100
3.30	02	2.01	01	Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	60	59	100					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
3.30	02	2.02		Kegiatan Penerbitan Tanda daftar Gudang	Persentase izin tanda daftar Gudang yang ditertibkan	0	0						
3.30	02	2.02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi penerbitan tanda daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	0	0						
3.30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaksanaan Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	50	50	50					100
3.30	03	2.01		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/revitalisasi	2	2	2					100
3.30	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/revitalisasi	2	0	2					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.30	03	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terfasilitasi pengelolaannya	1	2	1					100
3.30	03	2.02		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		-	-	-					-
3.30	03	2.02	01	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		-	-	-					-
3.30	04			Program Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	66	80	75					100
3.30	04	2.01		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah barang kebutuhan pokok dan	30	25	27					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	barang penting yang tersedia di tingkat daerah kabupaten								
3.30	04	2.01	01	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	0	0						100
3.30	04	2.02		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang di pantau	0	0	7					100
3.30	04	2.02	02	Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	Jumlah harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	25	12	30					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									
3.30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan distribusi barang kebutuhan pokok	9	4	9					100
3.30	06	2.01		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase kepastian akan mutu, jumlah dan keamanan barang yang diperdagangkan	20	20	20					100
3.30	06	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan/Penyuluhan yang dilakukan	1400	1400	1400					100
3.30	06	2.01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilakukan tera/ditera ulang (Jumlah UTTP	1304	1304	1500					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					yang memenuhi kelayakan)								
3.30	06	2.01	02	Sub kegiatan pengawasan/ penyuluhan metrology legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/penyuluhan metrologi legal yang dilaksanakan	3	3	15					100
3.30	06	2.01	03	Sub kegiatan penyidikan metrology legal	Jumlah kasus penegakan hukum di metrologi legal yang terselesaikan	3	1	3					100
3.30	07			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase produk olahan makanan daerah yang dikenal	0	0	20					100
3.30	07	2.01		Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan	Persentase pelaksanaan peningkatan citra produk dan penggunaan produk daerah	0	0	1400					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.30	07	2.01	01	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat kab/kota	Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat kab/kota	0	0						
3.31				Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian									
3.31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	90	95	90					100
3.31	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100	95	100					100
3.31	01	2.01	01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	1	1					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	01	2.01	02	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1	1	1					100
3.31	01	2.01	03	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1	1	1					100
3.31	01	2.01	04	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	1	1	1					100
3.31	01	2.01	05	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD	1	1	1					100
3.31	01	2.01	06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	1					100
3.31	01	2.02		Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terpenuhinya	95	94	100					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					kebutuhan administrasi keuangan								
3.31	01	2.02	01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100	94	100					100
3.31	01	2.02	03	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	2					100
3.31	01	2.02	05	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1					100
3.31	01	2.02	07	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	1	1	1					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	80						100
3.31	01	2.03	06	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada daerah	1	1						100
3.31	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perangkat daerah	90	90	95					100
3.31	01	2.05	02	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	52	51	52					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	01	2.05	10	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi perundang-undangan yang ikuti	5	44	8					100
3.31	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	90	90	90					100
3.31	01	2.06	01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	80	80	90					100
3.31	01	2.06	02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor	85	85	90					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	01	2.06	04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya makan dan minum rapat kantor	90	90	90					100
3.31	01	2.06	05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	90	90	90					100
3.31	01	2.06	07	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pameran yang diadakan	1	1	1					100
3.31	01	2.06	09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam satu tahun	7	7	7					100
3.31	01	2.06	10	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pelaksanaan	70	70	75					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					penatausahaan arsip dinamis								
3.31	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	95	95	95					100
3.31	01	2.08	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	100					100
3.31	01	2.08	04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan keamanan kantor	10	10	10					100
3.31	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	90	90	95					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	1	1	1					100
3.31	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinana kendaraan dinas operasional atau lapangan	90	90	95					100
3.31	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dipelihara	1	1	2					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6	1	6					100
3.31	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharannya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5	1	5					100
3.31	02			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase bertambahnya kemampuan dan wawasan teknologi industri kecil dan menengah	15%	16,01	24%					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	02	2.01		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mempunyai daya saing pasar	75	35	87					100
3.31	02	2.01	03	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi yang dilaksanakan	3	2	3					100
3.31	02	2.01	05	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	3	1	3					100
3.31	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Terselenggaranya Pengendalian Izin	1,2	0,5	10					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Usaha Industri Kabupaten								
3.31	03	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM pangan yang telah memenuhi pengamanan sistem produksi	6	3	10					100
3.31	03	2.01	02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM pangan yang telah mendapat sertifikat pengujian mutu	6	3	10					100

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Restra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
								Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0,6	1,4	100					100
3.31	04	2.01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan data Informasi pada Profil Industri	1,6	1,5	1,7					100
3.31	04	2.01	02	Sub kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen informasi industri	1	1	1					100

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil penyusunan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam rencana kinerja disajikan strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Ada 4 (Empat) indikator kinerja utama yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yaitu :

1. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB
2. Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB
3. Persentase penyerapan tenaga kerja
4. Persentase ketersediaan tenaga kerja bersertifikat kompetensi

A. Bidang Industri

Kinerja bidang industri yaitu dengan melakukan pelatihan dan pembinaan pada industri kecil menengah guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Selain itu melaksanakan pengujian mutu produk IKM untuk memberikan kepastian kehalalan, kualitas dan memberikan bantuan-bantuan peralatan untuk kegiatan industri kecil menengah yang ada di kabupaten Mempawah. Selanjutnya mempromosikan produk-produk industri unggulan diajang pameran-pameran lokal maupun nasional.

B. Bidang Perdagangan

Kinerja Bidang Perdagangan tahun 2023 yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal, kadaluarsa serta produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) guna melindungi konsumen/kepentingan umum.
2. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang
3. Melaksanakan kegiatan pasar murah di 9 kecamatan kabupaten mempawah yang menjual bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang hari raya keagamaan maupun pada saat melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok dipasar.

4. Melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dalam menghadapi Inflasi akibat kenaikan BBM yang dilaksanakan di 9 kecamatan Kabupaten Mempawah
5. Penataan Halaman pasar sebukit rama Mempawah dan Pembangunan pasar Usaha Bersama Sungai Pinyuh
6. Pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan guna senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan komoditas dagangan.

C. Bidang Tenaga Kerja

Kinerja Bidang Tenaga Kerja tahun 2023 yaitu :

1. Pada tahun 2023 , terlaksananya kegiatan pelatihan membuat yang diikuti oleh 10 peserta dan dibimbing oleh 3 orang instruktur yang berkompeten dibidangnya
2. Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja dan meningkatkan informasi bursa tenaga kerja bagi pemberi kerja kaitanya dengan lowongan yang dibutuhkan di perusahaan. Proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan bagi pencari kerja dalam pembuatan AK.1
 - b. melakukan pendataan perusahaan yang ada di Kabupaten Mempawah kaitan dengan lowongan pekerjaan. Pendataan/ pendaftaran lowongan kerja ke perusahaan (wajib lapor lowongan pekerjaan oleh perusahaan)
 - c. Penyebaran informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja
 - d. menginformasikan lowongan pekerjaan sesuai kebutuhan pemberi kerja.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan calon pencari kerja terhadap peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku.
4. Pengendalian penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan Kabupaten Mempawah

5. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pihak pengusaha dan pihak pekerja
6. Memberikan informasi sekaligus pemahaman kepada pengusaha dan pekerja mengenai peraturan ketenagakerjaan agar dapat dimplementasikan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Melakukan update data perusahaan di Kabupaten Mempawah
8. Mengembalikan anak usia sekolah ke dunia pendidikan dengan cara memberikan bimbingan oleh pembimbing anak dibantu oleh tutor dan narasumber dari instansi terkait kepada anak-anak putus sekolah dalam sebuah shelter yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
9. memfasilitasi penetapan Upah minimum Kabupaten Mempawah sekaligus mensosialisasi upah minimum Kabupaten mempawah kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mempawah
10. Melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan diantaranya pembuatan PP, PKB, Jaminan Sosial, Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Mempawah

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Restra				Realisasi Capaian			Proyek	Catatan analisa
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB			15,90%	15,92%	15,94%	15,96%	15,57%	15,57%	15,94%	15,96%	
2	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB			16,60%	16,60%	16,65%	16,75%	14,98%	14,98%	16,65%	16,75%	
3	Persentase kontribusi pendapatan retribusi disektor perdagangan			68%	70%	0	0	74,51%	74,51%	0	0	
4	Persentase penyerapan tenaga kerja			5%	7%	10%	11%	20,06%	20,06%	10%	11%	
5	Persentase pengaduan perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan			90%	90%	0	0	94,4%	94,4%	0	0	
6	Persentase ketersediaan tenaga kerja bersertifikat kompetensi			0	0	2%	2%	0	0	5,45%	6%	

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELEGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat beberapa terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Kurangnya pembinaan, pengawasan dan kualitas SDM pelaku usaha meliputi manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran
2. Anggaran yang disediakan melalui APBD Kabupaten Mempawah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang memadai.
3. Jumlah pegawai dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari segi kualitas kiranya masih perlu untuk ditingkatkan.
4. Kurangnya kesempatan kerja dan penambahan angkatan kerja
5. Belum adanya tenaga fungsional penyuluh industri , sehingga upaya pembinaan terhadap pelaku IKM belum berjalan secara optimal.
5. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai.
6. Peningkatan pembinaan terhadap industri kecil, menengah dan besar

Permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Mempawah dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Mempawah. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh SKPD-SKPD sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja khususnya bidang perindustrian dan perdagangan yaitu :

I. Urusan Perindustrian

1. Kualitas Sumber Daya manusia pelaku usaha industri masih perlu ditingkatkan.
2. Kualitas dan kuantitas bahan baku masih belum memadai
3. Kualitas dan kuantitas produk yang masih belum memadai
4. Lemahnya jaringan pemasaran produk IKM
5. Kemasan / packaging yang masih belum memadai
6. Adanya persaingan global yang menuntut kesiapan seluruh stakeholder untuk menghadapinya
7. Terbatasnya penggunaan teknologi industri bagi IKM

II. Urusan perdagangan

1. Lemahnya tatakelola pasar rakyat milik Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan tera dan tera ulang belum maksimal
3. Lemahnya kerjasama perdagangan
4. Persaingan global yang menuntut inovasi pelaku usaha
5. Lemahnya jaminan mutu barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha
6. Berkembangnya pasar modern yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pasar rakyat
7. Terbatasnya daya saing pelaku usaha menengah dan kecil dalam kegiatan perdagangan

III. Urusan Tenaga Kerja

1. Terbatasnya kesempatan kerja
2. Bertambahnya angkatan kerja
3. Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ada
4. Terbatasnya sarana, prasarana dan Instruktur LLK UKM dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja berbasis kompetensi
5. Rendahnya tingkat upah tenaga kerja
6. Jaminan sosial (Jamsostek) yang belum merata
7. Berkembangnya teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia
8. Meningkatnya kasus Hubungan Industrial
9. Walaupun urusan wajib namun belum menjadi prioritas
10. Tidak semua penerima kerja memberikan laporan pencari kerja yang diterima ditempatnya/perusahaan

Peluang-peluang (opportunities) pengembangan pelayanan dilingkungan Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kabupaten Mempawah, antara lain:

I. Urusan perindustrian

1. Adanya dukungan regulasi Pemerintah untuk pengembangan industri di daerah
2. Tersedianya Terminal Kijing sebagai pintu ekspor/pemasaran hasil industri

3. Tersedianya pelaku usaha industri mikro, kecil ,menengah dan besar
4. Meningkatnya minat investasi dibidang Industri
5. Meningkatnya permintaan komoditi hasil industri

II. Urusan Pedagangan

1. Tersedianya regulasi Pemerintah yang mendukung perkembangan sektor perdagangan.
2. Tersedianya Terminal Kijing sebagai pintu perdagangan Nasional dan Internasional
3. Iklim usaha yang relatif kondusif
4. Masih terbukanya peluang usaha dan pengembangan usaha skala kecil dan menengah
5. Perlunya perlindungan konsumen pengguna barang dan jasa
6. Distribusi barang dari pusat perdagangan cukup lancar

III. Urusan Tenaga Kerja

1. Tersedianya tenaga kerja
2. Bertambahnya perusahaan dan pembangunan industri besar
3. Tersedianya Terminal Kijing sebagai daya dorong berkembangnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
4. Tersedianya tempat pelatihan LLK Ukm bagi penyiapan keterampilan pencari kerja.

Upaya khusus Sektor Industri ialah mengembangkan industri yang efisien dengan wawasan ke masa depan sesuai dengan potensi daerah, dengan kualitas produk yang semakin baik, sehingga dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor,dengan nilai tambah yang semakin tinggi sehingga berdampak luas bagi perekonomian daerah.Kualitas produksi lokal daerah yang baik akan menimbulkan rasa cinta masyarakat konsumen kepada produk lokal daerahnya, sehingga berdampak terhadap perluasan pasar yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan efisiensi industri lokal daerah.

Untuk mengurangi kesenjangan kemampuan antar pelaku ekonomi sektor industri, dilakukan kegiatan untuk meningkatkan peranan industri kecil melalui peningkatan kemampuan mengelola usaha dan wawasan kewiraswasta. Upaya khusus Sektor Perdagangan ialah mengembangkan perdagangan lokal daerah untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa melalui pemantapan pengadaan dan penyaluran guna membentuk harga yang wajar, memperluas pasar hasil-hasil produksi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan produsen.

Melindungi kepentingan konsumen serta mendorong dan membantu pedagang kecil melalui penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan kemampuan berusaha, pelaksanaan kemitraan usaha dan pelayanan informasi perdagangan.

Dari sektor tenaga kerja dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan calon dan tenaga kerja agar mampu bersaing dan handal dalam memasuki dunia usaha/dunia kerja. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga- tenaga kerja dikabupaten Mempawah.

II.4 Review terhadap (Rancangan Awal) RKPD

Usulan Rencana Program dan kegiatan awal yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra disperindagnaker untuk Tahun 2023, terdiri dari 12 Program , 23 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan Total anggaran untuk belanja operasi dan modal berjumlah Rp.7.378.756.793,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Anggaran Dinas perindustrian, perdagangan dan Tenaga Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 setelah perubahan anggaran adalah, sebesar Rp. 7.802.178.831,- (Tujuh milyar delapan ratus dua juta serratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah),

Penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Perindag dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perindagnaker Kabupaten Mempawah.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas perindagnaker Kabupaten Mempawah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DinasKabupaten Mempawah, dengan arahan Bupati Mempawah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.

Tabel.T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag naker	Persentasebertambahnya kemampuan dan wawasan teknologi industri kecil dan menengah	24%	865.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag naker	Persentasebertambahnya kemampuan dan wawasan teknologi industri kecil dan menengah	13%	109.455.000	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Disperindag naker	Persentase jumlah IKM yang mempunyai kemampuan dan wawasan teknologi industri	90%	865.000.000	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Disperindag naker	Persentase jumlah IKM yang mempunyai kemampuan dan wawasan teknologi industri	70%	91.171.900	
	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Koordinasi inkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 dokumen	40.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Koordinasi inkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	0	0	
	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industr	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	3 dokumen	245.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rencana	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	3 Dokumen	35.885.000	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			Pembangunan Sumber Daya Industri			pembangunan sumber daya industr		Pembangunan Sumber Daya Industri			
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	230.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	0	
	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	66.491.900	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperindag naker	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	40.000.000	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperindag naker	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	18.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota	Disperindag naker	Persentase Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	40.000.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota	Disperindag naker	Persentase Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	18.150.000	
	Sub kegiatan Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2	40.000.000	Sub kegiatan Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	18.150.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN	Disperindag naker	Persentase Terselenggaranya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	10%	50.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN	Disperindag naker	Persentase Terselenggaranya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	1%	66.491.900	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/kota	Disperindag naker	Persentase Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kewenangan Kab/Kota	6%	50.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/kota	Disperindag naker	Persentase Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kewenangan Kab/Kota	6%	5.100.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/kota	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Perizinan diBidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/kota	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Perizinan diBidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.100.000	
	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Disperindag naker	Persentase pelaku usaha memperoleh izin usaha disektor perdagangan	100%	190.000.000	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Disperindag naker	Persentase pelaku usaha memperoleh izin usaha disektor perdagangan	50%	9.770.200	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Disperindag naker	Persentase penerbitan izin usaha perdagangan	100%	135.000.000	Kegiatan Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Disperindag naker	Persentase penerbitan izin usaha perdagangan	50%	9.770.200	
	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Disperindag naker	Jumlah Rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 Dokumen	135.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Disperindag naker	Jumlah Rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 Dokumen	9.770.200	
	Kegiatan Penerbitan tanda daftar gudang	Disperindag naker	Persentase Izin Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	50%	35.000.000	Kegiatan Penerbitan tanda daftar gudang	Disperindag naker	Persentase Izin Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	50%	14.213.600	
	Sub Kegiatan Fasilitas penerbitan tanda daftar gudang	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	35.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas penerbitan tanda daftar gudang	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	14.213.600	
	Kegiatan Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B	Disperindag naker	Persentase penerbitan izin usaha minuman	50%	20.000.000	Kegiatan Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol	Disperindag naker	Persentase penerbitan izin usaha minuman	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat		beralkohol gol B dan C			golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat		beralkohol gol B dan C			
	Sub Kegiatan Fasilitas penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	Disperindag naker	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	3 Pelaku Usaha	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	Disperindag naker	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	0	0	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperindag naker	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	75%	960.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperindag naker	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	50%	10.723.100	
	Kegiatan Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota	Disperindag naker	persentase koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan	40%	85.000.000	Kegiatan Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disperindag naker	persentase koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang	40%	10.723.100	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			pokok dan barang penting			di tingkat daerah kab/kota		kebutuhan pokok dan barang penting			
	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Disperindag naker	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25 laporan	30.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Disperindag naker	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25 Laporan	10.723.100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barangkebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Disperindag naker	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barangkebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Disperindag naker	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	0	
	Sub Kegiatan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
	Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan Pemantauan harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang	60%	800.000.000	Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan Pemantauan harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang	75%	260.621.568	
	Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kab/kota	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kab/kota	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	70.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	25.099.904	
	Sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	700.000.000	Sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota	Disperindag naker	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan	235.521.664	
	Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kab/kota	Disperindag naker	Persentase kelengkapan dokumen perizinan dan pengawasan pupuk dan pestisida	30%	75.000.000	Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kab/kota	Disperindag naker	Persentase kelengkapan dokumen perizinan dan pengawasan pupuk dan pestisida	0	0	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan	Disperindag naker	Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen	15 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeriksaan kelengkapan	Disperindag naker	Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	kelengkapan legalitas dokumen perizinan		perizinan yang diperiksa			legalitas dokumen perizinan		perizinan yang diperiksa			
	Sub Kegiatan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Disperindag naker	Jumlah Laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	7 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Disperindag naker	Jumlah Laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	0	0	
	Sub kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Disperindag naker	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	7 Dokumen	25.000.000	Sub kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Disperindag naker	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	0	0	
	Program Pengembangan Ekspor	Disperindag naker	Persentase produk unggulan daerah yang siap ekspor	26%	120.000.000	Program Pengembangan Ekspor	Disperindag naker	Persentase produk unggulan daerah yang siap ekspor	0	0	
	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Disperindag naker	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi	30%	120.000.000	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Disperindag naker	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi	0	0	
	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	5 Pelaku Usaha	20.000.000	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pameran Dagang Nasional	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	70.000.000	Pameran Dagang Nasional	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	0	
	Pameran Dagang Lokal	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	6 Pelaku Usaha	20.000.000	Pameran Dagang Lokal	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	0	
	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10 Pelaku usaha	30.000.000	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	0	0	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperindag naker	Persentase penggunaan produk unggulan lokal	22%	250.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperindag naker	Persentase penggunaan produk unggulan lokal	0	0	
	Kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Disperindag naker	persentase pelaksanaan peningkatan citra prduk dan penggunaan produk daerah	22%	250.000.000	Kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Disperindag naker	persentase pelaksanaan peningkatan citra prduk dan penggunaan produk daerah	0	0	
	Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam	50 UMKM	200.000.000	Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			negeri ditingkat kabupaten								
	Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten	Disperindag naker	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace perhotelan dan jasa akomodasi	8 UMKM	35.000.000	Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten	Disperindag naker	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace perhotelan dan jasa akomodasi	0	0	
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Disperindag naker	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	1 UMKM	15.000.000	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Disperindag naker	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	0	0	
	Program Standardisasi dan perlindungan konsumen	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang dan pengawasan	20%	207.000.000	Program Standardisasi dan perlindungan konsumen	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang dan pengawasan	20%	86.541.298	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Disperindag naker	Persentase kepastian akan mutu, jumlah dan keamanan barang	20%	207.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera	Disperindag naker	Persentase kepastian akan mutu, jumlah dan keamanan barang	20%	86.541.298	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			yang diperdagangkan			Ulang dan Pengawasan		yang diperdagangkan			
	Sub kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Disperindag naker	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.500 Unit	165.000.000	Sub kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Disperindag naker	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.500 Unit	69.756.298	
	Sub Kegiatan Pengawasan /penyuluhan metrologi legal	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3 Orang	30.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan /penyuluhan metrologi legal	Disperindag naker	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	16.785.000	
	Sub kegiatan metrologi legal	Disperindag naker	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	3 Unit	12.000.000	Sub kegiatan metrologi legal	Disperindag naker	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0	0	
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	50%	345.000.000	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	50%		
	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	50%	285.000.000	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	50%	153.034.267	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Jumlah Sarana Distribusi perdagangan	2 Unit	195.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Jumlah Sarana Distribusi perdagangan	1 Unit	28.478.267	
	Sub kegiatan Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	124.556.000	Sub kegiatan Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Disperindag naker	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	124.556.000	
	Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan	50%	60.000.000	Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan	50%	15.320.000	
	Sub Kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan.	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12 dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan.	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12 Dokumen	15.320.000	
	Sub Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola	12 dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			sarana distribusi perdagangan								
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disperindag naker	Persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	100%	500.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disperindag naker	Persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	80%	428.132.100	
	Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Disperindag naker	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	500.000.000	Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Disperindag naker	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80%	428.132.100	
	Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi	Disperindag naker	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	32 Orang	500.000.000	Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi	Disperindag naker	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	16 Orang	428.132.100	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disperindag naker	Persentase penempatan tenaga kerja	45%	200.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disperindag naker	Persentase penempatan tenaga kerja	15%	22.018.100	
	Kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja	Disperindag naker	Persentase tersusunnya rencana tenaga kerja makro dan mikro	30%	40.000.000	Kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja	Disperindag naker	Persentase tersusunnya rencana tenaga kerja makro dan mikro	15%	22.018.100	
		Disperindag naker	Jumlah Perusahaan yang	35 Perusahaan	40.000.000	Sub Kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja mikro	Disperindag naker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	20 Perusahaan	22.018.100	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja mikro		Menyusun RTK Mikro								
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disperindag naker	Persentase penempatan tenaga kerja	45%	200.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disperindag naker	Persentase penempatan tenaga kerja	15%	19.310.000	
	Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota	Disperindag naker	Prosentase pelayanan antar kerja yang dilaksanakan	75%	45.000.000	Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota	Disperindag naker	Prosentase pelayanan antar kerja yang dilaksanakan	0	0	
	Sub kegiatan Pelayanan antar kerja	Disperindag naker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL	25 Orang	20.000.000	Sub kegiatan Pelayanan antar kerja	Disperindag naker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL	0	0	
	Sub kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Disperindag naker	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	30 Orang	25.000.000	Sub kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Disperindag naker	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	0	0	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disperindag naker	Presentase pengguna informasi pasar kerja	35%	65.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disperindag naker	Presentase pengguna informasi pasar kerja	0	0	
	Sub kegiatan Pelayanan dan penyediaan	Disperindag naker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar	1 Orang	15.000.000	Sub kegiatan Pelayanan dan penyediaan	Disperindag naker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	informasi pasar kerja online		dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub			informasi pasar kerja online		Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub			
	Sub Kegiatan Job fair/Bursa kerja	Disperindag naker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	300 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Job fair/Bursa kerja	Disperindag naker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0	0	
	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten.	Disperindag naker	Prosentase CPMI/PMI yang terlindungi	15%	55.000.000	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten.	Disperindag naker	Prosentase CPMI/PMI yang terlindungi	20%	19.310.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disperindag naker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	20.000.000	Sub Kegiatan peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disperindag naker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	19.310.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disperindag naker	Jumlah C-PMI yang dilayani	20 Orang	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disperindag naker	Jumlah C-PMI yang dilayani	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disperindag naker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	10.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disperindag naker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0	0	
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam (1) satu daerah Kabupaten	Disperindag naker	Prosentase jumlah Dokumen Perpanjangan IMTA yang tervalidasi lokasi kerja dalam Kabupaten.	75%	35.000.000	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam (1) satu daerah Kabupaten	Disperindag naker	Prosentase jumlah Dokumen Perpanjangan IMTA yang tervalidasi lokasi kerja dalam Kabupaten.	40%	10.549.100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah koordinasi/ sinkronisasi tenaga kerja asing ditempatkan	50 kali	35.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah koordinasi/ sinkronisasi tenaga kerja asing ditempatkan	50 Kali	10.549.100	
	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota	Disperindag naker	Prosentase jumlah peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang di sahkan	15.0%	70.000.000	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota	Disperindag naker	Prosentase jumlah peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang di sahkan	15%	15%	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Disperindag naker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	20.000.000	Sub Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Disperindag naker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	0	0	
	Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Disperindag naker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2 Perusahaan	15.000.000	Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Disperindag naker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0	0	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disperindag naker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Dokumen	35.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disperindag naker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	10.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten/kota	Disperindag naker	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan	80%	335.000.000	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten/kota	Disperindag naker	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan	80%	184.870.000	
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Kasus	45.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Kasus	19.510.000	
	Sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten Mempawah	Disperindag naker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18 Kasus	30.000.000	Sub kegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten Mempawah	Disperindag naker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18 Kasus	12.320.000	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh serta non afiliasi	Disperindag naker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Organisasi	10.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh serta non afiliasi	Disperindag naker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0	0	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah dokumen LKS Tripartit yang Dibina	2 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disperindag naker	Jumlah dokumen LKS Tripartit yang Dibina	2 Dokumen	23.440.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disperindag naker	terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	1000	150.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disperindag naker	terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	1.000 Orang	129.600.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	90%	1.379.150.050	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag naker	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	90%		

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	90.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	29.998.800	
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.999.800	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.480.400	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.612.200	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Disperindag naker	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Disperindag naker	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2.113.300	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan DPA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Penyusunan DPA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.793.400	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	14.999.700	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	100%	5.709.650.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	100%	4.621.158.719	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperindag naker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.648.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperindag naker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	536 Orang	4.621.158.719	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	31.150.000	Sub Kegiatan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	28.419.700	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	4.999.800	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	21.400.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90%	21.400.000	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Disperindag naker	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Sub. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Disperindag naker	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	
	Sub. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Sub. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	
	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	
	Sub. Kegiatan Pentausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	2.900.000	Sub. Kegiatan Pentausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	21.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya administrasi perangkat daerah	95%	85.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya administrasi perangkat daerah	90%	7.040.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disperindag naker	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45%	48.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disperindag naker	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperindag naker	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	40.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperindag naker	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	7.040.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	90%	300.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag naker	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	90%	140.076.125	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperindag naker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90%	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperindag naker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.755.900	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperindag naker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90%	35.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperindag naker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.699.200	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperindag naker	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90%	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperindag naker	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	690 Kotak	13.800.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperindag naker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	90%	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperindag naker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Disperindag naker	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Disperindag naker	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1.999.700	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	145.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	52.821.325	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	85%	10.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disperindag naker	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95%	165.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95%	410.041.865	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperindag naker	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperindag naker	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Disperindag naker	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	45.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Disperindag naker	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	95%	455.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	95%	410.041.865	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	280.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	213.970.125	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	175.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperindag naker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 laporan	196.071.740	
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	95%	223.000.000	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Disperindag naker	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	90%	72.678.580	
	Sub Kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Disperindag naker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.000.000	Sub Kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Disperindag naker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	22.848.110	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperindag naker	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.000.000	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperindag naker	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	35.017.520	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan				Hasil					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disperindag naker	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	120.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disperindag naker	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	4.994.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	4.830.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	8.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag naker	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit	4.988.950	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindagnaker. Usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

TABEL T-C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
MEMPAWAH

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Mempawah	Persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	100%	
	1 Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Mempawah	1 Persentase pencari kerja yang Mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	
	3.1 Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Mempawah	3.1 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16 Orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu “penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Mempawah masuk dalam misi kesatu “Menciptakan pelayanan publik yang cepat, profesional dan efisien dan misi lima “Memperkuat Basis Perekonomian Daerah melalui penguatana sektor pertanian, pelabuhan internasional dan pariwisata. Untuk mendukung pencapaian misi Kabupaten Mempawah maka di tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, disusunlah Strategi pembangunan perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja meliputi 6 (enam) strategi yaitu:

1. Mendorong Industri Kecil Menengah yang mampu berkembang dan mampu mengakses pasar.
2. Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran, Peningkatan daya saing melalui pengembangan industri kompetitif,
3. Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan industri dan potensi yang unggul.

4. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja hingga memiliki keterampilan yang mampu bersaing.
5. Mengoptimalkan penegakan perda untuk mendukung potensi pedagang.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan

III.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian ,perdagangan dan Tenaga kerja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan Urusan Perindustrian, Perdagangan dan tenaga kerja di Kabupaten Mempawah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPD 2025 – 2026.

Visi Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 yaitu :

“ Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cetrda, Mandiri dan Terdepan“

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan Visi Dinas Sesuai dengan peran Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah, Tahun 2025 – 2026 adalah **“Kabupaten Mempawah sebagai daerah industri dan perdagangan yang maju dan tangguh yang didukung oleh tenaga kerja yang berdaya saing tinggi”**.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan :

Adapun tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan
2. Mewujudkan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada publik

B. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah untuk dapat menjalankan Visi dan Misinya adalah :

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan:
 - Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
2. Meningkatnya Sektor Perdagangan
 - Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan:
 - Persentase penyerapan tenaga kerja
 - Persentase ketersediaan tenaga kerja bersertifikat kompetensi
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan:
 - Nilai indeks kepuasan masyarakat pada perangkat daerah

III.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten , pada dasarnya kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan, Sejalan dengan Misi tiga Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupatem Mempawah pada 2025 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.

Tabel.T-C 33
Rumusan Program dan kegiatan tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program Kegiatan, Sasaran, dan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Disperindagaker	0	0		60	80.000.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	prosentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Disperindagaker	0	0		100	80.000.000
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja makro	Disperindagaker	0	0		1	45.000.000
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi penyusunan	Jumlah SDM perusahaan yang	Disperindagaker	0	0		20	35.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program Kegiatan dan Sasaran, dan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
	Rencana P.Tenaga Kerja Mikro	mampu menyusun RTK Mikro						
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (Persen)	Disperindagaker	90	1.400.000.000		90	1.400.000.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Disperindagaker	96	1.626.710.300		96	1.400.000.000
2.07.03.2.01.0001	Proses pelaksanaan pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Disperindagaker	96	795.549.300		96	900.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program Kegiatan dan Sasaran, dan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Disperindagaker	10	831.161.000		10	500.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	Disperindagaker	40	32.880.760		41.5	1.050.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Disperindagaker	530	7.325.300		720	815.000.000
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Disperindagaker	250	7.325.300		260	35.000.000
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Disperindagaker	0	0		Mempawah	50.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program dan Sasaran, Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Disperindagnaker	0	0		Mempawah	730.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase jumlah pengguna informasi pasar kerja	Disperindagnaker	10	25.555.460		Mempawah	125.000.000
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Disperindagnaker	525	25.555.460		Lokasi	50.000.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Disperindagnaker	0	0		25	75.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Persentase jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang dilindungi di daerah Kab /Kota	Disperindagnaker	6	0		7	110.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan kompensasi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Disperindagnaker	0	0		80	50.000.000
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Disperindagnaker	0	0		40	60.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB)	Disperindagnaker	65	1.381.636.400		75	1.805.000.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran	Persentase peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan	Disperindagnaker	0	0		12	125.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program Kegiatan Sasaran, dan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
	Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota							
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Disperindag na ker	0	0		15	60.000.000
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Disperindag na ker	0	0		2	25.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Disperindagaker	0	0		1	40.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Persentase Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten /kota	Disperindagaker	60	1.381.636.400		65	1.680.000.000
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Disperindagaker	12	7.684.800		15	65.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Program Kegiatan	Kinerja Sasaran, dan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
				Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		Disperindagaker	16	14.486.200		17	30.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Program Kegiatan	Kinerja Sasaran, dan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
				Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
	Kabupaten/Kota								
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		Disperindag naker	0	0		17	25.000.000
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		Disperindag naker	2	19.018.400		2	60.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Program Kegiatan	Kinerja Sasaran, dan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
				Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Disperindagaker	7000	1.340.447.000		7000	1.500.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif Rp.
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang diterbitkan	Disperindagaker	80	11.885.100		85	95.000.000
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase penerbitan izin usaha perdagangan	Disperindagaker	60	6.514.100		70	50.000.000
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Disperindagaker	2	6.514.100		2	50.000.000

	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase izin tanda daftar gudang yang diterbitkan	Disperindag naker	60	5.371.000		70	45.000.000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Disperindag naker	1	5.371.000		1	45.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Penggunaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag naker	64	119.532.500		71	2.630.000.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Disperindag naker	60	113.137.500		65	2.500.000.000
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag naker	1	90.948.500		1	2.000.000.000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag naker	1	22.189.000		2	500.000.000

3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase penataan, pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana perdagangan	Disperindagaker	60	6.395.000		65	130.000.000
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindagaker	1	3.954.900		1	65.000.000
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindagaker	1	2.440.100		1	65.000.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan pasar pantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disperindagaker	50	665.862.020		75	2.235.000.000
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau.	Disperindagaker	85	10.662.000		90	80.000.000

3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Disperindagaker	2	5.462.000		2	40.000.000
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Disperindagaker	1	5.200.000		1	40.000.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan Pokok	Disperindagaker	80	646.592.820		90	2.080.000.000
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Disperindagaker	1	4.300.900		1	40.000.000

	Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperindagaker	1	9.437.520		1	40.000.000
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Disperindagaker	3	632.854.400		4	2.000.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pupuk yang diawasi	Disperindagaker	100	8.607.200		100	75.000.000
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Disperindagaker	1	4.364.900		1	40.000.000
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan	Disperindagaker	1	4.242.300		1	35.000.000

	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Produk Unggulan Ekspor Daerah	Disperindag na ker	0	0		50	400.000.000
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Daerah kab/kota	Persentase eikutsertaan pelaku usaha dalam pameran dagang dan misi dagang produk ekspor daerah	Disperindag na ker	0	0		100	400.000.000
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Disperindag na ker	0	0		4	140.000.000
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Disperindag na ker	0	0		3	140.000.000
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Disperindag na ker	10	0		12	120.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPersentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Disperindag na ker	25	53.498.212		27	157.000.000

3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaku usaha yang tertib penggunaan UTP	Disperindagaker	25	53.498.212		30	157.000.000
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Disperindagaker	15	43.785.312		20	100.000.000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Disperindagaker	10	9.712.900,		15	45.000.000
3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil penyidikan Metrologi Legal	Disperindagaker		0		7	12.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk sandang yang dipasarkan	Disperindagaker	12	4.464.800		13	60.000.000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam egeri	Persentase produk sandang yang dipasarkan	Disperindagaker	60	4.464.800		70	60.000.000
3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan	Disperindagaker	40	4.464.800		50	60.000.000

	pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Sandang Produksi Dalam Negeri						
		Indeks kepuasan masyarakat		86,10	5.718.953.805		86,20	7.337.000.00 0
		Nilai indeks kepuasan masyarakat pada perangkat daerah		86,10	5.718.953.805		86,20	7.337.000.00 0
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Disperindagna ker	90	5.227.511.105		95	7.337.000.00 0
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Disperindagna ker	100	33.498.200		100	58.000.000
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperindagna ker	1	5.000.000		1	15.000.000
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperindagna ker	1	3.500.000		1	5.000.000

3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperindagaker	1	3.766.100		1	4.000.000
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Disperindagaker	1	2.500.000		1	5.000.000
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Disperindagaker	1	3.732.100		1	4.000.000
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Disperindagaker	3	15.000.000		3	25.000.000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	Disperindagaker	100	4.852.128.740		100	4.975.000.000

3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disperindagaker	48	4.803.082.840		50	4.885.000.000
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disperindagaker	1	29.000.000		1	50.000.000
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperindagaker	1	15.009.000		1	25.000.000
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disperindagaker	1	5.036.900		1	15.000.000
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	Disperindagaker	95	17.837.800		100	25.000.000
3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperindagaker	2	17.837.800		2	25.000.000
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	Disperindagaker	90	14.080.000		95	115.000.000

	Perangkat Daerah							
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Disperindag na ker	48	0		50	40.000.000
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperindag na ker	12	14.080.000		15	75.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Disperindag na ker	90	54.782.900		95	264.000.000
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disperindag na kerja	10	0		10	10.000.000
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disperindag na kerja	27	15.749.30		30	50.000.000
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Disperindag na kerja	345	0		350	24.000.000
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Disperindag na kerja	14	15.833.600		14	40.000.000

3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Disperindagna kerja	1	0		1	25.000.000
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperindagna kerja	7	23.200.000		7	100.000.000
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disperindagna kerja	0	0		12	15.000.000
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		95	18.240.800		95	1.135.000.000
3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Disperindagna kerja	0	00		4	915.000.000
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Disperindagna kerja	0	0		10	60.000.000
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Disperindagna kerja	3	18.240.800			
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disperindagna kerja	0	0		6	80.000.000

3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Disperindagna kerja	0	0		8	80.000.000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Disperindagna kerja	90	179.459.200,		90	415.000.000
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disperindagna kerja	12	179.459.200		12	215.000.000
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disperindagna kerja	0	0		1	200.000.000
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Disperindagna kerja	95	57.483.465		95	350.000.000
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disperindagna ker	1	22.848.110		1	50.000.000

3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disperindagaker	7	7.358.270		7	60.000.000
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disperindagaker	2	15.000.000		2	200.000.000
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disperindagaker	7	7.300.000		7	20.000.000
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disperindagaker	5	4.977.085		5	20.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Disperindagaker	16,10	475.951.600,		16,20	670.000.000
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang tumbuh.	Disperindagaker	30	475.951.600		30	670.000.000

3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperindag na ker	0	0		1	40.000.000
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperindag na ker	1	67.890.100		1	130.000.000
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperindag na ker	1	0		1	100.000.000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Disperindag na ker	1	408.061.500		1	400.000.000

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM olahan pangan yang memiliki legalitas pengujian dan standarisasi	Disperindagker	0	0		7	50.000.000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan bupati/kota	Persentase pengujian standarisasi dan kualitas produk pada IKM olahan pangan.	Disperindagker	0	0		7	50.000.000
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	Disperindagker	0	0		1	50.000.000

		kewenangan pemerintah pusat						
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	Disperindagaker	1.5	15.491.100		1.6	30.000.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI KewenanganKabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perusahaan industri Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas	Disperindagaker	1,5	15.491.100		1,6	30.000.000
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Disperindagaker	1	15.491.100		1	30.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MEMPAWAH

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Mempawah, Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah perlu menetapkan rencana kerja yang optimal serta pendanaan yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dan pendanaannya tertuang pada Rencana Startegis Dinas Perindustrian, perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten tahun 2025 – 2026.

Pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kabupaten Mempawah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) . Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kabupaten Mempawahtahun 2025 – 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2025		2026	
			Rp.	Target Capaian kinerja	Rp.	Target Capaian kinerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	0	60	80.000.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	prosentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0	0	100	80.000.000
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja makro	0	0	1	45.000.000
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	0	0	20	35.000.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (Persen)	90	1.400.000.000	90	1.400.000.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	96	1.626.710.300	96	1.400.000.000
2.07.03.2.01.0001	Proses pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96	795.549.300	96	900.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2025		2026	
			Rp.	Target Capaian kinerja	Rp.	Target Capaian kinerja
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10	831.161.000	10	500.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	40	32.880.760	41.5	1.050.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	530	7.325.300	720	815.000.000
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250	7.325.300	260	35.000.000
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0	0	Mempawah	50.000.000
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0	0	Mempawah	730.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase jumlah pengguna informasi pasar kerja	10	25.555.460	Mempawah	125.000.000
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	525	25.555.460	Lokasi	50.000.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0	0	25	75.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Persentase jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang dilindungi di daerah Kab /Kota	6	0	7	110.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2025		2026	
			Rp.	Target Capaian kinerja	Rp.	Target Capaian kinerja
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan kompensasi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0	0	80	50.000.000
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0	0	40	60.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB)	65	1.381.636.400	75	1.805.000.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan	0	0	12	125.000.000
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	0	0	15	60.000.000
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0	0	2	25.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2025		2026	
			Rp.	Target Capaian kinerja	Rp.	Target Capaian kinerja
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	0	0	1	40.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Persentase Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten /kota	60	1.381.636.400	65	1.680.000.000
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	12	7.684.800	15	65.000.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	16	14.486.200	17	30.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2025		2026	
			Rp.	Target Capaian kinerja	Rp.	Target Capaian kinerja
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0	0	17	25.000.000
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2	19.018.400	2	60.000.000
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7000	1.340.447.000	7000	1.500.000.000

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja program dan Kerangka pendanaan			
			2025		2026	
			2025	Target Capaian Kinerja	2026	Target Capaian Kinerja
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang diterbitkan	80	11.885.100	85	95.000.000
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase penerbitan izin usaha perdagangan	60	6.514.100	70	50.000.000
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	6.514.100	2	50.000.000

3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase izin tanda daftar gudang yang diterbitkan	60	5.371.000	70	45.000.000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	5.371.000	1	45.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Penggunaan Sarana Distribusi Perdagangan	64	119.532.500	71	2.630.000.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	60	113.137.500	65	2.500.000.000
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	90.948.500	1	2.000.000.000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	22.189.000	2	500.000.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase penataan, pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana perdagangan	60	6.395.000	65	130.000.000
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	3.954.900	1	65.000.000
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	2.440.100	1	65.000.000

3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan pasar pantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	50	665.862.020	75	2.235.000.000
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau.	85	10.662.000	90	80.000.000
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	5.462.000	2	40.000.000
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	5.200.000	1	40.000.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan Pokok	80	646.592.820,	90	2.080.000.000
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	4.300.900	1	40.000.000

3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	9.437.520	1	40.000.000
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	632.854.400	4	2.000.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pupuk yang diawasi	100	8.607.200	100	75.000.000
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1	4.364.900	1	40.000.000
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	4.242.300	1	35.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Produk Unggulan Ekspor Daerah	0	0	50	400.000.000
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Daerah kab/kota	Persentase eikutsertaan pelaku usaha dalam pameran dagang dan misi dagang produk ekspor daerah	0	0	100	400.000.000
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	0	4	140.000.000
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	0	3	140.000.000

3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10	0	12	120.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPersentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25	53.498.212	27	157.000.000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaku usaha yang tertib penggunaan UTTP	25	53.498.212	30	157.000.000
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15	43.785.312	20	100.000.000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10	9.712.900,	15	45.000.000
3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil penyidikan Metrologi Legal		0	7	12.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk sandang yang dipasarkan	12	4.464.800	13	60.000.000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	Persentase produk sandang yang dipasarkan	60	4.464.800	70	60.000.000
3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	40	4.464.800	50	60.000.000
		Indeks kepuasan masyarakat	86,10	5.718.953.805	86,20	7.337.000.000
		Nilai indeks kepuasan masyarakat pada perangkat daerah	86,10	5.718.953.805	86,20	7.337.000.000

3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keseekretariatan	90	5.227.511.105	95	7.337.000.000
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	33.498.200	100	58.000.000
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	5.000.000	1	15.000.000
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.500.000	1	5.000.000
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.766.100	1	4.000.000
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.500.000	1	5.000.000
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3.732.100	1	4.000.000

3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	3	15.000.000	3	25.000.000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100	4.852.128.740	100	4.975.000.000
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	4.803.082.840	50	4.885.000.000
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	29.000.000	1	50.000.000
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	1	15.009.000	1	25.000.000
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	5.036.900	1	15.000.000
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	95	17.837.800	100	25.000.000
3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	17.837.800	2	25.000.000
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dministrasi kepegawaian	90	14.080.000	95	115.000.000

3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48	0	50	40.000.000
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12	14.080.000	15	75.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	90	54.782.900	95	264.000.000
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	0	10	10.000.000
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	15.749.30	30	50.000.000
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	345	0	350	24.000.000
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	14	15.833.600	14	40.000.000
3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	1	25.000.000
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	23.200.000	7	100.000.000
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	12	15.000.000

3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95	18.240.800	95	1.135.000.000
3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	00	4	915.000.000
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	10	60.000.000
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	18.240.800		
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	6	80.000.000
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	0	0	8	80.000.000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90	179.459.200,	90	415.000.000
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	179.459.200	12	215.000.000
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	1	200.000.000
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95	57.483.465	95	350.000.000

3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	22.848.110	1	50.000.000
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7.358.270	7	60.000.000
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15.000.000	2	200.000.000
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	7.300.000	7	20.000.000
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	4.977.085	5	20.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	16,10	475.951.600,	16,20	670.000.000
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang tumbuh.	30	475.951.600	30	670.000.000
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	0	1	40.000.000

3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	67.890.100	1	130.000.000
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	0	1	100.000.000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	408.061.500	1	400.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM olahan pangan yang memiliki legalitas pengujian dan standarisasi	0	0	7	50.000.000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan bupaten/Kota	Persentase pengujian standarisasi dan kualitas produk pada IKM olahan pangan.	0	0	7	50.000.000
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	0	1	50.000.000

3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	1.5	15.491.100	1.6	30.000.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI KewenanganKabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perusahaan industri Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas	1,5	15.491.100	1,6	30.000.000
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	15.491.100	1	30.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan acuan bagi Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Tenaga kerja dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap para pelaku dunia usaha di wilayah Kabupaten Mempawah dengan mengacu sesuai dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini dapat digunakan dalam melaksanakan tugas dengan baik, rutin maupun pembangunan sektor industri , perdagangan dan tenaga kerja sebagai arahan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian , Perdagangan dan tenaga kerja. Tentu saja banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembinaan terhadap para pelaku dunia usaha di wilayah Kabupaten Mempawah seperti pendanaan penambahan sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian , Perdagangan dan tenaga kerja Kabupaten Mempawah dapat dilaksanakan untuk mendukung berhasil Dinas Perindustrian,Perdagangan dan tenaga kerja dimasa yang akan datang.

Mempawah, Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan
Tenaga Kerja kabupaten Mempawah

JOHANA SARI MARGIANI,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 198803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dinamika regulasi, kebutuhan aktual, serta perkembangan capaian kinerja Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini tetap berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) transisi Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026 sebagai arah kebijakan utama, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sebelumnya.

Nama program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen ini telah disesuaikan berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian penanggung jawab program, kegiatan, dan sub kegiatan juga merujuk pada Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

Perubahan dalam dokumen Renja ini mencakup penyesuaian indikator kinerja, target kinerja dan anggaran sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan riil dan ketersediaan sumber daya tahun berjalan. Oleh karena itu, angka-angka dalam dokumen ini bersifat prediktif dan masih dapat berubah sesuai kemampuan fiskal daerah serta proses penganggaran selanjutnya. Dengan disusunnya Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan bisa menjadi acuan perencanaan yang lebih adaptif, terukur, dan responsive dalam mendukung peningkatan kinerja serta akuntabilitas Sekretariat Daerah sebagai koordinator pengendalian kinerja perangkat daerah di Kabupaten Mempawah.

Mempawah, Juli 2025
Sekretaris Daerah Kab. Mempawah,

Drs. ISMAIL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660508 199203 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	7
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	16
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	19
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV PENUTUP.....	40



DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	8
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	17
Tabel T-C.31	Reviu terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025	20
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	30



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Mempawah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Tentunya merujuk pada Renstra Transisi Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026 yang telah disusun. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan



dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026, dimana telah ditetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya penguatan birokrasi yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada publik

Adapun indikator dari tujuan di atas adalah

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Mempawah

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.



1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kode klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah untuk :

- a. Menjamin keterkaitan serta keserasian dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dengan Renstra Transisi Setda Tahun 2025-2026 dan RPD Tahun 2025-2026.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.



Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah selama tahun 2025.
- b. Sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan SKPD dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Mempawah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dapat direalisasikan secara optimal, baik dari sisi output kegiatan maupun serapan anggaran. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Berikut ini adalah rekapitulasi dari Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Triwulan I:



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Tabel T.C.29																				
Rekapitulasi hasil pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan capaian RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah																				
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							I		II		III		IV							
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			SEKRETARIAT DAERAH			53.797.424.446,00		4.553.063.008,00		-		-		-		-		8,46%		-
1		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	28.292.281.752,00		4.216.404.675,00		-		-		-		-		14,90%		-
				Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100			-		-		-		-		-		-		-
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	39.003.450,00		11.610.000,00		-		-		-		-		29,77%		-
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	9.999.900,00	-	-									0,00%			Bagian Umum
		4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.499.600,00	-	-									0,00%			Bagian Umum
		4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.505.100,00	-	-									0,00%			Bagian Umum
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.499.600,00	-	-									0,00%			Bagian Umum
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3.499.900,00	-	-									0,00%			Bagian Umum
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	14.999.350,00	1	11.610.000,00									77,40%			Bagian Umum
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100%	14.598.033.072,00	25%	2.681.807.130,00		-		-		-		-		18,37%		-
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1820	14.404.436.572,00	455	2.649.672.130,00									18,39%			Bagian Umum
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	159.097.300,00	3	20.775.000,00									13,06%			Bagian Umum
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	26.999.750,00	1	11.360.000,00									42,07%			Bagian Umum
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	1	7.499.450,00	-	-									0,00%			Bagian Umum



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	29.159.800,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	29.159.800,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	135.000.000,00	22.930.760,00	-	-	-	-	16,99%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	135.000.000,00	22.930.760,00	-	-	-	-	16,99%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	1.796.204.133,00	361.282.889,00	-	-	-	-	20,11%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	134.999.100,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	94.999.400,00	27.365.500,00	-	-	-	-	28,81%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	1.132.000.000,00	196.634.700,00	-	-	-	-	17,37%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	74.380.133,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	14.999.500,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	329.833.000,00	137.282.689,00	-	-	-	-	41,62%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	14.993.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.409.311.400,00	64.741.800,00	-	-	-	-	1,90%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	3.161.169.400,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	48.727.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	700	199.415.000,00	64.741.800,00	-	-	-	-	32,47%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.093.825.020,00	296.663.283,00	-	-	-	-	14,17%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1.904.744.200,00	265.051.435,00	-	-	-	-	13,92%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	189.080.820,00	31.611.848,00	-	-	-	-	16,72%	-	Bagian Umum



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.031.106.700,00		216.352.882,00		-	-	-	10,65%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	476.911.700,00		56.205.600,00					11,79%		Bagian Umum
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	454.825.000,00		77.553.850,00					17,05%		Bagian Umum
		4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	15.000.000,00		-					0,00%		Bagian Umum
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	809.200.000,00		67.993.432,00					8,40%		Bagian Umum
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	95.000.000,00		-					0,00%		Bagian Umum
		4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	542	180.170.000,00		14.600.000,00					8,10%		Bagian Umum
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat difasilitasi	100%	1.079.918.437,00		20.811.059,00		-	-	-	1,93%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	206.638.437,00		12.065.059,00					5,84%		Bagian Umum
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang	4	88.280.000,00		8.746.000,00					9,91%		Bagian Umum
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	185.000.000,00		-					0,00%		Bagian Umum
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	600.000.000,00		-					0,00%		Bagian Umum
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan kerumahaan Sekretariat Daerah yang dapat difasilitasi	100%	1.547.997.600,00		163.063.402,00		-	-	-	10,53%	-	Bagian Umum
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	838.797.600,00		139.788.570,00					16,67%		Bagian Umum
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	559.200.000,00		23.274.832,00					4,16%		Bagian Umum
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	150.000.000,00		-					0,00%		Bagian Umum



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi	100%	141.685.900,00	34.705.000,00	-	-	-	-	24,49%	-	Bagian Organisasi
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	41.806.700,00	11.740.000,00					28,08%		Bagian Organisasi
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	48.283.700,00	1.110.000,00					2,30%		Bagian Organisasi
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	51.595.500,00	21.855.000,00					42,36%		Bagian Organisasi
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat Kepuasan Pimpinan Atas Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	80	1.391.036.240,00	342.436.470,00	-	-	-	-	24,62%	-	Bagian Humas Protokol
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	140.650.100,00	23.081.983,00					16,41%		Bagian Humas Protokol
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	1.124.959.720,00	301.426.377,00					26,79%		Bagian Humas Protokol
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	125.426.420,00	17.928.110,00					14,29%		Bagian Humas Protokol
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	100%	21.224.316.934,00	194.713.057,00					0,92%		
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LPPD	100%									
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan yang Disusun	15	198.015.300,00	31.306.925,00					15,81%		Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	42.429.600,00	-					0,00%		Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	90.336.600,00	-					0,00%		Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	65.249.100,00	31.306.925,00					47,98%		Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	19.766.162.300,00	102.177.400,00					0,52%		Bagian Kesmenspirit
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	9.717.541.000,00	88.009.000,00					0,91%		Bagian Kesmenspirit
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	9.983.735.000,00	14.168.400,00					0,14%		Bagian Kesmenspirit
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	64.886.300,00	-					0,00%		Bagian Kesmenspirit



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Dipublikasikan	390	967.071.334,00		61.228.732,00							6,33%		Bagian Hukum
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	390	410.572.134,00		28.664.500,00							6,98%		Bagian Hukum
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	467.579.600,00		16.657.366,00							3,56%		Bagian Hukum
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	390	88.919.600,00		15.906.866,00							17,89%		Bagian Hukum
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil kerjasama	17	293.068.000,00		-							0,00%		Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	280.063.700,00		-							0,00%		Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	13.004.300,00		-							0,00%		Bagian Pemerintahan
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	100%	596.390.150,00		55.105.276,00							9,24%		
				Persentase Pengadaan Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Ketentuan	100%												
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Dilaksanakan	5	190.851.000,00		18.428.000,00							9,66%		Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	130.062.500,00		6.102.000,00							4,69%		Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	46.572.300,00		10.656.000,00							22,88%		Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	14.216.200,00		1.670.000,00							11,75%		Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan pembangunan yang Difasilitasi dan	100%	68.879.650,00		-							0,00%		Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	32.838.850,00		-							0,00%		Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3	36.040.800,00		-							0,00%		Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses tender/seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100%	306.537.100,00		34.678.276,00							11,31%		Bagian PPBJ
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	137.550.900,00		18.986.776,00							13,80%		Bagian PPBJ
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	136.978.500,00		-							0,00%		Bagian PPBJ
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	32.007.700,00		15.691.500,00							49,02%		Bagian PPBJ



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan terkait sumber daya alam	100%	30.122.400,00		1.999.000,00								6,64%			Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	4.938.400,00		1.999.000,00								40,48%			Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	6.329.400,00		-								0,00%			Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	18.854.600,00		-								0,00%			Bagian Perekonomian
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan Di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100%	971.468.900,00		3.980.000,00								0,41%			Bagian Kesbangpol
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah dokumen kebijakan teknis dan jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	971.468.900,00		3.980.000,00								0,41%			Bagian Kesbangpol
		8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang	2	4.750.000,00		2.040.000,00								42,95%			Bagian Kesbangpol
		8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	963.834.300,00		1.940.000,00								0,20%			Bagian Kesbangpol
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20	2.884.600,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	2.183.103.010,00		-									0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan dan dilaksanakan	1	2.183.103.010,00		-									0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	1.392.078.960,00		-									0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	7.319.550,00		-									0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30	783.704.500,00		-									0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina	31	19.910.100,00		2.860.000,00									14,36%			Bagian Kesbangpol
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	1	19.910.100,00		2.860.000,00									14,36%			Bagian Kesbangpol
		8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12	14.504.500,00		2.860.000,00									19,72%			Bagian Kesbangpol
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	2.785.600,00		-									0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	2.620.000,00		-									0,00%			Bagian Kesbangpol



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	58.651.500,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.05.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan dan Dilaksanakan	1	58.651.500,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	1	8.523.400,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27	47.558.100,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	2.570.000,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	100%	451.302.100,00	80.000.000,00									17,73%			Bagian Kesbangpol
		8.01.06.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1	451.302.100,00	80.000.000,00									17,73%			Bagian Kesbangpol
		8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	25.021.500,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	3.603.000,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1.592.000,00		-								0,00%			Bagian Kesbangpol
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4	421.085.600,00	80.000.000,00									19,00%			Bagian Kesbangpol



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 - 2024.

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Mempawah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatnya Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	11	12	-	-
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,61	2,61	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	100%	100%	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah		Indeks Tata Kelola Pengadaan	50	70	-	-

Dari uraian indikator kinerja dalam kolom indikator pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja tersebut merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Kemudian indikator kinerja tersebut dibuat berdasarkan pencapaian sasaran kinerja dari setiap indikator sasaran layanan Sekretariat Daerah yang bisa diukur seperti persentase, nilai, maupun indeks, dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sebagai koordinator dan pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan realisasi pencapaian indikator sasaran diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 capaian realisasi belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dikarenakan :

1. Untuk nilai SAKIP biasanya dikeluarkan oleh Kementrian PANRB pada awal tahun berikutnya, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran.
2. Untuk nilai LPPD biasanya dikeluarkan setiap tahun oleh Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah, biasanya diumumkan pada akhir tahun berikutnya, misalnya LPPD 2024 (data tahun 2024) → disampaikan pada April 2025 → dinilai sepanjang 2025 → nilai diumumkan akhir 2025.
3. Nilai IKM biasanya dikeluarkan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik setiap akhir periode survey, umumnya dikeluarkan per akhir tahun anggaran.
4. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) biasanya dikeluarkan oleh Kementrian PANRB setiap tahun, umumnya diumumkan pada semester I atau II tahun berikutnya setelah tahun evaluasi. Misal ITKP tahun 2025 kemungkinan besar akan diumumkan pada pertengahan hingga akhir tahun 2026.

2.3 ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin di capai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program dan kegiatan.
- c. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan perubahan Rencana Kerja harus mengacu pada Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang harus disusun. Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Mempawah, untuk dilakukan review agar diperoleh kesesuaian atau relevansinya.



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

Tabel T.C.31											
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2025											
Kabupaten Mempawah											
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah											
No	Rencana Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEKRETARIAT DAERAH				54.890.462.721,00					54.890.462.721,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	29.849.892.736,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mempawah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	29.849.892.736,00	
			Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%				Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	39.003.450,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	39.003.450,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.999.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.999.900,00	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.499.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.499.600,00	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.505.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.505.100,00	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.600,00	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.900,00	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.999.350,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.999.350,00	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Mempawah	Pesentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100%	14.598.033.072,00	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Mempawah	Pesentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100%	14.598.033.072,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1820 OB	14.404.436.572,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1820 OB	14.404.436.572,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	159.097.300,00	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	159.097.300,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	26.999.750,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	26.999.750,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.499.450,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.499.450,00	
4.01.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	29.159.800,00	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	29.159.800,00	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	29.159.800,00	Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	29.159.800,00	
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	135.000.000,00	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	135.000.000,00	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	135.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	135.000.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	2.912.961.733,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	2.912.961.733,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	167.499.100,00	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	167.499.100,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.997.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.997.000,00	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.681.990.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.681.990.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	148.476.133,00	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	148476133	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14.999.500,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14.999.500,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	805.000.000,00	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	805.000.000,00	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.353.458.600,00	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.353.458.600,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Paket	254.029.600,00	Pengadaan Mebel	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Paket	254.029.600,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	336.887.800,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	336.887.800,00	
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	700 Unit	762.541.200,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	700 Unit	762.541.200,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.818.640.872,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.818.640.872,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air yang Disediakan	48 Laporan	1.627.588.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air yang Disediakan	48 Laporan	1.627.588.200,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	191.052.672,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.052.672,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.659.139.544,00	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kab. Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.659.139.544,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	592.827.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	592.827.400,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	474.825.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	474.825.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.310.107.144,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.310.107.144,00	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	75.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	75.000.000,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	542 Unit	206.380.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	181 Unit	206.380.000,00	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.01.2.11	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat difasilitasi	100%	1.207.370.137,00	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat difasilitasi	100%	1.207.370.137,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 OB	206.638.437,00	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 OB	206.638.437,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	215.731.700,00	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	215.731.700,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan medical checkup Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	185.000.000,00	Pelaksanaan medical checkup Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	185.000.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 OB	600.000.000,00	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 OB	600.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi kerumah tanggaan sekretariat daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dapat difasilitasi	100%	1.798.219.000,00	Fasilitasi kerumah tanggaan sekretariat daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dapat difasilitasi	100%	1.798.219.000,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.004.339.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.004.339.000,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	643.880.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	643.880.000,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	150.000.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan organisasi	Kab. Mempawah	Persentase Capaian Penataan Organisasi	100%	95.620.100,00	Penataan organisasi	Kab. Mempawah	Persentase Capaian Penataan Organisasi	100%	95.620.100,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	27.671.400,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	27.671.400,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	26.863.700,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	26.863.700,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	41.085.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	41.085.000,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Kab. Mempawah	Tingkat Kepuasan Pimpinan Atas Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	80	3.203.286.428,00	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Kab. Mempawah	Tingkat Kepuasan Pimpinan Atas Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	80	3.203.286.428,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi keprotokolan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	284.234.300,00	Fasilitasi keprotokolan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	284.234.300,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	2.650.549.908,00	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	2.650.549.908,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian tugas pimpinan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	268.502.220,00	Pendokumentasian tugas pimpinan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	268.502.220,00	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Mempawah	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	100%	20.801.758.375,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Mempawah	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	100%	20.801.758.375,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LPPD	100%				Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LPPD	100%		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan yang Disusun	15 Dokumen	130.204.000,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan yang Disusun	15 Dokumen	130.204.000,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	16.214.700,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	16.214.700,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	38.716.600,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	38.716.600,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	75.272.700,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	75.272.700,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Mempawah	Persentase Kebijakan kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	19.550.933.275,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Mempawah	Persentase Kebijakan kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	19.550.933.275,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	9.595.900.875,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	9.595.900.875,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	9.900.346.100,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	9.900.346.100,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	54.686.300,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	54.686.300,00	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Mempawah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Dipublikasikan	390 Dokumen	827.553.100,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Mempawah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Dipublikasikan	390 Dokumen	827.553.100,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	390 Dokumen	380.288.600,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	390 Dokumen	380.288.600,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Mempawah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	4 Kasus	376.250.400,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Mempawah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	4 Kasus	376.250.400,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Mempawah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	390 Dokumen	71.014.100,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Mempawah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	390 Dokumen	71.014.100,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen hasil kerjasama	17 Dokumen	293.068.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah dokumen hasil kerjasama	17 Dokumen	293.068.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	280.063.700,00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	280.063.700,00	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	13.004.300,00	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	13.004.300,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Mempawah	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	100%	596.390.150,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Mempawah	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	100%	596.390.150,00	
			Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan	100%				Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan	100%		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan Perekonomian Yang Dilaksanakan	5 Dokumen	190.851.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan Perekonomian Yang Dilaksanakan	5 Dokumen	190.851.000,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	130.062.500,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	130.062.500,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	46.572.300,00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	46.572.300,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	14.216.200,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	14.216.200,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Mempawah	Persentase Fasilitas Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan pembangunan yang Difasilitasi dan diterbitkan	100%	68.879.650,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Mempawah	Persentase Fasilitas Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan pembangunan yang Difasilitasi dan diterbitkan	100%	68.879.650,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	32.838.850,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	32.838.850,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	36.040.800,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	36.040.800,00	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Mempawah	Persentase proses tender/seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100%	306.537.100,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Mempawah	Persentase proses tender/seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100%	306.537.100,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	137.550.900,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	137.550.900,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	136.978.500,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	136.978.500,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	32.007.700,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	32.007.700,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Mempawah	Persentase pemantauan terkait sumber daya alam	100%	30.122.400,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Mempawah	Persentase pemantauan terkait sumber daya alam	100%	30.122.400,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4.938.400,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4.938.400,00	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	6.329.400,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	6.329.400,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	18.854.600,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	18.854.600,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Mempawah	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan Di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100%	968.584.300,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Mempawah	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan Di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100%	968.584.300,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Mempawah	Persentase jumlah dokumen kebijakan teknis dan jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	968.584.300,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Mempawah	Persentase jumlah dokumen kebijakan teknis dan jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	968.584.300,00	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	4.750.000,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	4.750.000,00	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	963.834.300,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	963.834.300,00	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Mempawah	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	2.173.438.960,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Mempawah	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	2.173.438.960,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan dan dilaksanakan	1 Dokumen	2.173.438.960,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan dan dilaksanakan	1 Dokumen	2.173.438.960,00
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1.392.078.960,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1.392.078.960,00
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	781.360.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	781.360.000,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Mempawah	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina	31 Organisasi Kemasyarakatan	14.504.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Mempawah	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina	31 Organisasi Kemasyarakatan	14.504.500,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	1 Dokumen	14.504.500,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	1 Dokumen	14.504.500,00
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	14.504.500,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	14.504.500,00



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Mempawah	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	47.558.100,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Mempawah	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	47.558.100,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan dan Dilaksanakan	1 Dokumen	47.558.100,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan dan Dilaksanakan	1 Dokumen	47.558.100,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27 Orang	47.558.100,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27 Orang	47.558.100,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Mempawah	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	100%	438.335.600,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Mempawah	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	100%	438.335.600,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	438.335.600,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	438.335.600,00	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	23.400.000,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	23.400.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	414.935.600,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	414.935.600,00	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Perubahan Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk jelasnya rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dapat kita lihat pada tabel TC 33 berikut:



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

Tabel T-C.33																
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Perubahan																
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Progra/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiran Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
	SEKRETARIAT DAERAH					132.631.155.662,00	55.695.220.687,00	54.890.462.721,00	-	77.740.692.941,00			67.976.808.289,00			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	41.169.936.995,00	29.538.867.919,00	29.849.892.736,00	-	11.320.044.259,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BB	34.166.723.189,00		
			Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keseekretariatan	100%	100%											
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	39.998.450,00	39.003.450,00	39.003.450,00	-	995.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	39.003.300,00	Bagian Umum	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	-		Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	9.999.800,00	Bagian Umum	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.499.600,00	3.499.600,00	3.499.600,00	-		Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.499.600,00	Bagian Umum	
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.505.100,00	3.505.100,00	-	494.900,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.505.100,00	Bagian Umum	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.499.600,00	3.499.600,00	3.499.600,00	-		Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.499.600,00	Bagian Umum	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.499.900,00	3.499.900,00	-	500.100,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.499.900,00	Bagian Umum	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.999.350,00	14.999.350,00	14.999.350,00	-		Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	14.999.300,00	Bagian Umum	



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100%	100%	17.093.470.785,00	14.598.033.072,00	14.598.033.072,00	-	2.495.437.713,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	15.838.195.656,00	Bagian Umum
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1820 OB	1820 OB	16.860.911.585,00	14.404.436.572,00	14.404.436.572,00	-	2.456.475.013,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1820 OB	15.657.567.856,00	Bagian Umum
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	198.060.000,00	159.097.300,00	159.097.300,00	-	38.962.700,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	146.128.800,00	Bagian Umum
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	26.999.750,00	26.999.750,00	26.999.750,00	-	-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	26.999.700,00	Bagian Umum
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.499.450,00	7.499.450,00	7.499.450,00	-	-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7.499.300,00	Bagian Umum
4.01.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	29.159.800,00	29.159.800,00	29.159.800,00	-	-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	29.159.800,00	Bagian Umum
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	29.159.800,00	29.159.800,00	29.159.800,00	-	-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	29.159.800,00	Bagian Umum
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	2.378.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-	2.243.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	135.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	220.000.000,00	-	-	-	220.000.000,00			0	-	Bagian Umum
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	0	11.500.000,00	-	-	-	11.500.000,00			0	-	Bagian Umum
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	11.500.000,00	-	-	-	11.500.000,00			0	-	Bagian Umum
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	2.135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-	2.000.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	135.000.000,00	Bagian Umum



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

	4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	100%	2.119.000.000,00	2.095.371.300,00	2.912.961.733,00	793.961.733,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	2.095.336.600,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	135.000.000,00	134.999.100,00	167.499.100,00	32.499.100,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	134.988.900,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	95.000.000,00	94.999.400,00	94.997.000,00	3.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	94.997.900,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan bahan logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.132.000.000,00	1.132.000.000,00	1.681.990.000,00	549.990.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	1.132.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	148.380.300,00	148.476.133,00	1.523.867,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	148.380.300,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00	2.000.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	14.999.500,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	575.000.000,00	555.000.000,00	805.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan	555.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	0	15.000.000,00	14.993.000,00	-	15.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	14.970.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	7.398.975.000,00	3.409.311.400,00	1.353.458.600,00	6.045.516.400,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.797.394.100,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	4.761.475.000,00	3.161.169.400,00	-	4.761.475.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	4.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0	1.800.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	375.000.000,00	-	254.029.600,00	120.970.400,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5 Unit	-	48.727.000,00	336.887.800,00	336.887.800,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	48.411.800,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	0	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	700 Unit	700 Unit	312.500.000,00	199.415.000,00	762.541.200,00	450.041.200,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	700 Unit	1.748.982.300,00	Bagian Umum



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.115.075.020,00	2.093.825.020,00	1.818.640.872,00	-	296.434.148,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	2.093.721.212,00	Bagian Umum
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	0	21.250.000,00	-	-	-	21.250.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Umum
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	1.904.744.200,00	1.904.744.200,00	1.627.588.200,00	-	277.156.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Laporan	1.904.744.200,00	Bagian Umum
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	189.080.820,00	189.080.820,00	191.052.672,00	-	1.971.852,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	188.977.012,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.539.685.000,00	2.031.106.700,00	2.659.139.544,00	-	119.454.544,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	2.031.051.544,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	706.000.000,00	476.911.700,00	592.827.400,00	-	113.172.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	476.908.700,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	454.825.000,00	454.825.000,00	474.825.000,00	-	20.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	454.823.500,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	187 Unit	187 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit	15.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	809.200.000,00	809.200.000,00	1.310.107.144,00	-	500.907.144,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	809.199.344,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	150 Unit	305.000.000,00	95.000.000,00	75.000.000,00	-	230.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Unit	95.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	542 Unit	542 Unit	249.660.000,00	180.170.000,00	206.380.000,00	-	43.280.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	542 Unit	180.120.000,00	Bagian Umum



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

4.01.01.2.11	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat difasilitasi	100%	100%	1.503.280.000,00	1.079.918.437,00	1.207.370.137,00	-	295.909.863,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	1.079.918.437,00	Bagian Umum
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 OB	24 OB	230.000.000,00	206.638.437,00	206.638.437,00	-	23.361.563,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 OB	206.638.437,00	Bagian Umum
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	88.280.000,00	88.280.000,00	215.731.700,00		127.451.700,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	88.280.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan medical checkup Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00		-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang	185.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 OB	24 OB	1.000.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-	400.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 OB	600.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.12	Fasilitasi rumah tangga kebutuhan sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang dapat difasilitasi	100%	100%	1.548.000.000,00	1.547.997.600,00	1.798.219.000,00		250.219.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	1.547.801.400,00	Bagian Umum
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	838.800.000,00	838.797.600,00	1.004.339.000,00		165.539.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	838.792.800,00	Bagian Umum
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	559.200.000,00	559.200.000,00	643.880.000,00		84.680.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	559.008.600,00	Bagian Umum
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	150.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.13	Penataan organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi	100%	100%	330.000.000,00	214.104.900,00	95.620.100,00	-	234.379.900,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	214.104.900,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	71.015.700,00	27.671.400,00	-	82.328.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	71.015.700,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	95.000.000,00	66.373.700,00	26.863.700,00	-	68.136.300,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	66.373.700,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	76.715.500,00	41.085.000,00	-	83.915.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	76.715.500,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.14	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Tingkat Kepuasan Pimpinan Atas Pelayanan Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan	80	80	4.075.292.940,00	2.266.036.240,00	3.203.286.428,00	-	872.006.512,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80	3.266.036.240,00	Bagian Humas Protokol
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol	12 Laporan	12 Laporan	316.978.200,00	165.650.100,00	284.234.300,00	-	32.743.900,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	165.650.100,00	Bagian Humas Protokol
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	3.455.842.520,00	1.949.959.720,00	2.650.549.908,00	-	805.292.612,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.949.959.720,00	Bagian Humas Protokol
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	302.472.220,00	150.426.420,00	268.502.220,00	-	33.970.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	150.426.420,00	Bagian Humas Protokol



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Keras	100%	100%	87.401.642.449,00	21.818.565.000,00	20.801.758.375,00	-	66.599.884.074,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	33.011.513.100,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LPPD	100%	100%							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	264.939.200,00	222.300.300,00	130.204.000,00	-	134.735.200,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Dokumen	222.300.300,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	55.627.000,00	47.189.600,00	16.214.700,00	-	39.412.300,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	47.189.600,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	134.202.200,00	109.861.600,00	38.716.600,00	-	95.485.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	109.861.600,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	75.110.000,00	65.249.100,00	75.272.700,00	-	162.700,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	65.249.100,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	85.650.041.849,00	20.212.481.300,00	19.550.933.275,00	-	66.099.108.574,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	31.405.430.100,00	Bagian Kesmenspirit
4.01.02.2.02.0001	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000.000,00	9.692.000.000,00	9.595.900.875,00	-	4.204.099.125,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9.692.000.000,00	Bagian Kesmenspirit
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	71.377.641.449,00	10.094.280.000,00	9.900.346.100,00	-	61.477.295.349,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	21.287.228.800,00	Bagian Kesmenspirit
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	472.400.400,00	426.201.300,00	54.686.300,00	-	417.714.100,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	426.201.300,00	Bagian Kesmenspirit
4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Dipublikasikan	390 Dokumen	390 Dokumen	1.371.415.100,00	1.085.955.400,00	827.553.100,00	-	543.862.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	390 Dokumen	1.085.954.700,00	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0001	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	390 Dokumen	390 Dokumen	539.846.600,00	465.843.200,00	380.288.600,00	-	159.558.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	390 Dokumen	465.843.100,00	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	666.428.400,00	519.052.600,00	376.250.400,00	-	290.178.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kasus	519.052.300,00	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	390 Dokumen	390 Dokumen	165.140.100,00	101.059.600,00	71.014.100,00	-	94.126.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	390 Dokumen	101.059.300,00	Bagian Hukum
4.01.02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil kerjasama	17 Dokumen	17 Dokumen	115.246.300,00	297.828.000,00	293.068.000,00	-	177.821.700,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Dokumen	297.828.000,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04.0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	85.246.300,00	280.063.700,00	280.063.700,00	-	194.817.400,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	280.063.700,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	17.764.300,00	13.004.300,00	-	16.995.700,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	17.764.300,00	Bagian Pemerintahan



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	100%	100%	1.226.063.800,00	768.723.150,00	596.390.150,00	-	629.673.650,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	798.572.000,00	
			Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan	100%	100%							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian Yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	370.720.200,00	224.256.000,00	190.851.000,00	-	179.869.200,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	224.155.900,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	184.690.000,00	146.952.500,00	130.062.500,00	-	54.627.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	146.852.400,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	132.999.000,00	46.572.300,00	46.572.300,00	-	86.426.700,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	46.572.300,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	53.031.200,00	30.731.200,00	14.216.200,00	-	38.815.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.731.200,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan pembangunan yang Difasilitasi dan diterbitkan	100%	100%	101.375.900,00	76.079.650,00	68.879.650,00	-	32.496.250,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	106.078.700,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	50.717.100,00	37.318.850,00	32.838.850,00	-	17.878.250,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	37.318.400,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	29.999.600,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	50.658.800,00	38.760.800,00	36.040.800,00	-	14.618.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	38.760.700,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses tender/seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100%	100%	669.823.700,00	406.955.100,00	306.537.100,00	-	363.286.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	406.905.000,00	Bagian PPBJ
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	150 Dokumen	312.163.400,00	206.940.900,00	137.550.900,00	-	174.612.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Dokumen	206.940.900,00	Bagian PPBJ
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	292.700.500,00	166.346.500,00	136.978.500,00	-	155.722.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	166.346.500,00	Bagian PPBJ
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	150 Orang	64.959.800,00	33.667.700,00	32.007.700,00	-	32.952.100,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Orang	33.617.600,00	Bagian PPBJ



*Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan terkait sumber daya alam	100%	100%	84.144.000,00	61.432.400,00	30.122.400,00	-	54.021.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	61.432.400,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	24.451.700,00	14.998.400,00	4.938.400,00	-	19.513.300,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	14.998.400,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	2 Dokumen	22.013.900,00	14.339.400,00	6.329.400,00	-	15.684.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	14.339.400,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	37.678.400,00	32.094.600,00	18.854.600,00	-	18.823.800,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	32.094.600,00	Bagian Perekonomian
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan Di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100%	100%	990.598.900,00	990.598.900,00	968.584.300,00	-	22.014.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah dokumen kebijakan teknis dan jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	100%	990.598.900,00	990.598.900,00	968.584.300,00	-	22.014.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	974.084.300,00	974.084.300,00	963.834.300,00	-	10.250.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 Orang	20 Orang	11.764.600,00	11.764.600,00	-	-	11.764.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perentase Partai Politik yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	1.201.662.018,00	1.983.022.018,00	2.173.438.960,00	971.776.942,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	-
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan dan dibagikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.662.018,00	1.983.022.018,00	2.173.438.960,00	971.776.942,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian kesbangpol
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.182.577.968,00	1.182.577.968,00	1.392.078.960,00	200.500.992,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian kesbangpol
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	10 Orang	7.319.550,00	7.319.550,00	-	7.319.550,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian kesbangpol
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Keterbacaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	30 Orang	11.764.500,00	793.124.500,00	781.360.000,00	769.595.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian kesbangpol
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KEMASYARAKATA N	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina	31 Organisasi Kemasyara katan	31 Organisasi Kemasyara katan	47.600.100,00	47.600.100,00	14.504.500,00	33.095.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	-
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perberdayaan dan Pengawasan Ormas	1 Dokumen	1 Dokumen	47.600.100,00	47.600.100,00	14.504.500,00	33.095.600,00	-	-	0	-	Bagian kesbangpol
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	14.504.500,00	14.504.500,00	14.504.500,00	-	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian kesbangpol
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Orang	12 Orang	10.095.600,00	10.095.600,00	-	10.095.600,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian kesbangpol
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Orang	2 Orang	23.000.000,00	23.000.000,00	-	23.000.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian kesbangpol



Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

8.01.05	PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	83.739.300,00	74.931.500,00	47.558.100,00	-	36.181.200,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	-
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan dan Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	83.739.300,00	74.931.500,00	47.558.100,00	-	36.181.200,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	14.223.400,00	14.223.400,00	-	-	14.223.400,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27 Orang	27 Orang	63.015.900,00	54.208.100,00	47.558.100,00	-	15.457.800,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	100%	100%	509.912.100,00	472.912.100,00	438.335.600,00	-	71.576.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	-
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	509.912.100,00	472.912.100,00	438.335.600,00	-	71.576.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelermbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelermbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	26.331.500,00	26.331.500,00	23.400.000,00	-	2.931.500,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelermbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelermbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Orang	1 Orang	10.153.000,00	10.153.000,00	-	-	10.153.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelermbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelermbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.802.000,00	9.802.000,00	-	-	9.802.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pelaksanaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	463.625.600,00	426.625.600,00	414.935.600,00	-	48.690.000,00	Kab. Mempawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	Bagian Kesbangpol



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pengajuan usulan program, perumusan, penyusunan, verifikasi sampai dengan pengesahan dan penetapannya. Dalam proses ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki guna menuju kesempurnaan agar diperoleh kesesuaian dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya baik secara top down maupun bottom up.

Rumusan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan bagi Tim Forum Musrenbang dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dan menjadi pedoman unit kerja pelaksana lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja baik itu belanja operasi maupun belanja modal tahun anggaran 2025.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan.

Mempawah, Juli 2025
Sekretaris Daerah Kab. Mempawah,

Drs. ISMAIL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660508 199203 1 018



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



*SEKRETARIAT
DPRD*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat selesai dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah ini bisa disusun dengan baik. Semoga Allah SWT selalu menuntun kita.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah.

Mempawah, Juli 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan tujuan
	1.4. Sistematika penulisan
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Bab III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1. Tujuan
	3.2. Sasaran
	3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025. (RKPD),
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang,
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024 serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2025. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Gambaran umum program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran 2023	Realisasi s.d. Desember 2023	%	Alokasi anggaran 2024
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	25.817.723.470	24.226.244.243	94,57	28.631.027.919
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.050.000	24.444.829	97,78	25.000.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.934.400	98,69	5.000.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.413.537	96,54	2.500.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.488.770	99,35	2.500.000
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.420.027	96,80	2.500.000
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	2.403.595	96,14	2.500.000
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.709.310,00	97,89	10.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.802.876.496	2.580.869.149	92,10	3.002.392.262
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.376.406	2.511.287.619	91,91	2.926.312.262
b	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	49.790.645	82,99	54.080.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	14.917.906,00	99,45	15.000.000
d	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.973.670	99,47	5.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.399.900	18.262.202	99,25	18.399.900
a	Perubahan/kegiatan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.399.900	18.262.202	99,25	18.399.900
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	49.667.209	66,22	100.000.000
a	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Alat/Bekal Kelengkapannya	-	-	#DIV/0!	-
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	75.000.000	49.667.209	66,22	100.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.703.380.000	1.691.371.734	99,33	1.888.400.809
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penyalang Bangunan Kantor	40.000.000	37.774.490	94,44	40.000.000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.356.610	99,28	80.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.235.380.000	1.134.620.525	91,84	1.142.960.000
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengkodean	85.000.000	84.490.975,00	99,40	85.000.000
e	Penyediaan Bahan Sarana dan Peralatan Perundang-undangan	58.980.000	58.015.200	98,36	58.900.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	169.169.000	96,10	150.000.000
g	Perakusahan Atap Dinas pada SKPD	20.000.000	19.944.924	99,72	20.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.199.400	77.763.009	72,46	414.237.100
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.530.500	42.850.000	67,45	312.682.000
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.668.900	14.913.000	34,01	101.545.100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.929.264	830.479.419	75,30	1.226.034.256
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	588.000.000	327.891.790	55,73	588.000.000
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.929.264	502.786.614	97,64	606.034.256
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	812.242.300	584.979.962	72,02	1.496.598.309
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	506.963.300	297.176.102	58,62	506.963.300
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	87.295.700	87,30	100.000.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	96.412.000	96,41	700.995.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.990.000	99,97	30.000.000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.300.000	75.206.150	99,88	60.000.000
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.971.195.200	18.468.367.966	97,35	20.762.609.209
a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.470.345.200	18.016.051.966	97,53	20.439.905.200
b	Penyediaan Pakan Dinas dan Alat/Bekal DPRD	488.350.000	444.150.000	91,00	270.200.000
c	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	52.500.000	5.166.000	11,74	52.500.000
II	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	13.876.779.974	12.889.959.561	92,96	13.254.312.174
1	Pembastutan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	872.292.824	649.484.715	74,56	797.597.824
a	Penyusunan dan Pembastutan Program Pembastutan Peraturan Daerah	399.340.000	375.870.872	94,15	324.736.000
b	Pembastutan Rancangan Peraturan Daerah	255.132.224	193.515.743	75,85	255.132.224
c	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	67.730.600	-	0,00	67.730.600
d	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Haskan Akademik	150.000.000	160.000.000	106,67	150.000.000
2	Pembastutan Kebijakan Anggaran	100.000.000	90.650.455	90,65	526.000.000
a	Pembastutan Pertanggungjawaban APBD	100.000.000	90.650.455	90,65	-
b	Pembastutan APBD	-	-	-	280.000.000
c	Pembastutan APBD Perubahan	-	-	-	246.000.000
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	42.834.500	40.947.200	95,59	150.000.000
a	Pembastutan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	42.834.500	40.947.200,00	95,59	150.000.000
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.732.100.000	3.269.138.899	87,13	3.479.100.800
a	Pendalaman Tugas DPRD / Pembastutan Teknis DPRD	3.107.100.000	2.629.136.899	84,63	2.807.100.000
b	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	225.000.000	164.000.000	72,89	288.000.000
c	Penyediaan Tenaga Ahli Fungsional	400.000.000	276.000.000	69,00	384.000.000
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.366.805.950	2.278.813.999	96,28	2.366.805.950
a	Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.000.000	23.135.000	23,14	100.000.000
b	Pelaksanaan Reses	2.266.805.950	2.255.678.999	99,51	2.266.805.950
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	42.029.200	-	-	-
a	Penyusunan Kode Etik DPRD	42.029.200	-	-	-
7	Pembastutan Kerja Sama Daerah	190.608.400	165.382.095	86,77	190.608.400
a	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	190.608.400	165.382.095	86,77	190.608.400
8	Facilitasi Tugas DPRD	6.510.200.000	6.376.540.467	97,95	5.750.200.800
a	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.510.200.000	6.376.540.467	97,95	5.750.200.800
TOTAL		39.494.653.344	37.126.265.824	94,00	41.895.339.192

Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program / kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD,
2. Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi,
3. Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada,
4. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja OPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup,
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD,
4. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan berbagai pihak ,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya,
2. Kerjasama dengan pihak *stakeholders* maupun OPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan,
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya,
4. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan berbagai pihak terutama ke BPKAD dan Bappeda,terkait dengan perencanaan dan penganggaran,
2. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan,

3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya,
4. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2021.

2.2.1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.2.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada umumnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting,
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan,
3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah antara lain :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal,
2. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
3. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD,
4. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah,
5. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD,
6. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Sekretariat DPRD dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurung waktu selama 1 tahun dengan tujuan yang dapat dirinciakan sbb:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 dan 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.
2. Mengarahkan Visi Bupati Mempawah kedalam suatu strategi pembangunan yang akan di laksanakan tahun 2025.
3. Menyusun Kebijakan pembangunan Sekretariat DPRD yang dituangkan Kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025.
4. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan

3.2. Sasaran

Adapun sasaran penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabuapten Mempawah secara umum adalah terjabarkannya rencana strategi (rentra) Sekretariat DPRD kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 kedalam dokumen rencana tahunan yang meliputi:

1. Kerangka pembangunan dan penganggaran tahun 2025.
2. Indikasi Kegiatan pembangunan DPRD tahun 2025.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun rumusan program dan kegiatan prioritas utama tahun 2025 adalah seperti berikut :

**RANCANGAN AWAL RENJA OPD
TAHUN 2025**

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD		46.095.804.131,00	0,00	0,00	46.095.804.131,00	50.681.624.545,00	
4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		46.095.804.131,00	0,00	0,00	46.095.804.131,00	50.681.624.545,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		31.522.629.720,00	0,00	0,00	31.522.629.720,00	34.674.892.692,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	
			Target:					
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1 Laporan)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	12.100.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	3.302.631.488,00	0,00	0,00	3.302.631.488,00	3.632.894.637,00	
			Target:					
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (31 Orang/bulan)	3.221.143.488,00	0,00	0,00	3.221.143.488,00	3.543.257.837,00	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (4 Dokumen)	59.488.000,00	0,00	0,00	59.488.000,00	65.436.800,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2 Laporan)	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	18.150.000,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (1 Laporan)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	20.239.890,00	0,00	0,00	20.239.890,00	22.263.879,00	
		Target:						
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 Laporan)	20.239.890,00	0,00	0,00	20.239.890,00	22.263.879,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	136.000.000,00	0,00	0,00	136.000.000,00	149.600.000,00	
		Target:						
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (1 Paket)	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	28.600.000,00	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (20 Orang)	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	1.743.940.000,00	0,00	0,00	1.743.940.000,00	1.918.334.000,00	
		Target:						
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (2 Paket)	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	48.400.000,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (10 Paket)	97.900.000,00	0,00	0,00	97.900.000,00	107.690.000,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (36 Paket)	1.257.190.000,00	0,00	0,00	1.257.190.000,00	1.382.909.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (10 Paket)	93.500.000,00	0,00	0,00	93.500.000,00	102.850.000,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (4 Dokumen)	64.350.000,00	0,00	0,00	64.350.000,00	70.785.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (28 Laporan)	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	181.500.000,00	
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1 Dokumen)	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.200.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator: Sasaran:	455.660.810,00	0,00	0,00	455.660.810,00	501.226.891,00	
		Target:						
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (219 Unit)	343.961.200,00	0,00	0,00	343.961.200,00	378.357.320,00	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (9 Unit)	111.699.610,00	0,00	0,00	111.699.610,00	122.869.571,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	1.348.637.682,00	0,00	0,00	1.348.637.682,00	1.483.501.450,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	Target:					
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (36 Laporan)	646.800.000,00	0,00	0,00	646.800.000,00	711.480.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (26 Laporan)	701.837.682,00	0,00	0,00	701.837.682,00	772.021.450,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	1.646.654.130,00	0,00	0,00	1.646.654.130,00	1.811.319.543,00	
		Sasaran:	Target:					
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (3 Unit)	557.659.630,00	0,00	0,00	557.659.630,00	613.425.593,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (8 Unit)	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2 Unit)	879.994.500,00	0,00	0,00	879.994.500,00	967.993.950,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	36.300.000,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	72.600.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indikator:	22.838.865.720,00	0,00	0,00	22.838.865.720,00	25.122.752.292,00	
		Sasaran:	Target:					
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (35 Orang/Bulan)	22.483.895.720,00	0,00	0,00	22.483.895.720,00	24.732.285.292,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (4 Paket)	297.220.000,00	0,00	0,00	297.220.000,00	326.942.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (35 Orang)	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	63.525.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		14.573.174.411,00	0,00	0,00	14.573.174.411,00	16.006.731.853,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indikator:	877.357.606,00	0,00	0,00	877.357.606,00	965.093.367,00	
		Sasaran:	Target:					
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (26 Dokumen)	357.208.500,00	0,00	0,00	357.208.500,00	392.929.350,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (30 Dokumen)	280.645.446,00	0,00	0,00	280.645.446,00	308.709.991,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	Target:					
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (36 Laporan)	646.800.000,00	0,00	0,00	646.800.000,00	711.480.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (26 Laporan)	701.837.682,00	0,00	0,00	701.837.682,00	772.021.450,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Berang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	1.646.654.130,00	0,00	0,00	1.646.654.130,00	1.811.319.543,00	
		Sasaran:	Target:					
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (3 Unit)	557.659.630,00	0,00	0,00	557.659.630,00	613.425.593,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (8 Unit)	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2 Unit)	879.994.500,00	0,00	0,00	879.994.500,00	967.993.950,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	36.300.000,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	72.600.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indikator:	22.838.865.720,00	0,00	0,00	22.838.865.720,00	25.122.752.292,00	
		Sasaran:	Target:					
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (35 Orang/Bulan)	22.483.895.720,00	0,00	0,00	22.483.895.720,00	24.732.285.292,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (4 Paket)	297.220.000,00	0,00	0,00	297.220.000,00	326.942.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (35 Orang)	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	63.525.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		14.573.174.411,00	0,00	0,00	14.573.174.411,00	16.006.731.853,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indikator:	877.357.606,00	0,00	0,00	877.357.606,00	965.093.367,00	
		Sasaran:	Target:					
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (26 Dokumen)	357.208.500,00	0,00	0,00	357.208.500,00	392.929.350,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (30 Dokumen)	280.645.446,00	0,00	0,00	280.645.446,00	308.709.991,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (205 Dokumen)	6.325.220.000,00	0,00	0,00	6.325.220.000,00	6.957.742.000,00	

PERUBAHAN BENCIKAK KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KAB. MEMPRAH
TAHUN 2025

[illegible]

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mompowahi

4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan/Obat Ikan di Balai Nalungaperyn																		
		Jual Beli Pakan Ikan dan Obat Ikan di Balai Nalungaperyn				1 Paket	1 Paket	29.300.000,00	0,00	0,00	-29.300.000,00	Kas. Monevial Serta Rekamasi, Serta GEDDA	DANA MONEV URUN (SAU)	Mengikuti adanya pak, hukum dan sistem, serta mengikuti pengawasan pemberian kang, naha, jati dan pengawasan			0,00	SEKUTAMAT DPD	
4.01.01.2.05.0003	Subsidi Perawatan/Perawatan Ikan																		
		Jual Beli Obat yang Mengikuti Sistem Perawatan Perawatan Ikan				30 Paket	30 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	96.800.000,00	-97.800.000,00	Kas. Monevial Serta Rekamasi, Serta GEDDA	PAJAK BARANG DAN JASA TETAPAN (PKT)	Mengikuti adanya pak, hukum dan sistem, serta mengikuti pengawasan kang, naha, jati dan pengawasan	100 Paket 100 Paket			0,00	SEKUTAMAT DPD
4.01.01.2.05	Subsidi Ikan Perawatan Ikan	Perawatan ikan di Balai Nalungaperyn				100 Paket	100 Paket	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.140.000.000,00	-100.000.000,00			Mengikuti adanya pak, hukum dan sistem, serta mengikuti pengawasan kang, naha, jati dan pengawasan	100 Paket 100 Paket			0,00	SEKUTAMAT DPD
4.01.01.2.05.0004	Pengadaan Pakan/Obat Ikan di Balai Nalungaperyn																		
		Jual Beli Pakan Ikan dan Obat Ikan yang Mengikuti Sistem Perawatan Ikan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	96.800.000,00	-86.800.000,00	Kas. Monevial Serta Rekamasi, Serta GEDDA	PAJAK BARANG DAN JASA TETAPAN (PKT)	Mengikuti adanya pak, hukum dan sistem, serta mengikuti pengawasan kang, naha, jati dan pengawasan	100 Paket 100 Paket			0,00	SEKUTAMAT DPD
4.01.01.2.05.0005	Pengadaan Pakan/Obat Ikan di Balai Nalungaperyn																		
		Jual Beli Pakan Ikan dan Obat Ikan yang Mengikuti Sistem Perawatan Ikan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	96.800.000,00	-86.800.000,00	Kas. Monevial Serta Rekamasi, Serta GEDDA	PAJAK BARANG DAN JASA TETAPAN (PKT)	Mengikuti adanya pak, hukum dan sistem, serta mengikuti pengawasan kang, naha, jati dan pengawasan	100 Paket 100 Paket			0,00	SEKUTAMAT DPD
4.01.01.2.05.0006	Pengadaan Pakan/Obat Ikan di Balai Nalungaperyn																		
		Jual Beli Pakan Ikan dan Obat Ikan yang Mengikuti Sistem Perawatan Ikan				10 Paket	10 Paket	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.740.000.000,00	-100.000.000,00	Kas. Monevial Serta Rekamasi, Serta GEDDA	PAJAK BARANG DAN JASA TETAPAN (PKT)	Mengikuti adanya pak, hukum dan sistem, serta mengikuti pengawasan kang, naha, jati dan pengawasan	100 Paket 100 Paket			0,00	SEKUTAMAT DPD
4.01.01.2.05.0007	Pengadaan Pakan/Obat Ikan di Balai Nalungaperyn																		
		Jual Beli Pakan Ikan dan Obat Ikan yang Mengikuti Sistem Perawatan Ikan				10 Paket	10 Paket	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.740.000.000,00	-100.000.000,00	Kas. Monevial Serta Rekamasi, Serta GEDDA	PAJAK BARANG DAN JASA TETAPAN (PKT)	Mengikuti adanya pak, hukum dan sistem, serta mengikuti pengawasan kang, naha, jati dan pengawasan	100 Paket 100 Paket			0,00	SEKUTAMAT DPD

[illegible]

4.02.01.2.01.000	Pengisian Kalendar Perunggu Desa atau Kalendar Desa Jember																		
		Jumlah Unit Kalendar Perunggu Desa atau Kalendar Desa Jember yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	2.750.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	480.000.000,00	Rib. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus Desa	PLUK MPR/BA BUKAN LOGAN DAN BATUKAN	Mengumpul. submanipulasi, kalendar (buku) atau perangkat pengumpul dan pemberitahuan kalendar, kalender, jdl, dan pengumpulan.	100 Salip 100 Salip			0,00	STW027ABMT D192
4.02.01.2.01.006	Pengisian Papan dan Meja Lainnya																		
		Jumlah Unit Papan dan Meja Lainnya yang Dikembangkan				1 Unit		0,00	11.104.000,00	11.104.000,00	15.104.000,00	Rib. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus Desa	SSA LTBH PERHUTAN AWIGANAN TIRANIS SCSLUNNYA		1000 Ciri 1000 Ciri			0,00	STW027ABMT D192
4.02.01.2.01.007	Pengisian Salaku dan Papan dan Meja Lainnya																		
		Jumlah Unit Salaku dan Papan dan Meja Lainnya yang Dikembangkan				20 Unit	20 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	10.000.000,00	Rib. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus Desa	PLUK MPR/BA BUKAN LOGAN DAN BATUKAN BUKAN PERHUTAN AWIGANAN TIRANIS BUKAN SCSLUNNYA SSA LTBH PERHUTAN AWIGANAN TIRANIS SCSLUNNYA PLUK BARANG DAN MSA TIRANIS/RETI	Mengumpul. submanipulasi, kalendar (buku) atau perangkat pengumpul dan pemberitahuan kalendar, kalender, jdl, dan pengumpulan.	100 Salip 100 Salip			0,00	STW027ABMT D192
4.02.01.2.01.007	Pengisian Salaku dan Papan dan Meja Lainnya																		
		Jumlah Unit Salaku dan Papan dan Meja Lainnya yang Dikembangkan				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	6.123.000,00	6.123.000,00	10.000.000,00	Rib. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus Desa	SSA LTBH PERHUTAN AWIGANAN TIRANIS SCSLUNNYA	Mengumpul. submanipulasi, kalendar (buku) atau perangkat pengumpul dan pemberitahuan kalendar, kalender, jdl, dan pengumpulan.	100 Salip 100 Salip			0,00	STW027ABMT D192
4.02.01.2.01	Penyediaan Jasa/Perangai	Perangkat komunikasi				100 Person	100 Person	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	10.000.000,00			Mengumpul. submanipulasi, kalendar (buku) atau perangkat pengumpul dan pemberitahuan kalendar, kalender, jdl, dan pengumpulan.	100 Salip 100 Salip			0,00	STW027ABMT D192
4.02.01.2.01.000	Penyediaan Jasa/Perangai																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa/Perangai				10 Laporan	10 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	10.000.000,00	Rib. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus Desa	SSA LTBH PERHUTAN AWIGANAN TIRANIS SCSLUNNYA	Mengumpul. submanipulasi, kalendar (buku) atau perangkat pengumpul dan pemberitahuan kalendar, kalender, jdl, dan pengumpulan.	100 Salip 100 Salip			0,00	STW027ABMT D192
4.02.01.2.01.000	Penyediaan Jasa/Perangai																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa/Perangai				10 Laporan	10 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	10.000.000,00	Rib. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus Desa	SSA LTBH PERHUTAN AWIGANAN TIRANIS SCSLUNNYA	Mengumpul. submanipulasi, kalendar (buku) atau perangkat pengumpul dan pemberitahuan kalendar, kalender, jdl, dan pengumpulan.	100 Salip 100 Salip			0,00	STW027ABMT D192

NO	KODE	URAIAN / RENCANA URAIAN / PROGRAM / KELOMPOK / SUB KELOMPOK	REKAM / PROGRAM / KELOMPOK / SUB KELOMPOK	TANGGAL KENDARAAN / SUB KELOMPOK	REKAM / KENDARAAN / SUB KELOMPOK	REKAM / KENDARAAN / SUB KELOMPOK	CAPAIAN KENDARAAN (MILITARI) KENDARAAN										KELOMPOK KENDARAAN	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB		REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	
							TANGGAL / SUB		REKAM / KENDARAAN (MILITARI)			REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB			TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB		REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB
							REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB				REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB	REKAM / KENDARAAN TANGGAL / SUB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pengiriman dan Pengiriman Lain Kendaraan yang Berhasil				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.001		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.002		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.003		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.004		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.005		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.006		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.007		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.008		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.009		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.01.2.01.010		Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain	Pengiriman barang Mili dan Pengiriman Lain Pengiriman Lain				10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	

NO	KODE	URUSAN / RUMAH SAKIT / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARUJET MEREK PENCANA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN BERTAHAP	PENCANAAN TARIKAT TARIKAT TARIKAT	CAPAIAN KEBERHASILAN DAN KEMERDEKAAN PENCANAAN										KELUARAN SASARAN	PENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2025		PENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2025	
							TARUJET MEREK		PENCANAAN KEGIATAN (Rp)			Indikator Keberhasilan (TB / TB)	LOKASI	Jumlah Orang	PENCANAAN KEGIATAN			TARUJET	PENCANAAN KEGIATAN (Rp)		
							SUBJUK	SUBJUK	2025-2025	2025-2025	2025-2025				INDUKSI	INDUKSI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.02.02.201.001		Pengembangan dan Peningkatan Program Pendidikan Profesi dan Studi																			
			Jumlah Dokumen / Hasil Pengembangan dan Peningkatan Program Pendidikan Profesi dan Studi				10 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000.00	20.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	Rak. Mengajar, Sertifikasi, Sertifikasi, Sertifikasi	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.02.201.002		Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi																			
			Jumlah Dokumen / Hasil Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi				10 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	Rak. Mengajar, Sertifikasi, Sertifikasi, Sertifikasi	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	
4.02.02.201.003		Pengembangan dan Peningkatan Program Pendidikan Profesi dan Studi																			
			Jumlah Dokumen / Hasil Pengembangan dan Peningkatan Program Pendidikan Profesi dan Studi				10 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000.00	20.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	Rak. Mengajar, Sertifikasi, Sertifikasi, Sertifikasi	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.02.201.004		Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi																			
			Jumlah Dokumen / Hasil Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi				10 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000.00	20.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	Rak. Mengajar, Sertifikasi, Sertifikasi, Sertifikasi	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.02.201.005		Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi																			
			Jumlah Dokumen / Hasil Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi				10 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000.00	20.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	Rak. Mengajar, Sertifikasi, Sertifikasi, Sertifikasi	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.02.201.006		Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi																			
			Jumlah Dokumen / Hasil Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi				10 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000.00	20.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	Rak. Mengajar, Sertifikasi, Sertifikasi, Sertifikasi	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
4.02.02.201.007		Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi																			
			Jumlah Dokumen / Hasil Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi dan Studi				10 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000.00	20.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	Rak. Mengajar, Sertifikasi, Sertifikasi, Sertifikasi	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	

4.02.02.2.02.000	Pendataan APBD	Jumlah Eksternal Hasil Pendataan APBD			1 Dekat	1 Dekat	380.000.000,00	380.000.000,00	140.000.000,00	-177.000.000,00	Rak. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus RT/Desa	SAJANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN	Mengumpul informasi publik, namun dari informasi yang terkumpul pengorganisasian dan koordinasi kelompok, melalui juk, dan pengumpulan.	Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)			000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.000	Pendataan APBD	Jumlah Eksternal Hasil Pendataan APBD			1 Dekat	1 Dekat	380.000.000,00	380.000.000,00	140.000.000,00	-177.000.000,00	Rak. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus RT/Desa	SAJANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN	Mengumpul informasi publik, namun dari informasi yang terkumpul pengorganisasian dan koordinasi kelompok, melalui juk, dan pengumpulan.	Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)			000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			100	100 Person	400.000.000,00	400.000.000,00	40.000.000,00	-70.000.000,00			Mengumpul informasi publik, namun dari informasi yang terkumpul pengorganisasian dan koordinasi kelompok, melalui juk, dan pengumpulan.	Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)			000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.000	Pendataan Laporan Keuangan	Pengawasan Laporan Keuangan	Jumlah Eksternal Hasil Pendataan Laporan Keuangan		1 Dekat	1 Dekat	400.000.000,00	400.000.000,00	40.000.000,00	-70.000.000,00	Rak. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus RT/Desa	SAJANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN	Mengumpul informasi publik, namun dari informasi yang terkumpul pengorganisasian dan koordinasi kelompok, melalui juk, dan pengumpulan.	Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)			000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Pengawasan Kegiatan DPRD	Pengawasan Kegiatan DPRD	Jumlah Eksternal Hasil Pendataan Laporan Keuangan		100 Person	100 Person	400.000.000,00	400.000.000,00	40.000.000,00	-70.000.000,00			Mengumpul informasi publik, namun dari informasi yang terkumpul pengorganisasian dan koordinasi kelompok, melalui juk, dan pengumpulan.	Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)			000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.000	Pendataan Tugan DPRD	Jumlah Eksternal Hasil Pendataan Tugan DPRD			1 Dekat	1 Dekat	400.000.000,00	400.000.000,00	40.000.000,00	-70.000.000,00	Rak. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus RT/Desa	SAJANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN	Mengumpul informasi publik, namun dari informasi yang terkumpul pengorganisasian dan koordinasi kelompok, melalui juk, dan pengumpulan.	Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)			000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.000	Pendataan Tugan DPRD	Jumlah Eksternal Hasil Pendataan Tugan DPRD			1 Dekat	1 Dekat	400.000.000,00	400.000.000,00	40.000.000,00	-70.000.000,00	Rak. Mengumpul. Sensus Kecamatan Sensus RT/Desa	SAJANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN SARANG BUKAN	Mengumpul informasi publik, namun dari informasi yang terkumpul pengorganisasian dan koordinasi kelompok, melalui juk, dan pengumpulan.	Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)			000	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap pengembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan perubahan indikator kinerja sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai Panduan Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sehingga pelaksanaan program-program Pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Mempawah, Juli 2025





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RENCANA KERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dalam konteks kebijakan desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil perlu segera menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu diharapkan masukan maupun saran dari berbagai pihak dalam kesempurnaan RENJA ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini.

Mempawah, Juli 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH




FIRDAUS, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720614 199803 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasa Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah	2
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah	11
2.4 Reviu Terhadap RKPD	13
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah	5
3.3 Program dan Kegiatan	7
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	1
 BAB V PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	3
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja	6
Tabel 2.3 Rencana Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun Anggaran 2025	14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	6
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	2
Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah	22

DAFTAR LAMPIRAN

- Matriks Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah
- Matriks Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu segera menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah berdasarkan pada rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD)

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini telah disusun melalui rumusan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja yang disusun mengacu kepada RENSTRA;
2. Rencana Kerja yang disusun atas pertimbangan realistis
3. Rencana Kerja disusun bersama Pimpinan dan Staf;
4. Rencana Kerja telah berisi target-target kinerja
5. Target-target dalam rencana kerja terkait langsung dengan sasaran sasaran yang ditetapkan

Rencana Kerja (RENJA) digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga digunakan untuk "*Service Agreement*" atau Komitmen Kinerja ataupun "*Performance Agreement*" yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



11. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);\
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);



20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Selanjutnya Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah
- 2.4 Review terhadap RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah selama tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



2.1.2 Capaian Analisis Keuangan dan Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data keuangan dan kinerja, meliputi:

a. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Total Anggaran Belanja setelah perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 adalah sebesar Rp.7.928.282.004,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.532.477.852,00 atau 95,01%. Anggaran tersebut merupakan Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.5.289.536.198,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.638.745.806,00.

Pelaksanaan Renja 2025 diselenggarakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga dilakukan pemutahiran Nama Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 serta diaplikasikan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Rincian Evaluasi Hasil Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.1
INSPEKTORAT DAERAH
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2023

kode rekening	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN (LEBIH KURANG)	%	KET
1	2	3	3	4	5	6
6	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6 01 01	<u>INSPEKTORAT DAERAH</u>	7.529.282.064,00	7.632.477.862,00	386.684.162,00	96,61	
6 01 01	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</u>	5.932.670.068,00	6.681.021.288,00	251.548.880,00	96,76	
6 01 01 301	<u>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</u>	27.680.000,00	27.113.190,00	386.810,00	98,69	
6 01 01 301 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.998.500,00	1.500,00	99,97	
6 01 01 301 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.080.000,00	1.934.625,00	65.375,00	96,73	
6 01 01 301 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penjabaran RKA-SKPD	1.580.000,00	1.486.235,00	33.765,00	97,75	
6 01 01 301 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.580.000,00	2.437.880,00	82.110,00	97,52	
6 01 01 301 05	Koordinasi dan Penyusunan Penjabaran DPA-SKPD	1.580.000,00	1.439.015,00	80.985,00	95,83	
6 01 01 301 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.836.925,00	163.075,00	98,91	
6 01 01 302	<u>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</u>	5.312.836.198,00	6.087.681.968,00	215.274.230,00	96,95	
6 01 01 302 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.288.686.198,00	5.763.949.733,00	214.736.475,00	96,92	
6 01 01 302 03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.150.000,00	24.080.780,00	89.220,00	99,63	
6 01 01 302 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.759.315,00	240.685,00	98,40	
6 01 01 302 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	5.000.000,00	4.782.190,00	217.810,00	95,64	
6 01 01 303	<u>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</u>	11.689.700,00	11.384.580,00	305.280,00	97,39	
6 01 01 303 02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.689.700,00	11.384.580,00	305.280,00	97,39	
6 01 01 306	<u>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</u>	114.322.700,00	112.728.623,00	1.594.077,00	98,61	
6 01 01 306 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72.580.000,00	71.737.923,00	782.077,00	98,95	
6 01 01 306 11	Simbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.822.700,00	40.980.700,00	832.000,00	98,01	
6 01 01 306	<u>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</u>	173.422.400,00	171.482.750,00	1.939.650,00	98,88	
6 01 01 306 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pengantian Bangunan Kantor	4.631.500,00	4.687.050,00	24.450,00	99,47	
6 01 01 306 02	Penyediaan Pesakot dan Peralengkapan Kantor	30.477.000,00	29.480.250,00	1.016.750,00	96,66	
6 01 01 306 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.580.000,00	19.310.000,00	190.000,00	99,63	
6 01 01 306 05	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	16.584.500,00	16.402.135,00	182.365,00	99,38	
6 01 01 306 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.080.000,00	84.682.315,00	387.685,00	99,68	
6 01 01 306 10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	7.389.400,00	7.011.000,00	288.400,00	95,82	
6 01 01 308	<u>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</u>	289.835.300,00	181.293.337,00	28.541.963,00	86,40	
6 01 01 308 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.080.000,00	99.789.463,00	27.290.537,00	78,51	
6 01 01 308 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.835.300,00	81.583.874,00	1.251.426,00	98,49	
6 01 01 309	<u>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</u>	82.563.800,00	79.446.840,00	3.586.960,00	96,77	
6 01 01 309 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Keadaan Pemrosesan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.884.640,00	42.715.540,00	1.169.100,00	97,39	
6 01 01 309 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.679.160,00	20.571.380,00	2.387.880,00	89,91	
6 01 01 309 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.080.000,00	7.580.000,00	10.080,00	99,88	
6 01 01 309 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.290.000,00	3.290.000,00	-	100,00	
6 01 01 309 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	



KODE REKEMING	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN (LEBIH KURANG)	%	KET
1	2	3	3	4	5	6
6 01 02	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</u>	1,675,122,900.00	1,582,521,000.00	112,601,580.00	93.29	
6 01 02 201	<u>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</u>	1,163,072,400.00	1,067,484,270.00	95,578,130.00	91.71	
6 01 02 201 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52,875,700.00	49,130,725.00	3,744,975.00	92.92	
6 01 02 201 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	580,080,000.00	520,916,825.00	59,063,175.00	89.81	
6 01 02 201 03	Revisi Laporan Kinerja	14,881,600.00	7,150,865.00	7,660,735.00	48.31	
6 01 02 201 04	Revisi Laporan Keuangan	87,347,100.00	47,541,865.00	39,805,245.00	70.59	
6 01 02 201 05	Pengawasan Desa	329,639,700.00	325,073,985.00	4,762,715.00	98.59	
6 01 02 201 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	108,211,300.00	107,680,015.00	531,285.00	99.51	
6 01 02 202	<u>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</u>	522,050,200.00	585,026,750.00	17,023,450.00	96.74	
6 01 02 202 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah	80,640,000.00	96,173,525.00	4,686,475.00	92.33	
6 01 02 202 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	481,210,200.00	448,653,225.00	12,359,975.00	97.32	
6 01 03	<u>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</u>	320,689,306.00	288,935,624.00	31,653,682.00	90.13	
6 01 03 201	<u>PERUMUSAN KEBIJAKAN TERKAIT DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN</u>	105,711,106.00	105,283,764.00	447,342.00	99.58	
6 01 03 201 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	78,570,506.00	78,383,064.00	187,442.00	99.76	
6 01 03 201 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	27,140,600.00	26,880,700.00	259,900.00	99.04	
6 01 03 202	<u>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</u>	214,878,200.00	183,671,860.00	31,206,340.00	85.48	
6 01 03 202 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29,575,600.00	22,367,810.00	7,177,790.00	75.73	
6 01 03 202 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	17,362,200.00	17,241,515.00	110,685.00	99.36	
6 01 03 202 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Penguatan Sistem	81,980,700.00	81,233,350.00	747,350.00	98.79	
6 01 03 202 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas	105,960,700.00	82,789,185.00	23,170,515.00	78.13	
	TOTAL JUMLAH	7,538,282,064.00	7,532,477,862.00	386,804,162.00	95.81	

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD)



b. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Inspektorat Daerah disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.2
INSPEKTORAT DAERAH
TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2020 – 2023

SASARAN		SATUAN	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN					KET
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																		
SEBELUM PERUBAHAN																		
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	%	82,00	85,00	90,00			100,00	143,13	98,05			121,95	168,39	108,94			
	2. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	%	96,00	97,00	98,00			100,00	88,10	83,63			104,17	90,82	85,34			
	3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan APSP dan Eksternal	%	84,00	88,00	92,00			99,48	99,77	95,84			118,43	113,38	104,17			
2. Mempertahankan Maturitas SPIP	- Nilai Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	2,89			100,00	100,00	96,33			
3. Mempertahankan Kapabilitas APSP	- Level Maturitas APSP	Level	3	3	3			3	3	3			100,00	100,00	100,00			
SETELAH PERUBAHAN																		
1. Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	- Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal (Nilai)	%				13,00	13,00				13,01	0,00			100,00	0,00		
2. Meningkatnya Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	- Nilai Maturitas SPIP	Level				3,00	3,00				3,00	0,00			100,00	0,00		
	- Level Maturitas APSP	Level				3	3				3	0,00			100,00	0,00		
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)																		
SEBELUM PERUBAHAN																		
1. Mempertahankan Maturitas SPIP	- Nilai Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	2,89			100,00	100,00	96,33			
2. Mempertahankan Kapabilitas APSP	- Level Maturitas APSP	Level	3	3	3			3	3	3			100,00	100,00	100,00			
SETELAH PERUBAHAN																		
1. Meningkatnya Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	- Nilai Maturitas SPIP	Level				3,00	3,00				3,00	0,00			100,00	0,00		
	- Level Maturitas APSP	Level				3	3				3	0,00			100,00	0,00		

Sumber :

- Hasil Revisi Kementerian PAN-RB sesuai Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/382/AA/05/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 03 September 2024
- Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024
- Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 026 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024
- Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor PE 09.03/S-543/D3/04/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APSP Daerah Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024



Penjelasan terkait capaian IKU pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Pencapaian realisasi pada Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

- Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Capaian ini pada tahun 2022 sebesar 98,05% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90,00% sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan hingga batas akhir tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan maksimal dan optimal
- Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Alokasi Dana Desa) atas LHP ADD yang terbit
Capaian ini pada tahun 2022 sebesar 83,63% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98,00% sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan hingga batas akhir tahun anggaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan optimal
- Persentase Rekomendasi Hasil Temuan Pengawasan yang Ditindalanjuti
Capaian ini pada tahun 2022 sebesar 95,84% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92,00% sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan hingga batas akhir tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan maksimal dan optimal

2. Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan laporan Pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Nomor PE12.03/S-1678/PW14/3/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah disimpulkan bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mempawah telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (terdefinisi)



3. Level Kapabilitas APIP

Hasil dari pelaksanaan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah telah berada pada Level 3.

Sedangkan pada tahun 2023 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah sesuai Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 026 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 maka Pencapaian realisasi tahun 2023 yaitu pada :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal

- Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Capaian pada Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal sesuai Hasil Reviu Kementerian PAN-RB sesuai Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/465/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 maka didapat pada nilai 13.01 dibandingkan dengan target yaitu sebesar 13.00 sehingga persentase capaian menjadi sebesar 100,08%

2. Meningkatnya Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

- Level Maturitas SPIP
- Level Maturitas APIP

Capaian realisasi ini sesuai Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, Tanggal 28 Desember 2023 disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah telah berada pada Level 3 baik pada Level Maturitas SPIP maupun Maturitas APIP



Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Kebijakan manajemen risiko belum mencakup struktur pengelola risiko baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
2. Perangkat daerah telah mengidentifikasi sebagian risiko operasional, namun belum menentukan prioritas risiko dan menyusun rencana tindak pengendalian yang efektif dalam menurunkan risiko;
3. Pengelolaan risiko strategis baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal;
4. Pengelolaan risiko di Pemerintah Kabupaten Mempawah belum mencakup pengelolaan risiko fraud dan risiko kemitraan;
5. Pengelolaan risiko belum melekat pada proses bisnis Pemerintah Kabupaten Mempawah;
6. Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan tetapi belum menjangkau seluruh kegiatan utama Pemerintah Kabupaten Mempawah dan belum didukung penetapan struktur pengelola risiko korupsi;
7. Kegiatan edukasi antikorupsi belum dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terstruktur pada Perangkat Daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- a) Kurang efektif dan efisien dalam ketepatan waktu penyampaian serta kelengkapan dokumen pendukung pada objek pemeriksaan yang harus dipenuhi, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan menjadi terhambat dan berakibat keterlambatan hasil pemeriksaan.
- b) Dana yang ada belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. Pemenuhan target pelaksanaan kegiatan serta adanya pelaksanaan kegiatan mandatory yang tidak tersedia anggaran, sehingga target pemeriksaan yang seharusnya dilaksanakan hingga berakhirnya masa tahun anggaran mengalami perubahan serta pengalihan beberapa anggaran yang mempengaruhi juga dalam realisasi dan pelaporannya.
- c) Sumber Daya Aparatur (SDA) yang masih kurang serta minimnya pengembangan kapasitas APIP sehingga terdapat beberapa kegiatan wajib serta mandatory yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kurangnya kompetensi yang dipersyaratkan.



Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Tim pemeriksa senantiasa selalu mengingatkan objek pemeriksaan untuk memberikan data pendukung yang diberikan tepat pada waktunya.
- b) Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pengadaan Komputer PC/Laptop.
- c) Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penambahan dana kegiatan khususnya dalam menunjang kegiatan wajib Inspektorat berdasarkan Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta kegiatan – kegiatan mandatory dari pusat.
- d) Mengusulkan ke instansi terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menambah personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berpendidikan minimal S-1/D-IV ke Inspektorat Daerah baik sebagai pejabat fungsional tertentu (Auditor atau P2UPD) maupun di Sekretariat.
- e) Mengusulkan ke instansi terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat menyediakan pengembangan kapasitas APIP dalam memenuhi persyaratan baik pelaksanaan kegiatan wajib dan mandatory maupun alih jenjang jabatan fungsional.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.



2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan SKPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada SKPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala SKPD, namun hal terkait dengan pemberian pelayanan kepada Kepala SKPD masih rendah karena kurangnya komitmen dari masing-masing Kepala SKPD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
 - a. Kurang meratanya aparat yang profesional

Aparat yang profesional di Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah kurang merata sehingga belum tercapainya sikap profesionalisme pegawai dalam melakukan pekerjaan. Dimana dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan performance yang baik sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya misi organisasi.

Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan tenaga fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah, maka hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam hal ini Inspektorat Daerah senantiasa mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga fungsional tersebut. Dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.



b. Kurangnya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah untuk mendukung kegiatan organisasi mengalami keterbatasan seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk masing-masing Tim Pemeriksa menjadi salah satu hambatan menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional menuju terciptanya efisiensi dan efektifitas organisasi serta upaya organisasi mewujudkan misi organisasi.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

a. Tantangan

Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;

b. Peluang

Peluang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah. Dengan demikian peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

(1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat Reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance.

(2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam



menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan- peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.

2.3 Review terhadap RKPD

Dalam RKPD, Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah mengusulkan anggaran sebesar Rp.11.897.100.000,00 yang direncanakan dipergunakan untuk keperluan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa untuk mencapai sasaran Strategis tahun 2025. Dari total Rancangan anggaran tersebut, sebesar Rp.2.672.000.000,00 untuk keperluan kegiatan inti dalam mencapai target kinerja SKPD. Dengan besaran anggaran tersebut, rencana capaian kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



INSPEKTORAT DAERAH
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

Tabel 2.3
INSPEKTORAT DAERAH
RENCANA TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (TARGET)	2025		RET
				TARGET	NEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7
9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
9.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
	• Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan	Persentase	95	90	8.225.180.000.00	
	• Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase	100	100	37.560.000.00	
9.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5.500.000.00	
9.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	
9.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Dokumen	1	1	4.000.000.00	
9.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	
9.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	
9.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	17.000.000.00	
9.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.000.000.00	
9.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
9.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	95	90	8.180.020.020.00	
9.01.01.2.02.0002	Pelaksanaan Pengkreditan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	27.000.000.00	
9.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	17.000.000.00	
9.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	6.000.000.00	
9.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH					
9.01.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	100	13.020.050.00	
	• Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase	100	100	13.020.050.00	
	• Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	13.000.000.00	
9.01.01.2.04	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					
9.01.01.2.04.0002	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Akibat Kelengkapan	Paket	90	90	130.000.000.00	
9.01.01.2.04.0012	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	1	1	30.000.000.00	
	• Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase	90	90	130.000.000.00	
	• Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	0	0	-	
9.01.01.2.04.0010	Rozakasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	55	10	45.000.000.00	
9.01.01.2.04.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	5	47.000.000.00	
	• Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	Persentase	100	100	180.100.020.00	
9.01.01.2.04.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	4.000.000.00	
9.01.01.2.04.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	34.000.000.00	
9.01.01.2.04.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	22.000.000.00	
9.01.01.2.04.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1	10.000.000.00	
9.01.01.2.04.0007	Penyediaan Bahan/Material	Paket	1	1	-	
9.01.01.2.04.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	77.000.000.00	
9.01.01.2.04.0010	Pemeliharaan Asap Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	6.100.000.00	
9.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	• Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	482.560.060.00	
9.01.01.2.07.002	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	600.000.000.00	
9.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Listrik	Unit	0	0	-	
9.01.01.2.07.0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	57.000.000.00	
9.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	5.500.000.00	
9.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
9.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	100	100	187.060.060.00	
	• Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	187.060.060.00	
9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	3	3	97.000.000.00	
9.01.01.2.08.0006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	90.000.000.00	



INSPEKTORAT DAERAH
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (TARGET)	2025		KET
1		2	3	4	TARGET	KEBUTUHAN ANGGARAN	5
5.01.01.2.09	PENELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase	96	90	85,050,000.00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	1	1	20,000,000.00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	12	12	40,000,000.00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	1	1	9,000,000.00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	1	1	4,000,000.00	
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	1	1	6,000,000.00	
5.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APJP yang diselesaikan - Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan - Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Persentase Persentase Persentase	95 94 1	90 96 1	2,220,000,000.00	
5.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	- Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan APJP dan BPK RI yang Ditindaklanjuti - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja - Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Persentase	88	87	1,476,000,000.00	
5.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Laporan	4	4	75,000,000.00	
5.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Laporan	42	42	850,000,000.00	
5.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja		Laporan	2	2	22,000,000.00	
5.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan		Laporan	10	10	108,000,000.00	
5.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		Laporan	27	27	413,000,000.00	
5.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP		Dokumen	2	2	180,000,000.00	
5.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi - Jumlah Laporan Penyidikan Korupsi Negara/daerah yang Ditangani - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase	96	90	750,000,000.00	
5.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyidikan Korupsi Negara/daerah		Laporan	1	1	77,000,000.00	
5.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Laporan	11	11	673,000,000.00	
5.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah	Persentase	85	86	446,000,000.00	
5.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	- Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan, dan Level Komponen Dukungan Pengawasan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Persentase Rekomendasi Rekomendasi	2 2 2	2 2 2	124,000,000.00 32,000,000.00 92,000,000.00	
5.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						
5.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan						
5.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang mendapatkan Pendampingan - Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi - Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Persentase OPD OPD Kegiatan OPD	96 11 14 4 4	90 11 14 4 4	322,000,000.00 41,000,000.00 22,000,000.00 80,000,000.00 170,000,000.00	
5.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
5.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
5.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi						
5.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas						
						11,897,100,000.00	

Sumber : Rencana Kerja/daerah Tahun 2025-2029



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, maka arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.
2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
4. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.



- b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu:
 - 1) Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - a) Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 - 2) Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:
 - a) Kinerja Rutin Pengawasan
 - (1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - (2) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - (3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;



- (4) Reviu Laporan Kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- (5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- (6) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- (7) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (8) Monitoring Penyerapan Anggaran / Pemeriksaan Kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- (9) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut- larut penyelesaiannya.

b) Pengawasan Prioritas Nasional

- (1) Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;



(3) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

(4) Dana Desa:

(a) Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan

(b) Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

(a) Inspektorat Daerah Provinsi, dengan sasaran :
meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

(b) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pengawasan Reformasi Birokrasi

a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;



- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; 4) Penilaian Internal Zona Integritas; 5) Penanganan Benturan Kepentingan; 6) Penanganan Laporan Pengaduan (*whistle blower system*); dan 7) Penanganan Pengaduan Masyarakat.
6. Penegakan Integritas
- a. Dukungan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional PPUPD dan Auditor;
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara implementatif, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari



pencapaian berbagai program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah merumuskan tujuan dan sasaran, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
INSPEKTORAT DAERAH
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KEPEK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN							KET
					2025	2026	2027	2028	2029	30	
- MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERINTEGRITAS	- MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS	1. OPTIMALNYA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	- Nilai SAKIP Daerah	Nilai	63.54	64.00	64.50	65.00	65.50	66.00	
			- MCP KPK	Nilai	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00	90.50	
			- Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	2.855	2.860	2.865	2.870	2.875	2.880	
		2. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	12.85	12.90	12.95	13.00	13.05	13.10	

Sumber : Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2029



3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

- 1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

- 1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4.4 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.7 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.6 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- 1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- 1.7 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
 - 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
 - 2.1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL**
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - 2.1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - 2.1.5 Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 - 2.1.6 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2.2 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
 - 3.1 KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN**
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 3.2 KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
 - 3.2.1 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.2.2 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3.2.4 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah telah menentukan tujuan, kelompok sasaran dengan indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawasan didaerah, maka indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Renja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.



Tabel 3.2
INSPEKTORAT DAERAH
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / URAIAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA ANAK (TARGET)	RENCANA BELAKA TAHUN 2023 TARGET	RENCANA BELAKA TAHUN 2023 ANGGARAN	PROGNOSA BELAKA 2023 TARGET	PROGNOSA BELAKA 2023 ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
6.61.01	PROGRAM PENUNJANG LULUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Tingkat Kesiapan Bidang Perencanaan	Persentase Persentase	100	100	8.245.000.000.00	86	10.817.400.000.00	DEPOKIN TERPADU	APBN
6.61.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANTARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2. Persentase Target pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase Persentase	100	100	37.400.000.00	100	37.400.000.00		
6.61.01.2.01.0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3.000.000.00	1	3.000.000.00		
6.61.01.2.01.0002	Kontribusi dan Partisipasi Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	1	3.000.000.00		
6.61.01.2.01.0003	Kontribusi dan Partisipasi Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	1	3.000.000.00		
6.61.01.2.01.0004	Kontribusi dan Partisipasi Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	1	3.000.000.00		
6.61.01.2.01.0005	Kontribusi dan Partisipasi Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	1	3.000.000.00		
6.61.01.2.01.0006	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Laporan Kinerja dan Kinerja Penerimaan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan Kinerja dan Kinerja Penerimaan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Laporan Laporan Kinerja dan Kinerja Penerimaan Kinerja SKPD	Laporan	0	0	17.000.000.00	0	17.000.000.00		
6.61.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	3.000.000.00	1	-		
6.61.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3. Persentase Target pelaksanaan administrasi keuangan	Persentase Persentase	100	100	8.180.000.000.00	100	8.886.181.200.00		
6.61.01.2.02.0001	Partisipasi dan Partisipasi Anggaran	Jumlah Anggaran yang Disetujui dan Disetujui	Anggaran	100	100	8.180.000.000.00	100	8.811.401.000.00		
6.61.01.2.02.0002	Partisipasi dan Partisipasi Anggaran	Jumlah Anggaran yang Disetujui dan Disetujui	Anggaran	100	100	8.180.000.000.00	100	8.811.401.000.00		
6.61.01.2.02.0003	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0004	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0005	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0006	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0007	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0008	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0009	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0010	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0011	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0012	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0013	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0014	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0015	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0016	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0017	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0018	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0019	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0020	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0021	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0022	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0023	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0024	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0025	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0026	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0027	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0028	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0029	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0030	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0031	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0032	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0033	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0034	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0035	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0036	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0037	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0038	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0039	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0040	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0041	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0042	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0043	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0044	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0045	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0046	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0047	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0048	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0049	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0050	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0051	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0052	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0053	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0054	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0055	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0056	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0057	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0058	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0059	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0060	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0061	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0062	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0063	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0064	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0065	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0066	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0067	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0068	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0069	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0070	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0071	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0072	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0073	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0074	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0075	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0076	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0077	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0078	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0079	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0080	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0081	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0082	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0083	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0084	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0085	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0086	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0087	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0088	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0089	Kontribusi dan Partisipasi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	17.000.000.00	1	17.000.000.00		
6.61.01.2.02.0090	Kontribusi dan Partisipasi Laporan									



INSPEKTORAT DAERAH
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (TARGET)	RENCANA KERJA TAHUN 2025		RENCANA KERJA TAHUN 2025		LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.00	PEMELEHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	• Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase	60	60	85.000.000.00	60	74.400.000.00		
6.01.01.2.00.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Siap untuk Pindah	Unit	1	1	26.000.000.00	1	22.000.000.00		
6.01.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pengoran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit	12	12	40.000.000.00	12	30.500.000.00		
6.01.01.2.00.0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	Unit	1	1	9.000.000.00	1	9.000.000.00		
6.01.01.2.00.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	Unit	1	1	4.000.000.00	1	3.190.000.00		
6.01.01.2.00.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	Unit	1	1	6.000.000.00	1	4.880.000.00		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	• Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	Persentase	60	60	2.226.000.000.00	60	2.326.000.000.00	INSPEKTORAT DAERAH	APSD
		• Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	Persentase	64	66		66			
		• Persentase Kejadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Persentase	1	1		1			
6.01.02.2.01	PERYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	• Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan APIP dan BPK RI T	Persentase	60	67	1.476.000.000.00	67	1.476.000.000.00		
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	4	70.000.000.00	4	70.000.000.00		
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	42	42	686.000.000.00	42	686.000.000.00		
6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	- Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	2	2	22.000.000.00	2	22.000.000.00		
6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	10	10	306.000.000.00	10	108.000.000.00		
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	27	27	413.000.000.00	27	413.000.000.00		
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	2	169.000.000.00	2	169.000.000.00		
6.01.02.2.02	PERYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	• Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Persentase	60	60	750.000.000.00	60	750.000.000.00		
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyidikan Korupsi Negara/daerah	- Jumlah Laporan Hasil Penyidikan Korupsi Negara/daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	77.000.000.00	1	77.000.000.00		
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	11	11	673.000.000.00	11	673.000.000.00		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	• Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah	Persentase	66	66	446.000.000.00	66	446.000.000.00	INSPEKTORAT DAERAH	APSD
6.01.03.2.01	PERLUASAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITAS PENGAWASAN	• Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan, dan Level Komponen Dukungan Pengawasan	Persentase	2	2	124.000.000.00	2	124.000.000.00		
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	32.000.000.00	2	32.000.000.00		
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	92.000.000.00	2	92.000.000.00		
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	• Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang	Persentase	60	60	322.000.000.00	60	322.000.000.00		
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	11	11	41.000.000.00	11	41.000.000.00		
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	14	14	27.000.000.00	14	27.000.000.00		
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	4	69.000.000.00	4	69.000.000.00		
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas	- Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas	OPD	4	4	170.000.000.00	4	170.000.000.00		
						11.897.100.000.00		12.899.400.100.00		

Sumber : Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Administrasi Tahun 2025-2029



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Pendanaan Belanja Operasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah dengan rincian anggaran kegiatan adalah seperti berikut :



INSPEKTORAT DAERAH
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PENDEKATAN DAN TAYAK SUB KEGIATAN	SATUAN	PERIODE AWAL (TARGET)	PERIODE AKHIR (TARGET)	RENCANA KERJA TAHUN 2025 ANGGARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Tingkat pencapaian tingkat tertampung masyarakat	Persentase	88	90	3.225.100.000.00	APBN
0.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	- Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase	100	100	37.000.000.00	
0.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Daerah	Dokumen	1	1	5.000.000.00	
0.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	- Jumlah Dokumen RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	
0.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perencanaan RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.000.000.00	
0.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	
0.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000.00	
0.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Laporan Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	17.000.000.00	
0.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Strategis Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Strategis Daerah	Laporan	1	1	2.000.000.00	
0.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	- Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	Persentase	100	100	8.150.000.000.00	
0.01.01.2.02.0001	Pengelolaan Kas dan Tunjangan ASN	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas dan Tunjangan ASN	Dokumen	5	5	8.100.000.000.00	
0.01.01.2.02.0002	Pelaksanaan Pembukuan dan Pengalihan/Modifikasi Keuangan SKPD	- Pengalihan/Modifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	1	17.000.000.00	
0.01.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	17.000.000.00	
0.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	8.000.000.00	
0.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	- Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi	Persentase	100	100	13.000.000.00	
0.01.01.2.03.0000	Pembukuan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Pembukuan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	12.000.000.00	
0.01.01.2.04	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	- Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi	Persentase	90	90	120.000.000.00	
0.01.01.2.04.0000	Pengelolaan Pabukur Status Barisan Aktif kepengurusannya	- Jumlah Pabukur Pabukur Status Barisan Aktif kepengurusannya	Pabukur	1	1	10.000.000.00	
0.01.01.2.04.0010	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkebutuhan Khusus dan Pungsi	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkebutuhan Khusus dan Pungsi	Orang	0	0	-	
0.01.01.2.04.0011	Sosialisasi Penerimaan Penerimaan Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penerimaan Penerimaan Undangan	Orang	10	10	40.000.000.00	
0.01.01.2.04.0012	Strategi Kerja Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Strategi Kerja Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	5	47.000.000.00	
0.01.01.2.05	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	- Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Persentase	100	100	100.100.000.00	
0.01.01.2.05.0001	Penyediaan Komputer dan Alat Tulis/Perengkapan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komputer dan Alat Tulis/Perengkapan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	4.000.000.00	
0.01.01.2.05.0002	Penyediaan Perabot dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Perabot dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	34.000.000.00	
0.01.01.2.05.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	32.000.000.00	
0.01.01.2.05.0004	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang disediakan	Paket	1	1	10.000.000.00	
0.01.01.2.05.0005	Penyediaan Bahan Material	- Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	Paket	1	1	-	
0.01.01.2.05.0006	Penyediaan Bahan Material dan Konsumsi SKPD	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Material dan Konsumsi SKPD	Laporan	1	1	77.000.000.00	
0.01.01.2.05.0010	Pembukuan Asep Utama pada SKPD	- Jumlah Dokumen Pembukuan Asep Utama pada SKPD	Dokumen	1	1	8.100.000.00	
0.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PERUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase Pemenuhan pengadaan kebutuhan barang	Persentase	100	100	402.000.000.00	
0.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain yang disediakan	Unit	1	1	400.000.000.00	
0.01.01.2.07.0002	Pengadaan Perabot dan Mesin Lain-lain	- Jumlah Unit Perabot dan Mesin Lain-lain yang disediakan	Unit	0	0	-	
0.01.01.2.07.0003	Pengadaan Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain	- Jumlah Unit Bangunan dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain yang disediakan	Unit	1	1	17.000.000.00	
0.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain	- Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain yang disediakan	Unit	1	1	5.000.000.00	
0.01.01.2.08	PERYEDIAAN JASA PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa perung	Persentase	100	100	187.000.000.00	
0.01.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	3	17.000.000.00	
0.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	10.000.000.00	



INSPEKTORAT DAERAH
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (TARGET)	RENCANA KERJA TAHUN 2025		SUMBER DANA
1		2	3	4	TARGET	ANGGARAN	5
6.01.01.3.00	PEMELIHARAAN SARANG MELIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan - Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan - Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan - Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan - Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan - Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Persentase	80	80	88.000.000.00	
6.01.01.3.00.0001	Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Unit	1	1	20.000.000.00	
6.01.01.3.00.0002	Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Unit	12	12	40.000.000.00	
6.01.01.3.00.0008	Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Unit	1	1	9.000.000.00	
6.01.01.3.00.0010	Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Unit	1	1	4.000.000.00	
6.01.01.3.00.0011	Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Melik Daerah Penunjang Urusan	Unit	1	1	8.000.000.00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP yang dilaksanakan - Persentase Tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang dilaksanakan - Persentase Keterlaksanaan Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Persentase	80	80	2.226.600.000.00	APBD
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	- Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan APIP dan BPK RI V - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	85	87	1.476.600.000.00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Daerah	Laporan	4	4	70.000.000.00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	42	42	680.000.000.00	
6.01.02.2.01.0003	Berita Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	20.000.000.00	
6.01.02.2.01.0004	Berita Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	10	10	100.000.000.00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa	Laporan	27	27	413.000.000.00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Dokumen	2	2	100.000.000.00	
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Negara/daerah yang Ditangani - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase	80	90	750.000.000.00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyidikan Kasus Hukum/daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Negara/daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	77.000.000.00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	11	11	673.000.000.00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah - Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan dan Level Komponen Dukungan Pengawasan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Persentase	85	86	446.600.000.00	APBD
6.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	- Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan dan Level Komponen Dukungan Pengawasan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Persentase	2	2	124.600.000.00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	92.000.000.00	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	92.000.000.00	
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Didukung Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pemantauan Reformasi Birokrasi - Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Persentase	80	80	322.600.000.00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	11	11	41.000.000.00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pemantauan Reformasi Birokrasi	OPD	14	14	22.000.000.00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	4	80.000.000.00	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	OPD	4	4	170.000.000.00	
						11.897.100.000.00	

Sumber : Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2025-2029



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana dalam Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Periode 2025-2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026 serta menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih.

Mempawah, Juli 2025



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

FIRDAUS, S.T., M.T

Pembina Utama Muda
NIP. 19720614 199803 1 012

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**PERUBAHAN
RENCANA
KERJA**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Renstra Bappeda dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman bagi personil Bappeda Kabupaten Mempawah dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2025, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Mempawah, Agustus 2025
Kepala Bappeda Kabupaten Mempawah,

AMI FEBRIYANTO,ST.,MT,
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19780220 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Semester I Tahun 2025	
2.2 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan berdasarkan Urusan	18
2.3 Analis Kinerja Perangkat Daerah	20
2.4 Isu Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 32
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah....	33
 BAB V PENUTUP	 50
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	51
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja bersifat Tahunan yang merupakan Penjabaran dari Pelaksanaan Pembangunan yang telah di rencanakan didalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2025. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah Wujud Implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,terahir dengan Undang – Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mempawah, sehingga dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terwujud sinergitas antar Dokumen Perencanaan yang telah di susun.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah perlu adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan daerah maupun antar daerah sehingga akan di capai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dalam lingkup satuan kerja Perangkat daerah integrasi perencanaan Pembangunan di tuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (Lima) tahun, untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan Jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Bappeda Kabupaten Mempawah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020- 2025. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2025 yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Mempawah.

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- e. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Mempawah bidang Perencanaan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
14. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), serta rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat mendorong efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Mempawah ini disajikan dalam 4 Bab yang masing-masing Bab berisikan antara lain :

- Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- Bab II berisi hasil evaluasi rencana kerja perangkat tahun berjalan yang diawali dengan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan semester I tahun 2025. dilanjutkan dengan melakukan evaluasi kinerja program/kegiatan berdasarkan urusan masing-masing bidang, analisis kinerja perangkat, dan melakukan review terhadap permasalahan capaian kinerja.
- Bab III menyajikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
- Bab IV merupakan penutup yang memuat kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

1.5 Struktur Organisasi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang urusan

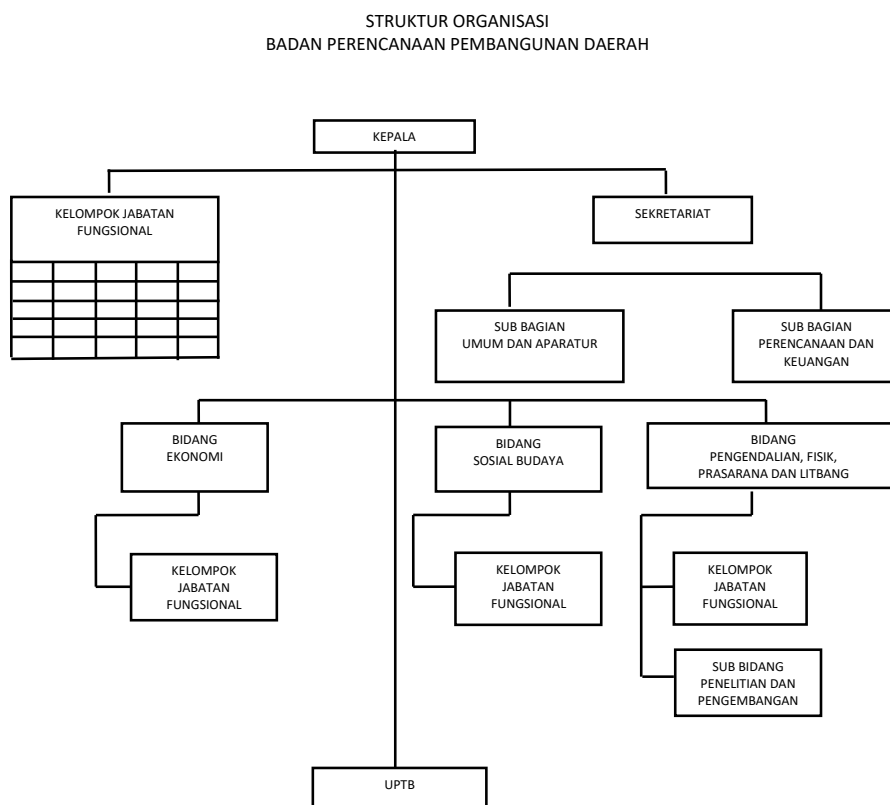
Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pengordinasian dan pembinaan teknis dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik dilingkungan badan;dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretaris
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bidang Umum dan Aparatur
- C. Bidang Ekonomi
- D. Bidang Sosial Budaya
- E. Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang
 - a. Sub Bidang Litbang;
- F. Kelompok Jabatan Fungsional
- G. Unit Pelaksana Teknis



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I tahun 2025

Sebagai mana Amanat Peraturan Menteri Nomer 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus di awali dalam pelaksanaanya, demikian halnya dengan Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Semester I dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatannya, mengidentifikasi Realisasi pencapaian target kinerja Program/Kegiatan /sub kegiatan serta hambatan – hambatan yang di hadapi.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Mempawah di tentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di sesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana strategis sebagai Dokumen jangka menengah. Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan mengacu pada hasil laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Mempawah dan Realisasi APBD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 .

Pada Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Mempawah memiliki Total Anggaran sebesar **Rp.8.217.451.185,00** (Delapan milyar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah yang di Alokasikan untuk pelaksanaan 4 Program, 19 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 6 Sub kegiatan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.946.693.280,00 dengan Realisasi Sebesar Rp.710.451.697,00 atau 36,50%. Anggaran ini di laksanakan untuk menunjang kegiatan :

- ✓ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- ✓ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah

Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah

- ✓ Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Bidang

Perencanaan

Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.907.651.774,00 dengan Realisasi Sebesar Rp.81,688,400.00 atau 9,00%. Anggaran ini dilaksanakan untuk menunjang kegiatan :

- ✓ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan

Manusia.

- ✓ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

(Sumber Daya Alam).

- ✓ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri dari 8 Kegiatan 24 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.939.567.581,00 dengan Realisasi sebesar Rp.2.291,584,957,00 atau 46.39% Anggaran ini di laksanakan untuk menunjang Kegiatan :

- ✓ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan 7 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 423.538.550,00,00 dengan Realisasi sebesar Rp.10.060.000,00 atau 2.38% Anggaran ini di laksanakan untuk menunjang Kegiatan :

- ✓ Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- ✓ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- ✓ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- ✓ Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sedangkan untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 1.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Semester I Tahun Anggaran 2025

KODE		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KET
PROG	KEG			Rp.	%		
1		2	3	4	5	6	7
		BELANJA OPERASI	8.217.451.185	3.093.765.054	37,65	5.123.686.131	
01		Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	4.939.567.581	2.291.584.957	28,64	2.647.982.624	
	2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	34.000.000	22.675.653	66,69	11.324.347	
	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.000.000	4.777.577	95,55	222.423	
	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.000.000	3.829.608	95,74	170.392	
	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.000.000	0	0,00	4.000.000	
	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	1.936.468	96,82	63.532	
	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	4.000.000	0	0,00	4.000.000	
	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	12.132.000	80,88	2.868.000	
	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.391.244.313	2.109.081.614	47,77	2.282.162.699	
	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	4.349.254.313	2.089.194.114	48,04	2.260.060.199	
	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	21.990.000	8.287.500	37,69	13.702.500	
	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15.000.000	11.600.000	77,33	3.400.000	
	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	5.000.000	0	0	5.000.000	
	2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	15.000.000	6.911.075	46,07	8.088.925	

	06	Penatausahaan barang milik daerah	15.000.000	6.911.075	46.07	8.088.925	
	2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	25.000.000	24.583.160	98.33	416.840	
	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25.000.000	24.583.160	98.33	416.840	
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.120.200	75.692.246	38.01	123.427.954	
	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.000.000	0	0	14.000.000	
	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.120.200	2.183.703	5.06	40.936.497	
	04	Penyediaan bahan logistik kantor	22.000.000	3.985.000	18.11	18.015.000	
	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.000.000	2.166.828	5.04	40.833.172	
	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75.000.000	67.356.715	89.81	7.643.285	
	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.000.000	0	0	2.000.000	
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.261.200	0	0	47.261.200	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	0	0	15.000.000	
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.261.200	0	0	32.261.200	
	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	135.000.000	45.868.209	33.98	89.131.791	
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	135.000.000	45.868.209	33.98	89.131.791	
	2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92.941.868	6.773.000	7.29	86.168.868	
	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	22.985.582	3.118.500	13.57	19.867.082	
	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	32.634.086	3.654.500	11.20	28.979.586	
	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000	0	0	10.000.000	
	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	7.000.000	0	0	7.000.000	
	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	20.322.200	0	0	20.322.200	
02		Program penelitian dan pengembangan daerah	423.538.550	10.060.000	2.8	413.478.550	
	2.01	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	24.563.850	4.160.000	16.94	20.403.850	
	01	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	24.563.850	4.160.000	16.94	20.403.850	
	2.02	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	124.810.000	1.160.000	0.93	123.650.000	
		Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	109.110.000	0	0	109.110.000	
		Penelitian dan pengembangan Bidang Kebudayaan	11.620.000	0	0	11.620.000	
	06	Penelitian dan pengembangan kesehatan	4.080.000	1.160.000	28.43	2.920.000	
	2.03	Penelitian dan pengembangan bidang Lingkungan Hidup	262.760.000	2.520.000	0.96	260.240.000	
	07	Penelitian dan pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	262.760.000	2.520.000	0.96	260.240.000	
	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	11.404.700	2.220.000	19.47	9.184.700	
	02	Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4.740.000	0	0	4.740.000	
	05	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	6.664.700	2.220.000	33.31	4.444.700	
03		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.946.693.280	710.451.697	36.50	1.236.241.583	
	2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	976.945.300	379.752.691	38.87	597.192.609	
	02	Koord. penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	66.160.700	3.793.980	5.73	62.366.720	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	60.860.400	15.361.000	25.24	45.499.400	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	15.000.000	
	05	Pelaksanaan musrenbang kab/kota	63.417.600	19.847.200	31.30	43.570.400	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	26.054.800	0	0	26.054.800	
	07	Koord. penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota	745.451.800	340.750.511	45.71	404.701.289	
	2.02	Analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	900.434.180	329.189.006	36.56	571.245.174	
	01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	894.614.280	329.189.006	36.80	565.425.274	
	02	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	5.819.900	0	0	5.819.900	
	2.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	69.313.800	1.510.000	2.18	67.803.800	
	01	Koord. pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kab/kota	3.539.700	1.510.000	42.66	2.029.700	

	02	Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	20.835.100	0	0	20.835.100	
	03	Monev laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	44.939.000	0	0	44.939.000	
04		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	907.651.774	81.768.400	9.01	825.863.374	
	2.01	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	265.202.000	56.267.400	21.22	208.934.600	
	01	Koord. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	35.782.000	15.737.800	43.98	20.044.200	
	02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan	65.400.000	18.180.000	27.80	47.220.000	
	03	Pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan	35.777.400	0	0	35.777.400	
	04	Koord. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan	13.613.100	0	0	13.613.100	
	05	Koord. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. pembangunan manusia	9.962.900	0	0	9.962.900	
	06	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. pembangunan manusia	32.666.600	22.349.600	68.42	10.317.000	
	07	Pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. pembangunan manusia	45.000.000	0	0	45.000.000	
	08	Koord. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bid. pembangunan manusia	27.000.000	0	0	227.000.000	
	2.02	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	233.384.774	23.381.000	9.98	210.083.774	
	01	Koord. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Perekonomian	59.127.500	0	0	59.127.500	
	02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Perekonomian	25.000.000	0	0	25.000.000	
	03	Pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Perekonomian	25.000.000	0	0	25.000.000	
	04	Koord. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bid. Perekonomian	31.331.587	0	0	31.331.587	
	05	Koord. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. SDA	5.614.100	0	0	5.614.100	
	06	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. SDA	25.000.000	7.220.000	28.88	17.780.000	
	07	Pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. SDA	25.000.000	0	0	25.000.000	
	08	Koord. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bid. SDA	37.311.587	16.161.000	43.05	21.250.587	
	2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	409.065.000	2.120.000	0.52	406.945.000	
	01	Koord. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Infrastruktur	383.417.800	0	0	383.417.800	
	02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Infrastruktur	5.804.500	0	0	5.804.500	
	03	Pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. Infrastruktur	2.466.200	0	0	2.466.200	
	05	Koord. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bid. kewilayahan	17.376.500	2.120.000	12.20	15.256.500	
	08		-				
		J u m l a h	8.217.451.185	3.093.765.054	37,65	5.123.686.131	

Tabel 1.2
Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n- 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
			Tahun 2025		I		II		III		IV		Semester I Tahun 2025		Semester I Tahun 2025		(Tahun 2025 - 2029)		(Tahun 2025 - 2029)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PERENCANAAN		%	7,793,912,635		1,203,967,810		1,879,737,244		0		0		3,083,705,054		39.57		3,083,705,054		0.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariat an	100	4,939,567,581	34.81 %	1,044,235,418	6.91 %	1,247,349,539		0		0		2,291,584,957	41.73	46.39	41.73 %	2.291.584.957	0.00	0.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	34,000,000	55.56 %	17,820,000	3.70 %	4,855,653	0.00 %	0	0.00 %	0	59.26 %	22,675,653	59.26	66.69	4	4,777,577	0.00	0.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen}	4	5,000,000	4	2,820,000	0	1,957,577	0	0	0	0	4	4,777,577	100.00	95.55	2	3,829,608	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	4,000,000	2	2,370,000	0	1,459,608	0	0	0	0	2	3,829,608	100.00	95.74	0	0	0.00	0.00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	2,000,000	1	1,380,000	0	556,468	0	0	0	0	1,	1,936,468	100.00	96.82	0	1,936,468	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	9	15,000,000	3	11,250,000	2	882,000	0	0	0	0	5	12,132,000	55.56	80.88	5	12,132,000	0.00	0.00

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																		
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														59.26%	66.69%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Rendah	Sedang			Sangat rendah	Sangat rendah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	4,391,244,313	33.75 %	913,427,543	15.63 %	1,195,654,071	0.00 %	0	0.00 %	0	49.38 %	2,109,081,614	49.38	48.03	49.38 %	2,109,081,614	0.00	0.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	4,349,254,313	34	910,652,543	5	1,178,541,571	0	0	0	0	39	2,089,194,114	97.50	48.04	39	2,089,194,114	0.00	0.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	21,990,000	0	2,775,000	1	5,512,500	0	0	0	0	1	8,287,500	50.00	37.69	1	8,287,500	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan}	2	15,000,000	2	0	0	11,600,000	0	0	0	0	2	11,600,000	50.00	77.33	2	11,600,000	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	1	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)																			
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														49.38%	48.03%			0.00%	46.07%	
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengolahan Administrasi Barang Milik Daerah	100	15,000,000	0.00 %	820,000	0.00 %	6,091,075	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	6,911,075	0.00	46.07	0	6,911,075	0.00	0.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	15,000,000	0	820,000	0	6,091,075	0	0	0	0	0	6,911,075	0.00	46.07	0	6,911,075	0.00	0.00	
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0.00%	46.07%			0.00%	0.00%	
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan	100	25,000,000	80.00 %	23,923,160	0.00 %	660,000	0.00 %	0	0.00 %	0	80.00 %	24,583,160	80.00	98.33	8	24,583,160	0.00	0.00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	25,000,000	8	23,923,160	0	660,000	0	0	0	0	8	24,583,160	80.00	98.33	8	24,583,160	0.00	0.00	
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															80.00%	98.33%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat rendah	Sangat rendah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan	100	199,120,200	14.58 %	65,471,715	0.00 %	10,220,531	0.00 %	0	0.00 %	0	14.58 %	75,692,246	14.58	38.01	14.58%	75.692.246	0.00	0.00	

		administrasi umum																		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	43,120,200	0	0	0	2,183,703	0	0	0	0	0	2,183,703	0.00	5.06	0	2,183,703	0.00	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22,000,000	0	0	0	3,985,000	0	0	0	0	0	3,985,000	0.00	18.11	0	3,985,000	0.00	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	43,000,000	0	0	0	2,166,828	0	0	0	0	0	2,166,828	0.00	5.04	0	2,166,828	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	75,000,000	28	65,471,715	0	1,885,000	0	0	0	0	28	67,356,715	87.50	89.81	28	67,356,715	0.00	0.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														14.58%	38.01%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	47,261,200	0.00 %	0.00	0.00	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	32,261,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0.00%	0.00%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	135,000,000	25.00 %	22,773,000	8.33 %	23,095,209	0.00 %	0	0.00 %	0	33.33 %	45,868,209	33.33	33.98	33.33	45,868,209	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	135,000,000	9	22,773,000	3	23,095,209	0	0	0	0	12	45,868,209	33.33	33.98	12	45,868,209	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														33.33	33.98			0.00%	0.00%

	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92,941,868	0.00 %	0	0.00 %	6,773,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	6,773,000	0.00	7.29	0	6,773,000	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	22,985,582	0	0	0	3,118,500	0	0	0	0	0	3,118,500	0.00	13.57	0	3,118,500	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	32,634,086	0	0	0	3,654,500	0	0	0	0	0	3,654,500	0.00	11.20	0	3,654,500	0.00	0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	3	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

	Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)																		
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)	3	20,322,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerj kegiatan (%)														0.00%	7.29%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Rata-rata capaian kinerj program (%)														41,73%	46,39%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kelarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Daerah dengan DPA APBD	100	1,946,693,280	29.17 %	113,251,792	0.00 %	597,199,905	0.00 %	0	0.00 %	0	29.17 %	710,451,697	29.17	36.50	29.17 %	710,451,697	0.00	0.00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	976,945,300	58.33 %	70,691,000	0.00 %	309,061,691	0.00 %	0	0.00 %	0	58.33 %	379,752,691	58.33	38.87	58.33	379,752,691	0.00	0.00
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3	66,160,700	2	0	0	3,793,980	0	0	0	0	2	3,793,980	66.67	5.73	2	3.793.980	0.00	0.00

	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	60,860,400	1	15,361,000	0	0	0	0	0	0	1	15,361,000	50.00	25.24	1	15,361,000	0.00	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	3	15,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	100.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Berita Acara)	3	63,417,600	1	2,300,000	0	17,547,200	0	0	0	0	1	19,847,200	33.33	31.30	1	19,847,200	0.00	0.00
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	67	26,054,800	67	0	0	0	0	0	0	0	67	0	100.00	0.00	67	0	0.00	0.00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD) (Dokumen)	3	745,451,800	0	53,030,000	0	287,720,511	0	0	0	0	0	340,750,511	0.00	45.71	0	340,750,511	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														58,33%	38,87%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi untuk mendukung Perencanaan Pembangunan	100	900,434,180	0.00 %	41,050,792	0.00 %	288,138,214	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	329,189,006	0.00	36.56	0.00 %	329,189,006	0.00	0.00

		Daerah																		
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3	894,614,280	0	41,050,792	0	288,138,214	0	0	0	0	0	329,189,006	0.00	36.80	0	329,189,006	0.00	0.00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	1	5,819,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0.00%	36,56%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah Laporan hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	69,313,800	0.00 %	1,510,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	1,510,000	0.00	2.18	0.00 %	1,510,000	0.00	0.00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	31	3,539,700	0	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000	0.00	42.66	0	1,510,000	0.00	0.00

	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasi kan Pelaksanaan nya (Kerja Sama)	1	20,835,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	44,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0.00%	2,18%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi dan Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100	907,651,774	3.65 %	46,480,600	0.00 %	35,187,800	0.00 %	0	0.00 %	°	3.65 %	81,668,400	3.65	9.00	3.65 %	81,668,400	0.00	0.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	265,202,000	7.29 %	27,659,600	0.00 %	28,607,800	0.00 %	0	0.00 %	°	7.29 %	56,267,400	7.29	21.22	7.29 %	56,267,400	0.00	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	2	35,782,000	0	5,220,000	0	10,517,800	0	0	0	0	0	15,737,800	0.00	43.98	0	15,737,800	0.00	0.00

	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	65,400,000	0	5,850,000	0	12,330,000	0	0	0	0	0	18,180,000	0.00	27.80	0	18,180,000	0.00	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	35,777,400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33.33	0.00	1	0	0.00	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	13,613,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	9,962,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (dokumen)	1	32,666,600	0	16,589,600	0	5,760,000	0	0	0	0	0	22,349.600	0	68.42	0	22,349,600	0.00	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	45,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	25.00	1	0	0.00	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	1	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	Daerah Bidang Pembangunan Manusia	pada Bidang Pembangunan Manusia (Dokumen																		
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														29,17%	36,50%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100	233,384,774	0.00 %	18,821,000	0.0 0 %	4,460,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	23,281,000	9.98	0.00 %	23,281,000	0.00	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	59,127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	1	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

		Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)																		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	31,331,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	5,614,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	25,000,000	0	6,840,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0.00	7,220,000	28.88	0	7,220,000	0.00	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	37,311,587	0	11,981,000	0	4,080,000	0	0	0	0		0	16,061,000	43.05	0.00	0	16,061,000	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														7,29%	21,22%			0.00%	0.00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	409,065,000	0.00 %	0	0.00 %	2,120,000	0.00 %	0	0.00 %	0		0.00 %	0.00	0.52	0.00 %	2,120,000	0.00	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	383,417,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	5,804,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2,466,200	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	17,376,500	0	0	0	2,120,000	0	0	0	0		0	2,120,000	0.00	0	2,120,000	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0,00%	0,52%			0,00%	0,00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Rata-rata capaian kinerja program (%)														3,65%	9,00%			0,00%	0,00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100	423,538,550	0.00 %	5,700,000	0.00 %	4,360,000	0.00 %	0	0	0	0	10,060,000		2.38		10,060,000	0.00	0.00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah (Persen)	100	423,538,550	0.00 %	5,700,000	0.00 %	4,360,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0	10,060,000	0.00	2.38	0.00 %	10,060,000	0.00	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan		24,563,850	0.00 %	3,480,000	0.00 %	680,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0	4,160,000	0.00	16.94	0.00	4,160,000	0.00	0.00

	Peraturan	dan Pengkajian Peraturan																		
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	0	24,563,850	0.00 %	3,480,000	0.00 %	680,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0	4,160,000	0.00	16.94	0.00	4,160,000	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0,00%	16,94%			0,00%	0,00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	124,810,000	0.00 %	0	0.00 %	1,160,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	1,160,000	0.93	0.00 %	1,160,000	0.00	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	109,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00 %	2,520,000	0.00	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	11,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2,520,000	0.00	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil	0	4,080,000	0	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0.00	1,160,000	28.43	0.00 %	2,220,000	0.00	0.00

		Penelitian dan Pengembangar Kesehatan (Dokumen)																		
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0,00%	0,93%			0,00%	0,00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangar Bidang Ekonomi dan Pembangunan		262,760,000	0.00 %	0	0.0 0 %	2,520,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00	2,520,000	0.96	0	0	0.00	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1	262,760,000	0	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0.00	2,520,000	0.96	0	0	0.00	0.00
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														0,00%	0,96%			0,00%	0,00%
	Predikat Kinerja														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pengembang an Inovasi dan Teknologi		11,404,700	0.00 %	2,220,000	0.0 0 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00	2,220,000	19.47	0	2.220.000	0.00	0.00
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		4,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		6,664,700	0	2,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2,220,000	33.31	0	2.220.000	0.00	0.00

		(Laporan)																		
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)													0,00%	19,47 %				0,00%	0,00%
	Predikat Kinerja													Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	Sangat rendah
	Rata-rata capaian kinerja program (%)													0,00%	2,38%				0,00%	0,00%
	Predikat Kinerja													Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	Sangat rendah
	RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM%													18,64 %	23,57 %				0,00%	0,00%
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat rendah	Sangat rendah					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada di wilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tahapan pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka memperpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Instansi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka, antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode Semester I Tahun 2025 masih sangat rendah, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya efisiensi anggaran
2. Terjadinya refocusing anggaran

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah adalah:

1. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
2. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan;

3. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;
4. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian;
5. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur puma tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium penerimaan pegawai baru;
6. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
7. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Renja Perubahan Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab III fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja BAPPEDA Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis BAPPEDA yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mempawah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan

Renja Perubahan Bappeda Tahun 2025 kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Mempawah yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan Daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun

program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang tertuang dalam Renja yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial

Renja Perubahan Bappeda Tahun 2025`

yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Beriku

Tabel III.I
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025
Bappeda Kabupaten Mempawah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-1	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				12.389.605.086	9.098.592.685	6.810.613.169	- 5.578.991.917	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.389.605.086	9.098.592.685	6.810.613.169	- 5.578.991.917	
	5.01	PERENCANAAN				10.624.355.086	8.109.933.635	6.440.993.169	- 4.183.361.917	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang te	100 Persen	100 Persen	6.608.228.098	4.939.567.581	4.961.419.513	- 6.608.228.098	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	39.500.000	34.000.000	34.000.000	-5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000	5.000.000	5.000.000	-2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	4.851.123.698	4.391.244.313	4.576.244.313	-274.879.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.806.633.698	4.349.254.313	4.534.254.313	-272.379.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	21.990.000	21.990.000	21.990.000	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	5.000.000	5.000.000	-2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengolahan Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	79.000.000	25.000.000	25.000.000	-54.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	34.000.000	-	-	-34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	45.000.000	25.000.000	25.000.000	-20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	342.120.200	199.120.200	141.145.200	-200.975.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.000.000	14.000.000	-	-14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.120.200	43.120.200	15.120.200	-28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.000.000	22.000.000	10.000.000	-13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.000.000	43.000.000	15.050.000	-28.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	-	-	-50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	32 Laporan	165.000.000	75.000.000	100.000.000	-65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000	2.000.000	975.000	-2.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	760.028.200	47.261.200	-	-760.028.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	300.000.000	-	-	-300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	367.767.000	-	-	-367.767.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	45.000.000	-	-	-45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	-	15.000.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	15.000.000	-	-	-15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	32.261.200	32.261.200	-	-32.261.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	185.000.000	135.000.000	135.000.000	-50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	185.000.000	135.000.000	135.000.000	-50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	336.456.000	92.941.868	35.030.000	-301.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	45.000.000	22.985.582	6.250.000	-38.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	48.340.000	32.634.086	14.180.000	-34.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.196.000	10.000.000	3.500.000	-196.696.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	7.000.000	7.000.000	2.450.000	-4.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	35.920.000	20.322.200	8.650.000	-27.270.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2,	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kelarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Daerah dengan DPA APBD	100 Persen	100 Persen	2.315.398.760	2.125.777.280	1.257.556.156	-2.315.398.760,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.303.000.300	1.123.452.300	662.089.800	-640.910.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	79.230.700	79.230.700	5.745.300	-73.485.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	132.406.800	60.860.400	16.000.000	-116.406.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	3 Berita Acara	39.999.600	15.000.000	-	-39.999.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	2 Berita Acara	126.848.200	126.409.600	29.070.000	-97.778.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan								
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	67 Usulan	67 Usulan	30.159.800	30.159.800	-	-30.159.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	894.355.200	811.791.800	611.274.500	-283.080.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	931.509.500	921.551.180	593.956.356	-337.553.144,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen	900.216.400	900.216.280	593.956.356	-306.260.044,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah								
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	1 Orang	31.293.100	21.334.900	-	-31.293.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah Laporan hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	80.888.960	80.773.800	1.510.000	-79.378.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	31 Laporan	31 Laporan	14.999.700	14.999.700	1.510.000	-13.489.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah								
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	20.835.100	20.835.100	-	-20.835.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	45.054.160	44.939.000	-	-45.054.160,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3,	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi dan Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 Persen	100 Persen	1.700.728.228	1.044.588.774	222.017.500	-1.700.728.228,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100 Persen	389.648.000	300.300.000	105.966.500	-283.681.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	35.757.000	-24.243.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	65.400.000	65.400.000	37.740.000	-27.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	35.777.400	-	-70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	13.613.100	-	-50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.048.000	20.842.900	9.962.900	-20.085.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	38.150.000	32.666.600	22.506.600	-15.643.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	49.050.000	45.000.000	-	-49.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	27.000.000	27.000.000	-	-27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen	555.117.128	290.663.774	98.674.500	-456.442.628,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0 Dokumen	146.294.261	59.127.500	-	-146.294.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan	30.540.858	25.000.000	-	-30.540.858,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan	30.540.858	25.000.000	-	-30.540.858,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	70.182.587	57.289.587	34.101.200	-36.081.387,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0 Dokumen	146.294.261	16.874.100	-	-146.294.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	30.540.858	25.000.000	29.456.200	-1.084.658,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0 Laporan	30.540.858	25.000.000	-	-30.540.858,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	70.182.587	57.372.587	35.117.100	-35.065.487,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	755.963.100	453.625.000	17.376.500	-738.586.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	0 Dokumen	559.705.400	383.417.800	-	-559.705.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	0 Laporan	45.610.000	25.524.500	-	-45.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	0 Laporan	47.580.000	27.306.200	-	-47.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	55.500.000	-	-	-55.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	47.567.700	17.376.500	17.376.500	-30.191.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.765.250.000	988.659.050	369.620.000	-1.395.630.000,00	
1,	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah (Persen)	100 Persen	100 Persen	1.765.250.000	988.659.050	369.620.000	-1.240.250.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 persen	100 persen	532.000.000	213.999.850	6.120.000	-525.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	0 Laporan	315.000.000	59.999.850	6.120.000	-308.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0 Laporan	217.000.000	154.000.000	-	-217.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 persen	100 persen	430.750.000	395.474.500	104.080.000	-326.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial								
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	132.500.000	132.500.000	100.000.000	-32.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan								
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	0 Dokumen	35.250.000	27.000.000	-	-35.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	263.000.000	235.974.500	4.080.000	-258.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	100 Persen	525.000.000	325.000.000	256.800.000	-268.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup								
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 0	1 0	525.000.000	325.000.000	256.800.000	-268.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 persen	100 persen	277.500.000	54.184.700	2.620.000	-274.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000	-	-	-60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0 Laporan	52.500.000	26.250.000	-	-52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	0 Laporan	165.000.000	27.934.700	2.620.000	-162.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H					12.389.605.086	9.098.592.685	6.810.613.169	-560.936.702.193,95	

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

RENJA Perubahan Bappeda Kabupaten Mempawah menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Mempawah. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Mempawah.

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sefatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat Daerah dengan Rencana kerja Pembangunan daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi Daerah.

Untuk itu, Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah di tetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat , Bidang – Bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Mempawah secara Bersama – sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga Konsistensi antara RKPD Perubahan, Renja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
2. Dalam Rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 akan di pergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RKA)

Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Bappeda Kabupaten Mempawah dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan

Mempawah, 2025

Kepala Bappeda Kabupaten Mempawah,

Ami Febriyanto,ST.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19780220 202212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah yang berjangka waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025–2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya



Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Mempawah, 14 Juli 2025

KEPALA BPKAD
KABUPATEN MEMPAWAH



Dra. IRNAWATI, M.Si
Pemdana Utama Muda
NIP. 19720510 199203 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika 8

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 31

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah 32

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.3. Program dan Kegiatan 42

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP 73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan *pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government)*. Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;

- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah juga merangkap sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menerima pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Barang (PB).

Dengan demikian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi dan elemen pokok di Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Mempawah digunakan sebagai landasan melaksanakan fungsi. Sehingga tujuan/sasaran strategis sebagaimana dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat direalisasikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 juga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan sebagaimana tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD)

1945;

3. Landasan operasional:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5



Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

- i. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 yang merupakan implementasi dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2026;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;

4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pengelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD pengelola keuangan melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 dan Capaian Renstra BPKAD yang merupakan Aktualisasi dari RENSTRA Tahun 2025-2026.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan.

Dari 3 (tiga) Program tersebut, 1 (satu) program merupakan program penunjang yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



Program dan kegiatan tahun 2024 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tergambar dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD sampai dengan Tahun 2024 (tahun berjalan) sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mempawah

Kode		Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.		Usuran penunjang Urusan Pemerintahan									
5.02		Keuangan									
5.02	02.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75,0
5.02	02.2.01	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100	100	100	100	100%	100	300	75,0
5.02	02.2.01 01	- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 02	- Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	- Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 03	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi RKA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 04	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi perubahan RKA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 05	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi DPA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 06	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi perubahan DPA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.01	07	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	- Jumlah dokumen peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01	08	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	- Jumlah dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01	09	- Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran	- Jumlah dokumen tentang regulasi serta kebijakan anggaran yang tersusun	4	4	4	4	100%	4	12	3
5.02	02.2.02		- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.02	01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Dokumen kas daerah/dokumen (B9) yang dikelola dalam setahun	264	264	264	264	100%	264	792	198
5.02	02.2.02	03	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Dokumen anggaran kas dan SPD	860	860	860	860	100%	860	2580	645
5.02	02.2.02	05	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Dokumen Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7	7	7	7	100%	7	21	5,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.02 06	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	- Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan transaksi non tunai	12	12	12	12	100%	12	36	9
5.02	02.2.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Dokumen Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.02 09	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Dokumen penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D yang direkonsiliasi setiap tahunnya	12	12	12	12	100%	12	36	9
5.02	02.2.02 10	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang tersusun	20	20	20	20	100%	20	60	15
5.02	02.2.02 11	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Perangkat daerah yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan	31	31	31	31	100%	31	93	23,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.03	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan keuangan daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.03 01	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Dokumen berita acara Rekon Kas Penerimaan dan Rekon Kas Pengeluaran	124	124	124	124	100%	124	372	93
5.02	02.2.03 02	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan Transfer, Belanja dan Pembiayaan	15	15	15	15	100%	15	45	11,25
5.02	02.2.03 03	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 04	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 05	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun	4	4	4	4	100%	4	12	3

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.03 06	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.03 08	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.03 09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 10	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dokumen Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1	-	-	-	-	-	-	-
5.02	02.2.03 11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Dokumen pendukung dalam proses penyelesaian laporan keuangan SKPD	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.03 12	- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	10	22	25	25	100%	25	72	18
5.02	02.2.04	- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.04 08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.04	09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.04	10	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.05		- Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyelesaian data Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.05	02	- Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	- Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sisten informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	03.2.01		- Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	03.2.01	01	- Penyusunan Standar Satuan Harga	- Jumlah standar satuan harga yang disusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01	02	- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	0	1	1	100%	2	3	0,75
5.02	03.2.01	03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	5	5	5	5	100%	5	15	3,75

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	03.2.01	04	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah	2	5	5	5	100%	5	15	3,75
5.02	03.2.01	05	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01	06	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik	1	0	1	1	-	1	2	0,5
5.02	03.2.01	07	- Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
5.02	03.2.01	08	- Penilaian Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan Hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	2	7	2	2	100%	2	11	2,75
5.02	03.2.01	09	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	- Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	5	5	5	5	100%	5	15	3,75
5.02	03.2.01	10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	20	18	20	20	100%	20	58	14,5
5.02	03.2.01	11	- Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	- Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	3	35	3	3	100%	3	41	10,25
5.02	03.2.01	12	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01	13	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten/kota	31	31	31	31	100%	31	93	23,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.01 01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	01.2.01 02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
5.02	01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi	100	100	100	100	100%	100	300	75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.02 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62	62	62	62	100%	62	186	46,5
5.02	01.2.02 03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.02 05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.03 01	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.05 02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	49	55	55	55	100%	55	165	41,25
5.02	01.2.05 10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan	10	7	10	10	100%	10	27	6,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.06 01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 07	- Penyediaan Bahan/Material	- Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7	7	7	7	100%	7	21	5,25
5.02	01.2.06 10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4500	1500	1500	1500	100%	1500	4500	1125
5.02	01.2.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.07 02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	0	2	2	100%	2	4	1
5.02	01.2.07 06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.07 10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat terpenuhi	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.08 01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	150	50	150	150	100%	150	350	87,5
5.02	01.2.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	36	36	36	100%	36	108	27
5.02	01.2.08 04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	5	12	12	100%	12	29	7,25
5.02	01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.09 01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.09 02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	21	21	21	100%	21	63	15,75
5.02	01.2.09 09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.09 10	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	52	1	1	100%	1	54	13,5
5.02	01.2.09 11	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	26	2	2	100%	2	30	7,5



Sumber dana merupakan sarana penunjang yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025, menjadi bagian penting yang menjelaskan asal-usul pembiayaan atas program dan kegiatan yang direncanakan selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Adapun realisasi Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel. 2.2
Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Per 31 Juni 2025
Kabupaten Mempawah

KODE		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KET
PROG	KEG			Rp.	%		
1		2	3	4	5	6	7
5	02	BIDANG URUSAN KEUANGAN	154.855.274.073,00	31.661.510.649,00	20,45	123.193.763.424,00	
	01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	6.552.766.208,00	2.922.367.487,00	44,60	3.630.398.721,00	
	2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	33.999.900,00	25.784.000,00	75,84	8.215.900,00	
	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40	30.000,00	
	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	2.936.500,00	97,88	63.500,00	
	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	2.936.500,00	97,88	63.500,00	
	0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.999.900,00	14.941.000,00	99,61	58.900,00	
	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	5.870.805.208,00	2.691.592.446,00	45,85	3.179.212.762,00	
	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan	5.779.385.558,00	2.645.714.446,00	45,78	3.133.671.112,00	
	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	56.419.650,00	21.300.000,00	37,75	35.119.650,00	
	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	27.500.000,00	24.578.000,00	89,37	2.922.000,00	
	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
	2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	20.900.000,00	11.430.000,00	54,69	9.470.000,00	
	0006	Penatausahaan barang milik daerah	20.900.000,00	11.430.000,00	54,69	9.470.000,00	
	2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	25.000.000,00	21.364.410,00	85,46	3.635.590,00	
	0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	21.364.410,00	85,46	3.635.590,00	
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.821.650,00	66.032.579,00	28,86	162.789.071,00	
	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.828.300,00	0,00	0,00	27.828.300,00	
	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	59.250.000,00	15.344.900,00	25,90	43.905.100,00	
	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	36.000.000,00	4.940.500,00	13,72	31.059.500,00	
	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.999.700,00	9.227.500,00	26,36	25.772.200,00	
	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55.745.500,00	34.196.879,00	61,34	21.548.621,00	
	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	14.998.150,00	2.322.800,00	15,49	12.675.350,00	
	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	235.400.000,00	95.827.452,00	40,71	139.572.548,00	
	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	235.400.000,00	95.827.452,00	40,71	139.572.548,00	
	2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	137.839.450,00	10.336.600,00	7,50	127.502.850,00	
	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	22.859.450,00	3.650.000,00	15,97	19.209.450,00	
	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	62.000.000,00	623.600,00	1,01	61.376.400,00	
	0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	0010	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00	

KODE		U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KET
PROG	KEG			Rp.	%		
1		2	3	4	5	6	7
	0011	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	29.730.000,00	6.063.000,00	20,39	23.667.000,00	
	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	147.392.748.009,00	28.393.413.212,00	19,26	118.999.334.797,00	
	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.500.573.650,00	214.158.800,00	14,27	1.286.414.850,00	
	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	146.046.400,00	0,00	0,00	146.046.400,00	
	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	105.259.100,00	0,00	0,00	105.259.100,00	
	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	102.380.600,00	0,00	0,00	102.380.600,00	
	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	54.839.000,00	0,00	0,00	54.839.000,00	
	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	31.706.600,00	29.830.000,00	94,08	1.876.600,00	
	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	79.230.600,00	0,00	0,00	79.230.600,00	
	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	344.865.300,00	0,00	0,00	344.865.300,00	
	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	528.192.000,00	160.935.200,00	30,47	367.256.800,00	
	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	108.054.050,00	23.393.600,00	21,65	84.660.450,00	
	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	488.170.000,00	128.753.000,00	26,37	359.417.000,00	
	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	
	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	78.650.000,00	19.200.000,00	24,41	59.450.000,00	
	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	
	0007	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	110.000.000,00	12.894.000,00	11,72	97.106.000,00	
	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	227.400.000,00	96.659.000,00	42,51	130.741.000,00	
	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12.120.000,00	0,00	0,00	12.120.000,00	
	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	600.543.178,00	248.540.748,00	41,39	352.002.430,00	
	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	15.000.000,00	4.860.000,00	32,40	10.140.000,00	
	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	126.025.978,00	63.244.390,00	50,18	62.781.588,00	
	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	37.543.200,00	0,00	0,00	37.543.200,00	
	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	216.754.200,00	147.663.058,00	68,12	69.091.142,00	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	175.220.000,00	32.773.300,00	18,70	142.446.700,00	
	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	29.999.800,00	0,00	0,00	29.999.800,00	
	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.305.461.181,00	27.740.076.854,00	19,22	116.565.384.327,00	
	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	125.606.872.000,00	23.512.505.000,00	18,72	102.094.367.000,00	
	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.424.025.661,00	2.028.369.254,00	27,32	5.395.656.407,00	
	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.274.563.520,00	2.199.202.600,00	19,51	9.075.360.920,00	
	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	498.000.000,00	61.883.810,00	12,43	436.116.190,00	
	0003	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	498.000.000,00	61.883.810,00	12,43	436.116.190,00	
	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	909.759.856,00	345.729.950,00	38,00	564.029.906,00	
	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	909.759.856,00	345.729.950,00	38,00	564.029.906,00	

KODE		U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KET
PROG	KEG			Rp.	%		
1		2	3	4	5	6	7
	0001	Penyusunan Standar Harga	231.129.550,00	133.231.540,00	57,64	97.898.010,00	
	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	26.872.700,00	0,00	0,00	26.872.700,00	
	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	293.788.256,00	80.391.320,00	27,36	213.396.936,00	
	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	91.172.500,00	17.461.590,00	19,15	73.710.910,00	
	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	73.395.150,00	44.794.000,00	61,03	28.601.150,00	
	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47.981.000,00	36.610.600,00	76,30	11.370.400,00	
	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	88.332.150,00	1.390.000,00	1,57	86.942.150,00	
	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	57.088.550,00	31.850.900,00	55,79	25.237.650,00	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;

- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKAD memiliki tugas yang cukup strategis dalam menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu, BPKAD juga mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan Belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Dari tugas dan fungsi BPKAD diatas, BPKAD mempunyai indikator kinerja pada urusan keuangan yaitu :

1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD.
 2. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu.
 3. Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah.
 4. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi.
- Adapun pencapaian pelayanan kinerja BPKAD sesuai indikator diatas dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13
1	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Paling lambat akhir Desember tahun anggaran sebelumnya
2	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SP2D terbit maks 2 hari stlh SPM terverifikasi
3	Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemyampaian LKD paling lambat 31 Maret tahun berikutnya
4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Aset Daerah tercatat dalam Aplikasi

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah untuk tahun 2025-2026.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain adalah :

1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
2. Jumlah SDM yang masih terbatas dibanding dengan volume pekerjaan yang ada;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang masih belum optimal ;
5. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga

berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindaklanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah.
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset Badan.

2.4 REVEIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPKAD dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh BPKAD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja BPKAD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja BPKAD senantiasa diselaraskan dengan Renstra BPKAD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dapat dilihat pada Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 sebagaimana table 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Mempawah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase capaian urusan pemerintah daerah	100%	Rp 6.453.145,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase capaian urusan pemerintah daerah	100%	Rp 6.453.145,00	
1.2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	Rp 33.999,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	Rp 33.999,00	
1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.000,00	
1.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	
1.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	
1.2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	
1.2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	
1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 14.999,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Rp 14.999,00	
1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 5.877.962,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 5.032.470,00	
1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	Rp 5.786.543,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	Rp 4.950.000,00	
1.2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 56.419,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 44.970,00	
1.2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 27.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 30.000,00	
1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 7.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 7.500,00	
1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 20.900,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 20.900,00	
1.2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Rp 20.900,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Rp 20.900,00	
1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	Rp 25.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	Rp 25.000,00	
1.2.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	Rp -	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	Rp -	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	Rp 25.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	Rp 25.000,00	
1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 106.285,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 394.330,00	
1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 5.565,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 33.396,00	
1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 20.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 76.829,00	
1.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 5.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 47.916,00	
1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 11.249,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 69.209,00	
1.2.6.7	Penyediaan Bahan/Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Rp -	Penyediaan Bahan/Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Rp 39.930,00	
1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp 55.745,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp 84.700,00	
1.2.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500 Dokumen	Rp 8.726,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500 Dokumen	Rp 42.350,00	
1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp -	
1.2.7.2	Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	Rp -	Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	Rp -	
1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	
1.2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	
1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	154 buah	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	154 buah	Rp -	
1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%	Rp 312.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%	Rp 312.200,00	
1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp -	
1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 235.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 235.400,00	
1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 76.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 76.800,00	
1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp 76.799,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp 76.799,00	
1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 16.001,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 16.001,00	
1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	Rp 31.550,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	Rp 31.550,00	
1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Rp 1.750,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Rp 1.750,00	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.2.9.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 unit	Rp 6.387,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 unit	Rp 6.387,00	
1.2.9.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	Rp 21.111,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	Rp 21.111,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 147.679.273,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 147.679.273,00	
2.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	Rp 1.261.997,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	Rp 1.261.997,00	
2.2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 132.250,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 132.250,00	
2.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 87.413,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 87.413,00	
2.2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 83.210,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 83.210,00	
2.2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 1.239,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 1.239,00	
2.2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.830,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.830,00	
2.2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.430,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.430,00	
2.2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Rp 296.987,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Rp 296.987,00	
2.2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Rp 500.860,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Rp 500.860,00	
2.2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Rp 100.778,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Rp 100.778,00	
2.2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perbendaharaan	100%	Rp 348.399,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perbendaharaan	100%	Rp 348.399,00	
2.2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 dokumen	Rp -	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 dokumen	Rp -	
2.2.2.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860 dokumen	Rp -	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860 dokumen	Rp -	
2.2.2.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 dokumen	Rp 62.029,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 dokumen	Rp 62.029,00	
2.2.2.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	Rp -	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	Rp -	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	Rp 49.070,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	Rp 49.070,00	
2.2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	Rp 227.400,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	Rp 227.400,00	
2.2.2.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 dokumen	Rp 9.900,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 dokumen	Rp 9.900,00	
2.2.2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp -	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp -	
2.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 417.231,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 417.231,00	
2.2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	124 laporan	Rp 5.433,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	n/a	Rp 5.433,00	
2.2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 dokumen	Rp 82.879,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 dokumen	Rp 82.879,00	
2.2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	Rp 18.881,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	Rp 18.881,00	
2.2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 laporan	Rp 163.715,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 dokumen	Rp 163.715,00	
2.2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 dokumen	Rp 135.832,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 dokumen	Rp 135.832,00	
2.2.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	
2.2.3.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	
2.2.3.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	Rp -	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	Rp -	
2.2.3.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp -	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp -	
2.2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 10.491,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 10.491,00	
2.2.3.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 lembaga	Rp -	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 lembaga	Rp -	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp 145.452.596,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp 145.452.596,00	
2.2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	Rp 125.584.133,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	Rp 125.584.133,00	
2.2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	Rp 7.424.025,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	Rp 7.424.025,00	
2.2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 12.444.438,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 12.444.438,00	
2.2.5	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	Rp 199.050,00	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	Rp 199.050,00	
2.2.5.2	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	Rp 199.050,00	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	Rp 199.050,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	Rp 647.338,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	Rp 1.865.861,00	
3.2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 647.338,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 1.865.861,00	
3.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	Rp 185.837,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	Rp 271.998,00	
3.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	Rp -	
3.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 dokumen	Rp 10.766,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 dokumen	Rp 10.766,00	
3.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 dokumen	Rp -	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 dokumen	Rp -	
3.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Rp 240.146,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Rp 588.162,00	
3.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp -	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp -	
3.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	Rp 48.598,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	Rp 185.000,00	
3.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 53.895,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 274.895,00	
3.2.1.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 laporan	Rp -	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 laporan	Rp 165.575,00	
3.2.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dokumen	Rp 39.981,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dokumen	Rp 39.981,00	
3.2.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 35.112,00	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 35.112,00	
3.2.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	Rp 33.003,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	Rp 33.003,00	
3.2.1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp -	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 261.369,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung BPKAD, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi. Mengingat BPKAD merupakan SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga penyajian tabel tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tidak dapat tersaji.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan pemerintah daerah termasuk SKPD di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan uraian di



atas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik.
2. Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Kabupaten Mempawah sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Mempawah dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Mempawah utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5) Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada rumusan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan perubahan RKPD Tahun 2025. Program, Kegiatan dan Pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Mempawah bisa dilihat pada tabel matriks Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Mempawah tahun 2025 yang tertuang pada Tabel. 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																							
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah							161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15						0,00			
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15						0,00			
	5	02			KEUANGAN							161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15						0,00			
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	95 persen	7.631.495.222,00	6.572.020.708,00	6.376.349.474,15							0,00		
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketetapan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan	-			-	100 persen	70.000.000,00	33.999.900,00	33.999.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	-			100	100	6.422.891.022,00	5.870.805.208,00	5.870.805.208,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	6.323.891.022,00	5.779.385.558,00	5.786.543.299,15	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	59.000.000,00	56.419.650,00	56.419.650,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	-			100 persen	100 persen	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	-			-	100 persen	70.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					49 Paket	49 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	10 Orang	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	-			95 persen	95 persen	287.950.000,00	248.076.150,00	248.076.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	27.828.300,00	5.565.660,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	59.250.000,00	59.250.000,00	20.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	36.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	34.999.700,00	11.249.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	84.700.000,00	75.000.000,00	55.745.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4500 Dokumen	4500 Dokumen	15.000.000,00	14.998.150,00	8.726.350,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			80 persen	80 persen	378.504.200,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.746.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				154 Unit	154 Unit	327.758.200,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 persen	95 persen	240.000.000,00	235.400.000,00	235.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	240.000.000,00	235.400.000,00	235.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 persen	95 persen	141.250.000,00	137.839.450,00	137.839.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23.000.000,00	22.859.450,00	16.001.615,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	62.000.000,00	62.000.000,00	31.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	1.750.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				53 Unit	53 Unit	21.500.000,00	18.250.000,00	6.387.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	159.956.700,00	108.439.100,00	87.413.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	164.806.300,00	102.380.600,00	83.210.700,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	124.955.200,00	54.839.000,00	1.239.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	79.816.000,00	31.706.600,00	29.830.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	79.625.000,00	79.230.600,00	29.430.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	375.228.300,00	375.228.300,00	296.987.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	528.192.000,00	528.192.000,00	500.860.022,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	191.457.800,00	122.274.050,00	100.778.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	-			100 persen	100 persen	606.404.990,00	492.850.000,00	492.850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				264 Dokumen	264 Dokumen	24.200.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				860 Dokumen	860 Dokumen	33.275.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				7 Dokumen	7 Dokumen	78.650.000,00	78.650.000,00	62.029.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	47.789.990,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	121.200.000,00	110.000.000,00	49.070.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	227.480.000,00	227.400.000,00	227.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				20 Dokumen	20 Dokumen	40.535.000,00	15.000.000,00	9.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	33.275.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	-			100 persen	100 persen	795.823.000,00	674.966.178,00	674.966.178,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				372 Laporan	372 Laporan	20.018.600,00	15.000.000,00	5.433.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				124 Dokumen	124 Dokumen	170.057.000,00	160.103.978,00	82.879.611,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	39.999.800,00	39.963.200,00	18.881.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	289.999.600,00	249.899.200,00	163.715.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	235.750.100,00	180.000.000,00	135.832.120,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																					0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																					0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	39.997.900,00	29.999.800,00	10.491.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realiasi pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak	-			100 persen	100 persen	147.721.911.710,00	144.887.635.520,00	144.887.635.520,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000.000,00	125.613.072.000,00	125.584.133.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.424.025.661,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.721.911.710,00	11.274.563.520,00	12.444.438.431,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Perizinan Tertentu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	247.299.225,00	240.359.550,00	185.837.842,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																						0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	35.241.795,00	30.762.700,00	10.766.945,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	479.479.395,00	346.453.256,00	240.146.869,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	824.812.093,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	138.943.500,00	138.943.500,00	48.598.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																						
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	205.520.100,00	104.279.150,00	53.895.150,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																						
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	135.000.000,00	90.000.000,00	39.981.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.322.150,00	100.322.150,00	35.112.752,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	155.749.300,00	76.808.550,00	33.003.582,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	36.750.110,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											J U M L A H		161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15							0,00	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan



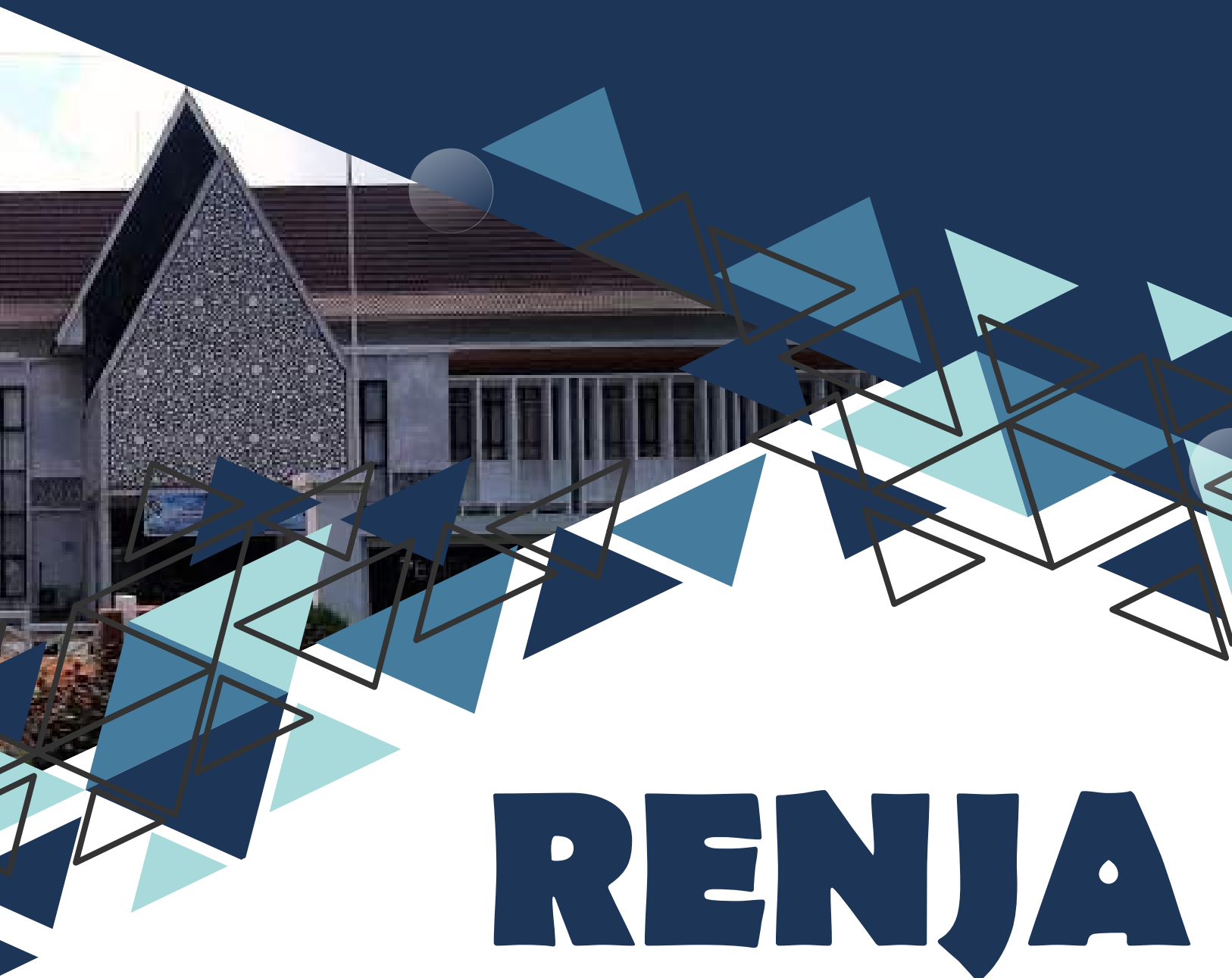
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian semoga Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Mempawah ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Mempawah pada umumnya.



**PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH**



RENJA

(RENCANA KERJA)

2025

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang berjangka waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025–2026. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai jenis kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah memuat indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya. Pada tahun 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merencanakan 2 (dua) program yang dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan-sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mempawah, Juni 2024
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mempawah

YUSRI, SE., M.Si
NIP. 19670322 199303 1 010



DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar isi iii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 15

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 41

3.3. Program dan Kegiatan 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 48

BAB V PENUTUP 61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program/Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pencapaian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPPRD	42
Tabel 3.2	Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah	43
Tabel 4.1	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025	53

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum dalam menjalankan *pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government)*. Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Harapan ke depan visi dan misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat terwujud. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah. Dalam peraturan tersebut tertuang bahwa Tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah.
5. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pajak dan retribusi daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya..

Dengan demikian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi dan elemen pokok di Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Maka Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang disusun oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah digunakan sebagai landasan melaksanakan fungsi. Sehingga tujuan/sasaran strategis sebagaimana dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat direalisasikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 sebagai berikut :

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- g) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Review Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- p) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
- r) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 2);
- s) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
- t) Peraturan Bupati No 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 89);

- u) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6);
- v) Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Menjadi pedoman dalam menjaga upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yaitu pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L, Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Membahas rencana kerja dan pendanaan program kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan kesimpulan penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan badan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra maupun Renja, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan pada jangka menengah, yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Benefits adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada outputs atau outcomes dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (ultimate outcomes) dan indikator benefits. Sedangkan indikator dampak secara umum masih terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya terbangun. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) pada level sasaran strategis digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja utamanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih

independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah di tahun 2023.

Anggaran yang di alokasikan kepada BPPRD setelah perubahan anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp.8.743.862.485,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.8.647.182.585,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.96.679.900,00 dengan jumlah Program atau Kegiatan menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tahun anggaran 2023 sebanyak 2 (*dua*) program dan 9 (*sembilan*) kegiatan serta 38 (*tiga puluh delapan*) sub kegiatan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja pada level sasaran strategis yakni rasio PAD terhadap APBD dan Nilai Sakip SKPD, yang dirinci Kembali pada level program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

**Program/Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka
Pencapaian Kinerja Tahun 2023**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA (TAHUN 2023)		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
1					2		4	5	6
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5	02				Keuangan				
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		68	75,26	110,68%
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	98,79%	98,79%
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	44,42%	44,42%
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Perangkat Daerah		100%	75,45%	75,45%
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	90,35%	90,35%
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	99,75%	99,75%
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	99,98%	99,98%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	89,13%	89,13%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	97,62%	97,62%
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		11,73%	13,89%	118,4%
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	94,47%	94,47%

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota telah mencapai target kinerja berupa pencapaian nilai SAKIP dengan nilai capaian 110,68% dimana target untuk Nilai SAKIP adalah 68 dan hasil akhir berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP adalah 75,26 dengan predikat BB. Adapun hasil evaluasi SAKIP untuk BPPRD adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja;

Kondisi pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipenuhi, yaitu telah tersedianya Pedoman teknis perencanaan kinerja, Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, menengah dan jangka pendek Dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja dan Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

Untuk Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja, ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART dan telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

Adapun Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja, dapat digambarkan bahwa anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai

b. Pengukuran Kinerja;

Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja telah terdapat definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja tersebut, namun belum ada pedoman teknis serta mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP)

Untuk Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja, setiap level dalam organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, dan pengumpulan data kinerja serta Pengukuran Capaian Kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)

Sedangkan Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (Pemberian/Pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja;

Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja, telah disusun secara berkala, dan telah diformalkan dan disampaikan tepat waktu namun laporan kinerja belum dipublikasikan.

Adapun kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja, Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas dan sesuai dengan standar dan telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dokumen laporan kinerja juga telah menginformasikan kinerja di level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) dan juga menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Kondisi pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilaksanakan oleh APIP secara berjenjang.

Adapun Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal, adalah Evaluasi Akuntabilitas Internal telah dilaksanakan sesuai standar, dan dilaksanakan oleh

SDM yang memadai dengan pendalaman yang memadai pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).

Sedangkan kondisi pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal yaitu telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, namun rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Kemudian untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah juga telah mencapai taret sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebesar 118,4%. Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tersebut adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini menggambarkan Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap total pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Semakin tinggi Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD, maka semakin besar kemandirian keuangan daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai program-programnya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2023 Target Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 11,73 %, dengan 13,89 % sehingga dikategorikan berhasil dengan capaian 118,4 %. Capaian target tersebut tidak terlepas dari terlampauinya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yakni sebesar 119,41% dimana meliputi Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 107,77%, Retribusi Daerah sebesar 78,29%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 100%, dan Lain Lain PAD yang Sah sebesar 151,40%.

Terdapat hambatan internal didalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan sehingga perlu didukung beberapa hal sebagai berikut :

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal kuantitas dan SDM yang memiliki keahlian dibidang perpajakan.
- Anggaran belanja OPD yang terbatas berpengaruh terhadap turunnya petugas dilapangan untuk melakukan sosialisasi, penagihan, dan pengawasan pajak.

Untuk menyikapi hambatan internal tersebut perlu adanya tindakan agar kinerja tetap dapat dicapai atau ditingkatkan antara lain:

- penambahan SDM aparatur BPPRD secara kuantitas dan kualitas yang dapat ditingkatkan dengan mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian dibidang administrasi dan perpajakan. Peningkatan SDM diharapkan terselenggaranya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terselenggaranya pelayanan, dan pengawasan yang optimal sehingga tercapainya visi OPD. Peningkatan kemampuan atau profesionalisme aparatur untuk mengelola pajak dan retribusi diharapkan membawa dampak atau kemajuan yang pesat bagi penerimaan PAD di Kabupaten Mempawah
- Meningkatkan anggaran belanja OPD untuk melakukan sosialisasi, penagihan, dan pengawasan pajak. Anggaran belanja yang cukup dapat meningkatkan pelayanan dan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi OPD untuk meningkatkan target kinerjanya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pembentukan BPPRD Kabupaten Mempawah dimaksud untuk memaksimalkan pelayanan dan pendapatan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah resmi berdiri sendiri sejak Januari Tahun 2017, sebelumnya masih bergabung dengan organisasi perangkat daerah lain yaitu Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah pada Bidang Pendapatan. Kinerja BPPRD dapat diukur dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah dari tahun 2019-2023 relatif masih kecil dan berada pada kategori instruktif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang rendah untuk membiayai program-programnya sendiri dan bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian tingkat kemandirian masih harus terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah dengan upaya menggali potensi sumber PAD secara lebih optimal, mengingat

“Gap” atau kesenjangan antara PAD dengan Pendapatan Daerah dalam APBD masih jauh dapat di lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2019 s.d 2022

TAHUN	REALISASI		RASIO (%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	PENDAPATAN DAERAH (Rp)	
2019	87.577.542.983,87	1.032.369.990.491,21	8,48
2020	98.615.210.566,16	976.603.858.971,55	10,10
2021	96.153.931.297,60	1.021.982.034.017,14	9,41
2022	154.466.054.038,56	1.049.304.823.148,81	14,72

Keberhasilan dalam pengelola pajak dan retribusi harus didukung sumber daya aparatur yang profesional, kegiatan, dan pendanaan yang cukup untuk mengoptimalkan kinerja. Hal tersebut harus didukung oleh daerah dan dukungan wajib pajak atau masyarakat melalui kesadaran membayar pajak, retribusi, dan kontribusi penerimaan daerah lainnya untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Mempawah.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, merupakan Badan Tipologi B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Peraturan Bupati Mempawah nomor 89 Tahun 2021, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mempawah adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan;** merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. **Sekretariat;** dipimpin seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
 - c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
 - d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - e. Pengumpulan, penyajian dan pengolahan data;

- f. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan (laporan rutin, semester dan laporan tahunan kinerja) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi Sub Bagian sebagai berikut :

- 1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;** mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Badan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Badan;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;

- h. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayan public di lingkungan Badan;
- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pajak dan Retribusi; dipimpin seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pajak dan Retribusi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pajak dan retribusi. Bidang Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak dan retribusi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pajak dan retribusi;
- d. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. Pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah di bidang Pajak dan Retribusi;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pajak dan retribusi;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi;

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
- c. Penyiapan bahan fasilitas, koordinasi dan pembinaan di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi;
- f. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- h. Pembuatan, pemeliharaan dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pajak dan Retribusi;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.

2) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi;

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penagihan pajak dan retribusi. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah di bidang penagihan pajak dan retribusi;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pajak dan Retribusi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pajak dan Retribusi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.

4. Bidang PBB dan BPHTB; dipimpin seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang PBB dan BPHTB;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PBB dan BPHTB;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang PBB dan BPHTB;
- d. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan
- e. Pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah di bidang PBB dan BPHTB;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang PBB dan BPHTB;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang PBB dan BPHTB;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang PBB dan BPHTP ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang PBB dan BPHTB membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
- c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
- e. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang PBB dan BPHTB;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penagihan PBB dan BPHTB, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
- c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah di sub bidang penagihan PBB dan BPHTB;

- e. Penyiapan bahan pemungutan dan penyetoran PBB dan BPHTB;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang PBB dan BPHTB;
- g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang PBB dan BPHTB;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang PBB dan BPHTB yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan; dipimpin seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pelaporan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengendalian dan pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan pelaporan;
- d. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah di bidang pengendalian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- g. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan;** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pengendalian dan pengaduan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di sub bidang pengendalian dan pengaduan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah di sub bidang pengendalian dan pengaduan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pajak;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pengaduan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
- 2) Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan;** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pelaporan dan pendataan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan pendataan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pelaporan dan pendataan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pelaporan dan pendataan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah bidang pelaporan dan pendataan;
- f. Penyiapan bahan pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- g. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pelaporan;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelaporan dan pendataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

7. Kelompok Jabatan Fungsional; berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kabupaten Mempawah merupakan Kabupaten yang telah beberapa kali mengalami pemekaran yakni dipecah menjadi Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya, dengan Kabupaten Mempawah menjadi kabupaten Induk yang mengakibatkan Kabupaten Mempawah harus mampu menata ulang berbagai kebijakan pembangunan. Konsekuensi Logis dari akibat pemekaran Kabupaten Mempawah berdampak pada mengecilnya sumber-sumber penerimaan yang semula memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasca Pemekaran Kabupaten Mempawah membutuhkan dana yang relatif besar untuk pembangunan dan penyediaan Infrastruktur, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Mempawah dihadapkan pada terbatasnya kemampuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada kemampuan penggalan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya.

Langkah-langkah strategis yang perlu untuk dilaksanakan adalah Identifikasi potensi penerimaan PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penerimaan lainnya. Dari hasil Identifikasi tersebut akan diketahui jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya yang perlu di Intensifkan Penerimaannya, serta jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya yang baru (ekstensifikasi) untuk menjadi sumber potensi Kabupaten Mempawah.

Terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap isu-isu strategis tersebut diatas, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai peranan penting terutama dalam usaha peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah. BPPRD sebagai organisasi perangkat daerah yang baru tentunya memiliki banyak permasalahan yang akan dihadapi untuk memperoleh keberhasilan atas setiap program dan kegiatan atau tujuan organisasi. Meskipun target yang dicapai sudah cukup baik, namun masih terdapat permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan dan hasil belum maksimal serta pencapaian sasaran yang masih dapat ditingkatkan. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah PNS dan kualitas Sumber Daya Aparatur serta Penempatan pegawai masih belum optimal.
- b. Terbatasnya anggaran OPD.
- c. Kuantitas jenis pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat berkembang karena masih dibatasi oleh perangkat hukum yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang secara tegas mencantumkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Demikian juga ketentuan yang mengatur bahwa pajak yang telah dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah yang lebih tinggi tidak boleh dipungut oleh daerah di bawahnya, sehingga membatasi daerah untuk menggali sumber pendapatan baru.

- d. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dipungut secara self assesment (menghitung sendiri) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar.
- e. Masih terdapat tunggakan pembayaran rekening listrik oleh pelanggan PT. PLN (Persero) di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Mempawah, sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- f. Dasar pengenaan pajak (PBB-P2) dan tarif beberapa jenis retribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga berpengaruh pada rendahnya nilai pajak (PBB-P2) maupun retribusi yang terhutang.
- g. Peran serta masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pembayaran pajak (PBB-P2) melalui jasa perbankan secara online relatif masih kecil.
- h. BUMD yang ada belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan kontribusi pada PAD. Selain itu pengelolaan BUMD belum mampu menangkap peluang usaha sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Mempawah.
- i. Pengembangan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah masih terkendala sarana dan prasarana yang masih terbatas, mengingat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang juga masih terbatas.
- j. Belum adanya tenaga aparatur pengelola pajak yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis secara khusus di bidang perpajakan seperti appraisal (penilai) dan juru sita.
- k. Masih terdapat permasalahan tentang akurasi data PBB-P2 dan laporan realisasi pendapatan serta kian membengkaknya data piutang PBB-P2 meskipun telah dilakukan penghapusan data piutang pasca penyerahan dari KPP Pratama Pontianak.

Pada masa otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah, tidak memberatkan wajib pajak dan mampu mendukung perekonomian masyarakat.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, BPPRD Kabupaten Mempawah perlu mengembangkan pelayanan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penambahan PNS sesuai kebutuhan, berusaha aktif mengikuti pelatihan atau bimtek terkait perpajakan sesuai anggaran yang tersedia, serta berusaha menambah PNS

yang memiliki latar belakang perpajakan kepada instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah.

- 2) Menambah anggaran OPD dan memaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan meningkatkan PAD khususnya pajak daerah.
- 3) Melakukan kajian potensi terhadap jenis pajak dan retribusi daerah yang belum dipungut sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, seperti Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 4) Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam bentuk penyuluhan maupun pemeriksaan pajak daerah serta memberikan penghargaan dan sanksi, sehingga wajib pajak termotivasi untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membayar listrik tepat waktu melalui himbauan dalam bentuk spanduk, stiker, siaran radio maupun kegiatan pertemuan.
- 6) Melakukan penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam rangka meningkatkan nilai jual objek Pajak (NJOP) PBB-P2, serta melakukan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan dasar pengenaan PBB-P2.
- 7) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan pelayanan pembayaran pajak (PBB-P2) yang menggunakan fasilitas perbankan sehingga semakin banyak masyarakat yang melakukan pembayaran secara online.
- 8) Meningkatkan perkembangan usaha BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
- 9) Melakukan pemeliharaan dan mengupayakan peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 10) Mengusulkan aparatur pengelola pajak agar dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga teknis di bidang perpajakan (Appraisal, Juru sita).
- 11) Melakukan inovasi dalam upaya pemungutan pajak maupun mendata potensi-potensi pajak yang dapat dikembangkan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah dan tingkat kinerja yang



dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah, dengan arahan Bupati Mempawah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.



Tabel 2.3 (Tabel.T-C 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah				11.929.550.000,00	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah				11.929.550.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG EKONOMI				11.929.550.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG EKONOMI				11.929.550.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Mempawah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88	9.004.650.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Mempawah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88	9.004.650.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	39.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	39.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	17.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	17.500.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Administrasi Keuangan	90%	7.322.500.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Administrasi Keuangan	90%	7.322.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	7.250.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	7.250.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	45.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	45.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	80 %	17.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	80 %	17.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17.500.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	90%	77.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	90%	77.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.500.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	40.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	40.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	90%	153.100.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	90%	153.100.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	3.850.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	3.850.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.300.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.300.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.850.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.850.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	75.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	75.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 Dokumen	6.600.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 Dokumen	6.600.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	1.035.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	1.035.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	435.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	435.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Mempawah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	50.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	300.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	300.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	176.550.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	176.550.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	87.450.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	87.450.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.100.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.100.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	183.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mempawah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	183.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	50.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	20.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Dipelihara/Direhabilitasi					yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	28.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	28.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	60.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	60.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Mempawah	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%	2.924.900.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Mempawah	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%	2.924.900.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Mempawah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	58%	2.924.900.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Mempawah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	58%	2.924.900.000,00	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	50.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	50.000.000,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	3 Dokumen	75.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	3 Dokumen	75.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	500.000.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan	110.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan	110.000.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	500.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	500.000.000,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas	Kabupaten Mempawah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	500 Obyek Pajak	110.000.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	500 Obyek Pajak	110.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	71 Dokumen	420.000.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	71 Dokumen	420.000.000,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2000 Layanan	143.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2000 Layanan	143.000.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	124.300.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	124.300.000,00	
	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36 Dokumen	517.000.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36 Dokumen	517.000.000,00	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	42.900.000,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	42.900.000,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	121.000.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	121.000.000,00	



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	125.400.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	125.400.000,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6 Laporan	36.300.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6 Laporan	36.300.000,00	



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada pada BPPRD Kabupaten Mempawah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah belum melaksanakan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan Tujuan RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik
2. Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah

3.2.1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan atau priodik yang dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja Kabupaten, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksanaanya.

Adapun sasaran strategis Perangkat Daerah yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPRD
Tahun 2025 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET		TARGET AKHIR
						2025	2026	
Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi)x Nilai Tertimbang	Nilai	83,86	84,21	84,50	84,50
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah	(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi)x Nilai Tertimbang	Nilai	84,58	85,5	86	86
Meningkatkan Sektor Unggulan Daerah		Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	(PAD / APBD) x 100%	Persen	14,72	15,18	16,33	16,33
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pertumbuhan PAD	[(PAD tahun t - PAD tahun t-1) / (PAD tahun t-1)] x 100%	Persen	46,44	8,11	8,61	8,61

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam kerjasama dengan masyarakat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menetapkan program-program yang berjumlah 2 program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan. Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Pada anggaran tahun 2025, jumlah anggaran belanja BPPRD sebesar Rp.15,00 terdiri atas Belanja Belanja Operasi sebesar Rp.8.583.444.887,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.345.746.801,00 (masih dalam bentuk draf/rancangan APBD). Terdiri atas 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan untuk dilaksanakan oleh bagian sekretariat BPPRD dan tiga bidang di lingkungan BPPRD.



Tabel 3.2 (Tabel.T-C 33 PMDN86/2017)
Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	KEUANGAN				11.929.550.000,00				12.799.560.000,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		88	9.004.650.000,00			90	9.597.170.000,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kabupaten Mempawah	100%	39.500.000,00	DAU		100%	39.500.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	2 Dokumen	6.000.000,00	DAU		2 Dokumen	6.000.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	4.000.000,00	DAU		1 Dokumen	4.000.000,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	4.000.000,00	DAU		1 Dokumen	4.000.000,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	4.000.000,00	DAU		1 Dokumen	4.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen DPA-SKPD							
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	4.000.000,00	DAU		1 Dokumen	4.000.000,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	3 Laporan	17.500.000,00	DAU		3 Laporan	17.500.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kabupaten Mempawah	90%	7.322.500.000,00	DAU		90%	8.047.500.000,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	35 Orang/ bulan	7.250.000.000,00	DAU		35 Orang/ bulan	7.975.000.000,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	3000 Dokumen	45.000.000,00	DAU		3000 Dokumen	45.000.000,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	2 Laporan	17.500.000,00	DAU		2 Laporan	17.500.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	3 Laporan	10.000.000,00	DAU		3 Laporan	10.000.000,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Mempawah	80 %	17.500.000,00	DAU		80 %	17.500.000,00
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mempawah	2 Laporan	17.500.000,00	DAU		2 Laporan	17.500.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Mempawah	90%	77.500.000,00	DAU		90%	77.500.000,00
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	37.500.000,00	DAU		1 Paket	37.500.000,00
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	15 Orang	40.000.000,00	DAU		15 Orang	40.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	Kabupaten Mempawah	90%	153.100.000,00	DAU		90%	168.410.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	3.850.000,00	DAU		1 Paket	4.235.000,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	25.300.000,00	DAU		1 Paket	27.830.000,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	14.850.000,00	DAU		1 Paket	16.335.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	27.500.000,00	DAU		1 Paket	30.250.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	25 Laporan	75.000.000,00	DAU		25 Laporan	82.500.000,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	750 Dokumen	6.600.000,00	DAU		750 Dokumen	7.260.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	75%	1.035.000.000,00	DAU		75%	860.000.000,00
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	435.000.000,00	DAU		6 Unit	260.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	30 Unit	50.000.000,00	DAU		30 Unit	50.000.000,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	5 Unit	300.000.000,00	DAU		10 Unit	300.000.000,00
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	15 Unit	250.000.000,00	DAU		15 Unit	250.000.000,00
5.02.01.2.07.0011	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	95%	176.550.000,00	DAU		95%	185.460.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	2 Laporan	87.450.000,00	DAU		2 Laporan	87.450.000,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	89.100.000,00	DAU		1 Laporan	98.010.000,00
5.02.01.2.08.0004	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	75%	183.000.000,00	DAU		75%	201.300.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Mempawah	1 Unit	25.000.000,00	DAU		1 Unit	27.500.000,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Mempawah	27 Unit	50.000.000,00	DAU		28 Unit	55.000.000,00
5.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	1 Unit	20.000.000,00	DAU		1 Unit	22.000.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	30 Unit	28.000.000,00	DAU		35 Unit	30.800.000,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	32 Unit	60.000.000,00	DAU		32 Unit	66.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.0010	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	Kabupaten Mempawah	100%	2.924.900.000,00	DAU		100%	3.202.390.000,00
5.02.01.2.09.0011	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten Mempawah	58%	2.924.900.000,00	DAU		60%	3.202.390.000,00
5.02.04	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	3 Dokumen	50.000.000,00	DAU		3 Dokumen	50.000.000,00
5.02.04.2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	3 Dokumen	75.000.000,00	DAU		3 Dokumen	82.500.000,00
5.02.04.2.01.0001	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	50.000.000,00	DAU		1 Laporan	55.000.000,00
5.02.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	1 Unit	500.000.000,00	DAU		1 Unit	550.000.000,00
5.02.04.2.01.0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	24 Laporan	110.000.000,00	DAU		24 Laporan	121.000.000,00
5.02.04.2.01.0004	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	500.000.000,00	DAU		1 Laporan	550.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0005	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kabupaten Mempawah	500 Obyek Pajak	110.000.000,00	DAU		500 Obyek Pajak	121.000.000,00
5.02.04.2.01.0006	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	71 Dokumen	420.000.000,00	DAU		71 Dokumen	462.000.000,00
5.02.04.2.01.0007	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	2000 Layanan	143.000.000,00	DAU		2000 Layanan	157.300.000,00
5.02.04.2.01.0008	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kabupaten Mempawah	30 Dokumen	124.300.000,00	DAU		30 Dokumen	136.730.000,00
5.02.04.2.01.0009	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	36 Dokumen	517.000.000,00	DAU		36 Dokumen	568.700.000,00
5.02.04.2.01.0010	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	12 Dokumen	42.900.000,00	DAU		12 Dokumen	47.190.000,00
5.02.04.2.01.0011	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Mempawah	12 Dokumen	121.000.000,00	DAU		12 Dokumen	123.100.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0012	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	125.400.000,00	DAU		1 Laporan	137.940.000,00
5.02.04.2.01.0013	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Mempawah	6 Laporan	36.300.000,00	DAU		6 Laporan	39.930.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebesar Rp11.929.550.000,00 didasari Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah 2025-2026. Renja yang dibuat ini merupakan pedoman bagi internal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus berpedoman pada indikator kinerja yang sudah tertuang pada Renja 2025 dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun Anggaran 2025

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02	KEUANGAN					11.929.550.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88			9.004.650.000,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%			39.500.000,00	DAU
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	6.000.000,00	DAU
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	4.000.000,00	DAU
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	4.000.000,00	DAU
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	4.000.000,00	DAU



**Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen DPA-SKPD					
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	4.000.000,00	DAU
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	17.500.000,00	DAU
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Administrasi Keuangan	90%		Kabupaten Mempawah	7.322.500.000,00	DAU
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	7.250.000.000,00	DAU
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	45.000.000,00	DAU
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	17.500.000,00	DAU



**Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	10.000.000,00	DAU
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	80 %		Kabupaten Mempawah	17.500.000,00	DAU
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	17.500.000,00	DAU
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	90%		Kabupaten Mempawah	77.500.000,00	DAU
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	BPPRD	Kabupaten Mempawah	37.500.000,00	DAU
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	BPPRD	Kabupaten Mempawah	40.000.000,00	DAU
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	90%		Kabupaten Mempawah	153.100.000,00	DAU



**Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	BPPRD	Kabupaten Mempawah	3.850.000,00	DAU
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	BPPRD	Kabupaten Mempawah	25.300.000,00	DAU
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	BPPRD	Kabupaten Mempawah	14.850.000,00	DAU
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	BPPRD	Kabupaten Mempawah	27.500.000,00	DAU
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	75.000.000,00	DAU
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	6.600.000,00	DAU
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%		Kabupaten Mempawah	1.035.000.000,00	DAU
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	435.000.000,00	DAU
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	50.000.000,00	DAU



**Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	300.000.000,00	DAU
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	250.000.000,00	DAU
5.02.01.2.07.0011	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%		Kabupaten Mempawah	176.550.000,00	DAU
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	87.450.000,00	DAU
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	89.100.000,00	DAU
5.02.01.2.08.0004	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%		Kabupaten Mempawah	183.000.000,00	DAU
5.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	25.000.000,00	DAU



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kendaraan Dinas Jabatan						
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	50.000.000,00	DAU
5.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	20.000.000,00	DAU
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	28.000.000,00	DAU
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	60.000.000,00	DAU
5.02.01.2.09.0010	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%	BPPRD	Kabupaten Mempawah	2.924.900.000,00	DAU
5.02.01.2.09.0011	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	58%		Kabupaten Mempawah	2.924.900.000,00	DAU
5.02.04	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	50.000.000,00	DAU



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	75.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0001	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	50.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	BPPRD	Kabupaten Mempawah	500.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	110.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0004	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	500.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0005	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	500 Obyek Pajak	BPPRD	Kabupaten Mempawah	110.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0006	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	71 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	420.000.000,00	DAU



Rencana Kerja (RENJA)
BPPRD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	PAGU	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.2.01.0007	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2000 Layanan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	143.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0008	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	124.300.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0009	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	517.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0010	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	42.900.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0011	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	BPPRD	Kabupaten Mempawah	121.000.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0012	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	125.400.000,00	DAU
5.02.04.2.01.0013	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6 Laporan	BPPRD	Kabupaten Mempawah	36.300.000,00	DAU

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 didasari Rencana Strategis BPPRD Kabupaten Mempawah 2025-2026. Renja yang dibuat ini merupakan pedoman bagi internal BPPRD Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus berpedoman pada indikator kinerja yang sudah tertuang pada Renja 2025.

Renja merupakan suatu hal yang penting dalam sistem Pemerintahan. Renja yang dibuat secara konseptual merupakan pedoman perencanaan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan daerah. Sebagai dokumen perencanaan strategis untuk menjabarkan potret permasalahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai ketentuan dan dapat dilaksanakan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Mempawah, Juni 2024
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mempawah



YUSRI, SE., M.Si
NIP. 19670322 199303 1 010

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN MEMPAWAH**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dilimpahkan kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan .

Sebagai salah satu instrument dalam perencanaan Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) yang akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) BKPSDM Kabupaten Mempawah Tahun 2025 .

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang rencana kegiatan Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah untuk Tahun 2025 dan sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Mempawah, Juli 2025

Plt.Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mempawah

Drs. TAUFIKURAHMAN,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680725 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025..... 3

1.4. Maksud dan Tujuan 4

1.5. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaiannya 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 19

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM..... 19

3.3. Program dan Kegiatan 19

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 23

BAB V PENUTUP 41

BAB I

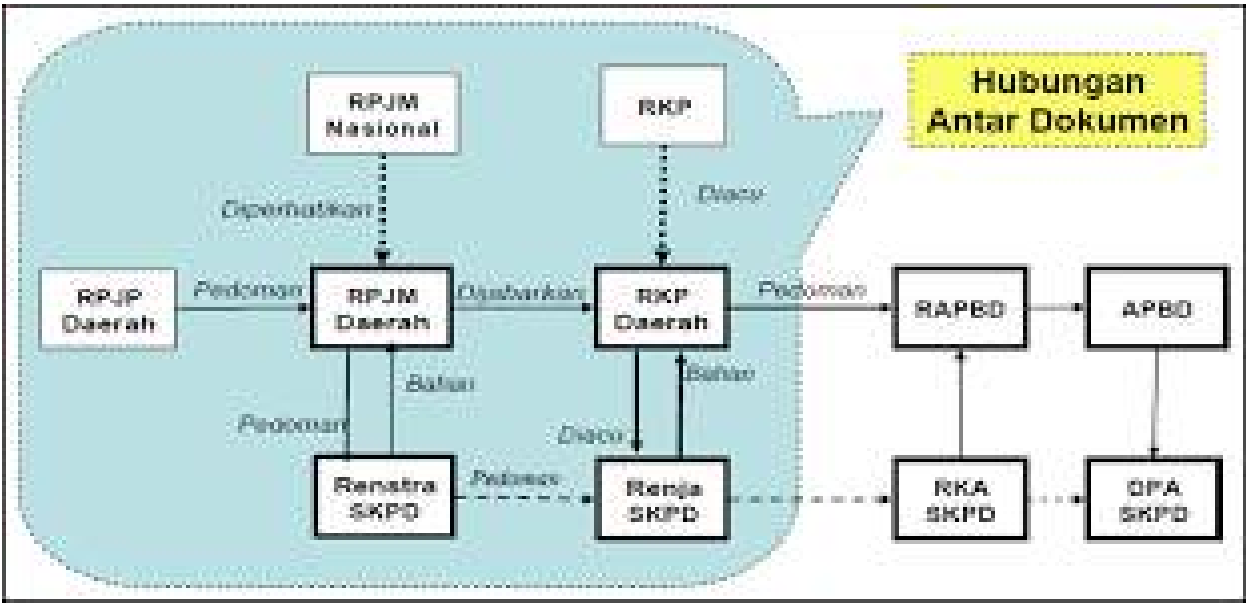
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) dan Renja Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mempawah sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah daerah menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dalam sebuah Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja). Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Gambar 1.1 Keterkaitan Perubahan Renja dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah tahun 2025 ini dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara

Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025.

1.3. Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat 1 Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sebagaimana penjelasan pasal 343 ayat 1 poin a dan b, BKPSDM telah melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap target kinerja dan keuangan di beberapa kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja badan sampai dengan akhir tahun.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini adalah untuk menyesuaikan target kinerja dan keuangan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II kedalam dokumen perencanaan yang lebih rinci agar dapat diimplementasikan secara tepat guna, tepat sasaran, efisien dan efektif serta memenuhi kaidah akuntabilitas publik. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja ini adalah:

1. Memberikan panduan kerja bagi seluruh komponen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (P-RKA) tahun 2025 bagi unit kerja di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah.
3. Memberikan umpan balik kepada pengambil kebijakan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten sehingga diharapkan muncul kebijakan alokasi yang lebih memadai untuk mengoptimalkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi program dan kegiatan dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menyukseskan pelaksanaan Renja.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaiannya

Dituangkannya program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mempawah. Selain itu juga dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/ tingkat keberhasilan BKPSDM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berkala untuk memonitoring pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan capaian kinerja terhadap renstra dituangkan dalam Tabel 2.1.

Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dan Capaian
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kabupaten Mempawah

Sasaran	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Tujuan,Sasaran, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Penanggu ng Jawab
							I		II		III		IV						
				Kinerja	Satuan	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	R p.	Kinerja	Rp .	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
Meningkatn ya indeks kepuasan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	90 Persen	90	Persen	4,091,029,308.00		714,727,525.00		1,098,809,533		-	-		1,813,537,058	41.98	21.31	Sekretariat	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	95	Persen	31,589,400.00		13,800,000.00		-		-	-		13,800,000.00	41.67	26.74	Sekretariat	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	Dokumen	5,000,000.00	1	2,580,000.00		-				1	2,580,000.00	50.00	51.60	Sekretariat	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	3,000,000.00		-		-				0	-	-	-	Sekretariat	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	2,644,700.00		-		-				0	-	-	-	Sekretariat	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	3,300,000.00	1	1,440,000.00		-				1	1,440,000.00	100.00	43.64	Sekretariat	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	2,644,700.00		-		-				0	-	-	-	Sekretariat	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3	Laporan	15,000,000.00	3	9,780,000.00		-				3	9,780,000.00	100.00	65.20	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan Administrasi Keuangan	95 Persen	95	Persen	3,736,025,008.00		665,522,038.00		1,070,168,177.00		-	-		1,735,690,215.00	62.50	38.63	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31/bulan Orang/bulan	31	orang/bulan	3,691,965,008.00	31	656,462,038.00		1,059,263,177.00				31	1,715,725,215.00	100.00	46.47	Sekretariat
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	Dokumen	24,060,000.00	3	3,510,000.00	3	6,465,000.00				6	9,975,000.00	50.00	41.46	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	Laporan	15,000,000.00	1	5,550,000.00		4,440,000.00				1	9,990,000.00	100.00	66.60	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	Laporan	5,000,000.00		-		-				0	-	-	-	Sekretariat
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	100	Persen	11,000,000.00		3,470,000.00		2,100,000.00		-	-		5,570,000.00	100.00	50.64	Sekretariat
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5	Laporan	11,000,000.00	5	3,470,000.00		2,100,000.00				5	5,570,000.00	100.00	50.64	Sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100	Persen	25,000,000.00		2,750,000.00		440,000.00		-	-		3,190,000.00	50.00	12.76	Sekretariat
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8	Orang	25,000,000.00	2	2,750,000.00	2	440,000.00				4	3,190,000.00	50.00	12.76	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum	100 Persen	100	Persen	82,011,500.00		9,196,203.00		9,652,562.00		-	-		18,848,765.00	6.67	10.47	Sekretariat

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	Paket	6,000,000.00		-		-				0	-	-	Sekretariat	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	Paket	18,024,000.00		-		-				0	-	-	Sekretariat	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	Paket	4,000,000.00		-		-				0	-	-	Sekretariat	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	Paket	18,987,500.00		-		-				0	-	-	Sekretariat	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10	Laporan	30,000,000.00	2	9,196,203.00	2	9,652,562.00				4	18,848,765.00	40.00	62.83	Sekretariat
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2	Dokumen	5,000,000.00		0		-				0	-	-	Sekretariat	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Persen	80	Persen	27,902,200.00		-		-		-	-		-	-	Sekretariat	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2	Unit	27,902,200.00		-		-				0	-	-	Sekretariat	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	95	Persen	120,000,000.00		18,739,284.00		16,448,794.00		-	-		35,188,078.00	50.00	29.32	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36	Laporan	120,000,000.00	9	18,739,284.00	9	16,448,794.00				18	35,188,078.00	50.00	29.32	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	95	Persen	57,501,200.00		1,250,000.00		-		-	-		1,250,000.00	25.00	1.95	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	Unit	16,000,000.00	1	1,250,000.00		-				1	1,250,000.00	100.00	7.81	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11	Unit	20,931,200.00		-		-				0	-	-	Sekretariat	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	Unit	14,600,000.00		-		-				0	-	-	-	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15	Unit	5,970,000.00		-		-				0	-	-	-	Sekretariat
Meningkatnya manajemen ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80 %	80	Persen	5,514,471,500.00		236,815,765.00		159,087,484.00		-	-		395,903,249.00	32.98	11.59	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase capaian kegiatan pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	85 Persen	85	Persen	463,501,800.00		68,933,800.00		94,581,589.00		-	-		163,515,389.00	40.00	21.33	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1	Dokumen	256,833,900.00	1	41,273,800.00		75,192,676.00				1	116,466,476.00	100.00	45.35	Bidang Pengadaan
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1	Dokumen	29,706,900.00		-	1	2,320,000.00				1	2,320,000.00	100.00	7.81	Bidang Pengadaan
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1	Lembaga	50,000,000.00		-		-				0	-	-	-	Bidang Diklat
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	Dokumen	83,654,000.00		27,660,000.00		17,068,913.00				0	44,728,913.00	-	53.47	Bidang Pengadaan
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1	Dokumen	43,307,000.00		-		-				0	-	-	-	Bidang Pengadaan
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase capaian kegiatan mutasi dan promosi ASN	70 Persen	70	Persen	834,652,500.00		30,866,200.00		25,955,895.00		-	-		56,822,095.00	66.67	7.08	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4	Dokumen	708,038,500.00	2	27,026,200.00	2	20,351,465.00				4	47,377,665.00	100.00	6.69	Bidang Diklat
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	6	Dokumen	64,907,000.00	3	3,840,000.00	3	5,604,430.00				6	9,444,430.00	100.00	14.55	Bidang Pengadaan
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1	Dokumen	61,707,000.00		-		-				0	-	-	-	Bidang Diklat

	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase capaian pengembangan kompetensi ASN	60 Persen	60	Persen	4,114,168,500.00		137,015,765.00		38,550,000.00		-		-		175,565,765.00	25.27	9.40	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50	orang	599,223,600.00	2	132,695,765.00		-				2		132,695,765.00	4.00	22.14	Bidang Diklat
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1	Dokumen	3,166,941,980.00		-	1	16,550,000.00				1		16,550,000.00	100.00	0.52	Bidang Diklat
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85 Orang	85	orang	312,500,000.00		-	2	22,000,000.00				2		22,000,000.00	2.35	7.04	Bidang Diklat
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Dokumen	1	Dokumen	10,502,920.00		-		-				0		-	-	-	Bidang Diklat
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	10 Orang	10	orang	25,000,000.00	2	4,320,000.00		-				2		4,320,000.00	20.00	17.28	Bidang Diklat
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	100 Persen	100	Persen	102,148,700.00		-				-					-	8.55	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1	Laporan	27,384,000.00		-		-				0		-	-	-	Bidang Diklat
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	20	orang	24,485,300.00		-		4,410,000.00				0		4,410,000.00	-	18.01	Bidang Diklat
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	20	orang	22,355,200.00		-		-				0		-	-	-	Bidang Diklat
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1	Laporan	17,654,200.00		-		-				0		-	-	-	Bidang Diklat
	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1	Laporan	10,270,000.00		-		2,542,683.00				0		2,542,683.00	-	24.76	Bidang Pengadaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah (Persen)	100 %	100	Persen	41,630,200.00		-								-	-	-	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	95 Persen	95	Persen	41,630,200.00		-								-		-	
	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen	1	Dokumen	41,630,200.00		-		-				0		-	-	-	Bidang Diklat

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat pencapaian kinerja badan dari 3 Program 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan terdapat 24 sub kegiatan yang kinerjanya belum dapat diukur dikarenakan belum dilaksanakan maupun masih dalam proses pelaksanaan namun belum selesai. Terdapat 15 Sub kegiatan capaian kinerja sudah mencapai diatas 50% dan 4 sub kegiatan capain kinerja masih di bawah 50%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara umum terdapat beberapa target kinerja program dan kegiatan yang capaian kinerja dan penyerapan anggaran belum sesuai target yang direncanakan. Pencapaian target yang belum sesuai mengharuskan adanya penyesuaian target kinerja dan anggaran pada renja perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025 capaian penyerapan anggaran masih sangat rendah yaitu sebesar Rp. 2.216.392.990,00 mencapai 22,97% dari target anggaran sebesar Rp. 9.647.31.008,00. Terdapat 6 sub kegiatan yang capaian kinerja anggaran sudah >50%, 16 sub kegiatan kinerja anggaran masih <50%, 21 sub kegiatan belum ada penyerapan anggaran.

Pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kinerja badan.

Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja triwulan II diantaranya sebagai berikut :

1. Tersedianya aplikasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan dalam pengiriman data ke instansi/lembaga baik internal maupun eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan pada kegiatan- kegiatan yang tidak bergantung kepada instansi pusat atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya time schedule yang di buat oleh PPTK.
4. Adanya dialog kinerja dan koordinasi yang baik dengan internal maupun eksternal.
5. Adanya monitoring dan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja dan anggaran badan secara berkala.
6. Hasil monitoring dan evaluasi dari triwulan sebelumnya ditindaklanjuti dengan adanya perbaikan dan laporan tindaklanjut.

Selain faktor yang mendukung keberhasilan, pelaksanaan kegiatan juga dipengaruhi oleh faktor penghambat sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Belum optimalnya pemberdayaan diklat khususnya analisis kebutuhan dan evaluasi diklat di masing-masing Perangkat Daerah sebagai upaya pemenuhan pengembangan kompetensi per pegawai 20 jam per tahun.
3. Tidak dapat melakukan intervensi untuk kegiatan-kegiatan yang bergantung kepada instansi lain atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan.
4. Penyedia tidak menyediakan semua barang yang akan dibeli sehingga proses pengadaan membutuhkan waktu lebih dari yang direncanakan.

Tindak lanjut bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 sebagai berikut :

- ✓ Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang anggaran kasnya di triwulan satu dan dua namun belum dilaksanakan.
- ✓ Menetapkan jadwal kegiatan dengan mempedomani anggaran kas dan hasil evaluasi triwulan dua.
- ✓ Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan.
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana prioritas kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja yang bersangkutan.
- ✓ Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi di triwulan dua ditindaklanjuti sehingga target-target kinerja yang sudah ditetapkan dapat terealisasi 100% di akhir periode renja 2025.
- ✓ Melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Melakukan penyesuaian terhadap target output dan anggaran agar pencapaian kinerja bisa maksimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terhadap Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah :

- Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu menjelaskan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah.

Hingga saat ini, belum ada Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah (Kepegawaian) maupun Pendidikan dan Pelatihan. Sehingga sebagaimana diatur pada point 2, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah tertinggi sebesar 130,77 % terjadi pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena saat itu tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara memang cukup tinggi dimana hanya didapatkan Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan hukuman disiplin lebih sedikit yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Adanya pembinaan dan monitoring yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Mempawah menjadi pendorong keberhasilan peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara. Sedangkan faktor penghambat peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kurangnya sosialisasi tentang peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara mengakibatkan minimnya pengetahuan Aparatur Sipil Negara atas peraturan Disiplin yang berlaku. Kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara juga merupakan penghambat terlaksananya disiplin Aparatur Sipil Negara.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mempawah**

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM Aparatur	0%	12%	12%	12%	12%	0%	15.18%	15.21%	12.00%		-	126.50	126.75	100.00	
2.	Persentase ASN yang dijamin hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemkab Mempawah	0%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0%	0.14%	0.09%	0.12%		-	92.31	130.77	107.69	
3.	Persentase Penyampaian laporan Keuangan dan aset serta kinerja yang optimal	100%	90%	90%	90%	90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00	111.11	111.11	111.11	100.00
4.	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN	0	0	0	85	80.5	0	0	0	80.58	n/a	-	-	-	94.80	-
5.	Indeks Sistem Merit	0	0	0	215	212.5	0	0	0	212	n/a	-	-	-	98.60	-

Sumber : BKPSDM Kab. Mempawah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2025-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah adalah :

1. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai;
2. Peningkatan pelayanan ASN yang professional melalui pengembangan teknologi informasi.

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut :

❖ **Kendala-kendala :**

1. Belum Optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian;
2. Masih rendahnya kemampuan SDM ASN;
3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN;
4. Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada;
5. Belum Optimalnya Fasilitas Kesejahteraan ASN dan Data / Informasi serta pengembangan IT bidang Kepegawaian.

❖ **Peluang :**

1. Adanya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan semangat dan keinginan untuk membangun good governance, termasuk bidang pengembangan SDM;
2. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
3. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar ASN berdisiplin dan professional dalam rangka penataan manajemen ASN;

4. Tersedianya jaringan Simpeg dan sistem teknologi informasi serta komputerisasi sehingga mendukung pelayanan yang lebih prima, cepat dan tepat;
5. Adanya rencana dalam rangka pengembangan jabatan fungsional;
6. Pengembangan sistem karier yang didasarkan prestasi kerja.

❖ **Kekuatan :**

1. Mudah nya koordinasi dengan BKN, dan BPSDM Provinsi ;
2. Loyalitas dan Dedikasi pegawai tinggi;
3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sudah baik;
4. Pelaksanaan Sosialisasi Kepegawaian sudah baik;
5. Kemudahan (cepat dan Tepat) dalam mengakses Informasi dengan Sistem Teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan;
6. Adanya Alokasi dana yang memadai.

❖ **Kelemahan :**

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
2. Belum Optimalnya dalam pelayanan Administrasi kepegawaian;
3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur;
4. Belum optimalnya kedisiplinan BKPSDM.

❖ **Tantangan :**

1. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
2. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan prima di bidang kepegawaian sebagai good governance dan bebas KKN;
3. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;
4. Adanya intervensi dari berbagai kalangan dalam bidang kepegawaian yang sering kali bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pola pengembangan karier berbasis kinerja belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

Dari isu-isu penting, kendala, peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mempawah menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan aparatur melalui tertib administrasi kepegawaian yang lebih baik, cepat, tepat dan akuntabel
2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang semakin baik;

3. Mendorong peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan secara terpadu, sinergis berdasarkan analisis kebutuhan yang rasional;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Salah satu prioritas pembangunan nasional bidang sumber daya aparatur Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 adalah pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional dimaksud, penajaman kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mempawah antara lain melalui penyempurnaan berbagai regulasi dan kebijakan daerah yang menyangkut urusan kepegawaian, Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis SAPK, Penegakan disiplin pegawai dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian lainnya sesuai tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM.

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2026 telah ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mempawah yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada publik

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatnya kompetensi Non Aparatur Sipil Negara

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Penunjang Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mempawah merencanakan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
5.03.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
5.03.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA- SKPD
5.03.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.03.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.03.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.03.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.03.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
5.03.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
5.03.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

5.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
5.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
5.03.02.2.01.03	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS Dan PPPK
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian
5.03.02.2.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN
5.03.02.2.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat Dan Sertifikasi ASN
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5.03.02.2.03.05	Koordinasi Dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
5.03.02.2.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Asn
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL
5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan kerjasama antar lembaga

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan Rencana Kerja, Program, Kegiatan serta pendanaan atau anggaran indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. MEMPAWAH
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesu dah	RKPD 2025	APBD 2025	Rencana Perubahan 2025		Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20			
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							11,791,392,449.00		10,334,317,308.00		7,232,768,654.00						7,758,758,103.00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11,791,392,449.00		10,334,317,308.00		7,232,768,654.00						7,758,758,103.00		
	5	03				KEPEGAWAIAN							11,276,091,249.00		10,265,102,108.00		7,232,768,654.00						7,689,542,903.00		
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan				90 Persen	90 Pers en	4,866,785,349.00	4,121,029,308.00	4,182,965,184.00							4,428,380,703.00			
	5	03	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Pers en	34,300,000.00	31,589,400.00	31,589,400.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		31,588,700.00	BKPSDM			
	5	03	01	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokume n	2 Doku men	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		2 Dokumen	4,999,900.00	BKPSDM			
	5	03	01	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Dokumen	3,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.00	2,644,700.00	2,644,700.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Dokumen	2,644,500.00	BKPSDM
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Dokumen	3,299,800.00	BKPSDM
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.00	2,644,700.00	2,644,700.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Dokumen	2,644,500.00	BKPSDM
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		3 Laporan	15,000,000.00	BKPSDM

	5	03	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan Administrasi Keuangan	-			95 Persen	95 Pers en	4223412149	3,736,025,008.00	3,743,666,394.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		4,044,060,419.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan	31 Oran g/ bulan	4,178,412,149.00	3,691,965,008.00	3,699,606,394.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		31 Orang/ bulan	4,000,000,819.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokume n	12 Doku men	25,000,000.00	24,060,000.00	24,060,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		12 Dokumen	24,060,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapo ran	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Laporan	14,999,600.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapo ran	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Laporan	5,000,000.00	BKPSDM

	5	03	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Pers en	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		11,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Lapo ran	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		5 Laporan	11,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	100 Pers en	62,573,500.00	25,000,000.00	25,000,000.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		25,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Pake t	27,573,500.00	0	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Paket	0	BKPSDM
	5	03	01	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Oran g	35,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		8 Orang	25,000,000.00	BKPSDM

	5	03	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Pers en	118,000,000.00	112,011,500.00	48,194,500.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		112,001,400.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Pake t	6,000,000.00	6,000,000.00	2,093,400.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Paket	5,990,300.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Pake t	22,000,000.00	18,024,000.00	6,308,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Paket	18,024,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Pake t	5,000,000.00	4,000,000.00	1,400,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Paket	4,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Pake t	20,000,000.00	18,987,500.00	6,643,100.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Paket	18,987,500.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

				6	9																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	60,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		10 Laporan	60,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	1,750,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		2 Dokumen	4,999,600.00	BKPSDM
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			80 Persen	80 Persen	107,399,700.00	27,902,200.00	79,235,700.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		27,232,900.00	BKPSDM
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	45,694,000.00	0	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		2 Unit	0	BKPSDM
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	14,918,700.00	0	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		2 Unit	0	BKPSDM
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	2 Unit	0	27,902,200.00	79,235,700.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Nilai Sakip		2 Unit	27,232,900.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 7	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	7 Unit	0 Unit	83,706,600.00	0	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		0 Unit	0	BKPSDM
	5	03	01	2.0 7	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	46,787,000.00	0	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		5 Unit	0	BKPSDM
	5	03	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 Persen	95 Persen	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		120,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip			120,000,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Lapo ran	0	0	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0	BKPSDM
	5	03	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 Persen	95 pers en	190,100,000.00	57,501,200.00	124,279,190.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip	-		57,497,284.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16,000,000.00	16,000,000.00	6,516,165.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Unit	15,997,064.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	25,000,000.00	20,931,200.00	10,583,025.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		11 Unit	20,930,220.00	BKPSDM
	5	03	01	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	125,000,000.00	-	100,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Unit	0	BKPSDM
	5	03	01	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	14,600,000.00	14,600,000.00	5,110,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		1 Unit	14,600,000.00	BKPSDM
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	9,500,000.00	5,970,000.00	2,070,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Sakip		15 Unit	5,970,000.00	BKPSDM
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah				80 %	80 %	6,409,305,900.00	6,144,072,800.00	3,049,803,470.00						3,261,162,200.00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase capaian kegiatan pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			85 Persen	85 Persen	567,451,500.00	490,797,800.00	415,558,300.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	-		1,021,797,800.00	BKPSDM
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	325,151,900.00	270,743,900.00	251,733,900.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Dokumen	270,743,900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																

				1	6	Pemberhentian																
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42,299,600.00	36,399,900.00	29,706,900.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Dokumen	36,399,900.00	BKPSDM
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Lembaga	581,000,000.00	BKPSDM
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	83,654,000.00	49,425,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Dokumen	83,654,000.00	BKPSDM
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																

[illegible]

							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	54,408,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		6 Dokumen	75,000,000.00	BKPSDM
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000.00	65,000,000.00	56,025,450.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Dokumen	65,000,000.00	BKPSDM
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase capaian pengembangan kompetensi ASN	-			60 Persen	60 Persen	5,006,920,000	4,957,544,800	1,746,685,720		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	-		1,225,298,100	BKPSDM
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																

							Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	413,000,000.00	399,223,600.00	599,223,600.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		50 Orang	399,223,600.00	BKPSDM
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,168,920,000.00	4,156,170,000.00	1,033,463,500.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Dokumen	423,923,900.00	BKPSDM
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85 Orang	85 Orang	85 Orang	85 Orang	85 Orang	350,000,000.00	350,000,000.00	79,495,700.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		85 Orang	350,000,000.00	BKPSDM
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	27,151,200.00	9,502,920.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			27,150,800.00	BKPSDM
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		10 Orang	24,999,800.00	BKPSDM
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-			100 Persen	100 persen	139,165,900.00	108,841,700.00	102,148,700.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	-		108,841,100.00	BKPSDM
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																

							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapo ran	27,384,000.00	27,384,000.00	27,384,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			27,384,000.00	BKPSDM
	5	03	02	2.0 4	000 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Oran g	33,191,900.00	31,178,300.00	24,485,300.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		20 Orang	31,178,300.00	BKPSDM
	5	03	02	2.0 4	000 7	Pembinaan Disiplin ASN																
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Oran g	39,695,000.00	22,355,200.00	22,355,200.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip			22,354,800.00	BKPSDM
	5	03	02	2.0 4	000 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapo ran	28,139,700.00	17,654,200.00	17,654,200.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Laporan	17,654,200.00	BKPSDM
	5	03	02	2.0 4	001 0	Evaluasi Disiplin ASN																
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapo ran	10,755,300.00	10,270,000.00	10,270,000.00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		1 Laporan	10,269,800.00	BKPSDM
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							515,301,200.00	69,215,200.00	-					69,215,200.00		
	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah (Persen)				100 %	0%	515,301,200.00	69,215,200.00	-						69,215,200.00	
	5	04	02	2.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-			95 Persen	0 Persen	515,301,200.00	69,215,200.00	-		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip	-		69,215,200.00	BKPSDM
	5	04	02	2.0 2	000 5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																

							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	515,301,200.00	69,215,200.00	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Sakip		2 Dokumen	69,215,200.00	BKPSDM
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Nilai Sakip		1 Dokumen	3,732,246,100.00	BKPSDM
	J U M L A H												11,791,392,449.00	10,334,317,308.00	7,232,768,654.00						7,758,758,103.00	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) yang lebih berkualitas, efisien dan efektif. Selain itu juga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih baik dan produktif dari waktu ke waktu. Selain itu juga dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan BKPSDM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan renja. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan maka perubahan Renja perangkat daerah dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan renja tahun berikutnya.

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MEMPAWAH HILIR TAHUN 2025

KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2024. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA PERUBAHAN tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Mempawah, Juli 2025

PIL. CAMAT MEMPAWAH HILIR

Dra. Tri Wahyuni, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680122 199312 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEMPAWAH HILIR TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Mempawah Hilir.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mempawah Hilir.....	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mempawah Hilir	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	12
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.....	13
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Mempawah	
3.2. Hilir.....	13
3.3. Program dan Kegiatan	14
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	15
BAB. IV P E N U T U P	16





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Kecamatan Mempawah Hilir sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Mempawah juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025-2026 merupakan bentuk penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, sehingga Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Mempawah Hilir.

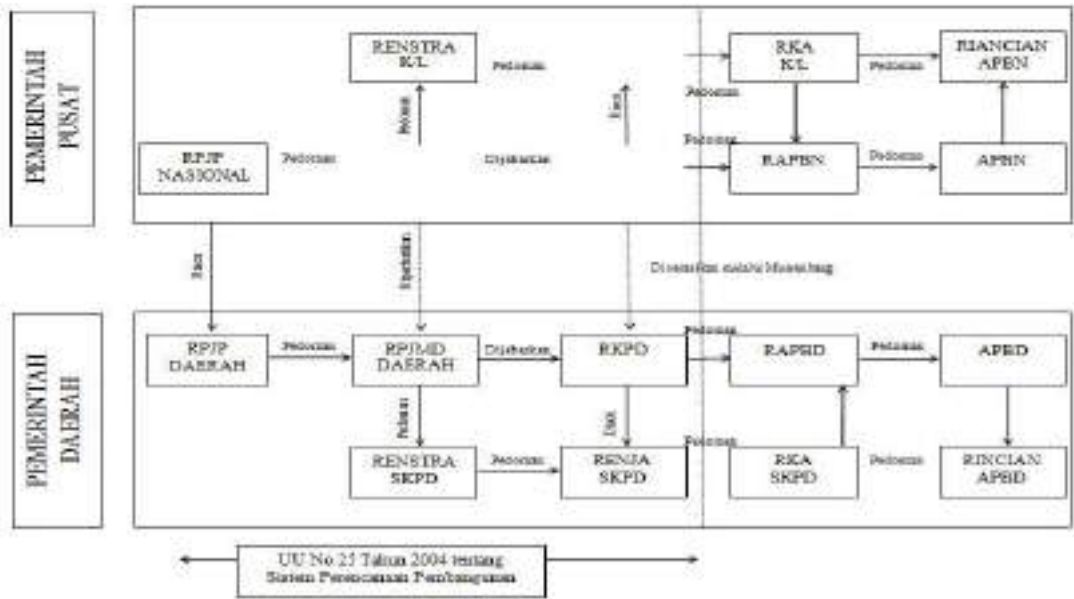
Renja Perubahan Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025 disusun melalui proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Mempawah Hilir sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum



Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja Perubahan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja ini adalah :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mempawah Hilir dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah Kecamatan Mempawah Hilir dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran Tahun 2025 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2026

- c) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Mempawah Hilir yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
- d) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah :

- a) Sebagai bahan masukan yang ada pada program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS).
- b) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- c) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- d) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f) Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- g) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- h) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN



MEMPAWAH HILIR TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Mempawah Hilir
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mempawah Hilir
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mempawah Hilir
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mempawah Hilir
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V P E N U T U P

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Mempawah Hilir.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Perubahan tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Mempawah, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN	6.441.004.894,00	6.121.109.887,00	95,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.833.167.308,00	4.581.080.932,00	94,78
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.197.150,00	22.777.664,00	98,19
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.473.874,00	99,25
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.810.000,00	1.789.700,00	98,88
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	811.800,00	791.550,00	97,51
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.269.700,00	84,65
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	575.350,00	575.300,00	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.877.540,00	99,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.287.809.330,00	4.125.345.717,00	96,21
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.210.179.480,00	4.061.861.858,00	96,48
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	58.129.850,00	44.156.713,00	75,96

SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.000.000,00	12.901.324,00	99,24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	6.500.000,00	6.425.822,00	98,86
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.665.000,00	18.634.700,00	86,01
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.665.000,00	18.634.700,00	86,01
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.742.300,00	169.546.590,00	91,28
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	6.995.100,00	99,93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.854.900,00	36.435.600,00	83,08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.500.400,00	18.104.900,00	97,86
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	37.840.000,00	71,80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.691.200,00	14.856.590,00	71,80
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.086.800,00	6.972.000,00	98,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.913.000,00	44.657.200,00	99,43
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.696.000,00	3.685.200,00	99,71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.065.600,00	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	18.065.600,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.107.288,00	164.213.821,00	78,91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	51.646.471,00	57,38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.107.288,00	112.567.350,00	95,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.080.640,00	63.062.440,00	88,72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.801.600,00	28.453.700,00	81,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000,00	3.829.700,00	69,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.999.040,00	15.999.040,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.590.000,00	7.590.000,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000,00	7.190.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	4.990.500,00	99,81

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	4.990.500,00	99,81
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	4.990.500,00	99,81
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.369.682.500,00	1.304.766.685,00	95,26
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.000.000,00	25.730.560,00	98,96
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13.000.000,00	12.885.840,00	99,12
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.000.000,00	12.844.720,00	98,81
Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	1.343.682.500,00	1.279.036.125,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.949.100,00	14.938.400,00	99,93
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	458.128.700,00	457.832.100,00	99,94
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	860.683.700,00	798.625.425,00	92,79
Evaluasi Kelurahan	9.921.000,00	7.640.200,00	77,01
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.354.000,00	123.963.520,00	99,69
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	124.354.000,00	123.963.520,00	99,69
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.405.760,00	24.405.760,00	99,70
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.874.000,00	13.731.000,00	99,91
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45.000.000,00	44.960.200,00	99,91
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	26.000.000,00	25.953.000,00	99,82
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	14.913.560,00	99,42
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	108.801.086,00	106.308.250,00	97,71
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	108.801.086,00	106.308.250,00	97,71
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	58.414.811,00	56.644.060,00	96,97
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.830.800,00	9.813.300,00	99,82
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.555.475,00	16.904.850,00	96,29
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.000.000,00	22.946.040,00	99,77
JUMLAH	6.441.004.894,00	6.121.109.887,00	95,03

--	--	--	--

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mempawah Hilir

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Mempawah Hilir, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

1. Kebijakan Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan PATEN di Kecamatan yang belum berjalan sebagai mana yang diharapkan.
 - b) Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Mempawah Hilir yang dilakukan oleh Kabupaten Mempawah;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir, sebagai berikut :
 - a) Pemahaman akan tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksanaan teknis kegiatan masih lemah yang berakibat pada hasil dan koordinasi yang tidak maksimal;
 - b) Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat perangkat daerah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Mempawah Hilir belum maksimal.
3. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mempawah Hilir sebagai berikut :
 - a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya;

- b) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan; ¹
- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;

2.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mempawah Hilir.

Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak lama harus terus digerakan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu merupakan tujuan dari reformasi birokrasi yang di cita-citakan. Sehingga tercapainya masyarakat yang adi makmur dan sejahtera tanpa memandang kelompok atau golongan serta bebas dari unsur KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mempawah Hilir, maka pendayagunaan Sumber daya aparatur daerah yang berada di Kecamatan Mempawah Hilir harus dimaskimalkan. SDM yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat perlu memahami prinsip pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang di harapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Mempawah Hilir harus menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Fungsi dari Kecamatan adalah untuk perpanjangan pemerintahan dari Kabupaten maka perlu untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tujuan OPD atau rencana kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penataan organisasi dan manajemen yang baik perlu dilaksanakan di Kecamatan Mempawah Hilir yang nanti dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung Visi dan Misi Bupati Mempawah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a) Terwujudnya tertib administrasi aset barang di Kecamatan Mempawah Hilir;
- b) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2025
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*Prosesdur Battom Up*).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mempawah Hilir

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahunan Kecamatan Mempawah Hilir dimaksudkan sebagai acuan

bagi organisasi perangkat daerah Kecamatan Mempawah Hilir dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
2. Mengarahkan Visi Bupati Mempawah kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Mempawah Hilir yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
4. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mempawah Hilir Secara umum adalah terjabarkannya Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025-2026 kedalam Dokumen Rencana Tahunan, yang meliputi :

1. Kerangka pembangunan dan penganggaran Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025
2. Indikasi kegiatan pembangunan Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rincian program dan kegiatan prioritas utama Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran



7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7	01	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7	01	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	01	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	01	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarna dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	03	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7	01	03	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	03	02		Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
7	01	03	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7	01	03	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	03	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	01	03	02	04	Evaluasi Kelurahan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	05	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7	01	05	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7	01	05	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	01	06	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mempawah Hilir 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sustansinya mengacu pada Rentra Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2025-2026, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Renja Perubahan ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan prioritas Plapon Anggaran Semesteran (PPAS) Tahun 2025, serta RAPBD tahun 2026.

Renja Perubahan ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Mempawah Hilir dan merupakan strategi pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Bupati Mempawah, dan juga Renja Perubahan ini dijadikan parameter untuk berhasil dicapai. Sehingga hasil dicapai. Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Mempawah Hilir.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mempawah Hilir ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Mempawah Hilir yang maju, sejahtera dan berkualitas dapat diwujudkan.





BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Mempawah Hilir dan merupakan strategis pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Kecamatan Mempawah Hilir, dan juga Renja Perubahan ini dijadikan parameter untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang direncanakan telah berhasil dicapai. Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Mempawah Hilir.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mempawah Hilir ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Kecamatan Mempawah Hilir yang maju, sejahtera dan berkualitas dapat diwujudkan.

Catatan penting dalam pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Mempawah Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara/ Pegawai
Pegawai memegang peranan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai sebagai motor penggerak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai di Kantor Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 38 orang terdiri dari 23 pejabat struktural dan 15 orang pejabat fungsional
- b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana menjadi unsur pendukung dalam membantu pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana berupa barang tidak bergerak seperti gedung dan barang bergerak seperti komputer, kendaraan, meja kursi, ATK dll.
- c. Pendanaan
Dana ibarat urat nadi suatu organisasi. Ketersediaan dana yang cukup akan membantu penyelenggaraan pemerintahan. Dana akan membantu aktivitas baik di dalam kantor seperti kegiatan kesekretariatan, dan kegiatan diluar seperti pembinaan ke desa/ kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, ekonomi pembangunan. Kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.



d. Kaidah-kaidah pelaksanaan

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Apa yang dikerjakan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi dan secara sosiologis.

2. Transparansi

Pemerintah yang baik akan bersifat transparan dapat diakses dan diketahui oleh siapapun apa yang telah diperbuat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Keterbukaan

Menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik, saran untuk kebaikan dan kemajuan daerah

4. Aturan Hukum

Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditempuh oleh penyelenggara negara, dan Aparatur Negara tidak kebal hukum tidak semauanya membuat aturan yang menguntungkan dirinya justru sebaliknya sebagai contoh dalam penegakan hukum.

Untuk itu kami mengharapkan semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh sungguh melaksanakan rencana kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya mengatasi masalah di lingkungan Kecamatan Mempawah Hilir sebagai upaya pendukung menjadikan masyarakat Kecamatan Mempawah Hilir yang sejahtera dan berkualitas.

Mempawah, Juli 2025







RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN TAHUN 2025

KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat selesai dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Renja 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Renja Perubahan Kecamatan Mempawah Timur ini bisa disusun dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mempawah Timur ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah.

Mempawah, Juli 2025



DAFTAR ISI

Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan catatan strategis

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Mempawah Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, Rencana Kerja Kecamatan Mempawah Timur :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Mempawah Kantor Kecamatan Mempawah Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja Perubahan Kecamatan Mempawah Timur yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Kecamatan Mempawah Timur .

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kantor Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023 dan 2024, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENJA Kantor Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Tahun 2025, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Mempawah Timur
- Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV: Rencana kerja dan pendanaan
- Bab V: Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Kantor Kecamatan Mempawah Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)	Persentase (%)	Alokasi Dana T.A. 2024
	KECAMATAN	4.860.044.284	4.728.346.861	97,29	4.905.785.675
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.718.172.684	3.594.404.616	96,67	4.059.921.125
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.608.800	24.216.145	98,40	24.977.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.809.800	93,66	3.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.435.200	1.420.000	98,94	1.435.200
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	887.300	871.055	98,17	887.300
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.102.100	1.068.665	96,97	1.102.100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	984.200	968.625	98,42	1.352.800
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.200.000	17.078.000	99,29	17.200.000
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.227.742.626	3.135.530.792	97,14	3.630.431.391
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.177.357.709	3.085.749.407	97,12	3.580.046.474
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.970.000	31.940.325,00	99,91	31.970.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.800.000	11.692.605	99,09	11.800.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.614.917	6.148.455	92,95	6.614.917
D	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000	13.481.480	97,69	13.800.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.800.000	13.481.480	97,69	13.800.000
E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.768.750	25.708.000	99,76	21.537.500
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	-
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.768.750	25.708.000	99,76	21.537.500
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.265.836	164.478.565	98,33	143.977.836
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.017.200	6.009.900	99,88	6.017.200
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000	35.284.580	99,39	40.195.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.503.400	5.442.600	98,90	5.503.400
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.920.000	99,73	30.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.200.000	14.864.710	97,79	15.200.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.406.000	5.316.000	98,34	5.406.000

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)	Persentase (%)	Alokasi Dana T.A. 2024
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.800.000	63.818.600	96,99	37.817.000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.839.236	3.822.175	99,56	3.839.236
G	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22.889.900	22.833.800	99,75	-
1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22.889.900	22.833.800	99,75	-
H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.704.256	142.339.059	85,38	166.161.398
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	26.826.291	53,65	50.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.704.256	115.512.768	98,98	116.161.398
I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.392.516	65.816.775	94,85	59.035.600
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.713.050	35.335.450	98,94	34.271.600
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000	2.543.400	46,24	5.500.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.866.000	99,11	14.994.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.210.000	6.210.000	100,00	-
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.969.466	6.861.925	98,46	4.270.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000	4.971.205	99	5.000.000
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	4.971.205	99,42	5.000.000
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	4.971.205	99,42	5.000.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	953.902.000	947.049.855	99,28	645.648.700
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.500.000	17.316.160	98,95	17.000.000
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.500.000	5.339.635	97,08	5.000.000

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)	Persentase (%)	Alokasi Dana T.A. 2024
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.000.000	11.976.525	99,80	12.000.000
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	936.402.000	929.733.695	99,29	628.648.700
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.100.000	11.018.890	99,27	11.100.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	222.146.500	221.165.000	99,56	193.806.900
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	697.136.000	691.585.705	99,20	417.722.300
4	Evaluasi Kelurahan	6.019.500	5.964.100	99,08	6.019.500
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	129.169.600	128.322.915	99,34	141.415.850
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	129.169.600	128.322.915	99,34	141.415.850
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.000.000	23.883.170	99,51	24.000.000
2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12.323.100	12.316.500	99,95	12.323.100
3	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	56.046.500	55.773.755	99,51	68.292.750
4	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	21.800.000	21.619.545	99,17	21.800.000
5	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000	14.729.945	98,20	15.000.000

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana T.A 2023 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2023 (Rp)	Persentase (%)	Alokasi Dana T.A. 2024
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.800.000	53.598.270	99,63	53.800.000
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.800.000	53.598.270	99,63	53.800.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.200.000	16.111.200	99,45	16.200.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.400.000	8.389.025	99,87	8.400.000
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000	14.945.635	99,64	15.000.000
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.200.000	14.152.410	99,66	14.200.000

Penjelasan :

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, total belanja yang dikelola tahun 2023 adalah Rp. 4.860.044.284,00 dengan realisasai anggarannya adalah sebesar Rp. 4.728.346.861,00 (97,29 %). Sedangkan untuk tahun anggaran 2024, anggaran yang disediakan berjumlah Rp. 4.905.785.675,00.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Mempawah Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis :

“ Terselenggaranya Tugas Umum Pemerintahan yang fungsional dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Mempawah Timur yang aman, damai, sejahtera dan berkualitas”

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan SKPD Kecamatan Mempawah Timur belum tercapai dengan efektif dan efisien disebabkan :

- 2.1.1 Kurangnya Tenaga SDM yang terlatih sehingga perlunya diadakan bimtek, kursus sehingga dapat tercapainya pelayanan efektif dan efisien.
- 2.1.2 Belum terpenuhinya sarana dan prasana yang menunjang kegiatan tersebut.

2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

2.2.1 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mempawah timur, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan didalam menyusun Renja Kecamatan Mempawah Timur adalah sebagai berikut :

- 2.2.1.1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;
- 2.2.1.2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 2.2.1.3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal
- 2.2.1.4. Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- 2.2.1.5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran tupoksi Kecamatan Mempawah Timur.

2.2.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

Untuk mengatasi permasalahan diatas,beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan

7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi di atas adalah :

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, koordinasi dan kerjasama.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah yaitu :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target	
				2023	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00	82,00	83,00
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Kejadian / Kasus di Masyarakat	100 %	100 %	100 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025 Kecamatan Mempawah Timur Daerah Kabupaten Mempawah dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4.1. Program, kegiatan dan sub kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Mempawah Timur tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**RANCANGAN AWAL RENJA OPD
TAHUN 2025**

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Mempawah Timur		4.998.668.207,00	0,00	0,00	4.998.668.207,00	5.258.425.718,00	
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		4.998.668.207,00	0,00	0,00	4.998.668.207,00	5.258.425.718,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.040.967.948,00	0,00	0,00	4.040.967.948,00	4.276.189.395,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.000.000,00	
		Target:						
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.200.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (6 Dokumen)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3 Laporan)	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	3.573.557.948,00	0,00	0,00	3.573.557.948,00	3.793.772.362,00	
		Target:						
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (28 Orang/bulan)	3.519.557.948,00	0,00	0,00	3.519.557.948,00	3.736.772.362,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (3 Dokumen)	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	34.000.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan)	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	14.000.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (11 Laporan)	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator:	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 Laporan)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator:	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	49.300.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (1 Paket)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.300.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (12 Orang)	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	24.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator:	148.700.000,00	0,00	0,00	148.700.000,00	154.102.884,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (3 Paket)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (3 Paket)	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	38.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (3 Paket)	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.800.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (3 Paket)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (3 Paket)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.200.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (36 Dokumen)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (52 Laporan)	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	43.000.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.102.884,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	168.500.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (100 Laporan)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	51.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (36 Laporan)	116.000.000,00	0,00	0,00	116.000.000,00	117.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	59.710.000,00	0,00	0,00	59.710.000,00	62.514.149,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (1 Unit)	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	26.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (10 Unit)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.877.696,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (3 Unit)	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (17 Unit)	6.210.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00	6.636.453,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (9 Unit)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	27.050.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator:	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (1 Dokumen)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indikator:	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (1 Laporan)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		630.900.259,00	0,00	0,00	630.900.259,00	640.686.323,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indikator:	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	20.824.064,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (8 Dokumen)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (8 Laporan)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.824.064,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indikator:	570.900.259,00	0,00	0,00	570.900.259,00	583.862.259,00	
		Sasaran:	Target:					

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (1 Lembaga Kemasyarakatan)	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	11.862.259,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (2 Unit)	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00	109.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (2 Pokmas / Ormas)	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	455.000.000,00	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (2 Laporan)	7.800.259,00	0,00	0,00	7.800.259,00	8.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indikator: Sasaran:	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00	
		Target:						
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (3 Lembaga Kemasyarakatan)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	98.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator: Sasaran:	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00	
		Target:						
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (1 Laporan)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Indikator: Sasaran:	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
		Target:						
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (1 Laporan)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator: Sasaran:	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
		Target:						
7.01.04.7.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (1 Laporan)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		147.800.000,00	0,00	0,00	147.800.000,00	154.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indikator:	147.800.000,00	0,00	0,00	147.800.000,00	154.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	Target:					
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (100 Orang)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (25 Orang)	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (100 Orang)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	72.000.000,00	
7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (25 Lembaga Masyarakat)	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00	23.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Relaksasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (12 Dokumen)	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		58.500.000,00	0,00	0,00	58.500.000,00	62.500.000,00	
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator:	58.500.000,00	0,00	0,00	58.500.000,00	62.500.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (8 Dokumen)	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (6 Dokumen)	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (1 Dokumen)	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (8 Dokumen)	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	16.500.000,00	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KAB. MEMPAWAH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / KEGIATAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JANGKA PENDEK RENCANA Q4 2024	INDIKATOR CAPAIAN RENCANA Q4 TAHUN 2024	PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET RENCANA Q4 TAHUN 2024	LAPORAN KEMERIA DAN KENDARA PERUBAHAN										KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		TANGGUNG JAWAB (Rp)			Berbanding/Berimbang (1012)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PADA INDIKATOR (Rp)		
							SEBELUM	SEKELAH	KOPD 2025	APRO 2025	KOPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR							6.111.903.000,00	6.282.870.014,00	6.999.910.014,00	6.811.240.014,00							31.000.000,00		
	3	UNDUK KEBELAYARAN							6.111.903.000,00	6.282.870.014,00	6.999.910.014,00	6.811.240.014,00							31.000.000,00		
	7.91	KECAMATAN							6.111.903.000,00	6.282.870.014,00	6.999.910.014,00	6.811.240.014,00							31.000.000,00		
1.	7.91.01	PROGRAM PENGUJIAN: JERJAN PEMERINTAHAN SIKRAN KAMPATISWETA.	Tingkat Kesiapan Rikang Terhadap Pelayanan Kasekretariat			90 Pemas	90 Pemas		6.802.000.070,00	6.802.000.070,00	6.282.870.014,00	6.999.910.014,00							3.00		
	7.91.01.01	Pemeriksaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemeriksaan digital pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan Evaluasi Kinerja			100 Pemas	100 Pemas		25.400.000,00	25.237.200,00	25.237.200,00	25.237.200,00			Mengikuti reformasi jukel, reformasi dan reformasi, serta mengikutsertakan pengujian dan pemeriksaan, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan	Melalui jukel, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan	Kelembagaan Monev		3.00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	
	7.91.01.2.01.0001	Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Kab. Mempawah, Kota Mempawah, Kota Mempawah	DANA, LOKASI, UMUM, DANA	Mengikuti reformasi jukel, reformasi dan reformasi, serta mengikutsertakan pengujian dan pemeriksaan, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan	Melalui jukel, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan		3.00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	
	7.91.01.2.01.0002	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen RKA-SKPD			6 Dokumen	6 Dokumen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Kab. Mempawah, Kota Mempawah, Kota Mempawah	DANA, LOKASI, UMUM, DANA	Mengikuti reformasi jukel, reformasi dan reformasi, serta mengikutsertakan pengujian dan pemeriksaan, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan	Melalui jukel, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan		3.00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	
	7.91.01.2.01.0003	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Kab. Mempawah, Kota Mempawah, Kota Mempawah	DANA, LOKASI, UMUM, DANA	Mengikuti reformasi jukel, reformasi dan reformasi, serta mengikutsertakan pengujian dan pemeriksaan, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan	Melalui jukel, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan		3.00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	
	7.91.01.2.01.0004	Koordinasi dan Pengawasan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Kab. Mempawah, Kota Mempawah, Kota Mempawah	DANA, LOKASI, UMUM, DANA	Mengikuti reformasi jukel, reformasi dan reformasi, serta mengikutsertakan pengujian dan pemeriksaan, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan	Melalui jukel, reformasi, reformasi, jukel, dan penyuluhan		3.00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	

7.81.01.2.01.000	Kendali dan Pengawasan Pembelian DPA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen Pembelian DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/Penyusunan Dokumen Pembelian DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kid. Mengawasi, Sensus Rencanatan, Sensus Kef/Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengontrol informasi publik, hukum dan indeks, serta memperoleh pengujian dan pembentahan korupsi, narkoba, jati, dan perijudugan	Misi Satip, Misi Satip			0,00	KECAMTAN MEMPHAN TIMUR
7.81.01.2.01.000	Kendali dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-800.000,00	Kid. Mengawasi, Sensus Rencanatan, Sensus Kef/Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengontrol informasi publik, hukum dan indeks, serta memperoleh pengujian dan pembentahan korupsi, narkoba, jati, dan perijudugan	Misi Satip, Misi Satip			0,00	KECAMTAN MEMPHAN TIMUR
7.81.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Perse	100 Perse	4.054.905.570,00	4.146.845.314,00	4.146.845.314,00	-90.939.744,00			Mengontrol informasi publik, hukum dan indeks, serta memperoleh pengujian dan pembentahan korupsi, narkoba, jati, dan perijudugan	Misi Satip, Misi Satip	Kecamatan Mempawah Timur		0,00	KECAMTAN MEMPHAN TIMUR
7.81.01.2.02.000	Pengawasan Saji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Mendapat Saji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ulan	38 Orang/ulan	4.007.905.570,00	4.146.304.347,00	4.146.304.347,00	-138.401.177,00	Kid. Mengawasi, Sensus Rencanatan, Sensus Kef/Utara	SISA LERIN PERHITUNGAN ANDARAN IN UN SERO LUNYA PENGUPATAN SICHANAL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PERHUKUNAN ATAS KEBUKUAN PENGALIAN PERGANTIN PERHUKUNAN DEMAM PERHUKUNAN KERA	Mengontrol informasi publik, hukum dan indeks, serta memperoleh pengujian dan pembentahan korupsi, narkoba, jati, dan perijudugan	Misi Satip, Misi Satip			0,00	KECAMTAN MEMPHAN TIMUR
7.81.01.2.02.000	Pembinaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI DPO	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI DPO TAHUN 2023	PROYAKSI CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI DPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PROYAKSI BAJU BENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berambah/Berkurang (Rp-/+)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKUSAH	RKPD 2023	APRO 2023	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran/Validasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	17.880.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan: Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempawah reformasi politik, hakim dan hakim, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian kompas, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Nisa Sakti Nisa Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
T.31.01.2.02.0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rekrutmen SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Rekrutmen SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Rekrutmen SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	-120.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan: Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempawah reformasi politik, hakim dan hakim, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian kompas, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Nisa Sakti Nisa Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
T.31.01.2.02.0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Thematic Semester SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Thematic/ Semester SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Thematic/ Semester SKPD				11 Laporan	11 Laporan	7.000.000,00	6.814.017,00	6.814.017,00	-185.983,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan: Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempawah reformasi politik, hakim dan hakim, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian kompas, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Nisa Sakti Nisa Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
T.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penerbitan Inggat pengelolaan pengelolaan administrasi barang milik daerah					100 Pemas	100 Pemas	14.000.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	-120.000,00			Mempawah reformasi politik, hakim dan hakim, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian kompas, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Nisa Sakti Nisa Sakti	Kecamatan Mempawah Timur		0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
T.31.01.2.03.0001 Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	-120.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan: Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempawah reformasi politik, hakim dan hakim, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian kompas, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Nisa Sakti Nisa Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANALIS PERIODIK RESTRUKTURISASI OPS	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPS TAHUN 2023	PRAKARIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENUNJANG										KELOMPOK SASARAN	PRAKARIRAN RENCANA TAHUN 2024		PENGANGKAT SARUNG PENGANGKAT JAWAB	
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkecukupan/Berkekurangan (R+/-)	LEWAT	SUMBER DATA	PRIORITY			TARGET	PADA INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2023	AKHIR 2023	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	27.000.000,00	+7.000.000,00	Kab. Mempawah Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DARI ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi publik, fokus dan terarah, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Nila Salip Nila Salip			0,00	KECAMATAN MENPAHANG TIRUJ	
1.01.01.1.06.008	Penyediaan Barang Coklat dan Pengawasan																				
			Jumlah Paket Barang Coklat dan Pengawasan yang Disalurkan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-200.000,00	Kab. Mempawah Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DARI ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi publik, fokus dan terarah, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Nila Salip Nila Salip			0,00	KECAMATAN MENPAHANG TIRUJ	
1.01.01.1.06.008	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Pengawasan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Pengawasan yang Disalurkan				36 Dokumen	36 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mempawah Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DARI ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi publik, fokus dan terarah, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Nila Salip Nila Salip			0,00	KECAMATAN MENPAHANG TIRUJ	
1.01.01.1.06.008	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Pengawasan																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Pengawasan				32 Laporan	32 Laporan	31.000.000,00	31.000.000,00	30.670.000,00	-330.000,00	Kab. Mempawah Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DARI ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi publik, fokus dan terarah, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Nila Salip Nila Salip			0,00	KECAMATAN MENPAHANG TIRUJ	
1.01.01.1.06.008	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Pengawasan																				
			Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Pengawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mempawah Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DARI ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi publik, fokus dan terarah, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Nila Salip Nila Salip			0,00	KECAMATAN MENPAHANG TIRUJ	

7.01.01.2.00	Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian persediaan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tingkat Kabupaten Bantul Tingkat Kabupaten Bantul				100 Pesen	100 Pesen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00				Mengetes reformasi pada hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jds, dan penyelidapan	Min/Datop Min/Datop	Kecamatan Mengowati Tesis		0,00	KECABKIN MEMPAWAT TBLR
7.01.01.2.00.000	Penyelesaian Jasa Kuminikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan/Persediaan Jasa Kuminikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan				100 Laporan	100 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Mengowati, Demas Kecamatan, Demas/Kel.Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengetes reformasi pada hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jds, dan penyelidapan	Min/Datop Min/Datop				0,00	KECABKIN MEMPAWAT TBLR
7.01.01.2.00.004	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan/Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan				30 Laporan	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mengowati, Demas Kecamatan, Demas/Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mengetes reformasi pada hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jds, dan penyelidapan					0,00	KECABKIN MEMPAWAT TBLR
7.01.01.2.00	Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian persediaan kebutuhan Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Pesen	100 Pesen	21.210.000,00	20.015.000,00	20.775.000,00	10.500.000,00				Mengetes reformasi pada hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jds, dan penyelidapan	Min/Datop Min/Datop	Kecamatan Mengowati Tesis		0,00	KECABKIN MEMPAWAT TBLR
7.01.01.2.00.0001	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan Penunjang Urusan atau Pemeliharaan Urusan Lain-lain																			
		Jumlah Kebutuhan Penunjang Urusan atau Pemeliharaan Urusan Lain-lain yang Diperkirakan dan Disiapkan Pajanya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Mengowati, Demas Kecamatan, Demas/Kel.Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengetes reformasi pada hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jds, dan penyelidapan	Min/Datop Min/Datop				0,00	KECABKIN MEMPAWAT TBLR
7.01.01.2.00.0002	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Pemeliharaan Urusan Lain-lain																			
		Jumlah Kebutuhan Urusan Pemeliharaan atau Lain-lain yang Diperkirakan dan Disiapkan Pajak dan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Mengowati, Demas Kecamatan, Demas/Kel.Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengetes reformasi pada hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jds, dan penyelidapan	Min/Datop Min/Datop				0,00	KECABKIN MEMPAWAT TBLR
7.01.01.2.00.0009	Pembelian/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain yang Diperkirakan dan Disiapkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mengowati, Demas Kecamatan, Demas/Kel.Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengetes reformasi pada hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jds, dan penyelidapan	Min/Datop Min/Datop				0,00	KECABKIN MEMPAWAT TBLR
7.01.01.2.00.0010	Pembelian/Pemeliharaan Gedung dan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain																			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REKUSASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	REKUSASI CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGSAI PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PENGALAMAN RENCANA TAHUN 2023		PENGACARA DAERAH PENGACARA JAWAB	
							TARGET 2023		PAJU INDIKATIF (Rp)			Berambah/Berkurang (R-R)	LOKASI	SOURCES DATA	PRIORITY			TARGET	PAJU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEKUAL	RPD 2023	APR 2023	RPD PENGALAMAN 2023				SAKRAL	SAKRAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Diperlukan/tersedia				17 unit	17 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Sembawa, Kecamatan Sembawa	SARANA TANPA KAWASAN KAWASAN KAWASAN	Berambah informasi, baik dari dokumen, atau informasi yang ada di pemerintahan kantor, melalui jdi, dan penyediaan	-		0,00	KECAMATAN MEPAHAWI TIMUR		
1.01.01.01.001: Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Diperlukan/tersedia yang Diperlukan/tersedia				9 unit	9 unit	0.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.000.000,00	Kab. Mempawah, Sembawa, Kecamatan Sembawa	SARANA ALOKASI 2023 (Rp)	Berambah informasi, baik dari dokumen, atau informasi yang ada di pemerintahan kantor, melalui jdi, dan penyediaan	Non Baku Non Baku		0,00	KECAMATAN MEPAHAWI TIMUR		
1.	1.01.02	PROGRAM PENRELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				100 Person	100 Person	21.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	-21.000.000,00							0,00		
	1.01.02.1.01	Realisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan pelayanan Dokumen Administrasi Kecamatan				100 Person	100 Person	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	-000.000,00			Berambah informasi, baik dari dokumen, atau informasi yang ada di pemerintahan kantor, melalui jdi, dan penyediaan	Indeks Desa Mendukung (IDM) Indeks Desa Mendukung (IDM)	Peningkatan Mempawah Timur		0,00	KECAMATAN MEPAHAWI TIMUR	
1.01.02.1.01.001: Peningkatan Efisiensi Kegiatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan																					
			Jumlah Dokumen Pengeluaran Administrasi Kegiatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	-000.000,00	Kab. Mempawah, Sembawa, Kecamatan Sembawa	SARANA ALOKASI 2023 (Rp)	Berambah informasi, baik dari dokumen, atau informasi yang ada di pemerintahan kantor, melalui jdi, dan penyediaan	Indeks Desa Mendukung (IDM) Indeks Desa Mendukung (IDM)		0,00	KECAMATAN MEPAHAWI TIMUR		
	1.01.02.1.04	Pelaksanaan Usah Pemeliharaan yang Diperlukan kepada Desa	Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat				1	1	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Berambah informasi, baik dari dokumen, atau informasi yang ada di pemerintahan kantor, melalui jdi, dan penyediaan	Indeks Desa Mendukung (IDM) Indeks Desa Mendukung (IDM)	-	0,00	KECAMATAN MEPAHAWI TIMUR		
1.01.02.1.04.001: Pelaksanaan Usah Pemeliharaan yang Terkait dengan kewenangan lain yang Diperlukan																					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diperlukan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mempawah, Sembawa, Kecamatan Sembawa	SARANA ALOKASI 2023 (Rp)	Berambah informasi, baik dari dokumen, atau informasi yang ada di pemerintahan kantor, melalui jdi, dan penyediaan	Indeks Desa Mendukung (IDM) Indeks Desa Mendukung (IDM)		0,00	KECAMATAN MEPAHAWI TIMUR		

1.	7.01.00	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Kelembagaan Yang Jelas			100 Persen	100 Persen	721.521.000,00	962.881.890,00	487.361.168,00	-721.521.000,00							0,00	
	7.01.00.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Masyarakat yang dibantu/dibantu			30 Orang	80 Orang	10.000.000,00	17.121.000,00	12.121.000,00	-8.079.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pembangunan dan pemberdayaan kelompok, rakyat, pemuda, perempuan, dan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)			0,00	KECAKINTAN MEMPANAH TIRU
	7.01.00.2.01.0002	Sistemisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Didukung oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Sistemisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Didukung oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			8 Dokumen	8 Dokumen	7.000.000,00	5.121.000,00	5.121.000,00	-1.879.000,00	Kab. Wampanah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SARAF ALKAS (SARAF)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pembangunan dan pemberdayaan kelompok, rakyat, pemuda, perempuan, dan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)			0,00	KECAKINTAN MEMPANAH TIRU
	7.01.00.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			8 Laporan	8 Laporan	11.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Wampanah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SARAF ALKAS (SARAF)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pembangunan dan pemberdayaan kelompok, rakyat, pemuda, perempuan, dan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)			0,00	KECAKINTAN MEMPANAH TIRU
	7.01.00.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibantu/dibantu			2 Lembaga	2 Lembaga	988.521.000,00	979.562.890,00	478.242.168,00	-103.279.750,00			-	-			0,00	KECAKINTAN MEMPANAH TIRU
	7.01.00.2.01.0004	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat/Pencapaian/Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Masyarakat/Pencapaian/Pembangunan di Kelurahan			1 Lembaga Kecamatan/kabupaten	1 Lembaga Kecamatan/kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Wampanah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SARAF TRANSFER (SARAF-SARAF ALKAS) UMUM	-	-			0,00	KECAKINTAN MEMPANAH TIRU
	7.01.00.2.01.0005	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun			2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Wampanah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SARAF TRANSFER (SARAF-SARAF ALKAS) UMUM	-	-			0,00	KECAKINTAN MEMPANAH TIRU
	7.01.00.2.01.0006	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Puker dan Simas yang Melaksanakan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan			2 Puker / Ormas	2 Puker / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Wampanah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SARAF TRANSFER (SARAF-SARAF ALKAS) UMUM	-	-			0,00	KECAKINTAN MEMPANAH TIRU
	7.01.00.2.01.0008	Evaluasi Kelurahan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODIK BERTAKWID	REALISASI CAPAIAN BELA OPO TAHUN 2023	PROGRAM CAPAIAN TARGET BELA OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MALU KENCANG TAHUN 2024		PILIHAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU BOKLATIF (Rp)			BeratantukBeratantuk (P-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU BOKLATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBELUM	BPPE 2024	APRO 2024	BPPE PERALAMAN 2024				NASIONAL	DAIRAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Saluran				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mawasari, Semua Kecamatan, Semua KUD/Desa	DANA TRANSFER LAKSI-DANA ALDAS (UMUM)	-	-			0,00	KECAMATAN BONGKAWA TIMUR
	T.M.21.2.30	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berkembang				2 unit	2 unit	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00			Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta mengikuti pelaksanaan dan pemberdayaan kelompok, rencana, jati, dan penyuluhan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,00	KECAMATAN BONGKAWA TIMUR
T.M.21.2.30.002 Pembinaan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berkembang				3 Lembaga Masyarakat adat	3 Lembaga Masyarakat adat	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Mawasari, Semua Kecamatan, Semua KUD/Desa	DANA ALDAS UMUM (DAS)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta mengikuti pelaksanaan dan pemberdayaan kelompok, rencana, jati, dan penyuluhan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,00	KECAMATAN BONGKAWA TIMUR
6.	T.M.4	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTAMAN UMUM	Persentase Pengawasan Masyarakat yang berkembang				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00							31.000.000,00	
	T.M.24.2.30	Kordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertaman Umum	Persentase Pengawasan Masyarakat yang berkembang				4 Kegiatan	4 Kegiatan	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00			Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta mengikuti pelaksanaan dan pemberdayaan kelompok, rencana, jati, dan penyuluhan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM)		31.000.000,00	KECAMATAN BONGKAWA TIMUR
T.M.24.2.30.001 Sinergis dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Tindakan Nasional Indonesia dan Indeks Vertikal & Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Tindakan Nasional Indonesia dan Indeks Vertikal & Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Mawasari, Semua Kecamatan, Semua KUD/Desa	DANA ALDAS UMUM (DAS)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta mengikuti pelaksanaan dan pemberdayaan kelompok, rencana, jati, dan penyuluhan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,00	KECAMATAN BONGKAWA TIMUR
T.M.24.2.30.002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Mawasari, Semua Kecamatan, Semua KUD/Desa	DANA ALDAS UMUM (DAS)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta mengikuti pelaksanaan dan pemberdayaan kelompok, rencana, jati, dan penyuluhan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM)		31.000.000,00	KECAMATAN BONGKAWA TIMUR

7.01.04.2.02	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran dan Realisasi Anggaran				8 Kegiatan	6 Kegiatan	8.00	-0.00	-0.00	8.00			-	-	-	8.00	KECAMATAN KIDULWARAH TIMUR
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Strategi dengan Perangkat Daerah yang Tugaskan di Bidang Pelaksanaan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran																	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Strategi dengan Perangkat Daerah yang Tugaskan di Bidang Pelaksanaan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	8.00	-0.00	-0.00	8.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALIHAN UMUM	-	-	-	8.00	KECAMATAN KIDULWARAH TIMUR
5	7.01.05	PROGRAM PENYELANGSIKAN RUJUKAN PEREMPTAHAN	Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara			100 Orang	100 Orang	146.002.788,00	118.478.340,00	82.522.888,00	-146.002.788,00						8.00	
7.01.05.2.01	Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara	Jumlah Penyelenggaraan Usaha Perantara				8 Kegiatan	6 Kegiatan	146.002.788,00	118.478.340,00	82.522.888,00	-146.002.788,00			Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta memperkuat penguatan dan pemberdayaan hukum, nasional, provinsi, dan kabupaten	Induk Desa Mendang (SDR) Induk Desa Mendang (SDR)	Kecamatan Mendang Timur	8.00	KECAMATAN KIDULWARAH TIMUR
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara																	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALIHAN UMUM (DANALU)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta memperkuat penguatan dan pemberdayaan hukum, nasional, provinsi, dan kabupaten	Induk Desa Mendang (SDR) Induk Desa Mendang (SDR)		8.00	KECAMATAN KIDULWARAH TIMUR
7.01.05.2.01.0002	Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara																	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara				20 Orang	20 Orang	14.000.000,00	12.400.000,00	8.00	-14.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALIHAN UMUM (DANALU)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta memperkuat penguatan dan pemberdayaan hukum, nasional, provinsi, dan kabupaten	Induk Desa Mendang (SDR) Induk Desa Mendang (SDR)		8.00	KECAMATAN KIDULWARAH TIMUR
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara																	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Perantara				100 Orang	100 Orang	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	8.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALIHAN UMUM (DANALU)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan sistem, serta memperkuat penguatan dan pemberdayaan hukum, nasional, provinsi, dan kabupaten	Induk Desa Mendang (SDR) Induk Desa Mendang (SDR)		8.00	KECAMATAN KIDULWARAH TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRADA OPD TAHUN 2021	PEMOKOKAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN BAKU RENCANA TAHUN 2021		PERAKSIKAT BADAN PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2021		PAGE INDIKATIF (Rp)			Berlaku/Berlaku (R-1)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGE INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEKUDAH	APRO 2021	APRO 2021	APRO PERUBAHAN 2021				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.05.2.01.0008	Pengembangan Kefektifan Desentralisasi berdasarkan Pemasukan																			
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditempatkan dalam Kefektifan Desentralisasi berdasarkan Pemasukan				25 Lembaga Masyarakat	25 Lembaga Masyarakat	21.800.000,00	19.748.000,00	0,00	-21.800.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti informasi publik, forum dan brosur, serta mengikuti pengamatan dan pemberitahuan kasus, risiko, sst, dan penyelenggaraan.	Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM)				0,00 KECABANGKIN MEMPAWAH TOLAK	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Pokok Koordinasi Kegiatan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Pokok Koordinasi/Pelaksanaan di Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	17.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti informasi publik, forum dan brosur, serta mengikuti pengamatan dan pemberitahuan kasus, risiko, sst, dan penyelenggaraan.	Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM)				0,00 KECABANGKIN MEMPAWAH TOLAK	
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				80 Persen	80 Persen	58.900.000,00	53.972.400,00	18.700.000,00	-58.900.000,00								0,00	
	7.01.05.2.01	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembiayaan dan Pengawasan di Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan				8 Desa/Kelurahan	8 Desa/Kelurahan	58.900.000,00	53.972.400,00	18.700.000,00	-58.900.000,00				Mengikuti informasi publik, forum dan brosur, serta mengikuti pengamatan dan pemberitahuan kasus, risiko, sst, dan penyelenggaraan.	Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM)	Sosialisasi Masyarakat Desa		0,00 KECABANGKIN MEMPAWAH TOLAK	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	17.000.000,00	15.000.000,00	11.200.000,00	-17.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti informasi publik, forum dan brosur, serta mengikuti pengamatan dan pemberitahuan kasus, risiko, sst, dan penyelenggaraan.	Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM)				0,00 KECABANGKIN MEMPAWAH TOLAK	
	7.01.05.2.01.0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguatan Aspek Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguatan Aspek Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	8.900.000,00	8.408.000,00	0,00	-8.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti informasi publik, forum dan brosur, serta mengikuti pengamatan dan pemberitahuan kasus, risiko, sst, dan penyelenggaraan.	Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM)				0,00 KECABANGKIN MEMPAWAH TOLAK	

T.31.01.2.01.8008	Fasilitas: Sistemisasi Pencapaian Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sistemisasi/ Pencapaian Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	14.372.400,00	5.000.000,00	-13.400.000,00	Kat. Monev Desa Kecamatan Desa Kadis	DANA ALYAS UNSW (DAU)	Monev reformasi politik, hakim dan birokrasi, serta monev pengawasan dan pembangunan ekonomi, nasional, juli, dan pembangunan.	Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM)			3,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIRUR
T.31.01.2.01.8011	Fasilitas: Penyelenggaraan Keterampilan dan Kelembagaan Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pembangunan dan Kelembagaan Umum				8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	16.300.000,00	1.000.000,00	-13.000.000,00	Kat. Monev Desa Kecamatan Desa Kadis	DANA ALYAS UNSW (DAU)	Monev reformasi politik, hakim dan birokrasi, serta monev pengawasan dan pembangunan ekonomi, nasional, juli, dan pembangunan.	Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM)			3,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIRUR
	JELURAN/PELAKSIAN								8.011.101.320,00	5.202.670.814,00	4.000.010.014,00	-1.011.241.810,00							31.000.000,00	
T.	UNSW KEMALAYAN								8.011.101.320,00	5.202.670.814,00	4.000.010.014,00	-1.011.241.810,00							31.000.000,00	
T.31	KECAMATAN								8.011.101.320,00	5.202.670.814,00	4.000.010.014,00	-1.011.241.810,00							31.000.000,00	
1.	T.31.01	PROGRAM PENGUATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penerapan Pelayanan Administrasi Keuangan Pemerintahan	-	undefined Penerapan				4.300.040.074,00	4.400.400.014,00	4.300.030.114,00	-4.000.040.074,00								8,00
	T.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan digital pelayanan administrasi keuangan	-	100 Person				4.000.000.074,00	4.100.040.014,00	4.100.040.014,00	-400.040.000,00			Monev reformasi politik, hakim dan birokrasi, serta monev pengawasan dan pembangunan ekonomi, nasional, juli, dan pembangunan.	Indeks Desa Membangun (IDM)			3,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIRUR
T.31.01.2.02.8001	Pelayanan: Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (KPD)				0 Dokumen	0 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		Kat. Monev Desa Kecamatan Desa Kadis	DANA ALYAS UNSW (DAU)	Monev reformasi politik, hakim dan birokrasi, serta monev pengawasan dan pembangunan ekonomi, nasional, juli, dan pembangunan.	Indeks Desa Membangun (IDM)			3,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIRUR
	T.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Makro Daerah	Jumlah barang milik Daerah	-	100 Person				14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-200.000,00			Monev reformasi politik, hakim dan birokrasi, serta monev pengawasan dan pembangunan ekonomi, nasional, juli, dan pembangunan.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Kelurahan Pademaran		3,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIRUR
T.31.01.2.02.8008	Pelayanan: Pelayanan Makro Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIK BERTAKWID DPO	REALISASI CAPAIAN BERTAKWID BERTAKWID DPO TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET BERTAKWID DPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN GERMUKA POKOKAN										KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BUDGET RENCANA TAHUN 2024		PERAKORBAT BAKORAS KEMERDEKAAN DPMK
							TARGET 2024					Berkas/Berkas (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PROJ BERTAKWID (%)	
							SEBELUM	SEKELAH	RPM 2023	APR 2024	RPM PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyelesaian Keluhan Masyarakat Semua jkt, SDP				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan status, fokus dan kinerja, serta meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, melalui, jkt, dan penyuluhan.	Nila Sakti Nila Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
7.10.21.2.15		Administrasi Organisasi Perangkat Daerah	Pencapaian tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi organisasi				-	100/Persen	47.400.000,00	22.000.000,00	-10.100.000,00	-28.900.000,00			Mempertahankan status, fokus dan kinerja, serta meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, melalui, jkt, dan penyuluhan.	Nila Sakti Nila Sakti	Pelatihan Pemasaran		0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
7.10.21.2.15.001		Pengelolaan Pelayanan Bina Insentif Aktif, Gelinggahannya																		
			Jumlah Paket Pelayanan Bina Insentif Aktif Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mempertahankan status, fokus dan kinerja, serta meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, melalui, jkt, dan penyuluhan.	Nila Sakti Nila Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
7.10.21.2.15.0010		Sosialisasi Pemasaran Produk Unggulan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pemasaran Produk Unggulan				1 Orang	1 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan status, fokus dan kinerja, serta meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, melalui, jkt, dan penyuluhan.	Nila Sakti Nila Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
7.10.21.2.15		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pencapaian Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan				-	100/Persen	140.800.700,00	108.117.000,00	-12.573.500,00	-12.500.000,00			Mempertahankan status, fokus dan kinerja, serta meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, melalui, jkt, dan penyuluhan.	Nila Sakti Nila Sakti	Pelatihan Pemasaran		0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
7.10.21.2.15.0011		Pengelolaan Keuangan Induk																		
			Uraian/Perincian Anggaran/Kantor																	
			Jumlah Paket Anggaran Pemasaran/Produk/Perdagangan/Perdagangan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan status, fokus dan kinerja, serta meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, melalui, jkt, dan penyuluhan.	Nila Sakti Nila Sakti			0,00	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

7.31.812.36.8032	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor																		
		Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANS AL/OKGSI UNLH (OKU)	Mempertukarkan informasi publik, hukum dan administrasi, serta memperhatikan pengalihan dan pemberdayaan korupsi, narkoba, jati, dan penyidukan.	Nila Sakti Nila Sakti			1,00	KECAMATAN MEMPWAH TIMUR
7.31.812.36.8033	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANS AL/OKGSI UNLH (OKU)	Mempertukarkan informasi publik, hukum dan administrasi, serta memperhatikan pengalihan dan pemberdayaan korupsi, narkoba, jati, dan penyidukan.	Nila Sakti Nila Sakti			1,00	KECAMATAN MEMPWAH TIMUR
7.31.812.36.8034	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANS AL/OKGSI UNLH (OKU)	Mempertukarkan informasi publik, hukum dan administrasi, serta memperhatikan pengalihan dan pemberdayaan korupsi, narkoba, jati, dan penyidukan.	Nila Sakti Nila Sakti			1,00	KECAMATAN MEMPWAH TIMUR
7.31.812.36.8035	Penyediaan Barang Ornamen dan Penggantian																		
		Jumlah Paket Barang Ornamen dan Penggantian yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	2701.500,00	-1.300.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANS AL/OKGSI UNLH (OKU)	Mempertukarkan informasi publik, hukum dan administrasi, serta memperhatikan pengalihan dan pemberdayaan korupsi, narkoba, jati, dan penyidukan.	Nila Sakti Nila Sakti			1,00	KECAMATAN MEMPWAH TIMUR
7.31.812.36.8036	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perawatan/Perbaikan																		
		Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perawatan/Perbaikan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	-1.210.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANS AL/OKGSI UNLH (OKU)	Mempertukarkan informasi publik, hukum dan administrasi, serta memperhatikan pengalihan dan pemberdayaan korupsi, narkoba, jati, dan penyidukan.	Nila Sakti Nila Sakti			1,00	KECAMATAN MEMPWAH TIMUR
7.31.812.36.8039	Penyediaan Laporan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD				3 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANS AL/OKGSI UNLH (OKU)	Mempertukarkan informasi publik, hukum dan administrasi, serta memperhatikan pengalihan dan pemberdayaan korupsi, narkoba, jati, dan penyidukan.	Nila Sakti Nila Sakti			1,00	KECAMATAN MEMPWAH TIMUR

NO	KODE	URAIAN / BENTUK URAIAN / PROGRAM / KENDARAAN / SUB KENDARAAN	INDIKATOR PROGRAM / KENDARAAN / SUB KENDARAAN	TARGET BOKH PERIODE INDONESIA SPO	REALISASI CAPAIAN BOKH SPO TAHUN 2021	PRAKARSA CAPAIAN TARGET RENCANA OPS TAHUN 2024	CAPAIAN KENDARAAN DAN KERANGKA PENGENDARAAN										KELOMPOK SASARAN	PRIORITAS TAHUN 2021		PENGINGKAT BENCANA PENGANGGARAN JAWA
							TARGET 2021		PADA INDIKATOR (Rp)			Berkas/Berkas (1012)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS			TARGET	PADA INDIKATOR (Rp)	
							SEBELUM	SEKUTAN	RPD 2021	SPB 2021	RPD PERUBAHAN 2021				INDIKATOR	DAFTAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.81.01.2.08	Pengadaan Jasa Perangai Utara Pemukiman Darat	Pemilihan Penyediaan Jasa Perangai Utara Pemukiman Darat					-	100 Persen	50.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00			Mempertahankan informasi publik dalam dan sistem sistem informasi pengelolaan dan pengelolaan sistem, metode juli, dan pengelolaan	Indikator SPB Indikator SPB	Kecamatan Darat	0.00	Kecamatan Darat	
7.81.01.2.08.002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Jaringan Data dan Jaringan																			
		Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Jaringan Data dan Jaringan Darat					0 Laporan	0 Laporan	17.000.000.00	17.000.000.00	17.000.000.00	0.00	Kab. Mempawah, Gubernur, Gubernur	DANA NLOKASI URUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik dalam dan sistem sistem informasi pengelolaan dan pengelolaan sistem, metode juli, dan pengelolaan	Indikator SPB Indikator SPB		0.00	Kecamatan Darat	
7.81.01.2.08.004	Pengadaan Jasa Pelayanan Urus Kantor																			
		Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Urus Kantor yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Mempawah, Gubernur, Gubernur	DANA NLOKASI URUM DANA ALOKASI DANA	Mempertahankan informasi publik dalam dan sistem sistem informasi pengelolaan dan pengelolaan sistem, metode juli, dan pengelolaan	Indikator SPB Indikator SPB		0.00	Kecamatan Darat	
7.81.01.2.08	Pemeliharaan Bening Mili Darat Perangai Utara Pemukiman Darat	Pemilihan penyediaan Jasa Perangai Utara Pemukiman Darat					-	100 Persen	50.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00				Mempertahankan informasi publik dalam dan sistem sistem informasi pengelolaan dan pengelolaan sistem, metode juli, dan pengelolaan	Indikator SPB Indikator SPB	Kecamatan Darat	0.00	Kecamatan Darat
7.81.01.2.08.002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Pajal dan Pajal: Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan																			
		Jumlah Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dipelihara					0 Unit	0 Unit	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	Kab. Mempawah, Gubernur, Gubernur	DANA NLOKASI URUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik dalam dan sistem sistem informasi pengelolaan dan pengelolaan sistem, metode juli, dan pengelolaan	Indikator SPB Indikator SPB		0.00	Kecamatan Darat	
7.81.01.2.08.003	Pemeliharaan Kefasilitasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara dan Dipelihara					0 Unit	0 Unit	0.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	0.00	Kab. Mempawah, Gubernur, Gubernur	DANA NLOKASI URUM (DAU)	Mempertahankan informasi publik dalam dan sistem sistem informasi pengelolaan dan pengelolaan sistem, metode juli, dan pengelolaan	Indikator SPB Indikator SPB		0.00	Kecamatan Darat	

[illegible]

7.01.01.2.03	Administrasi/Bidang MIA Daerah pada Perangkat Daerah	Tugasnya: peningkatan administrasi/daerah/daerah			-	100 Posen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	200.000,00			Menyusun informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Hulu Selip Hulu Selip	-		0,00	KESAMANTAN MEMPERHATIKAN
7.01.01.2.03.000	Peningkatan Bidang MIA Daerah pada DPRD																	
		Jumlah Laporan Peningkatan Bidang MIA Daerah pada DPRD			0 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Rab. Menyusun, Serius, Rencanan, Serius Realisasi	SARAH ALONZI (DRI)	Menyusun informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Hulu Selip Hulu Selip			0,00	KESAMANTAN MEMPERHATIKAN
7.01.01.2.05	Administrasi/Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyusunan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			-	45 Posen	47.000.000,00	22.000.000,00	18.000.000,00	-29.000.000,00			Menyusun informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Hulu Selip Hulu Selip	Akuntan/Paid Wira Salm		0,00	KESAMANTAN MEMPERHATIKAN
7.01.01.2.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas sesuai Rincun Kebutuhan																	
		Jumlah Pakaian Dinas sesuai Rincun Kebutuhan			0 Pakaian	3 Pakaian	3,00	0,00	0,00	0,00	Rab. Menyusun, Serius, Rencanan, Serius Realisasi	SARAH ALONZI (DRI) TRANSFER DARI DANA ALONZI (DRI)	Menyusun informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Hulu Selip Hulu Selip			0,00	KESAMANTAN MEMPERHATIKAN
7.01.01.2.05.001	Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan																	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan/Perundang-undangan			0 Orang	3 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Rab. Menyusun, Serius, Rencanan, Serius Realisasi	SARAH ALONZI (DRI)	Menyusun informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Hulu Selip Hulu Selip			0,00	KESAMANTAN MEMPERHATIKAN
7.01.01.2.06	Administrasi/Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan			-	100 Posen	145.000.000,00	150.707.000,00	72.070.000,00	-73.627.000,00			Menyusun informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Hulu Selip Hulu Selip	Kelurahan/Paid Wira Salm		0,00	KESAMANTAN MEMPERHATIKAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET BOKR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2021	PRAKARAH CAPAIAN TARJETA RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGGA PENGANTAR										KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH/ KEMAH TARJETA		PERSINGKAT DAFTAR PENGANTAR JAWAB
							TARJETA 2021		TARJETA INDIKATIF (Rp)			Berikutnya/Berikutnya (79-12)	LOKASI	JUMUDAH	PENGANTAR			TARJETA	TARJETA INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	KEMUDIAN	RKPD 2021	APRIL 2021	RKPD PERUBAHAN 2021				KEMUDIAN	DAFTAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.00.0001	Perbaikan Kompleks Instalasi Lokasi/Pemangku Barisan Kantor																		
			Jumlah Paket Kompleks Instansi/Lokasi/Pemangku Barisan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mempawah, Desa Kasimban, Desa Kallawu	DAFTAR ALOKASI UNSW (DAU)	Menyediakan informasi politik, hukum dan kesehatan, serta menyediakan pengalaman dan pembelajaran kompetensi, narkotika, juli, dan pengalaman.	Nia Sukir Nia Sukir			0,00	KECAMATAN MEPAWAH TIMOR
	7.01.01.2.00.0002	Perbaikan Instalasi dan Peningkatan Kantor																		
			Jumlah Paket Instalasi dan Peningkatan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	8.522.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	522.000,00	Kab. Mempawah, Desa Kasimban, Desa Kallawu	DAFTAR ALOKASI UNSW (DAU)	Menyediakan informasi politik, hukum dan kesehatan, serta menyediakan pengalaman dan pembelajaran kompetensi, narkotika, juli, dan pengalaman.	Nia Sukir Nia Sukir			0,00	KECAMATAN MEPAWAH TIMOR
	7.01.01.2.00.0003	Perbaikan Instalasi/Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Instalasi Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	Kab. Mempawah, Desa Kasimban, Desa Kallawu	DAFTAR ALOKASI UNSW (DAU)	Menyediakan informasi politik, hukum dan kesehatan, serta menyediakan pengalaman dan pembelajaran kompetensi, narkotika, juli, dan pengalaman.	Nia Sukir Nia Sukir			0,00	KECAMATAN MEPAWAH TIMOR
	7.01.01.2.00.0004	Perbaikan Barisan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Barisan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Desa Kasimban, Desa Kallawu	DAFTAR ALOKASI UNSW (DAU)	Menyediakan informasi politik, hukum dan kesehatan, serta menyediakan pengalaman dan pembelajaran kompetensi, narkotika, juli, dan pengalaman.	Nia Sukir Nia Sukir			0,00	KECAMATAN MEPAWAH TIMOR
	7.01.01.2.00.0005	Perbaikan Barisan Logistik dan Pengiriman																		
			Jumlah Paket Barisan Logistik dan Pengiriman yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Desa Kasimban, Desa Kallawu	DAFTAR ALOKASI UNSW (DAU)	Menyediakan informasi politik, hukum dan kesehatan, serta menyediakan pengalaman dan pembelajaran kompetensi, narkotika, juli, dan pengalaman.	Nia Sukir Nia Sukir			0,00	KECAMATAN MEPAWAH TIMOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2021	PRAKARSA CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARSA/RENCANA TAHUN 2022		KERANGKA SASARAN PENDANAAN JAWAB
							TARGET 2022		PASU INDIKATOR (Rp)			Berkas/Kelembagaan (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PASU INDIKATOR (Rp)	
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2022	APRO 2022	RKPD PERUBAHAN 2022				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemeliharaan Rutin Operasional atau Layanan yang Dipelihara dan Abaikan Pajal dan Persewaan				0 dan	0 dan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Bangkawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penganggaran dan pemberdayaan kelompok, metode: jdi, dan penyekelapan	MakSalda MakSalda			0,00	KECAMATAN MEMPANAH TAJUR
1.01.31.200.300 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				0 dan	0 dan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Bangkawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penganggaran dan pemberdayaan kelompok, metode: jdi, dan penyekelapan	MakSalda MakSalda			0,00	KECAMATAN MEMPANAH TAJUR
1.01.31.200.301 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				0 dan	0 dan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Bangkawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penganggaran dan pemberdayaan kelompok, metode: jdi, dan penyekelapan	MakSalda MakSalda			0,00	KECAMATAN MEMPANAH TAJUR
2	1.01.30	PROGRAM PEMERIKSAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemeriksaan Masyarakat				-	100 Persen	721.521.800,00	822.883.000,00	487.361.150,00	-722.521.800,00							0,00	
1.01.30.2.00		Kegiatan Pemeriksaan Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan yang di Jemputan				-	100 Persen	684.521.800,00	822.883.000,00	487.361.150,00	-140.376.750,00			Mengikuti reformasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penganggaran dan pemberdayaan kelompok, metode: jdi, dan penyekelapan	MakSalda MakSalda	Kecamatan Padi Wini Sam		0,00	KECAMATAN MEMPANAH TAJUR
1.01.30.2.00.001 Pengawasan Pelaksanaan Masyarakat Desa Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Masyarakat Desa Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Masyarakat Desa Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Masyarakat Desa Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan	1.084.700,00	1.084.700,00	1.084.700,00	0,00	Kab. Bangkawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengikuti reformasi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penganggaran dan pemberdayaan kelompok, metode: jdi, dan penyekelapan	MakSalda MakSalda			0,00	KECAMATAN MEMPANAH TAJUR

[illegible]

BAB V

P E N U T U P

Dalam rangka untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2025 Semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap pengembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan perubahan indikator kinerja sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai panduan perangkat daerah dalam menyusun perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.

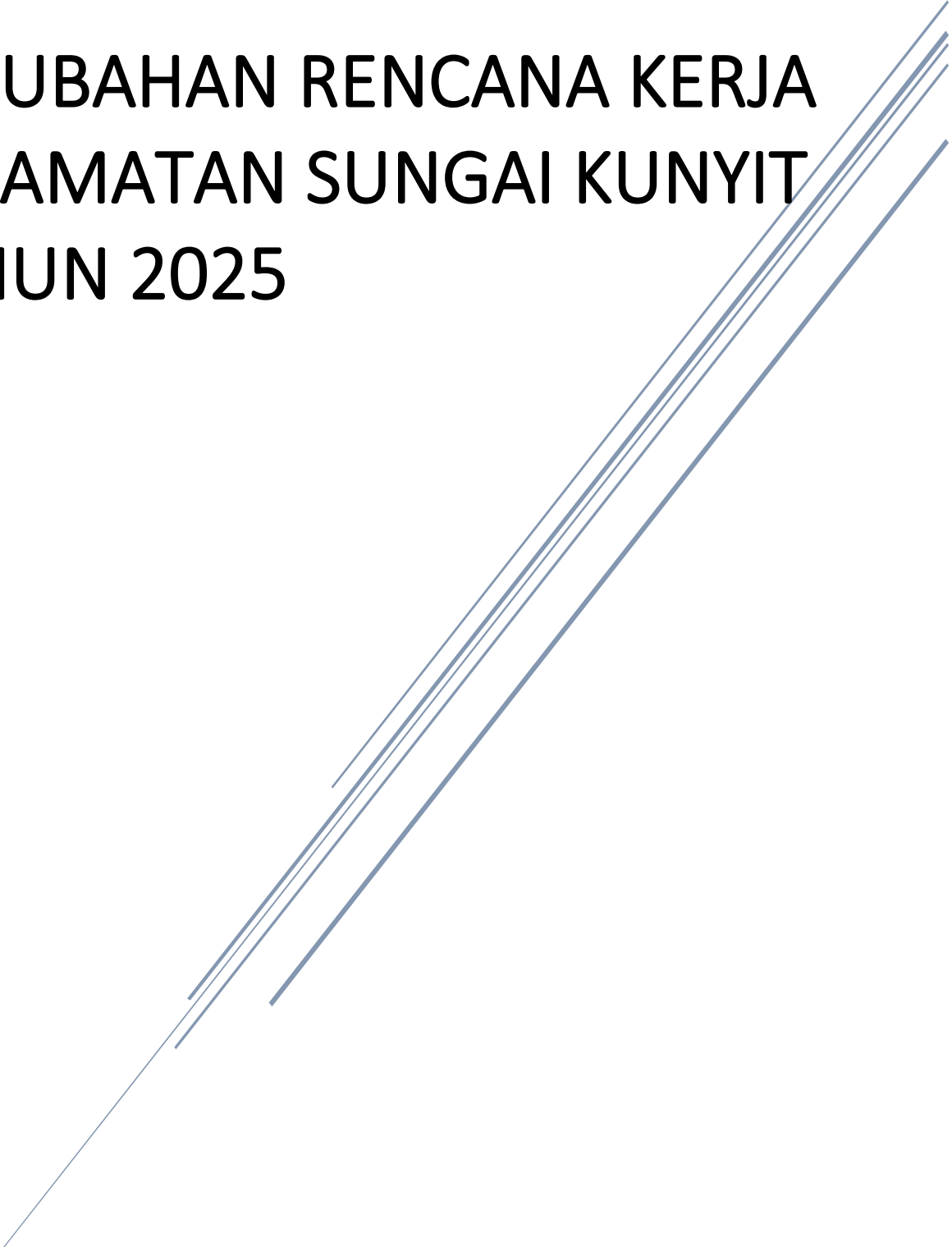
Rencana Kerja Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Mempawah, Juli 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUNGAI KUNYIT TAHUN 2025



KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2024. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA PERUBAHAN tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Sungai Kunyit, Juli 2025
PLT. Camat Sungai Kunyit

BUNJAMIN, SH. MH
NIP. 19760809 200604 1 009
Pembina Tingkat I

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI KUNYIT TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Sungai Kunyt Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Kunyt	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Kunyt	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Kunyt	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	12
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.....	13
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Sungai	
3.2. Kunyt	13
3.3. Program dan Kegiatan	14
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	15
BAB. IV P E N U T U P	16



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Kecamatan Sungai Kunyit sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Mempawah juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025-2026 merupakan bentuk penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, sehingga Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit .

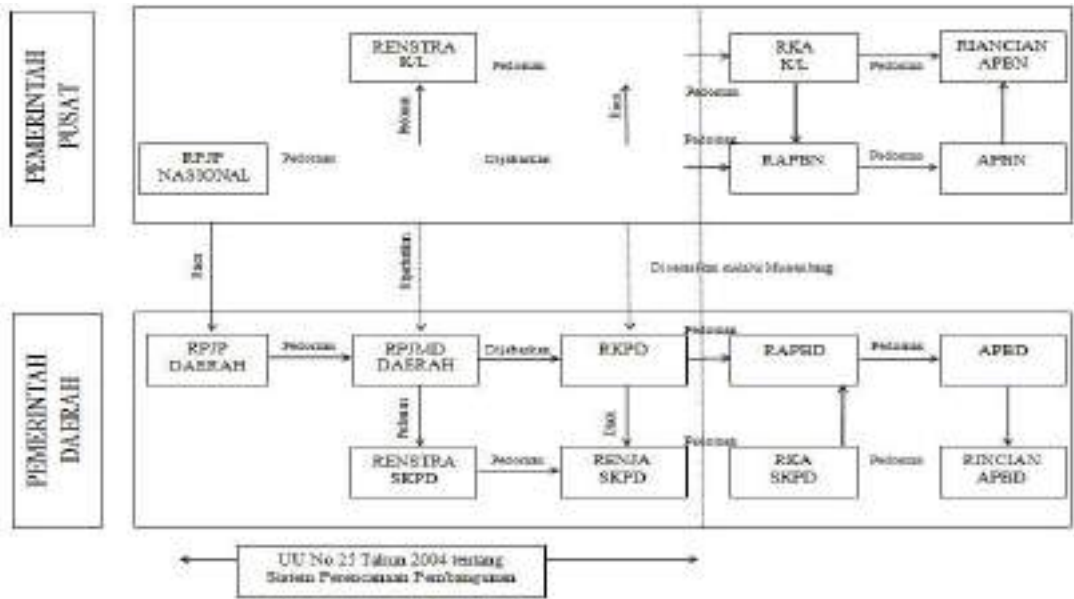
Renja Perubahan Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025 disusun melalui proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sungai Kunyit sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum



Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja Perubahan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja ini adalah :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Sungai Kunyit dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah Kecamatan Sungai Kunyit dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran Tahun 2025 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2026

- c) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sungai Kunyit yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
- d) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah :

- a) Sebagai bahan masukan yang ada pada program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS).
- b) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- c) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- d) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f) Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- g) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- h) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI KUNYIT TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Kunyit



- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Kunyit
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Kunyit
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Kunyit
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V P E N U T U P



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Kunyit .

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Perubahan tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Mempawah, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Error! Not a valid link.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Kunyit

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sungai Kunyit , yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

1. Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Kunyit dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sungai Kunyit sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan PATEN di Kecamatan yang belum berjalan sebagai mana yang diharapkan.
 - b) Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sungai Kunyit yang dilakukan oleh Kabupaten Mempawah;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Sungai Kunyit dapat diidentifikasi

permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sungai Kunyit , sebagai berikut :

- a) Pemahaman akan tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksanaan teknis kegiatan masih lemah yang berakibat pada hasil dan koordinasi yang tidak maksimal;
 - b) Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat perangkat daerah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit belum maksimal.
3. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sungai Kunyit sebagai berikut :
- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya;
 - b) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan; 
 - c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;

2.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Kunyit.

Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Kunyit adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak lama harus terus digerakan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu merupakan tujuan dari reformasi birokrasi yang di cita-citakan. Sehingga tercapainya masyarakat yang adi makmur dan sejahtera tanpa memandang kelompok atau golongan serta bebas dari unsur KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit , maka pendayagunaan Sumber daya aparatur daerah yang berada di Kecamatan Sungai Kunyit harus

dimaskimalkan. SDM yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat perlu memahami prinsip pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang di harapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Sungai Kunyit harus menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Fungsi dari Kecamatan adalah untuk perpanjangan pemerintahan dari Kabupaten maka perlu untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tujuan OPD atau rencana kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penataan organisasi dan manajemen yang baik perlu dilaksanakan di Kecamatan Sungai Kunyit yang nanti dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung Visi dan Misi Bupati Mempawah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a) Terwujudnya tertib administrasi aset barang di Kecamatan Sungai Kunyit ;
- b) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan.

Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2025

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*Prosesdur Battom Up*).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Kunyit

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahunan Kecamatan Sungai Kunyit dimaksudkan sebagai acuan bagi

organisasi perangkat daerah Kecamatan Sungai Kunyit dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
2. Mengarahkan Visi Bupati Mempawah kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sungai Kunyit yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
4. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Kunyit Secara umum adalah terjabarkannya Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025-2026 kedalam Dokumen Rencana Tahunan, yang meliputi :

1. Kerangka pembangunan dan penganggaran Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025
2. Indikasi kegiatan pembangunan Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rincian program dan kegiatan prioritas utama Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran



7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7	01	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7	01	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	01	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	01	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarna dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	03	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7	01	03	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	03	02		Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
7	01	03	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7	01	03	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	03	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	01	03	02	04	Evaluasi Kelurahan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	05	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7	01	05	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7	01	05	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	01	06	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Sungai Kunyit 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sustansinya mengacu pada Rentra Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2025-2026, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Renja Perubahan ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan prioritas Plapon Anggaran Semesteran (PPAS) Tahun 2025, serta RAPBD tahun 2026.

Renja Perubahan ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Sungai Kunyit dan merupakan strategi pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Bupati Mempawah, dan juga Renja Perubahan ini dijadikan parameter untuk berhasil dicapai. Sehingga hasil dicapai. Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit .

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Kunyit ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Sungai Kunyit yang maju, sejahtera dan berkualitas dapat diwujudkan.

BAB V PENUTUP

Renja Perubahan ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Sungai Kunyit dan merupakan strategis pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Kecamatan Sungai Kunyit, dan juga Renja Perubahan ini dijadikan parameter untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang direncanakan telah berhasil dicapai. Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Kunyit ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Kecamatan Sungai Kunyit yang maju, sejahtera dan berkualitas dapat diwujudkan.

Catatan penting dalam pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sungai Kunyit adalah sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara/ Pegawai

Pegawai memegang peranan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai sebagai motor penggerak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai di Kantor Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 13 orang terdiri dari 7 pejabat struktural dan 6 orang pejabat fungsional

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi unsur pendukung dalam membantu pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana berupa barang tidak bergerak seperti gedung dan barang bergerak seperti komputer, kendaraan, meja kursi, ATK dll.

c. Pendanaan

Dana ibarat urat nadi suatu organisasi. Ketersediaan dana yang cukup akan membantu penyelenggaraan pemerintahan. Dana akan membantu aktivitas baik di dalam kantor seperti kegiatan kesekretariatan, dan kegiatan diluar seperti pembinaan ke desa/ kelurahan, penyelenggaraan

urusan pemerintahan, ekonomi pembangunan. Kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

d. Kaidah-kaidah pelaksanaan

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Apa yang dikerjakan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi dan secara sosiologis.

2. Transparansi

Pemerintah yang baik akan bersifat transparan dapat diakses dan diketahui oleh siapapun apa yang telah diperbuat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Keterbukaan

Menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik, saran untuk kebaikan dan kemajuan daerah

4. Aturan Hukum

Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditempuh oleh penyelenggara negara, dan Aparatur Negara tidak kebal hukum tidak semauanya membuat aturan yang menguntungkan dirinya justru sebaliknya sebagai contoh dalam penegakan hukum.

Untuk itu kami mengharapkan semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh sungguh melaksanakan rencana kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya mengatasi masalah di lingkungan Kecamatan Sungai Kunyit sebagai upaya pendukung menjadikan masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit yang sejahtera dan berkualitas.

Sungai Kunyit, Juli 2025

PLT. Camat Sungai Kunyit



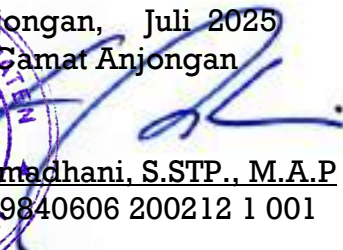
BUNJAMIN, SH.MH
NIP. 19760809 200604 1 009



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Kecamatan Anjongan Tahun 2025. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja Perubahan tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Anjongan, Juli 2025
Camat Anjongan

Feri Ramadhani, S.STP., M.A.P
NIP. 19840606 200212 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANJONGAN TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Anjongan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Anjongan	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Anjongan	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Anjongan	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.....	23
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan 3.2. Anjongan.....	23
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	27
BAB. IV P E N U T U P	28



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

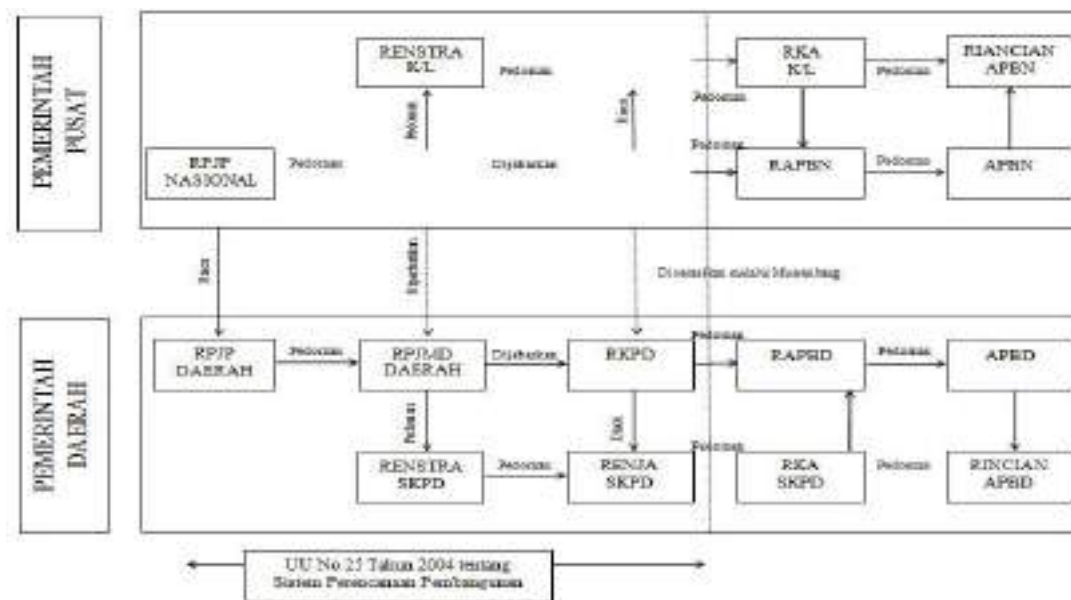
Kecamatan Anjongan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Mempawah juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kecamatan Anjongan Tahun 2025-2030 merupakan bentuk penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030, sehingga Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Anjongan.

Renja Perubahan Kecamatan Anjongan Tahun 2025 disusun melalui proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Anjongan sebelum

Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja Perubahan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025;



1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan ini adalah :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Anjongan dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah Kecamatan Anjongan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran Tahun 2025 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2026
- c) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Anjongan yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
- d) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah :

- a) Sebagai bahan masukan yang ada pada program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS).
- b) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- c) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- d) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f) Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.



- g) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- h) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN ANJONGAN TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Anjongan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Anjongan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Anjongan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Anjongan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Anjongan
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN ANJONGAN
TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Anjongan .

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Kecamatan Anjongan Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Perubahan tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Mempawah, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Anjongan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Uraian Program/Kegiat an	Target		Realisasi	Permasalahan
1	2	3		4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K OTA	100%			
A.1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	2.500.000 2.489.800	Anggaran terlalu kecil untuk kegiatan ini mengingat banyaknya kegiatan penyusunan



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

				Terealisasinya Realisasi kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa REVISI RENSTRA 2020-2024 dan RENJA 2024 dapat terlaksana dengan baik	dokumen perencanaan sehingga tidak menghasilkan perencanaan yang baik. Terdapat juga perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi menurut Permendagri 90 Tahun 2019 namun tidak mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis sehingga perencanaan masih belum bisa terlaksana dengan baik
	2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	1.700.000 1.699.650 Terealisasinya Realisasi kegiatan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dapat terlaksana dengan baik	Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan tidak mengalami permasalahan
	3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	1.316.525 1.316.400 Terealisasinya Realisasi kegiatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dapat terlaksana dengan baik	Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan tidak mengalami permasalahan
	4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	2.341.200 2.310.800 Terealisasinya Realisasi kegiatan penyusunan Dokumen DPA-SKPD dapat terlaksana dengan baik	Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan Penyusunan DPA_SKPD dan tidak mengalami permasalahan
	5.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	700.000 674.900	Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan Penyusunan Perubahan DPA_SKPD dan tidak



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

				Terealisasinya Realisasi kegiatan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dapat terlaksana dengan baik	mengalami permasalahan
	6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	15.486.575 15.476.300 Terealisasinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan baik	Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tidak mengalami permasalahan
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	Anggaran Realisasi	2.219.321.725 2.185.505.964 Terealisasinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran ini sudah sesuai dengan jumlah ASN yang ada dan tidak mengalami permasalahan
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	20.180.000 15.230.000,00 Tersedianya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Anggaran ini sudah sesuai dengan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	10.991.550 10.981.500 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (LAKIT) 2023	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	12 Dokumen	Anggaran Realisasi	5.499.950 5.489.900	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
A.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	14.535.000 9.634.600 Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
A.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	Anggaran Realisasi	17.500.000 17.239.971 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terhadap ASN Kantor Kecamatan Anjongan	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
A.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Anggaran Realisasi	3.655.400 3.652.600 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan selama tahun 2024	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Anjongan
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Anggaran Realisasi	14.391.624 14.361.000	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

				Tersedianya Peralatan dari Perlengkapan Kantor selama 12 bulan tahun 2024	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Anggaran Realisasi	4.128.554 4.127.700 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 12 bulan selama tahun 2024	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Anggaran Realisasi	10.000.000 10.000.000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor pada Tahun Anggaran 2024	Alokasi Anggaran Kegiatan ini masih dirasakan kurang untuk pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor Kecamatan Anjongan
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Anggaran Realisasi	8.600.000 8.599.800 Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	5.040.000 5.040.000 Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 jenis	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Anggaran Realisasi	33.467.000 33.275.000 Tersedianya laporan Perjadi tahun 2024	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	4.000.000 3.983.100 Tersedianya Dokumen arsip	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

				Dinamis tahun 2024	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Anggaran Realisasi	45.000.000 39.669.570 Realisasi pembayaran jasa listrik dan Telepon sesuai dengan Pemakaian PLN dan Telkom	Biaya yang dikeluarkan belanja listrik sesuai dengan Pemakaian PLN dan Telkom
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	Anggaran Realisasi	96.260.640 95.945.775 3 orang tenaga kontrak / honor terbayarkan gaji atau honoranya selama 12 bulan tahun 2024	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Anjongan
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Anggaran Realisasi	37.730.150 33.895.600 Terbayarnya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4 empat	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan pemabayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	Anggaran Realisasi	6.000.000 1.661.100 Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan pemabayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua walaupun ada beberapa kendaraan dinas roda dua yang rusak berak sehingga tidak dibayarkan pajaknya
	3. Pemeliharaan/R	2 Unit	Anggaran	9.928.000	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

	ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Realisasi	9.928.000 Terlaksananya perawatan / perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	4. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	Anggaran Realisasi	1.380.000 1.380.000 Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Alokasi Anggaran Kegiatan ini masih dirasakan kurang dengan kondisi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Anggaran Realisasi	4.880.000 4.880.000 Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%			
B.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	4.900.000 4.889.900 Tersedianya profil Kecamatan Anjongan Tahun 2023	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan penyusunan profil Kecamatan Anjongan
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

	DESA DAN KELURAHAN				
C.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	3.400.000 3.349.800 Tersedianya Berita Acara Hasil Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Dokumen	Anggaran Realisasi	8.600.000 8.550.000 Tersedianya Rapat atau Pertemuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
C.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Dokumen	Anggaran Realisasi	5.000.000 5.000.000 Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kelurahan di Kecamatan Anjongan Tahun Anggaran 2025	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	Anggaran Realisasi	141.763.700 125.843.900 Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Anggaran Realis	312.898.100 299.611.475	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025

			asi	Tersedianya Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	4. Evaluasi Kelurahan		Anggaran Realisasi	4.000.000 3.999.200 Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Anggaran ini sudah sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%			
D.1	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	Anggaran Realisasi	27.500.000 26.000.900 Terselenggaranya Peringatan 17 Agustus 2024	Alokasi Anggaran untuk Kegiatan ini masih dirasakan kurang dibandingkan dengan kebutuhan dana yang diperlukan
	2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Dokumen	Anggaran Realisasi	6.800.000 6.793.000	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

				Tersedianya Berita Acara Serah Terima Barang / Alat Olahraga	
	3. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	70.000.000 69.959.250 Tersedianya SK Panitia LPTQ Kecamatan	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan pelaksanaan LPTQ Tingkat Kecamatan
	3. Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Desa dan 1 Kelura han	Angga ran Realis asi	12.000.000 11.799.600 Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada karang taruna / LPMD / PKK	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan
	4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokum en	Angga ran Realis asi	12.000.000 11.988.500 Tersedianya Barita Acara hasil Rapat Forkopincam	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan pembinaan kepada karang taruna / LPMD / PKK
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%			
E.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	9.000.000 8.953.600 Tersedianya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa



**Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan
Tahun 2025**

				Pemerintahan Desa	
	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokum en	Angga ran Realis asi	7.500.000 7.499.600 Tersedianya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	3. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokum en	Angga ran Realis asi	15.000.000 14.999.800 Tersedianya Berita Acara Hasil Musrenbang 2025 Tingkat Kecamatan Anjongan	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Musrenbang 2025 Tingkat Kecamatan Anjongan
	4.Fasilitas Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokum en	Angga ran Realis asi Prosen tasi Realis asi	9.000.000 9.000.000 • Tersedianya 5 Dokumen Berita Acara Rapat/Pertemua n Pembinaan di Desa Terkait Masalah Ketentraman dan Ketertiban • Tersedianya Dokumen Catatan Tindak lanjut dari Pengaduan dan Ikhtisar Laporan Penyelsaian Masalah terkait Dengan Masalah Ketentraman dan Ketertiban	Anggaran ini sudah sesuai dengan kegiatan Pembinaan di Desa Terkait Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Anjongan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Anjongan, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

3. Kebijakan Pemerintah Kecamatan Anjongan dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Anjongan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan PATEN di Kecamatan yang belum berjalan sebagai mana yang diharapkan.
 - b) Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Anjongan yang dilakukan oleh Kabupaten Mempawah;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Anjongan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Anjongan , sebagai berikut :
 - a) Pemahaman akan tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksanaan teknis kegiatan masih lemah yang berakibat pada hasil dan koordinasi yang tidak maksimal;
 - b) Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat perangkat daerah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Anjongan belum maksimal.
5. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Anjongan sebagai berikut :
 - a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaanya;

- b) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;

2.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Anjongan .

Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Anjongan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak lama harus terus digerakan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu merupakan tujuan dari reformasi birokrasi yang di cita-citakan. Sehingga tercapainya masyarakat yang adi makmur dan sejahtera tanpa memandang kelompok atau golongan serta bebas dari unsur KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Anjongan , maka pendayagunaan Sumber daya aparatur daerah yang berada di Kecamatan Anjongan harus dimaskimalkan. SDM yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat perlu memahami prinsip pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang di harapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Anjongan harus menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Fungsi dari Kecamatan adalah untuk perpanjangan pemerintahan dari Kabupaten maka perlu untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tujuan OPD atau rencana kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penataan organisasi dan manajemen yang baik perlu dilaksanakan di Kecamatan Mempawah Hilir yang nanti dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung Visi dan Misi Bupati Mempawah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a) Terwujudnya tertib administrasi aset barang di Kecamatan Anjongan ;
- b) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2025
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*Prosedur Battom Up*).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum



sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.5 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*.

2.6 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Anjongan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahunan Kecamatan Anjongan dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah Kecamatan Anjongan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan yang dapat dirincikan sebagai berikut :



1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
2. Mengarahkan Visi Bupati Mempawah kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Anjongan yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
4. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Anjongan Secara umum adalah terjabarkannya Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Anjongan Tahun 2025-2030 kedalam Dokumen Rencana Tahunan, yang meliputi :

1. Kerangka pembangunan dan penganggaran Kecamatan Anjongan Tahun 2025
2. Indikasi kegiatan pembangunan Kecamatan Anjongan Tahun 2025.

2.7 Program dan Kegiatan

Adapun rincian program dan kegiatan prioritas utama Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran

PROGRAM KEGIATAN
BELANJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Evaluasi Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan



Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Anjongan 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sustansinya mengacu pada Rentra Kecamatan Anjongan Tahun 2025-2030, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030. Renja Perubahan ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan prioritas Plapon Anggaran Semesteran (PPAS) Tahun 2025, serta RAPBD tahun 2026, untuk APBD induk tahun 2025 pendanaan kecamatan anjongan sebesar Rp. 3.413.756.599 dan di perubahan APBD ini menjadi sebesar Rp. 3.105.458.854.

Renja Perubahan ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Anjongan dan merupakan strategi pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Bupati Mempawah, dan juga Renja Perubahan ini dijadikan parameter untuk berhasil dicapai. Sehingga hasil dicapai. Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Anjongan .

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Anjongan yang maju, sejahtera dan berkualitas dapat diwujudkan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Anjongan dan merupakan strategis pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Kecamatan Anjongan , dan juga Renja Perubahan ini dijadikan parameter untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang direncanakan telah berhasil dicapai. Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Anjongan .

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Anjongan ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Kecamatan Anjongan yang maju, sejahtera dan berkualitas dapat diwujudkan.

Catatan penting dalam pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Anjongan adalah sebagai berikut :

a. **Aparatur Sipil Negara/ Pegawai**

Pegawai memegang peranan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai sebagai motor penggerak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai di Kantor Kecamatan Anjongan sebanyak 25 orang terdiri dari 12 pejabat struktural dan 13 orang pejabat fungsional

b. **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana menjadi unsur pendukung dalam membantu pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana berupa barang tidak bergerak seperti gedung dan barang bergerak seperti komputer, AC, kendaraan bermotor, meja kursi, ATK dll.

c. **Pendanaan**

Dana ibarat urat nadi suatu organisasi. Ketersediaan dana yang cukup akan membantu penyelenggaraan pemerintahan. untuk APBD induk tahun 2025 pendanaan kecamatan anjongan sebesar Rp. 3.413.756.599 dan di perubahan APBD ini menjadi sebesar Rp. 3.105.458.854. Dana tersebut akan membantu aktivitas baik di dalam kantor seperti kegiatan kesekretariatan, dan kegiatan diluar seperti pembinaan ke desa/ kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, ekonomi pembangunan.



Kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

d. Kaidah-kaidah pelaksanaan

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Apa yang dikerjakan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi dan secara sosiologis.

2. Transparansi

Pemerintah yang baik akan bersifat transparan dapat diakses dan diketahui oleh siapapun apa yang telah diperbuat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Keterbukaan

Menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik, saran untuk kebaikan dan kemajuan daerah

4. Aturan Hukum

Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditempuh oleh penyelenggara negara, dan Aparatur Negara tidak kebal hukum tidak semauanya membuat aturan yang menguntungkan dirinya justru sebaliknya sebagai contoh dalam penegakan hukum.

Untuk itu kami mengharapkan semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh sungguh melaksanakan rencana kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya mengatasi masalah di lingkungan Kecamatan Anjongan sebagai upaya pendukung menjadikan masyarakat Kecamatan Anjongan yang sejahtera dan berkualitas.

PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TOHO TAHUN 2025

KECAMATAN TOHO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Kecamatan Toho Tahun 2024. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA PERUBAHAN tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Toho, Juli 2025
PLT. Camat Toho

NGATMO, S.KM, M.AP
NIP. 19720217 199203 1 005





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOHO TAHUN 2021.....

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Toho Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Toho..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Toho..... 9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Toho 11

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 11

2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 12

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 13

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten..... 13

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Toho..... 13

3.3. Program dan Kegiatan 14

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 15

BAB. IV P E N U T U P 16







PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) TAHUN ANGGARAN 2025



**KECAMATAN SADANIANG
TAHUN 2025**



KATAPENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun suatu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sadaniang Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Sadaniang Tahun 2025, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Sadaniang perlu menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Sadaniang ini berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait perencanaan pembangunan dan juga berpedoman kepada Renstra Kecamatan Sadaniang Tahun 2025-2026 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan untuk penyusunan yang akan datang.

Sadaniang, Agustus 2025
CAMAT SADANIANG,

Muhammad Yusra, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680617 199003 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.4 Maksud dan Tujuan	20
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	21
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SADANIANG TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sadaniang Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Sadaniang	24
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.....	31
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sadaniang	31
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN I :Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah	
LAMPIRAN II :Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	
LAMPIRAN III : Rancangan Awal Renja OPD tahun 2025 Sicanda	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan dokumen tahunan rencana kerja daerah yang mempunyai kedudukan strategis dan merupakan penjabaran perencanaan strategis jangka menengah daerah maupun perangkat daerah. Penyusunan dokumen RKPD memerlukan sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui berbagai forum dan wadah yang dituangkan dalam sistem berbasis e-planning. Dokumen RKPD ini disusun sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- d. Penyusunan rancangan RKPD
- e. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- f. Perumusan rancangan akhir RKPD
- g. Penetapan RKPD

Selain itu penyusunan dokumen RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2026 untuk periode Tahun ke IV dengan fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan desa menuju desa mandiri yang merupakan penjabaran

dari Misi ke-IV Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2026, dengan demikian program strategis daerah melalui rencana kerja perangkat daerah adalah benar-benar kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan desa sehingga pada akhir masa periode RPJMD target pembangunan pada Misi IV dapat tercapai ditengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

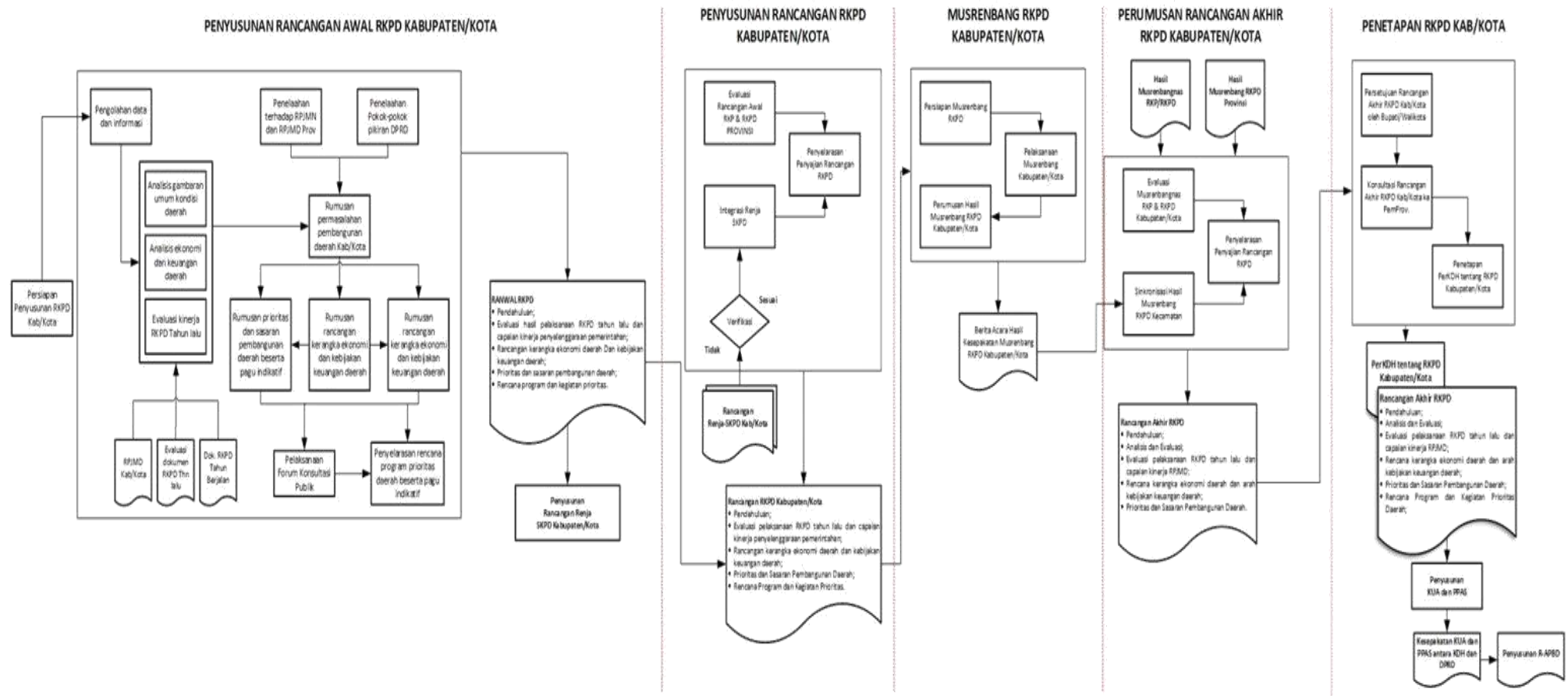
Sejak tahun 2019, seluruh belahan dunia mengalami suatu fenomena mewabahnya penyebaran virus Covid 19 hingga saat ini dimana kondisi yang tidak menentu baik dari sektor ekonomi, kesehatan bahkan di sektor pendidikan yang berdampak secara langsung sehingga antara target pembangunan dan realisasi perencanaan tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, disisi lain Tahun 2025 sudah mulai mempersiapkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2025 sehingga pembiayaan belanja yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah dan agenda kerja lainnya harus terbagi dengan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Selain itu, secara orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Dengan demikian penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara diagram, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.sebagai berikut :

Gambar 1.1

Skema Alur Penyusunan RKPD



Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di

Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program dan kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD kemudian juga dilakukan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh segmen masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah serta

pendekatan politis yaitu penerjemahan yang tepat dan sistematis serta dapat terukur terhadap visi dan misi Bupati Kabupaten Mempawah terpilih periode 2025-2026. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan dari bawah-atas (*bottom-up*), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang disusun melalui metode tahapan perencanaan diatas, dilaksanakan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Mempawah.

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan salah satu subsistem dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun untuk menjabarkan amanat arah pembangunan yang mengacu pada Perda RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025, Perda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan RPJM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025 dan RPJM Nasional 2025-2026.

Dokumen RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini secara tahapan proses berada pada tahun keempat perencanaan pembangunan daerah sejak ditetapkannya Perda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sesuai Visi dan Misi Bupati Kabupaten Mempawah 2025-2026 baik yang secara umum dan bahkan secara khusus dapat diterapkan dalam Perencanaan Perangkat Daerah. Antisipasi secara dini ini dilakukan sejak dalam proses Musrenbang Kecamatan melalui Forum Perangkat Daerah sampai dengan Musrenbang Kabupaten, dimana perangkat daerah diberi informasi dan

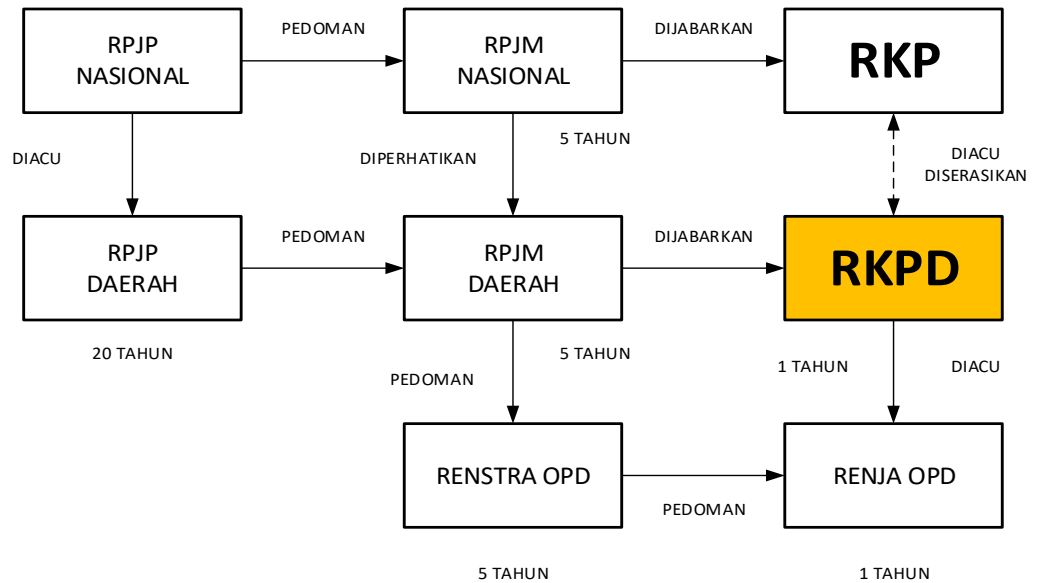
bahan data Visi dan Misi Bupati terpilih, sehingga perencanaan pembangunan perangkat daerah dapat menyesuaikan dengan rencana kerja Bupati Mempawah Tahun 2025 dimana arah pembangunan difokuskan pada *pembangunan desa menuju desa mandiri*.

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 berada pada lingkup RPJMD Provinsi Kalimantan Barat maka Perda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 berada pada tahapan peningkatan status desa baik dengan status desa berkembang menjadi desa maju, sedangkan desa maju menjadi desa mandiri melalui upaya berbagai sektor baik dari penyediaan sarana prasarana infrastruktur, ekonomi, kesehatan bahkan Pendidikan.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun selaras dengan dokumen perencanaan tingkat Pusat dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta menjadi landasan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Secara sistematis hubungan antar dokumen dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:

Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Dalam konteks spasial, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 juga memperhatikan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Strategi dan kebijakan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dimana pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program

dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: *Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* yang dijabarkan dalam 7 prioritas nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, pada Tahun 2025 pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian tujuh arah kebijakan prioritas nasional yang pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan bisa mencapai 0-1 persen dengan perkiraan 2,5-3 juta jiwa penduduk, kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada sektor kesehatan dan Pendidikan, arah kebijakan ketiga adalah penanggulangan pengangguran yang disertai dengan decent job, keempat akan diupayakan pada pendorongan pemulihan dunia usaha sedangkan kelima revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam ekonomi hijau, dimana kebijakan nasional menargetkan pada tahun 2060 Indonesia mencapai net-zero dengan pembangunan rendah karbon dan arah kebijakan yang ketujuh adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi.

Pada Tahun 2025, beberapa target pembangunan nasional yang

ingin dicapai diantaranya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh pada 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, dari sektor Indeks Pembangunan Manuis (IPM) ditargetkan sebesar 73,29 – 73,35 yang disertai dengan pengentasan tingkat kemiskinan sebesar 7-8 persen, disisi lain nilai tukar petani (NTP) ditargetkan antara 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

2. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD diperlukan arah kebijakan guna efektivitas dan efisiensi pencapaian pembanguan selama lima tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tahapan Pembangunan RKPD Kalimantan Barat Tahun ke-5 adalah *“Peningkatan Kualitas Hidup Manusia, Produktivitas Masyarakat dan Daya Saing Daerah”* dengan strategi yang akan dilasanakan diantaranya :

1. Menurunkan kematian ibu dan anak, serta percepatan penurunan prevelensi stunting dan wasting.
2. Meningkatkan jangkauan perlindungan sosial.
3. Meningkatkan rata-rata lama sekolah tingkat Pendidikan tinggi (Usia 19-24 Tahun)
4. Peningkatan produktivitas sector pertanian, kehutanan dan perikanan.

Selain itu untuk mendukung strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan arah kebijakan yang direncanakan pada Tahun 2025 diantaranya:

1. Penguatan Fasilitas Kesehatan.

2. Meningkatkan cakupan imunisasi dan pelayanan KB
3. Pemenuhan Kebutuhan Gizi
4. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
5. Perlindungan sosial bagi lansia.
6. Pemberian Bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di level perguruan tinggi.
7. Meningkatkan harapan lama sekolah melalui peningkatan Kerjasama dengan perguruan tinggi lokal.
8. Penguatan PKBM sebagai fasilitator Pendidikan Non Formal.
9. Pengendalian Harga.
10. Menjaga ketersediaan bahan pangan.
11. Penyerapan tenaga kerja lokal melalui pola padat karya.
12. Nilai Tukar Petani.
13. Peningkatan produktivitas sektor unggulan.

Dari strategi dan arah kebijakan yang diuraikan diatas, maka fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2025 adalah "*Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat*", tahapan ini merupakan tahapan peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata. Pada tahap ini menjadi sebuah bentuk respon dari berbagai modifikasi pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik sebagai suatu dorongan atau koreksi guna menuju tahap berikutnya. Melalui tahap penguatan ini mampu memberikan peningkatan partisipasi dalam aktivitas pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi

dengan mendorong kepada pertumbuhan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada sector yang padat modal.

Pada tahapan ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka, menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip Good Governance
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
5. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dengan melihat 7 prioritas nasional dengan 6 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang telah dijabarkan maka dapat disajikan kesesuaiannya dengan 20 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mempawah yang dapat dilihat tabel matrik sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Hubungan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi
dan Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	Meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengurangi ketimpangan pendapatan Masyarakat. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Meningkatkan sektor unggulan daerah. Meningkatkan investasi. Mewujudkan stabilitas harga. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.		Meningkatkan kemandirian desa. Mengurangi kemiskinan.

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip Good Governance	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi. Meningkatkan penerapan e-govtment.
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang Mengurangi pencemaran lingkungan.

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Mewujudkan Masyarakat yang Tertib	Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan toleransi dikalangan masyarakat

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Prioritas Nasional pertama didukung oleh 7 prioritas daerah yang tersebar di beberapa perangkat daerah yang mengampu beberapa urusan diantara urusan ketahanan pangan, urusan perdagangan, urusan ketenagakerjaan, urusan penanaman modal, urusan keuangan dan beberapa urusan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Selain itu Prioritas Nasional kedua didukung oleh 2 prioritas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa, urusan pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial.

Untuk Prioritas Nasional ketiga didukung oleh 3 prioritas daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan keuangan, sedangkan untuk Prioritas Nasional keempat didukung oleh 2 prioritas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, urusan komunikasi dan informatika, urusan perencanaan, urusan keuangan dan Prioritas Nasional kelima didukung oleh 2 prioritas daerah yakni urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan permukiman, urusan perhubungan.

Prioritas Nasional keenam didukung oleh 2 prioritas daerah dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penataan ruang, urusan penanggulangan bencana dan urusan lingkungan hidup dan Prioritas Nasional terakhir didukung oleh 3 Prioritas daerah yakni yang melaksanakan urusan ketertiban dan keamanan, urusan pemerintahan, urusan Kesehatan, urusan pencatatan sipil, urusan perencanaan dan urusan penunjang yang sifatnya peningkatan pelayanan publik.

3. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah dalam pembangunan yang penyusunannya berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan fokus

pembangunan desa menuju desa mandiri. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target pembangunan tahun keempat RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

4. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan RTRW Kabupaten Mempawah 2014-2034

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 berpedoman pada RTRW Kabupaten Mempawah, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 sebagai acuan untuk mengarahkan tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.

Adapun tujuan penelaahan rencana tata ruang untuk melihat kerangka pengembangan struktur ruang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai pemerataan secara seimbang, guna menggerakkan

perkembangan pertanian (dalam arti luas) dan perikanan dan kelautan; dan

- b. Penyediaan sarana-prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air dan prasarana lingkungan.

5. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Mempawah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah:

- 1) Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mempawah;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ;
- 4) Mengoptimalkan komunikasi dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi; serta
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.3 Hubungan Antara Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan yang relevan seperti keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD Prov/Kab, RKPD Provinsi, RTRW Kabupaten, Renstra Perangkat

Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.5 Sitematika Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun 2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJMD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian Sub Fungsi, Program dan Kegiatan Prioritas, Instansi Pelaksana/SKPD, Lokasi Kegiatan serta Pagu Indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RPJPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain :

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara perangkat daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas perangkat daerah;
- b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD;
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Mempawah. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sadaniang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sadaniang dapat dilihat pada table di Lampiran II Formulir E.81.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Perangkat Daerah Kecamatan Sadaniang terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sadaniang dapat mendorong terwujudnya Kabupaten Mempawah yang sejahtera dan berkualitas.

Kecamatan Sadaniang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanateknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 6Desa yang menjadiwewenang Kecamatan Sadaniang. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sadaniangmemilikibeberapa kelemahan faktor eksternalserta faktor internal yang menghambat kelancaran prosespencapaian tujuan dalam menjalankan Visi dan Misinya.

Terkait dengan faktor eksternal yang menjadi hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pembinaan ke Desa belum optimal sehingga Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Pedesaan
2. Koordinasi dengan UPT dan instansi vertikal belum optimal

3. Belum lengkap atau tersosialisasinya peraturan perundang-undangan serta regulasi sebagai platform dasar pelaksanaan tugas

Adapun faktor internal yang menyangkut tugas dan fungsi jajaran aparatur di Kecamatan Sadaniang antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai baik dalam jumlah maupun secara kualitas. Sehingga masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
2. Penataan administrasi pemerintahan masih belum teratur

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan, namun demikian sudah barang tentu sebaik-baiknya program dan kegiatan yang direncanakan tidak akan dapat terlaksana manakala tidak didukung oleh perangkat aturan sebagai regulasi dasar pelaksanaan teknis di lapangan. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan kedepan diusulkan :

1. Mengadakan pembenahan lebih lanjut menyangkut sarana-prasarana pendukung dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur tentang tugas fungsi, tata kerja, regulasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Penyediaan dan penambahan anggaran dari APBD Kabupaten Mempawah untuk penyelenggaraan PATEN mengingat pelimpahan

kewenangan harus dibarengi dengan pelimpahan personil, pendanaan dan sarana-prasarana.

3. Peningkatan kesejahteraan dan jaminan kesehatan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam.

Selain itu isu penting lainnya yaitu adanya tantangan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Sadaniang yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tantangan

Kecamatan Sadaniang adalah Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten lain, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten tetangga yang karakteristiknya tidak sesuai dengan Kabupaten Mempawah cukup berpengaruh, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap Otonomi Daerah sangat kurang. Selain itu juga adanya heterogenitas penduduk dan tingkat kerawanan criminal yang cukup tinggi sehingga diperlukan upaya untuk menjaga keamanan dan keutuhan masyarakat.

- b. Peluang

- 1) Potensi Kecamatan Sadaniang cukup besar bila dikembangkan, seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian.
- 2) Adanya kewajiban pengusaha untuk memperhatikan Company/Coorporate Social Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sadaniang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Sadaniang dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Mempawah. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcome baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil,

manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan. Proses penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, pemuka agama, aparatur

desa/kelurahan dan pemuka adat yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Penelitian dan pengamatan tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kependudukan masyarakat pemberdayaan, kesejahteraan, keagamaan dan kebudayaan masyarakat karena dianggap sejalan dengan indikator dalam RPJMD 2025-2026 Kabupaten Mempawah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Sadaniang merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Mempawah, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi OPD Kecamatan Sadaniang dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sadaniang yang definitif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sadaniang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Sadaniang dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah di Kecamatan Sadaniang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2023.
- 2) Mengarahkan visi Kecamatan Sadaniang kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
- 3) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sadaniang yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
- 4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

Adapun sasaran penyusunan Renja Kecamatan Sadaniang secara umum adalah terjabarkannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadaniang tahun 2025-2026 ke dalam dokumen Rencana Tahunan, yang meliputi :

- 1) Kerangka pembangunan dan penganggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2023.
- 2) Indikasi kegiatan pembangunan Kecamatan Tahun Anggaran 2024.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rincian program dan kegiatan prioritas utama Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan Kecamatan Sadaniang Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7	Penyediaan Bahan/Material
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan Mebel
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

	5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
	3	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	4	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	5	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
	6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
	4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Selain kegiatan prioritas di atas Kecamatan Sadaniang juga mengusulkan kegiatan yang juga perlu diprioritaskan untuk dibiayai dalam APBD 2025 melalui OPD terkait yaitu :

1. Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Sadaniang.
2. Pembangunan Halaman Keliling Kecamatan Sadaniang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan untuk OPD Kecamatan Sadaniang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Renstra Kecamatan Sadaniang Tahun 2025-2026 dan RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Usulan Program dan kegiatan untuk OPD Kecamatan Sadaniang secara rinci dapat dilihat pada tabel di Lampiran I.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sadaniang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Renstra Kecamatan Sadaniang Tahun 2025-2026 dan RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Renja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta RAPBD Tahun 2025.

Untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja OPD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra OPD (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerjasecara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sadaniang sebagai barometer yang menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Demikian Renja Kecamatan Sadaniang Tahun 2025 ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Sadaniang dan merupakan strategi pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan sesuai dengan Visi Kecamatan Sadaniang.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Sadaniang ini dijadikan pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan

pada tahunberikutnya dengan harapan Kecamatan Sadaniang yang maju, sejahtera dan berkualitas dapat diwujudkan.

RANCANGAN AWAL RENJA OPD
KECAMATAN SADANIANG
TAHUN 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.0.00.0.00.07	KECAMATAN SADANIANG		2.533.456.135,00	0,00	0,00	2.533.456.135,00	2.533.456.135,00	Kec. Sadaniang
7.01	KECAMATAN		2.533.456.135,00	0,00	0,00	2.533.456.135,00	2.533.456.135,00	Kec. Sadaniang
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.249.009.335,00	0,00	0,00	2.249.009.335,00	2.249.009.335,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	1.744.551.535,00	0,00	0,00	1.744.551.535,00	1.744.551.535,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.707.551.535,00	0,00	0,00	1.707.551.535,00	1.707.551.535,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kec.

7.01.01.2.02.01	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Sadaniang
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	42.096.800,00	0,00	0,00	42.096.800,00	42.096.800,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12.096.800,00	0,00	0,00	12.096.800,00	12.096.800,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Sasaran:	127.500.000,00	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Sasaran:	107.861.000,00	0,00	0,00	107.861.000,00	107.861.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.861.000,00	0,00	0,00	24.861.000,00	24.861.000,00	Kec.

7.01.01.2.09.01	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24.001.000,00	0,00	0,00	24.001.000,00	24.001.000,00	Sadaniang
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.09.19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.09.27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.09.28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kec. Sadaniang
37263	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26.750.000,00	0,00	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator: Sasaran:	26.750.000,00	0,00	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	15.750.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Indikator: Sasaran:	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.02.2.01.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan. Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kec. Sadaniang
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		55.696.800,00	0,00	0,00	55.696.800,00	55.696.800,00	Kec. Sadaniang
7.01.03.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indikator: Sasaran:	55.696.800,00	0,00	0,00	55.696.800,00	55.696.800,00	Kec. Sadaniang
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12.096.800,00	0,00	0,00	12.096.800,00	12.096.800,00	Kec. Sadaniang
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kec.

7.01.05.2.01.02	Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Sadaniang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kec. Sadaniang
38359	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		148.000.000,00	0,00	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Indikator: Sasaran:	148.000.000,00	0,00	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kec. Sadaniang
38724	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator: Sasaran:	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kec. Sadaniang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kec. Sadaniang

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kec. Sadaniang
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						

RANCANGAN AWAL RENJA OPD TAHUN 2025								
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sadaniang		2.315.500.000,00	0,00	0,00	2.315.500.000,00	2.404.500.000,00	
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		2.315.500.000,00	0,00	0,00	2.315.500.000,00	2.404.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.029.500.000,00	0,00	0,00	2.029.500.000,00	2.094.000.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator:	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	52.500.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (3 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (3 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5 Laporan)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.500.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 Laporan)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (4 Dokumen)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator:	1.402.000.000,00	0,00	0,00	1.402.000.000,00	1.409.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (15 Orang/bulan)	1.350.000.000,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	1.351.000.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 Dokumen)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2 Laporan)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (1 Laporan)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.500.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator:	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	29.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (2 Dokumen)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (1 Laporan)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (12 Laporan)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 Laporan)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator:	101.000.000,00	0,00	0,00	101.000.000,00	109.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (15 Paket)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.500.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (5 Dokumen)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.500.000,00	
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (4 Dokumen)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (12 Orang)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator:	162.500.000,00	0,00	0,00	162.500.000,00	178.500.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (10 Paket)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (20 Paket)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.500.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (15 Paket)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (2 Paket)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (10 Paket)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (12 Dokumen)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (10 Paket)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (200 Laporan)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1 Dokumen)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (2 Dokumen)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator:	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	132.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (5 Unit)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (15 Unit)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (2 Unit)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	84.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (4 Laporan)	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (3 Laporan)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	62.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	100.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (1 Unit)	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (15 Unit)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (20 Unit)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (3 Unit)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (3 Unit)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (12 Unit)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	40.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator: Sasaran:	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (12 Laporan)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (1 Dokumen)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indikator: Sasaran:	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (4 Laporan)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (4 Laporan)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	34.500.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indikator: Sasaran:	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	34.500.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (8 Lembaga Kemasyarakatan)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.500.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (1 Dokumen)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (4 Laporan)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator:	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (4 Laporan)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (4 Laporan)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Indikator:	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (12 Laporan)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	145.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indikator:	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	145.000.000,00	
		Sasaran:	Target:					
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (50 Orang)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	32.000.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (30 Orang)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (100 Orang)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	
7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (8 Lembaga Masyarakat)	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (1 Dokumen)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	73.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator: Sasaran:	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	73.000.000,00	
		Target:						
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (4 Dokumen)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.500.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (4 Dokumen)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.500.000,00	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (4 Dokumen)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (1 Dokumen)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (4 Dokumen)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	

Formulir E. 8.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mempawah
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sadanang Kabupaten Mempawah
Periode Pelaksanaan Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
							I			II			III			IV									
							K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp					%	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6+12	14 = (13/5) x 100%	15											
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sadanang	100,00	40.516.875,00	86	22.477.525,00	100	40.516.875,00	-	-	-	-	-	3.198.400,00	99,87	22.477.525,00	99,87	22.477.525,00	185,87	44.955.050,00	185,87	262,17	Kantor Camat Sadanang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Tereaksanannya Pelayanan Publik	100,00	40.516.875,00	75%	22.477.525,00	100	40.516.875,00	-	-	-	-	-	-	3.198.400,00	99,87	22.477.525,00	99,87	22.477.525,00	100,62	44.955.050,00	100,62	262,17	Kantor Camat Sadanang
		1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	Persentase Tersedianya Dokumen	100,00	30.516.875,00	75%	12.494.085,00	100	30.516.875,00	-	-	-	-	-	-	3.198.400,00	99,91	12.494.085,00	99,91	12.494.085,00	100,66	24.988.170,00	100,66	162,83	Kantor Camat Sadanang
		1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Koordinasi	100,00	17.364.375	12	7.498.400,00	100	17.364.375,00	-	-	-	-	-	42,65	3.198.400	99,98	7.498.400,00	99,98	7.498.400,00	111,98	24.996.800	111,98	86,37	Kantor Camat Sadanang
		1.2 Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2 Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	100,00	13.152.500	1	4.995.685,00	100	13.152.500,00	-	-	-	-	-	-	-	100	4.995.685,00	99,91	4.995.685,00	100,91	9.991.370	100,91	75,97	Kantor Camat Sadanang
		2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat	100,00	10.000.000,00	75%	9.983.440,00	100	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,83	9.983.440,00	99,83	9.983.440,00	100,58	19.966.880,00	100,58	199,67	Kantor Camat Sadanang
		2.1 Pelaksanaan Usulan pemerintah yang tidak dalam non-pemerintah	2.1 Jumlah Kegiatan Non Perizinan	100,00	10.000.000	12	9.983.440,00	100	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100	9.983.440,00	99,83	9.983.440,00	111,83	19.966.880	111,83	199,67	Kantor Camat Sadanang
2	Meningkatnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait serta pembinaan pemerintah desa dan masyarakat		2. Persentase tingkat Realisasi Koordinasi, fasilitas dan pembinaan yang dilaksanakan	100,00	282.752.500,00	100%	183.253.239,00	100	282.752.500,00	24,31	34.694.150,00	35,43	66.519.515,00	70,88	146.768.979,00	99,79	183.253.239,00	99,79	183.253.239,00	100,79	366.506.478,00	100,79	101,61	Kantor Camat Sadanang	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang Berdayakan	100,00	58.752.500	75%	29.904.375	100	58.752.500	23,80	7.373.395	30,01	9.218.395	48,96	14.792.395	99,57	29.904.375	99,57	29.904.375,00	100,32	59.808.750	100,32	110,61	Kantor Camat Sadanang	
		1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Persentase Tereaksanannya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100,00	58.752.500	70%	29.904.375	100	58.752.500	23,80	7.373.395	30,01	9.218.395	48,96	14.792.395	99,57	29.904.375	99,57	29.904.375,00	100,27	59.808.750	100,27	110,61	Kantor Camat Sadanang	
		1.1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.1 Jumlah desa yang dibina	100,00	13.152.500	6	10.803.795	100	13.152.500	42,28	4.579.395	49,20	5.329.395	56,13	6.079.395	99,74	10.803.795	99,74	10.803.795,00	105,74	21.607.590	105,74	164,29	Kantor Camat Sadanang	
		1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta	1.2 Jumlah desa yang dibina	100,00	22.600.000	6	9.515.200	100	22.600.000	4,17	400.000	8,07	775.000	33,01	3.169.000	99,12	9.515.200	99,12	9.515.200,00	105,12	19.030.400	105,12	84,21	Kantor Camat Sadanang	
		1.3 Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1.3 Jumlah desa yang dibina	100,00	23.000.000	6	9.585.380	100	23.000.000	24,94	2.394.000	32,75	3.114.000	57,75	5.544.000	99,86	9.585.380	99,86	9.585.380,00	105,86	19.170.760	105,86	83,35	Kantor Camat Sadanang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	100,00	166.000.000	70%	108.124.265,00	100	166.000.000,00	8,03	6.519.000	25,45	32.376.365	83,47	94.903.785	99,91	108.124.265	99,91	108.124.265,00	100,61	216.248.530	100,61	140,29	Kantor Camat Sadanang	
		2. Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Tereaksanannya Pembinaan kepada Masyarakat	100,00	166.000.000	70%	108.124.265	100	166.000.000	8,03	6.519.000	25,45	32.376.365	83,47	94.903.785	99,91	108.124.265	99,91	108.124.265,00	100,61	216.248.530	100,61	140,29	Kantor Camat Sadanang	
		1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka menanggapi pengamatan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ka serta pemertahanan dan pemeliharaan kedutuhan negara kesatuan republik indonesia	1.1 Jumlah Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	100,00	45.000.000	2	28.299.220	100	45.000.000	-	-	-	-	-	99,93	28.299.220	99,93	28.299.220,00	101,93	56.598.440	101,93	125,77	Kantor Camat Sadanang		
		1.2 Pembinaan Penatutan dan Kesatuan Bangsa	1.2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kepemudaan	100,00	12.000.000	2	8.112.200	100	12.000.000	-	-	-	-	-	99,96	8.112.200	99,96	8.112.200,00	101,96	16.224.400	101,96	135,20	Kantor Camat Sadanang		
		1.3 Pembinaan Kenukunan antarsuku, dan intrasuku umat beragama, Ras Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	1.3 Jumlah kegiatan keagamaan	100,00	70.000.000	2	39.940.365	100	70.000.000	-	51,33	20.513.365	99,95	39.940.365	99,96	39.940.365	99,95	39.940.365,00	101,96	79.880.730	101,96	114,12	Kantor Camat Sadanang		
		1.4 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Masyarakat	1.4 Jumlah desa yang dibina terkait dengan soal kemasyarakatan	100,00	21.000.000	6	16.813.600	100	21.000.000	16,67	3.000.000	25,99	4.375.000	50,59	8.517.000	99,98	16.813.600	99,98	16.813.600,00	105,98	33.627.200	105,98	160,13	Kantor Camat Sadanang	
		1.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Rencana di Kecamatan	1.5 Jumlah Kegiatan dan Forum Koordinasi	100,00	18.000.000	12	14.958.880	100	18.000.000	23,46	3.519.000	49,92	7.488.000	66,90	10.035.000	99,73	14.958.880	99,73	14.958.880,00	111,73	29.917.760	111,73	166,21	Kantor Camat Sadanang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	100,00	58.000.000	75%	45.224.599	100	58.000.000	41,10	20.801.755	50,85	24.924.755	80,22	37.072.799	99,88	45.224.599	99,88	45.224.599,00	100,63	90.449.198	100,63	155,54	Kantor Camat Sadanang	
		1. Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tereaksanannya Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	58.000.000	75%	45.224.599	100	58.000.000	41,10	20.801.755	50,85	24.924.755	80,22	37.072.799	99,88	45.224.599	99,88	45.224.599,00	100,63	90.449.198	100,63	155,54	Kantor Camat Sadanang	
1.1 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.1 Jumlah Desa yang dibina terkait dengan administrasi	100,00	14.000.000	6	10.405.216	100	14.000.000	5,91	650.000	28,55	2.975.000	67,94	7.080.816	99,84	10.405.216	99,84	10.405.216,00	105,84	20.810.432	105,84	148,65	Kantor Camat Sadanang			
1.2 Fasilitas Pengelolaan keuangan Desa	1.2 Jumlah Desa yang dimonitoring dan di Evaluasi	100,00	13.000.000	6	9.993.228	100	13.000.000	25,00	2.500.000	25,00	2.500.000	79,68	7.968.228	99,93	9.993.228	99,93	9.993.228,00	105,93	19.986.456	105,93	153,74	Kantor Camat Sadanang			
1.3 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.3 Jumlah Dokumen Murenbang	100,00	17.000.000	1	13.842.000	100	17.000.000	98,87	13.842.000	98,87	13.842.000	98,87	13.842.000	99,87	13.842.000	99,87	13.842.000,00	100,87	27.684.000	100,87	162,85	Kantor Camat Sadanang			
1.4 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.4 Jumlah Desa yang dibina terkait dengan ketentraman dan ketertiban	100,00	14.000.000	6	10.984.155	100	14.000.000	34,63	3.809.755	50,98	5.607.755	74,38	8.181.755	99,86	10.984.155	99,86	10.984.155,00	105,86	21.968.310	105,86	156,92	Kantor Camat Sadanang			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja, Kapasitas Aparatur dan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.		3. Rasio Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	100,00	2.377.509.335,00	75%	1.424.323.032,00	100	2.377.509.335,00	16,24	216.210.615,00	36,68	700.439.356,00	50,28	1.009.332.680,00	83,97	1.424.323.032,00	83,97	1.424.323.032,00	84,72	2.848.646.064,00	84,72	831,56	Kantor Camat Sadanang	
		PROGRAM PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN	Persentase Jumlah capaian pelayanan Tersusunnya Dokumen perencanaan, Dokumen penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100,00	2.377.509.335	70%	1.424.323.032	100,00	2.377.509.335	16,24	216.210.615	36,68	700.439.356	50,28	1.009.332.680	83,97	1.424.323.032	83,97	1.424.323.032,00	84,67	2.848.646.064	84,67	831,56	Kantor Camat Sadanang	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen perencanaan, Dokumen penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100,00	39.500.000	70%	23.424.965	100,00	39.500.000	45,05	7.935.000	50,93	12.635.000	119,42	23.424.965	119,42	23.424.965	119,42	23.424.965,00	120,12	46.849.930	120,12	88,35	Kantor Camat Sadanang	
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Pembangunan	100,00	4.500.000	2	1.996.625	100	4.500.000	78,75	1.575.000	78,75	1.575.000	99,83	1.996.625	99,83	1.996.625,00	101,83	3.993.250	101,83	88,74	Kantor Camat Sadanang			
		1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1.2 Jumlah Dokumen RKA - SKPD Yang disusun tepat waktu	100,00	4.000.000	1	1.218.410	100	4.000.000	67,51	825.000	67,51	825.000	67,51	825.000	99,71	1.218.410	99,71	1.218.410,00	100,71	2.436.820	100,71	60,92	Kantor Camat Sadanang	
		1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun tepat waktu	100,00	4.000.000	1	1.156.000	100	4.000.000	-	-	-	-	-	-	99,20	1.156.000	99,20	1.156.000,00	100,20	2.312.120	100,20	57,80	Kantor Camat Sadanang	
		1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1.4 Jumlah Dokumen DPA - SKPD disusun tepat waktu	100,00	4.000.000	1	1.659.565	100	4.000.000	49,56	825.000	49,56	825.000	49,56	825.000	99,70	1.659.565	99,70	1.659.565,00	100,70	3.319.130	100,70	82,98	Kantor Camat Sadanang	
		1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD	1.5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	100,00	4.000.000	1	1.432.760	100	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	98,91	1.432.760	98,91	1.432.760,00	99,91	2.865.520	99,91	71,64	Kantor Camat Sadanang
		1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja SKPD	1.6 Jumlah Laporan capaian kinerja (AKRP)	100,00	19.000.000	3	15.961.545	100	19.000.000	29,															

Disusun
Sadaniang, Januari 2024
Camat Sadaniang

 Muhammad Yusra, S.Sos, M.S.
Nip. 19680617 199003 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025**



KANTOR KECAMATAN SEGEDONG



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan rencana Kerja (RENJA) Perubahan kecamatan segedong Kabupaten mempawah Tahun 2025 dapat selesai dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Renja 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Renja Perubahan kecamatan Segedong ini bisa disusun dengan baik.

Akhir Kata semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Segedong ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah.

Segedong, Juli 2025

Camat Segedong,



ARIFIN.S.Pd.SD.M.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19691203 199908 1 001

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Segedong





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Segedong.....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Segedong.....	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGLATAN	12
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Segedong.....	13
3.3. Program dan Kegiatan	13
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
BAB. V PENUTUP	19
LAMPIRAN	





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Segedong mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang





akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Rencana kerja Kecamatan Segedong :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemengku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Mempawah Kantor Kecamatan Segedong Menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya Renja Perubahan Kecamatan Segedong yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Kantpr Kecamatan Segedong.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Segedong Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan





- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
 11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan Daerah.





1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan 2024, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk Menyusun perencanaan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Segedong Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Kecamatan Segedong Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Mompowah, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Segedong Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tabel Evaluasi Hasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2023	REALISASI DANA TAHUN ANGGARAN 2023	(%)
6	7	8	9
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN	1.964.684.441	1.840.070.521	93,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.815.293.091	1.692.301.671	93,22
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.498.475	21.498.175	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.452.675	1.452.525	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.297.775	1.297.775	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.452.675	1.452.525	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.296.675	1.296.675	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	13.998.675	13.998.675	100,00





Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.521.336.338	1.419.690.360	93,32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.501.336.838	1.399.690.860	93,23
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.850	4.999.850	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.800	9.999.800	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.999.850	4.999.850	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.637.000	51.488.100	80,91
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.637.000	8.797.800	82,71
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	53.000.000	42.690.300	80,55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.913.800	76.613.800	92,40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.400	3.499.400	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.672.850	13.672.850	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.995.400	2.995.400	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	11.920.000	79,47
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.020.000	51,00
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.500.000	35.260.000	94,03
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.246.150	1.246.150	100,00
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.221.200	14.221.200	100,00
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.221.200	14.221.200	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.877.428	73.547.636	98,22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	-	00,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000	36.675.500	97,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.877.428	36.972.136	99,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.808.850	35.242.400	95,74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.857.850	22.853.200	99,98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000	1.938.200	55,38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.896.000	4.896.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.070.000	2.070.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.485.000	3.485.000	100,00





PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.998.550	4.998.550	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.998.550	4.998.550	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.998.550	4.998.550	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.063.175	14.063.175	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.063.175	14.063.175	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.464.300	4.464.300	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.598.875	9.598.875	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.125.400	81.502.900	98,05
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.125.400	81.502.900	98,05
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000	30.000.000	100,00
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8.134.200	8.134.200	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.991.200	13.368.700	89,18
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	15.000.000	15.000.000	100,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.204.225	47.194.225	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.204.225	47.194.225	100,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.591.575	14.591.575	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.999.850	9.999.850	100,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000	12.000.000	100,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.612.800	10.612.800	100,00
JUMLAH	1.964.684.441	1.840.070.521	93,66

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Segedong

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang berkaitan



dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Segedong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

- Kebijakan Pemerintah Kecamatan Segedong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Segedong sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan PATEN di Kecamatan yang belum berjalan sebagai mana yang diharapkan.
 - b) Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Segedong yang dilakukan oleh Kabupaten Mompowah;
- Pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Segedong dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Segedong, sebagai berikut :
 - a) Pemahaman akan tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksanaan teknis kegiatan masih lemah yang berakibat pada hasil dan koordinasi yang tidak maksimal;
 - b) Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat perangkat daerah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Segedong belum maksimal.
- Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Segedong sebagai berikut :
 - a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya;
 - b) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;





- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Segedong

Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Segedong adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak lama harus terus digerakan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu merupakan tujuan dari reformasi birokrasi yang di cita-citakan. Sehingga tercapainya masyarakat yang adi makmur dan sejahtera tanpa memandang kelompok atau golongan serta bebas dari unsur KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Segedong, maka pendayagunaan Sumber daya aparatur daerah yang berada di Kecamatan Segedong harus dimaskimalkan. SDM yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat perlu memahami prinsip pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang di harapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Segedong harus menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service*



reform) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Fungsi dari Kecamatan adalah untuk perpanjangan pemerintahan dari Kabupaten maka perlu untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tujuan OPD atau rencana kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penataan organisasi dan manajemen yang baik perlu dilaksanakan di Kecamatan Segedong yang nanti dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung Visi dan Misi Bupati Mempawah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a) Terwujudnya tertib administrasi aset barang di Kecamatan Segedong;
- b) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*Prosedur Bottom Up*).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang





prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*.



2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Segedong

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Segedong dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah Kecamatan Segedong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2025.
2. Mengarahkan Visi Bupati Mempawah kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Segedong yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
4. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Segedong Secara umum adalah terjabarkannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Segedong Tahun 2025-2029 kedalam Dokumen Rencana Tahunan, yang meliputi :

1. Kerangka pembangunan dan penganggaran Kecamatan Segedong Tahun 2025.
2. Indikasi kegiatan pembangunan Kecamatan Segedong Tahun 2025.

2.3 Program dan Kegiatan

Adapun rincian program dan kegiatan prioritas utama Tahun 2025, dapat dilihat pada lampiran.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025 Kecamatan Segedong Daerah Kabupaten Mempawah dilakukan Penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4.1. Program Kegiatan dan Sub kegiatan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025 Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 5 program 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Setelah adanya perubahan maka program, kegiatan dan sub kegiatannya juga berubah yang terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan.



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025

Organisasi

REKAPITULASI
RUMAH BELANJA
SAPB[illegible]

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Berkas					Tahun - 2				Tahun - 3
								Berkas Operasi	Berkas Modal	Berkas Tidak Terdaftar	Berkas Transfer	Asumsi (Rp)	Berkas Operasi	Berkas Modal	Berkas Tidak Terdaftar	Berkas Transfer	Asumsi (Rp)
P	01	00	2.11	Facilities, Transportation and Accommodation for Personnel and Programme Implementation Costs				Rp 44 000 000				Rp 44 000 000	Rp 1 000 000				Rp 12 000 000
P	01	00	2.11	Facilities Administration and Transportation Costs		- Gd. Kecamatan Zakaria KPD/Dea		Rp 11 000 000				Rp 11 000 000	Rp 4 000 000				Rp 4 000 000
P	01	00	2.11	Facilities Personnel Accommodation Costs and Personnel Transport Costs		- Gd. Kecamatan Zakaria (25x1) KPD/Dea		Rp 10 000 000				Rp 10 000 000	Rp 3 000 000				Rp 3 000 000
P	01	00	2.11	Facilities Personnel Transportation and Accommodation Costs		- Gd. Kecamatan Zakaria (25x1) KPD/Dea		Rp 12 000 000				Rp 12 000 000	Rp 0				Rp 0
P	01	00	2.11	Facilities Personnel Transportation and Accommodation Costs		- Gd. Kecamatan Zakaria (25x1) KPD/Dea		Rp 11 000 000				Rp 11 000 000	Rp 4 000 000				Rp 4 000 000
								Rp 1 953 371 547		Rp 8 871 000		Rp 3 802 168 547	Rp 1 000 000 000	Rp 0			Rp 1 000 000 000



BAB V

PENUTUP

Dalam rangka untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2025 semester I, menunjukkan peluang penyesuaian terhadap pengembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penganggaran. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan perubahan indikator kinerja sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai panduan perangkat daerah dalam Menyusun perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.



Semoga Rencana Kerja Kecamatan Segedong ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Kecamatan Segedong semakin maju, sejahtera dan berkualitas dapat terwujud.

Segedong, Juli 2025

Camat Segedong,



ARIFIN, S.Pd.SD., M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19691203 199908 1 001

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Keluarga Antarmuka dan Interektu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kestiduran Demokrasi Berdasarkan Pancasila	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
38724	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.391.700,00	0,00	0,00	58.391.700,00	0,00	58.391.700,00
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.391.700,00	0,00	0,00	58.391.700,00	0,00	58.391.700,00
	Sasaran:	Target:					
7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.891.700,00	0,00	0,00	16.891.700,00	0,00	16.891.700,00
7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
7.01.06.2.01.09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00

TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN JONGKAT



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN JONGKAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah tahun 2026 dapat selesai dengan baik.

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dibuat sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Renja Kantor Kecamatan Mempawah Timur ini bisa disusun dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita.

Akhir kata semoga Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Kecamatan Mempawah Timur ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah

Jongkat, Agustus 2025

CAMAT JONGKAT,



MAHMUD HASAN, S.Ag.,M.Pd

Pembina

NIP. 19750816 200502 1 007

DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan SKPD*
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan catatan strategis

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

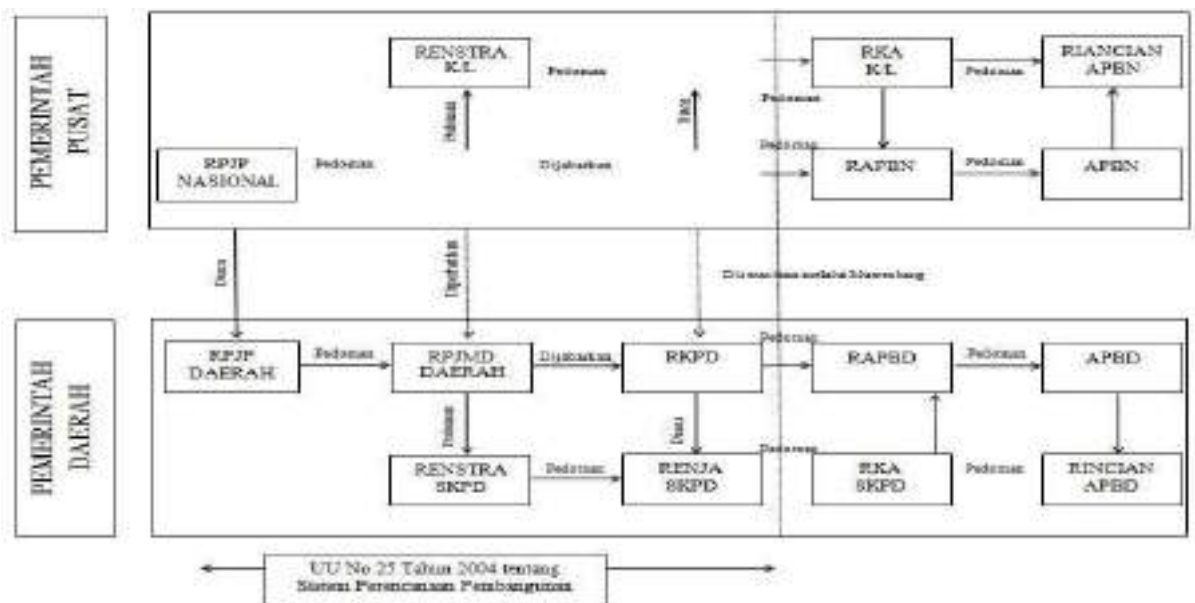
Kecamatan Jongkat sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Mempawah juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kecamatan Jongkat Tahun 2025 - 2026 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026, sehingga Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Jongkat.

Renja Kecamatan Jongkat Tahun 2025 disusun melalui proses penyusunan Renja Kecamatan Jongkat sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jongkat Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja ini adalah:

- a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jongkat dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah. Kecamatan Jongkat dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

- b) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran Tahun 2025 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- c) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Jongkat yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2025.
- d) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

- a) Sebagai bahan masukan yang ada pada program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS).
- b) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- c) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- d) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f) Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
- g) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- h) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholder).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Jongkat Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JONGKAT TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jongkat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Jongkat
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jongkat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jongkat
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jongkat
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JONGKAT
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jongkat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Jongkat

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Kecamatan Jongkat Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Mompawah, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2026. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jongkat Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN	ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024	REALISASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024	(%)
BELANJA OPERASI	2.347.983.253	2.325.660.249	99,05
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.189.179.153	2.169.948.879	99,12
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.985.037	21.233.500	96,58
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.999.950	100,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.894.062	2.893.950	100,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	865.000	864.600	99,95
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.400.000	1.399.600	99,97
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	827.175	826.850	99,96
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.998.800	13.248.550	94,64
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.898.624.032	1.885.345.816	99,30
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.865.664.457	1.857.479.016	99,56
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	17.960.000	13.637.900	75,93
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.999.775	9.279.350	92,80
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4.999.800	4.949.550	98,99
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.820.000	9.119.800	92,87
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.820.000	9.119.800	92,87
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	14.975.000	99,83
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.975.000	99,83

Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.550.800	81.921.175	96,89
1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.685.500	3.671.500	99,62
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.300.000	17.777.400	97,14
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.124.200	3.038.500	97,26
4. Penyediaan Bahan/ Logistik Kantor	9.200.000	9.200.000	100,00
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.024.100	6.955.775	99,03
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.217.000	38.278.000	95,18
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.756.384	113.649.188	99,04
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	57.000.000	56.081.723	98,39
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.756.384	57.567.465	99,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	44.442.900	43.704.400	98,34
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	31.180.900	31.148.000	99,89
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000	1.794.400	71,776
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.032.000	5.032.000	100
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya.	2.070.000	2.070.000	100
5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.	3.660.000	3.660.000	100
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	4.790.000	4.789.850	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.790.000	4.789.850	100,00
1. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.790.000	4.789.850	100,00
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.	13.111.800	13.071.470	99,69
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.111.800	13.071.470	99,69
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	7.744.400	7.704.170	99,48
2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	5.367.400	5.367.300	100,00
IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	92.564.800	92.309.750	99,72
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.	92.564.800	92.309.750	99,72
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	22.062.000	21.885.850	99,20
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.035.500	5.034.700	99,98
3. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	45.000.000	44.922.600	99,83
4. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	10.174.200	10.174.200	100,00
5. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.293.100	10.292.400	99,99
V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.337.500	45.540.300	94,21
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.337.500	45.540.300	94,21
1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.985.400	14.978.850	99,96
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.432.100	7.432.100	100,00
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.120.000	13.909.750	92,00
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	10.800.000	9.219.600	85,37

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, total belanja yang dikelola tahun 2024 adalah Rp. 2.347.983.253,00 dengan realisasai anggarannya adalah

sebesar Rp. 2.325.660.249,00 (99,05 %). Sedangkan untuk tahun anggaran 2025, anggaran yang disediakan berjumlah Rp. 2.376.984.973,00.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jongkat

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Jongkat, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

1. Kebijakan Pemerintah Kecamatan Jongkat dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Jongkat sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
 - b) Masih seringnya mengalami kendala berkenaan dengan sarana pelayanan. seperti seringnya gangguan dalam hal perekaman KTP.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Jongkat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Jongkat, sebagai berikut :
 - a) Pemahaman akan tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksanaan teknis kegiatan masih lemah yang berakibat pada hasil dan koordinasi yang tidak maksimal;
 - b) Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat perangkat daerah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Jongkat belum maksimal.
3. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Jongkat sebagai berikut :
 - a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya;

- b) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jongkat

Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Jongkat adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak lama harus terus digerakan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu merupakan tujuan dari reformasi birokrasi yang di cita-citakan. Sehingga tercapainya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera tanpa memandang kelompok atau golongan serta bebas dari unsur KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jongkat, maka pendayagunaan Sumber daya aparatur daerah yang berada di Kecamatan Jongkat harus dimaskimalkan. SDM yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat perlu memahami prinsip pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang di harapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Jongkat harus menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Fungsi dari Kecamatan adalah untuk perpanjangan pemerintahan dari Kabupaten maka perlu untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tujuan OPD atau rencana kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penataan organisasi dan manajemen yang baik perlu dilaksanakan di Kecamatan Jongkat yang nanti dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung Visi dan Misi Bupati Mempawah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a) Terwujudnya tertib administrasi aset barang di Kecamatan Jongkat
- b) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- 1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2026.
- 2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Prosedur Battom Up).
- 3. Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program–program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari shopping list ke working plan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jongkat

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah yaitu :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target	
				2023	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	80%	85%
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Kejadian / Kasus di Masyarakat	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jongkat merupakan perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Renstra Kecamatan Jongkat Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Renja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA– APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025, serta RAPBD Tahun 2025.

Tabel. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Jongkat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.319.214.457	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.270.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 11.400.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 49.517.252	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 8.450.000	APBD
TOTAL		Rp. 2.389.851.709	

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Jongkat tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel (terlampir)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jongkat Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Renstra Kecamatan Jongkat Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Renja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta RAPBD Tahun 2025.

Renja ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kecamatan Jongkat dan merupakan strategis pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Bupati Mempawah, dan juga Renja ini dijadikan parameter untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang direncanakan telah berhasil dicapai Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Jongkat.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Jongkat ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Kecamatan Jongkat semakin maju, sejahtera dan berkualitas dapat terwujud.

Jongkat, Juli 2025

Camat Jongkat,



MAHMUD HASAN, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750816 200502 1 007

Lampiran I

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2025				KET
		SEBELUM		SESUDAH		
		TARGET	PAGU			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	80	2.241.513.921	80	2.319.214.457	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja, Kapasitas Aparatur dan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja, Kapasitas Aparatur dan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	82%	2.241.513.921	82%	2.319.214.457	
7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase tingkat pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82%	22.192.500	82%	20.692.500	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Meningkatnya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.999.800	2 dokumen	1.999.800	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Meningkatnya penyediaan Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.894.300	1 dokumen	2.894.300	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD						
Meningkatnya penyediaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	200.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						

Meningkatnya penyediaan Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.399.900	1 dokumen	1.399.900	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
Meningkatnya penyediaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	899.800	1 dokumen	199.800	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Meningkatnya penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	13.998.700	2 laporan	13.998.700	
7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		82%	2.054.544.356	82%	2.102.760.292	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang / bulan	2.021.545.056	21 orang / bulan	2.074.860.992	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Meningkatnya pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 dokumen	18.000.000	100 dokumen	15.000.000	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Meningkatnya penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.999.300	1 laporan	8.599.300	

7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Meningkatnya penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan	5.000.000	1 laporan	4.300.000	
7.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		82%	4.997.800	82%	4.997.800	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Meningkatnya peaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	4.997.800	2 laporan	4.997.800	
7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		80%	15.000.000	80%	15.000.000	
7.01.01.2.05.0002Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	-	21 paket	-	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
Meningkatnya pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	15.000.000	20 orang	15.000.000	
7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		82%	71.636.600	82%	37.987.700	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Meningkatnya ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.698.000	1 paket	1.424.200	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Meningkatnya ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	16.525.100	2 paket	7.984.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Meningkatnya ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9.480.000	1 paket	3.900.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Meningkatnya ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.934.000	1 paket	2.679.500	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	33.000.000	50 laporan	20.700.000	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.999.500	1 Dokumen	1.300.000	
7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	38.000.000	80%	38.000.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Meningkatnya ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	38.000.000	36 laporan	38.000.000	
7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase jumlah capaian Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	80%	35.142.665	80%	99.776.165	
01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

Meningkatnya ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	21.175.700	1 unit	16.309.200	
7.01.01.2.09.0002 -Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Meningkatnya ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	2.300.000	7 unit	2.300.000	
7.01.01.2.09.0009 -Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Meningkatnya pelaksanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.500.000	1 unit	75.000.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Meningkatnya pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	2.190.000	7 unit	2.190.000	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Meningkatnya pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	3.976.965	9 unit	3.976.965	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		82%	4.098.000	82%	1.270.000	

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelesaian layanan publik di kecamatan	82%	4.098.000	82%		
7.01.02.2.01- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	82%	4.098.000	82%	1.270.000	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Ekeftivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	4.098.000	1 dokumen	1.270.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya sekolah sehat	82%	-	-	-	
7.01.02.2.02.0002- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
Meningkatnya pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	-	-	-	
7.01.03. - PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		82%	15.238.500	82%	11.400.000	
Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif					
7.01.03.2.02-Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah capaian pemberdayaan desa	80%	15.238.500	80%	11.400.000	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.738.500	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.400.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	8.500.000	2 laporan	7.000.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		82%	72.816.152	82%	49.517.252	
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82%	72.816.152	82%	49.517.252	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Meningkatnya pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	21.199.800	200 orang	21.199.800	
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						
Meningkatnya pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang	4.999.900	50 orang	-	

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
Meningkatnya pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	24.567.452	50 orang	24.567.452	
7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila						
Meningkatnya perkembangan Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	5 lembaga	10.499.200	5 lembaga	3.750.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
Meningkatnya pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	11.549.800	4 dokumen	-	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82%	43.318.400	82%	8.450.000	
Meningkatnya Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82%	43.318.400	82%		
7.01.06.2.01 - FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan	5 desa	43.318.400	5 desa	8.450.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	13.198.500	4 dokumen	4.100.000	

7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
Meningkatnya pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	7.599.500	4 dokumen	-	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						
Meningkatnya pelaksanaan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	13.171.000	1 dokumen	-	
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Meningkatnya pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	9.349.400	4 dokumen	4.350.000	
JUMLAH			2.376.984.973		2.389.851.709	12.866.736